

#KEMENSOS
Hadir

KATA PENGANTAR



www.kemsos.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Sosial adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Sosial mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Sosial. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2020

MENTERI SOSIAL RI,



JUIARI P. BATUBARA

#KEMENSOS
Hadir

DAFTAR ISI



www.kemsos.go.id



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Telah Direviu.....	iii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iv
Ringkasan Laporan Keuangan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	3
II. Neraca.....	4
III. Laporan Operasional.....	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	7
A. Penjelasan Umum.....	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	38
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	125
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	146
F. Pengungkapan-pengungkapan Penting Lainnya.....	156
VI. LAMPIRAN	

#KEMENSOS
Hadir

PERNYATAAN TELAH DIREVIU



www.kemsos.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KEMENTERIAN SOSIAL RI TAHUN ANGGARAN 2019 (*Audited*)

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Sosial RI untuk Tahun Anggaran 2019 (*Audited*) berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Sosial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain yang terkait.

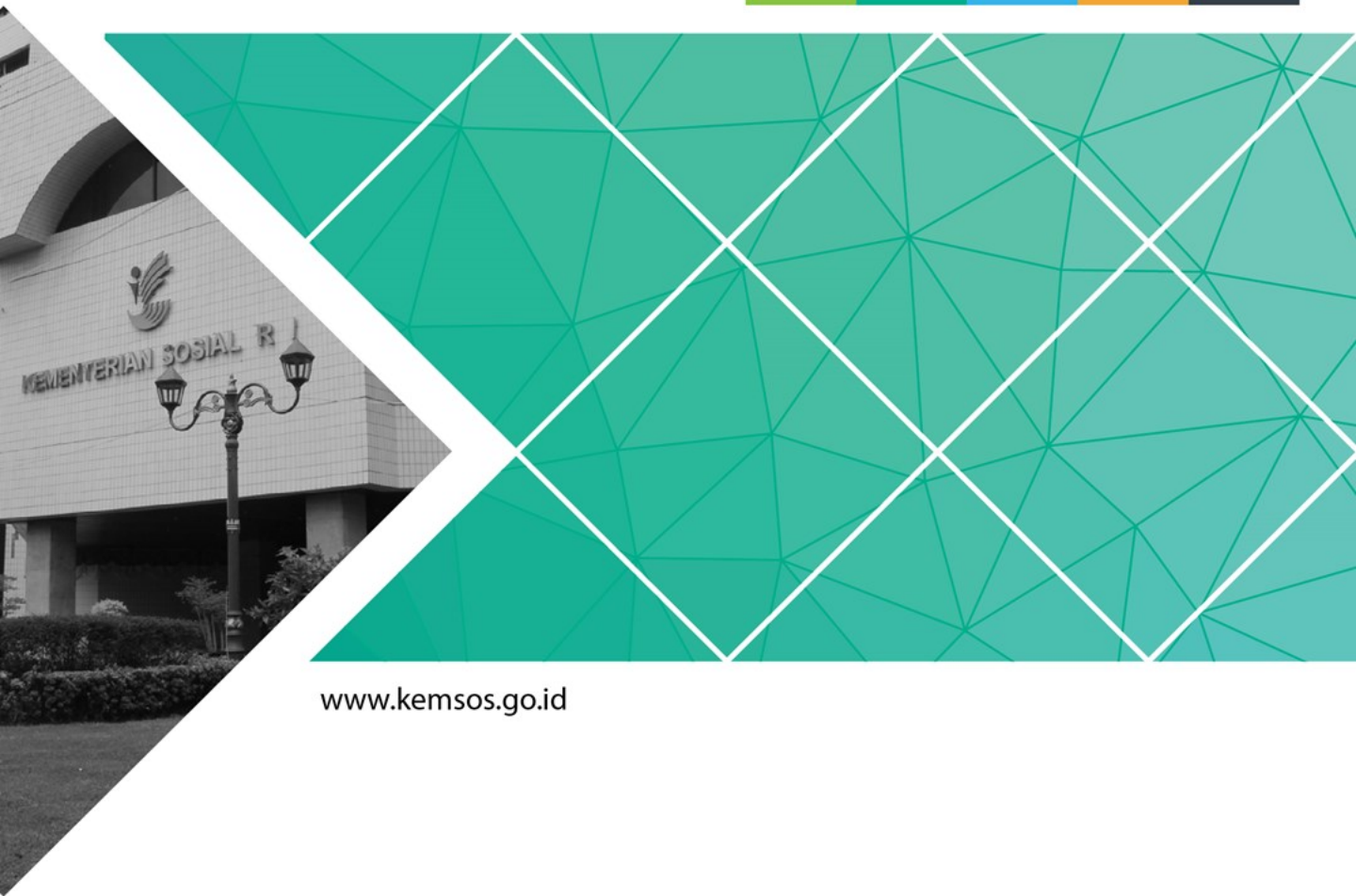
Jakarta, 4 Mei 2020
Inspektur Jenderal,



Dada Iskandar

#KEMENSOS
Hadir

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



www.kemsos.go.id



**MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kementerian Sosial Bagian Anggaran 027 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2020

MENTERI SOSIAL RI,



JUJARI P. BATUBARA

#KEMENSOS
Hadir

NOTA KESEPAKATAN FINAL DAN JURNAL ASERSI FINAL



www.kemsos.go.id

**NOTA KESEPAKATAN FINAL
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN SOSIAL RI (BA 027) TAHUN 2019
YANG DIMASUKKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2019 (AUDITED)**

Nomor : NKF Revaluasi-027/44/KN.2/2020

Pada hari ini, Selasa tanggal 28 April 2020, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan **Rekonsiliasi Tiga Pihak terkait Revaluasi BMN dan Bantuan Sosial secara Online** untuk menyepakati dan menyetujui angka-angka terkait Revaluasi BMN dan Bantuan Sosial yang disajikan dalam **Laporan Keuangan Kementerian Sosial RI (BA 027) Tahun 2019** untuk dikonsolidasikan dalam **LKPP Tahun 2019 (Audited)**.

Berdasarkan pembahasan dan bukti dukung yang dapat dipertanggungjawabkan maka disepakati bahwa terdapat temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas hasil revaluasi Barang Milik Negara dan bantuan sosial pada BA 027 yang akan ditindaklanjuti pada perbaikan atas LKKL Audited 2019 yang telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, **sehingga Lampiran NKF dan LKKL Audited yang telah disampaikan tersebut perlu diperbaiki**. Perbaikan Lampiran NKF dan LKKL Audited Tahun 2019 (*softcopy dan hardcopy*) akan disampaikan kembali kepada Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan **paling lambat tanggal 7 Mei 2020**.

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

Kementerian Sosial RI (BA 027)



Mira Riyati Kurniasih

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Kekayaan Negara
Selaku Tim Penyusun LBMN



Bambang Sulistyono

Kementerian Keuangan RI,
Ditjen Perbendaharaan
Selaku Tim Penyusun LKPP



Denny Febriano Singawiria

**MENGETAHUI
Tim Auditor BPK**



Amelina Gustiana

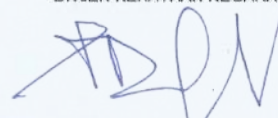
AKUN	UNAUDITED	KOREKSI	UNAUDITED KORREVAL	KOREKSI		ASERSI FINAL	Koreksi terkait Pencatatan Beban Bansos dan Revaluasi untuk Menindaklanjuti Temuan		AUDITED PERBAIKAN
				DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT	
ASET TETAP									
Tanah	18.596.291.557.705	-	18.596.291.557.705	12.897.368.000	-	18.609.188.925.705	138.206.326.000	215.356.545.000	18.532.036.706.705
Peralatan dan Mesin	1.904.951.350.165	-	1.904.951.350.165	160.257.000	167.366.000	1.904.924.241.165	-	-	1.904.924.241.165
Gedung dan Bangunan	1.827.504.056.550	(7.119.210.354)	1.820.384.846.196	-	-	1.820.384.846.196	9.972.326.000	31.728.323.929	1.798.628.848.267
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	99.616.065.081	3.047.617.753	102.663.682.834	-	-	102.663.682.834	-	-	102.663.682.834
Aset Tetap Lainnya	21.957.201.622	-	21.957.201.622	65.616.880	32.808.440	21.990.010.062	-	-	21.990.010.062
Konstruksi Dalam Pengerjaan	281.836.313	-	281.836.313	-	-	281.836.313	-	-	281.836.313
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.552.649.161.069)	-	(1.552.649.161.069)	10.723.750	9.184.100	(1.552.647.621.419)	-	-	(1.552.647.621.419)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(189.547.212.856)	600.092.206	(188.947.120.560)	501.905.679	500.714.550	(188.945.928.431)	17.233.615.972	10.340.805.136	(182.053.118.595)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(38.073.995.830)	(293.930.487)	(38.367.926.317)	-	-	(38.367.926.317)	1.572.550.658	472.508.667	(37.267.884.326)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(3.466.709.781)	-	(3.466.709.781)	-	-	(3.466.709.781)	-	-	(3.466.709.781)
Jumlah Aset Tetap	20.666.664.987.900	(3.765.430.792)	20.663.099.557.108	13.635.871.309	730.073.090	20.676.005.355.327	166.964.818.630	257.898.182.732	20.585.091.991.225
PIUTANG JANGKA PANJANG									
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran (Netto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA									
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Konsesi Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	98.538.827.706	-	98.538.827.706	-	-	98.538.827.706	-	-	98.538.827.706
Dana yg Dibalasi Penggunaannya	826.222.522.848	-	826.222.522.848	549.179.306.589	826.222.522.848	549.179.306.589	-	-	549.179.306.589
Dana Penjaminan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Kelolaan BLU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lain-lain	26.297.974.644	-	26.297.974.644	-	-	26.297.974.644	-	-	26.297.974.644
Akum. Penyusutan Kemitraan Dg Pihak Ke3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Akum. Penyusutan Aset Lain-lain	(23.337.779.234)	-	(23.337.779.234)	-	-	(23.337.779.234)	-	-	(23.337.779.234)
Akum. Amortisasi Aset Tak Berwujud	(85.278.449.458)	-	(85.278.449.458)	-	-	(85.278.449.458)	-	-	(85.278.449.458)
Akum. Amortisasi ATB yg TDK digunakan	(159.469.052)	-	(159.469.052)	-	-	(159.469.052)	-	-	(159.469.052)
Jumlah Aset Lainnya	842.283.627.454	-	842.283.627.454	549.179.306.589	826.222.522.848	565.240.411.195	-	-	565.240.411.195
JUMLAH ASET	23.470.488.073.433	(3.765.430.792)	23.466.722.642.641	2.199.076.296.350	1.956.812.180.839	23.708.986.758.162	527.473.810.586	259.692.583.649	23.976.767.785.089

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI	UNAUDITED KORREVAL	KOREKSI		ASERSI FINAL	Koreksi terkait Pencatatan Beban Bansos dan Revaluasi untuk Menindaklanjuti Temuan		AUDITED PERBAIKAN
				DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT	
KEWAJIBAN									
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK									
Utang kepada Pihak Ketiga	4.875.241.851	-	4.875.241.851	2.917.600.000	2.744.719.803	4.702.361.654	-	-	4.702.361.654
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Pendak Lainnya	-	-	-	-	10.341.818	10.341.818	-	-	10.341.818
Hibah Yang Belum Disahkan	-	-	-	-	527.339.126	527.339.126	-	-	527.339.126
Uang Muka dari KPPN	67.666.000	-	67.666.000	-	-	67.666.000	-	-	67.666.000
Pendapatan Diterima Dimuka	759.279.648	-	759.279.648	-	1.208.000.000	1.967.279.648	-	-	1.967.279.648
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	5.702.187.499	-	5.702.187.499	2.917.600.000	4.490.400.747	7.274.988.246	-	-	7.274.988.246
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG									
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kewajiban Konsesi Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	5.702.187.499	-	5.702.187.499	2.917.600.000	4.490.400.747	7.274.988.246	-	-	7.274.988.246
EKUITAS	23.464.785.885.934	(3.765.430.792)	23.461.020.455.142	1.974.646.329.658	2.215.337.644.422	23.701.711.769.906	259.692.583.649	527.473.610.586	23.969.492.796.843
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	23.470.488.073.433	(3.765.430.792)	23.466.722.642.641	1.977.563.929.658	2.219.828.045.169	23.708.966.758.152	259.692.583.649	527.473.610.586	23.976.767.785.089


JAKARTA, APRIL 2020
KEMENTERIAN SOSIAL


MIRA RIYATI KURNIASIH

DITJEN KEKAYAAN NEGARA


BAMBANG SULISTYONO

DITJEN PERBENDAHARAAN


DENNY FEBRIANO SINGAWIRIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN


AMELINA GUSTIANA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
A. PENDAPATAN

Kode Bagian Anggaran : 027
Uraian Bagian Anggaran : KEMENTERIAN SOSIAL

URAIAN	UNAUDITED			KOREKSI BRUTO		KOREKSI PENGEMBALIAN		AUDITED		
	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 2-5+6	10 = 3-7+8	11 = 9-10
41. Pendapatan Perpajakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42. Pendapatan Negara Bukan Pajak	516.990.350.519	250.108.000	516.740.242.519	-	-	-	-	516.990.350.519	250.108.000	516.740.242.519
421. Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422. Pendapatan dari KND	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425. Pendapatan PNPB Lainnya	516.990.350.519	250.108.000	516.740.242.519	-	-	-	-	516.990.350.519	250.108.000	516.740.242.519
424. Pendapatan BLU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN	516.990.350.519	250.108.000	516.740.242.519	-	-	-	-	516.990.350.519	250.108.000	516.740.242.519


B. BELANJA

JENIS BELANJA	URAIAN	UNAUDITED			KOREKSI BRUTO		KOREKSI PENGEMBALIAN		AUDITED		
		BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3+6-7	11 = 4+8-9	12 = 10-11
51	Belanja Pegawai	480.858.886.810	241.128.399	480.617.558.411	-	-	-	-	480.858.886.810	241.128.399	480.617.558.411
52	Belanja Barang dan Jasa	3.696.467.439.146	30.613.570.877	3.665.853.868.269	-	-	-	-	3.696.467.439.146	30.613.570.877	3.665.853.868.269
53	Belanja Modal	319.595.543.923	251.025.677	319.344.518.246	-	-	-	-	319.595.543.923	251.025.677	319.344.518.246
54	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Belanja Bantuan Sosial	53.560.357.327.595	299.527.820.440	53.260.829.507.155	-	-	-	-	53.560.357.327.595	299.527.820.440	53.260.829.507.155
58	Belanja Belanja Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA	58.057.278.997.474	330.633.545.393	57.726.645.452.081	-	-	-	-	58.057.278.997.474	330.633.545.393	57.726.645.452.081

KEMENTERIAN SOSIAL


MIRA RIYATI KURNIASIH

KEMENTERIAN KEUANGAN


DENNY FEBRIANO SINGAWIRIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN


AMELINA GUSTIANA

K/L : KEMENTERIAN SOSIAL
BA : 027

AKUN	UNAUDITED	KOREKSI	UNAUDITED KORREVAL	KOREKSI		ASERSI FINAL	Koreksi terkait Pencatatan Beban Bansos dan Revaluasi untuk Menindaklanjuti Temuan		AUDITED PERBAIKAN
				DEBET	KREDIT		DEBET	KREDIT	
EKUITAS AWAL	5.978.367.271.420	-	5.978.367.271.420			5.978.367.271.420			5.978.367.271.420
SURPLUS/DEFISIT LO	(55.272.094.611.772)	104.806.836	(55.271.989.804.936)	1.971.628.620.046	1.900.211.077.733	(55.343.407.347.249)	8.410.676.875	216.003.902.408	(55.135.814.121.716)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS									
Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	1.858.337.865	-	1.858.337.865	-	-	1.858.337.865	-	-	1.858.337.865
Selisih Revaluasi Aset	15.506.794.293.692	(6.854.831.512)	15.500.939.482.180	41.248.072	12.897.368.000	15.513.795.582.108	149.987.942.000	57.203.585.000	15.421.011.225.108
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(15.733.604.486)	1.984.593.884	(13.749.010.602)	58.199.600	100.357.410	(13.706.852.792)	101.293.964.774	102.246.454.104	(12.754.383.482)
Koreksi Atas Reklasifikasi	(936.795.742)	-	(936.795.742)	2.748.454.612	2.748.454.611	(936.795.743)	-	-	(936.795.743)
Koreksi Lain-lain	-	-	-	169.807.328	299.380.386.668	299.210.579.340	-	152.019.669.074	451.230.248.414
JUMLAH DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN	15.491.982.231.329	(3.870.237.628)	15.488.111.993.701	3.017.709.612	315.126.566.689	15.800.220.850.778	251.281.906.774	311.469.708.178	15.860.408.652.182
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS									
Ditegihkan ke Entitas Lain	57.636.484.135.381	-	57.636.484.135.381	-	-	57.636.484.135.381	-	-	57.636.484.135.381
Diterima dari Entitas Lain	(516.740.242.519)	-	(516.740.242.519)	-	-	(516.740.242.519)	-	-	(516.740.242.519)
Transfer Keluar	(718.750.608.475)	-	(718.750.608.475)	-	-	(718.750.608.475)	-	-	(718.750.608.475)
Transfer Masuk	714.040.295.270	-	714.040.295.270	-	-	714.040.295.270	-	-	714.040.295.270
Pengesahan Hibah Langsung	152.047.168.600	-	152.047.168.600	-	-	152.047.168.600	-	-	152.047.168.600
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(549.753.300)	-	(549.753.300)	-	-	(549.753.300)	-	-	(549.753.300)
Setoran Surplus BLU	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	17.486.418.614.514	(3.765.430.792)	17.482.653.183.722	1.974.646.329.658	2.215.337.644.422	17.723.344.498.486	259.692.583.649	527.473.610.586	17.991.125.525.423
EKUITAS AKHIR	23.464.785.885.934	(3.765.430.792)	23.461.020.455.142	1.974.646.329.658	2.215.337.644.422	23.701.711.769.906	259.692.583.649	527.473.610.586	23.969.492.796.843

JAKARTA, APRIL 2020
KEMENTERIAN SOSIAL


MIRA RIYATI KURNIASIH

DITJEN KEKAYAAN NEGARA


BAMBANG SULISTYONO

DITJEN PERBENDAHARAAN


DENNY FEBRIANO SINGAWIRIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN


AMELINA GUSTIANA

LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2019
(dalam rupiah)

URAIAN	Unaudited	Koreksi Revaluasi Setelah Penyampaian Laporan Unaudited		Koreksi		Audited	Koreksi terkait Pencatatan Beban Bansos dan Revaluasi untuk Menurunkan/kanjuri Temuan		AUDITED PERBAIKAN
		Debet	Kredit	Debet	Kredit		Debet	Kredit	
KEGIATAN OPERASIONAL									
PENDAPATAN OPERASIONAL									
PENDAPATAN PERPAJAKAN									
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK									
Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	26.281.686.055	-	-	1.208.000.000	119.331.893	25.193.017.948	-	-	25.193.017.948
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	26.281.686.055	-	-	1.208.000.000	119.331.893	25.193.017.948	-	-	25.193.017.948
PENDAPATAN HIBAH									
Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN PENYESUAIAN									
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	26.281.686.055	-	-	1.208.000.000	119.331.893	25.193.017.948	-	-	25.193.017.948
BEBAN OPERASIONAL									
Beban Pegawai	480.569.652.168	-	-	18.062.875	14.251.004	480.563.464.039	-	-	480.563.464.039
Beban Persediaan	39.196.178.503	-	-	-	-	39.196.178.503	-	-	39.196.178.503
Beban Barang dan Jasa	2.547.441.943.430	-	-	2.850.929.500	3.424.936.090	2.546.867.936.840	-	-	2.546.867.936.840
Beban Pemeliharaan	78.501.417.769	-	-	-	32.808.440	78.468.609.329	-	-	78.468.609.329
Beban Perjalanan Dinas	984.371.145.245	-	-	8.400.000	908.437.050	963.471.108.195	-	-	963.471.108.195
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	44.040.629.063	-	-	14.681.152.780	29.171.213.560	29.550.568.283	-	-	29.550.568.283
Beban Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	51.436.251.839.133	-	-	1.859.606.778.517	1.865.915.244.104	51.429.943.373.546	-	208.469.122.882	51.221.474.250.664
Beban Penyusutan dan Amortisasi	253.874.965.521	-	104.806.836	410.450.978	412.272.019	253.768.337.644	6.616.275.958	7.534.779.526	252.849.834.076
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(101.870)	-	-	5.655.267	-	5.555.597	1.794.400.917	-	1.799.954.514
Beban Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Penyesuaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	55.844.237.689.162	-	104.806.836	1.877.581.429.917	1.899.879.162.267	55.821.835.129.976	8.410.676.875	216.003.902.408	55.614.241.904.443
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(55.817.955.983.107)	-	104.806.836	1.878.789.429.917	1.899.998.494.160	(55.796.642.112.028)	8.410.676.875	216.003.902.408	(55.589.048.886.465)

URAIAN	Unaudited	Koreksi Revaluasi Setelah Penyampaian Laporan Unaudited		Koreksi		Audited	Koreksi terkait Pencatatan Beban Bansos dan Revaluasi untuk Menindaklanjuti Temuan		AUDITED PERBAIKAN
		Debet	Kredit	Debet	Kredit		Debet	Kredit	
KEGIATAN NON OPERASIONAL									
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR									
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.656.887.086	-	-	-	-	1.656.887.086	-	-	1.656.887.086
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	209.583.425	-	-	-	-	209.583.425	-	-	209.583.425
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	1.447.303.661	-	-	-	-	1.447.303.661	-	-	1.447.303.661
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG									
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA									
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	594.137.134.372	-	-	92.464.420.556	206.375	501.672.920.191	-	-	501.672.920.191
Beban dan Kegiatan Non Operasional Lainnya	49.723.066.698	-	-	374.769.573	212.377.198	49.885.459.073	-	-	49.885.459.073
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	544.414.067.674	-	-	92.839.190.129	212.583.573	451.787.461.118	-	-	451.787.461.118
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINN	545.861.371.335	-	-	92.839.190.129	212.583.573	453.234.764.779	-	-	453.234.764.779
POS LUAR BIASA									
Beban Luar Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) LO	(55.272.094.611.772)	-	104.806.836	1.971.628.620.046	1.900.211.077.733	(55.343.407.347.249)	8.410.676.875	216.003.902.408	(55.135.814.121.716)

KEMENTERIAN SOSIAL



MIRA RIYATI KURNIASIH

KEMENTERIAN KEUANGAN



DENNY FEBRIANO SINGAWIRIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



AMELINA GUSTIANA

Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK LKPP 2019
Selisih Antara Nilai Koreksi Revaluasi Yang Harus Diinput Sesuai SIMAN
Dengan Koreksi Terinput Pada SIMAK BMN
Untuk Transaksi Koreksi Transfer Masuk (Perekaman Manual)
Yang Telah Terkoreksi di LK Audited

BA_PENERIMA	SATKER_PENERIMA	BA_PENGERIM	SATKER_PENGERIM	KD_BRG	JUMLAH_KIRIM	JUMLAH_INPUT_MANUAL	SELISIH_JUMLAH_INPUT	DELTA_KIRIM	NILAI_INPUT_MANUAL	SELISIH_NILAI_INPUT	Selisih_Absolut	Sudah Disajikan dalam Laporan Keuangan Audited 2019	PENJELASAN
027	027010199440121001KP	027	027010199440140000KP	2010104001	6	0	6	29.413.931.000	0	29.413.931.000	29.413.931.000	29.413.931.000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon
027	027010199440121001KP	027	027010199440140000KP	2010202002	4	0	4	17.995.126.000	0	17.995.126.000	17.995.126.000	17.995.126.000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon
027	027010199440121001KP	027	027010199440140000KP	4010101001	4	0	4	15.599.635.000	0	15.599.635.000	15.599.635.000	15.599.635.000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon
027	027010199440121001KP	027	027010199440140000KP	4010109001	1	0	1	10.076.859.000	0	10.076.859.000	10.076.859.000	10.076.859.000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon
027	027040100352594000KD	027	027040100426726000KD	4010111001	1	1	0	-9.672.919.000	61.000	-9.672.980.000	9.672.980.000	-9.672.919.000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon (Pengujian BPK belum memperhitungkan koreksi 225 yang terkoreksi pada tahun 2018)
027	027010199440121002KP	027	027010199440140003KP	2010104002	1	0	1	5.253.461.000	0	5.253.461.000	5.253.461.000	5.253.461.000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon
027	027010199440121001KP	027	027010199440140000KP	2010101999	1	0	1	-4.013.168.000	0	-4.013.168.000	4.013.168.000	-4.013.168.000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon
027	027010199440121004KP	027	027010199440140001KP	2010101005	1	0	1	-1.812.935.000	0	-1.812.935.000	1.812.935.000	-1.812.935.000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon
027	027010199440121003KP	027	027010199440140002KP	2010104001	3	0	3	773.404.000	0	773.404.000	773.404.000	773.404.000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon
027	027010199440121001KP	027	027010199440140000KP	2010301002	1	0	1	-568.371.000	0	-568.371.000	568.371.000	-568.371.000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon
027	027040100352594000KD	027	027040100426726000KD	5010109002	2	2	0	-271.219.000	-769.243.000	498.024.000	498.024.000	-271.219.000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon (Pengujian BPK belum memperhitungkan koreksi 225 yang terkoreksi pada tahun 2018)
027	027010199440121001KP	027	027010199440140000KP	2010202001	1	0	1	431.860.000	0	431.860.000	431.860.000	431.860.000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon (Pengujian BPK belum memperhitungkan koreksi 225 pada tahun 2018)
027	027010199440121005KP	027	027010199440140004KP	2010101005	1	0	1	377.052.000	0	377.052.000	377.052.000	377.052.000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon
027	027010199440121001KP	027	027010199440140000KP	2010106001	1	0	1	-254.303.000	0	-254.303.000	254.303.000	-254.303.000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon
027	027010199440121001KP	027	027010199440140000KP	2010101001	3	0	3	-240.827.000	0	-240.827.000	240.827.000	-240.827.000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon
027	027010199440121001KP	027	027010199440140000KP	2010101002	5	0	5	229.216.000	0	229.216.000	229.216.000	229.216.000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon
027	027010199440121002KP	027	027010199440140003KP	2010101005	1	0	1	-206.736.000	0	-206.736.000	206.736.000	-206.736.000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon
027	027040100352594000KD	027	027040100426726000KD	5010109008	1	1	0	97.875.000	-83.735.000	181.610.000	181.610.000	97.875.000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon (Pengujian BPK belum memperhitungkan koreksi 225 yang terkoreksi pada tahun 2018)
027	027010199440121001KP	027	027010199440140000KP	2010301001	1	0	1	-142.377.000	0	-142.377.000	142.377.000	-142.377.000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon
027	027010199440121001KP	027	027010199440140000KP	2010104002	1	0	1	-125.960.000	0	-125.960.000	125.960.000	-125.960.000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon
027	027010199440121001KP	027	027010199440140000KP	2010104999	2	0	2	-100.623.000	0	-100.623.000	100.623.000	-100.623.000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon
027	027010199440121001KP	027	027010199440140000KP	2010102003	1	0	1	94.794.000	0	94.794.000	94.794.000	94.794.000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon
027	027010199440121001KP	027	027010199440140000KP	2010101005	3	0	3	89.776.000	0	89.776.000	89.776.000	89.776.000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon

Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK LKPP 2019
Selisih Antara Nilai Koreksi Revaluasi Yang Harus Diinput Sesuai SIMAN
Dengan Koreksi Terinput Pada SIMAK BMN
Untuk Transaksi Koreksi Transfer Masuk (Perekaman Manual)
Yang Telah Terkoreksi di LK Audited

BA_PENERIMA	SATKER_PENERIMA	BA_PENGIROM	SATKER_PENGIROM	KD_BRG	JUMLAH_KIRIM	JUMLAH_INPUT_MANUAL	SELISIH_Jumlah_IN PUT	DELTA_KIRIM	NILAI_INPUT_MANUAL	SELISIH_NILAI_IN PUT	Selisih_Absolut	Sudah Disajikan dalam Laporan Keuangan Audited 2019	PENJELASAN
027	027010199440121001KP	027	027010199440140000KP	2010301003	3	0	3	35.778.000	0	35.778.000	35.778.000	35.778.000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon
027	027010199440121002KP	027	027010199440140003KP	2010104001	1	0	1	-17.952.000	0	-17.952.000	17.952.000	-17.952.000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon
027	027010199440121001KP	027	027010199440140000KP	2010104018	1	0	1	16065000	0	16065000	16065000	16065000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon
027	027010199440121001KP	027	027010199440140000KP	2010301999	1	0	1	12786000	0	12786000	12786000	12786000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon
027	027010199440121001KP	027	027010199440140000KP	2010104007	1	0	1	-3680000	0	-3680000	3680000	-3680000	Sudah sesuai dan sudah diupload di E- Rekon

Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK LKPP 2019
Rincian Perbedaan Hasil Perhitungan Ulang Saldo Aset
Telah Terkoreksi di LK Audited

No	KD_BA	NUP_2	JNS_TRN	TRN_UR	NM_AKUN_ASET	SALDO_UJI_BPK	SALDO_DATA_SIMAK	SELISIH_SALDO_BRUTO	NM_AKUN_AKM	AKM_UJI_BPK	AKM_DATA_SIMAK	SELISIH_AKM_BRUTO	NM_AKUN_BEBAN	BEBAN_UJI_BPK	BEBAN_DATA_SIMAK	SELISIH_BEBAN_BRUTO	Sudah Disajikan dalam Laporan Keuangan Audited 2019	PENJELASAN
1	027	027040100426710000KD.4040104999.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	2.672.000	0	2.672.000	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	190.855	0	190.855		0	-2.096.145	0	-2.096.145	Koreksi 2.672.000 sudah masuk pada SIMAK barang Ekstra, dan Upload ke E-Rekon
2	027	027040100426710000KD.4040104999.2	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	2.672.000	0	2.672.000	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	190.855	0	190.855		0	-2.096.145	0	-2.096.145	Koreksi 2.672.000 sudah masuk pada SIMAK barang Ekstra Upload ke E-Rekon
3	027	02704019944025000KP.4040104001.2	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	337.815.000	340.421.000	-2.606.000	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.182.696	15403765	-221.069		0	-191.788	0	-191.788	Selisih pada transaksi koreksi 225 tahun 2018 sebesar 2.606.000, Data simak sudah sesuai dan sudah upload ke E-Rekon
4	027	02704019944025000KP.5010109002.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Jalan dan Jembatan	564.835.000	695.997.000	-131.162.000	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	173.795.384	207834347	-34.038.963		0	-23.949.578	0	-23.949.578	Selisih Aset 131.162.000 terdapat koreksi 225 tahun 2018. Setelah ditelusuri pada histori nilai setelah 225 2019 sudah sesuai dengan nilai wajar baru 564.835.000, dan sudah diupload di E-Rekon
5	027	027040300369169000KD.2010104001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Tanah	532.784.604.000	519.887.236.000	12.897.368.000	Tanah	-	0	0		0	0	0	0	Data simak sudah sesuai dan Upload ke E-Rekon

Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK LKPP 2019
Rincian Perbedaan Hasil Perhitungan Ulang Beban Penyusutan
Telah Terkoreksi di LK Audited

Rincian perbedaan hasil perhitungan ulang

No	KD_BA	NUP_2	JNS_TRN	TRN_UR	NM_AKUN_ASET	SALDO_UJI_BPK	SALDO_DATA_S1 MAK	SELISIH_SALDO BRUTO	NM_AKUN_AKM	AKM_UJI_BPK	AKM_DATA_S1 MAK	SELISIH_AKM_BR UTO	NM_AKUN_BEBAN	BEBAN_UJI_BPK	BEBAN_DATA_S1M AK	SELISIH_BEBAN_B RUTO	Sudah Disajikan dalam Laporan Keuangan Audited 2019	PENJELASAN
1	027	02701019944014000KP.4010101001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	0	0	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.655.638.792	3.641.792.290	13.846.502	0	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
2	027	027031900199135000TP.4020102001.1	229	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	Gedung dan Bangunan	0	0	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.180.000	1.006.670	173.330	0	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
3	027	027031900199135000TP.4040104001.2	229	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	Gedung dan Bangunan	0	0	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.454.006	-3.902.830	6.356.836	0	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
4	027	027040100426701000KD.4010101001.3	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	1.499.685.000	1.499.685.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	89.266.965	89.238.590	28.375	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	89.266.965	90.576.494	-1.309.529	89.238.590	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
5	027	027040100426701000KD.4010102001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	207.827.000	207.827.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.509.479	3.298.841	12.210.638	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.509.479	3.298.841	12.210.638	3.298.841	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
6	027	027040100426701000KD.4010103001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	415.654.000	415.654.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.018.955	6.597.683	24.421.272	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.018.955	6.597.683	24.421.272	6.597.683	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
7	027	027040100426701000KD.4010103001.2	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	459.991.000	459.991.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	27.380.415	24.338.147	3.042.268	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	27.380.415	24.338.147	3.042.268	24.338.147	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
8	027	027040100426701000KD.4010103001.3	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	241.080.000	241.080.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.977.465	3.598.209	13.379.256	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.977.465	3.598.209	13.379.256	3.598.209	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
9	027	027040100426701000KD.4010106001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	378.043.000	378.043.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.502.560	10.272.910	12.229.650	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.502.560	10.272.910	12.229.650	10.272.910	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
10	027	027040100426701000KD.4010109001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	862.576.000	862.576.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	64.371.345	13.691.683	50.679.662	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	64.371.345	13.691.683	50.679.662	13.691.683	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
11	027	027040100426701000KD.4010110001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	379.201.000	379.201.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.298.580	6.019.063	22.279.517	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.298.580	6.019.063	22.279.517	6.019.063	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
12	027	027040100426701000KD.4010110001.2	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	1.285.442.000	1.285.442.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.285.442.000	12.727.149	1.272.714.851	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.285.442.000	12.727.149	1.272.714.851	12.727.149	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
13	027	027040100426701000KD.4010110001.3	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	396.722.000	396.722.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	29.606.120	6.297.175	23.308.945	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	29.606.120	6.297.175	23.308.945	6.297.175	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
14	027	027040100426701000KD.4010113001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	24.606.000	24.606.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.836.270	390.571	1.445.699	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.836.270	390.571	1.445.699	390.571	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
15	027	027040100426701000KD.4010130001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	759.546.000	759.546.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	45.211.070	20.639.835	24.571.235	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	45.211.070	20.639.835	24.571.235	20.639.835	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
16	027	027040100426701000KD.4010130001.2	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	266.227.000	266.227.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.846.845	14.086.084	1.760.761	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.846.845	14.086.084	1.760.761	14.086.084	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
17	027	027040100426701000KD.4010130001.3	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	239.604.000	239.604.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.880.895	3.803.238	14.077.657	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.880.895	3.803.238	14.077.657	3.803.238	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
18	027	027040100426701000KD.4010201007.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	304.650.000	304.650.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.612.380	4.835.714	13.776.666	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.612.380	4.835.714	13.776.666	4.835.714	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
19	027	027040100426701000KD.4010201007.10	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	49.368.000	49.368.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.164.615	667.135	2.497.480	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.164.615	667.135	2.497.480	667.135	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
20	027	027040100426701000KD.4010201007.11	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	49.368.000	49.368.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.164.615	667.135	2.497.480	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.164.615	667.135	2.497.480	667.135	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
21	027	027040100426701000KD.4010201007.12	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	49.368.000	49.368.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.164.615	667.135	2.497.480	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.164.615	667.135	2.497.480	667.135	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
22	027	027040100426701000KD.4010201007.13	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	49.368.000	49.368.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.164.615	667.135	2.497.480	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.164.615	667.135	2.497.480	667.135	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
23	027	027040100426701000KD.4010201007.2	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	82.212.000	82.212.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.135.225	1.304.952	4.830.273	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.135.225	1.304.952	4.830.273	1.304.952	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
24	027	027040100426701000KD.4010201007.5	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	82.212.000	82.212.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.135.225	1.304.952	4.830.273	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.135.225	1.304.952	4.830.273	1.304.952	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
25	027	027040100426701000KD.4010201007.6	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	87.048.000	87.048.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.496.120	1.381.714	5.114.406	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.496.120	1.381.714	5.114.406	1.381.714	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
26	027	027040100426701000KD.4010201007.8	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	82.212.000	82.212.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.135.225	1.304.952	4.830.273	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.135.225	1.304.952	4.830.273	1.304.952	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
27	027	027040100426701000KD.4010201007.9	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	82.212.000	82.212.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.135.225	1.304.952	4.830.273	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.135.225	1.304.952	4.830.273	1.304.952	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
28	027	027040100426701000KD.4010204001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	205.048.000	205.048.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	128.155.000	9.492.965	118.662.035	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	128.155.000	9.492.965	118.662.035	9.492.965	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
29	027	027040100426701000KD.4010205001.2	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	787.612.000	787.612.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	58.777.015	12.501.778	46.275.237	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	58.777.015	12.501.778	46.275.237	12.501.778	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
30	027	027040100426701000KD.4010205001.4	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	945.135.000	945.135.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	70.532.465	15.002.143	55.530.322	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	70.532.465	15.002.143	55.530.322	15.002.143	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
31	027	027040100426701000KD.4010205001.7	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	1.021.435.000	1.021.435.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	76.226.493	16.213.254	60.013.239	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	76.226.493	16.213.254	60.013.239	16.213.254	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
32	027	027040100426701000KD.4010205001.8	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	992.392.000	992.392.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	74.059.105	15.752.254	58.306.851	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	74.059.105	15.752.254	58.306.851	15.752.254	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
33	027	027040100426710000KD.4040104999.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	2.672.000	0	2.672.000	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	190.855	0	190.855	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	190.855	2.287.000	-2.096.145	4.574.000	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
34	027	027040100426710000KD.4040104999.2	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	2.672.000	0	2.672.000	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	190.855	0	190.855	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	190.855	2.287.000	-2.096.145	4.574.000	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
35	027	027040100426726000KD.4010101001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	0	0	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.730.065.286	113.181.840	1.616.883.446	0	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
36	027	027040100426726000KD.4010110001.2	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	0	0	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	38.457.795	0	38.457.795	0	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)

Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK LKPP 2019
Rincian Perbedaan Hasil Perhitungan Ulang Beban Penyusutan
Telah Terkoreksi di LK Audited

Rincian perbedaan hasil perhitungan ulang

No	KD_BA	NUP_2	JNS_TRN	TRN_UR	NM_AKUN_ASET	SALDO_UJI_BPK	SALDO_DATA_S1 MAK	SELISIH_SALDO BRUTO	NM_AKUN_AKM	AKM_UJI_BPK	AKM_DATA_S1 MAK	SELISIH_AKM_BR UTO	NM_AKUN_BEBAN	BEBAN_UJI_BPK	BEBAN_DATA_S1M AK	SELISIH_BEBAN_B RUTO	Sudah Disajikan dalam Laporan Keuangan Audited 2019	PENJELASAN
37	027	027040100426726000KD.401011001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	0	0	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	312.748.286	2.977.154.424	-2.664.406.138	0	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
38	027	027040100426726000KD.401011004.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	0	0	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	406.377.858	26.585.466	379.792.392	0	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
39	027	027040100426726000KD.401011999.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	0	0	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.714.938	3.714.937	1	0	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
40	027	027040100426726000KD.4010124001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	0	0	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	53.362.728	0	53.362.728	0	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
41	027	027040100426726000KD.5010109002.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Jalan dan Jembatan	0	0	0	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	0	0	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.049.728.500	-190.859.727	1.240.588.227	0	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
42	027	027040100426726000KD.5010109002.2	225	Koreksi Kesalahan input IP	Jalan dan Jembatan	0	0	0	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	0	0	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	12.916.200	27.523.687	-14.607.487	0	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
43	027	027040100426726000KD.5010109001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Jalan dan Jembatan	0	0	0	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	0	0	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	105.817.385	130.648.233	-24.830.848	0	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
44	027	027040100560532000KD.4010108001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	270.698.000	270.698.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	34.704.870	38.605.894	-3.901.024	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	34.704.870	52.304.366	-17.599.486	38.605.894	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
45	027	027040100560532000KD.5010109002.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Jalan dan Jembatan	416.593.000	416.593.000	0	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	189.360.455	160.956.387	28.404.068	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	189.360.455	160.956.387	28.404.068	160.956.387	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
46	027	027040100560532000KD.5010109999.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Jalan dan Jembatan	455.202.000	455.202.000	0	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	206.910.000	177.597.750	29.312.250	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	206.910.000	177.597.750	29.312.250	177.597.750	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
47	027	02704019944025000KP.4040104001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	198.896.000	198.896.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	8.939.148	17.358.509	-8.419.361	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	8.939.148	17.358.509	-8.419.361	8.939.148	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
48	027	02704019944025000KP.4040104001.2	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	337.815.000	340.421.000	-2.606.000	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.182.696	15.403.765	-221.069	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	15.182.696	15.374.484	-191.788	15.244.840	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
49	027	02704019944025000KP.4040104999.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	250.725.000	250.725.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	10.556.844	11.612.422	-1.055.578	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	10.556.844	11.612.422	-1.055.578	10.556.844	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
50	027	02704019944025000KP.5010109002.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Jalan dan Jembatan	564.835.000	695.997.000	-131.162.000	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	173.795.384	207.834.347	-34.038.963	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	173.795.384	197.744.962	-23.949.578	175.043.846	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
51	027	027040200426669000KD.4010104999.10	229	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	Gedung dan Bangunan	809.457.827	809.457.827	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	132.808.904	132.808.906	-2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	43.374.930	46.032.112	-2.657.182	132.808.906	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
52	027	027040200426732000KD.4010109001.2	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	7.279.483.000	7.279.483.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	372.247.506	371.556.713	690.793	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	372.247.506	371.556.713	690.793	371.556.713	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
53	027	027040200426732000KD.4010205001.8	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	812.811.000	812.811.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	82.939.900	66.351.920	16.587.980	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	82.939.900	66.351.920	16.587.980	66.351.920	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
54	027	027040200426814000KD.5010109002.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Jalan dan Jembatan	2.207.876.000	2.207.876.000	0	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	919.948.335	772.756.601	147.191.734	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	919.948.335	772.756.601	147.191.734	772.756.601	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
55	027	027040200526071000KD.4040104001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	361.017.000	361.017.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.013.230	104.255.347	-82.242.117	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.013.230	104.255.347	-82.242.117	94.301.640	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
56	027	027040900426675000KD.5020404002.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Irigasi	105.439.000	105.439.000	0	Akumulasi Penyusutan Irigasi	40.553.460	38.057.863	2.495.597	Beban Penyusutan Irigasi	40.553.460	38.057.863	2.495.597	38.057.863	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
57	027	027041700426741000KD.5010109002.2	225	Koreksi Kesalahan input IP	Jalan dan Jembatan	38.047.000	38.047.000	0	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	11.889.688	11.097.042	792.646	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	11.889.688	11.097.042	792.646	11.097.042	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
58	027	02704190042664000KD.5010109002.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Jalan dan Jembatan	487.952.000	487.952.000	0	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	203.313.335	165.808.933	37.504.402	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	203.313.335	165.808.933	37.504.402	165.808.933	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
59	027	027050199440275000KP.5010209002.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Jalan dan Jembatan	1.201.453.000	1.201.453.000	0	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	69.851.920	67.226.571	2.625.349	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	69.851.920	66.789.385	3.062.535	67.226.571	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
60	027	027110199440326000KP.4010110001.4	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	3.902.319.396	3.902.319.396	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	326.530.421	326.228.112	302.309	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	175.341.164	175.038.855	302.309	326.228.112	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
61	027	027110200369084000KD.4010101001.2	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	1.918.274.000	1.918.274.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	93.649.191	94.657.838	-1.008.647	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	93.649.191	94.657.838	-1.008.647	93.466.709	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
62	027	027110200369084000KD.4010108001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	203.065.000	203.065.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.208.900	13.767.120	3.441.780	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.208.900	13.767.120	3.441.780	13.767.120	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
63	027	027110200369084000KD.4010113001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	16.182.000	16.182.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.371.355	0	1.371.355	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.371.355	0	1.371.355	0	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
64	027	027110200369084000KD.4010116001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	859.223.000	859.223.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	95.630.944	67.439.145	28.191.799	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	95.630.944	67.439.145	28.191.799	67.439.145	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)
65	027	027110200369084000KD.4010130001.2	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	1.415.403.000	1.415.403.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	128.673.000	0	128.673.000	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	128.673.000	0	128.673.000	0	NILAI AUDITED (TIDAK UPLOAD ULANG)

Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK LKPP 2019
Daftar Barang Milik Negara Yang Tidak Ditemukan
Pada Saat Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali
Yang Masih Tersaji Pada Neraca dan LBMN
Yang Akan Dilakukan Koreksi di LK Audited

BA	SATKER	UNIK	NILAI_SIPRE VAL	SIMAN_LAMA	SIMAN_BARU	SIMAK_2019	NO_LHIP	TGL_LHIP	TRN_SIMAN	UR_TUJUAN	UR_STS_INV2	NO_TIKET_BR	Sudah Disajikan dalam Laporan Keuangan Audited 2019	PENJELASAN
027	426669000	027040200426669000KD.4010104999.10	0	639.583.000	0	809.457.827	LHIP-0026/REV/WKN.08/KNL.02/2019	13/10/2017	229	REVISI DITEMUKAN - TIDAK DITEMUKAN	SALAH INPUT TANGGAL PEROLEHAN	IP-RV-20190717143306807857	809.457.827	Koreksi Pencatatan dan Upload ke E-Rekon
027	426644000	027041900426644000KD.4010101001.1	0	2.489.903.000	0	487.186.090	LHIP-631/REV/WKN.15/KNL.02/2019	20/11/2017	229	REVISI DITEMUKAN - TIDAK DITEMUKAN	SALAH INPUT TANGGAL PEROLEHAN	IP-RV-20191228112737315272	487.186.090	Koreksi Pencatatan dan Upload ke E-Rekon
027	426644000	027041900426644000KD.4010109001.1	0	1.399.364.000	0	1.296.577.785	LHIP-631/REV/WKN.15/KNL.02/2019	20/11/2017	229	REVISI DITEMUKAN - TIDAK DITEMUKAN	SALAH INPUT TANGGAL PEROLEHAN	IP-RV-20191228112737315272	1.296.577.785	Koreksi Pencatatan dan Upload ke E-Rekon
027	426644000	027041900426644000KD.4010110001.1	0	798.262.000	0	892.323.051	LHIP-631/REV/WKN.15/KNL.02/2019	20/11/2017	229	REVISI DITEMUKAN - TIDAK DITEMUKAN	SALAH INPUT TANGGAL PEROLEHAN	IP-RV-20191228112737315272	892.323.051	Koreksi Pencatatan dan Upload ke E-Rekon
027	426644000	027041900426644000KD.4010110001.2	0	798.262.000	0	818.891.413	LHIP-631/REV/WKN.15/KNL.02/2019	20/11/2017	229	REVISI DITEMUKAN - TIDAK DITEMUKAN	SALAH INPUT TANGGAL PEROLEHAN	IP-RV-20191228112737315272	818.891.413	Koreksi Pencatatan dan Upload ke E-Rekon
027	426644000	027041900426644000KD.4010110001.3	0	798.262.000	0	833.645.351	LHIP-631/REV/WKN.15/KNL.02/2019	20/11/2017	229	REVISI DITEMUKAN - TIDAK DITEMUKAN	SALAH INPUT TANGGAL PEROLEHAN	IP-RV-20191228112737315272	833.645.351	Koreksi Pencatatan dan Upload ke E-Rekon
027	426644000	027041900426644000KD.4010110001.4	0	783.341.000	0	996.617.412	LHIP-631/REV/WKN.15/KNL.02/2019	20/11/2017	229	REVISI DITEMUKAN - TIDAK DITEMUKAN	SALAH INPUT TANGGAL PEROLEHAN	IP-RV-20191228112737315272	996.617.412	Koreksi Pencatatan dan Upload ke E-Rekon

Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK LKPP 2019
Rincian Perbedaan Hasil Perhitungan Ulang Beban Penyusutan
Yang Akan Dilakukan Koreksi di LK Audited

No	KD_B A	NUP_2	JNS_T RN	TRN_UR	NM_AKUN_ASET	SALDO_UJI_BP K	SALDO_DATA_SIMAK	SELISIH_SAL DO_BRUTO	NM_AKUN_AKM	AKM_UJI BPK	AKM_DATA_S IMAK	SELISIH_AKM_B RUTO	NM_AKUN_BEBAN	BEBAN_UJI BPK	BEBAN_DATA_S IMAK	SELISIH_BEBAN BRUTO	Dilakukan Update/Koreksi Audited 2019	PENJELASAN
1	027	027040100426710000KD.4010110001.4	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	906.511.000	906.511.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	122.501.485	122.511.865	-10.380	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	122.501.485	122.511.865	-10.380	122.501.485	UPLOAD ULANG (E-REKON)
2	027	027040100426710000KD.4010110001.5	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	552.271.000	552.271.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	34.090.802	34.116.976	-26.174	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	34.090.802	34.116.976	-26.174	34.090.802	UPLOAD ULANG (E-REKON)
3	027	027040100426710000KD.4010111005.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	1.139.635.000	1.139.635.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	107.512.735	196.873.912	-89.361.177	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	107.512.735	196.873.912	-89.361.177	107.512.735	UPLOAD ULANG (E-REKON)
4	027	027040100426710000KD.4010114002.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	39.094.000	39.094.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.383.780	4.539.204	-2.155.424	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.383.780	4.539.204	-2.155.424	2.383.780	UPLOAD ULANG (E-REKON)
5	027	027040100426710000KD.4010114002.2	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	39.094.000	39.094.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.383.780	4.539.204	-2.155.424	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.383.780	4.539.204	-2.155.424	2.383.780	UPLOAD ULANG (E-REKON)
6	027	027040100426710000KD.4010205002.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	307.154.000	307.154.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	52.957.585	53.071.065	-113.480	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	52.957.585	53.071.065	-113.480	52.957.585	UPLOAD ULANG (E-REKON)
7	027	027040200369110000KD.4010108001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	203.713.000	203.713.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.220.105	39.883.489	-18.663.384	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.220.105	39.883.489	-18.663.384	21.220.105	UPLOAD ULANG (E-REKON)
8	027	027040200526071000KD.4010104001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	402.512.000	402.512.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	24.543.415	49.014.726	-24.471.311	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	24.543.415	49.014.726	-24.471.311	24.543.415	UPLOAD ULANG (E-REKON)
9	027	027040200526071000KD.4010205001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	954.976.000	954.976.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	136.425.145	138.878.785	-2.453.640	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	136.425.145	138.878.785	-2.453.640	136.425.145	UPLOAD ULANG (E-REKON)
10	027	027040200526071000KD.4010205001.5	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	706.453.000	706.453.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	47.733.310	59.343.853	-11.610.543	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	47.733.310	59.343.853	-11.610.543	47.733.310	UPLOAD ULANG (E-REKON)
11	027	027040200526071000KD.4010205001.8	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	818.567.000	818.567.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	52.472.245	59.199.625	-6.727.380	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	52.472.245	59.199.625	-6.727.380	52.472.245	UPLOAD ULANG (E-REKON)
12	027	027040200613057000KD.4010109001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	794.334.000	794.334.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	52.258.815	61.879.576	-9.620.761	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	52.258.815	61.879.576	-9.620.761	52.258.815	UPLOAD ULANG (E-REKON)
13	027	027040200613057000KD.4010111005.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	29.780.000	29.780.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.551.040	15.175.078	-13.624.038	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.551.040	15.175.078	-13.624.038	1.551.040	UPLOAD ULANG (E-REKON)
14	027	027040200613057000KD.4010125001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	93.279.000	93.279.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.858.280	4.880.991	-22.711	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.858.280	4.880.991	-22.711	4.858.280	UPLOAD ULANG (E-REKON)
15	027	027040200613057000KD.4010130999.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	15.656.000	15.656.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.030.000	3.422.306	-2.392.306	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.030.000	3.422.306	-2.392.306	1.030.000	UPLOAD ULANG (E-REKON)
16	027	027040200613057000KD.4010132001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	310.930.000	310.930.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.194.270	16.269.939	-75.669	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.194.270	16.269.939	-75.669	16.194.270	UPLOAD ULANG (E-REKON)
17	027	027040200613057000KD.4010134001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	18.400.000	18.400.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	958.335	8.256.428	-7.298.093	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	958.335	8.256.428	-7.298.093	958.335	UPLOAD ULANG (E-REKON)
18	027	027040200613057000KD.4010202001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	511.503.000	511.503.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	43.347.710	43.482.903	-135.193	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	43.347.710	43.482.903	-135.193	43.347.710	UPLOAD ULANG (E-REKON)
19	027	027040200613057000KD.4010202007.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	154.747.000	154.747.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.114.153	14.777.586	-1.663.433	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.114.153	14.777.586	-1.663.433	13.114.153	UPLOAD ULANG (E-REKON)
20	027	027040200613057000KD.4010202010.2	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	119.376.000	119.376.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.948.000	11.210.250	-1.262.250	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.948.000	11.210.250	-1.262.250	9.948.000	UPLOAD ULANG (E-REKON)
21	027	027040200613057000KD.4010202010.3	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	119.376.000	119.376.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.948.000	11.210.250	-1.262.250	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.948.000	11.210.250	-1.262.250	9.948.000	UPLOAD ULANG (E-REKON)
22	027	027040200613057000KD.4010202010.4	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	119.376.000	119.376.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.948.000	11.210.250	-1.262.250	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.948.000	11.210.250	-1.262.250	9.948.000	UPLOAD ULANG (E-REKON)
23	027	027040200613057000KD.4010202010.5	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	119.376.000	119.376.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.948.000	11.210.250	-1.262.250	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.948.000	11.210.250	-1.262.250	9.948.000	UPLOAD ULANG (E-REKON)
24	027	027040200613057000KD.4010202013.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	66.320.000	66.320.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.348.385	6.027.440	-679.055	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.348.385	6.027.440	-679.055	5.348.385	UPLOAD ULANG (E-REKON)
25	027	027040200613057000KD.4010202013.10	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	46.424.000	46.424.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.626.875	6.454.696	-2.827.821	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.626.875	6.454.696	-2.827.821	3.626.875	UPLOAD ULANG (E-REKON)
26	027	027040200613057000KD.4010202013.11	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	79.584.000	79.584.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.217.500	7.007.363	-789.863	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.217.500	7.007.363	-789.863	6.217.500	UPLOAD ULANG (E-REKON)
27	027	027040200613057000KD.4010202013.12	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	79.584.000	79.584.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.217.500	7.007.363	-789.863	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.217.500	7.007.363	-789.863	6.217.500	UPLOAD ULANG (E-REKON)
28	027	027040200613057000KD.4010202013.13	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	79.584.000	79.584.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.217.500	7.007.363	-789.863	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.217.500	7.007.363	-789.863	6.217.500	UPLOAD ULANG (E-REKON)
29	027	027040200613057000KD.4010202013.14	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	79.584.000	79.584.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.217.500	7.007.363	-789.863	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.217.500	7.007.363	-789.863	6.217.500	UPLOAD ULANG (E-REKON)
30	027	027040200613057000KD.4010202013.15	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	79.584.000	79.584.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.217.500	7.007.363	-789.863	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.217.500	7.007.363	-789.863	6.217.500	UPLOAD ULANG (E-REKON)
31	027	027040200613057000KD.4010202013.16	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	79.584.000	79.584.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.217.500	7.007.363	-789.863	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.217.500	7.007.363	-789.863	6.217.500	UPLOAD ULANG (E-REKON)
32	027	027040200613057000KD.4010202013.17	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	79.584.000	79.584.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.217.500	7.007.363	-789.863	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.217.500	7.007.363	-789.863	6.217.500	UPLOAD ULANG (E-REKON)
33	027	027040200613057000KD.4010202013.18	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	79.584.000	79.584.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.217.500	7.007.363	-789.863	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.217.500	7.007.363	-789.863	6.217.500	UPLOAD ULANG (E-REKON)
34	027	027040200613057000KD.4010202013.19	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	79.584.000	79.584.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.832.000	7.473.500	-841.500	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.832.000	7.473.500	-841.500	6.832.000	UPLOAD ULANG (E-REKON)
35	027	027040200613057000KD.4010202013.2	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	46.424.000	46.424.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.743.870	4.219.211	-475.341	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.743.870	4.219.211	-475.341	3.743.870	UPLOAD ULANG (E-REKON)

Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK LKPP 2019
Rincian Perbedaan Hasil Perhitungan Ulang Beban Penyusutan
Yang Akan Dilakukan Koreksi di LK Audited

No	KD_B A	NUP_2	JNS_T RN	TRN_UR	NM_AKUN_ASET	SALDO_UJI_BP K	SALDO_DATA_ SIMAK	SELISIH_SAL DO_BRUTO	NM_AKUN_AKM	AKM_UJI BPK	AKM_DATA_S MAK	SELISIH_AKM_B RUTO	NM_AKUN_BEBAN	BEBAN_UJI BPK	BEBAN_DATA_S IMAK	SELISIH_BEBAN N_BRUTO	Dilakukan Update/Koreksi Audited 2019	PENJELASAN
71	027	027040200613057000KD.4010205001.6	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	59.688.000	59.688.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.979.200	3.993.606	-14.406	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.979.200	3.993.606	-14.406	3.979.200	UPLOAD ULANG (E-REKON)
72	027	027040200613057000KD.4010205001.7	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	59.688.000	59.688.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.979.200	3.993.606	-14.406	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.979.200	3.993.606	-14.406	3.979.200	UPLOAD ULANG (E-REKON)
73	027	027040200613057000KD.4010205001.8	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	59.688.000	59.688.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.979.200	3.993.606	-14.406	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.979.200	3.993.606	-14.406	3.979.200	UPLOAD ULANG (E-REKON)
74	027	027040200613057000KD.4010205001.9	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	59.688.000	59.688.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.979.200	3.993.606	-14.406	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.979.200	3.993.606	-14.406	3.979.200	UPLOAD ULANG (E-REKON)
75	027	027040200613057000KD.5020502001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Irigasi	22.322.000	22.322.000	0	Akumulasi Penyusutan Irigasi	3.282.645	13.538.185	-10.255.540	Beban Penyusutan Irigasi	3.282.645	13.538.185	-10.255.540	3.282.645	UPLOAD ULANG (E-REKON)
76	027	027040200613057000KD.5020502002.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Irigasi	27.823.000	27.823.000	0	Akumulasi Penyusutan Irigasi	2.484.195	4.195.430	-1.711.235	Beban Penyusutan Irigasi	2.484.195	4.195.430	-1.711.235	2.484.195	UPLOAD ULANG (E-REKON)
77	027	027042200426650000KD.4010102001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	231.402.000	231.402.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	20.660.895	28.763.029	-8.102.134	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	20.660.895	28.763.029	-8.102.134	20.660.895	UPLOAD ULANG (E-REKON)
78	027	027042200426650000KD.4010130001.7	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	657.549.000	657.549.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	74.721.476	76.315.690	-1.594.214	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	74.721.476	76.315.690	-1.594.214	74.721.476	UPLOAD ULANG (E-REKON)
79	027	027042200426650000KD.4010130001.8	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	210.416.000	210.416.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.412.055	67.916.079	-53.504.024	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.412.055	67.916.079	-53.504.024	14.412.055	UPLOAD ULANG (E-REKON)
80	027	027042200426650000KD.4010202004.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	403.955.000	403.955.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	36.067.410	41.534.920	-5.467.510	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	36.067.410	41.534.920	-5.467.510	36.067.410	UPLOAD ULANG (E-REKON)
81	027	027042200426650000KD.4010205001.3	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	1.077.215.000	1.077.215.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	141.738.815	756.478.038	-614.739.223	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	141.738.815	756.478.038	-614.739.223	141.738.815	UPLOAD ULANG (E-REKON)
82	027	027050199440275000KP.4010102001.2	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	3.078.478.600	3.078.478.600	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	166.767.347	387.568.002	-220.800.655	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	166.767.347	387.568.002	-220.800.655	166.767.347	UPLOAD ULANG (E-REKON)
83	027	027111500369752000KD.4010102001.3	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	223.120.000	223.120.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	12.395.555	14.991.941	-2.596.386	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	12.395.555	14.991.941	-2.596.386	12.395.555	UPLOAD ULANG (E-REKON)
84	027	027111500369752000KD.4010102001.4	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	93.239.000	93.239.000	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.856.200	5.874.177	-1.017.977	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.856.200	5.874.177	-1.017.977	4.856.200	UPLOAD ULANG (E-REKON)
85	027	027111500369752000KD.4010109999.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	2.703.278.295	2.703.278.295	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	121.082.290	121.179.368	-97.078	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	121.082.290	121.179.368	-97.078	121.082.290	UPLOAD ULANG (E-REKON)
86	027	027111500369752000KD.4010202007.3	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	1.051.887.170	1.051.887.170	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	24.071.428	25.988.444	-1.917.016	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	24.071.428	25.988.444	-1.917.016	24.071.428	UPLOAD ULANG (E-REKON)
87	027	027111500369752000KD.4010202007.4	225	Koreksi Kesalahan input IP	Gedung dan Bangunan	703.685.972	703.685.972	0	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.586.226	19.093.617	-1.507.391	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.586.226	19.093.617	-1.507.391	17.586.226	UPLOAD ULANG (E-REKON)
88	027	027111500369752000KD.5010109002.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Jalan dan Jembatan	3.594.492.000	3.594.492.000	0	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.283.747.144	2.368.842.430	-1.085.095.286	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.283.747.144	2.368.842.430	-1.085.095.286	1.283.747.144	UPLOAD ULANG (E-REKON)
89	027	027111500369752000KD.5020505001.1	225	Koreksi Kesalahan input IP	Irigasi	221.295.000	221.295.000	0	Akumulasi Penyusutan Irigasi	19.758.480	22.738.410	-2.979.930	Beban Penyusutan Irigasi	19.758.480	22.738.410	-2.979.930	19.758.480	UPLOAD ULANG (E-REKON)

Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK LKPP 2019
Data Ketidaksesuaian Data pada LPK dan LHIP yang mempengaruhi nilai Wajar Hasil Perbaikan Reval
Yang Akan Dilakukan Koreksi di LK Audited

No	Kode BA	Kode Satker	Jumlah NUP per Jenis Permasalahan									Total Ketidaksesuaian Data LPK per KL	PENJELASAN	
			Kesalahan Luas	Kesalahan Kondisi	Kesalahan pengisian Tahun Dibangun/Renovasi/Penilaian	Kesalahan penentuan Kategori Bangunan	Kesalahan penggunaan satuan DBBG	Kesalahan penentuan fasilitas	Kesalahan penentuan Umur Efektif Bangunan	Kesalahan penentuan prosentase penyusutan	Lainnya			
1	027	027041900426690000KD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Kesalahan input nilai
2	027	027030199440213000KP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Kesalahan input nilai
3	027	027041700426741000KD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	Kesalahan input nilai
4	027	027010199440140000KP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Kesalahan luas
5	027	027041000426794000KD	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Kesalahan luas
Total			2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
		<i>Koreksi Unaudited atas Revaluasi Aset Tetap tanggal 12 Maret 2020</i>			
		<i>UKE I Sekretariat Jenderal/ Satuan Kerja Biro Umum</i>			
1	391114 133111	Revaluasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	26.410.506.591	26.410.506.591	Masuk Korreval Masuk Korreval
		<i>(Koreksi Pencatatan atas transaksi Koreksi Kesalahan input IP per 29 Februari 2020)</i>			
2	137211 391116	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	526.035.195	526.035.195	Masuk Korreval Masuk Korreval
		<i>(Koreksi Pencatatan atas transaksi Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
3	133111 391116	Gedung dan Bangunan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	26.410.506.591	26.410.506.591	Masuk Korreval Masuk Korreval
		<i>(Koreksi Pencatatan atas transaksi Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi)</i>			
4	391116 137211	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	526.035.195	526.035.195	Masuk Korreval Masuk Korreval
		<i>(Koreksi Pencatatan atas transaksi Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi)</i>			
5	133111 391114	Gedung dan Bangunan Revaluasi Aset Tetap	25.676.494.000	25.676.494.000	Masuk Korreval Masuk Korreval
		<i>(Pencatatan Koreksi Kesalahan input IP)</i>			
6	391116 137211	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	512.188.693	512.188.693	Masuk Korreval Masuk Korreval
		<i>(Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
7	391116 133111	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Gedung dan Bangunan	25.676.494.000	25.676.494.000	Masuk Korreval Masuk Korreval
		<i>(Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi)</i>			
8	137211 391116	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	512.188.693	512.188.693	Masuk Korreval Masuk Korreval
		<i>(Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi)</i>			
		<i>UKE I Sekretariat Jenderal/ Satuan Kerja Sekretariat Jenderal</i>			
9	313221 133111	Transfer Masuk Gedung dan Bangunan	25.676.494.000	25.676.494.000	Masuk Korreval Masuk Korreval
		<i>(Koreksi Pencatatan atas Koreksi Transfer Masuk)</i>			
10	313221 131111	Transfer Masuk Tanah	42.870.023.000	42.870.023.000	Masuk Korreval Masuk Korreval
		<i>(Koreksi Pencatatan atas Koreksi Transfer Masuk)</i>			
11	131111 313221	Tanah Transfer Masuk	1.812.935.000	1.812.935.000	Masuk Korreval Masuk Korreval
		<i>(Koreksi Pencatatan atas Koreksi Transfer Masuk)</i>			
12	313221 131111	Transfer Masuk Tanah	773.404.000	773.404.000	Masuk Korreval Masuk Korreval
		<i>(Koreksi Pencatatan atas Koreksi Transfer Masuk)</i>			
13	313221 131111	Transfer Masuk Tanah	5.028.773.000	5.028.773.000	Masuk Korreval Masuk Korreval
		<i>(Koreksi Pencatatan atas Koreksi Transfer Masuk)</i>			
14	313221 131111	Transfer Masuk Tanah	377.052.000	377.052.000	Masuk Korreval Masuk Korreval
		<i>(Koreksi Pencatatan atas Koreksi Transfer Masuk)</i>			
15	131111 391116	Tanah Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	42.870.023.000	42.870.023.000	Masuk Korreval Masuk Korreval
		<i>(Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi)</i>			
16	391116 131111	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Tanah	1.812.935.000	1.812.935.000	Masuk Korreval Masuk Korreval
		<i>(Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi)</i>			
17	131111 391116	Tanah Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	773.404.000	773.404.000	Masuk Korreval Masuk Korreval
		<i>(Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi)</i>			
18	131111 391116	Tanah Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	5.028.773.000	5.028.773.000	Masuk Korreval Masuk Korreval
		<i>(Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi)</i>			
19	131111 391116	Tanah Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	377.052.000	377.052.000	Masuk Korreval Masuk Korreval
		<i>(Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi)</i>			
20	133111 391116	Gedung dan Bangunan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	25.676.494.000	25.676.494.000	Masuk Korreval Masuk Korreval
		<i>(Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi)</i>			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
		UKE I Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial/Satuan Kerja DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN (199135)			
21	133111	Gedung dan Bangunan	41.248.072		Masuk Korreval
	391114	Revaluasi Aset Tetap		41.248.072	Masuk Korreval
		(Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali)			
22	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.518.854		Masuk Korreval
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		19.518.854	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
23	391114	Revaluasi Aset Tetap	581.606.472		Masuk Korreval
	133111	Gedung dan Bangunan		581.606.472	Masuk Korreval
		(Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan)			
24	133111	Gedung dan Bangunan	540.358.400		Masuk Korreval
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		540.358.400	Masuk Korreval
		(Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi)			
25	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	19.518.854		Masuk Korreval
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		19.518.854	Masuk Korreval
		(Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi)			
		UKE I Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial/ Satuan Kerja Dit. RTS & KPO			
26	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	94.709.759		Masuk Korreval
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		94.709.759	Masuk Korreval
		(Koreksi Pencatatan atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
27	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	54.240.295		Masuk Korreval
	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan		54.240.295	Masuk Korreval
		(Koreksi Pencatatan atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
28	133111	Gedung dan Bangunan	277.387.000		Masuk Korreval
	391114	Revaluasi Aset Tetap		277.387.000	Masuk Korreval
		(Koreksi Pencatatan atas Koreksi Kesalahan input IP)			
29	391114	Revaluasi Aset Tetap	109.522.000		Masuk Korreval
	134111	Jalan dan Jembatan		109.522.000	Masuk Korreval
		(Koreksi Pencatatan atas Koreksi Kesalahan input IP)			
30	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	257.684		Masuk Korreval
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		257.684	Masuk Korreval
		(Koreksi Pencatatan atas Koreksi Penyusutan Karena 225)			
31	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	9.126.833		Masuk Korreval
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		9.126.833	Masuk Korreval
		(Koreksi Pencatatan atas Koreksi Penyusutan Karena 225)			
32	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	128.842		Masuk Korreval
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		128.842	Masuk Korreval
		(Koreksi Pencatatan atas Koreksi Penyusutan Karena 225)			
33	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	9.126.834		Masuk Korreval
	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan		9.126.834	Masuk Korreval
		(Koreksi Pencatatan atas Koreksi Penyusutan Karena 225)			
34	391114	Revaluasi Aset Tetap	279.993.000		Masuk Korreval
	133111	Gedung dan Bangunan		279.993.000	Masuk Korreval
		(Koreksi Kesalahan input IP)			
35	391114	Revaluasi Aset Tetap	21.640.000		Masuk Korreval
	134111	Jalan dan Jembatan		21.640.000	Masuk Korreval
		(Koreksi Kesalahan input IP)			
36	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.197.778		Masuk Korreval
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		6.197.778	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
37	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.803.334		Masuk Korreval
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		1.803.334	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
38	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.131.423		Masuk Korreval
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		3.131.423	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
39	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.803.333		Masuk Korreval
	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan		1.803.333	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
40	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	43.310.128		Masuk Korreval
	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		43.310.128	Masuk Korreval
		(Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
41	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	94.791.622		Masuk Korreval
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		94.791.622	Masuk Korreval
		(Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
		UKE I Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial/ Satuan Kerja BRSEGP "PANGUDI LUHUR" DI BEKASI			
42	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	328.147.334		Masuk Korreval
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		328.147.334	Masuk Korreval
		(Koreksi Atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
43	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	62.646.273		Masuk Korreval
	591312	Beban Penyusutan Irigasi		62.646.273	Masuk Korreval
		(Koreksi Atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
44	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.756.186		Masuk Korreval
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		14.756.186	Masuk Korreval
		(Koreksi atas transaksi Koreksi Penyusutan Karena 225)			
45	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	44.268.560		Masuk Korreval
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		44.268.560	Masuk Korreval
		(Koreksi atas transaksi Koreksi Penyusutan Karena 225)			
46	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	178.867.948		Masuk Korreval
	391114	Revaluasi Aset Tetap		178.867.948	Masuk Korreval
		(Koreksi atas Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan)			
47	133111	Gedung dan Bangunan	3.159.779.000		Masuk Korreval
	391114	Revaluasi Aset Tetap		3.159.779.000	Masuk Korreval
		(Koreksi Kesalahan input IP)			
48	134112	Irigasi	829.823.000		Masuk Korreval
	391114	Revaluasi Aset Tetap		829.823.000	Masuk Korreval
		(Koreksi Kesalahan input IP)			
49	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	217.844.782		Masuk Korreval
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		217.844.782	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
50	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	198.436.179		Masuk Korreval
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		198.436.179	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
51	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	69.830.256		Masuk Korreval
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		69.830.256	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
52	591312	Beban Penyusutan Irigasi	33.608.609		Masuk Korreval
	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		33.608.609	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
53	391114	Revaluasi Aset Tetap	89.433.974		Masuk Korreval
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		89.433.974	Masuk Korreval
		(Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan)			
54	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	379.556.155		Masuk Korreval
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		379.556.155	Masuk Korreval
		(Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
55	591312	Beban Penyusutan Irigasi	96.254.879		Masuk Korreval
	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		96.254.879	Masuk Korreval
		(Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
56	391114	Revaluasi Aset Tetap	89.433.974		Masuk Korreval
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		89.433.974	Masuk Korreval
		(Koreksi Atas Jurnal Manual di SAIBA)			
		UKE I Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial/ Satuan Kerja BRSMPPK "Rumbai" di Pekanbaru			
57	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	261.908.163		Masuk Korreval
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		261.908.163	Masuk Korreval
		(Koreksi Atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
58	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	7.403.619		Masuk Korreval
	591312	Beban Penyusutan Irigasi		7.403.619	Masuk Korreval
		(Koreksi Atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
59	391114	Revaluasi Aset Tetap	1.618.324.354		Masuk Korreval
	133111	Gedung dan Bangunan		1.618.324.354	Masuk Korreval
		(Koreksi Pencatatan atas Koreksi Kesalahan input IP)			
60	134112	Irigasi	180.845.753		Masuk Korreval
	391114	Revaluasi Aset Tetap		180.845.753	Masuk Korreval
		(Koreksi Pencatatan atas Koreksi Kesalahan input IP)			
61	391114	Revaluasi Aset Tetap	45.934.412		Masuk Korreval
	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		45.934.412	Masuk Korreval
		(Koreksi Atas Transaksi Koreksi Penyusutan Karena 225)			
62	391114	Revaluasi Aset Tetap	110.314.092		Masuk Korreval
	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		110.314.092	Masuk Korreval
		(Koreksi Atas Transaksi Koreksi Penyusutan Karena 225)			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
63	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	107.869.674		Masuk Korreval
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		107.869.674	Masuk Korreval
		(Koreksi Atas Transaksi Koreksi Penyusutan Karena 225)			
64	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	35.949.034		Masuk Korreval
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		35.949.034	Masuk Korreval
		(Koreksi Atas Transaksi Koreksi Penyusutan Karena 225)			
65	591312	Beban Penyusutan Irigasi	36.771.364		Masuk Korreval
	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		36.771.364	Masuk Korreval
		(Koreksi Atas Transaksi Koreksi Penyusutan Karena 225)			
66	133111	Gedung dan Bangunan	175.582.000		Masuk Korreval
	391114	Revaluasi Aset Tetap		175.582.000	Masuk Korreval
		(Koreksi Kesalahan input IP)			
67	391114	Revaluasi Aset Tetap	179.874.000		Masuk Korreval
	134112	Irigasi		179.874.000	Masuk Korreval
		(Koreksi Kesalahan input IP)			
68	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	13.071.588		Masuk Korreval
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		13.071.588	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
69	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	45.934.412		Masuk Korreval
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		45.934.412	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
70	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	110.269.242		Masuk Korreval
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		110.269.242	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
71	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.317.298		Masuk Korreval
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		4.317.298	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
72	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	36.756.414		Masuk Korreval
	591312	Beban Penyusutan Irigasi		36.756.414	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
73	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	221.641.831		Masuk Korreval
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		221.641.831	Masuk Korreval
		(Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
74	591312	Beban Penyusutan Irigasi	7.418.569		Masuk Korreval
	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		7.418.569	Masuk Korreval
		(Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
		UKE I Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial/ Satuan Kerja BRSLU "BUDHI DHARMA" DI BEKASI			
75	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	302.995.673		Masuk Korreval
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		302.995.673	Masuk Korreval
		(Koreksi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
76	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	300.731.301		Masuk Korreval
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		300.731.301	Masuk Korreval
		(Koreksi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
77	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	1.603.895		Masuk Korreval
	591312	Beban Penyusutan Irigasi		1.603.895	Masuk Korreval
		(Koreksi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
78	391114	Revaluasi Aset Tetap	59.350.000		Masuk Korreval
	133111	Gedung dan Bangunan		59.350.000	Masuk Korreval
		(Koreksi atas Transaksi Koreksi Kesalahan input IP)			
79	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	50.197.801		Masuk Korreval
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		50.197.801	Masuk Korreval
		(Koreksi Atas Transaksi Koreksi Penyusutan Karena 225)			
80	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.823.170		Masuk Korreval
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		16.823.170	Masuk Korreval
		(Koreksi Atas Transaksi Koreksi Penyusutan Karena 225)			
81	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	815.124		Masuk Korreval
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		815.124	Masuk Korreval
		(Koreksi atas Transaksi Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi)			
82	391114	Revaluasi Aset Tetap	543.416		Masuk Korreval
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		543.416	Masuk Korreval
		(Koreksi Atas Jurnal Manual di SAIBA)			
83	133111	Gedung dan Bangunan	739.495.000		Masuk Korreval
	391114	Revaluasi Aset Tetap		739.495.000	Masuk Korreval
		(Koreksi Kesalahan input IP)			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
84	134112	Irigasi	224.167.000		Masuk Korreval
	391114	Revaluasi Aset Tetap		224.167.000	Masuk Korreval
		(Koreksi Kesalahan input IP)			
85	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	72.430.968		Masuk Korreval
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		72.430.968	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
86	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	14.534.154		Masuk Korreval
	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		14.534.154	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
87	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	24.234.224		Masuk Korreval
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		24.234.224	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
88	591312	Beban Penyusutan Irigasi	4.844.718		Masuk Korreval
	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		4.844.718	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
89	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	271.708		Masuk Korreval
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		271.708	Masuk Korreval
		(Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi)			
90	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	308.142.358		Masuk Korreval
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		308.142.358	Masuk Korreval
		(Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
91	591312	Beban Penyusutan Irigasi	6.448.613		Masuk Korreval
	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		6.448.613	Masuk Korreval
		(Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
92	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	302.995.673		Masuk Korreval
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		302.995.673	Masuk Korreval
		(Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
		UKE I Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial/ Satuan kerja BRSPDSN "TAN MIYAT" DI BEKASI			
93	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	339.278.324		Masuk Korreval
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		339.278.324	Masuk Korreval
		(Koreksi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
94	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	68.764.834		Masuk Korreval
	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan		68.764.834	Masuk Korreval
		(Koreksi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
95	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	1.734.233		Masuk Korreval
	591312	Beban Penyusutan Irigasi		1.734.233	Masuk Korreval
		(Koreksi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
97	133111	Gedung dan Bangunan	733.239.643		Masuk Korreval
	391114	Revaluasi Aset Tetap		733.239.643	Masuk Korreval
		(Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali)			
98	391114	Revaluasi Aset Tetap	1.469.658.000		Masuk Korreval
	133111	Gedung dan Bangunan		1.469.658.000	Masuk Korreval
		(Koreksi Kesalahan input IP)			
99	134111	Jalan dan Jembatan	1.795.287.000		Masuk Korreval
	391114	Revaluasi Aset Tetap		1.795.287.000	Masuk Korreval
		(Koreksi Kesalahan input IP)			
100	134112	Irigasi	333.032.000		Masuk Korreval
	391114	Revaluasi Aset Tetap		333.032.000	Masuk Korreval
		(Koreksi Kesalahan input IP)			
101	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	34.106.067		Masuk Korreval
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		34.106.067	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
102	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	115.224.834		Masuk Korreval
	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		115.224.834	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
103	591312	Beban Penyusutan Irigasi	5.266.079		Masuk Korreval
	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		5.266.079	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
104	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	145.730.827		Masuk Korreval
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		145.730.827	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
105	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	345.674.501		Masuk Korreval
	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		345.674.501	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
106	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	15.798.237		Masuk Korreval
	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		15.798.237	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
107	391114	Revaluasi Aset Tetap	1.085.315.643		Masuk Korreval
	133111	Gedung dan Bangunan		1.085.315.643	Masuk Korreval
		(Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan)			
108	133111	Gedung dan Bangunan	352.076.000		Masuk Korreval
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		352.076.000	Masuk Korreval
		(Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi)			
109	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	43.412.626		Masuk Korreval
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		43.412.626	Masuk Korreval
		(Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi)			
110	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	305.172.257		Masuk Korreval
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		305.172.257	Masuk Korreval
		(Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
111	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	36.797.933		Masuk Korreval
	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		36.797.933	Masuk Korreval
		(Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
112	591312	Beban Penyusutan Irigasi	7.000.312		Masuk Korreval
	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		7.000.312	Masuk Korreval
		(Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
		UKE I Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial/ Satuan kerja BRSKPN "Galih Pakuan" Bogor			
113	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	862.581.770		Masuk Korreval
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		862.581.770	Masuk Korreval
		(Koreksi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
114	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	32.043.018		Masuk Korreval
	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan		32.043.018	Masuk Korreval
		(Koreksi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
115	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	9.067.345		Masuk Korreval
	591312	Beban Penyusutan Irigasi		9.067.345	Masuk Korreval
		(Koreksi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
116	133111	Gedung dan Bangunan	1.067.423.000		Masuk Korreval
	391114	Revaluasi Aset Tetap		1.067.423.000	Masuk Korreval
		(Koreksi atas Transaksi Koreksi Kesalahan input IP)			
117	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	25.791.305		Masuk Korreval
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		25.791.305	Masuk Korreval
		(Koreksi Atas Transaksi Koreksi Penyusutan Karena 225)			
118	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	77.373.915		Masuk Korreval
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		77.373.915	Masuk Korreval
		(Koreksi Atas Transaksi Koreksi Penyusutan Karena 225)			
119	391114	Revaluasi Aset Tetap	3.204.973.000		Masuk Korreval
	133111	Gedung dan Bangunan		3.204.973.000	Masuk Korreval
		(Koreksi Kesalahan input IP)			
120	134111	Jalan dan Jembatan	176.773.000		Masuk Korreval
	391114	Revaluasi Aset Tetap		176.773.000	Masuk Korreval
		(Koreksi Kesalahan input IP)			
121	391114	Revaluasi Aset Tetap	162.475.000		Masuk Korreval
	134112	Irigasi		162.475.000	Masuk Korreval
		(Koreksi Kesalahan input IP)			
122	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	44.801.225		Masuk Korreval
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		44.801.225	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
123	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2.386.225		Masuk Korreval
	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		2.386.225	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
124	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	14.956.119		Masuk Korreval
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		14.956.119	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
125	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.933.739		Masuk Korreval
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		14.933.739	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
126	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	795.409		Masuk Korreval
	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		795.409	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
127	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	4.985.373		Masuk Korreval
	591312	Beban Penyusutan Irigasi		4.985.373	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
128	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	821.856.727		Masuk Korreval
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		821.856.727	Masuk Korreval
		(Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
129	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	32.838.426		Masuk Korreval
	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		32.838.426	Masuk Korreval
		(Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
130	591312	Beban Penyusutan Irigasi	4.081.972		Masuk Korreval
	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		4.081.972	Masuk Korreval
		(Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
		UKE I Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial/ Satuan kerja Dit. PSKBA			
131	391114	Revaluasi Aset Tetap	135.870.000		Masuk Korreval
	134111	Jalan dan Jembatan		135.870.000	Masuk Korreval
		(Koreksi atas Transaksi Koreksi Kesalahan input IP)			
132	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	14.226.593		Masuk Korreval
	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan		14.226.593	Masuk Korreval
		(Koreksi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
133	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.220		Masuk Korreval
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		9.220	Masuk Korreval
		(Koreksi atas Transaksi Normalisasi BMN)			
134	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	27.660		Masuk Korreval
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		27.660	Masuk Korreval
		(Koreksi atas Transaksi Normalisasi BMN)			
135	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.617.500		Masuk Korreval
	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan		1.617.500	Masuk Korreval
		(Koreksi atas Transaksi Normalisasi BMN)			
136	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.617.500		Masuk Korreval
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		1.617.500	Masuk Korreval
		(Koreksi atas Transaksi Normalisasi BMN)			
137	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	14.002.795		Masuk Korreval
	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		14.002.795	Masuk Korreval
		(Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
138	134111	Jalan dan Jembatan	117.071.000		Masuk Korreval
	391114	Revaluasi Aset Tetap		117.071.000	Masuk Korreval
		(Koreksi Kesalahan input IP)			
139	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	27.660		Masuk Korreval
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		27.660	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
140	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1.393.702		Masuk Korreval
	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		1.393.702	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
141	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.220		Masuk Korreval
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		9.220	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
142	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.393.702		Masuk Korreval
	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		1.393.702	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
		UKE I BP3KS/ Satuan Kerja STKS Bandung			
143	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	823.125.206		Masuk Korreval
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		823.125.206	Masuk Korreval
		(Koreksi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
144	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	756.058.766		Masuk Korreval
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		756.058.766	Masuk Korreval
		(Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
145	391114	Revaluasi Aset Tetap	5.969.585.000		Masuk Korreval
	133111	Gedung dan Bangunan		5.969.585.000	Masuk Korreval
		(Koreksi Kesalahan input IP)			
146	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	201.199.320		Masuk Korreval
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		201.199.320	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
147	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	67.066.440		Masuk Korreval
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		67.066.440	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
		UKE I BP3KS/ Satuan Kerja BBPPKS Makassar			
148	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	199.295.164		Masuk Korreval
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		199.295.164	Masuk Korreval
		(Koreksi Atas Transaksi Koreksi Penyusutan Karena 225)			
149	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	66.431.722		Masuk Korreval
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		66.431.722	Masuk Korreval
		(Koreksi Atas Transaksi Koreksi Penyusutan Karena 225)			
150	133111	Gedung dan Bangunan	33.292.000		Masuk Korreval
	391114	Revaluasi Aset Tetap		33.292.000	Masuk Korreval
		(Koreksi atas transaksi Koreksi Penilaian Kembali BMN)			
151	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	399.036.090		Masuk Korreval
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		399.036.090	Masuk Korreval
		(Koreksi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
152	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	399.713.863		Masuk Korreval
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		399.713.863	Masuk Korreval
		(Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)			
153	133111	Gedung dan Bangunan	29.715.000		Masuk Korreval
	391114	Revaluasi Aset Tetap		29.715.000	Masuk Korreval
		(Koreksi atas transaksi Penilaian Kembali BMN)			
154	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	197.261.845		Masuk Korreval
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		197.261.845	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
155	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	65.753.949		Masuk Korreval
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		65.753.949	Masuk Korreval
		(Koreksi Penyusutan Karena 225)			
		Satuan Kerja Konsolidasi Kementerian Sosial RI			
156	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	25.676.494.000		Masuk Korreval
	313221	Transfer Masuk		25.676.494.000	Masuk Korreval
		(Jurnal Balik atas Koreksi Transfer Masuk di Satuan Kerja Sekretariat Jenderal)			
157	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	47.236.317.000		Masuk Korreval
	313221	Transfer Masuk		47.236.317.000	Masuk Korreval
		Koreksi Audited selain Koreksi Atas Revaluasi Aset Tetap tanggal 12 Maret 2020			
		UKEI Sekretariat Jenderal/ 418939 - PUSDATIN KESOS			
158	115212	Piutang Lainnya	24.725.000		
	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		24.725.000	
		(Jurnal penyesuaian atas Kelebihan Pembayaran Paket Meeting Fullboard Rakornas I Tahun 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 uang tersebut berada di pelaksana kegiatan, telah disetor ke kas negara pada tanggal 8 Januari 2020; NTPN 839D30N9UUS018DC)			
159	115212	Piutang Lainnya	24.225.000		
	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		24.225.000	
		(Jurnal penyesuaian atas Kelebihan Pembayaran Paket Meeting Fullboard Rakornas II Tahun 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 uang tersebut berada di pelaksana kegiatan, telah disetor ke kas negara pada tanggal 8 Januari 2020; NTPN 3CAFD2G4UK0PC8PU)			
160	115212	Piutang Lainnya	153.762.738		
	522141	Beban Sewa		153.762.738	
		(Jurnal penyesuaian atas Kelebihan Pembayaran Sewa Jaringan Komunikasi dan Data Tahun 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 uang tersebut berada di pelaksana kegiatan, telah disetor ke kas negara pada tanggal 24 Februari 2020; NTPN 500458N3DE4Q4QOP)			
161	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	1.013.564		
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		1.013.564	
		(Jurnal Penyisihan piutang atas adanya piutang lainnya (adanya kelebihan pembayaran paket meeting Fullboard Rakornas I & II 2019, dan Sewa Jaringan Komunikasi dan Data Tahun 2019)			
		UKE I Sekretariat Jenderal/ 440121 - SEKRETARIAT JENDERAL			
162	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	2.691		
	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		2.691	
		(Jurnal penyesuaian atas kekurangan pembayaran pembulatan gaji PNS Tahun 2019. Kekurangan tersebut telah dibayarkan pada bulan Januari 2020, dengan rincian SP2D 201821302000112 sebesar Rp36; SP2D 201821302000300 sebesar Rp50; SP2D 201821302000198 sebesar Rp150; SP2D 201821302000197 sebesar Rp1.332; SP2D 201821302000196 sebesar Rp1.123)			
163	115212	Piutang Lainnya	2.183		
	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS		2.183	
		(Jurnal penyesuaian atas kelebihan pembayaran pembulatan gaji PNS Tahun 2019. Penyesuaian tersebut merupakan kelebihan yang terdokumentasikan dalam SP2D akun potongan dengan rincian SP2D 201821302000036 sebesar Rp32; SP2D 201821302000195 sebesar Rp230; SP2D 201821302000196 sebesar Rp237; SP2D 201821302000197 sebesar Rp710; SP2D 201821302000198 sebesar Rp100; SP2D 201821302000199 sebesar Rp565; SP2D 201821302000300 sebesar Rp50; SP2D 201821302000649 sebesar Rp147; SP2D 201821302000651 sebesar Rp112)			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
164	115212	Piutang Lainnya	480.000		
	511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS		480.000	
		<i>(Jurnal penyesuaian atas kelebihan pembayaran tunjangan fungsional PNS Tahun 2019. Penyesuaian tersebut merupakan kelebihan yang terdokumentasikan dalam SP2D akun potongan dengan rincian 201821302000198)</i>			
165	115212	Piutang Lainnya	555.000		
	511151	Beban Tunjangan Umum PNS		555.000	
		<i>(Jurnal penyesuaian atas kelebihan pembayaran tunjangan umum PNS Tahun 2019. Penyesuaian tersebut merupakan kelebihan yang terdokumentasikan dalam SP2D akun potongan dengan rincian nomor 201821302000198)</i>			
166	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	5.186		
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		5.186	
		<i>(Jurnal penyisihan piutang atas adanya piutang lainnya (adanya kelebihan pembayaran pembulatan gaji PNS Tahun 2019, tunjangan fungsional PNS Tahun 2019, dan tunjangan umum PNS Tahun 2019)</i>			
167	391119	Koreksi Lainnya	2.057.328		
	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		2.057.328	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas kekurangan pembayaran gaji pokok, tunj suami/istri, dan tunjangan anak tahun 2018 yang belum dibayarkan per 31 Desember 2019. Atas kekurangan pembayaran tersebut telah dibayarkan pada bulan Januari 2020 dengan rincian SP2D 201821302000199 sebesar Rp570.528; SP2D 201821302000195 sebesar Rp693.840; SP2D 201821302000649 sebesar Rp792.960)</i>			
168	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.208.000.000		
	219211	Pendapatan Sewa Diterima Di Muka		1.208.000.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Koreksi BPK untuk pencatatan Uang Muka Sewa Gedung GAB 1,2,3 yang diterima di tahun 2019 untuk event tahun 2020)</i>			
		UKE I Inspektorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal			
169	115212	Piutang Lainnya	483.900		
	511111	Beban Gaji Pokok PNS		483.900	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas kelebihan pembayaran Belanja Pegawai tahun 2019, telah disetorkan ke kas negara tanggal 18 Februari 2020 sesuai dengan NTPN A7C3D8N3DE4Q3RM3)</i>			
170	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	2.420		
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		2.420	
		<i>(Jurnal penyisihan piutang atas kelebihan pembayaran Belanja Pegawai tahun 2019, telah disetorkan ke kas negara tanggal 18 Februari 2020 sesuai dengan NTPN A7C3D8N3DE4Q3RM3)</i>			
		UKE I Ditjen Pemberdayaan Sosial/ Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Dayasos			
171	511111	Beban Gaji Pokok PNS	6.384.800		
	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	2.514		
	511121	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	532.240		
	511122	Beban Tunjangan Anak PNS	149.634		
	511123	Beban Tunjangan Struktural PNS	1.440.000		
	511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS	300.000		
	511125	Beban Tunjangan PPh PNS	109.824		
	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	678.000		
	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		9.597.012	
		<i>(Jurnal penyesuaian atas kekurangan pembayaran Belanja Pegawai dan telah dibayarkan dengan SP2D 201821302005399 sebesar Rp3.266.999, 201821302005531 sebesar Rp212.730, 201821302005646 sebesar Rp2.068.288, 201821302005645 sebesar Rp2.568.958, 201821302008135 sebesar Rp802.037 dan 201821304006472 sebesar Rp678.000 pada bulan Februari dan Maret 2020)</i>			
172	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	400		
	115212	Piutang Lainnya		400	
		<i>(Jurnal penyesuaian atas kesalahan pencatatan piutang lainnya. Piutang Lainnya tersebut merupakan kelebihan pembayaran Tunjangan kinerja Bulan Desember 2019)</i>			
173	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	114.192		
	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		114.192	
		<i>(Jurnal penyesuaian atas kekurangan pembayaran tunjangan kinerja An Asriyadi, telah dibayar dengan SP2D 201821304001972 Tanggal 14 Februari 2020)</i>			
		UKE I Ditjen Pemberdayaan Sosial/ Direktorat PSDBS			
174	163119	Dana Lainnya	125.000.000		
	574111	Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang		125.000.000	
		<i>(Jurnal penyesuaian atas dana bantuan sosial Direktorat PSKBS yang berasal dari Hibah Direktorat PSDBS yang masih berada di rekening penampungan dan belum disalurkan sampai 31 Desember 2019)</i>			
175	111821	Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran	18.500.000		
	574111	Beban Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam Bentuk Uang		18.500.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian pengembalian Dana Hibah Dit. PSDBS yang digunakan oleh Dit. JSK yang posisinya per 31 Desember 2019 dananya berada di Bendahara Pengeluaran Dit. PSDBS, telah disetor ke kas negara pada tanggal 20 Maret 2020)</i>			
176	117911	Persediaan Belum Diregister	527.339.126		
	218211	Hibah Langsung yang Belum Disahkan		527.339.126	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Koreksi BPK untuk mencatat barang HTI/HTDP yang belum diregister)</i>			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
177	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	527.339.126		
	117911	Persediaan yang Belum Diregister		527.339.126	
		<i>(Jurnal kiriman aplikasi persediaan atas koreksi BPK untuk mencatat barang HTT/HTDP yang belum diregister)</i>			
178	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	109.292.000		
	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		109.292.000	
		<i>(Jurnal kiriman aplikasi persediaan atas koreksi BPK untuk mencatat penyaluran barang HTT/HTDP yang belum diregister)</i>			
179	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	100.000.000		
	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat		100.000.000	
		<i>(Jurnal kiriman aplikasi persediaan atas koreksi BPK untuk mencatat persediaan HTT/HTDP yang sudah kadaluarsa)</i>			
		UKE I Ditjen Pemberdayaan Sosial/ Direktorat PSPKMM			
180	115212	Piutang Lainnya	36.500.255		
	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya		36.500.255	
		<i>(Jurnal penyesuaian kelebihan pembayaran Belanja atas Sisa Dana BOP (tidak habis pakai) SLRT TA 2019, sampai dengan 31 Desember 2019 dana tersebut berada di pihak ketiga, dan telah disetor ke kas negara tanggal 14 Februari 2020 NTPN 348896U8DOVT5HCR sebesar Rp30.000.000, 18 Februari 2020 NTPN 11C4B1JNEPHIQMBJ sebesar Rp1.000.000, 17 Februari 2020 NTPN 374956U8DOVU5CFP sebesar Rp500.000, 20 Januari 2020 NTPN C4C416U8DP02CPDR sebesar Rp255, 25 Februari 2020 NTPN 7AD4F8N3DE4R6SF3 sebesar Rp5.000.000)</i>			
181	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	182.501		
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		182.501	
		<i>(Jurnal Penyisihan Piutang atas kelebihan pembayaran belanja atas Sisa Dana BOP (tidak habis pakai) SLRT TA 2019, sampai dengan 31 Desember 2019 dana tersebut berada di pihak ketiga)</i>			
182	115212	Piutang Lainnya	47.047.500		
	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya		47.047.500	
		<i>(Jurnal penyesuaian kelebihan pembayaran belanja atas Dana BOP (tidak habis pakai) SLRT TA 2019, sampai dengan 31 Desember 2019 dana tersebut berada di pihak ketiga, dan telah disetor ke kas negara tanggal 5 Maret 2020 NTPN 6B7D51JNEPK85NOI sebesar Rp30.000, 6 Maret 2020 NTPN 482048N3DE7BDPCF sebesar Rp66.500, 11 Maret 2020 NTPN 825FC6U8DP2KMIRS sebesar Rp201.000, 9 Maret 2020 NTPN B9DDC48VU9BGHHAS sebesar Rp250.000, 6 Maret 2020 NTPN D1A6B1JNEPKAAC9D sebesar Rp15.500.000, 12 Maret 2020 NTPN D747F7QLTJL4A7L8 sebesar Rp16.000.000, 17 Maret 2020 NTPN 531387QLTJLGHQT sebesar Rp10.000.000, 9 Maret 2020 NTPN 6FFDA6U8DP2LOJ45 sebesar Rp5.000.000)</i>			
183	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	235.238		
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		235.238	
		<i>(Jurnal Penyisihan Piutang atas kelebihan pembayaran belanja atas Dana BOP (tidak habis pakai) SLRT TA 2019, sampai dengan 31 Desember 2019 dana tersebut berada di pihak ketiga)</i>			
		UKE I Ditjen Pemberdayaan Sosial/ Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (199135)			
184	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	4.601.606		
	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		4.601.606	
		<i>(Jurnal penyesuaian atas Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, sampai dengan 31 Desember 2019 masih berada di pihak ketiga, dan telah disetor ke kas negara tanggal 02 Januari 2020 NTPN 4B45661QTM1QIF24)</i>			
185	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNB	23.008		
	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB		23.008	
		<i>(Jurnal Penyisihan Piutang atas Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, sampai dengan 31 Desember 2019 masih berada di pihak ketiga)</i>			
186	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	19.518.854		
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		19.518.854	
		<i>(Koreksi atas transaksi Koreksi penyusutan karena 225) (Koreksi Revaluasi)</i>			
187	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.518.854		
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		19.518.854	
		<i>(Koreksi atas transaksi Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi) (Koreksi Revaluasi)</i>			
188	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.605.181		
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		6.605.181	
		<i>(Koreksi Penyusutan Karena 225) (Koreksi Revaluasi)</i>			
189	391114	Revaluasi Aset Tetap	41.248.072		
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		41.248.072	
		<i>(Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan) (Koreksi Revaluasi)</i>			
190	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	34.642.891		
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		34.642.891	
		<i>(Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi) (Koreksi Revaluasi)</i>			
		UKE I Ditjen Pemberdayaan Sosial/ Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Asmat			
191	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	52.824.342		
	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		52.824.342	
		<i>(Jurnal penyesuaian atas Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, sampai dengan 31 Desember 2019 masih berada di pihak ketiga, telah disetor pada tanggal 20 Januari 2020, NTPN 87A682G4UK164K20)</i>			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
192	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNB	264.122		
	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB		264.122	
		<i>(Jurnal Penyisihan Piutang atas Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, sampai dengan 31 Desember 2019 masih berada di pihak ketiga)</i>			
193	117141	Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial	2.641.217.112		
	573112	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk barang		2.641.217.112	
		<i>(Jurnal kiriman aplikasi persediaan untuk koreksi hasil opname fisik per 31 Desember 2019 atas barang yang telah diserahkan Rumah KAT kampung Kairin)</i>			
194	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/ Aset Tetap/ Aset Lainnya	2.641.217.112		
	117141	Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial		2.641.217.112	
		<i>(Jurnal kiriman aplikasi persediaan atas transaksi Reklasifikasi Keluar Persediaan Dalam Rangka Bansos menjadi Persediaan Dalam Proses Rumah KAT kampung Kairin)</i>			
195	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat- Dalam Proses	2.641.217.111		
	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/ Aset Tetap/ Aset Lainnya		2.641.217.111	
		<i>(Jurnal kiriman aplikasi persediaan atas transaksi Reklasifikasi Masuk Persediaan Dalam Rangka Bansos menjadi Persediaan Dalam Proses Kampung Kairin)</i>			
196	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	184.885.198		
	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan kepada Masyarakat- Dalam Proses		184.885.198	
		<i>(Jurnal kiriman aplikasi persediaan untuk mengurangi nilai Persediaan Dalam Proses karena Pekerjaan yang belum selesai per 31 Desember 2019)</i>			
197	115212	Piutang Lainnya	184.885.198		
	117911	Persediaan yang Belum Diregister		184.885.198	
		<i>(Jurnal Penyesuaian untuk pencatatan piutang serta penyesuaian nilai persediaan pekerjaan rumah KAT kampung Kairin yang belum selesai, per 31 Desember 2019 dana masih berada di pihak ketiga, dan telah disetor ke kas negara pada tanggal 20 Januari 2020 NTPN 3F9B561QTUAJMSOC)</i>			
198	117911	Persediaan yang Belum Diregister	184.885.198		
	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		184.885.198	
		<i>(Jurnal penyesuaian untuk mengurangi nilai Persediaan Dalam Proses karena Pekerjaan yang belum selesai per 31 Desember 2019)</i>			
199	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	924.426		
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		924.426	
		<i>(Jurnal Penyisihan Piutang atas pencatatan piutang pekerjaan rumah KAT kampung Kairin yang belum selesai, per 31 Desember 2019 dana masih berada di pihak ketiga)</i>			
		UKE I Ditjen Pemberdayaan Sosial/ Dinas Sosial Kabupaten Nunukan			
200	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	61.905.945		
	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		61.905.945	
		<i>(Piutang PNB atas Garansi Bank pembangunan Rumah KAT yang sampai dengan 31 Desember 2019 masih berada di pihak ketiga, telah disetorkan ke kas negara tanggal 27 Januari 2020 NTPN E8C8D61QTUAU151N)</i>			
201	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak tertagih-Piutang PNB	309.530		
	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNB		309.530	
		<i>(Jurnal Penyisihan Piutang atas Garansi Bank pembangunan Rumah KAT yang sampai dengan 31 Desember 2019 masih berada di pihak ketiga)</i>			
		UKE I Ditjen Pemberdayaan Sosial/ Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat			
202	135111	Aset Tetap Renovasi	32.808.440		
	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister		32.808.440	
		<i>(Jurnal Kiriman SIMAK BMN atas ATR yang dihasilkan dari belanja pemeliharaan)</i>			
203	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	32.808.440		
	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya		32.808.440	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas kesalahan penggunaan akun belanja yang menghasilkan ATR)</i>			
		UKE I Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial/ DIT RS KP NAPZA			
204	115212	Piutang Lainnya	5.000.000		
	571111	Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Uang		5.000.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian Belanja BANSOS T.A 2019, posisi per 31 Desember 2019 berada di IPWL, telah disetor ke Kas Negara tanggal 7 Februari 2020 NTPN 903251JNEPHBDOK5)</i>			
205	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	25.000		
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		25.000	
		<i>(Jurnal penyisihan piutang atas Pengembalian Belanja BANSOS T.A 2019, posisi per 31 Desember 2019 berada di IPWL)</i>			
206	115212	Piutang Lainnya	2.321.271		
	571111	Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Uang		2.321.271	
		<i>(Jurnal penyesuaian atas Pengembalian Belanja BANSOS T.A 2019, posisi per 31 Desember 2019 berada di IPWL, telah disetor ke Kas Negara tanggal 7 Februari 2020 NTPN F04037QLTJ281EA)</i>			
207	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	11.606		
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		11.606	
		<i>(Jurnal penyisihan piutang atas Pengembalian Belanja BANSOS T.A 2019, posisi per 31 Desember 2019 berada di IPWL)</i>			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
		UKE I Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial/ Sekretariat Ditjen Rehsos			
208	115212	Piutang Lainnya	1.063.596		
	511122	Beban Tunj. Anak PNS		1.063.596	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas kelebihan pembayaran belanja tunjangan anak PNS T.A 2019, telah disetor ke kas negara pada tanggal 03 Februari 2020 NTPN DD2C42N3DB4CCJNN)</i>			
209	115212	Piutang Lainnya	796.620		
	511126	Beban Tunj. Beras PNS		796.620	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas kelebihan pembayaran belanja tunjangan beras PNS T.A 2019, telah disetor ke kas negara pada tanggal 03 Februari 2020 NTPN DD2C42N3DB4CCJNN)</i>			
210	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	9.301		
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		9.301	
		<i>(Jurnal Penyisihan Piutang atas kelebihan pembayaran Belanja Tunj Anak T.A 2019 dan Belanja Tunj Beras T.A 2019)</i>			
		UKE I Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial/ BRSAMPK TODDOPULI			
211	115212	Piutang Lainnya	200.000		
	511111	Beban Gaji Pokok PNS		200.000	
		<i>(Jurnal penyesuaian atas kelebihan pembayaran Belanja Gaji Pokok PNS T.A 2019, telah disetorkan ke kas negara tanggal 14 Februari 2020 No NTPN: 896E678LJIAIMDK)</i>			
212	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	1.000		
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		1.000	
		<i>(Jurnal Penyisihan Piutang atas kelebihan pembayaran Belanja Gaji Pokok PNS T.A 2019)</i>			
		UKEI Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial/ Direktorat Rehsos Penyandang Disabilitas			
213	571111	Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Uang	1.911.600.000		
	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		1.911.600.000	
		<i>(Jurnal Balik atas Pencatatan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran karena Dana Bantuan Sosial per 31 Desember 2019 berada di rekening atas nama Penerima Manfaat yang disetorkan ke kas negara tanggal 27 Maret 2020 NTPN B59443CIEEPMN00T)</i>			
		UKE I Ditjen Rehabilitasi Sosial/ Satker BBRSPDF Prof. Dr. Soeharso Surakarta			
214	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	206.375		
	117111	Barang Konsumsi		206.375	
		<i>(Jurnal kiriman aplikasi persediaan untuk penyesuaian nilai persediaan)</i>			
215	117111	Barang Konsumsi	206.375		
	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		206.375	
		<i>(Jurnal kiriman aplikasi persediaan untuk penyesuaian nilai persediaan)</i>			
216	131111	Tanah	12.897.368.000		
	391114	Revaluasi Aset Tetap		12.897.368.000	
		<i>(Koreksi Kesalahan Input IP) (Koreksi Revaluasi Aset berdasarkan BAR LHIP Nomor : 078.REV/WKN/2019)</i>			
		UKE I Ditjen Rehabilitasi Sosial/ Satker BRSAMPK "Alyatama" Jambi			
217	571111	Beban Bantuan Sosial untuk rehabilitasi Sosial dalam bentuk uang	2.000.000		
	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		2.000.000	
		<i>(Jurnal Balik atas Pencatatan kas dan setara kas lainnya yang disebabkan Penerima Manfaat yang diteriminasi dan diluar jangkauan dimana posisi per 31 Desember 2019 dana bansos telah tersalur ke Penerima Manfaat Surat Perintah Pengembalian ke Kas Negara tanggal 10 Februari 2020; dan disetor ke kas Negara 12 Februari 2020 NTPN 20BA361QTUDD9N4)</i>			
		UKE I Ditjen Rehabilitasi Sosial/ Satker Direktorat RS Lanjut Usia			
218	571111	Beban Bantuan Sosial untuk rehabilitasi Sosial dalam bentuk uang	458.400.000		
	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		458.400.000	
		<i>(Jurnal Balik atas Pencatatan kas dan setara kas lainnya atas Penerima Manfaat yang tidak mencairkan bantuan dimana posisi per 31 Desember 2019 dana bansos berada di Rekening penerima bansos Bantu LU Surat Perintah Pengembalian ke Kas Negara tanggal 10 Februari 2020 Berita Acara Penelitian tanggal 10 Februari 2020 dan disetor ke kas Negara 11 Februari 2020 NTPN 779B148VU981PRQ8)</i>			
219	571111	Beban Bantuan Sosial untuk rehabilitasi Sosial dalam bentuk uang	372.000.000		
	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		372.000.000	
		<i>(Jurnal Balik atas Pencatatan kas dan setara kas lainnya atas Penerima Manfaat yang tidak mencairkan bantuan dimana posisi per 31 Desember 2019 dana bansos berada di Rekening Penerima Bansos Dukungan Keluarga Surat Perintah Pengembalian ke Kas Negara tanggal 10 Februari 2020 Berita Acara Penelitian tanggal 10 Februari 2020 dan disetor ke kas Negara 11 Februari 2020 NTPN A97D15SDE3R26U17)</i>			
		UKE I Ditjen Rehabilitasi Sosial/ Satker Direktorat RS Anak			
220	571111	Beban Bantuan Sosial untuk rehabilitasi Sosial dalam bentuk uang	109.000.000		
	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		109.000.000	
		<i>(Jurnal Balik atas Pencatatan kas dan setara kas lainnya atas Penerima Manfaat yang tidak mencairkan bantuan dimana posisi per 31 Desember 2019 dana bansos berada di Rekening Penerima Bansos Surat Perintah Pengembalian ke Kas Negara tanggal 6 Februari 2020 Berita Acara Penelitian tanggal 4 Februari 2020 dan disetor ke kas Negara tanggal 7 Februari 2020 NTPN 976A52G4UK3OSH30)</i>			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
		UKE I Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial/ Setditjen Linjamsos			
221	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	5.940.000		
	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		5.940.000	
		<i>(Jurnal penyesuaian atas kekurangan pembayaran gaji tunjangan jabatan fungsional bulan november dan desember 2019 sebanyak 5 orang yaitu Drs. Hendrasman, M.Si., Dra. Johanna Carolina Purimahua, M.Si., Dra. Dewi Rosfianti, MPS.Sp., Edhy Suwarna, S.Sos.,M.Si., R. Budi Hapriyono, A.KS., M.Si telah dibayarkan kepada masing-masing pegawai pada bulan Januari 2020 dengan Nomor SPM:00012 Tanggal 20 Januari 2020)</i>			
222	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	2.408.580		
	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		2.408.580	
		<i>(Jurnal penyesuaian atas kekurangan pembayaran Tunjangan Kinerja dikarenakan adanya kenaikan grade jabatan dr calon perencana ke perencana an. Dina Elina Saragih selama 3 bulan dr oktober sd. desember 2019 dan kekurangan tunjangan kinerja an. Risky Banu Saputra dikarenakan Tugas Belajar seharusnya 80% pada bulan September 2019, akan dibayarkan dan diajukan SPM pada bulan april 2020)</i>			
		UKE I Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial/ Dit. PSKBA			
223	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	16.556.333		
	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		16.556.333	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian belanja barang atas selisih perhitungan Opname Cash BKU Bendahara dan telah disetorkan pada tanggal 27 Februari 2020 dengan NTPN : C1D8C8N3DE51G03R)</i>			
224	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	5.260.000		
	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		5.260.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian belanja barang atas kegiatan Rakor KSB Di Cilacap dan Pangandaran Tahun 2019, dan telah disetor 27 Februari 2020 dengan NTPN : 65C9255DE3RFSN7T)</i>			
225	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	25.351.800		
	524111	Beban Perjalanan Biasa		25.351.800	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian belanja barang terkait penyeteroran monitoring dan evaluasi program tahap 1 Dit. PSKBA tahun 2019 dan telah disetor 28 Januari 2020 dengan NTPN : FE3E16U8DOTAH875)</i>			
226	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	827.900		
	524111	Beban Perjalanan Biasa		827.900	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian belanja barang terkait penyeteroran monitoring dan evaluasi program tahap 2 Dit. PSKBA tahun 2019 dan telah disetor 28 Januari 2020 dengan NTPN : 7F8A78N3DE23B7E7)</i>			
227	573112	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	332.000		
	117141	Persediaan dalam rangka bansos		332.000	
		<i>(Jurnal kiriman aplikasi persediaan atas hasil Opname Fisik di Provinsi Papua berupa Rompi Pelampung sebanyak 1 pcs yang telah diserahkan kepada masyarakat sesuai BAP Fisik No: BA/Cek Fisik Persediaan/02/2020 tanggal 24 Februari 2020)</i>			
228	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	62.186.000		
	117141	Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial		62.186.000	
		<i>(Jurnal kiriman aplikasi persediaan atas Koreksi BPK karena adanya buffer stock berupa mie instant sebanyak 31.000 bungkus sebesar Rp62.186.000 (31.000xRp2.006) sudah kadaluarsa namun masih dicatat sebagai Persediaan dan telah diusulkan oleh Sekretariat sesuai Surat Sesditjen Nomor : 44/3.1/PL.05.03/01/2020 Tanggal 08 Januari 2020)</i>			
229	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	10.341.818		
	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor		10.341.818	
		<i>(Jurnal penyesuaian atas Koreksi BPK karena berdasarkan hasil pemeriksaan kas, diketahui adanya pajak atas kegiatan tahun 2019 yang belum disetor di tahun 2019 dan baru disetor pada tahun 2020 dengan NTPN 79E4B741GTPGJ34, 0A48900LI9ALDISG, C541A00LI9AKJ63C, F35351PGHUFNCNCQU, 07BE431BHJK4O4BO,377B8741GTTGN29S, 4DF435B6H8OMLLJU, C2C455B6H8O8MKTU, 3C17F0T323SQRJAI, A224700LI9AN45BK, 39731PGHUFGIT2Q, F43E5B6H8P3BRK6, E63FA0T323T4QQ0N, A80EA00LI9D4UNSC, A84B20T323VGRDVT, C618B1PGHUFLD0LE, 2C1922LU1P22H7PP, 476C72LU1P23V23VI6L, 589AC741GTVB5VHG, BFC2A0T323TCLJB, 346930T323UP09PV, 664CC0T323TATHF, 16E33741GTVF80IK,023901PGHUEQUA02,CE38E5B6H8OD9LVQ,3C1802LU1P1DIGH, F401E80FP8Q1B, 41120741GTTEAL10)</i>			
		UKE I Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial/ Dit PSKBS			
230	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	870.437		
	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		870.437	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian belanja barang dalam rangka Kegiatan Sarasehan Nasional Kearifan Lokal yang telah disetor ke kas negara 31 Januari 2020 dengan NTPN 5B4637QLTJPQ4282)</i>			
231	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	57.261		
	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		57.261	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian belanja barang dalam rangka Kegiatan Dukungan HKS 2019 yang telah disetor 31 Januari 2020 dengan NTPN C962648VU965GHSS)</i>			
		UKE I Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial/ Dit. Jamsoske!			
232	115212	Piutang Lainnya	8.000.000		
	521213	Beban Honor Output Kegiatan		8.000.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas kelebihan pembayaran honor bulan Mei s.d Agustus 2019 SDM PKH Kec. Besuki Kab Situbondo prov jatim a.n Cucuk Faisal, S.Pd, sampai dengan 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga, telah disetor ke kas negara tanggal 03 Februari 2020 dengan NTPN 521F86U8DOTCJ74H)</i>			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
233	594212 116212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	40.000	40.000	
		<i>(Jurnal Penyisihan Piutang atas kelebihan pembayaran honor bulan mei s.d agustus 2019 SDM PKH Kec. Besuki Kab Situbondo prov jatim a.n Cucuk Faisal, S.Pd, sampai dengan 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga)</i>			
234	115212 521213	Piutang Lainnya Beban Honor Output Kegiatan	20.800.000	20.800.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas kelebihan pembayaran honor SDM PKH Kab. Pasaman an Harna Dewi bulan Mei - Desember 2019, sampai dengan 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga, telah disetor ke kas negara tanggal 07 Februari 2020 dengan NTPN A8FE66U8DOVJMQ7F)</i>			
235	594212 116212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	104.000	104.000	
		<i>(Jurnal Penyisihan Piutang atas kelebihan pembayaran honor SDM PKH Kab. Pasaman an Harna Dewi bulan Mei-Desember 2019, sampai dengan 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga)</i>			
236	111821 521213	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran Beban Honor Output Kegiatan	675.000	675.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian Pengembalian Belanja Honor Tim Kegiatan Konsolidasi dan Dialog Nasional PKH Tahun 2019, telah disetor ke kas negara tanggal 11 Februari 2020 dengan NTPN D334B61QTUDDIDKC)</i>			
237	111821 521213	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran Beban Honor Output Kegiatan	147.500	147.500	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian Belanja Honor Tim Penyusunan Bahan Sosialisasi dan Edukasi Bansos Non Tunai PKH Tahun 2019 telah disetor ke kas negara tanggal 11 Februari 2020 dengan NTPN 133FB2G4UK3RUDDA)</i>			
238	111821 521213	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran Beban Honor Output Kegiatan	370.000	370.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian Belanja Honor Kegiatan Penyusunan Rekonsiliasi Data Penyaluran Bansos PKH dengan Lembaga Bayar Tahun 2019 telah disetor ke kas negara tanggal 11 Februari 2020 dengan NTPN D5D691JNEPHFCEN)</i>			
239	111821 524111	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran Beban Perjalanan Biasa	1.000.000	1.000.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian Belanja Perjudin Biasa Pelaksanaan Rekrutmen SDM PKH Pegganti Tahun 2019 Gel. 3 yang disetor tanggal 12 Februari 2020 dengan NTPN 86CC961QTUDFK63Q)</i>			
240	115212 521213	Piutang Lainnya Beban Honor Output Kegiatan	3.300.000	3.300.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas kelebihan pembayaran honor SDM PKH Bln Desember 2019 pdp PKH Akses Kab Pulau Taliabu Kec Ledo An. Suhartini, posisi per 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga, telah disetor ke kas negara tanggal 26 Februari 2020 dengan NTPN ECADA61QTUDSSULQ)</i>			
241	594212 116212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	16.500	16.500	
		<i>(Jurnal Penyisihan Piutang atas kelebihan pembayaran honor SDM PKH Bln Desember 2019 pdp PKH Akses Kab Pulau Taliabu Kec Ledo An. Suhartini, posisi per 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga)</i>			
242	115212 521213	Piutang Lainnya Beban Honor Output Kegiatan	10.400.000	10.400.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas kelebihan pembayaran honor SDM PKH Bln September - Desember 2019 pdp PKH Kota Banjarmasin A.n Muliani, posisi per 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga, telah disetor ke kas negara tanggal 28 Februari 2020 NTPN 80CF661QTUDS61A6)</i>			
243	594212 116212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	52.000	52.000	
		<i>(Jurnal Penyisihan Piutang atas Kelebihan pembayaran Honor SDM PKH Bln September - Desember 2019 pdp PKH Kota Banjarmasin A.n Muliani, posisi per 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga)</i>			
244	115212 574111	Piutang Lainnya Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	9.575.000	9.575.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas pengembalian Hasil Temuan Inspektorat Jenderal tentang Penyalahgunaan Dana Bansos KPM PKH oleh PDP Sosial PKH Kec. Musik kab. Boyolali telah disetor ke kas negara tanggal 13 Januari 2020 dengan NTPN 0B6807QLTJF74C0C)</i>			
245	594212 116212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	47.875	47.875	
		<i>(Jurnal Penyisihan Piutang atas pengembalian Hasil Temuan Inspektorat Jenderal tentang Penyalahgunaan Dana Bansos KPM PKH oleh PDP Sosial PKH Kec. Musik kab. Boyolali)</i>			
246	115212 521213	Piutang Lainnya Beban Honor Output Kegiatan	200.000	200.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas kelebihan pembayaran Honor SDM PKH bulan November Th 2019 An Arief Rahman Pdp PKH Kab Sumenep, posisi per 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga, telah disetor ke kas negara tanggal 3 Januari 2020 dengan NTPN 12CF21JNEPE9OLS1)</i>			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
247	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	1.000		
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		1.000	
		<i>(Jurnal Penyisihan Piutang atas kelebihan pembayaran Honor SDM PKH bulan November Th 2019 An Arief Rahman Pdp PKH Kab Sumenep, posisi per 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga)</i>			
248	115212	Piutang Lainnya	8.400.000		
	521213	Beban Honor Output Kegiatan		8.400.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Kelebihan pembayaran Honor SDM PKH Bln Januari -Maret Th 2019 a.n Srijuliate pdp PKH Kab Katingan, posisi per 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga, yang telah disetor ke kas negara tanggal 8 Januari 2020 dengan NTPN FD4908N3DE1D0IPV)</i>			
249	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	42.000		
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		42.000	
		<i>(Jurnal Penyisihan Piutang atas kelebihan pembayaran Honor SDM PKH Bln Januari -Maret Th 2019 a.n Srijuliate pdp PKH Kab Katingan, posisi per 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga)</i>			
250	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	190.000		
	521213	Beban Honor Output Kegiatan		190.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian Belanja Honor Tim Assesmen Calon SDM PKH Th 2019 Gelombang 2 yang disetor tanggal 27 Januari 2020 dengan NTPN B08BD6U8DOT6F3OV)</i>			
251	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	53.356.000		
	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		53.356.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian Belanja Barang Perjudin Paket Meeting Luar Kota Keg Bimbingan Pemantapan e-PKH Tahap V Tahun 2019 yang disetor tanggal 28 Januari 2020 dengan NTPN 7AE6A6U8DOTAH60H)</i>			
252	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	193.533.000		
	524111	Beban Perjalanan Biasa		193.533.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian Belanja Barang Kegiatan Penanganan Pengaduan Tahap I Tahun 2019 yang disetor tanggal 31 Januari 2020 dengan NTPN 4A4926U8DOTDKM77)</i>			
253	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	13.653.180		
	524111	Beban Perjalanan Biasa		13.653.180	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian Belanja Barang Kegiatan Konsolidasi Tahap 4 Tahun 2019 yang disetor tanggal 31 Januari 2020 dengan NTPN F99CA3CIEEISLVJ)</i>			
254	425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial TAYL	16.005.883.385		
	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran		16.005.883.385	
		<i>(Jurnal Balik Koreksi data Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran pada LK Unaudited 2019 untuk KKS 2017 BRI karena dana tersebut masih terdapat pada rekening Penerima Manfaat sehingga tidak memenuhi definisi Kas Lainnya dan Setara Kas)</i>			
255	425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial TAYL	65.434.627.179		
	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran		65.434.627.179	
		<i>(Jurnal Balik Koreksi data Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran pada LK Unaudited 2019 KKS 2018 pada Bank BRI karena dana tersebut masih terdapat pada rekening Penerima Manfaat sehingga tidak memenuhi definisi Kas Lainnya dan Setara Kas)</i>			
256	425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial TAYL	8.898.325.785		
	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran		8.898.325.785	
		<i>(Jurnal Balik atas Jurnal Unaudited untuk KKS TIDAK TERDISTRIBUSI TLHP LK 2018 PADA BANK BRI karena dana tersebut masih terdapat pada rekening Penerima Manfaat sehingga tidak memenuhi definisi Kas Lainnya dan Setara Kas)</i>			
257	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	23.014.949.361		
	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran		23.014.949.361	
		<i>(Jurnal Balik atas Jurnal Unaudited 2019 atas KKS tidak terdistribusi PDTT tahun 2019 pada Bank BRI sebanyak 17.861 KKS karena dana tersebut masih terdapat pada rekening Penerima Manfaat sehingga tidak memenuhi definisi Kas Lainnya dan Setara Kas)</i>			
258	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	13.033.396.163		
	163119	Dana Lainnya		13.033.396.163	
		<i>(Jurnal Balik atas Koreksi Dana Dibatasi Penggunaannya Bank BRI 2019 dari LK Unaudited 2019 karena dana tersebut masih terdapat pada rekening Penerima Manfaat sehingga tidak memenuhi definisi Dana Lainnya)</i>			
259	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	33.499.804.340		
	163119	Dana Lainnya		33.499.804.340	
		<i>(Jurnal Balik Koreksi Dana Dibatasi Penggunaannya Bank BNI 2019 dari LK Unaudited 2019 sebanyak 68,772 KKS karena dana tersebut masih terdapat pada rekening Penerima Manfaat sehingga tidak memenuhi definisi Dana Lainnya)</i>			
260	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	56.456.812.691		
	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran		56.456.812.691	
		<i>(Jurnal Balik Koreksi LK UNAUDITED 2019 atas KKS TIDAK TERDISTRIBUSI PDTT TAHUN 2019 PADA BANK BNI sebanyak 309,259 KKS karena dana tersebut masih terdapat pada rekening Penerima Manfaat sehingga tidak memenuhi definisi Kas Lainnya dan Setara Kas)</i>			
261	425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial TAYL	1.476.203.278		
	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran		1.476.203.278	
		<i>(Jurnal Balik Koreksi atas Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran atas data LK Unaudited 2019 KKS 2017 BTN karena dana tersebut masih terdapat pada rekening Penerima Manfaat sehingga tidak memenuhi definisi Kas Lainnya dan Setara Kas)</i>			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
262	425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial TAYL	649.380.929		
	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran		649.380.929	
		<i>(Jurnal Balik Koreksi atas Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran LK Unaudited 2019 KKS 2018 pada Bank BTN karena dana tersebut masih terdapat pada rekening Penerima Manfaat sehingga tidak memenuhi definisi Kas Lainnya dan Setara Kas)</i>			
263	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	192.463.100		
	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran		192.463.100	
		<i>(Jurnal Balik Koreksi LK UNAUDITED 2019 atas KKS TIDAK TERDISTRIBUSI PDDT TAHUN 2019 PADA BANK BTN sebanyak 2,028 KKS karena dana tersebut masih terdapat pada rekening Penerima Manfaat sehingga tidak memenuhi definisi Kas Lainnya dan Setara Kas)</i>			
264	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	171.678.564		
	163119	Dana Lainnya		171.678.564	
		<i>(Jurnal Balik Koreksi Dana Dibatasi Penggunaannya Bank BTN 2019 dari LK Unaudited 2019 karena dana tersebut masih terdapat pada rekening Penerima Manfaat sehingga tidak memenuhi definisi Dana Lainnya)</i>			
265	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	3.509.779.638		
	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran		3.509.779.638	
		<i>(Jurnal Balik Koreksi LK UNAUDITED 2019 atas KKS TIDAK TERDISTRIBUSI PDDT TAHUN 2019 PADA BANK Mandiri sebanyak 1,777 KKS karena dana tersebut masih terdapat pada rekening Penerima Manfaat sehingga tidak memenuhi definisi Kas Lainnya dan Setara Kas)</i>			
266	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	11.811.949.407		
	163119	Dana Lainnya		11.811.949.407	
		<i>(Jurnal Balik Koreksi Dana Dibatasi Penggunaannya Bank Mandiri 2019 dari LK Unaudited 2019 sebanyak 5,442 KKS karena dana tersebut masih terdapat pada rekening Penerima Manfaat sehingga tidak memenuhi definisi Dana Lainnya)</i>			
		UKE I Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial / DINAS SOSIAL KALIMANTAN BARAT			
267	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	69.000.000		
	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya		69.000.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian belanja operasional keg. pendamping PKH Tahun 2019 yang disetor 17 Januari 2020 dengan NTPN BA1557QLTJFCG7P1)</i>			
268	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	2.000.000		
	524111	Beban Perjalanan Biasa		2.000.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian belanja perjalanan dinas keg PKH Tahun 2019 yang disetor 17 Januari 2020 dengan NTPN 781406U8DOT14NN1)</i>			
269	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	12.000.000		
	524111	Beban Perjalanan Biasa		12.000.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian belanja perjalanan dinas Kegiatan PKH Tahun 2019 yang disetor tanggal 17 Januari 2020 dengan NTPN 568823CIEEJF8NP)</i>			
		UKE I Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial / DINAS SOSIAL JAWA TIMUR			
270	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	60.783.500		
	524111	Beban Perjalanan Biasa		60.783.500	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas pengembalian belanja barang perjalanin asistensi koordinasi wilayah Tahun 2019 yang disetor 20 Januari 2020 dengan NTPN A783F2G4UK162BF4)</i>			
271	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	4.000.000		
	521211	Beban Bahan		4.000.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian belanja bahan utk ATK dan dokumentasi pelaporan kab/kota Tahap 4 Tahun 2019 yang disetor 13 Januari 2020 dengan NTPN 7AC6C48VU950HB9Q)</i>			
272	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	9.667.500		
	521213	Beban Honor Output Kegiatan		9.667.500	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian Belanja Honor Tim Sekretariat PKH Kab/Kota Tahap 4 Tahun 2019 yang disetor 13 Januari 2020 dengan NTPN 4A3F63CIEEJC4HPK)</i>			
273	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	1.128.000		
	521213	Beban Honor Output Kegiatan		1.128.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian Belanja Honor petugas gudang logistik kota surabaya sebanyak 2 orang tahun 2019 yang disetor tanggal 22 Januari 2020 dengan NTPN 323321JNEPERQB0N)</i>			
274	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	1.264.000		
	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		1.264.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian Belanja fullboard keg.rapat penyusunan laporan logistik tahap 2 tahun 2019 yang disetor tanggal 13 Januari 2020 dengan NTPN FC4E20N9U5U4UQFP)</i>			
275	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	29.625.000		
	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		29.625.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian Belanja Perjalanin monitoring dan evaluasi kab/kota tahun 2019 yang disetor tanggal 13 Januari 2020 dengan NTPN 242B12G4UK0VNVU)</i>			
276	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	896.000		
	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		896.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian Belanja Perjalanin kegiatan PSKBA Tahun 2019 yang disetor tanggal 22 Januari 2020 dengan NTPN FDB1E61QTUAPRFO)</i>			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
277	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	2.250.000		
	521211	Beban Bahan		2.250.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian belanja bahan perlengkapan peserta keg. Workshop Komplementaritas PKH Tahap 2 Tahun 2019 yang disetor 13 Januari 2020 dengan NTPN 82DF955DE302VR1D)</i>			
278	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	2.581.000		
	521211	Beban Bahan		2.581.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian belanja bahan perlengkapan peserta keg. Rakor PKH Tahap 2 Tahun 2019 yang disetor tanggal 13 Januari 2020 dengan NTPN 249A22G4UK0TQC3)</i>			
279	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	2.904.000		
	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		2.904.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian Belanja fullboard keg. Rakor PKH Tahap 2 Tahun 2019 yang disetor tanggal 13 Januari 2020 dengan NTPN EE8132G4UK0TORCK)</i>			
280	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	2.592.000		
	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		2.592.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian Belanja fullboard keg. Workshop Komplementaritas PKH Tahap 2 Tahun 2019 yang disetor 13 Januari 2020 dengan NTPN CF4DE7QLTJF86RHP)</i>			
		UKE I Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial/ DINAS SOSIAL SULAWESI SELATAN			
281	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	3.829.000		
	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		3.829.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas pengembalian belanja barang perjalan paket meeting luar kota utk transport keg. PSKBA Logistik Angkatan 11 Tahun 2019 yang disetor 13 Februari 2020 dengan NTPN 6D4E50N9UUV56HOO)</i>			
282	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	2.620.297		
	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya		2.620.297	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian belanja barang non operasional lainnya utk transport kegiatan Jambore PSKBA Tahun 2019 yang disetor tanggal 13 Februari 2020 dengan NTPN DFFF67QLTJ8EMT2)</i>			
		UKE I Ditjen PFM/ 418941 - Setditjen PFM			
283	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.567.500		
	524111	Beban Perjalanan Biasa		1.567.500	
		<i>(Jurnal penyesuaian atas pengembalian Belanja Barang Kegiatan Pameran HKS2019 yang disetor tanggal 17 Januari 2020 No NTPN 8415B6U8DOT15P43)</i>			
284	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	100.000		
	524111	Beban Perjalanan Biasa		100.000	
		<i>(Jurnal penyesuaian atas pengembalian Belanja Barang Keg.Rekonsiliasi Barang Milik Negara ke Lokasi "Tahap 2" yang sudah disetor tahun 2020 yang disetor tanggal 17 Januari 2020 No NTPN C1F566U8DOT15P01)</i>			
		UKE I Ditjen PFM/ 418942 - Dit. PFM Wilayah I			
285	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	2.917.600.000		
	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya		2.917.600.000	
		<i>(Jurnal balik atas penyajian tunggakan insentif pendamping pada Dit PFM Wil I di LK Unaudited)</i>			
286	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.724.600.000		
	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		2.724.600.000	
		<i>(Jurnal penyesuaian atas nilai utang Intensif pendamping Dit PFM Wil I sesuai dengan LHR BPKP No:LHR-27/D203/1/2020 tanggal 3 Maret 2020)</i>			
287	391119	Koreksi Lainnya	55.550.000		
	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		55.550.000	
		<i>(Jurnal balik atas perubahan data Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2018 terhadap dana bantuan sosial hasil pemeriksaan)</i>			
288	575111	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk uang	535.955.473.039		
	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		535.955.473.039	
		<i>(Jurnal balik atas perubahan data Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2019 terhadap dana bantuan sosial hasil pemeriksaan)</i>			
289	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	142.470.473.716		
	391119	Koreksi Lainnya		142.470.473.716	
		<i>(Jurnal penyesuaian atas perubahan data Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2018 terhadap dana bantuan sosial hasil pemeriksaan dengan rincian Saldo Escrow 2018 sebesar Rp141.790.480.635 dan Timeout transaction Bank Mandiri 2018 yang berada di Rekening Simpanan Sementara Bank Mandiri di BNI sebesar Rp679.993.081)</i>			
290	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	652.403.412.824		
	575111	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk uang		652.403.412.824	
		<i>(Jurnal penyesuaian atas perubahan data Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2019 terhadap dana bantuan sosial hasil pemeriksaan dengan rincian saldo escrow 2019 sebesar Rp115.650.420.330; saldo RPL (netto) 2019 sebesar Rp534.333.094.483; timeout transaction bank Mandiri 2019 yang berada di rekening simpanan sementara bank mandiri di BNI sebesar Rp348.378.011; dan saldo di Rekening PNPL Tahun 2019 di PNPL/GNC Bank Mandiri sebesar Rp2.071.520.000)</i>			
291	575111	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk uang	237.699.930.494		
	163119	Dana Lainnya		237.699.930.494	
		<i>(Jurnal balik atas hasil pemeriksaan dan analisa atas rekening pemerintah lainnya (RPL) Tahun 2019, diketahui bahwa masih terdapat dana BPNT 3 tahap penyaluran terakhir (Tahap X, Tahap XI, dan Tahap XII) yang masih bisa disalurkan di Tahun 2020, yaitu sebesar Rp218.933.563.267. Dalam LK unaudited, dana dibatasi penggunaannya sebesar Rp237.699.930.494)</i>			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
292	163119	Dana Lainnya	218.933.563.267		
	575111	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk uang		218.933.563.267	
		<i>(Jurnal penyesuaian atas hasil pemeriksaan dan analisa atas rekening pemerintah lainnya (RPL) Tahun 2019, diketahui bahwa masih terdapat dana BPNT 3 tahap penyaluran terakhir (Tahap X, Tahap XI, dan Tahap XII) yang masih bisa disalurkan di Tahun 2020, yaitu sebesar Rp218.933.563.267. Dalam LK unaudited, dana dibatasi penggunaannya sebesar Rp237.699.930.494)</i>			
		UKE I Ditjen PFM/ 418942 - Dit. PFM Wilayah II			
293	391119	Koreksi Lainnya	112.200.000		
	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		112.200.000	
		<i>(Jurnal balik atas perubahan data Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2018 terhadap dana bantuan sosial hasil pemeriksaan)</i>			
294	575111	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk uang	216.122.889.850		
	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		216.122.889.850	
		<i>(Jurnal balik atas perubahan data Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2019 terhadap dana bantuan sosial hasil pemeriksaan)</i>			
295	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	83.995.601.114		
	391119	Koreksi Lainnya		83.995.601.114	
		<i>(Jurnal penyesuaian atas perubahan data Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2018 terhadap dana bantuan sosial hasil pemeriksaan dengan rincian Saldo Escrow 2017 sebesar Rp974.400.027; Saldo Escrow 2018 sebesar Rp79.229.793.451; dan Timeout transaction Bank Mandiri 2018 yang berada di rekening simpanan sementara bank mandiri di BNI sebesar Rp3.791.407.636)</i>			
296	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	331.491.743.867		
	575111	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk uang		331.491.743.867	
		<i>(Jurnal penyesuaian atas perubahan data Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2019 terhadap dana bantuan sosial hasil pemeriksaan dengan rincian saldo escrow 2019 sebesar Rp84.251.506.385; saldo RPL (netto) 2019 sebesar Rp243.003.310.275; timeout transaction bank Mandiri 2019 yang berada di rekening simpanan sementara bank mandiri di BNI sebesar Rp592.737.207; dan saldo di Rekening PNPL Tahun 2019 di PNPL/GNC Bank Mandiri sebesar Rp3.644.190.000)</i>			
297	575111	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk uang	272.526.224.648		
	163119	Dana Lainnya		272.526.224.648	
		<i>(Jurnal balik atas hasil pemeriksaan dan analisa atas rekening pemerintah lainnya (RPL) Tahun 2019, diketahui bahwa masih terdapat dana BPNT 3 tahap penyaluran terakhir (Tahap X, Tahap XI, dan Tahap XII) yang masih bisa disalurkan di Tahun 2020, yaitu sebesar Rp160.572.852.879. Dalam LK unaudited, dana dibatasi penggunaannya sebesar Rp272.526.224.648)</i>			
298	163119	Dana Lainnya	160.572.852.879		
	575111	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk uang		160.572.852.879	
		<i>(Jurnal koreksi atas hasil pemeriksaan dan analisa atas rekening pemerintah lainnya (RPL) Tahun 2019, diketahui bahwa masih terdapat dana BPNT 3 tahap penyaluran terakhir (Tahap X, Tahap XI, dan Tahap XII) yang masih bisa disalurkan di Tahun 2020, yaitu sebesar Rp160.572.852.879. Dalam LK unaudited, dana dibatasi penggunaannya sebesar Rp272.526.224.648)</i>			
		UKE I Ditjen PFM/ 418942 - Dit. PFM Wilayah III			
299	575111	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk uang	195.278.555.990		
	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		195.278.555.990	
		<i>(Jurnal balik atas perubahan data Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2019 terhadap dana bantuan sosial hasil pemeriksaan)</i>			
300	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	72.914.311.838		
	391119	Koreksi Lainnya		72.914.311.838	
		<i>(Jurnal penyesuaian atas perubahan data Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2018 terhadap dana bantuan sosial hasil pemeriksaan dengan rincian Saldo Escrow 2018 sebesar Rp72.060.300.678; dan Timeout transaction Bank Mandiri 2018 yang berada di rekening simpanan sementara bank mandiri di BNI sebesar Rp854.011.160)</i>			
301	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	330.164.167.441		
	575111	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk uang		330.164.167.441	
		<i>(Jurnal penyesuaian atas perubahan data Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2019 terhadap dana bantuan sosial hasil pemeriksaan dengan rincian saldo escrow 2019 sebesar Rp8.783.222.338; saldo RPL (netto) 2019 sebesar Rp318.066.742.403; timeout transaction bank Mandiri 2019 yang berada di rekening simpanan sementara bank mandiri di BNI sebesar Rp112.652.700; dan saldo di Rekening PNPL Tahun 2019 di PNPL/GNC Bank Mandiri sebesar Rp3.201.550.000)</i>			
302	575111	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk uang	257.479.539.232		
	163119	Dana Lainnya		257.479.539.232	
		<i>(Jurnal balik atas hasil pemeriksaan dan analisa atas rekening pemerintah lainnya (RPL) Tahun 2019, diketahui bahwa masih terdapat dana BPNT 3 tahap penyaluran terakhir (Tahap X, Tahap XI, dan Tahap XII) yang masih bisa disalurkan di Tahun 2020, yaitu sebesar Rp169.547.890.443. Dalam LK unaudited, dana dibatasi penggunaannya sebesar Rp257.479.539.232)</i>			
303	163119	Dana Lainnya	169.547.890.443		
	575111	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam bentuk uang		169.547.890.443	
		<i>(Jurnal penyesuaian atas hasil pemeriksaan dan analisa atas rekening pemerintah lainnya (RPL) Tahun 2019, diketahui bahwa masih terdapat dana BPNT 3 tahap penyaluran terakhir (Tahap X, Tahap XI, dan Tahap XII) yang masih bisa disalurkan di Tahun 2020, yaitu sebesar Rp169.547.890.443. Dalam LK unaudited, dana dibatasi penggunaannya sebesar Rp257.479.539.232)</i>			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
		UKE I Ditjen PFM/ 418963 - DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG			
304	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	3.000.000		
	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		3.000.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian kelebihan uang harian paket meeting fullboard Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal tahun 2019 yang disetorkan pada tanggal 8 Januari 2020 No NTPN 49EBE1JNEPECVBLP)</i>			
305	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	3.800.000		
	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		3.800.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian kelebihan Transport Peserta Bimtek Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal tahun 2019 yang disetorkan pada tanggal 8 Januari 2020 No NTPN 49EBE1JNEPECVBLP)</i>			
306	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.000.000		
	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		5.000.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian Kelebihan Paket Meeting Fullboard Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal tahun 2019 yang disetorkan pada tanggal 8 Januari 2020 No NTPN 49EBE1JNEPECVBLP)</i>			
307	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	7.500.000		
	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya		7.500.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian Kelebihan pembelian papan nama KUBE atas Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal tahun 2019 yang disetorkan pada tanggal 8 Januari 2020 No NTPN 49EBE1JNEPECVBLP)</i>			
		UKE I BP3KS/ 682040 - Pusbangprof Peksos			
308	115212	Piutang Lainnya	3.570.000		
	521213	Beban Honor Output Kegiatan		3.570.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas kelebihan pembayaran Honor Pengarah dan Penanggung Jawab TIM PAK Bulan Mei s/d Juli karena Kabadan (Pak H.Z.S) tidak mau menerima honor tersebut karena sudah tidak menjabat sebagai Kabadan, posisi per 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga dan telah disetorkan ke kas negara pada 17 Januari 2020 No NTPN B2C720N9UUS96PK2)</i>			
309	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	17.850		
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		17.850	
		<i>(Jurnal Penyisihan piutang atas Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian Honor Pengarah dan Penanggung Jawab TIM PAK Bulan Mei s/d Juli karena Kabadan (Pak H.Z.S) tidak mau menerima honor tersebut karena sudah tidak menjabat sebagai Kabadan, posisi per 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga)</i>			
310	115212	Piutang Lainnya	30.000		
	522151	Beban Jasa Profesi		30.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas kelebihan pembayaran Honor Narasumber Penyusunan Revisi Permenpan ttg JF Peksos, posisi per 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga dan telah disetorkan ke kas negara pada 7 Januari 2020 No NTPN C9F9E3CIEE140JH)</i>			
311	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	150		
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		150	
		<i>(Jurnal Penyisihan piutang atas Jurnal Penyesuaian atas Pengembalian Honor Narasumber Penyusunan Revisi Permenpan ttg JF Peksos karena kelebihan pengajuan pencairan posisi per 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga)</i>			
312	115212	Piutang Lainnya	65.463.572		
	524111	Beban Perjalanan Biasa		65.463.572	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Kelebihan Perjalanan Dinas Tahun 2019, posisi per 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga, dan telah disetor 9 kali pada bulan Januari 2020 Rincian tanggal 17 Januari 2020 NTPN D21F42G4UK120RPG sebesar Rp2.000.000; tanggal 16 Januari 2020 NTPN F48D355DE3077RAJ sebesar Rp635.000; tanggal 7 Januari 2020 NTPN 19DAD1JNEPEBULV9 sebesar Rp17.803.972; tanggal 7 Januari 2020 NTPN 50B87QTIJF2PJ06 sebesar Rp1.350.000; tanggal 7 Januari 2020 NTPN 51CCB6U8DOSMCKUB sebesar Rp40.651.400; tanggal 7 Januari 2020 NTPN 54A6961QTUA9VJBC sebesar Rp776.700; tanggal 7 Januari 2020 NTPN A415655DE3NTIINL sebesar Rp419.500; tanggal 7 Januari 2020 NTPN 06F3F6U8DOSMCIHP sebesar Rp265.000; tanggal 7 Januari 2020 NTPN 454DE48VU95H5GII sebesar Rp1.562.000)</i>			
313	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	327.318		
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		327.318	
		<i>(Jurnal Penyisihan piutang atas Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Tahun 2019, posisi 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga)</i>			
314	115212	Piutang Lainnya	4.049.000		
	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		4.049.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Tahun 2019, posisi 31 Desember 2019 uang berada di pihak ketiga dan telah disetor 2 kali pada tanggal 16 Januari 2020 NTPN C45728N3DE1OUETD sebesar Rp3.539.000 dan tanggal 17 Januari 2020 NTPN C68DC7QLTJFCHEUO SEBESAR Rp510.000)</i>			
315	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	20.245		
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		20.245	
		<i>(Jurnal Penyisihan piutang atas Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Tahun 2019, posisi 31 Desember 2019 uang berada di pihak ketiga)</i>			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
316	115212	Piutang Lainnya	47.971.800		
	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		47.971.800	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Tahun 2019, posisi 31 Desember 2019 uang berada di pihak ketiga dan telah disetor 7 kali bulan Januari 2020 tanggal 7 Januari 2020 No NTPN FFA157QLTJF2PLEU sebesar Rp11.130.000; tanggal 7 Januari 2020 NTPN 3C1733CIEEIAOJV9 sebesar Rp2.564.000; TANGGAL 7 Januari 2020 NTPN 7DD3A7QLTJF2PIAU sebesar Rp1.350.000; tanggal 7 Januari 2020 NTPN A94530N9UURVHLKA sebesar Rp31.117.800; tanggal 8 Januari 2020 NTPN OD1CB55DE3NUMQ8L sebesar Rp360.000; Tanggal 16 Januari 2020 NTPN A14950N9UUS96Q8C sebesar Rp600.000; Tanggal 16 Januari 2020 NTPN 70C867QLTJFCEPVI sebesar Rp850.000)</i>			
317	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	239.859		
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		239.859	
		<i>(Jurnal Penyisihan Piutang atas Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Tahun 2019, posisi 31 Desember 2019 uang berada di pihak ketiga)</i>			
318	115212	Piutang Lainnya	607.100		
	511111	Beban Gaji Pokok PNS		607.100	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Kelebihan Pembayaran Gaji dari bulan Januari s/d April 2019 posisi 31 Desember 2019 uang berada di pihak ketiga dan telah disetorkan pada 4 Maret 2020 No NTPN NTPNA4FD055DE3TPAJ1)</i>			
319	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	3.036		
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		3.036	
		<i>(Jurnal Penyisihan Piutang atas Kelebihan Pembayaran Gaji dari bulan Januari s/d April 2019 posisi 31 Desember 2019 uang berada di pihak ketiga)</i>			
		UKE I BP3KS/ 369752 - BBPPKS Banjarmasin			
320	115212	Piutang Lainnya	3.131.505		
	512411	Beban Pegawai		3.131.505	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Desember 2019 posisi per 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga, dan telah disetorkan 20 Januari 2020 No NTPN CD23C1JNERFPMN6V)</i>			
321	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	15.658		
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		15.658	
		<i>(Jurnal Penyisihan Piutang atas Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Desember 2019 posisi per 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga)</i>			
322	115212	Piutang Lainnya	6.931.100		
	512411	Beban Pegawai		6.931.100	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Kelebihan Pembayaran Gaji a.n Evi Budiarti Tahun 2019, Posisi per 31 Desember berada di pegawai, dan disetorkan ke kas negara tanggal 15 Januari 2020 No NTPN 9B2E50N9UUS7VF9Q)</i>			
323	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	34.656		
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		34.656	
		<i>(Jurnal Penyisihan Piutang atas Kelebihan Pembayaran Gaji a.n Evi Budiarti Tahun 2019, Posisi per 31 Desember berada di pegawai)</i>			
		UKE I BP3KS/440326 - PUSDIKLAT KESOS			
324	115212	Piutang Lainnya	165.427.800		
	524111	Beban Perjalanan Biasa		165.427.800	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Tahun 2019 posisi per 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga, dan telah disetorkan ke kas Negara tanggal 28 Januari 2020 NTPN BA3162G4UK1CDTJ6 DAN OECEC1JNEPF00VCL sebesar Rp1.782.000 dan Rp11.500, tanggal 3 Februari 2020 NTPN 065CC48VU98EA3CE sebesar Rp5.045.600, Tanggal 3 Februari 2020 NTPN BD3922G4UK3LG7PU sebesar Rp5.500, tanggal 6 Februari 2020 NTPN FB4363CIEEM1T8J sebesar Rp242.500, tanggal 3 Februari 2020 NTPN D57B27QLTJHVUA46 sebesar Rp70.000, tanggal 3 Februari 2020 NTPN 544560N9UUSMAF6 sebesar Rp2.380.000,-, tanggal 3 Februari 2020 NTPN 774216U8DOVJHBK9 sebesar Rp3.495.000 ; tanggal 4 Februari 2020 dengan NTPN 13F813CIEEM2VNSI sebesar Rp139.703.100, NTPN 0F7301JNEPHAS47 sebesar Rp8.734.000, dan NTPN 50D18N3DE4DDON1 sebesar Rp3.958.600)</i>			
325	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	827.139		
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		827.139	
		<i>(Jurnal Penyisihan piutang atas Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Tahun 2019 posisi per 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga)</i>			
326	115212	Piutang Lainnya	520.000		
	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		520.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Tahun 2019 posisi per 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga, dan telah disetorkan 2 kali bulan Februari 2020 tanggal 4 Februari 2020 NTPN 6702A8N3DE4DEK8J sebesar Rp300.000 dan tanggal 7 Februari 2020 dengan NTPN C72FD7QLTJJI17415 Rp220.000,-)</i>			
327	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	2.600		
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		2.600	
		<i>(Jurnal Penyisihan Piutang atas Kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Tahun 2019 posisi per 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga)</i>			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
328	115212	Piutang Lainnya	15.340.000		
	522151	Beban Jasa Profesi		15.340.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Kelebihan Belanja Jasa Profesi posisi per 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga dan telah disetorkan pada tanggal 28 Januari 2020 dengan NTPN B9D8D61QTUUAU24K0 sebesar Rp3.135.000, NTPN 2DAAA7QLTJFMS6VC sebesar Rp1.330.000; NTPN C05C755DE3OHL5CV sebesar Rp950.000, tanggal 3 Februari 2020 NTPN 96D951NPH9369P sebesar Rp280.000, NTPN EAC4C0N9UUUSM6JO sebesar Rp85.000,- NTPN C3B746U8DOVJH8T3 sebesar Rp510.000 dan tanggal 7 Februari 2020 NTPN DFES248VU98FJAB0 sebesar Rp910.000, NTPN E024B3CIEEM369KF sebesar Rp1.700.000, NTPN E488E6U8DOVKQ5SJ sebesar Rp1.080.000, NTPN CDD08C48VU98F5SH sebesar Rp280.000, NTPN D7C2D0N9UUUTV1UO sebesar Rp3.570.000,-, NTPN B0805N9UUUTV38U sebesar Rp160.000,- dan tanggal 19 Februari 2020 dengan NTPN 633F63CIEEMDISHI sebesar Rp1.350.000,-)</i>			
329	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	76.700		
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		76.700	
		<i>(Jurnal Penyisihan Piutang atas Kelebihan Belanja Jasa Profesi posisi per 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga)</i>			
330	115212	Piutang Lainnya	136.227.967		
	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		136.227.967	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Tahun 2019 posisi per 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga dan telah disetorkan 4 kali Bulan Januari 2020 DENGAN NTPN 8D1512G4UK1CE1NM sebesar Rp3.700.000,-, NTPN F57556U8DOTAF0BF sebesar Rp150.000, NTPN C971C0N9UUSJK526 sebesar Rp2.400.000, NTPN B1C222G4UK1CE6NM sebesar Rp1.200.000; tanggal 3 FEBRUARI NTPN.1FFE61QTUD73L95 sebesar Rp25.146.200, NTPN 052A87QLTJHVU91G sebesar Rp220.000; NTPN B21298N3DE4CB1H7 sebesar Rp27.563.800; tanggal 7 Februari 2020 dengan NTPN F511C6U8DOVKQ8GL sebesar Rp1.535.000; NTPN 3646c61QTUD8D8DG sebesar Rp22.488.700; NTPN 654F161QTUD8D9C0 sebesar Rp10.194.400; NTPN 37FF848VU98F169A sebesar Rp19.420.299; NTPN CF9AD3CIEEM363KJ sebesar Rp318.268; NTPN 7D3208N3DE4DK4C7 sebesar Rp21.891.300)</i>			
331	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	681.140		
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		681.140	
		<i>(Jurnal Penyisihan Piutang atas Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Tahun 2019 posisi per 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga)</i>			
332	115212	Piutang Lainnya	220.000		
	521213	Beban Honor Output Kegiatan		220.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Kelebihan pembayaran Belanja Honor Pengajar Latsar posisi per 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga dan telah disetorkan 2 kali bulan Februari 2020 tanggal 7 Februari 2020 NTPN 77FC47QLTJ17AUG sebesar Rp150.000 dan NTPN A26F23CIEEM362FN sebesar Rp70.000)</i>			
333	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	1.100		
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		1.100	
		<i>(Jurnal Penyisihan atas Kelebihan pembayaran Belanja Honor Pengajar Latsar posisi per 31 Desember 2019 berada di pihak ketiga)</i>			
334	117124	Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau diserahkan kepada masyarakat	14.571.860.780		
	526112	Beban Peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda		14.571.860.780	
		<i>(Jurnal kiriman aplikasi persediaan atas hasil Opsik karena terdapat toolkit yang belum disalurkan kepada pendamping PKH per 31/12/2019. Berdasarkan hasil inventarisasi, diketahui bahwa dari 21.900 paket toolkit, sebanyak 4.606 set telah terdistribusi ke pendamping PKH per 31/12/2019, sebanyak 10.436 set toolkit baru terdistribusi ke pendamping PKH di tahun 2020, dan sebanyak 6.858 set belum terdistribusi (masih berada di Dinsos Kab/Kota/Sekretariat UPPKH)</i>			
335	117124	Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau diserahkan kepada masyarakat	27.492.000		
	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat		27.492.000	
		<i>(Jurnal kiriman aplikasi persediaan atas Koreksi Otomatis Pencatatan Beban Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat yang berasal dari kesalahan akun belanja pada Harga Satuan Paket di Jayapura dari 1.897.670 menjadi 981.270 sehingga terdapat selisih 916.400x15 unit Toolkit=13.746.000 dan Nabire dari 1.897.670 menjadi 981.270 sehingga terdapat selisih 916.400x15 unit Toolkit=13.746.000)</i>			
336	593311	Beban penyesuaian Nilai Persediaan	27.492.000		
	117124	Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau diserahkan kepada masyarakat		27.492.000	
		<i>(Jurnal kiriman Aplikasi Persediaan atas Koreksi Otomatis Pencatatan Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat atas Harga Satuan Paket karena kesalahan akun belanja di Jayapura dari 1.897.670 menjadi 981.270 sehingga terdapat selisih 916.400x15 unit Toolkit=13.746.000 dan Nabire dari 1.897.670 menjadi 981.270 sehingga terdapat selisih 916.400x15 unit Toolkit=13.746.000)</i>			
337	526112	Beban Peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	14.571.860.780		
	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat		14.571.860.780	
		<i>(Jurnal Penyesuaian untuk mengoreksi 526112 menjadi 593124 karena kesalahan pembentukan jurnal kirim di aplikasi Persediaan)</i>			
338	521211	Beban Bahan	3.242.000		
	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		3.242.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian untuk mengoreksi kesalahan penggunaan akun belanja barang persediaan yang digunakan untuk belanja bahan yang terdiri dari pembelian ATK Rp1.000.000; Konsumsi Rapat Pertemuan Rp1.242.000; Computer Supply Rp500.000; dan Pengadaan Bahan sebesar Rp500.000)</i>			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
339	524113 593311	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	8.400.000	8.400.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian untuk mengoreksi kesalahan penggunaan akun belanja barang persediaan yang digunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota yang terdiri dari Transport Pertemuan Rp2.250.000; dan Uang Saku Rapat Dalam Kantor sebesar Rp6.150.000)</i>			
340	521213 593311	Beban Honor Output Kegiatan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	15.850.000	15.850.000	
		<i>(Jurnal Penyesuaian untuk mengoreksi kesalahan penggunaan akun belanja barang persediaan yang digunakan untuk belanja Honor Output Kegiatan yang terdiri dari Honor Tim Pokja sebesar Rp9.550.000 dan Honor Penerima Hasil pekerjaan sebesar Rp6.300.000)</i>			
		UKE I BP3KS/369059 Sekretariat BP3KS			
341	115212 521219	Piutang Lainnya Beban Barang Non Operasional Lainnya	19.507.800	19.507.800	
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Kelebihan Pembayaran Belanja Non Operasional Lainnya-(Short Course) Tahun 2019 karena ada tugas yg Urgency selaku Sekretaris (Pak H.L.G) maka Beliau harus segera kembali ke Indonesia yang seharusnya 14 hari, menjadi pulang lebih awal dan telah disetorkan 30 Maret 2020 NTPN 750502G4UK7E9JBA dan NTB 200330013898)</i>			
342	594212 116212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lainnya	97.539	97.539	
		<i>(Jurnal Penyisihan piutang atas Kelebihan Pembayaran Belanja Non Operasional Lainnya-(Short Course) Tahun 2019 karena ada tugas yg Urgency selaku Sekretaris (Pak H.L.G) maka Beliau harus segera kembali ke Indonesia yang seharusnya 14 hari, menjadi pulang lebih awal)</i>			
		UKE I BP3KS/ 369084 - BBPPKS Bandung			
343	137211 591211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	389.047.845	389.047.845	
		<i>(Koreksi atas Transaksi Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
344	137211 391116	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	39.590.484	39.590.484	
		<i>(Koreksi atas Transaksi Normalisasi BMN)</i>			
345	137211 591211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	12.500.424	12.500.424	
		<i>(Koreksi atas Transaksi Normalisasi BMN)</i>			
346	391116 137211	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	38.680.746	38.680.746	
		<i>(Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
347	591211 137211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	12.206.754	12.206.754	
		<i>(Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
348	591211 137211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	389.060.124	389.060.124	
		<i>(Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
349	132211 522141	Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister Beban Sewa	80.128.500	80.128.500	
		<i>(Jurnal Penyesuaian Koreksi BPK atas belanja barang kegiatan Diklat P2K2 pada BBPPKS Bandung yang digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin tersebut ada dan dalam kondisi baik)</i>			
350	132111 132211	Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin yang Belum Diregister	80.128.500	80.128.500	
		<i>(Jurnal Kiriman aplikasi SIMAK BMN Koreksi BPK atas belanja barang kegiatan Diklat P2K2 pada BBPPKS Bandung digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin tersebut ada dan dalam kondisi baik)</i>			
351	591111 137111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	9.184.100	9.184.100	
		<i>(Jurnal Kiriman Aplikasi SIMAK BMN atas Beban Penyusutan terkait belanja barang kegiatan Diklat P2K2 pada BBPPKS Bandung digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp80.128.500. Peralatan dan mesin tersebut ada dan dalam kondisi baik)</i>			
		UKE I BP3KS/ BBPPKS Jayapura			
352	391151 132111	Koreksi atas Reklasifikasi Aset Tetap/Aset Lainnya Peralatan dan Mesin	107.237.500	107.237.500	
		<i>(Jurnal Kiriman Aplikasi SIMAK BMN Koreksi BPK atas reklasifikasi dari akun Intrakomptabel peralatan dan mesin menjadi akun Ekstrakomptabel peralatan dan mesin. Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp101.237.500,- dan nilai pajak sebesar Rp6.000.000,-)</i>			
353	595112 391151	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin Koreksi atas Reklasifikasi Aset Tetap/Aset Lainnya	107.237.500	107.237.500	
		<i>(Jurnal Penyesuaian untuk mencatat Reklasifikasi aset tetap peralatan mesin menjadi aset ekstrakomptabel atas rekomendasi BPK. Nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp101.237.500,- dan nilai pajak sebesar Rp6.000.000,-)</i>			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
354	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	10.723.750		
	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		10.723.750	
		<i>(Jurnal Kiriman Aplikasi SIMAK BMN Koreksi BPK atas penyesuaian nilai penyusutan dari neraca dan LO akibat reklasifikasi akun intrakomptabel ke ekstrakomptabel dengan nilai penyusutan Rp10.723.750)</i>			
		KOREKSI AUDITED SETELAH TANGGAL 21 APRIL 2020 (Bantuan Sosial)			
		UKE I Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial/ DIT RS LU			
355	115212	Piutang Lainnya	458.400.000		Koreksi Audited
	571111	Beban Bantuan Sosial untuk rehabilitasi Sosial dalam bentuk uang		458.400.000	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pencatatan Piutang Lainnya atas Penerima Manfaat yang tidak mencairkan bantuan dimana posisi per 31 Desember 2019 dana bansos berada di Rekening penerima bansos Bantu Lu Surat Perintah Pengembalian ke Kas Negara tanggal 10 Februari 2020; Berita Acara Penelitian tanggal 10 Februari 2020; dan disetor ke kas Negara 11 Februari 2020 No NTPN 779B148VU981PRQ8 sebesar Rp458.400.000)</i>			
356	115212	Piutang Lainnya	372.000.000		Koreksi Audited
	571111	Beban Bantuan Sosial untuk rehabilitasi Sosial dalam bentuk uang		372.000.000	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pencatatan Piutang Lainnya atas Penerima Manfaat yang tidak mencairkan bantuan dimana posisi per 31 Desember 2019 dana bansos berada di Rekening Penerima Bansos Dukungan Keluarga Surat Perintah Pengembalian ke Kas Negara tanggal 10 Februari 2020 Berita Acara Penelitian tanggal 10 Februari 2020 dan disetor ke kas Negara 11 Februari 2020 No NTPN A97D155DE3R26U17 sebesar Rp372.000.000)</i>			
357	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	4.152.000		Koreksi Audited
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		4.152.000	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Penyisihan atas Piutang Lainnya)</i>			
		UKEI Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial/ Direktorat Rehsos Penyandang Disabilitas			
358	115212	Piutang Lainnya	7.650.119.797		Koreksi Audited
	571111	Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Uang		7.650.119.797	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Umum SAIBA atas Pengembalian Belanja BANSOS T.A 2019. Telah disetorkan pada tanggal 27 Maret 2020 sebesar 7.291.101.462 dengan NTPN B59443CIEEPMNOOT berdasarkan berita acara hasil penelitian terhadap penyaluran dana bansos asistensi sosial penyandang disabilitas (ASPD) tahun 2019 tanggal 1 April 2020. Kemudian disetor pada tanggal 14 April 2020 NTPN 7025D55DE412HA4L sebesar Rp355.418.335 berdasarkan surat perintah penyetoran ke kas negara Nomor B.334/Kemosos/4.3/BS.01.02/4/2020 tanggal 2 April 2020. Selanjutnya disetor pada tanggal 8 April 2020 NTPN 56CF28N3DEAE2MRL sebesar Rp3.600.000 berdasarkan surat perintah penyetoran ke kas negara Nomor 336/Kemosos/4.3/BS.01.02/4/2020 tanggal 3 April 2020)</i>			
359	115212	Piutang Lainnya	250.272.111		Koreksi Audited
	571111	Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dalam Bentuk Uang		250.272.111	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Umum SAIBA atas Pengembalian Dana Alat Bantu Disabilitas T.A 2019 yang disetorkan pada tanggal 27 Maret 2020) Nomor NTPN C74281JNEPKTOR3</i>			
360	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	39.501.960		Koreksi Audited
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		39.501.960	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Penyisihan atas Piutang Lainnya)</i>			
		UKEI Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial/ Dit RS Anak			
361	115212	Piutang Lainnya	109.000.000		Koreksi Audited
	571111	Beban Bantuan Sosial untuk rehabilitasi Sosial dalam bentuk uang		109.000.000	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Pencatatan Piutang Lainnya atas Penerima Manfaat yang tidak mencairkan bantuan dimana posisi per 31 Desember 2019 dana bansos berada di Rekening Penerima Bansos Surat Perintah Pengembalian ke Kas Negara tanggal 6 Februari 2020; Berita Acara Hasil Penelitian terhadap Penyaluran Dana Bansos Rehsos Anak tanggal 4 Februari 2020 dan disetor ke kas Negara tanggal 7 Februari 2020 No NTPN 976A52G4UK3OSH30)</i>			
362	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	545.000		Koreksi Audited
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		545.000	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Penyisihan atas Piutang Lainnya)</i>			
		UKE I Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial/ Dit. Jamsoske			
363	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	168.425.000		Koreksi Audited
	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang		168.425.000	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas saldo KKS Tidak Terdistribusi tahun 2019 yang masih berada di rekening GNC Bank Mandiri per 31 Desember 2019 dengan nomor rekening 991.0000.144.924, dan telah dikembalikan ke kas negara pada tanggal 23 Maret 2020 NTPN D8C8C5U8DP3392EJ)</i>			
364	111821	Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	1.440.183.550		Koreksi Audited
	391119	Koreksi Lainnya		1.440.183.550	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas saldo KKS Tidak Terdistribusi tahun 2017 dan 2018 yang masih berada di rekening GNC Bank Mandiri per 31 Desember 2019 dengan nomor rekening 991.0000.144.924, dan telah dikembalikan ke kas negara pada tanggal 23 Maret 2020 NTPN D8C8C5U8DP3392EJ)</i>			
365	115212	Piutang Lainnya	31.889.559.116		Koreksi Audited
	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang		31.889.559.116	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 untuk mengakui Piutang Lainnya di BNI atas saldo KKS tidak Terdistribusi sampai dengan 31 Desember 2019 yang telah dilakukan perintah pengembalian ke kas negara melalui surat Nomor 581/3.4/BS.02.01/4/2020 tanggal 16 April 2020 senilai Rp47.796.967.559,- dan Nomor 583/3.4/PS.04.02/4/2020 tanggal 16 April 2020 senilai Rp15.553.472.340,- dan telah dikembalikan ke kas negara oleh BNI pada tanggal 20 April 2020 sebesar Rp47.796.967.559,- dengan NTPN 26EF61JNEPNKODP1; dan tanggal 21 April sebesar Rp15.553.472.340,- dengan NTPN 5B23661QTUJ11844)</i>			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
366	115212	Piutang Lainnya	31.460.880.783		Koreksi Audited
	391119	Koreksi Lainnya		31.460.880.783	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Beban Bantuan Sosial Tahun 2016-2018 untuk mengakui Piutang Lainnya di BNI atas saldo KKS tidak Terdistribusi sampai dengan 31 Desember 2019 yang telah dilakukan perintah pengembalian ke kas negara melalui surat Nomor 581/3.4/BS.02.01/4/2020 tanggal 16 April 2020 senilai Rp47.796.967.559,- dan Nomor 583/3.4/PS.04.02/4/2020 tanggal 16 April 2020 senilai Rp15.553.472.340,- dan telah dikembalikan ke kas negara oleh BNI pada tanggal 20 April 2020 sebesar Rp47.796.967.559,- NTPN 26EF61JNEPNKODP1; dan tanggal 21 April sebesar Rp15.553.472.340,- NTPN 5B2366IQTUJI1B44)</i>			
367	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	316.752.199		Koreksi Audited
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		316.752.199	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal penyisihan piutang atas pengakuan Piutang Lainnya terhadap adanya KKS tidak Terdistribusi di BNI)</i>			
368	115212	Piutang Lainnya	64.707.145.840		Koreksi Audited
	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang		64.707.145.840	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 untuk mengakui Piutang Lainnya di BNI atas saldo Rekening KPM yang Tidak Bertransaksi sampai dengan 31 Desember 2019 yang telah dilakukan perintah pengembalian ke kas negara dengan Nomor Surat 639/3/BS.01.01/4/2020 tanggal 29 April 2020 senilai Rp64.707.145.840,-)</i>			
369	115212	Piutang Lainnya	25.266.961.963		Koreksi Audited
	391119	Koreksi Lainnya		25.266.961.963	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Beban Bantuan Sosial Tahun 2016-2018 untuk mengakui Piutang Lainnya di BNI atas saldo Rekening KPM yang Tidak Bertransaksi sampai dengan 31 Desember 2019 yang telah dilakukan perintah pengembalian ke kas negara dengan Nomor Surat .639/3/BS.01.01/4/2020 tanggal 29 April 2020 senilai Rp25.266.961.963,-)</i>			
370	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	449.870.539		Koreksi Audited
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		449.870.539	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal penyisihan piutang atas pengakuan Piutang Lainnya terhadap adanya saldo Rekening KPM yang Tidak Bertransaksi di BNI)</i>			
371	115212	Piutang Lainnya	102.864.201.018		Koreksi Audited
	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang		102.864.201.018	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 untuk mengakui Piutang Lainnya di BRI atas saldo Rekening KPM yang Tidak Bertransaksi sampai dengan 31 Desember 2019 yang telah dilakukan perintah pengembalian ke kas negara dengan Nomor Surat 640/3.4/BS .02.04/4/2020 tanggal 29 April 2020 senilai Rp102.864.201.018)</i>			
372	115212	Piutang Lainnya	93.851.642.778		Koreksi Audited
	391119	Koreksi Lainnya		93.851.642.778	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Penyesuaian atas Beban Bantuan Sosial Tahun 2016-2018 untuk mengakui Piutang Lainnya di BRI atas saldo Rekening KPM yang Tidak Bertransaksi sampai dengan 31 Desember 2019 yang telah dilakukan perintah pengembalian ke kas negara dengan Nomor Surat 640/3.4/BS .02.04/4/2020 tanggal 29 April 2020 senilai Rp93.851.642.778,-)</i>			
373	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya	983.579.219		Koreksi Audited
	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Lainnya		983.579.219	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal penyisihan piutang atas pengakuan Piutang Lainnya terhadap adanya saldo Rekening KPM yang Tidak Bertransaksi di BRI)</i>			
		KOREKSI AUDITED SETELAH TANGGAL 21 APRIL 2020 (Revaluasi Aset Tetap Tindakanlanjutan Temuan)			
		UKE I Sekretariat Jenderal/ Satker Biro Umum			
374	391114	Revaluasi Aset Tetap	47.236.317.000		Koreksi Audited
	131111	Tanah		47.236.317.000	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas koreksi transaksi 225)</i>			
375	131111	Tanah	47.236.317.000		Koreksi Audited
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		47.236.317.000	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas koreksi transaksi 334)</i>			
376	131111	Tanah	47.231.259.000		Koreksi Audited
	391114	Revaluasi Aset Tetap		47.231.259.000	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Aplikasi atas Koreksi Kesalahan input IP)</i>			
377	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	47.231.259.000		Koreksi Audited
	131111	Tanah		47.231.259.000	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi)</i>			
		UKE I Sekretariat Jenderal/ Satker Sekretariat Jenderal			
378	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	42.870.023.000		Koreksi Audited
	131111	Tanah		42.870.023.000	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Aplikasi atas koreksi transaksi 247)</i>			
379	131111	Tanah	42.864.965.000		Koreksi Audited
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		42.864.965.000	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Aplikasi atas Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi)</i>			
		UKE I Ditjen Pemberdayaan Sosial/ Satker K2KRS			
380	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.238.430.253		Koreksi Audited
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		1.238.430.253	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Aplikasi atas koreksi Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
381	133111	Gedung dan Bangunan	9.084.132.000		Koreksi Audited
	391114	Revaluasi Aset Tetap		9.084.132.000	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas koreksi transaksi 225)</i>			
382	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	266.453.794		Koreksi Audited
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		266.453.794	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas koreksi transaksi 228)</i>			
383	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	133.226.897		Koreksi Audited
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		133.226.897	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas koreksi transaksi 228)</i>			
384	391114	Revaluasi Aset Tetap	24.049.731.000		Koreksi Audited
	133111	Gedung dan Bangunan		24.049.731.000	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Aplikasi atas Koreksi Kesalahan input IP)</i>			
385	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	588.294.634		Koreksi Audited
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		588.294.634	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
386	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	294.147.317		Koreksi Audited
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		294.147.317	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
387	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.077.509.833		Koreksi Audited
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		1.077.509.833	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Aplikasi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
		UKE I Ditjen Rehabilitasi Sosial/ Satker BRSEGP Pangudi Luhur Bekasi			
388	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	379.556.155		Koreksi Audited
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		379.556.155	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas koreksi Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
389	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	370.881.169		Koreksi Audited
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		370.881.169	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Aplikasi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
390	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	809.457.827		Koreksi Audited
	133111	Gedung dan Bangunan		809.457.827	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Aplikasi atas Koreksi Pencatatan Barang yang tidak ditemukan)</i>			
391	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	124.133.920		Koreksi Audited
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		124.133.920	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Aplikasi atas Koreksi Pencatatan Barang yang tidak ditemukan)</i>			
		UKE I Ditjen Rehabilitasi Sosial/ Satker BRSPDF Wirajaya Makassar			
392	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	676.383.402		Koreksi Audited
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		676.383.402	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Aplikasi atas koreksi Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
393	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	586.534.246		Koreksi Audited
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		586.534.246	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Aplikasi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
394	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	5.325.241.102		Koreksi Audited
	133111	Gedung dan Bangunan		5.325.241.102	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Aplikasi atas Koreksi Pencatatan Barang yang tidak ditemukan)</i>			
395	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.730.893.101		Koreksi Audited
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		4.730.893.101	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Aplikasi atas Koreksi Pencatatan Barang yang tidak ditemukan)</i>			
		UKE I Ditjen Rehabilitasi Sosial/ Satker BBRVPD Cibinong			
396	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	33.194.457		Koreksi Audited
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		33.194.457	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Transaksi Normalisasi BMN)</i>			
397	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	157.618.002		Koreksi Audited
	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		157.618.002	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Transaksi Normalisasi BMN)</i>			
398	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	218.196		Koreksi Audited
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		218.196	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Transaksi Normalisasi BMN)</i>			
399	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	11.064.819		Koreksi Audited
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		11.064.819	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Transaksi Normalisasi BMN)</i>			
400	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	52.539.333		Koreksi Audited
	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		52.539.333	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Transaksi Normalisasi BMN)</i>			
401	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	72.732		Koreksi Audited
	591312	Beban Penyusutan Irigasi		72.732	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Transaksi Normalisasi BMN)</i>			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
402	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	560.391.028		Koreksi Audited
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		560.391.028	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Aplikasi atas koreksi Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
403	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	1.263.015		Koreksi Audited
	591312	Beban Penyusutan Irigasi		1.263.015	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Aplikasi atas koreksi Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
404	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	561.503.267		Koreksi Audited
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		561.503.267	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Aplikasi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
405	591312	Beban Penyusutan Irigasi	1.650.207		Koreksi Audited
	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		1.650.207	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Aplikasi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
406	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	22.368.885		Koreksi Audited
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		22.368.885	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
407	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	157.618.002		Koreksi Audited
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		157.618.002	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
408	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	9.047.280		Koreksi Audited
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		9.047.280	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
409	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.456.289		Koreksi Audited
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		7.456.289	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
410	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	52.539.333		Koreksi Audited
	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan		52.539.333	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
411	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	3.015.759		Koreksi Audited
	591312	Beban Penyusutan Irigasi		3.015.759	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
		UKE I Ditjen Rehabilitasi Sosial/ Satker BRAMPK Alyatama Jambi			
412	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	860.946.000		Koreksi Audited
	131111	Tanah		860.946.000	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi transaksi 245)</i>			
413	131111	Tanah	873.785.000		Koreksi Audited
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		873.785.000	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Nilai Barang Berlebih)</i>			
		UKE I Ditjen Rehabilitasi Sosial/ Satker BRSLU Gau Mabaji			
414	391114	Revaluasi Aset Tetap	77.133.129.000		Koreksi Audited
	131111	Tanah		77.133.129.000	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi transaksi 225)</i>			
415	391114	Revaluasi Aset Tetap	24.871.000		Koreksi Audited
	131111	Tanah		24.871.000	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Aplikasi atas Koreksi Kesalahan input IP)</i>			
		UKE I Ditjen Rehabilitasi Sosial/ Satker BRSPDSN Tuma Tou Manado			
416	391114	Revaluasi Aset Tetap	1.543.894.000		Koreksi Audited
	133111	Gedung dan Bangunan		1.543.894.000	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi transaksi 225)</i>			
417	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	103.274.268		Koreksi Audited
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		103.274.268	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi transaksi 228)</i>			
418	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	34.424.757		Koreksi Audited
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		34.424.757	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi transaksi 228)</i>			
419	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	212.909.628		Koreksi Audited
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		212.909.628	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
420	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	198.655.280		Koreksi Audited
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		198.655.280	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
421	133111	Gedung dan Bangunan	888.194.000		Koreksi Audited
	391114	Revaluasi Aset Tetap		888.194.000	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Kesalahan input IP)</i>			
422	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	60.511.224		Koreksi Audited
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		60.511.224	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
423	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	20.170.409		Koreksi Audited
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		20.170.409	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
		UKE I Ditjen Rehabilitasi Sosial/ Satker BRSPDN Galih Pakuan Bogor			
424	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	44.801.225		Koreksi Audited
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		44.801.225	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi transaksi 228)</i>			
425	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.933.739		Koreksi Audited
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		14.933.739	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi transaksi 228)</i>			
426	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	821.856.727		Koreksi Audited
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		821.856.727	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
427	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	823.584.828		Koreksi Audited
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		823.584.828	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
428	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	141.726.044		Koreksi Audited
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		141.726.044	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
429	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	47.242.012		Koreksi Audited
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		47.242.012	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
		UKE I Ditjen Rehabilitasi Sosial/ Satker BRSPDN Mahatmya Bali			
430	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	186.689.100		Koreksi Audited
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		186.689.100	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi transaksi 228)</i>			
431	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	61.752.812		Koreksi Audited
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		61.752.812	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi transaksi 228)</i>			
432	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	242.722.316		Koreksi Audited
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		242.722.316	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
433	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	262.444.551		Koreksi Audited
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		262.444.551	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
434	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	340.657.905		Koreksi Audited
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		340.657.905	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
435	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	114.029.523		Koreksi Audited
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		114.029.523	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
		UKE I Ditjen Rehabilitasi Sosial/ Satker BRS Eks WTS Mulya Jaya Jakarta			
436	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3.667.653.600		Koreksi Audited
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		3.667.653.600	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi transaksi 228)</i>			
437	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	55.007.530		Koreksi Audited
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		55.007.530	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi transaksi 228)</i>			
438	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	734.623.495		Koreksi Audited
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		734.623.495	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
439	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	736.546.567		Koreksi Audited
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		736.546.567	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
440	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.739.462.448		Koreksi Audited
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		3.739.462.448	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
441	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	78.943.813		Koreksi Audited
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		78.943.813	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
		UKE I Ditjen Rehabilitasi Sosial/ Satker BLBI Abiyoso Bandung			
442	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	175.278.520		Koreksi Audited
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		175.278.520	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
443	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	175.712.552		Koreksi Audited
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		175.712.552	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
444	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	14.323.062		Koreksi Audited
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		14.323.062	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
445	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.774.354		Koreksi Audited
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		4.774.354	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
UKE I Linjamsos/ Satker Dit. PSKBA					
446	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	27.660		Koreksi Audited
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		27.660	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Aplikasi atas koreksi transaksi 228)</i>			
447	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.220		Koreksi Audited
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		9.220	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Aplikasi atas koreksi transaksi 228)</i>			
448	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	60.481.920		Koreksi Audited
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		60.481.920	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Aplikasi atas koreksi Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
449	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	167.521.073		Koreksi Audited
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		167.521.073	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
450	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	55.840.357		Koreksi Audited
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		55.840.357	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
451	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	63.079.575		Koreksi Audited
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		63.079.575	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal Aplikasi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
UKE I BP3KS/ BBPPKS Banjarmasin					
452	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.221.514.396		Koreksi Audited
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		1.221.514.396	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas koreksi Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
453	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	136.183.286		Koreksi Audited
	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan		136.183.286	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas koreksi Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
454	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	3.893.266		Koreksi Audited
	591312	Beban Penyusutan Irigasi		3.893.266	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas koreksi Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
455	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	868.530		Koreksi Audited
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		868.530	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi transaksi 228)</i>			
456	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	289.510		Koreksi Audited
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		289.510	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi transaksi 228)</i>			
457	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.543.697		Koreksi Audited
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		4.543.697	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
458	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	904.246.072		Koreksi Audited
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		904.246.072	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
459	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	2.278.770		Koreksi Audited
	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		2.278.770	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
460	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.514.565		Koreksi Audited
	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		1.514.565	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
461	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	301.415.357		Koreksi Audited
	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan		301.415.357	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
462	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	759.590		Koreksi Audited
	591312	Beban Penyusutan Irigasi		759.590	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Koreksi Penyusutan Karena 225)</i>			
463	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.221.594.850		Koreksi Audited
	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		1.221.594.850	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
464	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	256.749.429		Koreksi Audited
	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		256.749.429	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			

JURNAL USULAN KOREKSI AUDITED LK KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2019

NO	Kode Akun	URAIAN AKUN	DEBET	KREDIT	KETERANGAN
465	591312	Beban Penyusutan Irigasi	3.951.696		Koreksi Audited
	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		3.951.696	Koreksi Audited
		<i>(Jurnal aplikasi atas Penyusutan/Amortisasi Reguler Semesteran)</i>			
		TOTAL	5.332.967.467.277	5.332.967.467.277	

#KEMENSOS
Hadir

RINGKASAN



www.kemsos.go.id



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2019 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasi yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp516.740.242.519 atau mencapai 4296,61% dari estimasi pendapatan sebesar Rp12.026.705.400

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2019 sebesar Rp57.726.645.452.081 atau mencapai 97,78% dari alokasi anggaran belanja sebesar Rp59.039.206.791.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp23.976.767.785.089 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp2.826.435.382.669; Aset Tetap (Netto) sebesar Rp20.585.091.991.225; dan Aset Lainnya (Netto) sebesar Rp565.240.411.195.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp7.274.988.246 dan Rp23.969.492.796.843.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp25.193.017.948 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah Rp55.614.241.904.443 sehingga defisit dari kegiatan operasional sebesar (Rp55.589.048.886.495) Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp453.234.764.779 dan sebesar Rp0 sehingga Kementerian Sosial RI mengalami Defisit-LO sebesar (Rp55.135.814.121.716).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp5.978.367.271.420 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp55.135.814.121.716) ditambah/(dikurangi) dengan koreksi-koreksi yang mempengaruhi Ekuitas senilai Rp15.860.408.652.182 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp57.266.530.994.957 sehingga ekuitas Kementerian Sosial RI pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp23.969.492.796.843.



5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 disajikan dengan basis akrual.

#KEMENSOS
Hadir

LAPORAN REALISASI ANGGARAN



www.kemsos.go.id



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN SOSIAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

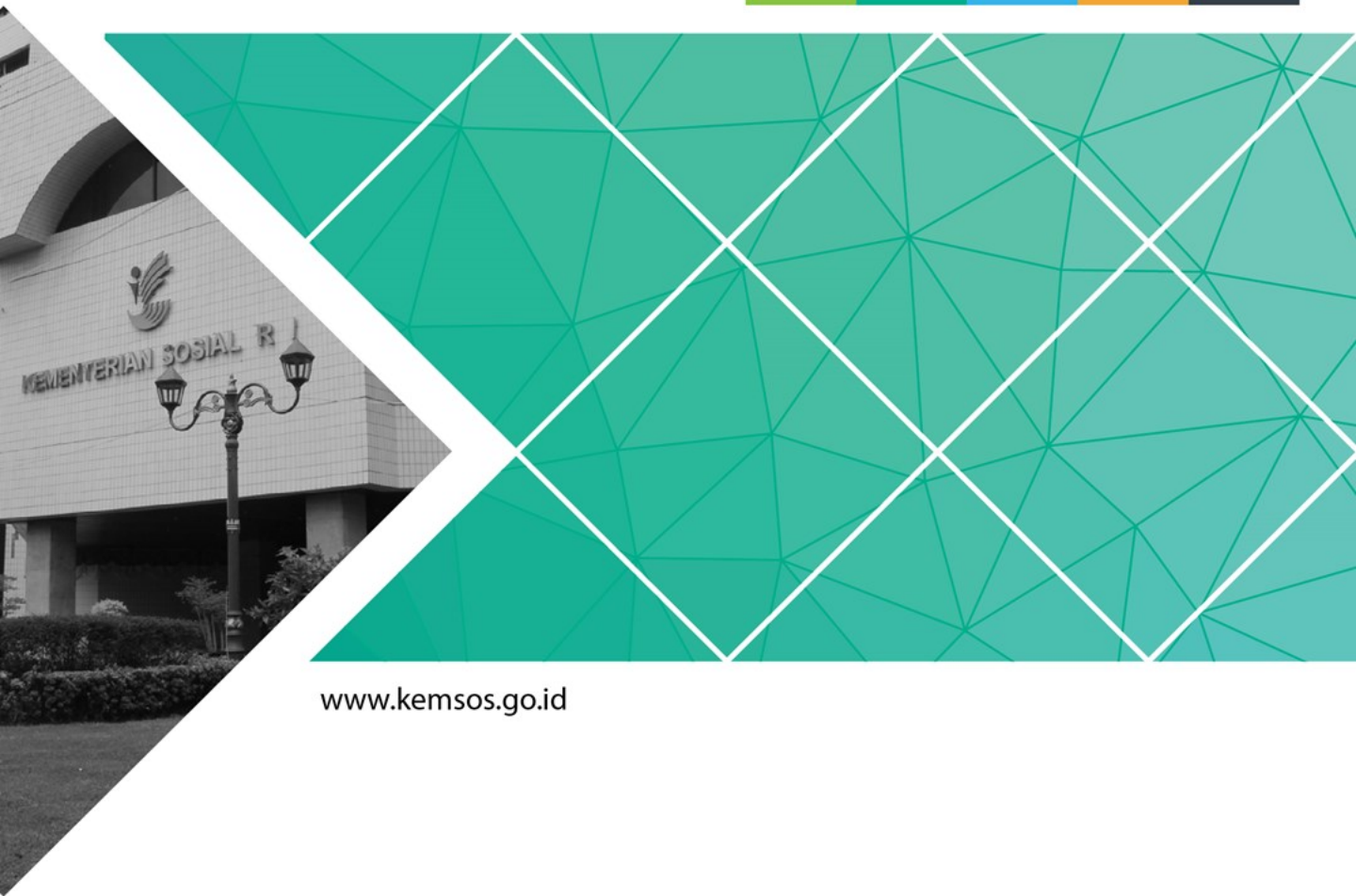
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019		% thd Anggaran	31 Desember 2018
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		12.026.705.400	516.740.242.519	4296,61	338.356.086.414
JUMLAH PENDAPATAN		12.026.705.400	516.740.242.519	4296,61	338.356.086.414
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	489.387.325.000	480.617.558.411	98,21	471.787.790.216
Belanja Barang	B.4	3.814.831.867.000	3.665.853.868.269	96,09	3.472.332.616.879
Belanja Modal	B.5	322.514.274.000	319.344.518.246	99,02	134.171.280.952
Belanja Bantuan Sosial	B.6	54.412.473.325.000	53.260.829.507.155	97,88	37.155.851.182.997
JUMLAH BELANJA		59.039.206.791.000	57.726.645.452.081	97,78	41.234.142.871.044

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

#KEMENSOS
Hadir

NERACA



www.kemsos.go.id



II. NERACA

KEMENTERIAN SOSIAL
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

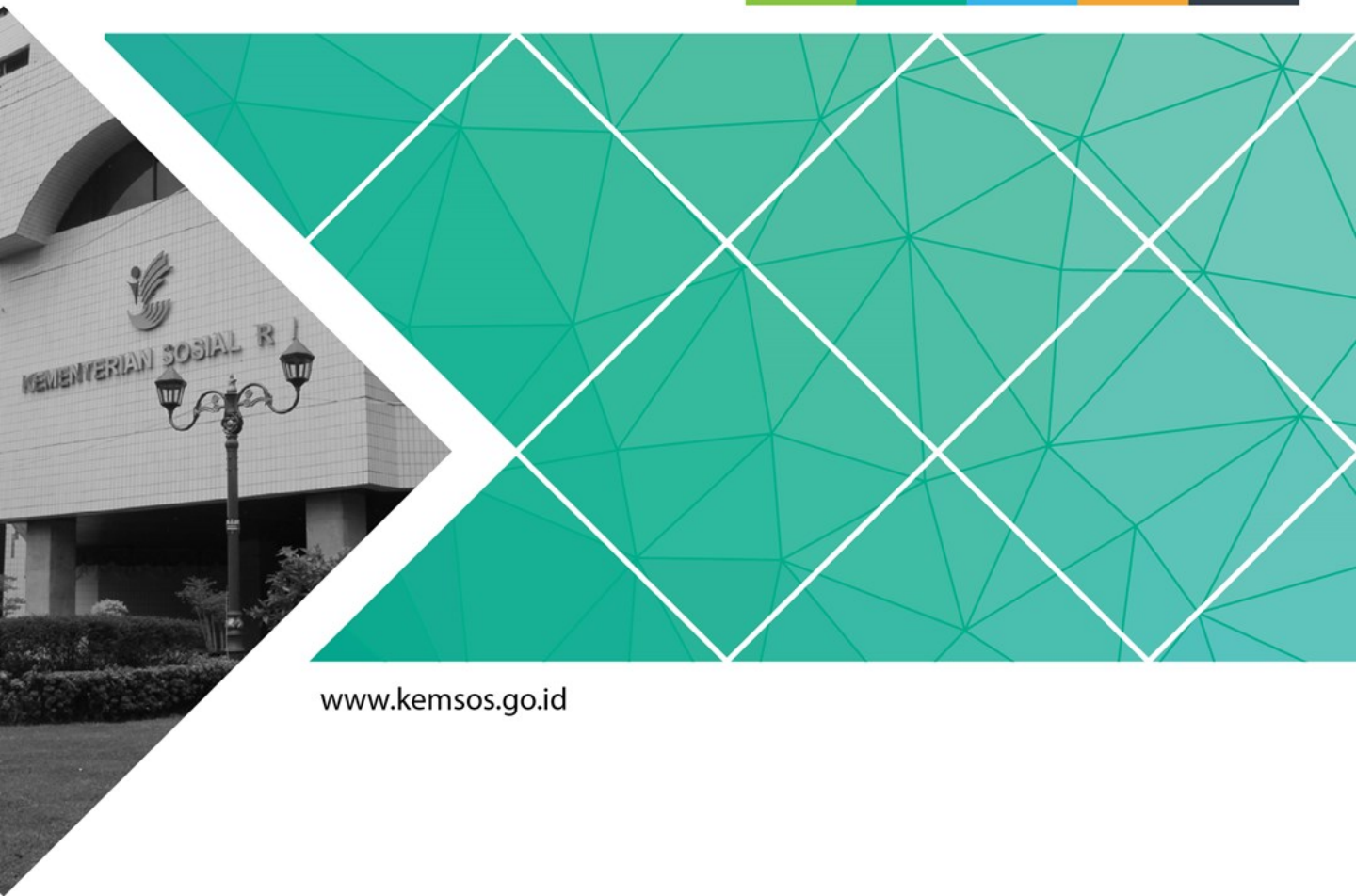
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	67.666.000	211.191.900
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	992.366.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	2.011.950.360.632	391.775.845.227
Belanja Dibayar di Muka	C.4	-	508.490.858
Piutang Bukan Pajak	C.5	360.334.178.898	343.275.773
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.6	(1.801.670.900)	(1.716.386)
Piutang Bukan Pajak (Neto)	C.7	358.532.507.998	341.559.387
Persediaan	C.8	455.884.848.039	451.765.319.891
JUMLAH ASET LANCAR		2.826.435.382.669	845.594.773.263
ASET TETAP			
Tanah	C.9	18.532.038.706.705	3.495.475.164.694
Peralatan dan Mesin	C.10	1.904.924.241.165	1.788.554.554.510
Gedung dan Bangunan	C.11	1.798.628.848.267	1.513.338.943.015
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.12	102.663.682.834	116.099.265.531
Aset Tetap Lainnya	C.13	21.990.010.062	14.798.697.676
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.14	281.836.313	623.272.587
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.15	(1.775.435.334.121)	(1.821.543.916.226)
JUMLAH ASET TETAP		20.585.091.991.225	5.107.345.981.787
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.16	98.538.827.706	94.613.896.087
Dana yg Dibatasi Penggunaannya	C.17	549.179.306.589	2.655.138.145
Aset Lain-Lain	C.18	26.297.974.644	27.417.688.583
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.19	(108.775.697.744)	(97.696.354.704)
JUMLAH ASET LAINNYA		565.240.411.195	26.990.368.111
JUMLAH ASET		23.976.767.785.089	5.979.931.123.161
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.20	4.702.361.654	1.205.917.841
Hibah yang Belum Disahkan	C.21	527.339.126	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.22	1.967.279.648	146.742.000
Uang Muka Dari KPPN	C.23	67.666.000	211.191.900
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.24	10.341.818	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		7.274.988.246	1.563.851.741
JUMLAH KEWAJIBAN		7.274.988.246	1.563.851.741
EKUITAS			
Ekuitas	C.25	23.969.492.796.843	5.978.367.271.420
JUMLAH EKUITAS		23.969.492.796.843	5.978.367.271.420
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		23.976.767.785.089	5.979.931.123.161

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

#KEMENSOS
Hadir

LAPORAN OPERASIONAL



www.kemsos.go.id



III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN SOSIAL
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan PNPB Lainnya	D.1	25.193.017.948	19.875.486.431
JUMLAH PENDAPATAN		25.193.017.948	19.875.486.431
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	480.563.464.039	471.370.541.398
Beban Persediaan	D.3	39.196.178.503	44.271.730.551
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.546.867.936.840	2.477.161.280.911
Beban Pemeliharaan	D.5	78.468.609.329	79.929.210.304
Beban Perjalanan Dinas	D.6	963.471.108.195	855.367.837.526
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	29.550.568.283	25.773.356.581
Beban Bantuan Sosial	D.8	51.221.474.250.664	37.255.869.069.772
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	252.849.834.076	242.521.247.609
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	1.799.954.514	(155.775.095)
JUMLAH BEBAN		55.614.241.904.443	41.452.108.499.557
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(55.589.048.886.495)	(41.432.233.013.126)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	1.447.303.661	(562.426.872)
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jk. Panjang		-	-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	451.787.461.118	285.594.170.903
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		453.234.764.779	285.031.744.031
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(55.135.814.121.716)	(41.147.201.269.095)
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	D.14	(55.135.814.121.716)	(41.147.201.269.095)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

#KEMENSOS
Hadir

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



www.kemsos.go.id



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN SOSIAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
Ekuitas Awal	E1	5.978.367.271.420	6.282.333.008.178
Surplus/Defisit Lo	E2	(55.135.814.121.716)	(41.147.201.269.095)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi		-	-
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E3	15.860.408.652.182	(120.504.149.420)
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E3.1	1.858.337.865	5.573.051.184
Koreksi Atas Reklasifikasi	E3.2	(936.795.743)	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E3.3	15.421.011.225.108	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E3.4	(12.754.363.462)	(125.665.910.604)
Koreksi Lain-Lain	E4	451.230.248.414	(411.290.000)
Transaksi Antar Entitas	E5	57.266.530.994.957	40.963.739.681.757
Ditagikan ke Entitas Lain	E5.1	57.636.484.135.381	41.163.912.263.928
Diterima dari Entitas Lain	E5.1	(516.740.242.519)	(338.356.086.414)
Transfer Keluar	E5.2	(718.750.608.475)	(1.006.407.534.481)
Transfer Masuk	E5.2	714.040.295.270	1.006.075.155.871
Pengesahan Hibah Langsung	E5.3	152.047.168.600	122.632.869.003
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	E5.3	-	16.298.000.000
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	E5.3	(549.753.300)	(414.986.150)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E6	17.991.125.525.423	(303.965.736.758)
Ekuitas Akhir	E7	23.969.492.796.843	5.978.367.271.420

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

#KEMENSOS
Hadir

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



www.kemsos.go.id



A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

Entitas dan

Rencana Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kementerian Sosial RI

Kebijakan tentang perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan telah diamanatkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD RI 1945. Salah satunya telah dirumuskan bahwa penduduk miskin dan rentan harus diberdayakan sesuai martabat dan asas kemanusiaan. Kondisi ini berarti bahwa tidak boleh ada penduduk Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya untuk hidup sejahtera. Pembukaan UUD RI 1945 menyebutkan "... membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia..., untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..." Selanjutnya Pasal 34 UUD RI 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, maka negara wajib mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bersifat nasional, komprehensif, dan mensejahterakan rakyat.

Hak konstitusional warga negara sesuai dengan UUD RI 1945, mengamanatkan kepada negara dalam hal ini pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dan PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dijelaskan bahwa "Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penduduk dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial", dalam rangka pengurangan penduduk miskin dan rentan.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagaimana Pasal 3 UU No 11/2009 memiliki 6 (enam) tujuan. Tiga diantaranya ditujukan bagi PMKS, dua lainnya pada PSKS, dan satu tujuan ditujukan pada manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota, maupun penduduk). Tujuan-tujuan tersebut adalah:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial penduduk dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian penduduk dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



Melalui pencapaian enam tujuan tersebut diharapkan dapat mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya perlindungan dan kesejahteraan sosial yang komprehensif, berkeadilan dan bermartabat.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2019 *Unaudited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kementerian Sosial RI menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Sosial RI dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2019 *Unaudited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Sosial RI adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

1. Pendapatan- LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

2. Pendapatan- LO

- a. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Sosial RI adalah sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - 2) Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - 3) Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- b. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan



oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- c. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Berdasarkan Surat KSAP Nomor S-35/K.1/KSAP/III/2018, belanja bantuan sosial diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara sebesar pembayaran belanja bantuan sosial yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam tahun anggaran tersebut atau dalam bentuk barang/jasa yang dianggarkan dan dibeli pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja bantuan sosial dimaksud disajikan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar nilai realisasi belanja.
- e. Belanja bantuan sosial yang telah terealisasi namun sampai tanggal pelaporan belum diterima oleh pihak yang berhak, belum dapat diakui sebagai beban bantuan sosial di Laporan Operasional. Dengan demikian, dalam laporan keuangan terdapat kemungkinan nilai belanja bantuan sosial pada Laporan Realisasi Anggaran tidak sama dengan nilai beban bantuan sosial pada Laporan Operasional, yaitu sebesar belanja bantuan sosial yang belum didistribusikan kepada masyarakat, baik berupa uang maupun barang.

Beban

4. Beban

- a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Berdasarkan Surat dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor S-35/K.1/KSAP/III/2018, dalam hal rekening yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial merupakan rekening milik lembaga penyalur atau rekening pemerintah pada lembaga penyalur, maka beban bantuan sosial diakui pada saat dana bantuan sosial tersebut disalurkan kepada penerima bantuan sosial. Penyaluran tersebut dapat dilakukan melalui pengambilan langsung tunai pada lembaga penyalur, transfer dana ke rekening milik penerima bantuan sosial, maupun penambahan saldo pada alat bayar elektronik atau uang elektronik yang dipersamakan yang dikuasai oleh penerima bantuan sosial.
- d. Terhadap sisa dana bantuan sosial yang belum tersalurkan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan yang berada di rekening milik lembaga penyalur atau rekening milik pemerintah pada lembaga penyalur serta entitas akuntansi/pelaporan yang mempunyai hak pengendalian atas dana tersebut, sisa dana bantuan sosial tersebut tidak dapat diakui sebagai beban bantuan sosial, namun disajikan sebagai:



- 1) Kas yang Dibatasi Penggunaannya, apabila sisa dana bantuan sosial tersebut akan disalurkan kembali kepada penerima;
 - 2) Kas Lainnya, apabila sisa dana bantuan sosial tersebut akan disetorkan ke rekening kas negara.
 - 3) Catatan atas Beban Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra)
- e. Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam bentuk barang Beras Sejahtera (Rastra) di Ditjen Penanganan Fakir Miskin diakui saat barang telah disalurkan di titik Daftar Penerima Manfaat 1 (DPM 1) yang berada di titik Distribusi sesuai dengan Pedoman Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera yang disusun oleh Tim Koordinasi Rastra Pusat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia hal. 41 huruf H No.1 bahwa Penyaluran Bansos Rastra dari TD ke TB sampai ke KPM menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan Bultek SAP Nomor 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrua hal. 21 no. 3 alinea ke 2 bahwa “Jika barang tersebut masih ada di lembaga penyalur lembaga non pemerintah dan berada di luar pengendalian pemerintah, maka barang yang tersisa tersebut diakui sebagai beban bansos dan tidak dapat diakui sebagai persediaan Satuan Kerja/SKPD”.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- 2) Kas Lainnya dan Setara Kas terkait dana Bantuan Sosial berdasarkan Surat dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor S-35/K.1/KSAP/III/2018 diakui apabila terdapat sisa dana bantuan sosial yang tidak dapat diakui sebagai beban bantuan sosial dan atas sisa dana bantuan sosial tersebut akan disetorkan ke rekening kas negara.
- 3) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 4) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 5) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- 6) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang



yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- 7) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- 8) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- 1) Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- 2) Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 3) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan



atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 4) Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Oaerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk obyek penilaian kembali selain Tanah.
- 5) Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- 6) Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 *Unaudited* sesuai mekanisme yang berlaku.
- 7) Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- 8) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak be rat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos



Aset Lainnya.

- 9) Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap **c. Penyusutan Aset Tetap**

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang **d. Piutang Jangka Panjang**

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.



Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 2) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 3) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- 4) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- 5) Dana Lainnya terkait Bantuan Sosial berdasarkan Surat dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor S-35/K.1/KSAP/III/2018 diakui apabila terdapat sisa dana bantuan sosial yang tidak dapat diakui sebagai beban bantuan sosial dan atas sisa dana bantuan sosial tersebut akan tetap disetorkan ke penerima manfaat.
- 6) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.



Kewajiban

6. Kewajiban

- a. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - 2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Revaluasi Barang Milik Negara

8. Koreksi Pencatatan Hasil Revaluasi Barang Milik Negara

- a. Koreksi pencatatan hasil revaluasi BMN (koreksi pencatatan) dilakukan pada laporan keuangan level K/L, sedangkan untuk laporan keuangan level satker, wilayah, eselon I, serta laporan barang level satker sampai dengan level konsolidasian seluruh K/L (Laporan Barang Milik Negara/LBMN) tidak perlu dilakukan koreksi.
- b. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, objek revaluasi terdiri dari BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015, dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - 1) Aset tetap berupa: tanah; gedung dan bangunan; serta jalan, irigasi, dan jaringan (jalan, jembatan, dan bangunan air) pada K/L.
 - 2) Aset lainnya berupa aset tetap pada K/L yang sedang dilaksanakan pemanfaatan.
- c. Koreksi pencatatan dilakukan terhadap:
 - 1) Akun-akun yang timbul dari perekaman transaksi revaluasi (Koreksi Penilaian Kembali dan Koreksi Kesalahan Input IP dengan kode transaksi 205, 224, dan 225), misalnya akun Aset Tetap/Aset Kemitraan yang merupakan objek revaluasi BMN dan Akumulasi Penyusutan Aset



Tetap/Aset Kemitraan di Neraca, Beban Penyusutan Aset Tetap/Aset Kemitraan di Laporan Operasional (LO), Revaluasi Aset Tetap di Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta akun-akun lain yang terdampak sesuai dengan transaksi BMN yang terjadi setelah transaksi revaluasi.

- 2) Akun-akun yang timbul dari perekaman transaksi barang berlebih (kode transaksi 120 dan 130), misalnya akun Aset Tetap yang merupakan objek revaluasi BMN dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap di Neraca, Beban Penyusutan Aset Tetap di Laporan Operasional (LO), Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi di Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta akun-akun lain yang terdampak sesuai dengan transaksi BMN yang terjadi setelah transaksi barang berlebih.
- d. Dalam penyusunan LKKL dan LKPP tahun 2018, telah dilakukan koreksi pencatatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a dan huruf b. Mengingat bahwa hingga saat ini hasil peniiaian kembali BMN belum dapat disajikan dalam laporan keuangan, maka dalam rangka penyusunan LKKL dan LKPP semester I tahun 2019, koreksi dimaksud tidak perlu dilakukan jurnal balik.
- e. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan bahwa laporan keuangan level satker, wilayah, eselon I, serta laporan barang level satker sampai dengan level konsolidasian seluruh K/L (Laporan Barang Milik Negara/LBMN) masih mengandung saldo terkait revaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dipandang perlu untuk melakukan koreksi pencatatan atas transaksi-transaksi lanjutan yang terjadi atas BMN yang merupakan objek revaluasi tahun 2017-2018, di mana transaksi-transaksi lanjutan tersebut terjadi selama semester I tahun 2019.
- f. Terdapat tambahan jurnal lanjutan terkait koreksi pencatatan atas transaksi-transaksi lanjutan yang terjadi atas BMN yang merupakan objek revaluasi. Jurnal-jurnal tersebut dilakukan pada periode semester II tahun 2019 sampai dengan triwulan III.
- g. Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan No: S-189/PB/2020 tanggal 5 Maret 2020 Hal: Petunjuk Teknis Pencatatan Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara setelah Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 Unaudited serta Rilis Update Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.3.1, Kementerian Sosial melakukan koreksi atas revaluasi aset tetap tersebut pada Laporan Keuangan Audited 2019.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan

Rp516.740.242.519

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp516.740.242.519** atau mencapai 4296,61% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp12.026.705.400**

Rincian Pendapatan per UKE I

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019

Uraian	Periode yang Berakhir 31 Desember 2019		
	Estimasi	Realisasi	% Real Angg.
Sekretariat Jenderal	3.550.750.000	10.345.934.981	291,37
Inspektorat Jenderal	-	110.153.920	0
Ditjen Pemberdayaan Sosial	700.000.000	9.317.014.410	1331,00
Ditjen Rehabilitasi Sosial	995.808.000	2.166.105.396	217,52
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	94.265.803.042	0
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	-	392.827.646.066	0
Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	6.780.147.400	7.707.584.704	113,68
Jumlah	12.026.705.400	516.740.242.519	4296,61

Berdasarkan tabel diatas, rincian Realisasi Pendapatan menurut Eselon I untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal Rp10.345.934.981

No	Uraian Akun	Nominal
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	483.210.000
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Banguna	6.958.594.182
3	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	4.944
4	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2.516.296.523
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	54.961.295
6	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	292.067.172
7	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	40.800.865
	Jumlah	10.345.934.981

2. Inspektorat Jenderal Rp110.153.920

No	Uraian Akun	Nominal
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	80.455.900
2	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	29.567.420
3	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	130.600
	Jumlah	110.153.920



3. Ditjen Pemberdayaan Sosial Rp9.317.014.410

No	Uraian Akun	Nominal
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	250.108.000
2	Pendapatan Perizinan Lainnya	1.245.189.272
3	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	5.906.715.082
4	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	220.964.669
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	99.981.375
6	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	481.869.569
7	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	4.555.912
8	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	1.107.630.531
Jumlah		9.317.014.410

4. Ditjen Rehabilitasi Sosial Rp2.166.105.396

No	Uraian Akun	Nominal
1	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	95.668.000
2	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	16.200.000
3	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	152.683.386
4	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	333.027.600
5	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	500.083.452
6	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000
7	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	572.642.500
8	Pendapatan Jasa Lainnya	77.266.000
9	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	4.715.234
10	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	26.869.774
11	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	140.746.613
12	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	108.115.682
13	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	20.742.329
14	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	116.244.826
15	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	100.000
Jumlah		2.166.105.396

5. Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp94.265.803.042

No	Uraian Akun	Nominal
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	82.855.200
2	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	454.012.769
3	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	17.500.000
4	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	377.325.401
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	21.364.164
6	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.357.376.191
7	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	351.604.658
8	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	91.603.764.659
Jumlah		94.265.803.042



6. Ditjen Penanganan Fakir Miskin Rp392.827.646.066

No	Uraian Akun	Nominal
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	390.000
2	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	1.058.888.888
3	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	673.003
4	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	76.364.335
5	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	179.787.962
6	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	391.511.541.878
Jumlah		392.827.646.066

7. Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Rp7.707.584.704

No	Uraian Akun	Nominal
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	257.957.000
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	270.296.234
3	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	571.900.000
4	Pendapatan Biaya Pendidikan	4.897.000.000
5	Pendapatan Pendidikan Lainnya	580.950.000
6	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	504.883.000
7	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	155.676
8	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	437.154.461
9	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	98.913.041
10	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	66.513.535
11	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	21.860.569
12	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	1.188
Jumlah		7.707.584.704

Adapun rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan pada Kementerian Sosial RI adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi menurut Jenis Pendapatan
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2019*

Uraian	Periode yang Berakhir 31 Desember 2019		
	Estimasi	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	4.179.859.400	9.482.528.954	226,86
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	700.000.000	1.245.189.272	177,88
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	6.482.983.000	6.554.733.000	101,11
Pendapatan Jasa Lainnya	663.863.000	649.908.500	97,90
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rek Perbankan	-	7.441.992.593	0
Pendapatan Denda	-	3.579.283.831	0
Pendapatan Lain-Lain	-	487.786.606.369	0
Jumlah	12.026.705.400	516.740.242.519	4.296,61

Berdasarkan tabel diatas rincian realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebagai berikut:



1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha sebesar Rp9.482.528.954 berupa;

No	Uraian Akun	Nominal
1	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	95.668.000
2	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	16.200.000
3	Pendapatan dari Pejualan Peralatan dan Mesin	152.683.386
4	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.488.003.700
5	Pendapatan Sew a Tanah, Gedung, dan Bangunan	7.728.973.868
6	Pendapatan Sew a Peralatan dan Mesin	1.000.000
Jumlah		9.482.528.954

2. Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum Rp1.245.189.272 berupa Pendapatan Perizinan Lainnya.

3. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi Rp6.554.733.000 berupa:

No	Uraian Akun	Nominal
1	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	571.900.000
2	Pendapatan Biaya Pendidikan	4.897.000.000
3	Pendapatan Pendidikan Lainnya	580.950.000
4	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	504.883.000
Jumlah		6.554.733.000

4. Pendapatan Jasa Lainnya Rp 649.908.500

No	Uraian Akun	Nominal
1	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	572.642.500
2	Pendapatan Jasa Lainnya	77.266.000
Jumlah		649.908.500

5. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan Rp7.441.992.593

No	Uraian Akun	Nominal
1	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	7.424.492.593
2	Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya	17.500.000
Jumlah		7.441.992.593

6. Pendapatan Denda sebesar Rp3.579.283.831 berupa Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

7. Pendapatan Lain-lain sebesar Rp487.786.606.369 berupa:

No	Uraian Akun	Nominal
1	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	521.898.243
2	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2.485.730.111
3	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	439.564.333
4	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	484.339.181.894
5	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	100.000
6	Pendapatan Anggaran Lain-lain	131.788
Jumlah		487.786.606.369

Selanjutnya, realisasi pendapatan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 dibandingkan dengan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 52,72%. Kenaikan ini disebabkan naiknya seluruh pos pendapatan khususnya untuk pendapatan yang berasal dari Pendapatan Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha sebesar 77,91%; Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar 65,40%; Pendapatan Denda sebesar 563,39%; dan Pendapatan Lain-Lain sebesar 53,12% dengan perincian sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
 Menurut Jenis Pendapatan
 Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha	9.482.528.954	5.329.927.810	4.152.601.144	77,91
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	1.245.189.272	752.822.200	492.367.072	65,40
Pendapatan Jasa Lainnya	649.908.500	604.527.000	45.381.500	7,51
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	6.554.733.000	5.877.600.000	677.133.000	11,52
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	7.441.992.593	6.678.181.702	763.810.891	11,44
Pendapatan Denda	3.579.283.831	539.544.887	3.039.738.944	563,39
Pendapatan Lain-lain	487.786.606.369	318.573.482.815	169.213.123.554	53,12
Jumlah	516.740.242.519	338.356.086.414	178.384.156.105	52,72

*Grafik Perbandingan Realisasi Pendapatan
 Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*



Realisasi Belanja

Rp57.726.645.452.081

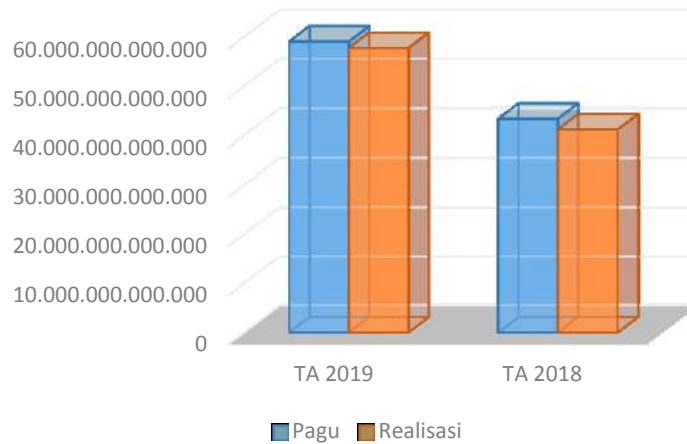
B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Kementerian Sosial RI untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp57.726.645.452.081** atau 97,78% dari anggaran belanja sebesar **Rp59.039.206.791.000**.

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar **Rp16.492.502.581.037** atau sebesar 40,00% dari realisasi belanja pada periode TA 2018 sebesar **Rp41.234.142.871.044**

Perbandingan antara pagu dan realisasi belanja Kementerian Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut:

*Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Kementerian Sosial
 Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*



*Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Kementerian Sosial
 Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	Persentase Kenaikan (%)
PAGU	59.039.206.791.000	43.393.136.929.000	15.646.069.862.000	36,06
Realisasi	57.726.645.452.081	41.234.142.871.044	16.492.502.581.037	40,00
Persentase Realisasi (%)	97,78	95,02		

B.2.1. Realisasi Belanja

B.2.1.1. Belanja Kementerian Sosial menurut Unit Eselon I

Realisasi Belanja Kementerian Sosial sampai dengan 31 Desember 2019 dapat dirinci menurut Unit Kerja Eselon I sebagaimana dapat dilihat pada tabel. Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi terbesar pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar **Rp34.763.181.659.013** dan Direktorat Penanganan Fakir Miskin sebesar **Rp20.113.590.633.266** dengan alokasi belanja terbesar adalah pada Belanja Bantuan Sosial.

Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja menurut Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Menurut UKE I
 Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019*

No	UKE I	Pagu	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	% Pagu/Realisasi (Netto)
1	Sekretariat Jenderal	457.427.070.000	444.222.711.960	1.818.220.037	442.404.491.923	96,72
2	Inspektorat Jenderal	48.506.224.000	47.785.102.711	188.413.463	47.596.689.248	98,12
3	Ditjen. Pemberdayaan Sosial	522.514.236.000	507.795.795.767	1.806.559.012	505.989.236.755	96,84
4	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	1.189.760.763.000	1.162.626.093.676	3.994.133.569	1.158.631.960.107	97,38
5	Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	34.790.708.685.000	34.769.547.550.178	6.365.891.165	34.763.181.659.013	99,92
6	Ditjen. Penanganan Fakir Miskin	21.305.110.213.000	20.425.578.017.196	311.987.383.930	20.113.590.633.266	94,41
7	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	725.179.600.000	699.723.725.986	4.472.944.217	695.250.781.769	95,87
	Total	59.039.206.791.000	58.057.278.997.474	330.633.545.393	57.726.645.452.081	97,78



Perbandingan antara realisasi belanja menurut Unit Kerja Eselon I untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan periode yang berakhir 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Menurut UKE I

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	UKE I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	442.404.491.923	327.006.448.055	115.398.043.868	35,29
2	Inspektorat Jenderal	47.596.689.248	44.570.840.734	3.025.848.514	6,79
3	Ditjen. Pemberdayaan Sosial	505.989.556.755	480.800.688.223	25.188.868.532	5,24
4	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	1.158.631.960.107	992.473.134.218	166.158.825.889	16,74
5	Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	34.763.181.659.013	19.552.174.281.157	15.211.007.377.856	77,80
6	Ditjen. Penanganan Fakir Miskin	20.113.590.633.266	19.483.719.617.272	629.871.015.994	3,23
7	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	695.250.781.769	353.397.861.385	341.852.920.384	96,73
Total		57.726.645.772.081	41.234.142.871.044	16.492.502.901.037	40,00

B.2.1.2. Belanja Kementerian Sosial menurut Program

Rincian Anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 tersaji sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019

PPROGRAM	Periode yang Berakhir 31 Desember 2019		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	457.427.070.000	444.222.711.960	97,11
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	48.506.224.000	47.785.102.711	98,51
Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan dan penyuluhan Sosial	725.179.600.000	699.723.725.986	96,49
Program Rehabilitasi Sosial	1.189.760.763.000	1.162.626.093.676	97,72
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	34.790.708.685.000	34.769.547.550.178	99,94
Program Pemberdayaan Sosial	522.514.236.000	507.795.795.767	97,18
Program Penangan Fakir Miskin	21.305.110.213.000	20.425.578.017.196	95,87
Total Belanja Kotor	59.039.206.791.000	58.057.278.997.474	98,34
Pengembalian Belanja		(330.633.545.393)	
Total Belanja (Netto)	59.039.206.791.000	57.726.645.452.081	97,78

B.2.1.3. Belanja Kementerian Sosial menurut Jenis Belanja

Belanja Kementerian Sosial menurut Jenis Belanja terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial. Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja dapat dilihat pada tabel berikut:



*Rincian Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
 Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2019*

Uraian	Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019					
	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	Belanja Netto	% Real Angg.	Sisa Anggaran
Belanja Pegawai	489.387.325.000	480.858.686.810	241.128.399	480.617.558.411	98,21	8.769.766.589
Belanja Barang	3.814.831.867.000	3.696.467.439.146	30.613.570.877	3.665.853.868.269	96,09	148.977.998.731
Belanja Modal	322.514.274.000	319.595.543.923	251.025.677	319.344.518.246	99,02	3.169.755.754
Belanja Bantuan Sosial	54.412.473.325.000	53.560.357.327.595	299.527.820.440	53.260.829.507.155	97,88	1.151.643.817.845
Total	59.039.206.791.000	58.057.278.997.474	330.633.545.393	57.726.645.452.081	97,78	1.312.561.338.919

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sampai dengan 31 Desember 2019 Realisasi Belanja secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 40,00% dibandingkan periode sampai dengan 31 Desember 2018. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan anggaran sebesar 36,06% terutama kenaikan anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang berasal dari pelaksanaan program guna mengentaskan kemiskinan. Perbandingan Realisasi Belanja Kementerian Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Perbandingan Realisasi Belanja

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	480.617.558.411	471.787.790.216	8.829.768.195	1,87
Belanja Barang	3.665.853.868.269	3.472.332.616.879	193.521.251.390	5,57
Belanja Modal	319.344.518.246	134.171.280.952	185.173.237.294	138,01
Belanja Bantuan Sosial	53.260.829.507.155	37.155.851.182.997	16.104.978.324.158	43,34
Jumlah	57.726.645.452.081	41.234.142.871.044	16.492.502.581.037	40,00

Rincian perbandingan alokasi anggaran untuk TA 2019 dan TA 2018 dengan perincian:



Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	489.387.325.000	483.523.265.000	5.864.060.000	1,21
Belanja Barang	3.814.831.867.000	3.663.144.397.000	151.687.470.000	4,14
Belanja Modal	322.514.274.000	136.894.897.000	185.619.377.000	135,59
Belanja Bantuan Sosial	54.412.473.325.000	39.109.574.370.000	15.302.898.955.000	39,13
Jumlah	59.039.206.791.000	43.393.136.929.000	15.646.069.862.000	36,06

Penjelasan atas kenaikan dan penurunan Pos-Pos Realisasi Belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Pegawai

Rp480.617.558.411

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2019 dan periode 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp480.617.558.411** dan **Rp471.787.790.216** atau terjadi kenaikan sebesar 1,87% dari tahun lalu. Kenaikan ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan anggaran terhadap Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar 1,21% dari anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Kenaikan ini disebabkan diantaranya karena adanya penambahan pembayaran gaji dan tunjangan dikarenakan penambahan pegawai baru Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan pegawai dengan kontrak kerja, adanya kenaikan gaji pegawai sebesar 5%, dan adanya kenaikan pangkat pegawai.

Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Pegawai

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	489.387.325.000	483.523.265.000	1,21

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai menurut Unit Kerja Eselon I

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	UKE I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	61.118.266.548	59.660.244.497	1.458.022.051	2,44
2	Inspektorat Jenderal	16.934.767.804	15.684.658.856	1.250.108.948	7,97
3	Ditjen. Pemberdayaan Sosial	24.989.787.992	23.802.338.173	1.187.449.819	4,99
4	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	227.627.788.114	223.880.245.033	3.747.543.081	1,67
5	Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	20.938.751.915	19.086.463.191	1.852.288.724	9,70
6	Ditjen. Penanganan Fakir Miskin	18.577.968.048	17.449.883.824	1.128.084.224	6,46
7	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	110.430.227.990	112.223.956.642	(1.793.728.652)	(1,60)
	Total	480.617.558.411	471.787.790.216	8.829.768.195	1,87



*Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai menurut Jenis Belanja
 Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	194.803.540.170	187.126.686.303	7.676.853.867	4,10
Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.024.313	2.611.435	412.878	15,81
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	13.574.173.932	13.125.620.116	448.553.816	3,42
Belanja Tunjangan Anak PNS	3.735.699.870	3.644.669.051	91.030.819	2,50
Belanja Tunjangan Struktural PNS	9.405.890.000	9.470.480.000	(64.590.000)	(0,68)
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.921.610.000	9.800.665.000	120.945.000	1,23
Belanja Tunjangan PPh PNS	1.164.600.094	953.167.142	211.432.952	22,18
Belanja Tunjangan Beras PNS	9.083.735.480	9.169.754.820	(86.019.340)	(0,94)
Belanja Uang Makan PNS	24.255.552.300	24.476.523.050	(220.970.750)	(0,90)
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	195.155.000	202.800.000	(7.645.000)	(3,77)
Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar	-	-	-	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	5.619.955.000	5.524.380.000	95.575.000	1,73
Belanja Tunjangan Profesi Dosen	3.885.576.100	3.725.582.200	159.993.900	4,29
Belanja Uang Lembur	1.391.764.550	1.214.888.825	176.875.725	14,56
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	203.818.410.001	203.531.446.165	286.963.836	0,14
Jumlah Belanja Kotor	480.858.686.810	471.969.274.107	8.889.412.703	1,88
Pengembalian Belanja Pegawai	(241.128.399)	(181.483.891)	(59.644.508)	32,86
Jumlah Belanja Bersih	480.617.558.411	471.787.790.216	8.829.768.195	1,87

Belanja Barang

Rp3.665.853.868.269

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp3.665.853.868.269** dan **Rp3.472.332.616.879**. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,57% jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya kenaikan anggaran di Tahun Anggaran 2019 sebesar 4,14% serta meningkatnya realisasi kegiatan untuk melaksanakan program Kementerian Sosial. Beberapa pos yang mengalami kenaikan di antaranya adalah pada pos Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional, Belanja Jasa, Belanja Perjalanan Dalam Negeri, dan Belanja Perjalanan Luar Negeri, Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat, dan Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat. Sedangkan apabila dilihat dari realisasi berdasarkan Unit Kerja Eselon I, dapat diketahui bahwa kenaikan realisasi Belanja Barang terbesar pada Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial terkait pengeluaran untuk program kediklatan dan perjalanan dinas terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Barang

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	3.814.831.867.000	3.663.144.397.000	4,14



*Perbandingan Realisasi Belanja Barang menurut Unit Kerja Eselon I
 Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

No	UKE I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	279.501.950.039	258.694.984.684	20.806.965.355	8,04
2	Inspektorat Jenderal	28.658.810.944	27.995.828.878	662.982.066	2,37
3	Ditjen. Pemberdayaan Sosial	295.787.352.665	296.915.763.127	(1.128.410.462)	(0,38)
4	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	477.927.233.475	479.081.034.809	(1.153.801.334)	(0,24)
5	Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.801.181.002.145	1.882.296.575.427	(81.115.573.282)	(4,31)
6	Ditjen. Penanganan Fakir Miskin	325.361.345.823	334.493.868.858	(9.132.523.035)	(2,73)
7	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	457.436.173.178	192.854.561.096	264.581.612.082	137,19
Total		3.665.853.868.269	3.472.332.616.879	193.521.251.390	5,57

*Perbandingan Realisasi Belanja Barang menurut Jenis Belanja
 Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	112.350.764.715	108.420.225.783	3.930.538.932	3,63
Belanja Barang Non Operasional	2.166.831.772.561	2.114.327.337.598	52.504.434.963	2,48
Belanja Barang Persediaan	39.718.004.607	45.070.317.086	(5.352.312.479)	(11,88)
Belanja Jasa	267.795.043.034	256.574.568.411	11.220.474.623	4,37
Belanja Pemeliharaan	77.817.021.240	82.075.536.843	(4.258.515.603)	(5,19)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	987.680.060.061	884.653.529.615	103.026.530.446	11,65
Belanja Perjalanan Luar Negeri	5.397.323.522	2.716.614.979	2.680.708.543	98,68
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	18.665.940.906	11.847.566.248	6.818.374.658	57,55
Belanja Barang Fisik dan Penunjang Dana Dekonsentrasi	-	4.500.000	(4.500.000)	(100,00)
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masy.	20.211.508.500	1.792.924.550	18.418.583.950	1.027,29
Jumlah Belanja Kotor	3.696.467.439.146	3.507.483.121.113	188.984.318.033	5,39
Pengembalian Belanja	(30.613.570.877)	(35.150.504.234)	4.536.933.357	
Jumlah Belanja	3.665.853.868.269	3.472.332.616.879	193.521.251.390	5,57

Belanja Modal

Rp319.344.518.246

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp319.344.518.246** dan **Rp134.171.280.952**.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dibandingkan dengan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar 138,01% dikarenakan adanya kenaikan anggaran sebesar 135,59% dari tahun 2018.



Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Modal

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal	322.514.274.000	136.894.897.000	135,59

Selanjutnya apabila dilihat dari realisasi Belanja Modal menurut Unit Kerja Eselon I, dapat diketahui bahwa pengeluaran signifikan terdapat pada:

1. Sekretariat Jenderal dengan realisasi terbesar terkait Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang digunakan dalam operasional pemerintah pada satuan kerja Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebesar Rp51.082.839.760;
2. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dengan realisasi terbesar terkait Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp26.109.449.700;
3. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial dengan realisasi terbesar pada Belanja Modal Tanah di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung sebesar Rp72.449.805.888.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal menurut Unit Kerja Eselon I

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	UKE I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/(Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	101.784.275.336	8.651.218.874	93.133.056.462	1.076,53
2	Inspektorat Jenderal	2.003.110.500	890.353.000	1.112.757.500	124,98
3	Ditjen. Pemberdayaan Sosial	10.383.341.625	5.888.319.150	4.495.022.475	76,34
4	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	62.984.122.134	44.917.797.098	18.066.325.036	40,22
5	Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	11.299.074.250	24.877.688.593	(13.578.614.343)	(54,58)
6	Ditjen. Penanganan Fakir Miskin	3.506.213.800	626.560.590	2.879.653.210	459,60
7	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	127.384.380.601	48.319.343.647	79.065.036.954	163,63
Total		319.344.518.246	134.171.280.952	185.173.237.294	138,01

Perbandingan Realisasi Belanja Modal menurut Jenis Belanja

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	90.527.836.808	34.457.197.247	56.070.639.561	162,73
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.465.585.186	48.700.378.774	77.765.206.412	159,68
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.199.054.457	36.235.529.605	48.963.524.852	135,13
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.085.705.450	689.196.200	1.396.509.250	202,63
Belanja Modal Lainnya	15.317.362.022	14.174.119.859	1.143.242.163	8,07
Jumlah Belanja Kotor	319.595.543.923	134.256.421.685	185.339.122.238	138,05
Pengembalian	(251.025.677)	(85.140.733)	(165.884.944)	194,84
Jumlah Belanja	319.344.518.246	134.171.280.952	185.173.237.294	138,01



B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp90.527.836.808** dan **Rp34.457.197.247**.

Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 naik sebesar 162,73% jika dibanding untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 disebabkan terjadinya kenaikan anggaran di Tahun Anggaran 2019 untuk Belanja Modal Tanah sebesar 159,61% dibanding Tahun Anggaran 2018. Belanja Modal Tanah tersebut terdapat pada:

No	Nama UKE I	Jumlah
1	DIREKTORAT KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL	7.047.932.000,
2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL	112.776.000,
3	SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS) BANDUNG	72.449.805.888,
4	BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPKS) BANJARMASIN	10.917.322.920,
Jumlah		90.527.836.808

Rincian perbandingan realisasi belanja modal tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	90.527.836.808	34.457.197.247	56.070.639.561	162,73
Jumlah Belanja Kotor	90.527.836.808	34.457.197.247	56.070.639.561	162,73
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja	90.527.836.808	34.457.197.247	56.070.639.561	162,73

Rincian perbandingan alokasi anggaran belanja modal tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut;

*Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Modal Tanah
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Kode Akun	URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	NAIK (TURUN) %
531111	Belanja Modal Tanah	91.069.248.000	35.075.000.000	55.994.248.000	159,64
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	4.400.000	(4.400.000)	(100,00)
Total Anggaran Belanja Modal Tanah		91.069.248.000	35.079.400.000	55.989.848.000	159,61

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp126.447.641.640** dan **Rp48.688.282.934**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember



2019 mengalami kenaikan sebesar 159,71% dibandingkan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebesar 160,11% dari periode yang berakhir 31 Desember 2018.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Eselon I Kementerian Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	79.257.926.471,
2	Inspektorat Jenderal	1.823.110.500,
3	Ditjen. Pemberdayaan Sosial	2.402.016.500,
4	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	15.221.906.715,
5	Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	10.571.301.250,
6	Ditjen. Penanganan Fakir Miskin	2.352.144.800,
7	Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyusulahan Sosial	14.757.598.950,
Jumlah Belanja Kotor		126.386.005.186
Pengembalian		(17.943.546,)
Jumlah		126.368.061.640

2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	2.280.000,
Jumlah Belanja		2.280.000

3. Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	77.300.000,
Jumlah Belanja		77.300.000

Rincian Perbandingan realisasi dan alokasi anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.386.005.186	48.614.228.774	77.771.776.412	159,98
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	-	86.150.000	(86.150.000)	(100,00)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	2.280.000	-	2.280.000	-
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	77.300.000	-	77.300.000	-
Jumlah Belanja Kotor	126.465.585.186	48.700.378.774	77.765.206.412	159,68
Pengembalian	(17.943.546)	(12.095.840)	(5.847.706)	48,34
Jumlah Belanja	126.447.641.640	48.688.282.934	77.759.358.706	159,71



*Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Kode Akun	URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	NAIK (TURUN) %
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.432.235.000	48.979.863.000	78.452.372.000	160,17
532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	-	86.150.000	(86.150.000)	(100,00)
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	2.280.000	-	2.280.000	-
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	78.070.000	-	78.070.000	-
Total Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin		127.512.585.000	49.066.013.000	78.446.572.000	159,88

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp84.977.335.749** dan **Rp36.162.799.312**.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 134,99% dibandingkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebesar 131,00% pada tahun anggaran 2019.

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	197.450.000,
2	Ditjen Pemberdayaan Sosial	328.400.000,
3	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	30.232.491.358,
4	Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial	17.306.147.521,
Jumlah Belanja Kotor		48.064.488.879
	Pengembalian	(3.683.600,)
Jumlah		48.060.805.279

2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial	91.853.300,
Jumlah		91.853.300

3. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	1.431.059.804,
2	Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial	180.372.000,
Jumlah Belanja Kotor		1.611.431.804
	Pengembalian	(18.649.932,)
Jumlah		1.592.781.872



4. Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	618.817.699,
Jumlah Belanja Kotor		618.817.699
	Pengembalian	(180.235.300,)
Jumlah		438.582.399

5. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	18.251.154.000,
2	Ditjen. Pemberdayaan Sosial	119.068.125,
3	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	13.734.126.250,
4	Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial	2.708.114.400,
Jumlah Belanja Kotor		34.812.462.775
	Pengembalian Belanja	(19.149.876,)
Jumlah		34.793.312.899

Rincian realisasi serta alokasi anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.064.488.879	20.855.222.755	27.209.266.124	130,47
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	-	49.222.000	(49.222.000)	(100,00)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	91.853.300	49.500.000	42.353.300	85,56
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	1.611.431.804	741.900.000	869.531.804	117,20
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	618.817.699	78.506.600	540.311.099	688,24
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	34.812.462.775	14.461.178.250	20.351.284.525	140,73
Jumlah Belanja Kotor	85.199.054.457	36.235.529.605	48.963.524.852	135,13
Pengembalian Belanja Modal	(221.718.708)	(72.730.293)	(148.988.415)	204,85
Jumlah Belanja	84.977.335.749	36.162.799.312	48.814.536.437	134,99



*Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Kode Akun	Anggaran	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun) %
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.593.372.000	21.748.312.000	26.845.060.000	123,44
533112	Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	-	50.000.000	(50.000.000)	(100,00)
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	125.943.000	49.500.000	76.443.000	154,43
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	1.647.147.000	741.900.000	905.247.000	122,02
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	619.080.000	78.600.000	540.480.000	687,63
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	35.016.321.000	14.562.601.000	20.453.720.000	140,45
Total Anggaran Belanja Modal GB		86.001.863.000	37.230.913.000	48.770.950.000	131,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp2.085.705.450** dan **Rp689.196.200**. Hal ini menyebabkan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 202,63% dibandingkan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Meningkatnya realisasi atas Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dipengaruhi oleh meningkatnya anggaran sebesar 201,31% yang dialokasikan untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Adapun Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Eselon I Kementerian Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Belanja Modal Irigasi

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	338.000.000,
Jumlah		338.000.000

2. Belanja Modal Jaringan

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	856.971.200,
2	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	70.417.600,
3	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	499.500.000,
Jumlah		1.426.888.800

3. Belanja Penambahan Nilai Jaringan

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	320.816.650,
Jumlah		320.816.650

Rincian Perbandingan realisasi serta alokasi anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel berikut;



*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun) %
Belanja Modal Irigasi	338.000.000	-	338.000.000	-
Belanja Modal Jaringan	1.426.888.800	35.380.200	1.391.508.600	3.933,02
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	320.816.650	653.816.000	(332.999.350)	(50,93)
Jumlah Belanja Kotor	2.085.705.450	689.196.200	1.396.509.250	202,63
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja	2.085.705.450	689.196.200	1.396.509.250	202,63

*Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Kode Akun	Anggaran	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun) %
534121	Belanja Modal Irigasi	338.000.000	-	338.000.000	-
534131	Belanja Modal Jaringan	1.432.590.000	35.500.000	1.397.090.000	3.935,46
534151	Belanja Penambahan Nilai Irigasi	325.000.000	660.000.000	(335.000.000)	(50,76)
Total Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan		2.095.590.000	695.500.000	1.400.090.000	201,31

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp15.305.998.599** dan **Rp14.173.805.259**. Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 7,99% dibandingkan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Dari sisi anggaran Belanja Modal Lainnya mengalami kenaikan sebesar 6,83% dari Tahun Anggaran 2018.

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Lainnya per Unit Eselon I dapat dilihat sebagai berikut:

1. Belanja Modal Lainnya

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	2.513.801.965,
2	Inspektorat Jenderal	180.000.000,
3	Ditjen. Pemberdayaan Sosial	485.925.000
4	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	1.358.050.485,
5	Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	616.013.000,
6	Ditjen. Penanganan Fakir Miskin	396.015.000,
7	Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial	934.247.100,
Jumlah Belanja Kotor		6.484.052.550
Pengembalian		(10.513.423,)
Jumlah		6.473.539.127



2. Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	740.360.000,
2	Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	111.760.000,
3	Ditjen. Penanganan Fakir Miskin	758.054.000,
4	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	7.223.135.472,
Jumlah Belanja Kotor		8.833.309.472
	Pengembalian	(850.000.)
Jumlah Belanja		8.832.459.472

Perbandingan Realisasi Anggaran serta Alokasi Anggaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	6.484.052.550	13.282.908.759	(6.798.856.209)	(51,18)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	8.833.309.472	891.211.100	7.942.098.372	891,16
Jumlah Belanja Kotor	15.317.362.022	14.174.119.859	1.143.242.163	8,07
Pengembalian Belanja Modal	(11.363.423)	(314.600)	(11.048.823)	3.512,02
Jumlah Belanja	15.305.998.599	14.173.805.259	1.132.193.340	7,99

Perbandingan Alokasi Anggaran Belanja Modal Lainnya

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Anggaran	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	6.540.114.000	13.919.296.000	(7.379.182.000)	(53,01)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	9.294.874.000	903.775.000	8.391.099.000	928,45
Total Anggaran Belanja Modal Lainnya	15.834.988.000	14.823.071.000	1.011.917.000	6,83

Belanja Bantuan Sosial

Rp53.260.829.507.155

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018, masing-masing sebesar **Rp53.260.829.507.155** dan **Rp37.155.851.182.997**.

Belanja Bantuan Sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif.



Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut;

No	Nama UKE I	Jumlah
1	Ditjen. Pemberdayaan Sosial	175.004.029.473
2	Ditjen Rehabilitasi Sosial	390.414.034.004
3	Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	32.930.787.593.958
4	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	20.064.151.670.160
Jumlah Belanja Kotor		53.560.357.327.595
Pengembalian		(299.527.820.440)
Jumlah		53.260.829.507.155

Adapun rincian Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	NAIK (TURUN) %
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	398.142.933.004	257.082.487.303	141.060.445.701	54,87
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	120.942.777.473	103.924.125.537	17.018.651.936	16,38
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	32.828.279.903.000	17.609.104.621.175	15.219.175.281.825	86,43
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	20.076.779.320.160	19.629.348.615.000	447.430.705.160	2,28
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	136.212.393.958	99.504.539.360	36.707.854.598	36,89
Jumlah Belanja Kotor	53.560.357.327.595	37.698.964.388.375	15.861.392.939.220	42,07
Pengembalian	(299.527.820.440)	(543.113.205.378)	243.585.384.938	(44,85)
Jumlah Belanja	53.260.829.507.155	37.155.851.182.997	16.104.978.324.158	43,34

Selanjutnya rincian perbandingan alokasi anggaran Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

Perbandingan Anggaran Belanja Bantuan Sosial

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Bantuan Sosial	54.412.473.325.000	39.109.574.370.000	39,13

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kementerian Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 meningkat sebesar 43,34% dibanding dengan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Kenaikan alokasi anggaran Bantuan Sosial sebesar 39,13% turut mempengaruhi kenaikan penyerapan anggaran Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019. Kenaikan ini selaras dengan komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Belanja bantuan sosial dengan realisasi terbesar terdapat pada Direktorat Jaminan Sosial Keluarga sebesar Rp32.747.075.200.000 merupakan bantuan sosial dalam bentuk uang Program Keluarga Harapan (PKH) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dengan nilai pengembalian sebesar Rp961.650.000.



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
 Pengeluaran
 Rp67.666.000*

C.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp67.666.000** dan **Rp211.191.900** dimana terdapat penurunan sebesar (**Rp143.525.900**) atau sebesar (67,96) %.

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran dirinci sebagai berikut:

No	Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Sekretariat Jenderal	8.728.000,	8.973.400,	(245.400)	-
2	Inspektorat Jenderal	0,	0,	-	-
3	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	58.938.000,	65.194.600,	(6.256.600)	(9,60)
4	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	0,	88.637.900,	(88.637.900)	(100,00)
5	Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial	0,	0,	-	-
6	Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	0,	48.386.000,	(48.386.000)	(100,00)
7	Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluhan Sosial	0,	0,	-	-
	Jumlah	67.666.000	211.191.900	(143.525.900)	(67,96)

Kas di Bendahara Pengeluaran Kementerian Sosial per 31 Desember 2019 sebesar Rp67.666.000 terdiri dari:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp58.728.000 dirinci sebagai berikut:

No	Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Sekretariat Jenderal	8.728.000	8.973.400	(245.400)	(2,73)
3	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	50.000.000	65.194.600	(15.194.600)	(23,31)
4	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	-	88.637.900	(88.637.900)	(100,00)
6	Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	-	48.386.000	(48.386.000)	(100,00)
	Jumlah	58.728.000	211.191.900	(152.463.900)	(72,19)

Penjelasan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp58.728.000 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal satuan kerja Dinas Sosial Provinsi Papua Barat yang merupakan sisa UP sebesar Rp8.728.000 telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 22 Januari 2020, dengan NTPN : 0DF450N9UUSFDK0
 - b. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial satuan kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kaimana sebesar Rp50.000.000 yang merupakan sisa UP yang telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 03 Maret 2020 dengan NTPN 0A6026U8DP2IILL.
2. Kas di Bendahara Pengeluaran TUP sebesar Rp8.938.000 pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial di satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan



Sosial dikarenakan terdapat pengajuan penihilan SPM TUP sebesar Rp134.500.000 atas belanja uang makan ke KPPN. Atas pengajuan belanja uang makan tersebut, terdapat penolakan dari KPPN pada tanggal 10 Januari 2020 karena pagu belanja uang makan yang tidak mencukupi. Pagu belanja uang makan yang tersisa adalah sebesar Rp125.562.000 sehingga per 31 Desember 2019, Kas di Bendahara Pengeluaran TUP yang belum dinihilkan sebesar Rp8.938.000. Kas di Bendahara Pengeluaran TUP ini telah disetor ke kas negara pada tanggal 13 Januari 2020 dengan NTPN : 1A3103CIEEJC5H95.

Kas di Bendahara **C.2 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN**

Penerimaan

Rp0

Nilai Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp992.366.000** dimana terdapat penurunan sebesar (Rp992.366.000) atau sebesar (100) %.

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang berasal dari hasil penerimaan PNPB yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 merupakan penerimaan uang muka atas sewa Gedung Aneka Bhakti I, Gedung Aneka Bhakti II, penerimaan biaya sewa Wisma Pandawa Ciumbuleuit Bandung, dan biaya sewa Wisma Pandawa Ciloto Cianjur yang diterima di tahun 2018 dan belum dipertanggungjawabkan/disetorkan ke Kas Negara per tanggal 31 Desember 2018. Kas di Bendahara Penerimaan tersebut per 31 Desember 2019 telah disetorkan ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2019
Gedung GAB I - Jakarta	827.600.000
Gedung GAB II - Bekasi Timur	140.500.000
Wisma Pandawa Ciumbuleuit Bandung	19.510.000
Wisma Pandawa Ciloto Cianjur	4.756.000
Kas di Bendahara Penerimaan	992.366.000

Dengan demikian, Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0

Kas Lainnya dan **C.3 KAS LAINNYA DAN SETARA KAS**

Setara Kas

Rp2.011.950.360.632

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp2.011.950.360.632** dan **Rp391.775.845.227** dimana terdapat kenaikan sebesar Rp1.620.174.515.405 atau sebesar 413,55 %.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.



Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

No	Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	2.568.000	-	2.568.000	100,00
2	Inspektorat Jenderal	-	-	-	-
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	394.234.674.179	337.290.648.267	56.944.025.912	16,88
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	1.253.683.373	158.840.000	1.094.843.373	689,27
5	Ditjen Linjamsos	2.991.826.780	29.372.196.960	(26.380.370.180)	(89,81)
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	1.613.467.608.300	24.954.160.000	1.588.513.448.300	6.365,73
7	Badiklit Pensos	-	-	-	-
Jumlah		2.011.950.360.632	391.775.845.227	1.620.174.515.405	413,55

Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp2.011.950.360.632 terdiri dari:

Kas Lainnya dan Setara Kas	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.618.418.390.121	54.485.196.960	1.563.933.193.161	2.870,38
Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	393.531.970.511	337.290.648.267	56.241.322.244	16,67
Jumlah	2.011.950.360.632	391.775.845.227	1.620.174.515.405	413,55

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kas lainnya dan setara Kas pada Sekretariat Jenderal per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.568.000 berupa Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran yang merupakan retur transfer pada unit kerja Biro Perencanaan atas pembayaran biaya perjalanan dinas atas nama Oktavia Dewi dan honor narasumber atas nama Ni Masjitoh pada kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial tanggal 13 Desember 2019 di Oasis Amir Hotel Jakarta.
- Kas Lainnya dan Setara Kas pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial per 31 Desember 2019 sebesar Rp394.234.674.179 berupa:
 - Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang terdapat pada Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial per 31 Desember 2019 sebesar Rp393.531.970.511. Mutasi atas Kas Lainnya di K/L dari Hibah dapat di tampilkan sebagai berikut:

Saldo Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada 31 Desember 2018	Rp	337.290.648.267
Mutasi tambah:	Rp	139.232.948.244
Pendapatan Hibah	Rp	139.232.948.244
Mutasi kurang:	Rp	(82.991.626.000)
Belanja Bantuan Sosial u/ Rehabilitasi Sosial	Rp	(7.728.899.000)
Belanja Bantuan Sosial u/ Pemberdayaan Sosial	Rp	(28.930.374.000)
Belanja Bantuan Sosial u/ Perlindungan Sosial	Rp	(33.704.703.000)
Belanja Bantuan Sosial u/ Penanggulangan Kemiskinan	Rp	(12.627.650.000)
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	393.531.970.511

Penjelasan atas Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Mutasi tambah merupakan Pendapatan Hibah berasal dari Dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dari penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang disetorkan oleh penyelenggaran untuk periode Januari s.d Desember 2019 sebesar Rp139.232.948.244

Mutasi Kurang sebesar (Rp82.991.626.000) dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Jumlah
Belanja Bantuan Sosial u/ Rehabilitasi Sosial	(7.728.899.000)
Belanja Bantuan Sosial u/ Pemberdayaan Sosial	(28.930.374.000)
Belanja Bantuan Sosial u/ Perlindungan Sosial	(33.704.703.000)
Belanja Bantuan Sosial u/ Penanggulangan Kemiskinan	(12.627.650.000)
Total	(82.991.626.000)

- b. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp702.703.668 pada satuan kerja Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial yang terdiri dari:

No	Uraian	Nilai Per 31 Desember 2019	Tanggal Setor	Nilai Setor	NTPN
1	Sisa Belanja Bantuan Sosial Bencana Alam di Selat Sunda Tahun 2019	150.000.000	13 Januari 2020	150.000.000	F417861QTUAC711A
2	Sisa Belanja Bantuan Sosial Bencana Alam di Maluku Tahun 2019	8.378.190	13 Januari 2020	8.378.190	1E6F33CIEEJ70F6J
3	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Negara	525.825.478	10 Januari 2020	525.825.478	56C6B8N3DE1HFJK3
4	Sisa Dana Hibah Direktorat PSDBS yang digunakan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga	18.500.000	20 Maret 2020	18.500.000	8FEC07QLTJLEM6UI
	Total	702.703.668		702.703.668	

3. Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial berupa Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp158.840.000 terdapat pada satuan kerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak atas sisa kegiatan dari penerimaan bantuan dana hibah luar negeri dari UNICEF. Atas sisa kegiatan ini telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 3 Januari 2019.

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.253.683.373 dengan rincian di tiap satuan kerja sebagai berikut:

No	Nama Satker	Nilai Per 31 Desember 2019	Tgl Setor	Nilai Setor	NTPN
1	Direktorat Rehsos Penyandang Disabilitas	1.172.400.000	14 Januari 2020	1.172.400.000	AC1D455DE3O1URP1
2	Direktorat Rehsos Anak	81.283.373	2 Maret 2020	81.283.373	F29491JNEPF4AGO3
	Total	1.253.683.373		1.253.683.373	

Penjelasan lebih lanjut atas tabel tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebesar Rp1.172.400.000,- merupakan sisa dana ASDP tahun 2019 yang terdapat pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas dana bantuan sosial yang tidak tersalurkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.172.400.000 dikarenakan 325 penerima gagal burekol.
- b. Kas Lainnya pada Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak sebesar Rp81.283.373 merupakan pendapatan jasa giro atas bantuan sosial yang terdapat di RPL 182 DB Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak di Bank Nasional Indonesia (BNI).



4. Kas Lainnya dan Setara Kas di Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial berupa Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing sebesar Rp1.383.218.230 dan Rp29.372.196.960.

Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp29.372.196.960 telah disetor ke kas negara per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Setoran sebesar Rp2.881.496.960 dirinci sebagai berikut:

NO	TANGGAL	KODE BILLING	NTPN	KODE AKUN	NOMINAL	KETERANGAN
1	30 Januari 2019	'001595500454	FEFA45N9601BQMF8	425917	1.575.209.650	Pengembalian Sisa Dana Bansos Pada RPL 182 Bank BTN Per 31 Des 2018
2	30 Januari 2019	'001595500457	A35545N9BGVPUHF8	425917	3.630.000	Pengembalian Sisa Dana Bansos Pada Rekening Escrow Bank BTN Per 31 Des 2018
3	31 Januari 2019	'000000021560	F6F190TCM4MMM21D	425917	1.297.657.310	* bag dari Rp1.646.605.105,00 ESCROW MANDIRI, sudah disetorkan namun berisikan dengan KPM NE 2018 7.247 KPM PDTT 2018 di tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp230.209.550,00
4	31 Januari 2019	'000000021561	F6F190TCM4MMM21D	425917	5.000.000	* bag dari Rp1.646.605.105,00 ESCROW MANDIRI, sudah disetorkan namun berisikan dengan KPM NE 2018 7.247 KPM PDTT 2018 di tanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp230.209.550,00
TOTAL					2.881.496.960	

- b. Setoran sebesar Rp26.490.700.000 dirinci sebagai berikut:

NOMINAL AWAL	NOMINAL YANG DISETORKAN	TANGGAL SETOR	NTPN	KETERANGAN
8.492.500.000	79.500.000	2 Juli 2019	0C9B939CCF86DI79	Pengembalian Dana Bansos PKH 159 KPM ASLUT Gagal Multiautokredit PDTT 2018 Bank BNI
	2.074.500.000	5 Agustus 2019	A06E41JNEGMTH1K4	Pengembalian Dana Bansos PKH, KPM ASPDB Gagal Multiautokredit PDTT 2018. Bank BNI
	3.234.500.000	24 September 2019	D8E5355DDR6282OD	Gagal Multiautokredit Dana Bansos PKH Tahap I Tahun 2018 di Rek BNI.
7.485.500.000	4.500.000	5 Agustus 2019	410A61JNEGMTH2II	Pengembalian Dana Bansos PKH, KPM ASPDB Gagal Multiautokredit PDTT 2018. Bank BNI. Selisih Temuan
	5.282.500.000	24 September 2019	6BA973CIE619E3TU	Gagal Multiautokredit Dana Bansos PKH Tahap 2 Tahun 2018 di Rek BNI.
10.512.500.000	10.509.500.000	2 Juli 2019	D8E5355DDR6282OD	Pengembalian Dana Bansos PKH 21.179 KPM KKS ASLUT NE Thn 2018 PDTT 2018, Bank BNI
	5.305.500.000	24 September 2019	D7A0C7QLTAT7F458	Gagal Multiautokredit Dana Bansos PKH Tahap 3 Tahun 2018 di Rek BNI.
200.000	200.000	4 Juli 2019	842E15THH57OMFO9	Pengembalian Dana Bansos PKH Yang Tidak Terdistribusi Thn 2016 & 2017 di Rek BTN
26.490.700.000	26.490.700.000			

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.991.826.780 dirinci setiap satuan kerja adalah sebagai berikut:

Kode Satker	Satker	31 Desember 2019
027.05.139013	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat	83.000.000
027.05.059016	Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	117.691.000
027.05.199009	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	6.449.297
027.05.440275	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	58.337.851
027.05.440281	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	927.698
027.05.440310	Direktorat Jaminan Sosial Keluarga	2.725.420.934
Total		2.991.826.780

- a. Pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat terdapat Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp83.000.000 per 31 Desember 2019, dan telah disetorkan pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL SETOR	NTPN	NOMINAL	KETERANGAN
17-01-2020	568823CIEEJEF8NP	12.000.000	Pengembalian belanja perjalanan dinas Kegiatan PKH Tahun 2019
17-01-2020	BA1557QLTJFCG7P1	69.000.000	Pengembalian belanja operasional keg. pendamping PKH Tahun 2019
17-01-2020	781406U8DOT14NN1	2.000.000	Pengembalian belanja perjalanan dinas keg PKH Tahun 2019
Jumlah		83.000.000	

- b. Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur terdapat Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp117.691.000 per 31 Desember 2019, dan telah disetorkan pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL SETOR	NTPN	NOMINAL	KETERANGAN
13-01-2020	4A3F63CIEEJC4HPK	9.667.500	Pengembalian Belanja Honor Tim Sekretariat PKH Kab/Kota Tahap 4 Tahun 2019
13-01-2020	7AC6C48VU85OHB9Q	4.000.000	Pengembalian belanja bahan utk ATK dan dokumentasi pelaporan kab/kota Tahap 4 Tahun 2019
13-01-2020	249A22G4UK0TOQC3	2.581.000	Pengembalian belanja bahan perlengkapan peserta keg. Rakor PKH Tahap 2 Tahun 2019
13-01-2020	82DF955DE3O2VR1D	2.250.000	Pengembalian belanja bahan perlengkapan peserta keg. Workshop Komplementaritas PKH Tahap 2 Tahun 2019
13-01-2020	EE8132G4UK0TORCK	2.904.000	Pengembalian Belanja fullboard keg. Rakor PKH Tahap 2 Tahun 2019
13-01-2020	CF4DE7QLTJF86RHP	2.592.000	Pengembalian Belanja fullboard keg. Workshop Komplementaritas PKH Tahap 2 Tahun 2019
13-01-2020	242B12G4UK0VNVU	29.625.000	Pengembalian Belanja Perjadin monitoring dan evaluasi kab/kota tahun 2019
13-01-2020	FC4E20N9UUS4UQFP	1.264.000	Pengembalian Belanja fullboard keg.rapat penyusunan laporan logistik tahap 2 tahun 2019
20-01-2020	A783F2G4UK162BF4	60.783.500	pengembalian belanja barang perjadin asistensi koordinasi wilayah Tahun 2019
22-01-2020	323321JNEPERQB0N	1.128.000	Pengembalian Belanja Honor Tim Sekretariat PKH Kab/Kota Tahap 4 Tahun 2019
22-01-2020	FDB1E61QTUAPRFPO	896.000	Pengembalian Belanja Perjadin kegiatan PSKBA Tahun 2019
Jumlah		117.691.000	

- c. Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan terdapat Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp6.449.297 per 31 Desember 2019, dan telah disetorkan pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL SETOR	NTPN	NOMINAL	KETERANGAN
13-02-2020	6D4E50N9UUV56HOO	3.829.000	pengembalian belanja barang perjadin paket meeting luar kota utk transport keg.PSKBA Logistik Angkatan 11 Tahun 2019
13-02-2020	DFFF67QLTJ8EMT2	2.620.297	Pengembalian belanja barang non operasional lainnya utk transport kegiatan Jambore PSKBA Tahun 2019
Jumlah		6.449.297	

- d. Pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam terdapat Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp58.337.851 per 31 Desember 2019, dan telah disetorkan pada tahun 2020 yang terdiri dari:

- 1) Kelebihan pembayaran belanja barang sebesar Rp47.996.033 dengan rincian sebagai berikut:



TANGGAL SETOR	NTPN	NOMINAL	KETERANGAN
27-02-2020	C1D8C8N3DE51GO3R	16.556.333	Pengembalian belanja barang atas selisih perhitungan Opname Cash BKU Bendahara
27-02-2020	65C9255DE3RFSN7T	5.260.000	Pengembalian belanja barang atas kegiatan Rakor KSB Di Cilacap dan Pangandaran Tahun 2019
28-01-2020	FE3E16U8DOTAH875	25.351.800	Pengembalian belanja barang terkait penyeteroran monitoring dan evaluasi program tahap 1 Dit. PSKBA tahun 2019
28-01-2020	7F8A78N3DE23B7E7	827.900	Pengembalian belanja barang terkait penyeteroran monitoring dan evaluasi program tahap 2 Dit. PSKBA tahun 2019
Jumlah		47.996.033	

- 2) Pajak kegiatan pembentukan Kampung Siaga Bencana tahun 2019 yang masih berada di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019, yang telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 12 Februari 2020 sebesar Rp10.341.818 dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	PPN	NTPN	PPH 23	NTPN
1	Konsumsi Penyuluhan Pembentukan KSB di Cianjur	545.455	C2C455B6H8O8MKTU	109.091	3C17F0T323SBQRAJ
2	Sertifikat Pelatihan Pembentukan KSB di Cianjur	109.091	023901PGHUEQUA02	21.818	CE38E5B6H8OD9LVQ
3	Konsumsi Pelatihan Pembentukan KSB di Cianjur	327.273	3C1B02LU1P1DIG0H	65.455	F401E80FP8Q1B
4	Perlengkapan Pelatihan Pembentukan KSB di Cianjur	1.363.636	41120741GTTEAL1O	272.727	4DF435B6H8OMLLJU
5	Konsumsi Simulasi Pembentukan KSB di Cianjur	1.363.636	377B8741GTTGN29S	272.727	07BE43IBHJK4O4BO
6	Sewa Sound System Pembentukan KSB di Cianjur	272.727	F35351PGHUFNCNCQU	54.545	C541AO0LI9AKJ63C
7	Sewa Kendaraan Pembentukan KSB di Cianjur	327.273	0A489O0LI9ALDISG	65.455	79E4B741GTTTGPJ34
8	Konsumsi Penyuluhan Pembentukan KSB di Lombok Utara	545.455	16E33741GTVF80IK	109.091	346930T323UP09PV
9	Sertifikat Pelatihan Pembentukan KSB di Lombok Utara	109.091	BFC2A0T323TCILJB	21.818	589AC741GTVB5VHG
10	Konsumsi Pelatihan Pembentukan Perlengkapan Pelatihan KSB di Lombok Utara	327.273	664CC0T323TATHF	65.455	476C72LU1P23V23V6L
11	Pembentukan KSB di Lombok Utara	1.363.636	C618B1PGHUFLD0LE	272.727	2C1922LU1P22H7PP
12	Konsumsi Simulasi Pembentukan KSB di Lombok Utara	1.363.636	A84B20T323VGR TDV	272.727	AB0EA00LI9D4UN5C
13	Sewa Sound System Pembentukan KSB di Lombok Utara	272.727	E63FA0T323T4QQ0N	54.545	F43E5B6H8P3BRK6
14	Sewa Kendaraan Pembentukan KSB di Lombok Utara	327.273	39731PGHUFGIT2Q	65.455	A224700LI9AN4SBK
Jumlah		8.618.182		1.723.636	
Total			10.341.818		

- e. Pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial terdapat Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp927.698 per 31 Desember 2019, dan telah disetorkan pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL SETOR	NTPN	NOMINAL	KETERANGAN
31/01/2020	5B4637QLTJPQ4282	870.437	Pengembalian belanja barang dalam rangka Kegiatan Sarasehan Nasional Kearifan Lokal
31/01/2020	C962648VU965GHSS	57.261	Pengembalian belanja barang dalam rangka Kegiatan Dukungan HKSAN 2019
Jumlah		927.698	

- f. Pada Direktorat Jaminan Sosial Keluarga terdapat Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.725.420.934 per 31 Desember 2019 yang terdiri dari:

- 1) Pengembalian belanja barang sebesar Rp1.116.812.384 dan telah disetorkan ke kas negara pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:



TANGGAL SETOR	NTPN	NOMINAL	KETERANGAN
03/01/2020	21C8F6U8DOSJ5BFV	2.077.586	Pengembalian Belanja Perjadin Biasa Keg Konsolidasi dan Dialog Nasional PKH Tahap VII Tahun 2019
03/01/2020	2E86748VU95DUHV2	38.962.888	Pengembalian Belanja Perjadin Paket Meeting Luar Kota Keg Appreciation Day Tahun 2019
03-01-2020	9CE4A1JNEPE9N5S7	8.755.200	Pengembalian Belanja Perjadin Biasa Keg Advokasi Bansos Tahap 3 Tahun 2019
03-01-2020	227AF61QTUA7O91U	50.000.000	Pengembalian Belanja Perjadin Biasa Keg Verifikasi & Validasi KPM Terdampak Bencana Tahun 2019
03-01-2020	B4BC348VU95EU9H6	2.378.073	Pengembalian Belanja Perjadin Biasa Advokasi Permasalahan Bansos Tahap IV Tahun 2019
03-01-2020	32CA661QTUA7OAD2	16.191.100	Pengembalian Belanja Perjadin Biasa Keg Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Tahap IV Tahun 2019
03-01-2020	FEF680N9UURTAUVU	1.665.700	Pengembalian Belanja Perjadin Biasa Keg Koordinasi Lintas Sektor Tahap 5 Tahun 2019
06-01-2020	6B1C461QTUA9RTFG	16.530.000	Pengembalian Honor Tim Narasumber Rakor PKH Keg Workshop Komplementaritas Tahun 2019



08-01-2020	906C43CIEEJ5T6FR	34.576.000	Pengembalian Belanja Perjadin Biasa Keg Verifikasi & Validasi Terdampak Bencana Tahun 2019
08-01-2020	999718N3DE1GB7A9	3.657.400	Pengembalian Belanja Perjadin Biasa Keg Verifikasi dan Validasi KPM Terdampak Bencana Tahap 2 Tahun 2019
08-01-2020	69F287QLTJF3U7QQ	100.000.000	Pengembalian Belanja Perjadin Biasa Keg Konsolidasi Dialog Nasional PKH Tahap VIII Tahun 2019
08-01-2020	5DD653CIEEJ5T9S9	11.807.125	Pengembalian Belanja Perjadi Biasa Keg Supervisi & Monitoring PKH Tahap 2 Tahun 2019
08-01-2020	10D1755DE3NUNA3H	39.491.100	Pengembalian Belanja Perjadin Biasa Keg Supervisi Pelaksanaan P2K2/FDS Tahun 2019
08-01-2020	660308N3DE1GBABF	50.000.000	Pengembalian Belanja Perjadin Biasa Keg Validasi Penggenapan KPM PKH di Papua dan Papua Barat Tahun 2019
08-01-2020	C63C661QTUAB4B7G	50.000.000	Pengembalian Belanja Perjadin Biasa Keg Penanganan Pengaduan PKH Tahap 3 TA 2019
10-01-2020	D9A4A1JNEPEG8SJB	1.223.700	Pengembalian Belanja Barang Kegiatan Pendampingan dan Penanganan TLHP Tahap VI
10-01-2020	E35652G4UK0SLT22	90.000	Pengembalian belanja Barang Honor Tim Perencanaan



10-01-2020	86BC955DE3O1STVH	1.790.000	Pengembalian Belanja Barang Kegiatan Konsolidasi Tahap VII
10-01-2020	6B1681JNEPEG8UHR	53.738.080	Pengembalian Belanja Barang Kegiatan Penanganan Pengaduan 3
10-01-2020	ACB5148VU95LFUMK	51.288.150	Pengembalian Belanja Barang Kegiatan Validasi Penggenapan KPM PKH
10-01-2020	2DF252G4UK0SLURS	200.000.000	Pengembalian Belanja Barang Kegiatan Konsolidasi Tahap VIII
10/01/2020	6BE1F61QTUAE9VT4	63.291.053	Pengembalian Belanja Barang Kegiatan Workshop Komplementaritas
10-01-2020	0524955DE3O1T10N	7.633.840	Pengembalian Belanja Barang Kegiatan TLHP Tahap VII
10-01-2020	2BBEC61QTUAEA1CK	34.335.900	Pengembalian Belanja Barang Kegiatan Lintas Sektor Tahap VI
17-01-2020	0B3691JNEPEMM369	12.238.480	Pengembalian Belanja Barang Kegiatan Konsolidasi & dialog Nasional Tahap 8
17-01-2020	A55960N9UUSA97OG	1.986.329	Pengembalian Belanja Barang Kegiatan Advokasi Permasalahan Bansos Tahap IV 2019
20-01-2020	577CC55DE3OBBAUL	180.000	Pengembalian Belanja barang Kegiatan FM Workshop Pemetaan Potensi Pengembangan Kewirausahaan KPM PKH
02/11/2020	D334B61QTUDDIDKC	675.000	Pengembalian Belanja Honor Tim Kegiatan Konsolidasi dan Dialog Nasional PKH Tahun 2019
02/11/2020	133FB2G4UK3RUDOA	147.500	Pengembalian Belanja Honor Tim Penyusunan Bahan Sosialisasi dan



			Edukasi Bansos Non Tunai PKH Tahun 2019
02/11/2020	D5D691JNEPHFCEN	370.000	Pengembalian Belanja Honor Kegiatan Penyusunan Rekonsiliasi Data Penyaluran Bansos PKH dengan Lembaga Bayar Tahun 2019
02/12/2020	86CC961QTUDFK63Q	1.000.000	Pengembalian Belanja Perjadin Biasa Pelaksanaan Rekrutmen SDM PKH Pegganti Tahun 2019 Gel. 3
27-01-2020	B0BBD6U8DOT6F3OV	190.000	Pengembalian Belanja Honor Tim Assesmen Calon SDM PKH Th 2019 Gelombang 2
28-01-2020	7AE6A6U8DOTAH60H	53.356.000	Pengembalian Belanja Barang Perjadin Paket Meeting Luar Kota Keg Bimbingan Pemantapan e-PKH Tahap V Tahun 2019
31-01-2020	4A4926U8DOTDKM77	193.533.000	Pengembalian Belanja Barang Kegiatan Penanganan Pengaduan Tahap I Tahun 2019
31-01-2020	F99CA3CIEEJS0LVJ	13.653.180	Pengembalian Belanja Barang Kegiatan Konsolidasi Tahap 4 Tahun 2019
Jumlah		1.116.812.384	

- 2) Saldo KKS Tidak Terdistribusi tahun 2019 yang masih berada di rekening GNC Bank Mandiri per 31 Desember 2019 dengan nomor rekening 991.0000.144.924 dan telah dikembalikan ke kas negara pada tanggal 23 Maret 2020 NTPN D8C8C5U8DP3392EJ sebesar Rp1.608.608.550
5. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp1.613.467.608.300 dan Rp24.954.160.000. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 di setiap satuan kerja Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin adalah sebagai berikut:



Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	8.597.500	-
Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	794.873.886.540	2.902.680.000
Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	415.487.344.981	8.562.180.000
Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	403.078.479.279	13.489.300.000
Dinas Sosial Provinsi Lampung	19.300.000	-
Jumlah	1.613.467.608.300	24.954.160.000

- a. Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp8.597.500,- terdiri dari:

Perincian	Jumlah
Honor Tenaga Ahli berjumlah 1 (satu) orang pada bulan Desember 2019 yang tidak berhasil masuk ke Rekening Penerima, disebabkan oleh tidak ditemukannya Nomor Rekening	6.930.000
Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Kegiatan Pameran HKSN 2019	1.567.500
Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Kegiatan Rekonsiliasi Barang Milik Negara	100.000
Total	8.597.500

- b. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I sebesar Rp794.873.886.540 dengan rincian sebagai berikut:

Neraca	Bank Mandiri	BNI	BRI	BTN	Total
RPL 2019	129.988.361.351	80.301.980.000	322.397.279.758	1.645.473.374	534.333.094.483
Saldo Escrow 2018	565.098.973	88.302.812.907	51.910.435.869	1.012.132.886	141.790.480.635
Saldo Escrow 2019	5.058.890.384	109.760.539.142		830.990.804	115.650.420.330
Saldo Rekening PNPL	2.071.520.000				2.071.520.000
Timeout Transaction	1.028.371.092				1.028.371.092
Total	138.712.241.800	278.365.332.049	374.307.715.627	3.488.597.064	794.873.886.540

- c. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II sebesar Rp415.487.344.981 dengan rincian sebagai berikut:

Neraca	Bank Mandiri	BNI	BRI	BTN	Total
RPL 2019	19.966.394.856	70.203.100.000	134.283.110.874	18.550.704.545	243.003.310.275
Saldo Escrow 2017	173.782.773	-	393.464.463	407.152.791	974.400.027
Saldo Escrow 2018	2.708.986.669	65.119.938.198	7.185.818.360	4.215.050.224	79.229.793.451
Saldo Escrow 2019	7.071.432.377	73.610.843.257	-	3.569.230.751	84.251.506.385
Saldo Rekening PNPL	3.644.190.000	-	-	-	3.644.190.000
Timeout Transaction	4.384.144.843	-	-	-	4.384.144.843
Total	37.948.931.518	208.933.881.455	141.862.393.697	26.742.138.311	415.487.344.981

- d. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III sebesar Rp403.078.479.279 dengan rincian sebagai berikut:

Neraca	Bank Mandiri	BNI	BRI	BTN	Total
RPL 2019	53.643.770.504	97.759.420.000	160.011.112.296	6.652.439.603	318.066.742.403
Saldo Escrow 2018	498.453.456	63.345.268.928	7.727.471.419	489.106.875	72.060.300.678
Saldo Escrow 2019	8.285.428.627	-		497.793.711	8.783.222.338
Saldo Rekening PNPL	3.201.550.000				3.201.550.000
Timeout Transaction	966.663.860				966.663.860
Total	66.595.866.447	161.104.688.928	167.738.583.715	7.639.340.189	403.078.479.279



- e. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Provinsi Lampung sebesar Rp19.300.000 dengan rincian sebagai berikut:

Perincian	Jumlah
Kelebihan Pembayaran Uang Harian Fullboard yang melebihi Standar Belanja Minimal (SBM) Tahun 2019	3.000.000
Kelebihan Pembayaran Transport Peserta Bimtek Penerima Manfaat melebihi Standar Belanja Minimal (SBM) Tahun 2019	3.800.000
Kelebihan Pembayaran Paket Fullboard Meeting	5.000.000
Kelebihan Pembayaran Pembelian Papan Nama KUBE	7.500.000
Total	19.300.000

Belanja Dibayar di Muka (prepaid)
Rp0

C.4 BELANJA DIBAYAR DI MUKA (PREPAID)

Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp508.490.858** dimana terjadi penurunan sebesar (Rp508.490.858) atau sebesar (100) %.

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2018 terdapat pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang telah menganggarkan Belanja Barang sebesar Rp34.149.448.000 dengan realisasi sebesar Rp32.741.940.525 atau 95,88% dari anggaran tahun 2018. Dari realisasi tersebut sebesar Rp1.920.948.907 digunakan untuk Belanja Pemeliharaan. Pengujian lebih lanjut atas Berita Acara Rekonsiliasi antara Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang diwakili oleh Kasubag Rumah Tangga dengan PT Pertamina Retail yang diwakili Asisten Manager Tax dan Account Representative pada 23 April 2019 menyatakan terdapat selisih antara nilai Top Up sebesar Rp596.904.000 dengan pemakaian kartu (pembelian di SPBU) pada tahun 2018 sebesar Rp88.413.142 sehingga masih terdapat sisa Top Up sebesar Rp508.490.858 per 31 Desember 2018. Sampai dengan 31 Desember 2019 sisa top up sebesar Rp508.490.858 tersebut telah terpakai secara keseluruhan.

Piutang Bukan Pajak
Rp360.334.178.898

C.5 PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar **Rp360.334.178.898** dan **Rp343.275.773**

Piutang Bukan Pajak merupakan piutang yang timbul selain dari Piutang Pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Rincian Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:



No	Unit Kerja Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	284.903.600	57.348.945	227.554.655	396,79
2	Inspektorat Jenderal	12.707.630	8.578.580	4.129.050	48,13
3	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	477.255.901	99.981.375	377.274.526	377,34
4	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	8.892.291.018	79.168.473	8.813.122.545	11.132,11
5	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	350.128.646.458	20.438.475	350.108.207.983	1.712.985,96
6	Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	26.061.805	27.076.135	(1.014.330)	(3,75)
7	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	512.312.486	50.683.790	461.628.696	910,80
Jumlah		360.334.178.898	343.275.773	359.990.903.125	104.869,30

Piutang Bukan Pajak tahun 2018 sebesar Rp343.275.773 merupakan Piutang Lainnya dan telah disetor ke kas negara pada tahun 2019 dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut;

1. Sekretariat Jenderal terdapat piutang lainnya sebesar Rp57.348.945 dengan kualitas lancar dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	Keterangan
Piutang Lainnya - Peng Belanja Tukin Des 2018	53.111.125	Belum disetorkan per 31 Desember 2018
Piutang Lainnya - Peng Belanja Perjadin TW IV TA 2018	960.700	Belum disetorkan per 31 Desember 2018
Piutang Lainnya - Peng Belanja Sew a Des 2018	3.277.120	Belum disetorkan per 31 Desember 2018
Total Piutang Bukan Pajak - Piutang Lainnya	57.348.945	

2. Inspektorat Jenderal terdapat piutang lainnya yang berupa kelebihan pembayaran tunjangan kinerja bulan Desember 2018 pegawai Inspektorat Jenderal sebesar Rp8.578.580 dan belum disetorkan per 31 Desember 2018.
3. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial terdapat piutang lainnya sebesar Rp99.981.375 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	Keterangan
Tunjangan Khusus/Kegiatan	40.145.025	Belum disetorkan per 31 Desember 2018
Uang Makan Pegawai	59.836.350	Belum disetorkan per 31 Desember 2018
Jumlah	99.981.375	

4. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terdapat Piutang Lainnya sebesar Rp79.168.473 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	Keterangan
Pengembalian tunjangan kinerja (tukin) pegawai	54.343.823	Belum disetorkan per 31 Desember 2018
Pengembalian uang makan pegawai	23.462.650	Belum disetorkan per 31 Desember 2018
Pengembalian perjalanan dinas	1.362.000	Belum disetorkan per 31 Desember 2018
Jumlah	79.168.473	

5. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial terdapat piutang lainnya sebesar Rp20.438.475 yang merupakan Pengembalian Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember 2018 yang berada pada di tangan pegawai dan belum disetorkan per 31 Desember 2018.
6. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin terdapat piutang lainnya sebesar Rp27.076.135 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah	Keterangan
Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja ASN	13.909.585	Belum disetorkan per 31 Desember 2018
Kelebihan Pembayaran Uang Makan ASN	11.954.050	Belum disetorkan per 31 Desember 2018
Kelebihan Pembayaran Honor Tenaga Ahli PPNFN	1.212.500	Belum disetorkan per 31 Desember 2018
Jumlah	27.076.135	



7. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial terdapat piutang lainnya sebesar Rp50.683.790 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah	Keterangan
Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) pegawai	49.769.140	Belum disetorkan per 31 Desember 2018
Kelebihan pembayaran uang makan pegawai	914.650	Belum disetorkan per 31 Desember 2018
Jumlah	50.683.790	

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2019 senilai Rp360.334.178.898 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp284.903.600 merupakan kelebihan pembayaran belanja yang masih berada di pihak ketika sampai dengan 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Satuan Kerja Pusat Data dan Informasi sebesar Rp202.712.738,- dengan rincian:

No.	Keterangan Piutang	Piutang
1	Piutang Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Pake Meeting Dalam Kota TA 2019	24.725.000
1	Piutang Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Pake Meeting Dalam Kota TA 2019	24.225.000
2	Piutang Pengembalian Belanja Sew a TA 2019	153.762.738
	Total Piutang	202.712.738

- b. Satuan Kerja Sekretariat Jenderal sebesar Rp82.190.862,- dengan rincian:

No.	Keterangan Piutang	Piutang
1	Piutang Pengembalian Belanja Tunjangan Kinerja Pegawai Bulan Desember 2019	Rp 62.397.910
2	Piutang Pengembalian Belanja Uang Makan Pegawai Bulan Desember 2019	Rp 5.208.800
3	Piutang Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa TA 2019	Rp 13.546.969
4	Piutang Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS TA 2019	Rp 2.183
5	Piutang Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS TA 2019	Rp 480.000
6	Piutang Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS TA 2019	Rp 555.000
	Total Piutang	Rp 82.190.862

2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp12.707.630 yang merupakan Piutang Lainnya yang berupa pengembalian tunjangan kinerja pegawai Inspektorat Jenderal periode bulan Desember 2019 sebesar Rp12.223.730 yang telah dilakukan pemotongan pada tunjangan kinerja untuk bulan Januari 2020 dan pengembalian kelebihan gaji pegawai atas nama Rustiyono sebesar Rp483.900.
3. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp477.255.901 dengan rincian:



No	Satuan Kerja	Total Piutang	Keterangan
1	Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial	39.573.035	Kelebihan pembayaran Tunjangan Khusus/Kegiatan PNS
		47.384.750	Kelebihan pembayaran uang makan
		2.533.270	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Khusus/Kegiatan PNS
	Subtotal Piutang Setditjen Dayasos	89.491.055	
2	Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	83.547.755	kelebihan pembayaran atas Belanja sisa dana BOP (tidak habis pakai) SLRT TA 2019
3	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	4.601.606	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah yang sampai dengan 31 Desember 2019 masih berada di pihak ketiga
4	Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Asmat	52.824.342	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah yang sampai dengan 31 Desember 2019 masih berada di pihak ketiga
		184.885.198	Pengembalian atas pekerjaan rumah KAT Kampung Kairin yang belum selesai per 31 Desember 2019 dana tersebut masih berada di pihak ketiga
	Subtotal Dinsos Kab. Asmat	237.709.540	
5	Dinas Sosial Provinsi Nunukan	61.905.945	Garansi Bank Pembangunan Rumah KAT yang sampai dengan 31 Desember 2019 masih berada di pihak ketiga
	Total	477.255.901	

4. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp8.892.291.018 dengan rincian:
- Piutang Bukan Pajak sebesar Rp45.177.839 yang merupakan kelebihan pembayaran belanja pegawai pada 31 Desember 2019 masih berada di pegawai terdapat pada satuan kerja:

PIUTANG BUKAN PAJAK	NILAI
Loka Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus "Kahuripan" Di Sukabumi	3.812.790
Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya "Satria" Di Baturraden	2.865.535
Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental "Phala Martha" Di Sukabumi	327.990
Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik "Prof. Dr. Soeharso" Di Surakarta	1.925.355
Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik "Budi Perkasa" Di Palembang	2.874.075
Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual "Nipotow" Di Palu	1.486.980
Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental "Dharma Guna" Di Bengkulu	1.288.810
Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara "Melati"	250.055
Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus "Toddopuli" Di Makassar	200.000
Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	23.424.534
Loka Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	6.721.715
Total	45.177.839

- Piutang Lainnya dimana posisi per 31 Desember 2019 dana bantuan sosial berada di Instansi Penerima Wajib Laport (IPWL) sebesar Rp7.321.271 pada satuan kerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA.
- Piutang Lainnya atas Penerima Manfaat yang tidak mencairkan bantuan dimana posisi per 31 Desember 2019 dana bantuan sosial berada di Rekening penerima bantuan sosial sebesar Rp8.839.791.908 dengan rincian sebagai berikut:



No	Satuan Kerja	Total Piutang	Tgl Setor	NTPN	Jumlah Setor	Keterangan
1	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak	109.000.000	7 Februari 2020	976A52G4UK3OSH30	109.000.000	Surat Perintah Pengembalian ke Kas Negara tanggal 6 Februari 2020; Berita Acara Hasil Penelitian terhadap Penyaluran Dana Bansos Rehsos Anak tanggal 4 Februari 2020 dan disetor ke kas Negara
2	Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	458.400.000	11 Februari 2020	779B148VU981PRQ8	458.400.000	Penerima Manfaat yang tidak mencairkan bantuan dimana posisi per 31 Desember 2019 dana bansos berada di Rekening penerima bansos Bantu LU Surat Perintah Pengembalian ke Kas Negara tanggal 10 Februari 2020; Berita Acara Penelitian tanggal 10 Februari 2020
		372.000.000	11 Februari 2020	A97D155DE3R26U17	372.000.000	Penerima Manfaat yang tidak mencairkan bantuan dimana posisi per 31 Desember 2019 dana bansos berada di Rekening Penerima Bansos Dukungan Keluarga Surat Perintah Pengembalian ke Kas Negara tanggal 10 Februari 2020 Berita Acara Penelitian tanggal 10 Februari 2020
	Subtotal Piutang Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	830.400.000			830.400.000	
3	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	7.650.119.797	27 Maret 2020	B59443CIEEPMNOOT	7.291.191.462	Berita acara hasil penelitian terhadap penyaluran dana bansos asistensi sosial penyandang disabilitas (ASPD) tahun 2019 tanggal 1 April 2020
			14 April 2020	7025D55DE412HA4L	355.418.335	Surat perintah penyetoran ke kas negara Nomor B.334/Kemensos/4.3/BS.01.02/4/2020 tanggal 2 April 2020.
			08 April 2020	56CF28N3DEAE2MRL	3.600.000	Surat perintah penyetoran ke kas negara Nomor 336/Kemensos/4.3/BS.01.02/4/2020 tanggal 3 April 2020
			Subtotal Piutang RSPD		7.650.209.797	
		250.272.111	27 Maret 2020	C74281JNEPKTTOR3	250.272.111	Belum disetorkan per 31 Desember 2019
	Subtotal Piutang Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	7.900.391.908				
Total		8.839.791.908				

5. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial di sebesar Rp350.128.646.458 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kelebihan pembayaran belanja pegawai dan belanja barang sebesar Rp78.679.960 dimana per 31 Desember masih berada di pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	Keterangan
Potongan Tunjangan Kinerja pegawai bulan Desember 2019 yang akan disetorkan pada Bulan Januari 2020 melalui mekanisme potongan tagihan Tunjangan Kinerja Januari 2020	27.579.960	Belum Disetorkan Per 31 Desember 2019
Kelebihan pembayaran atas honor SDM PKH bulan Desember 2019 pdp PKH Akses Kab Pulau Taliabu Kec Ledo An. Suhartini	3.300.000	Telah disetor ke kas negara tanggal 26 Februari 2020 dengan NTPN ECADA61QTUDSSULQ
Kelebihan pembayaran atas honor SDM PKH Bln September - Desember 2019 pdp PKH Kota Banjarmasin A.n Muliani	10.400.000	Telah disetor ke kas negara tanggal 28 Februari 2020 NTPN 80CF661QTUDS61A6
Kelebihan pembayaran atas honor SDM PKH bulan November Th 2019 An Arief Rahman Pdp PKH Kab Sumenep	200.000	Telah disetor ke kas negara tanggal 3 Januari 2020 dengan NTPN 12CF21JNEPE9OL51
Kelebihan pembayaran atas honor SDM PKH Bln Januari -Maret Th 2019 a.n Srijuliate pdp PKH Kab Katingan	8.400.000	Telah disetor ke kas negara tanggal 8 Januari 2020 dengan NTPN FD4908N3DE1DOIPV
Kelebihan pembayaran atas honor bulan mei s.d agustus 2019 SDM PKH Kec. Besuki Kab Situbondo prov jatim a.n Cucuk Faisal, S.Pd	8.000.000	Telah disetor ke kas negara tanggal 03 Februari 2020 dengan NTPN 521F86U8DOTCJ74H
Kelebihan pembayaran atas honor SDM PKH Kab. Pasaman an Harna Dewi bulan Mei - Desember 2019	20.800.000	Telah disetor tanggal 07 Februari 2020 dengan NTPN A8FE66U8DOVJMQ7F
Jumlah	78.679.960	

- b. Kelebihan pembayaran Hasil Temuan Inspektorat Jenderal tentang Penyalahgunaan Dana Bansos KPM PKH oleh PDP Sosial PKH Kec. Musik kab. Boyolali telah disetor ke kas negara tanggal 13 Januari 2020 dengan NTPN 0B6807QLTJF74C0C sebesar Rp9.575.000
- c. Sisa dana Bantuan Sosial per 31 Desember 2019 masih berada di rekening penerima bantuan sosial dikarenakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang tidak terdistribusi dan Keluarga Penerima Manfaat yang tidak bertransaksi sebesar Rp350.040.391.498 dengan rincian:

Kategori	Penyaluran	Bank	Jumlah Piutang	Tgl setor	Total Setor	Keterangan
KKS yang tidak terdistribusi	2017-2018	BNI	31.460.880.783	20-Apr-20	47.796.967.559	NTPN 26EF61JNEPNK0DP1
KKS yang tidak terdistribusi	2019	BNI	31.889.559.116	21-Apr-20	15.553.472.340	NTPN 5B2366IQTUJ1B44
KPM Tidak Bertransaksi	2016-2018	BNI	25.266.961.963			Telah dilakukan perintah pengembalian ke kas negara dengan Nomor Surat .639/3/BS.01.01/4/2020 tanggal 29 April 2020
KPM Tidak Bertransaksi	2019	BNI	64.707.145.840			Telah dilakukan perintah pengembalian ke kas negara dengan Nomor Surat .640/3/BS.01.01/4/2020 tanggal 29 April 2020
KPM Tidak Bertransaksi	2016-2018	BRI	93.851.642.778			Telah dilakukan perintah pengembalian ke kas negara dengan Nomor Surat .640/3/BS.01.01/4/2020 tanggal 29 April 2020
KPM Tidak Bertransaksi	2019	BRI	102.864.201.018			Telah dilakukan perintah pengembalian ke kas negara dengan Nomor Surat .640/3/BS.01.01/4/2020 tanggal 29 April 2020
Total			350.040.391.498		63.350.439.899	

6. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Rp26.061.805 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah	Keterangan
Piutang Pembayaran Uang Makan	11.291.450	Belum disetorkan per 31 Desember 2019
Piutang Pembayaran Tunjangan Khusus	9.041.130	Belum disetorkan per 31 Desember 2019
Piutang Pembayaran Honor Tenaga Ahli	4.043.910	Belum disetorkan per 31 Desember 2019
Piutang Pembayaran Honor Pramubakti	1.685.315	Belum disetorkan per 31 Desember 2019
Jumlah	26.061.805	

7. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp512.312.486 dengan rincian:

Satuan Kerja	Jumlah Piutang
Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluh Sosial	20.919.125
Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung	19.111.407
Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung	10.104.345
Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang	3.506.295
Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin	10.062.605
Pusat Penyuluhan Sosial	2.419.360
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	324.497.877
Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial	121.691.472
Total	512.312.486

- a. Satuan kerja Sekretariat Badiklitpensos sebesar Rp20.919.125,- dengan rincian:



Uraian	Jumlah Piutang	Tanggal Setor	Jumlah Setor	NTPN
Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja bulan Desember 2019	1.411.325	05 Maret 2020	1.411.325	9B9586U6DP2KM4U
Kelebihan pembayaran belanja bahan non operasional lainnya /Short Course Tahun 2019	19.507.800	30 Maret 2020	19.507.800	750502G4UK7E9JBA
Total	20.919.125		20.919.125	

- b. STKS Bandung sebesar Rp19.111.407 berupa kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2019 dan telah disetorkan ke kas negara tanggal 17 Januari 2020 dengan NTPN 359A248VU95RSO4K
- c. BBPPKS Bandung sebesar Rp10.104.345 yang merupakan kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2019 dan telah disetorkan ke kas negara tanggal 7 Januari 2020 dengan NTPN 7EE853CIEEJ5PUF3.
- d. BBPPKS Padang sebesar Rp3.506.295 berupa kelebihan pembayaran uang tunjangan kinerja dan telah disetorkan ke kas negara tanggal 16 Januari 2020 NTPN FD5BF6U8DOTO14K3
- e. BBPPKS Banjarmasin sebesar Rp10.062.605 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Piutang	Tanggal Setor	Jumlah Setor	NTPN
Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja bulan Desember 2019	3.131.505	20 Januari 2020	3.131.505	CD23C1JNERCPMN6V
Kelebihan pembayaran belanja Gaji a.n Evi Budiarti Rafiah	6.931.100	15 Januari 2020	6.931.100	982E50N9UUS7VF9Q
Total	10.062.605		10.062.605	

- f. Puspensos sebesar Rp2.419.360 yang merupakan kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2019 dan telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 24 Januari 2020 dengan NTPN CAEF37QLTJEJRILU.
- g. Pusdiklat Kesejahteraan Sosial sebesar Rp324.497.877 yang terdiri dari:



Uraian	Jumlah Piutang	Tanggal Setor	Jumlah Setor	NTPN
Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) bulan Desember 2019	6.762.110	28 Januari 2020	6.762.110	B5F7CON9UUSJJPHE
Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas biasa Tahun 2019	165.427.800	28 Januari 2020	1.782.000	BA3162G4UK1CDTJ6
		28 Januari 2020	11.500	0ECEC1JNEPF00VCL
		04 Februari 2020	139.703.100	13F813CIEEM2VNSJ
		04 Februari 2020	8.734.000	0F7301JNEPHA5P47
		04 Februari 2020	3.958.600	550D18N3DE4DDON1
		03 Februari 2020	5.045.600	065CC48VU98EA3CE
		03 Februari 2020	5.500	BD3922G4UK3LG7PU
		03 Februari 2020	242.500	FB4363CIEEM1T8JJ
		03 Februari 2020	70.000	D57B27QLTJHVUA46
		03 Februari 2020	2.380.000	544560N9UUUSMAF6
Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota tahun 2019	520.000	03 Februari 2020	3.495.000	774216U8DOVJHBK9
		4 Februari 2020	300.000	6702A8N3DE4DEK8J
Kelebihan pembayaran honor jasa profesi	15.340.000	7 Februari 2020	220.000	C72FD7QLTJH17415
		28 Januari 2020	3.135.000	B9D8D61QTUAU24K0
		28 Januari 2020	950.000	C05C755DE3OHL5CV
		28 Januari 2020	1.330.000	2DA A A 7QLTJFMS6VC
		03 Februari 2020	280.000	96D951JNEPH9369P
		03 Februari 2020	85.000	EAC4C0N9UUUSM6JO
		03 Februari 2020	510.000	C3B746U8DOVJH8T3
		07 Februari 2020	910.000	DFE5248VU98FJAB0
		07 Februari 2020	1.700.000	E024B3CIEEM369KF
		07 Februari 2020	1.080.000	E4B8E6U8DOVKQ5SJ
		07 Februari 2020	280.000	CD08C48VU98FJ5HI
		07 Februari 2020	3.570.000	D7C2D0N9UUUTV1UO
		07 Februari 2020	160.000	B08050N9UUUTV38U
		19 Februari 2020	1.350.000	633F63CIEEMDISHJ
Kelebihan pembayaran perjalanan dinas paket meeting luar kota	136.227.967	28 Januari 2020	3.700.000	8D1512G4UK1CE1NM
		28 Januari 2020	150.000	F57556U8DOTAF0BF
		28 Januari 2020	2.400.000	C971C0N9UUSJK526
		28 Januari 2020	1.200.000	B1C222G4UK1CE6NM
		03 Februari 2020	25.146.200	1FFEB61QTUD73L9S
		03 Februari 2020	220.000	052A87QLTJHVU91G
		07 Februari 2020	1.535.000	F511C6U8DOVKQ8GL
		07 Februari 2020	22.488.700	3646C61QTUD8D8DG
		07 Februari 2020	10.194.400	654F161QTUD8D9CO
		07 Februari 2020	19.420.299	37FF848VU98FJ69A
		07 Februari 2020	318.268	CF9AD3CIEEM363KJ
		07 Februari 2020	21.891.300	7D3208N3DE4DK4C7
		03 Februari 2020	27.563.800	B21298N3DE4CB1H7
Kelebihan pembayaran honor output kegiatan	220.000	7 Februari 2020	150.000	77FC47QLTJH17AUG
		7 Februari 2020	70.000	A26F23CIEEM362FN
Total	324.497.877		324.497.877	

- h. Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial sebesar Rp121.691.472 dirinci sebagai berikut:



Uraian	Jumlah Piutang	Tanggal Setor	Jumlah Setor	NTPN
Kelebihan pembayaran Gaji Pokok PNS dari Bulan Januari-April 2019	607.100	04 Maret 2020	607.100	A4FD055DE3TQPAJ1
Kelebihan pembayaran atas Belanja Bahan Kegiatan Operasional Beban Honor Output Kegiatan Tahun 2019	3.570.000	17 Januari 2020	3.570.000	B2C720N9UUS96PK2
Kelebihan pembayaran belanja bahan kegiatan operasional beban jasa profesi tahun 2019	30.000	7 Januari 2020	30.000	C9F9E3CIEEJ4OJHH
Kelebihan pembayaran belanja bahan kegiatan operasional beban perjalanan dinas tahun 2019	65.463.572	17 Januari 2020	2.000.000	D21F42G4UK120RPG
		16 Januari 2020	635.000	F48D355DE3O77RAJ
		7 Januari 2020	17.803.972	19DAD1JNEPEBULV9
		7 Januari 2020	1.350.000	50BD87QLTJF2PJ06
		7 Januari 2020	40.651.400	51CCB6U8DOSMCKUB
		7 Januari 2020	776.700	54A6961QTUA9VJBC
		7 Januari 2020	419.500	A415655DE3NTIINL
		7 Januari 2020	265.000	06F3F6U8DOSMCIHP
Kelebihan pembayaran atas belanja bahan kegiatan operasional beban paket meeting dalam kota tahun 2019	4.049.000	16 Januari 2020	3.539.000	C45728N3DE1OUETD
		17 Januari 2020	510.000	C68DC7QLTJFCHEU0
Kelebihan pembayaran belanja bahan kegiatan operasional beban paket meeting luar kota tahun 2019	47.971.800	7 Januari 2020	11.130.000	FFA157QLTJF2PLEU
		7 Januari 2020	2.564.000	3C1733CIEEJA0JV9
		7 Januari 2020	1.350.000	7DD3A7QLTJF2PIAU
		7 Januari 2020	31.117.800	A94530N9UURVHLKA
		8 Januari 2020	360.000	0D1CB55DE3NUMQ8L
		6 Januari 2020	600.000	A14950N9UUS96Q8C
		6 Januari 2020	850.000	70C867QLTJFCEPV1
Total	121.691.472		121.691.472	

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak (Rp1.801.670.900)

C.6 PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH – PIUTANG BUKAN PAJAK

Saldo Penyisihan Piutang Bukan Pajak Neto per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar (Rp1.801.670.900) dan (Rp1.716.386)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak menggunakan perhitungan 0,5 per mil atau 0,005 % dari total Piutang Lancar.

Rincian Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut:

Nama Eselon I	31 Des 2019	31 Des 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	(1.424.518)	(286.745)	(1.137.773)	396,79
Inspektorat Jenderal	(63.539)	(42.893)	(20.646)	48,13
Ditjen Pemberdayaan Sosial	(2.386.282)	(499.907)	(1.886.375)	377,35
Ditjen Rehabilitasi Sosial	(44.461.456)	(395.845)	(44.065.611)	11.132,04
Ditjen Perlindungan dan Jaminan	(1.750.643.232)	(102.192)	(1.750.541.040)	1.712.992,25
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	(130.310)	(135.381)	5.071	(3,75)
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	(2.561.563)	(253.423)	(2.308.140)	910,79
Jumlah	(1.801.670.900)	(1.716.386)	(1.799.954.514)	104.868,86

Piutang Bukan Pajak (Netto)

C.7 PIUTANG BUKAN PAJAK NETTO

Piutang Bukan Pajak Netto Kementerian Sosial Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp358.532.507.998 dan Rp341.559.387

Rp358.532.507.998



Piutang Bukan Pajak Netto merupakan hasil pengurangan antara saldo Piutang Bukan Pajak dengan Penyisihan Piutang tak Tertagih.

Persediaan

Rp455.884.848.039

C.8 PERSEDIAAN

Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar **Rp455.884.848.039** dan **Rp451.765.319.891**, mengalami kenaikan sebesar Rp4.119.528.148 atau sebesar 0,91 %.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan Kementerian Sosial dirinci sebagai berikut:

No	Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	2.102.251.813	2.178.312.872,	(76.061.059)	(3,49)
2	Inspektorat Jenderal	8.174.500	5.632.500,	2.542.000	45,13
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	27.302.439.302	19.876.893.195,	7.425.546.107	37,36
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	125.559.826.719	132.214.692.816,	(6.654.866.097)	(5,03)
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	284.418.061.781	292.462.953.710,	(8.044.891.929)	(2,75)
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	192.892.455	4.138.673.500,	(3.945.781.045)	(95,34)
7	Badiklit Pensos	16.301.201.469	888.161.298,	15.413.040.171	1.735,39
	Jumlah	455.884.848.039	451.765.319.891	4.119.528.148	0,91

Persediaan Kementerian Sosial 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 terdiri dari:

No	Persediaan	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Barang Konsumsi	7.990.376.411	7.213.665.962	776.710.449	10,77
2	Bahan untuk Pemeliharaan	27.944.000	27.927.250	16.750	0,06
3	Suku Cadang	-	-	-	100,00
3	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	98.591.193.481	102.682.236.481	(4.091.043.000)	(3,98)
4	Peralatan dan Mesin untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	31.558.594.906	17.645.838.126	13.912.756.780	78,84
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.700.516.000	1.700.516.000	-	-
6	Aset Lain-lain untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.386.026.850	1.386.026.850	-	-
7	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	22.228.558.086	19.502.730.167	2.725.827.919	13,98
8	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat dalam Proses	5.130.176.957	1.175.916.032	3.954.260.925	336,27
9	Bahan Baku	-	1.805.750	(1.805.750)	(100,00)
10	Persediaan dalam rangka bantuan sosial	286.839.684.347	299.846.152.930	(13.006.468.583)	(4,34)
11	Persediaan untuk Tujuan Strategi/Berjaga-jaga	13.759.717	17.562.386	(3.802.669)	(21,65)
12	Persediaan Lainnya	418.017.284	564.941.957	(146.924.673)	(26,01)
	Total	455.884.848.039	451.765.319.891	4.119.528.148	0,91

1. Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat dalam Proses terdapat pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial di satuan kerja:

- a. Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial sebesar Rp1.676.128.906 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Tanggal Kontrak	Jangka Waktu	Keterangan
1	Pekerjaan Jasa Kontruksi Pembangunan MPN Raja Aii (Pulau Penyengat) sebagai Destinasi Wisata	03/3.4/PL.03.03/destinasiwisata/08/2019	474.000.000	9 Agustus 2019	09 Agustus 2019 s/d 06 Desember 2019 (120 Hari Kalender)	Dalam Proses Penandatanganan BAST
2	Pekerjaan Jasa Kontruksi Rehabilitasi TMPN Provinsi Tatura (Sulawesi Tengah)	02/3.4/PL.03.03/tpnsulteng/08/2019	287.966.000	2 Agustus 2019	2 Agustus 2019 s/d 29 November 2019 (120 Hari Kalender)	Dalam Proses Penandatanganan BAST
3	Pekerjaan Jasa Kontruksi Pemeliharaan MPN Kab. Nani Warta (Gorontalo) Tahap I	04/3.4/PL.03.03/mpngorontalo/08/2019	452.162.906	16 Agustus 2019	16 Agustus 2020 s/d 13 November 2019 (90 Hari Kalender)	Dalam Proses Penandatanganan BAST
4	Pekerjaan Jasa Kontruksi Pemeliharaan MPN Kab. Nani Warta Gorontalo Tahap II	04/3.4/PL.03.03/mpngorontalo2/10/2019	462.000.000	21 Oktober 2019	1 Oktober 2020 s/d 19 Desember 2019 (60 Hari Kalender)	Dalam Proses Penandatanganan BAST
Total			1.676.128.906			

BAST dari Provinsi terhadap pekerjaan ini masih dalam proses karena masih dalam tahap pemeliharaan.

- b. Dinas Sosial Provinsi Papua (Tugas Pembantuan) senilai Rp204.494.002 merupakan Pekerjaan pembangunan Rumah komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kampung Papane Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya tahun 2017 dengan nilai keseluruhan Rp404.700.094 (dengan SPM LS No. 00012 tanggal 16 Oktober 2017 dengan rincian : nilai yang dibayarkan Rp396.606.092 dengan pajak PPh dengan nilai Rp8.094.002) yang tidak terealisasi karena adanya kesalahpahaman dari masyarakat sekitar yang tidak mendapatkan bantuan dan telah dilakukan musyawarah tetapi tidak menghasilkan kesepakatan. Pada Tahun 2018 berdasarkan hasil pemeriksaan telah disetor ke kas negara senilai Rp200.206.092 NTPN : EE6001OL96005IO Tanggal 5 April 2018) sehingga per 31 Desember 2019 menjadi Rp204.494.002
- c. Dinas Sosial Provinsi NTT Tugas Pembantuan sebesar Rp174.146.536 merupakan pekerjaan pemberian bantuan stimulant pemukiman social bagi warga Komunitas Adat Terpencil tidak dapat direalisasikan karena wanprestasi sehingga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan surat Nomor Dinsos.460/411/BPS.1/NTT/IX/2018 tanggal 20 Setember 2018 yang telah diawali dengan pemberian Surat peringatan I sd III terhadap Perusahaan CV. Binna Karyda selaku kontraktor Pelaksana Pekerjaan pemberian Bantuan stimulant Pemukiman Sosial Bagi Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Lokasi di Letkole Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang. Akibat dari PHK tersebut dilakukan klaim terhadap pemberian jaminan (Bank NTT) untuk mengembalikan sisa uang muka tersebut dengan rincian nilai Kontrak Rp1.366.820.000 uang muka (30%) sebesar Rp410.046.000 Realisasi uang muka (12,74%) sebesar Rp174.146.536 Sisa Uang Muka yang dikembalikan sebesar Rp235.899.464 NTPN DC56D2U58QEA73D2 tanggal 16 Oktober 2018 jaminan pelaksanaan (5%) sebesar Rp68.341.000 dan sisa kontrak yang tidak tereliasasi sebesar Rp1.192.673.646
- d. Dinas Sosial Kabupaten Nunukan sebesar Rp619.075.600 dikarenakan Dinas Sosial Kabupaten Nunukan melakukan pemutusan kontrak Penerima Pekerjaan Pembangunan Rumah Bantuan Stimulan Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan



CV. Netlajasa Perkasa dengan Nomor SPK (Surat Perjanjian Kontrak) 03/PKAT/027/IV/2019 tanggal 24 Juni 2019 nilai kontrak sebesar Rp1.238.118.900 Dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Surat Teguran I Nomor 01/PKAT/027/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 dengan realisasi fisik sebesar 51,08 % terjadi deviasi sebesar 9,79 %
 - 2) Surat Teguran II Nomor 02/PKAT/027/X/2019 tanggal 14 November 2019 dengan realisasi fisik sebesar 54,58 % terjadi deviasi sebesar 41,93 %
 - 3) Surat Teguran III Nomor 03/PKAT/027/X/2019 tanggal 02 Desember 2019 dengan realisasi Fisik sebesar 54,58 % terjadi deviasi sebesar 41,93 %.
 - 4) Dilakukan rapat Bersama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan SPM, Aplikator SAIBA, Bendahara, Tim Teknis, dan Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2019, terkait laporan kemajuan pekerjaan dan laporan deviasi pekerjaan, dokumentasi pekerjaan di lapangan sebagai lampiran Pemuusan Kontrak & Sanksi Administrasi.
 - 5) Pembuktian dilapangan pada tanggal 09 Desember 2019 Bersama wakil Bupati Nunukan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nunukan, Kabag Pembangunan, Pejabat Pembuat Komitmen, Tim PPHP, Tim Teknis dan lain-lain.
 - 6) Lokasi kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pekerjaan Pembangunan Rumah Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial, Desa Paluan Kec. Lumbis Ogong , karena pada jalur anak sungai debit air kecil dan seringnya muncul binatang buas (buaya) sehingga tidak bisa dijangkau transportasi dan sangat beresiko apabila dilakukan pengangkutan material bangunan mengingat jarak tempuh \pm 2 KM dan material bangunan danya dapat terangkut ketika banjir (Air Pasang).
 - 7) Melihat laporan pekerjaan kemajuan pertanggal 21 Oktober 2019 sebesar 51,08 % (lima puluh satu koma nol delapan %) dengan deviasi sebesar : 9,79% (Sembilan koma tujuh puluh Sembilan %) sampai dengan tanggal 06 Desember 2019 sebesar 54, 05% (lima puluh empat koma nol lima %) dengan deviasi sebesar 45, 95% (empat puluh lima koma Sembilan puluh lima %), pihak penyediaan tidak ada kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan.
- e. Pada Satuan kerja Dinas Sosial Kabupaten Asmat terjadinya pembangunan Rumah KAT sisa pekerjaan yang belum terselesaikan sebanyak 7 % (tujuh %) pekerjaan fisik ditahun 2019 dan dilanjutkan pekerjaannya sampai dengan tahun 2020. Pekerjaan Pembangunan Rumah sederhana bagi warga KAT di Kampung Kairin Distrik Safan Kabupaten Asmat yang kontraknya berakhir sampai dengan tanggal 8 Desember 2019 telah melakukan perpanjangan kontrak (addendum) hingga 31 Desember 2019. Pekerjaan yang dimaksud tersebut per tanggal 31 Desember 2019 belum juga terselesaikan secara tuntas sehingga pihak penyedia meminta



perpanjangan waktu pekerjaan dengan sanksi satu per mill selama 20 (dua puluh) hari kalender atau berakhir ditanggal 20 Januari 2020 dengan surat jaminan pelaksanaan Addendum dan surat pernyataan kemampuan penyelesaian pekerjaan. Uang sisa pekerjaan 7% merupakan uang dari SPM yang telah dicairkan ke rekening pihak ketiga dan langsung diblokir sesuai dengan arahan KPPN Merauke karena pihak bank tidak mau memberikan jaminan senilai Rp1.294.196.384,88. Uang sisa pekerjaan 7% inilah yang kemudian penyedia menyetorkan ke Kas Negara dan Denda atas keterlambatan pekerjaan tersebut selama 20 hari kalender. Adapun jumlah keterlambatan pekerjaan 7% senilai Rp184.885.198 semuanya telah disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan arahan KPPN Merauke. Total Nilai Kontrak untuk Pembangunan Rumah Sederhana Bagi Warga KAT di Kampung Kairin Distrik Safan Kabupaten Asmat sebesar Rp2.641.217.112 sehingga masih terdapat Persediaan dalam proses sebesar Rp2.456.331.913

2. Terdapat persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat yang terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp118.665.178.107 di satuan kerja:
 - a. Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA sebesar Rp Rp87.262.558.140 berupa Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp76.627.390.481 dan Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp10.635.167.659 dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1) Pembangunan Gedung Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di 7 lokasi pada Tahun 2015 beserta pengadaan sarana prasarana pendukungnya dimana pada tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami pengembangan supaya bisa berfungsi optimal dalam memberikan pelayanan. Dasar SK Menteri Sosial No. 37/HUK/2015 Tgl. 23 April 2015 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Institusi Penerima Wajib Lapor di 7 lokasi yaitu Prov. Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Kota Malang.
 - 2) Pembangunan Gedung Pusat Informasi dan Edukasi NAPZA pada tahun 2015 beserta pengadaan sarana prasarana pendukungnya dimana pada Tahun 2016 mengalami pengembangan supaya bisa berfungsi optimal dalam memberikan Informasi pada masyarakat. Dasar ; SK Menteri Sosial No. 65/HUK/2015 Tanggal 25 Juni 2015 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pusat Informasi dan Edukasi NAPZA Tahun 31 Desember 2016 di 4 Lokasi yaitu Provinsi DIY, Kalimantan Tengah, NTB dan Jawa Timur.

Persediaan untuk diserahkan masyarakat senilai Rp87.262.558.140 sampai pada periode pelaporan 31 Desember 2018 belum diserahkan kepada masyarakat/Pemda karena Implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana didalam lampiran F Poin 3 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Sub. Bidang Rehabilitasi Sosial disebutkan bahwa terkait dengan penanganan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dan HIV/AIDS menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah pusat, sehingga status keberadaan Gedung IPWL adalah sebagai



berikut :

- 1) 5 Gedung IPWL tidak jadi diserahkan pada Pemerintah Daerah dan sekarang kondisinya masih dalam tahap untuk proses Pinjam Pakai dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan (IPWL Prov. Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara).
 - 2) IPWL di Kota Malang dalam proses hibah berupa penyerahan Gedung dan Bangunan serta Peralatan dan Mesin dari Kementerian Sosial kepada Yayasan milik masyarakat yaitu Yayasan Baitul Maghfirah karena gedung dan bangunan IPWL dibangun di tanah milik yayasan tersebut.
 - 3) IPWL Prov. Jambi yang telah dibangun oleh Kementerian Sosial Tahun 2015 di atas tanah milik Pemda Kab. Batang Hari telah dihibahkan kepada Kementerian Sosial berdasarkan Berita Acara Serah Terima dengan Nomor 030/4360/BMD/2019 untuk Pemda Kab. Batang Hari dan Nomor 17 Tahun 2019 untuk Kementerian Sosial pada hari Senin Tanggal 6 Agustus 2019. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2020 dilakukan proses permohonan untuk pembuatan sertifikat tanah balik nama berupa Tanah dengan Luas 40.000M² dengan nilai Rp61.200.000 untuk Kementerian Sosial RI.
- b. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak sebesar Rp31.401.912.317 yang merupakan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak Bantuan Dengan Hukum (LPKS ABH) akan dilakukan proses pembuatan Naskah Perjanjian Hibah kepada setiap Provinsi penerima untuk dapat diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan Hibah BMN dari Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Persediaan	Total
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	21.963.803.000
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	6.351.566.467
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.700.516.000
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.386.026.850
Total	31.401.912.317

- c. Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebesar Rp707.650 berupa Barang Persediaan Lainnya yang diserahkan ke Masyarakat.

3. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial terdapat persediaan dalam rangka bantuan sosial sebesar Rp283.626.378.897 yang terdapat pada satuan kerja Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebesar Rp256.745.804.740 dan satuan kerja Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial sebesar Rp26.880.574.157 yang merupakan:

- a. Bufferstock dan perlengkapan dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam dan sosial yang dikelola Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, antara lain berupa logistic (beras, mie instant, lauk pauk, sandang, alat dapur, family kit, kid ware, food ware dan makanan tambahan) dan perlengkapan evakuasi.
- b. Persediaan berupa beras milik Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana



Alam yang dititipkan di Perum Bulog berdasarkan perjanjian jual beli yang telah dilakukan. Kementerian Sosial tidak mengelola persediaan beras secara fisik dan akan mengambilnya sewaktu-waktu jika dibutuhkan dari Perum Bulog, sehingga penyajian nilai persediaan hanya berdasarkan data pencatatan/pembukuan. Fisik beras masih dikelola Perum Bulog dengan komitmen sewaktu-waktu diminta oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial akan disediakan.

4. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin terdapat Persediaan sebesar Rp192.892.455 berupa Barang Konsumsi.
5. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial terdapat Persediaan Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp14.571.860.780 berupa *toolkit* yang belum disalurkan kepada pendamping PKH per 31 Desember 2019. Berdasarkan hasil inventarisasi dari 21.900 paket *toolkit*, sebanyak 4.606 set telah terdistribusi ke pendamping PKH per 31 Desember 2019, sebanyak 10.436 set *toolkit* baru terdistribusi ke pendamping PKH di tahun 2020, dan sebanyak 6.858 set belum terdistribusi (masih berada di Dinsos Kab/Kota/Sekretariat UPPKH).

ASET TETAP

Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Aset tetap dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan No : S-338/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Koreksi Data Revaluasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2017 hasil Revaluasi seluruh BMN pada tahun 2017 agar tidak disajikan dalam face LKKL tahun 2017.

Atas hasil revaluasi aset BMN yang telah disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian Sosial tahun 2017 (*Unaudited*), Kementerian Sosial perlu melakukan koreksi atas hasil revaluasi dimaksud melalui Satuan kerja Konsolidasi.

Berdasarkan Nota Kesepakatan Koreksi Pencatatan Hasil Penilaian Kembali BMN tahun 2017-2019 Pada Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2018 Nomor :NK-027/46/TO-REVALBMN/2019 maka Kementerian Sosial melakukan jurnal koreksi pada Satuan kerja Konsolidasi terhadap aset-aset yang telah dilakukan penilaian kembali.

Pada tanggal 26 Juni 2019 berdasarkan Lampiran III surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-625/PB/2019 tentang Pedoman Penyusunan, Penyajian, dan Pengungkapan Laporan



Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) Semester I Tahun 2019 huruf B No 3 untuk periode Semester I Tahun Anggaran 2019 tidak perlu dilakukan jurnal balik atas jurnal koreksi hasil penilaian kembali BMN (jurnal takeout revaluasi BMN) yang telah dilakukan pada Satuan kerja Konsolidasi dalam LKKL Tahun 2018.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan bahwa laporan keuangan level satuan kerja, wilayah, eselon I, serta laporan barang level satuan kerja sampai dengan level konsolidasian seluruh K/L (Laporan Barang Milik Negara/LBMN) masih mengandung saldo terkait revaluasi, Kementerian Sosial dipandang perlu untuk melakukan koreksi pencatatan atas transaksi-transaksi lanjutan yang terjadi atas BMN yang merupakan objek revaluasi tahun 2017-2018, di mana transaksi-transaksi lanjutan tersebut terjadi selama semester I tahun 2019. Terdapat tambahan jurnal lanjutan terkait koreksi pencatatan atas transaksi-transaksi lanjutan yang terjadi atas BMN semester II yang merupakan objek revaluasi. Jurnal koreksi *take out* tersebut dilakukan pada triwulan III Tahun Anggaran 2019.

Per 31 Desember 2019, berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Nomor: S-58/ PB/2020 Hal: Rilis Update Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 Menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA, Kementerian Sosial melakukan Jurnal untuk memasukkan kembali (*take in*) Hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan yang telah dikeluarkan (*take out*) dari Laporan Keuangan tahun 2018 dan semester I tahun 2019 menggunakan aplikasi SAIBA melalui Satuan kerja Konsolidasi, serta melakukan pencatatan perbaikan atau koreksi hasil IP tahun 2017 dan 2018 dalam Laporan Keuangan Kementerian Sosial tahun 2019 menggunakan aplikasi SIMAK BMN. Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan No: S-189/PB/2020 tanggal 5 Maret 2020 Hal: Petunjuk Teknis Pencatatan Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Setelah Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga Tahun 2019 Unaudited serta Rilis Update Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.3.1 Kementerian Sosial melakukan koreksi atas revaluasi aset tetap tersebut pada Laporan Keuangan Audited Tahun 2019.

Pada Tanggal 24 April 2020 berdasarkan Surat Kementerian Keuangan No S-48/KN/2020 Hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Tiga Pihak Dalam Rangka Penyajian Hasil Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 pada LKPP Unaudited, terdapat Temuan Pemeriksaan terkait Penyajian Hasil Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 pada LKPP Unaudited 2019 sehingga Aset Tetap Kementerian Sosial yang terdampak revaluasi kembali dikoreksi pada Laporan Keuangan Kementerian Sosial RI *Audited* Tahun Anggaran 2019.

Tanah

Rp18.532.038.706.705

C.9 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp18.532.038.706.705** dan **Rp3.495.475.164.694** mengalami kenaikan sebesar Rp15.036.563.542.011 atau sebesar 430,17 %.

Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.



Aset Tanah Kementerian Sosial RI dirinci sebagai berikut:

No	Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	3.545.666.944.000	3.498.435.685.000,	47.231.259.000	1,35
2	Ditjen Pemberdayaan Sosial	6.868.611.638.000	6.638.259.426.000,	230.352.212.000	3,47
3	Ditjen Rehabilitasi Sosial	6.471.449.766.650	6.582.483.540.650,	(111.033.774.000)	(1,69)
4	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	38.669.400.000	38.669.400.000,	-	-
5	Badiklit Pensos	1.607.640.958.055	1.490.132.016.247,	117.508.941.808	7,89
6	Satker Konsolidasi	-	(14.752.504.903.203)	14.752.504.903.203	(100,00)
	Jumlah	18.532.038.706.705	3.495.475.164.694	15.036.563.542.011	430,17

Rincian mutasi aset Tanah dari Belanja Modal Tanah adalah sebagai berikut:

Belanja Tanah	90.527.836.808
Mutasi:	
Pembelian	
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	83.471.253.408
Pengembangan Melalui KDP	7.047.932.000
Perolehan/ Penambahan KDP	
Pengembangan Nilai Aset	8.651.400
Ekstra komtabel	
Koreksi kurang	
Total	90.527.836.808
Selisih	-

Rincian mutasi atas aset Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Menurut E-rekon Keuangan 2018	3.495.475.164.694
Koreksi Revaluasi Aset Tetap pada satker Konsolidasi Tahun 2018	(14.752.504.903.203)
Saldo E-Rekon BMN per 31 Desember 2018	18.247.980.067.897
Mutasi Tambah :	1.044.051.947.808
(102) Transfer Masuk	645.733.000.000
(105) Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	83.471.253.408
(202) Pengembangan Nilai Aset	8.651.400
(208) Pengembangan Melalui KDP	7.047.932.000
(225) Koreksi Kesalahan input IP	192.657.017.000
(245) Koreksi Nilai barang Berlebih	873.785.000
(247) Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	47.231.259.000
(331) Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	67.029.050.000
Mutasi Kurang :	(759.993.309.000)
(232) Koreksi Transfer Masuk	(67.029.050.000)
(302) Transfer Keluar	(645.733.000.000)
(334) Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	(47.231.259.000)
Saldo E-Rekon BMN per 31 Desember 2019	18.532.038.706.705
Koreksi Revaluasi Aset Tetap pada satker Konsolidasi Tahun 2018	(14.752.504.903.203)
Koreksi Revaluasi Aset Tetap pada satker Konsolidasi Semester I Tahun 2019	515.144.466.925
Tambahan Koreksi Revaluasi Aset Tetap pada satker Konsolidasi Semester I Tahun 2019(dilakukan pada TW III Tahun 2019)	(515.144.466.925)
Koreksi Take in Revaluasi pada Satker Konsolidasi 31 Desember 2019	14.752.504.903.203
Saldo E rekon Keuangan 31 Desember 2019	18.532.038.706.705



Mutasi Tambah :

1. Transfer Masuk 31 Desember 2019 sebesar Rp645.733.000.000 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada Satuan Kerja BRSKP NAPZA Bambu Apus dikarenakan perubahan nomenkelatur dari pelayanan Anak menjadi Napza berdasarkan Berita Acara Nomor: 646/BRSKPN/PL.04/06/2019
2. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp83.471.253.408 terdapat pada :
 - a. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp112.776.000 terdapat pada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dikarenakan adanya pengadaan pembelian akses tanah untuk jalan khusus kompleks pada Pusat Rehabilitasi Sosial Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor.
 - b. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp83.358.477.408 pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung	72.449.805.888
Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin	10.908.671.520
Jumlah	83.358.477.408

3. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp8.651.400 terdapat pada Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial pada satuan kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin.
4. Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp7.047.932.000 terdapat pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial satuan kerja Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial di Taman Makam Pahlawan Utama Kalibata.
5. Koreksi Kesalahan Input IP sebesar Rp192.657.017.000 dikarenakan revaluasi Aset Tetap terdapat pada :
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp47.231.259.000 di satuan kerja Biro Umum.
 - b. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp223.304.280.000 di satuan kerja Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan Dan Restorasi Sosial berupa Tanah di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata.
 - c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar (Rp112.020.335.000) yang terdapat pada satuan kerja:



Satuan Kerja	Jumlah
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "PROF. DR. SOEHARSO" DI SURAKARTA	12.897.368.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "BUDI LUHUR" DI BANJARBARU	2.801.316.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "ALYATAMA" DI JAMBI	2.090.536.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "NIPOTOWE" DI PALU	521.418.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "SATRIA" DI BATURRADEN	514.674.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "GAU MABAJI" DI GOWA	(24.871.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "WYATA GUNA" DI BANDUNG	(130.018.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "TODDOPULI" DI MAKASSAR	(386.770.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "MELATI" DI JAKARTA	(844.945.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "BUDI PERKASA" DI PALEMBANG	(16.679.933.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS WANITA TUNA SUSILA "MULYA JAYA" DI JAKARTA	(45.750.060.000)
PANTI SOSIAL BINA REMAJA "BAMBU APUS", JAKARTA	(67.029.050.000)
Total	(112.020.335.000)

- d. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp34.141.813.000 yang terdapat pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (B2P3KS) YOGYAKARTA	31.865.148.000
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) BANJARMASIN	1.609.507.000
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) MAKASSAR	1.454.157.000
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	(10.000.000)
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) YOGYAKARTA	(776.999.000)
Total	34.141.813.000

- Koreksi Nilai Barang Berlebih sebesar Rp873.785.000 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus "Alyatama" di Jambi dikarenakan adanya revaluasi BMN berdasarkan LHIP : 090/REV/WKN.04
- Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi sebesar Rp47.231.259.000 terdapat pada Sekretariat Jenderal di satuan kerja Sekretariat Jenderal.
- Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi sebesar Rp67.029.050.000 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial di satuan kerja Panti Sosial Bina Remaja "Bambu Apus", Jakarta

Mutasi Kurang:

- Koreksi Transfer Masuk sebesar (Rp67.029.050.000) pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial di satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya "Bambu Apus" di Jakarta.



2. Transfer Keluar sebesar (Rp645.733.000.000) terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada Satuan Kerja BRSKP NAPZA Bambu Apus berdasarkan Berita Acara Nomor:646/BRSKPN/PL.04/06/2019.
3. Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi sebesar (Rp47.231.259.000) pada Sekretariat Jenderal di satuan kerja Biro Umum.

Peralatan dan Mesin
Rp1.904.924.241.165

C.10 PERALATAN DAN MESIN

Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp1.904.924.241.165** dan **Rp1.788.554.554.510** dimana mengalami kenaikan sebesar Rp116.369.686.655 atau 6,51 %.

Peralatan dan Mesin adalah Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan Mesin Kementerian Sosial RI dirinci sebagai berikut;

No	Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	446.216.179.047	369.029.933.596	77.186.245.451	20,92
2	Inspektorat Jenderal	8.265.107.738	6.516.371.936	1.748.735.802	26,84
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	77.974.010.785	75.240.087.285	2.733.923.500	3,63
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	327.108.842.025	316.035.600.404	11.073.241.621	3,50
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	849.049.293.862	839.199.229.784	9.850.064.078	1,17
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	20.248.499.049	17.963.685.149	2.284.813.900	12,72
7	Badiklit Pensos	176.062.308.659	164.569.646.356	11.492.662.303	6,98
	Jumlah	1.904.924.241.165	1.788.554.554.510	116.369.686.655	6,51

Mutasi Aset Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Belanja Peralatan dan Mesin (Netto)	126.447.641.640
Mutasi :	
Pembelian	111.733.088.224
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	15.673.905.372
Pengembangan Nilai Aset	80.938.000
Ekstra komtabel	-
Pengembalian Belanja Modal PM TAB	-
Pengembangan KDP	-
Perolehan/Penambahan KDP	-
Total Mutasi	127.487.931.596
Selisih	(1.040.289.956)
Penjelasan Atas Selisih	
Mutasi PM yang tidak berasal dari BM PM	(1.097.618.610)
Belanja GB yang menghasilkan PM	(1.016.390.110)
Belanja Pemeliharaan GB yang menghasilkan PM	(1.100.000)
Belanja Sew a yang menghasilkan PM	(80.128.500)
Koreksi Pencatatan Nilai PM karena Pengembalian Belanja Modal PM	(17.943.546)
BM PM yang tidak menghasilkan PM	75.272.200
Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	75.272.200
Total Penjelasan Selisih	(1.040.289.956)
Selisih	-



Mutasi Aset Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo Neraca per 31 Desember 2018		1.788.554.554.510
Mutasi Tambah :		161.571.567.746
(100)	Koreksi Saldo Awal	95.178.950
(101)	Pembelian	111.733.088.224
(102)	Transfer Masuk	22.322.624.628
(103)	Hibah (Masuk)	229.182.000
(105)	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	15.673.905.372
(107)	Reklasifikasi Masuk	11.182.645.472
(177)	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	254.005.100
(202)	Pengembangan Nilai Aset	80.938.000
Mutasi Kurang :		(45.201.881.091)
(204)	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(75.143.738)
(209)	Transaksi Normalisasi BMN	(34.096.000)
(301)	Penghapusan	(1.068.842.266)
(302)	Transfer Keluar	(22.079.444.583)
(303)	Hibah (Keluar)	(2.163.173.050)
(304)	Reklasifikasi Keluar	(10.048.527.412)
(308)	Usulan Barang Hilang ke Pengelola	(41.042.000)
(188)	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (Penghentian Aset dari Penggunaan)	(9.691.612.042)
Saldo Neraca 31 Desember 2019		1.904.924.241.165

Mutasi Tambah:

1. Saldo Awal sebesar Rp95.178.950 terdapat pada :
 - a. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp5.397.500 pada satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya "Galih Pakuan" di Bogor dikarenakan terdapat temuan tim auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial pada Tahun Anggaran 2018 atas aset tetap yang belum terkapitalisasi.
 - b. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp89.781.450 pada satuan kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta.
2. Pembelian sebesar Rp 111.733.088.224 terdapat pada :

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp71.759.831.699 pada satuan kerja :

Satuan Kerja	Jumlah
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	51.081.142.260
SEKRETARIAT JENDERAL	20.678.689.439
Total	71.759.831.699

- b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp1.800.373.500 pada satuan kerja Inspektorat Jenderal.



c. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp2.402.016.500 pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.527.113.500
DIREKTORAT KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL	874.903.000
Total	2.402.016.500

d. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp15.947.758.825 pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL	9.242.550.911
BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "BUDHI DHARMA" DI BEKASI	785.999.300
BALAI BESAR REHABILITASI VOKASIONAL PENYANDANG DISABILITAS DI CIBINONG	665.644.040
BALAI LITERASI BRAILLE INDONESIA "ABIYOSO" DI CIMAH	529.100.000
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL ANAK	499.781.700
BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "GAU MABAJI" DI GOWA	409.520.000
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "PROF. DR. SOEHARSO" DI SURABAYA	371.416.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "PHALA MARTHA" DI SUKABUMI	286.659.156
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "HANDAYANI" DI JAKARTA	277.877.500
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "NAIBONA" DI KUPANG	268.119.100
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "BAMBU APUS" DI JAKARTA	238.272.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS "PANGUDI LUHUR" DI BEKASI	231.769.800
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "KARTINI" DI TEMANGGUNG	224.500.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TAN MIYATA" DI BEKASI	211.635.790
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "SAPTIA" DI BATURRADEN	203.607.578
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG	197.403.700
BALAI REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "WASANA BAHAGIA" DI TERNATE	176.465.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS WANITA TUNA SUSILA "MULYA JAYA" DI JAKARTA	174.700.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "BUDI PERKASA" DI PALEMBANG	94.549.750
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "WYATA GUNA" DI BANDUNG	88.197.890
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "PARAMITA" DI MATARAM	85.900.000
LOKA REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "KAHURIPAN" DI SUKABUMI	74.500.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "CIUNG WANARA" DI BOGOR	74.400.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "NIPOTOWE" DI PALU	72.375.000
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA	49.600.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "BAHAGIA" DI MEDAN	46.497.000
LOKA REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "MINAULA" DI KENDARI	40.925.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "ANTASENA" DI MAGELANG	34.885.030
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TUMOU TOU" DI MANADO	30.545.455
LOKA REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "MEOHA" DI KENDARI	28.025.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "MELATI" DI JAKARTA	25.732.625
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "TODDOPULI" DI MAKASSAR	25.500.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "MAHATMIYA" DI TABANAN	24.970.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "BUDI LUHUR" DI BANJARBARU	23.925.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "GALIH PAKUAN" DI BOGOR	22.308.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "MARGO LARAS" DI PATI	20.120.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "ALYATAMA" DI JAMBI	20.000.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "EFFATA" DI KUPANG	17.352.500
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "DHARMA GUNA" DI BENGKULU	15.000.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "RUMBAI" DI PEKANBARU	15.000.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "WIRAJAYA" DI MAKASSAR	13.929.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "INSYAF" DI MEDAN	8.500.000
Total	15.947.758.825



- e. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp10.113.001.250 pada satuan kerja :

Satuan Kerja	Jumlah
DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	7.122.696.000
DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL KELUARGA	1.617.907.450
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.372.397.800
Total	10.113.001.250

- f. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp2.302.007.900 pada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

- g. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp7.408.098.550 pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
SEKRETARIAT BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUH SOSIAL	1.811.244.900
PUSAT PENYULUHAN SOSIAL	1.798.771.000
SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS) BANDUNG	897.193.000
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) JAYAPURA	670.220.100
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) LEMBANG - BANDUNG	479.128.500
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	449.995.000
PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI PEKERJA SOSIAL DAN PENYULUH SOSIAL	349.393.000
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) YOGYAKARTA	299.500.000
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	249.879.850
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) MAKASSAR	224.062.200
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) PADANG	143.500.000
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) BANJARMASIN	35.211.000
Total	7.408.098.550

3. Transfer Masuk sebesar Rp22.322.624.628 terdapat pada :

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp604.997.000 pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
SEKRETARIAT JENDERAL	580.390.000
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	24.607.000
Total	604.997.000

- b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp493.380.366

- c. Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp582.407.000 pada satuan kerja Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.

- d. Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp16.020.790.662 pada satuan kerja:



Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "BAMBU APUS" DI JAKARTA	12.117.306.662
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "WYATA GUNA" DI BANDUNG	746.350.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "MAHATMYA" DI TABANAN	746.350.000
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "PROF. DR. SOEHARSO" DI SURAKARTA	746.350.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK	746.350.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "BUDI	587.654.000
LOKA REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "KAHURIPAN" DI SUKABUMI	330.430.000
Total	16.020.790.662

- e. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp1.174.585.200 pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	676.194.000
DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	267.605.000
DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL KELUARGA	142.878.000
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	87.908.200
Total	1.174.585.200

- f. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp534.241.000 pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH I	294.979.500
DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH III	201.819.000
DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH II	37.442.500
Total	534.241.000

- g. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp2.912.223.400 pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	2.407.442.400
PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI PEKERJA SOSIAL DAN PENYULUH SOSIAL	482.803.000
SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS) BANDUNG	21.978.000
Total	2.912.223.400

4. Hibah (Masuk) sebesar Rp229.182.000 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial di satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "WYATA GUNA" DI BANDUNG	149.520.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "CIUNG WANARA" DI BOGOR	79.662.000
Total	229.182.000

5. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp15.673.905.372 terdapat pada :



- a. Sekretariat Jenderal pada satuan kerja Sekretariat Jenderal sebesar Rp7.496.397.272
- b. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp290.280.000 terdapat pada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
- c. Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp457.600.000 pada satuan kerja Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) BANJARMASIN	5.217.325.700
SEKRETARIAT BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUH SOSIAL	2.212.302.400
Total	7.429.628.100

- d. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp7.429.628.100 pada satuan kerja:
6. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp11.182.645.472 terdapat pada :
- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp7.590.162.272 pada satuan kerja Sekretariat Jenderal.
 - b. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp1.246.655.560 pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL	1.216.755.560
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "DHARMA GUNA" DI BENGKULU	29.900.000
Total	1.246.655.560

- c. Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp133.525.240 pada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dikarenakan terdapat penyesuaian kodefikasi barang.
 - d. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp2.212.302.400 pada satuan kerja Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.
7. Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp254.005.100 terdapat pada :
- a. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp251.879.100 terdapat pada satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya "Galih Pakuan" di Bogor dikarenakan terdapat penyesuaian kodefikasi barang
 - b. Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp2.126.000 pada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial yang disebabkan penggunaan kembali BMN yang dihentikan untuk merubah kondisi barang menjadi rusak berat.



8. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp80.938.000 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja :

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "BUDHI DHARMA" DI BEKASI	77.300.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "WYATA GUNA" DI BANDUNG	3.638.000
Total	80.938.000

Mutasi Kurang:

1. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar (Rp75.143.738) terdapat pada :
- a. Sekretariat Jenderal sebesar (Rp15.489.000) pada satuan kerja Sekretariat Jenderal yang dikarenakan pengembalian kemahalan Pengadaan AC CV.Karya Rahayu Mandiri, Kode Billing: 820191009549458 tanggal 10 Oktober 2019.

- b. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar (Rp42.154.626) pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "NIPOTOWE" DI PALU	(2.454.546)
LOKA REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "KAHURIPAN" DI SUKABUMI	(5.228.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS WANITA TUNA SUSILA "MULYA JAYA" DI JAKARTA	(10.560.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "PHALA MARTHA" DI SUKABUMI	(11.908.000)
BALAI BESAR REHABILITASI VOKASIONAL PENYANDANG DISABILITAS DI CIBINONG	(12.004.080)
Total	(42.154.626)

- c. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar (Rp14.850.112) pada satuan kerja Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

- d. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar (Rp2.650.000) pada satuan kerja Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.

2. Transaksi Normalisasi BMN sebesar (Rp34.096.000) terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "RUMBA" DI PEKANBARU	(78.000)
LOKA REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "KAHURIPAN" DI SUKABUMI	(495.000)
LOKA REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "MEOHA" DI KENDARI	(33.523.000)
Total	(34.096.000)

3. Penghapusan sebesar (Rp1.068.842.266) terdapat pada :

- a. Sekretariat Jenderal sebesar (Rp920.799.266) pada satuan kerja:



Satuan Kerja	Jumlah
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	(45.850.000)
SEKRETARIAT JENDERAL	(874.949.266)
Total	(920.799.266)

- b. Inspektorat Jenderal sebesar (Rp47.981.000) pada satuan kerja Inspektorat Jenderal.
- c. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar (Rp65.800.000) pada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- d. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebesar (Rp17.194.000) pada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
- e. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar (Rp17.068.000) pada satuan kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.
4. Transfer Keluar sebesar (Rp22.079.444.583) pada :

- a. Sekretariat Jenderal sebesar (Rp1.067.535.366) pada satuan kerja Sekretariat Jenderal.
- b. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar (Rp250.500.000) pada satuan kerja Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
- c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar (Rp15.777.610.617) pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL	(918.084.000)
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	(2.985.400.000)
PANTI SOSIAL BINA REMAJA "BAMBU APUS", JAKARTA	(11.874.126.617)
Total	(15.777.610.617)

- d. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar (Rp1.559.312.200) pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO	(29.743.200)
DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	(58.165.000)
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	(1.471.404.000)
Total	(1.559.312.200)

- e. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebesar (Rp534.241.000) pada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
- f. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar (Rp2.890.245.400) pada satuan kerja Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluh Sosial.



5. Hibah (Keluar) sebesar (Rp2.163.173.050) pada :
- a. Sekretariat Jenderal sebesar (Rp147.738.600) pada satuan kerja Sekretariat Jenderal.
 - b. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar (Rp576.094.450) pada satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya "Satria" di Baturraden.
 - c. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar (Rp1.439.340.000) pada satuan kerja Pusat Penyuluhan Sosial.
6. Reklasifikasi Keluar sebesar (Rp10.048.527.412) pada :
- a. Sekretariat Jenderal sebesar (Rp7.590.162.272) pada satuan kerja Sekretariat Jenderal.
 - b. Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar (Rp138.825.240) pada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - c. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar (Rp2.319.539.900) pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) JAYAPURA	(107.237.500)
SEKRETARIAT BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUH SOSIAL	(2.212.302.400)
Total	(2.319.539.900)

7. Usulan Barang Hilang ke Pengelola sebesar (Rp41.042.000) terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
8. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar (Rp9.691.612.042) terdapat pada :
- a. Sekretariat Jenderal sebesar (Rp523.418.288) pada satuan kerja Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar (Rp497.037.064) pada satuan kerja Inspektorat Jenderal
 - c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar (Rp6.528.642.333) pada satuan kerja:



Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "BAMBU APUS" DI JAKARTA	(2.941.456.605)
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL	(2.077.692.015)
BALAI BESAR REHABILITASI VOKASIONAL PENYANDANG DISABILITAS DI CIBINONG	(518.903.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "SATRIA" DI BATURRADEN	(305.155.500)
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "BUDI LUHUR" DI BANJARBARU	(276.309.500)
BALAI REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "WASANA BAHAGIA" DI TERNATE	(176.753.333)
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "MAHATMYA" DI TABANAN	(117.047.000)
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "PROF. DR. SOEHARSO" DI SURAKARTA	(68.808.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "GALIH PAKUAN" DI BOGOR	(28.350.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "MELATI" DI JAKARTA	(9.100.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "MARGO LARAS" DI PATI	(9.067.380)
Total	(6.528.642.333)

- d. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar (Rp251.986.060) pada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial.
- e. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar (Rp1.890.528.297) pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) YOGYAKARTA	(690.324.400)
PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI PEKERJA SOSIAL DAN PENYULUH SOSIAL	(443.333.897)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	(381.070.000)
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) LEMBANG - BANDUNG	(375.800.000)
Total	(1.890.528.297)

Gedung dan Bangunan
 Rp1.798.628.848.267

C.11 GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah **Rp1.798.628.848.267** dan **Rp1.513.338.943.015** mengalami kenaikan sebesar Rp285.289.905.252 atau sebesar 18,85 %.

Gedung dan Bangunan adalah Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu.



Gedung dan Bangunan Kementerian Sosial RI dirinci sebagai berikut;

No	Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Sekretariat Jenderal	439.620.104.238	393.142.677.726	46.477.426.512	11,82
2	Ditjen Pemberdayaan Sosial	66.991.071.957	92.009.885.444	(25.018.813.487)	(27,19)
3	Ditjen Rehabilitasi Sosial	910.261.213.091	885.597.850.398	24.663.362.693	2,78
4	Ditjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial	6.936.906.080	11.798.636.080	(4.861.730.000)	(41,21)
5	Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluhan Sosial	374.819.552.901	362.038.989.420	12.780.563.481	3,53
6	Satker Konsolidasi	-	(231.249.096.053)	231.249.096.053	(100,00)
	Jumlah	1.798.628.848.267	1.513.338.943.015	285.289.905.252	18,85

Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut :

Belanja Gedung dan Bangunan	84.977.335.749
Mutasi:	
Pembelian	197.450.000
Penyelesaian Pembangunan langsung	45.463.000
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Pengembangan Nilai Aset	23.793.568.225
Pengembangan KDP	58.716.512.864
Perolehan/ Penambahan KDP	2.145.199.700
Total Mutasi:	84.898.193.789
Selisih	79.141.960
Penjelasan Atas Selisih	
BM GB yang tidak menghasilkan GB	1.344.790.110
Menghasilkan Peralatan dan Mesin	1.016.390.110
Menghasilkan Beban Aset Ekstrakomtabel	328.400.000
	(1.235.488.150)
Gb yang dihasilkan bukan dari Belanja GB	(30.160.000)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(30.160.000)
Total Penjelasan Atas Selisih	79.141.960
Selisih	-

Terdapat realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan membentuk Aset Ekstrakomtabel senilai Rp328.400.000 pada satuan kerja Direktorat Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial berupa pembelian topi tempur dan kijing dibawah nilai kapitalisasi. Permasalahan ini telah terjadi sejak Tahun Anggaran 2018 dan telah dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan dan masih menunggu arahan dari Kementerian Keuangan terkait penggunaan akun belanja aset ekstrakomtabel tersebut agar sesuai dengan peruntukannya.

Pada satuan kerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terdapat realisasi belanja modal Gedung Dan Bangunan menjadi Peralatan dan Mesin senilai Rp1.016.390.110 dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan menjadi Irigasi senilai Rp185.000.000

Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :



Saldo Neraca per 31 Desember 2018	1.513.338.943.015
Koreksi Revaluasi Aset Tetap pada Satker Konsolidasi Tahun 2018	(231.249.096.053)
Saldo BMN 31 Desember 2018	1.744.588.039.068
Mutasi Tambah :	233.154.114.484
(101) Pembelian	197.450.000
(102) Transfer Masuk	70.612.143.100
(103) Hibah (Masuk)	649.820.000
(105) Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	36.403.039.634
(107) Reklasifikasi Masuk	27.070.122.685
(113) Penyelesaian Pembangunan Langsung	45.463.000
(130) Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	7.097.376.000
(177) Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	154.061.000
(190) Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	2.079.850.106
(202) Pengembangan Nilai Aset	23.793.568.225
(206) Penerimaan Aset Tetap Renovasi	3.934.868.985
(208) Pengembangan Melalui KDP	23.397.563.809
(223) Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	5.426.348.940
(224) Koreksi Penilaian Kembali BMN	29.715.000
(245) Koreksi Nilai barang Berlebih	781.121.000
(247) Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	25.676.494.000
(331) Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	5.805.109.000
Mutasi Kurang :	(179.113.305.285)
(204) Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(876.846.300)
(209) Transaksi Normalisasi BMN	(2.162.011.000)
(225) Koreksi Kesalahan input IP	(30.401.599.000)
(229) Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	(7.835.552.411)
(232) Koreksi Transfer Masuk	(5.805.109.000)
(301) Penghapusan	(120.653.000)
(302) Transfer Keluar	(70.612.143.100)
(304) Reklasifikasi Keluar	(28.316.778.245)
(305) Koreksi Pencatatan	(7.855.876.629)
(334) Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	(24.778.810.600)
(188) Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(347.926.000)
Saldo BMN per 31 Desember 2019	1.798.628.848.267
Koreksi Revaluasi Aset Tetap pada Satker Konsolidasi Tahun 2018	(231.249.096.053)
Koreksi Revaluasi Aset Tetap pada Satker Konsolidasi Semester I Tahun 2019	53.891.646.859
Koreksi Revaluasi Aset Tetap pada Satker Konsolidasi Semester I Tahun 2019 yang dilakukan pada TW III 2019	(53.610.110.859)
Koreksi take in Revaluasi 31 Desember 2019	230.967.560.053
Saldo Neraca per 31 Desember 2019	1.798.628.848.267

Mutasi Tambah:

1. Pembelian sebesar Rp197.450.000 terdapat pada Sekretariat Jenderal satuan kerja Sekretariat Jenderal.
2. Transfer Masuk sebesar Rp70.612.143.100 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya "Bambu Apus" di Jakarta.
3. Hibah (Masuk) sebesar Rp649.820.000 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual "Ciung Wanara" Di Bogor berdasarkan Berita Acara Hibah BMN Nomor : 11/PSBG/KS.02/01/2019 yang berasal dari Siloam Center For The Blind
4. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp36.403.039.634 pada :
 - a. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp28.286.878.245 satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dikarenakan adanya pembangunan Pusat Rehabilitasi Sosial ODHIV di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan.



- b. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp8.116.161.389 satuan kerja Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin.
5. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp27.070.122.685 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dikarenakan adanya pembangunan Pusat Rehabilitasi Sosial ODHIV di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan yang di definitif menjadi aset pada satu bangunan kemudian dilakukan reklasifikasi masuk untuk mengkapitalisasi aset sesuai dengan fisik bangunan yang terbentuk.
6. Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp45.463.000 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Literasi Braille Indonesia "Abiyoso" di Cimahi.
7. Koreksi Barang Berlebih hasil Inventarisasi sebesar Rp7.097.376.000 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dikarenakan adanya revaluasi aset tetap di satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "WIRAJAYA" DI MAKASSAR	6.486.913.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS "PANGUDI LUHUR" DI BEKASI	610.463.000
Total	7.097.376.000

8. Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp154.061.000 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra "Tumou Tou" Di Manado.
9. Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp2.079.850.106 terdapat pada UKEI I Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "HANDAYANI" DI JAKARTA	2.015.585.832
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "INSYAF" DI MEDAN	64.264.274
Total	2.079.850.106

10. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp23.793.568.225 terdapat pada :
- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp18.251.154.000 satuan kerja Sekretariat Jenderal
- b. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp119.068.125 satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial berupa Rolling Door untuk Gedung HTT di makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata.
- c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp4.610.943.100 pada satuan kerja:



Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS "PANGUDI LUHUR" DI BEKASI	793.763.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "NIPOTOWE" DI PALU	411.275.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "PHALA MARTHA" DI SUKABUMI	397.100.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "NAIBONAT" DI KUPANG	370.946.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TAN MIYAT" DI BEKASI	312.404.000
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "KARTINI" DI TEMANGGUNG	247.060.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "WYATA GUNA" DI BANDUNG	243.364.000
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL	198.484.000
BALAI LITERASI BRAILLE INDONESIA "ABIYOSO" DI CIMAHI	194.914.250
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "PROF. DR. SOEHARSO" DI SURAKARTA	123.358.000
LOKA REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "DARUSSA'ADAH" DI ACEH	74.975.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "INSYAF" DI MEDAN	66.492.500
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "BUDI PERKASA" DI PALEMBANG	66.250.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "GAU MABAJ" DI GOWA	62.735.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "PARAMITA" DI MATARAM	60.900.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "SATRIA" DI BATURRADEN	60.340.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "BUDHI DHARMA" DI BEKASI	60.338.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "DHARMA GUNA" DI BENGKULU	60.000.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "RUMBA" DI PEKANBARU	60.000.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "BAHAGIA" DI MEDAN	58.498.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "EFFATA" DI KUPANG	57.547.500
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "ALYATAMA" DI JAMBI	55.000.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "GALIH PAKUAN" DI BOGOR	52.569.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "BUDI LUHUR" DI BANJARBARU	51.075.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "MAHATMYA" DI TABANAN	49.880.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "TODDOPULI" DI MAKASSAR	49.500.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "MELATI" DI JAKARTA	49.067.375
LOKA REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "KAHURIPAN" DI SUKABUMI	48.950.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "WASANA BAHAGIA" DI TERNATE	47.750.000
LOKA REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "MEOHA" DI KENDARI	46.975.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TUMOU TOU" DI MANADO	44.454.545
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "ANTA SENA" DI MAGELANG	40.056.430
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "BAMBU APUS" DI JAKARTA	35.662.000
LOKA REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "MINAULA" DI KENDARI	34.075.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "HANDAYANI" DI JAKARTA	25.184.500
Total	4.610.943.100

- d. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp812.403.000 pada satuan kerja:



Satuan Kerja	Jumlah
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) BANJARMASIN	388.493.000
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) LEMBANG - BANDUNG	275.250.000
SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS) BANDUNG	118.500.000
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) YOGYAKARTA	30.160.000
Total	812.403.000

11. Penerimaan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp3.934.868.985 terdapat pada :

- Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.407.989.500 pada satuan kerja Sekretariat Jenderal.
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp384.683.000 terdapat pada satuan kerja Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp747.339.485 pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "BAMBU APUS" DI JAKARTA	378.366.485
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "PHALA MARTHA" DI SUKABUMI	197.844.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "ANTASENA" DI MAGELANG	171.129.000
Total	747.339.485

- Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp394.857.000 pada satuan kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.

12. Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp23.397.563.809 terdapat pada :

- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp12.014.371.698 pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "PROF. DR. SOEHARSO" DI SURABAYA	3.210.306.198
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "KARTINI" DI TEMANGGUNG	1.860.000.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "BAMBU APUS" DI JAKARTA	1.160.072.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "HANDAYANI" DI JAKARTA	1.087.670.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "GAU MABAJI" DI GOWA	626.653.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TAN MIYAT" DI BEKASI	499.100.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS "PANGUDI LUHUR" DI BEKASI	446.810.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "WASANA BAHAGIA" DI TERNATE	399.249.500
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "NIPOTOWE" DI PALU	391.350.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "PHALA MARTHA" DI SUKABUMI	383.265.000
LOKA REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "DARUSSA'ADAH" DI ACEH	374.650.000
BALAI BESAR REHABILITASI VOKASIONAL PENYANDANG DISABILITAS DI CIBINONG	364.582.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "MARGO LARAS" DI PATI	346.130.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "WYATA GUNA" DI BANDUNG	239.175.000
BALAI LITERASI BRAILLE INDONESIA "ABIYOSO" DI CIMAHI	221.209.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "BUDHI DHARMA" DI BEKASI	199.283.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "SATRIA" DI BATURRADEN	144.485.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "WIRAJAYA" DI MAKASSAR	60.382.000
Total	12.014.371.698



- b. Balai Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp11.383.192.111 pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) BANJARMASIN	7.049.216.411
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (B2P3KS) YOGYAKARTA	2.408.104.300
SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS) BANDUNG	1.925.871.400
Total	11.383.192.111

13. Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali sebesar Rp5.426.348.940 terdapat pada:

- a. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial di satuan kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp41.248.072
- b. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp5.385.100.868 di satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "WIRAJAYA" DI MAKASSAR	4.561.019.407
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TAN MIYAT" DI BEKASI	733.239.643
BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS "PANGUDI LUHUR" DI BEKASI	89.433.974
BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "BUDHI DHARMA" DI BEKASI	1.407.844
Total	5.385.100.868

14. Koreksi Penilaian Kembali BMN sebesar Rp29.715.000 terdapat pada Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial di satuan kerja Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar.

15. Koreksi Nilai barang Berlebih sebesar Rp781.121.000 terdapat pada :

- a. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp149.184.000 di satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "BUDI LUHUR" DI BANJARBARU	760.240.000
PANTI SOSIAL BINA REMAJA "BAMBU APUS", JAKARTA	(611.056.000)
Total	149.184.000

- b. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial di satuan kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar sebesar Rp631.937.000

16. Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi sebesar Rp25.676.494.000 terdapat pada Sekretariat Jenderal di satuan kerja Sekretariat Jenderal.

17. Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi sebesar Rp5.805.109.000 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial di satuan kerja Panti Sosial Bina Remaja "Bambu Apus", Jakarta



Mutasi Kurang:

1. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar (Rp876.846.300) terdapat pada :
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar (Rp55.660.988) pada satuan kerja Sekretariat Jenderal.
 - b. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar (Rp4.555.912) terdapat pada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
 - c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar (Rp707.637.381) pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "WYATA GUNA" DI BANDUNG	128.700.000
BALAI BESAR REHABILITASI VOKASIONAL PENYANDANG DISABILITAS DI CIBINONG	12.004.080
BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS WANITA TUNA SUSILA "MULYA JAYA" DI JAKARTA	10.560.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "PHALA MARTHA" DI SUKABUMI	5.017.410
BALAI REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "BAHAGIA" DI MEDAN	(807.579)
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "HANDAYANI" DI JAKARTA	(1.300.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TUMOU TOU" DI MANADO	(12.543.036)
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "PROF. DR. SOEHARSO" DI SURAKARTA	(849.268.256)
Total	(707.637.381)

- d. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar (Rp108.992.019) satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	(19.210.569)
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) YOGYAKARTA	(89.781.450)
Total	(108.992.019)

2. Transaksi Normalisasi BMN sebesar (Rp2.162.011.000) terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "INSYAF" DI MEDAN	(67.493.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "HANDAYANI" DI JAKARTA	(2.094.518.000)
Total	(2.162.011.000)

3. Koreksi Kesalahan input IP sebesar (Rp30.401.599.000) terdapat pada :

- a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp25.676.494.000 di satuan kerja Biro Umum



- b. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar (Rp24.049.731.000) di satuan kerja Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
- c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar (Rp18.940.822.000) di satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "BUDI LUHUR" DI BANJARBARU	5.012.402.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS "PANGUDI LUHUR" DI BEKASI	3.159.779.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TUMOU TOU" DI MANADO	888.194.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "BUDHI DHARMA" DI BEKASI	739.495.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "RUMBAI" DI PEKANBARU	175.582.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "WYATA GUNA" DI BANDUNG	(28.795.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "HANDAYANI" DI JAKARTA	(207.263.000)
BALAI LITERASI BRAILLE INDONESIA "ABIYOSO" DI CIMAH	(229.169.000)
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG	(279.993.000)
BALAI BESAR REHABILITASI VOKASIONAL PENYANDANG DISABILITAS DI CIBINONG	(357.923.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "WIRAJAYA" DI MAKASSAR	(513.665.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "ALYATAMA" DI JAMBI	(679.176.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS WANITA TUNA SUSILA "MULYA JAYA" DI JAKARTA	(1.141.544.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TAN MIYAT" DI BEKASI	(1.469.658.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "GALIH PAKUAN" DI BOGOR	(3.204.973.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "MAHATMIYA" DI TABANAN	(3.258.132.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "MELATI" DI JAKARTA	(3.864.436.000)
PANTI SOSIAL BINA REMAJA "BAMBU APUS", JAKARTA	(5.194.053.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "TODDOPULI" DI MAKASSAR	(8.487.494.000)
Total	(18.940.822.000)

- d. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar (Rp4.861.730.000) terdapat pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	163.939.000
DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	(5.025.669.000)
Total	(4.861.730.000)

- e. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar (Rp8.225.810.000) pada satuan kerja:



Satuan Kerja	Jumlah
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	2.975.743.000
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) LEMBANG - BANDUNG	375.178.000
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) BANJARMASIN	(150.499.000)
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) MAKASSAR	(5.456.647.000)
SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS) BANDUNG	(5.969.585.000)
Total	(8.225.810.000)

4. Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan sebesar (Rp7.835.552.411) terdapat pada :

a. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial di satuan kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (Rp581.606.472)

b. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar (Rp7.253.945.939) di satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS "PANGUDI LUHUR" DI BEKASI	190.713.853
BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "BUDHI DHARMA" DI BEKASI	(6.656.844)
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TAN MIYAT" DI BEKASI	(1.085.315.643)
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "WIRAJAYA" DI MAKASSAR	(6.352.687.305)
Total	(7.253.945.939)

5. Koreksi Transfer Masuk sebesar (Rp5.805.109.000) terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial di satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya "Bambu Apus" di Jakarta.

6. Penghapusan sebesar (Rp120.653.000) terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus "Naibonat" di Kupang.

7. Transfer Keluar sebesar (Rp70.612.143.100) terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada satuan kerja Panti Sosial Bina Remaja "Bambu Apus", Jakarta.

8. Reklasifikasi Keluar sebesar (Rp28.316.778.245) terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "DHARMA GUNA" DI BENGKULU	(29.900.000)
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL	(28.286.878.245)
Total	(28.316.778.245)

9. Koreksi Pencatatan sebesar (Rp7.855.876.629) terdapat pada :



a. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar (Rp1.468.277.700) satuan kerja Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

b. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar (Rp6.134.698.929) di satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS "PANGUDI LUHUR" DI BEKASI	(809.457.827)
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "WIRAJAYA" DI MAKASSAR	(5.325.241.102)
Total	(6.134.698.929)

c. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar (Rp252.900.000) satuan kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Lembang – Bandung.

10. Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi sebesar (Rp24.778.810.600) dirinci sebagai berikut :

a. Sekretariat Jenderal sebesar (25.676.494.000) di satuan kerja Biro Umum

b. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial di satuan kerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Rp540.358.400

c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp357.325.000 di satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TAN MIYAT" DI BEKASI	352.076.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "BUDHI DHARMA" DI BEKASI	5.249.000
Total	357.325.000

11. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar (Rp347.926.000) terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "NAIBONAT" DI KUPANG	(4.393.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "WIRAJAYA" DI MAKASSAR	(281.536.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "WYATA GUNA" DI BANDUNG	(61.997.000)
Total	(347.926.000)

Jalan, Irigasi dan Jaringan **C.12 JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN**

Rp102.663.682.834

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp102.663.682.834** dan **Rp116.099.265.531** dan terdapat penurunan sebesar (Rp13.435.582.697) atau sebesar (11,57) %.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Kementerian Sosial RI terdapat pada:



URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	19.115.158.444	18.258.187.244	856.971.200	4,69
Ditjen Pemberdayaan Sosial	13.130.093.446	13.551.441.846	(421.348.400)	(3,11)
Ditjen Rehabilitasi Sosial	59.286.282.952	49.399.788.352	9.886.494.600	20,01
Ditjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.389.553.000	1.272.482.000	117.071.000	9,20
Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluhan Sosial	9.742.594.992	13.032.629.342	(3.290.034.350)	(25,24)
Satker Konsolidasi	-	20.584.736.747	(20.584.736.747)	(100,00)
TOTAL	102.663.682.834	116.099.265.531	(13.435.582.697)	(11,57)

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dirinci sebagai berikut :

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Jalan dan Jembatan	46.551.709.875	60.059.211.237	(13.507.501.362)	(22,49)
Irigasi	38.341.743.268	40.017.530.053	(1.675.786.785)	(4,19)
Jaringan	17.770.229.691	16.022.524.241	1.747.705.450	10,91
TOTAL	102.663.682.834	116.099.265.531	(13.435.582.697)	(11,57)

C.12.1 Jalan Dan Jembatan

Nilai Aset Tetap Jalan dan Jembatan pada Kementerian Sosial per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp46.551.709.875 dan Rp60.059.211.237 atau mengalami penurunan sebesar (22,49) %.

Jalan dan Jembatan adalah Jalan dan Jembatan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jalan dan Jembatan dirinci sebagai berikut:

No	Nama Eselon I	30 September 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	8.849.041.000	8.849.041.000,	-	-
2	Ditjen Pemberdayaan Sosial	5.868.799.500	5.868.799.500,	-	-
3	Ditjen Rehabilitasi Sosial	25.332.549.375	23.692.603.375,	1.639.946.000	6,92
4	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.201.453.000	1.084.382.000,	117.071.000	10,80
5	Badiklit Pensos	5.299.867.000	9.173.132.000,	(3.873.265.000)	(42,22)
6	Satker Konsolidasi	-	11.391.253.362	(11.391.253.362)	(100,00)
	Jumlah	46.551.709.875	60.059.211.237	(13.507.501.362)	(22,49)

Pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, Kementerian Sosial RI tidak merealisasikan Belanja Modal Jalan dan Jembatan, adapun mutasi nilai Aset Tetap Jalan dan Jembatan di Neraca dapat disajikan dalam tabel berikut:



Saldo Neraca per 31 Desember 2018	Rp	60.059.211.237
Koreksi Revaluasi Aset Tetap pada Satker Konsolidasi Tahun 2018	Rp	(11.391.253.362)
Saldo SIMAK BMN per 31 Desember 2018	Rp	48.667.957.875
Mutasi Tambah	Rp	4.350.714.000
(102) Transfer Masuk	Rp	3.454.031.000
(190) Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp	43.705.000
(331) Koreksi Transfer Keluar akibat Koreksi Revaluasi	Rp	852.978.000
Mutasi Kurang :	Rp	(6.466.962.000)
(209) Transaksi Normalisasi BMN	Rp	(43.054.000)
(225) Koreksi Kesalahan input IP	Rp	(2.116.899.000)
(232) Koreksi Transfer Masuk	Rp	(852.978.000)
(302) Transfer Keluar	Rp	(3.454.031.000)
Saldo SIMAK BMN per 31 Desember 2019	Rp	46.551.709.875
Koreksi Revaluasi Aset Tetap pada Satker Konsolidasi Tahun 2018	Rp	11.391.253.362
Koreksi Revaluasi Aset Tetap pada Satker Konsolidasi Semester I Tahun 2019	Rp	3.313.364.831
Tambahan Koreksi Revaluasi Aset Tetap pada Satker Konsolidasi Semester I Tahun 2019 yang dilakukan pada TWIII 2019	Rp	(3.313.364.831)
Koreksi Take in Revaluasi 31 Desember 2019	Rp	(11.391.253.362)
Saldo Neraca per 31 Desember 2019	Rp	46.551.709.875

Mutasi Tambah:

1. Transfer Masuk sebesar Rp3.454.031.000 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya "Bambu Apus" di Jakarta.
2. Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi terdapat pada UKE Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial di satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya "Bambu Apus" di Jakarta sebesar Rp43.705.000
3. Koreksi Transfer Keluar atas 224 sebesar Rp852.978.000 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial di satuan kerja Panti Sosial Bina Remaja "Bambu Apus", Jakarta.

Mutasi Kurang:

1. Transaksi Normalisasi BMN sebesar (Rp43.054.000) terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial di satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya "Bambu Apus" di Jakarta.
2. Koreksi Kesalahan input IP sebesar (Rp2.116.899.000) terdapat pada :
 - a. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar 1.639.295.000 di satuan kerja:



Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TAN MIYAT" DI BEKASI	1.795.287.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "BUDI LUHUR" DI BANJARBARU	488.136.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "MELATI" DI JAKARTA	404.011.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "GALIH PAKUAN" DI BOGOR	176.773.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "WIRAJAYA" DI MAKASSAR	107.574.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "HANDAYANI" DI JAKARTA	46.740.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "ALYATAMA" DI JAMBI	27.494.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TUMOU TOU" DI MANADO	(13.423.000)
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG	(21.640.000)
BALAI BESAR REHABILITASI VOKASIONAL PENYANDANG DISABILITAS DI CIBINONG	(258.384.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "RUMBAI" DI PEKANBARU	(260.295.000)
PANTI SOSIAL BINA REMAJA "BAMBU APUS", JAKARTA	(852.978.000)
Total	1.639.295.000

- b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp117.071.000 terdapat pada satuan kerja Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
- c. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar (Rp3.873.265.000) di satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	346.550.000
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) BANJARMASIN	(4.219.815.000)
Total	(3.873.265.000)

- d. Koreksi Transfer Masuk sebesar (Rp852.978.000) terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial di satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya "Bambu Apus" di Jakarta.
- e. Transfer Keluar sebesar (Rp3.454.031.000) terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Panti Sosial Bina Remaja "Bambu Apus", Jakarta.

C.12.2 Irigasi

Nilai Aset Tetap Irigasi pada Kementerian Sosial RI per 31 Desember 2019 sebesar **Rp38.341.743.268** dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp40.017.530.053** dimana terdapat penurunan sebesar (Rp1.675.786.785) atau sebesar (4,37) %.

Irigasi adalah Irigasi yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Rincian Aset Tetap Irigasi adalah sebagai berikut:



Uraian	30 September 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	2.215.992.400	2.215.992.400	-	-
Ditjen Pemberdayaan Sosial	6.366.029.453	6.787.377.853	(421.348.400)	(6,62)
Ditjen Rehabilitasi Sosial	27.892.524.415	19.716.393.415	8.176.131.000	29,31
Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluhan Sosial	1.867.197.000	2.104.283.000	(237.086.000)	(12,70)
Satker Konsolidasi	-	9.193.483.385	(9.193.483.385)	(100)
Total	38.341.743.268	40.017.530.053	(1.675.786.785)	(4,37)

Mutasi Aset Irigasi dari Belanja Modal Irigasi adalah sebagai berikut :

Belanja Modal Irigasi	338.000.000
Mutasi:	
Penyelesaian Pembangunan langsung	338.000.000
Pengembangan melalui KDP	185.000.000
Total Mutasi:	523.000.000
Selisih	(185.000.000)
Penjelasan Atas Selisih	
Mutasi Irigasi yang berasal dari Belanja Gedung dan Bangunan yang membentuk KDP	(185.000.000)
Total Penjelasan Atas Selisih	(185.000.000)
Selisih	-

Mutasi Aset Irigasi adalah sebagai berikut :

Saldo Neraca per 31 Desember 2018	40.017.530.053
Koreksi Revaluasi Aset Tetap pada Satker Konsolidasi Tahun 2018	(9.193.483.385)
Saldo BMN per 31 Desember 2018	30.824.046.668
Mutasi Tambah :	7.939.045.000
(113) Penyelesaian Pembangunan Langsung	338.000.000
(208) Pengembangan Melalui KDP	185.000.000
(225) Koreksi Kesalahan input IP	7.416.045.000
Mutasi Kurang :	(421.348.400)
Koreksi Pencatatan	(421.348.400)
Saldo BMN per 31 Desember 2019	38.341.743.268
Koreksi Revaluasi Aset Tetap pada Satker Konsolidasi Tahun 2018	(9.193.483.385)
Koreksi Take in Revaluasi 31 Desember 2019	9.193.483.385
Saldo Neraca per 30 September 2019	38.341.743.268

Mutasi Tambah:

1. Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp338.000.000 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "INSYAF" DI MEDAN	198.000.000
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "KARTINI" DI TEMANGGUNG	140.000.000
Total	338.000.000

2. Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp185.000.000 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia "Gau Mabaji" di



Gowa.

3. Koreksi Kesalahan Input IP sebesar Rp7.416.045.000 terdapat pada :

a. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp7.653.131.000 pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "HANDAYANI" DI JAKARTA	6.299.885.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS "PANGUDI LUHUR" DI BEKASI	829.823.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "MELATI" DI JAKARTA	413.506.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TAN MIYAT" DI BEKASI	333.032.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "BUDHI DHARMA" DI BEKASI	224.167.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "BUDI LUHUR" DI BANJARBARU	36.122.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "ALYA TAMA" DI JAMBI	(264.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TUMOU TOU" DI MANADO	(30.259.000)
BALAI BESAR REHABILITASI VOKASIONAL PENYANDANG DISABILITAS DI CIBINONG	(110.532.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "GALIH PAKUAN" DI BOGOR	(162.475.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "RUMBA" DI PEKANBARU	(179.874.000)
Total	7.653.131.000

b. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar (Rp237.086.000) pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) MAKASSAR	(30.726.000)
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) BANJARMASIN	(42.537.000)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	(163.823.000)
Total	(237.086.000)

Mutasi Kurang:

1. Koreksi Pencatatan sebesar (Rp421.348.400) terdapat pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial satuan kerja Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakwanan, dan Restorasi Sosial.

C.12.3 Jaringan

Nilai Aset Tetap Jaringan pada Kementerian Sosial 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp17.770.229.691** dan **Rp16.022.524.241** dimana terdapat kenaikan sebesar Rp1.747.705.450 atau sebesar 9,84 %.

Jaringan adalah Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Rincian Aset Jaringan dapat dilihat pada tabel berikut:



Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	8.050.125.044	7.193.153.844	856.971.200	10,65
Ditjen Pemberdayaan Sosial	895.264.493	895.264.493	-	-
Ditjen Rehabilitasi Sosial	6.061.209.162	5.990.791.562	70.417.600	1,16
Ditjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial	188.100.000	188.100.000	-	-
Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluhan Sosial	2.575.530.992	1.755.214.342	820.316.650	31,85
Total	17.770.229.691	16.022.524.241	1.747.705.450	9,84

Rincian Mutasi Aset Jaringan dari Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Belanja Modal Jaringan	1.747.705.450
Mutasi:	
Pembelian	1.743.586.850
Penyelesaian Pembangunan langsung	-
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	-
Pengembangan Nilai Aset	4.118.600
Pengembangan KDP	-
Perolehan/ Penambahan KDP	-
Total Mutasi:	1.747.705.450
Selisih	-

Mutasi Aset Tetap Jaringan adalah sebagai berikut :

Saldo Neraca per 31 Desember 2018	16.022.524.241
Mutasi Tambah :	1.957.211.956
Pembelian	1.743.586.850
Transfer Masuk	209.506.506
Pengembangan Nilai Aset	4.118.600
Mutasi Kurang :	(209.506.506)
Transfer Keluar	(209.506.506)
Saldo per 31 Desember 2019	17.770.229.691

Mutasi Tambah:

1. Pembelian sebesar Rp1.743.586.850 terdapat pada :
 - a. Sekretariat Jenderal satuan kerja Sekretariat Jenderal sebesar Rp856.971.200
 - b. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Literasi Braille Indonesia "Abiyoso" di Cimahi sebesar Rp66.299.000
 - c. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial satuan kerja Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jayapura sebesar Rp820.316.650.
2. Transfer masuk sebesar Rp209.506.506 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya "Bambu Apus" di Jakarta.
3. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp4.118.600 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Literasi Braille Indonesia "Abiyoso" di Cimahi.



Mutasi Kurang:

1. Transfer Keluar sebesar (Rp209.506.506) terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Panti Sosial Bina Remaja "Bambu Apus", Jakarta.

Aset Tetap Lainnya
Rp21.990.010.062

C.13 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar **Rp21.990.010.062** dan sebesar **Rp14.798.697.676** dimana mengalami kenaikan sebesar Rp7.191.312.386 atau sebesar 48,59 %.

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Berikut Rincian Aset Tetap Lainnya Kementerian Sosial di setiap per 31 Desember 2019:

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	1.766.429.930	1.684.151.930	82.278.000	4,89
Inspektorat Jenderal	60.995.750	60.995.750	-	-
Ditjen Pemberdayaan Sosial	1.867.182.755	1.834.374.315	32.808.440	1,79
Ditjen Rehabilitasi Sosial	6.783.414.139	6.891.177.993	(107.763.854)	(1,56)
Ditjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial	249.805.500	249.805.500	-	-
Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluhan Sosial	11.262.181.988	4.078.192.188	7.183.989.800	176,16
TOTAL	21.990.010.062	14.798.697.676	7.191.312.386	48,59

Aset Tetap Lainnya di Kementerian sosial RI terdiri dari Aset Tetap Renovasi dan Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

No	Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset Tetap Renovasi	7.153.651.140	350.000.000,	6.803.651.140	1.943,90
2	Aset Tetap Lainnya	14.836.358.922	14.448.697.676,	387.661.246	2,68
	Jumlah	21.990.010.062	14.798.697.676	7.191.312.386	48,59

C.13.1 ASET TETAP RENOVASI

Nilai Aset Tetap Renovasi (ATR) pada Kementerian Sosial RI per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing masing adalah sebesar Rp7.153.651.140 dan Rp350.000.000 mengalami kenaikan sebesar Rp6.803.651.140 atau sebesar 1.934,90 %.

Aset Tetap dalam Renovasi adalah Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan.

Aset Tetap Renovasi di setiap dirinci sebagai berikut:



No	UKE I	30 September 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	382.808.440	350.000.000	32.808.440	8,57
2	Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	6.770.842.700	-	6.770.842.700	100,00
Jumlah		7.153.651.140	350.000.000	6.803.651.140	1.943,90

Aset Tetap Renovasi Kementerian Sosial RI per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.153.651.140 terdapat pada :

1. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial di satuan kerja:
 - a. Direktorat Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakwanan, dan Restorasi Sosial sebesar Rp350.000.000 berupa renovasi di Taman Makam Pahlawan Seroja, Dili Timor Leste yang merupakan hibah ATR lintas negara. Belanja Modal yang menyebabkan ATR ini terdapat pada tahun 2008. ATR tersebut akan segera ditindaklanjuti dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara yang dihibahkan oleh pihak Kementerian Sosial dengan pihak Kementerian Provinsi c.q Dinas/ Instansi Sosial Provinsi.
 - b. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp32.808.440 yang terletak di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra Bandung berupa gudang penyimpanan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.
2. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp6.770.842.700 berupa renovasi pada Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dimana sebesar Rp327.054.228 menjadi utang kepada pihak ketiga berupa kekurangan pembayaran Belanja modal Peralatan dan Mesin dikarenakan adanya keterlambatan pengajuan pembayaran Termin III Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Pusdiklat Kesos dan akan dilakukan pembayaran pada tahun 2020.

Mutasi/perubahan Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	350.000.000
Mutasi Tambah :	17.671.039.825
(101) Pembelian	3.018.803.940
(105) Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	6.770.842.700
(107) Reklasifikasi Masuk	6.770.842.700
(113) Penyelesaian Pembangunan Langsung	1.110.550.485
Mutasi Kurang :	(10.867.388.685)
(204) Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(4.000.000)
(302) Transfer Keluar	(4.092.545.985)
(304) Reklasifikasi Keluar	(6.770.842.700)
Saldo per 31 Desember 2019	7.153.651.140

Mutasi Tambah:

1. Pembelian sebesar Rp3.018.803.940 pada :



- a. Sekretariat Jenderal Rp936.781.500 pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	196.421.500
SEKRETARIAT JENDERAL	740.360.000
Total	936.781.500

- b. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial di satuan kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebesar Rp32.808.440

- c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp247.500.000 pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA	49.500.000
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL	198.000.000
Total	247.500.000

- d. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp264.313.000 pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	54.450.000
DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL KELUARGA	209.863.000
Total	264.313.000

- e. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp758.054.000 satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

- f. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp779.347.000 pada satuan kerja Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluh Sosial.

2. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp6.770.842.700 pada Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan sosial satuan kerja Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluh Sosial.
3. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp6.770.842.700 pada Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan sosial satuan kerja Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluh Sosial.
4. Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp1.110.550.485 pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Mutasi Kurang:

1. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar (Rp4.000.000) pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza.
2. Transfer Keluar sebesar (Rp4.092.545.985) pada :



- a. Sekretariat Jenderal sebesar (Rp936.781.500) pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	196.421.500
SEKRETARIAT JENDERAL	740.360.000
Total	936.781.500

- b. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar (Rp1.354.050.485) pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL	(1.308.550.485)
DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA	(45.500.000)
Total	(1.354.050.485)

- c. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar (Rp264.313.000) satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL KELUARGA	(209.863.000)
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	(54.450.000)
Total	(264.313.000)

- d. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebesar (Rp758.054.000) pada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
- e. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar (Rp779.347.000) satuan kerja Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluh Sosial.
3. Reklasifikasi Keluar sebesar (Rp6.770.842.700) pada Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial satuan kerja Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluh Sosial.

C.13.2 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Sosial RI per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar **Rp14.836.358.922** dan **Rp14.448.697.676** di mana terdapat kenaikan Rp387.661.246 atau sebesar 2,61 %.

Aset Tetap Lainnya adalah Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.



Aset Tetap Lainnya di rinci sebagai berikut:

No	Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Sekretariat Jenderal	1.766.429.930	1.684.151.930,	82.278.000	4,66
2	Inspektorat Jenderal	60.995.750	60.995.750,	-	-
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	1.484.374.315	1.484.374.315,	-	-
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	6.783.414.139	6.891.177.993,	(107.763.854)	(1,59)
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	249.805.500	249.805.500,	-	-
6	Badiklit Pensos	4.491.339.288	4.078.192.188,	413.147.100	9,20
	Jumlah	14.836.358.922	14.448.697.676	387.661.246	2,61

Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut;

Saldo per 31 Desember 2018	14.448.697.676
Mutasi Tambah :	941.576.850
(101) Pembelian	495.425.100
(102) Transfer Masuk	412.357.750
(103) Hibah (Masuk)	33.794.000
Mutasi Kurang :	(553.915.604)
(188) Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(120.576.900)
(302) Transfer Keluar	(412.357.750)
(303) Hibah (Keluar)	(20.980.954)
Saldo per 31 Desember 2019	14.836.358.922

Mutasi Tambah:

1. Pembelian sebesar Rp495.425.100 terdapat pada :
 - a. Sekretariat Jenderal satuan kerja Sekretariat Jenderal sebesar Rp82.278.000
 - b. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp413.147.100 satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (B2P3KS) YOGYAKARTA	48.997.100
SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS) BANDUNG	364.150.000
Total	413.147.100

2. Transfer Masuk sebesar Rp412.357.750 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya "Bambu Apus" di Jakarta.
3. Hibah (Masuk) sebesar Rp33.794.000 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual "Ciung Wanara" di Bogor.

Mutasi Kurang:

1. Reklasifikasi dari Aset tetap ke aset lainnya sebesar (Rp120.576.900) pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "BAMBU APUS" DI JAKARTA	92.879.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "SATRIA" DI BATURRADEN	27.697.900
Total	120.576.900

2. Transfer Keluar sebesar (Rp412.357.750) terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Panti Sosial Bina Remaja "Bambu Apus", Jakarta.
3. Hibah (Keluar) sebesar (Rp20.980.954) terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya "Satria" di Baturraden.

Konstruksi Pengerjaan
 Rp281.836.313

C.14 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp281.836.313** dan **Rp623.272.587** dimana terdapat penurunan (Rp341.436.274) atau sebesar (54,78) %.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Kementerian Sosial dirinci sebagai berikut:

Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Ditjen Rehabilitasi Sosial	206.197.213	547.633.487	(341.436.274)	(62,35)
Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluhan Sosial	75.639.100	75.639.100	-	-
Total	281.836.313	623.272.587	(341.436.274)	(54,78)

Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp206.197.213 pada Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial berupa biaya perencanaan untuk pembangunan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) pada Pusat Rehabilitasi Sosial di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Terkait hal ini, Sekretaris Ditjen Rehsos selaku KPA telah menerbitkan Surat Pernyataan yang menjelaskan bahwa pembangunan RPTC tidak akan dilanjutkan karena keterbatasan alokasi belanja modal untuk pembangunan fisik dan akan memprioritaskan pada optimalisasi UPT dalam



rangka peningkatan status dari Panti menjadi Balai. Saldo KDP ini belum dapat dihapus buku karena belum ada keputusan penghapusan/penghentian KDP dari Pengguna Barang.

2. Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp41.627.000 pada Satuan kerja BBPPKS Padang berupa KDP Tanah, hal tersebut disebabkan karena adanya Rencana Pengadaan Tanah pada Tahun 2017, kemudian dilaksanakan penilaian/penaksiran harga tanah oleh Tim Appraisal Eksternal berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 949/BKS-BBPPKS-PDG/KEU.04/PL. 02.04/07/2017 tanggal 28 Juli 2017 senilai Rp41.627.000 dengan menggunakan akun belanja Modal Tanah 531111. Dari hasil penilaian/penaksiran oleh Tim Appraisal dinyatakan harga /nilai ekonomis tanah/lahan dimaksud adalah Rp303.000 per Meter persegi (M2) dengan nilai obyek total sebesar Rp478.134.000 sedangkan dari pemilik tanah/lahan mengajukan penawaran Rp750.000 per meter persegi, sehingga tidak terjadi kesepakatan harga jual tanah/lahan dimaksud.
3. Pada Satuan kerja STKS Bandung terdapat KDP Gedung dan Bangunan senilai Rp34.012.100 berupa biaya perencanaan pembangunan asrama putra. Hal tersebut dikarenakan adanya rencana pembangunan Asrama Putra Tahun 2016, kemudian dilaksanakan Penunjukan Langsung Perencanaan senilai Rp19.742.100 serta biaya-biaya Lainnya (perjadin, honor, rapat-rapat) senilai Rp14.270.000. Dalam pelaksanaan Lelang melalui LPSE tidak ada perusahaan yang memasukkan penawaran, hal tersebut dikarenakan akses ke lokasi yang akan dibangun sangat sempit sehingga alat berat tidak mendapat akses, sedangkan kategori pekerjaannya merupakan pekerjaan berat/membutuhkan alat berat. Atas hal ini, berdasarkan penjelasan dari Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung dalam Surat Pernyataan No. 886/7.1.8/PL.05.01/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 pembangunan asrama putra dihentikan secara permanen karena terdapat penghematan anggaran dan optimalisasi anggaran sejak tahun 2018 untuk pengadaan tanah Kampus II Poltekesos di Soreang. Saldo KDP ini belum dapat dihapus buku karena belum ada keputusan penghapusan/penghentian KDP dari Pengguna Barang.

Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	623.272.587
Mutasi Tambah :	174.031.843.257
(501) Saldo Awal KDP	206.197.213
(502) Perolehan/Penambahan KDP	5.297.594.733
(503) Pengembangan KDP	168.528.051.311
Mutasi Kurang :	(174.373.279.531)
(105) Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(142.319.041.114)
(208) Pengembangan Melalui KDP	(30.630.495.809)
(504) Koreksi Nilai KDP	(1.423.742.608)
Saldo per 31 Desember 2019	281.836.313

Mutasi Tambah:

1. Saldo Awal KDP sebesar Rp206.197.213 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.



2. Perolehan/Penambahan KDP sebesar Rp5.297.594.733 terdapat pada :
- Sekretariat Jenderal sebesar Rp99.500.000 satuan kerja Sekretariat Jenderal
 - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp1.924.629.068 satuan kerja Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
 - Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp1.886.333.150 satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "NIPOTOWE" DI PALU	362.350.000
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL	306.776.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "GAU MABAJI" DI GOWA	224.995.900
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "PROF. DR. SOEHARSO" DI SURAKARTA	200.591.500
LOKA REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "DARUSSA'ADAH" DI ACEH	200.000.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "SATRIA" DI BATURRADEN	122.868.250
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "MARGO LARAS" DI PATI	72.237.500
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "BAMBU APUS" DI JAKARTA	67.720.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "HANDAYANI" DI JAKARTA	64.420.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "WIRAJAYA" DI MAKASSAR	51.615.000
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "KARTINI" DI TEMANGGUNG	47.964.200
BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS "PANGUDI LUHUR" DI BEKASI	29.500.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "WASANA BAHAGIA" DI TERNATE	28.350.000
BALAI BESAR REHABILITASI VOKASIONAL PENYANDANG DISABILITAS DI CIBINONG	25.037.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TAN MIYAT" DI BEKASI	25.000.000
BALAI LITERASI BRAILLE INDONESIA "ABY OSO" DI CIMAHI	20.752.800
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "PHALA MARTHA" DI SUKABUMI	19.500.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "BUDHI DHARMA" DI BEKASI	13.985.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "WYATA GUNA" DI BANDUNG	2.670.000
Total	1.886.333.150

- Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp91.520.000 satuan kerja Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
- Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp1.295.612.515 satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
SEKRETARIAT BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUH SOSIAL	637.980.145
SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS) BANDUNG	459.794.750
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) BANJARMASIN	115.464.120
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (B2P3KS) YOGYAKARTA	82.373.500
Total	1.295.612.515

3. Pengembangan KDP sebesar Rp168.528.051.311 terdapat pada :

- Sekretariat Jenderal satuan kerja Sekretariat Jenderal sebesar Rp7.396.897.272



- b. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial satuan kerja Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial sebesar Rp5.123.302.932.
- c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp38.860.421.751 pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL	28.240.607.203
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "PROF. DR. SOEHARSO" DI SURAKARTA	3.009.714.698
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "KARTINI" DI TEMANGGUNG	1.812.035.800
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "BAMBU APUS" DI JAKARTA	1.092.352.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "HANDAYANI" DI JAKARTA	1.023.250.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "GAU MABAJI" DI GOWA	586.657.100
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TAN MIYAT" DI BEKASI	474.100.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS "PANGUDI LUHUR" DI BEKASI	417.310.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "WASANA BAHAGIA" DI TERNATE	370.899.500
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "PHALA MARTHA" DI SUKABUMI	363.765.000
BALAI BESAR REHABILITASI VOKASIONAL PENYANDANG DISABILITAS DI CIBINONG	339.545.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "MARGO LARAS" DI PATI	273.892.500
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "WYATA GUNA" DI BANDUNG	236.505.000
BALAI LITERASI BRAILLE INDONESIA "ABIYOSO" DI CIMAHI	200.456.200
BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "BUDHI DHARMA" DI BEKASI	185.298.000
LOKA REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "DARUSSA'ADAH" DI ACEH	174.650.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "NIPOTOWE" DI PALU	29.000.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "SATRIA" DI BATURRADEN	21.616.750
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "WIRAJAYA" DI MAKASSAR	8.767.000
Total	38.860.421.751

- d. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp366.080.000 satuan kerja Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
- e. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp116.781.349.356 satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS) BANDUNG	73.915.882.538
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) BANJARMASSIN	32.194.571.063
SEKRETARIAT BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUH SOSIAL	8.345.164.955
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (B2P3KS) YOGYAKARTA	2.325.730.800
Total	116.781.349.356

Mutasi Kurang:

1. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar (Rp142.319.041.114) pada :
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar (Rp7.496.397.272) satuan kerja Sekretariat Jenderal.
 - b. Direktorat Jenderal Rehabilitasi sosial sebesar (Rp28.689.934.245) satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.



- c. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar (Rp457.600.000) satuan kerja Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
- d. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar (Rp105.675.109.597) satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS) BANDUNG	72.449.805.888
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) BANJARMASIN	24.242.158.609
SEKRETARIAT BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUH SOSIAL	8.983.145.100
Total	105.675.109.597

2. Pengembangan Melalui KDP sebesar (Rp30.630.495.809) pada :
- a. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar (Rp7.047.932.000) satuan kerja Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
- b. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar (Rp12.199.371.698) satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "PROF. DR. SOEHARSO" DI SURABAYA	3.210.306.198
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "KARTINI" DI TEMANGGUNG	1.860.000.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "BAMBU APUS" DI JAKARTA	1.160.072.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "HANDAYANI" DI JAKARTA	1.087.670.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "GAU MABAJI" DI GOWA	811.653.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TAN MIYAT" DI BEKASI	499.100.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS "PANGUDI LUHUR" DI BEKASI	446.810.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "WASANA BAHAGIA" DI TERNA TE	399.249.500
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "NIPOTOWE" DI PALU	391.350.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "PHALA MARTHA" DI SUKABUMI	383.265.000
LOKA REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "DARUSSA'ADAH" DI ACEH	374.650.000
BALAI BESAR REHABILITASI VOKASIONAL PENYANDANG DISABILITAS DI CIBINONG	364.582.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "MARGO LARAS" DI PATI	346.130.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "WYATA GUNA" DI BANDUNG	239.175.000
BALAI LITERASI BRAILLE INDONESIA "ABIYOSO" DI CIMAHI	221.209.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "BUDHI DHARMA" DI BEKASI	199.283.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "SATRIA" DI BATURRADEN	144.485.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "WIRAJAYA" DI MAKASSAR	60.382.000
Total	12.199.371.698

- c. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar (Rp11.383.192.111) pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) BANJARMASIN	7.049.216.411
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (B2P3KS) YOGYAKARTA	2.408.104.300
SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS) BANDUNG	1.925.871.400
Total	11.383.192.111

3. Koreksi Nilai KDP sebesar (Rp1.423.742.608) terdapat pada :



- a. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar (Rp405.082.445) satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
- b. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar (Rp1.018.660.163) satuan kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
 (Rp1.775.435.334.121)

C.15 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing **(Rp1.775.435.334.121)** dan **(Rp1.821.543.916.226)**. Terdapat penurunan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp46.108.582.105 atau sebesar (2,53) %

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dirinci sebagai berikut:

No	Aset Tetap	Nilai Aset Tetap di Neraca	Akum.Penyusutan Aset Tetap	Nilai Buku
1	Tanah	18.532.038.706.705	-	18.532.038.706.705
2	Peralatan dan Mesin	1.904.924.241.165	(1.552.647.621.419)	352.276.619.746
3	Gedung dan Bangunan	1.798.628.848.267	(182.053.118.595)	1.616.575.729.672
4	Jalan dan Jembatan	46.551.709.875	(23.402.850.397)	23.148.859.478
5	Irigasi	38.341.743.268	(6.491.545.017)	31.850.198.251
6	Jaringan	17.770.229.691	(7.373.488.912)	10.396.740.779
7	Aset Tetap Renovasi	7.153.651.140	-	7.153.651.140
8	Aset Tetap Lainnya	14.836.358.922	(3.466.709.781)	11.369.649.141
9	Konstruksi Dalam Pengerjaan	281.836.313	-	281.836.313
Total		22.360.527.325.346	(1.775.435.334.121)	20.585.091.991.225

Aset Tak Berwujud
 Rp98.538.827.706

C.16 ASET TAK BERWUJUD

Nilai Aset Tak Berwujud (ATB) Kementerian Sosial RI per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar **Rp98.538.827.706** dan **Rp94.613.896.087** dimana terdapat kenaikan Rp3.924.931.619 atau sebesar 4,15 %.

Aset Tak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Tak Berwujud di rinci sebagai berikut:



Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	32.012.845.828	29.782.519.663	2.230.326.165	7,49
Inspektorat Jenderal	386.475.000	206.475.000	180.000.000	87,18
Ditjen Pemberdayaan Sosial	17.959.418.000	17.473.493.000	485.925.000	2,78
Ditjen Rehabilitasi Sosial	1.570.600.550	1.585.740.550	(15.140.000)	(0,95)
Ditjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial	43.377.016.328	43.250.310.874	126.705.454	0,29
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	738.220.000	342.205.000	396.015.000	115,72
Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluhan Sosial	2.494.252.000	1.973.152.000	521.100.000	26,41
Total	98.538.827.706	94.613.896.087	3.924.931.619	4,15

Aset Tak Berwujud di lingkungan Kementerian Sosial RI terdiri dari :

Aset Tak berwujud	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Software	98.151.352.706	86.297.896.087	11.853.456.619	13,74
Lisensi	190.850.000	-	190.850.000	100,00
Aset Tak berwujud Lainnya	196.625.000	8.316.000.000	(8.119.375.000)	(97,64)
Total	98.538.827.706	94.613.896.087	3.924.931.619	4,15

Penjelasan atas Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

C.16.1 SOFTWARE

Nilai Aset Tak Berwujud Software pada Kementerian Sosial 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp98.151.352.706** dan **Rp86.297.896.087** dimana terdapat kenaikan sebesar Rp11.853.456.619 atau sebesar 13,74 %.

Rincian Aset Tak Berwujud Software di tiap dapat dilihat pada tabel berikut;

Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	32.012.845.828	29.782.519.663	2.230.326.165	7,49
Inspektorat Jenderal	386.475.000	206.475.000	180.000.000	87,18
Ditjen Pemberdayaan Sosial	17.571.943.000	17.473.493.000	98.450.000	0,56
Ditjen Rehabilitasi Sosial	1.570.600.550	1.585.740.550	(15.140.000)	(0,95)
Ditjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial	43.377.016.328	34.934.310.874	8.442.705.454	24,17
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	738.220.000	342.205.000	396.015.000	115,72
Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluhan Sosial	2.494.252.000	1.973.152.000	521.100.000	26,41
Total	98.151.352.706	86.297.896.087	11.853.456.619	13,74

Adapun Mutasi Aset Tak Berwujud Software adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	86.297.896.087
Mutasi Tambah :	11.882.327.465
(101) Pembelian	3.424.077.465
(107) Reklasifikasi Masuk	7.988.200.000
(202) Pengembangan Nilai Aset	470.050.000
Mutasi Kurang :	(28.870.846)
(188) Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	(15.140.000)
(204) Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(13.730.846)
Saldo per 31 Desember 2019	98.151.352.706



Mutasi Tambah:

1. Pembelian sebesar Rp3.424.077.465 terdapat pada :
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.140.502.465 satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
SEKRETARIAT JENDERAL	613.655.000
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	1.526.847.465
Total	2.140.502.465
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp180.000.000 satuan kerja Inspektorat Jenderal.
 - c. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp98.450.000 satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
 - d. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp266.010.000 satuan kerja Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
 - e. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp396.015.000 satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
 - f. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp343.100.000 satuan kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung
2. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp7.988.200.000 terdapat pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial di satuan kerja Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.
3. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp470.050.000 terdapat pada :
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp94.600.000 satuan kerja Sekretariat Jenderal
 - b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp197.450.000 satuan kerja Direktorat Jaminan Sosial Keluarga
 - c. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp178.000.000 satuan kerja Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung.

Mutasi Kurang

1. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar (Rp15.140.000) terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya "Galih Pakuan" di Bogor.
2. Koreksi Pencatatan Nilai/ Kuantitas sebesar (Rp13.730.846) terdapat pada :
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar (Rp4.776.300) satuan kerja Sekretariat Jenderal.
 - b. Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar (Rp8.954.546) satuan kerja (Rp8.954.546)



C.16.2 LISENSI

Nilai Aset Tak Berwujud Lisensi pada Kementerian Sosial 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp190.850.000** dan **Rp0** dimana terdapat kenaikan sebesar Rp190.850.000 atau sebesar 100 %.

Mutasi atas aset tidak berwujud Lisensi adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	-
Mutasi Tambah :	
Pembelian	190.850.000
Mutasi Kurang :	
Saldo per 31 Desember 2019	190.850.000

Mutasi Tambah berupa pembelian Lisensi sebesar Rp190.850.000 terdapat pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial satuan kerja Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat.

C.16.3 ASET TAK BERWUJUD LAINNYA

Aset Tak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah **Rp196.625.000** dan **Rp8.316.000.000**

Mutasi Aset Tak Berwujud Lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	8.316.000.000
Mutasi Tambah :	196.625.000
(101) Pembelian	196.625.000
Mutasi Kurang :	(8.316.000.000)
(204) Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(327.800.000)
(304) Reklasifikasi Keluar	(7.988.200.000)
Saldo per 31 Desember 2019	196.625.000

Mutasi Tambah:

1. Pembelian pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial di satuan kerja Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial berupa aplikasi XEGEL sebesar Rp196.625.000 berupa keamanan dokumen elektronik persuratan.

Mutasi Kurang:

1. Koreksi Pencatatan Nilai/ Kuantitas sebesar (Rp327.800.000) pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial di satuan kerja Direktorat Jaminan Sosial Keluarga
2. Reklasifikasi Keluar sebesar (Rp7.988.200.000) pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial di satuan kerja Direktorat Jaminan Sosial Keluarga

Dana yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp549.179.306.589

C.17 DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Sosial berupa Dana lainnya dimana per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp549.179.306.589** dan



Rp2.655.138.145 mengalami kenaikan sebesar Rp546.524.168.444 atau sebesar 20.583,64 %

Dana yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Adapun rincian Dana Lainnya di tiap dapat dilihat sebagai berikut;

No	Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Ditjen Pemberdayaan Sosial	125.000.000	-	125.000.000	100,00
2	Ditjen Rehabilitasi Sosial	-	287.000.000	(287.000.000)	(100,00)
3	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	2.368.138.145	(2.368.138.145)	(100,00)
4	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	549.054.306.589	-	549.054.306.589	100,00
Jumlah		549.179.306.589	2.655.138.145	546.524.168.444	20.583,64

Untuk tindak lanjut Dana Lainnya per 31 Desember 2018 yang telah disetorkan ke Kas Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur terdapat dana bantuan sosial tahun 2018 yang belum tersalur per 31 Desember 2018 senilai Rp287.000.000 dan telah tersalur per 31 Desember 2019.
2. Pada UKE 1 Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial satuan kerja Direktorat Jaminan Sosial Keluarga terdapat dana lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.368.138.145 . Per 31 Desember 2019 atas Dana Lainnya yang telah disalurkan ke KPM adalah sebesar Rp2.140.138.145 dan sisanya sebesar Rp228.000.000 dikembalikan ke kas negara karena merupakan KPM Non Eligibile. Tindak lanjut Dana lainnya Direktorat Jaminan Sosial Keluarga per 31 Desember 2019 dirinci sebagai berikut :

BANK	KETERANGAN SEMULA	DANA DISALURKAN	TERSALUR	KEMBALI KE KN	KETERANGAN UPDATE
MANDIRI Transaksi Bansos	3 KPM Double tahun 2018	1.500.000	500.000	1.000.000	Id billing setor
	KPM Blitar dan Purwakarta	227.000.000	-	227.000.000	Id billing setor
	KPM tahap 4 yang sudah disalurkan	266.350	266.350	-	Rekening koran yg menyatakan dana sudah keluar sebesar nominal tsb ada
	KPM blitar	500.000	500.000	-	Terdapat dokumen sumber dan BNBA
	KPM purwakarta	81.424.000	81.424.000	-	Terdapat dokumen sumber dan BNBA
MANDIRI Escrow	Merupakan bagian dari sisa escrow sebesar 1.646.605.105	500.000	500.000	-	Terdapat dokumen sumber dan BNBA
Mandiri Escrow	Merupakan bagian dari sisa escrow sebesar 1.646.605.105	343.447.795	343.447.795	-	Terdapat dokumen sumber
BNI Escrow Tahap 2	Merupakan bagian dari sisa escrow BNI Tahap 2 sebesarRp 9.199.000.000 yang disalurkan kembali kepada 3.427 KPM di Tulungagung	1.713.500.000	1.713.500.000	-	Terdapat dokumen sumber dan BNBA
TOTAL		2.368.138.145	2.140.138.145	228.000.000	



Dana lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp549.179.306.589 terdapat pada :

1. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp125.000.000 di satuan kerja Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial yang merupakan Dana Bantuan Sosial Direktorat PSKBS yang berasal dari hibah langsung Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial yang masih berada di rekening penampung dan belum disalurkan sampai 31 Desember 2019 yang dipergunakan untuk penyaluran dana bantuan sosial di kota Manokwari pada bulan Januari 2020.
2. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang merupakan saldo rekening sisa belanja bansos BPNT tahap 10 sampai dengan tahap 12 yang masih dalam masa penyaluran dan pemanfaatan (105 Hari) karena penerima manfaat masih memiliki hak untuk mengambil bantuan yang telah masuk dalam e-wallet nya sebesar Rp549.054.306.589 yang dirinci disetiap satuan kerja sebagai berikut:

Satuan Kerja	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Direktorat PFM Wilayah I	218.933.563.267	-
Direktorat PFM Wilayah II	160.572.852.879	-
Direktorat PFM Wilayah III	169.547.890.443	-
Jumlah	549.054.306.589	-

Dana Lainnya di setiap satuan kerja dan di setiap Himbara adalah dirinci sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	BNI	BRI	BTN	MANDIRI	TOTAL
1	Dit PFM Wilayah I	126.000.874.251	38.404.308.201	245.681.890	54.282.698.925	218.933.563.267
2	Dit PFM Wilayah II	119.781.832.156	12.717.921.874	6.393.357.167	21.679.741.682	160.572.852.879
3	Dit PFM Wilayah III	117.984.051.777	9.277.673.495	407.782.025	41.878.383.146	169.547.890.443
	Total	363.766.758.184	60.399.903.570	7.046.821.082	117.840.823.753	549.054.306.589

Aset Lain-Lain
Rp26.297.974.644

C.18 ASET LAIN-LAIN

Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp26.297.974.644** dan **Rp27.417.688.583** Terdapat kenaikan senilai (Rp1.119.713.939) atau sebesar (4,08) %.

Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasi Kementerian Sosial RI serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Aset Lain-Lain Kementerian Sosial RI dirinci sebagai berikut:



Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	4.893.314.303	5.568.169.454	(674.855.151)	(12,12)
Inspektorat Jenderal	843.928.903	346.891.839	497.037.064	143,28
Ditjen Pemberdayaan Sosial	451.679.802	1.441.249.802	(989.570.000)	(68,66)
Ditjen Rehabilitasi Sosial	13.134.727.497	11.384.511.639	1.750.215.858	15,37
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	344.153.488	1.208.233.044	(864.079.556)	(71,52)
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	171.192.231	189.342.231	(18.150.000)	(9,59)
Badiklit dan Pensos	6.458.978.420	7.315.551.574	(856.573.154)	(11,71)
Satker Konsolidasi	-	(36.261.000)	36.261.000	(100,00)
Total	26.297.974.644	27.417.688.583	(1.119.713.939)	(4,08)

Aset Lain-lain terdiri dari :

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Aset Tetap yang Tidak Lagi Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	26.060.951.592	27.186.605.531	(1.125.653.939)	(4,14)
2	ATB-yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	237.023.052	231.083.052	5.940.000	2,57
	Jumlah	26.297.974.644	27.417.688.583	(1.119.713.939)	(4,08)

ASET TETAP YANG TIDAK LAGI DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp26.060.951.592** dan **Rp27.186.605.531** mengalami penurunan senilai (Rp1.125.653.939) atau sebesar (4,14) %

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah di setiap adalah sebagai berikut:

Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	4.857.014.303	5.531.869.454	(674.855.151)	(12,20)
Inspektorat Jenderal	805.174.903	308.137.839	497.037.064	161,30
Ditjen Pemberdayaan Sosial	451.679.802	1.441.249.802	(989.570.000)	(68,66)
Ditjen Rehabilitasi Sosial	12.987.758.445	11.243.482.587	1.744.275.858	15,51
Ditjen Linjamsos	344.153.488	1.208.233.044	(864.079.556)	(71,52)
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	171.192.231	189.342.231	(18.150.000)	(9,59)
Badiklit dan Pensos	6.443.978.420	7.300.551.574	(856.573.154)	(11,73)
Satker Konsolidasi	-	(36.261.000)	36.261.000	(100,00)
Total	26.060.951.592	27.186.605.531	(1.125.653.939)	(4,14)



Mutasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah sebagai berikut :

Saldo Neraca per 31 Desember 2018	Rp	27.186.605.531
Koreksi Revaluasi Aset Tetap pada Satker Konsolidasi Tahun 2018	Rp	(36.261.000)
Saldo Erekon BMN per 31 Desember 2018	Rp	27.222.866.531
Mutasi Tambah :	Rp	10.160.114.942
(188) Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp	10.160.114.942
Mutasi Kurang :	Rp	(11.322.029.881)
(177) Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	(408.066.100)
(299) Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	Rp	(11.713.000)
(391) Penghapusan (BMN yang dihentikan)	Rp	(10.602.070.736)
(392) Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	Rp	(243.180.045)
(396) Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	Rp	(57.000.000)
Saldo Erekon BMN per 30 Juni 2019	Rp	26.060.951.592
Koreksi Revaluasi Aset Tetap pada Satker Konsolidasi Tahun 2018	Rp	(36.261.000)
Koreksi Revaluasi Aset Tetap pada Satker Konsolidasi Semester 1 Tahun 2019	Rp	(281.536.000)
Koreksi Take In Revaluasi 31 Desember 2019	Rp	317.797.000
Saldo per 31 Desember 2019 E-rekon	Rp	26.060.951.592

Mutasi Tambah:

1. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp10.160.114.942 terdapat pada :
 - a. Sekretariat Jenderal satuan kerja Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebesar Rp523.418.288
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp497.037.064 satuan kerja Inspektorat Jenderal.
 - c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp6.997.145.233 pada satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "NAIBONAT" DI KUPANG	4.393.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "MARGO LARAS" DI PATI	9.067.380
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "MELATI" DI JAKARTA	9.100.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "GALIH PAKUAN" DI BOGOR	28.350.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "WYATA GUNA" DI BANDUNG	61.997.000
BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "PROF. DR. SOEHARSO" DI SURAKARTA	68.808.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "MAHA TMIYA" DI TABANAN	117.047.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "WASANA BAHAGIA" DI TERNATE	176.753.333
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "BUDI LUHUR" DI BANJARBARU	276.309.500
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "WIRAJAYA" DI MAKASSAR	281.536.000
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "SATRIA" DI BATURRADEN	332.853.400
BALAI BESAR REHABILITASI VOKASIONAL PENYANDANG DISABILITAS DI CIBINONG	518.903.000
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL	2.077.692.015
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "BAMBU APUS" DI JAKARTA	3.034.335.605
Total	6.997.145.233



- d. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp251.986.060 satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- e. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp1.890.528.297 satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) LEMBANG - BANDUNG	375.800.000
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	381.070.000
PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI PEKERJA SOSIAL DAN PENYULUH	443.333.897
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) YOGYAKARTA	690.324.400
Total	1.890.528.297

Mutasi Kurang:

1. Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar (Rp408.066.100) pada :
- a. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar (Rp405.940.100) di satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "GALIH PAKUAN" DI BOGOR	(251.879.100)
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TUMOU TOU" DI MANADO	(154.061.000)
Total	(405.940.100)

- b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar (Rp2.126.000) satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
2. Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan) sebesar (Rp11.713.000) terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus "Rumbai" di Pekanbaru.
3. Penghapusan (BMN yang dihentikan) sebesar (Rp10.602.070.736) terdapat pada :

- a. Sekretariat Jenderal sebesar (Rp1.198.273.439) satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
SEKRETARIAT JENDERAL	(1.012.992.000)
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	(185.281.439)
Total	(1.198.273.439)

- b. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar (Rp989.570.000) satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar (Rp4.535.036.230) satuan kerja:



Satuan Kerja	Jumlah
BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "GALIH PAKUAN" DI BOGOR	(1.561.480.929)
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "MARGO LARAS" DI PATI	(1.047.567.983)
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "MELATI" DI JAKARTA	(888.445.140)
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "PHALA MARTHA" DI SUKABUMI	(502.211.590)
BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TAN MIYAT" DI BEKASI	(275.539.000)
BALAI REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "WASANA BAHAGIA" DI TERNATE	(169.225.588)
BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS WANITA TUNA SUSILA "MULYA JAYA" DI JAKARTA	(90.566.000)
Total	(4.535.036.230)

- d. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar (Rp1.113.939.616) satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	(1.081.164.616)
DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL KELUARGA	(32.775.000)
Total	(1.113.939.616)

- e. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebesar (Rp18.150.000) satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

- f. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar (Rp2.747.101.451) satuan kerja:

Satuan Kerja	Jumlah
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	(2.503.708.054)
PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI PEKERJA SOSIAL DAN PENYULUH SOSIAL	(243.393.397)
Total	(2.747.101.451)

4. Transfer Keluar (BMN yang dihentikan) sebesar (Rp243.180.045) terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Panti Sosial Bina Remaja "Bambu Apus", Jakarta.
5. Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan) sebesar (Rp57.000.000) terdapat pada UKE Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara "Effata" di Kupang.

C.18.2 ATB YANG TIDAK LAGI DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN

ATB yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan per 31 Desember 2019 dan 31



Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp237.023.052** dan **Rp231.083.052** dimana mengalami kenaikan senilai Rp5.940.000 atau sebesar 2,57 %.

Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah Aset Tak Berwujud yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

ATB yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Sekretariat Jenderal	36.300.000	36.300.000	-	-
Inspektorat Jenderal	38.754.000	38.754.000	-	-
Ditjen Pemberdayaan Sosial	-	-	-	-
Ditjen Rehabilitasi Sosial	146.969.052	141.029.052	5.940.000	4,21
Ditjen Linjamsos	-	-	-	-
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	-	-	-	-
Badiklit dan Pensos	15.000.000	15.000.000	-	-
Satker Konsolidasi	-	-	-	-
Total	237.023.052	231.083.052	5.940.000	2,57

Adapun mutasi untuk ATB yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	231.083.052
Mutasi Tambah :	15.140.000
(188) Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	15.140.000
Mutasi Kurang :	(9.200.000)
(391) Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(9.200.000)
Saldo per 31 Desember 2019	237.023.052

Mutasi Tambah:

1. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp15.140.000 terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya "Galih Pakuan" di Bogor.

Mutasi Kurang:

1. Penghapusan (BMN yang dihentikan) sebesar (Rp9.200.000) terdapat pada terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya "Galih Pakuan" di Bogor.



Akumulasi Penyusutan
/Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp108.775.697.744)

C.19 AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar (Rp108.775.697.744) dan sebesar (Rp97.696.354.704)

Aset Lainnya	Nilai Aset Lainnya di Neraca	Akm. Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	Nilai Buku Aset Lainnya
Aset Tak Berwujud	98.538.827.706	(85.278.449.458)	562.439.684.837
Dana Lainnya	549.179.306.589	-	549.179.306.589
Software	98.151.352.706	(85.268.906.958)	12.882.445.748
Lisensi	190.850.000	(9.542.500)	181.307.500
Aset Tak Berwujud Lainnya	196.625.000	-	196.625.000
Aset Lain-lain	26.297.974.644	(23.497.248.286)	2.800.726.358
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah	26.060.951.592	(23.337.779.234)	2.723.172.358
ATB yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah	237.023.052	(159.469.052)	77.554.000
Grand Total	124.836.802.350	(108.775.697.744)	565.240.411.195

Utang Kepada Pihak
Ketiga
(Rp4.702.361.654)

C.20 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp4.702.361.654 dan Rp1.205.917.841 dimana terdapat kenaikan sebesar Rp3.496.443.813 atau sebesar 289,94 %.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang pada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut :

AKUN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Sekretariat Jenderal	126.605.133	-	126.605.133,00	-
Inspektorat Jenderal	1.261.400	1.171.000	90.400,00	7,72
Ditjen Pemberdayaan Sosial	11.995.044	7.070.114	4.924.930,00	69,66
Ditjen Rehabilitasi Sosial	427.762.100	304.442.172	123.319.928,00	40,51
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	164.548.535	237.027.751	(72.479.216,00)	(30,58)
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	2.808.930.000	612.820.000	2.196.110.000,00	358,36
Badiklit dan Pensos	1.161.259.442	43.386.804	1.117.872.638,00	2.576,53
Total	4.702.361.654	1.205.917.841	3.496.443.813,00	289,94

Rincian Utang pada Pihak Ketiga Kementerian Sosial adalah sebagai berikut;

Dari tabel di atas dapat dijelaskan Utang pada pihak ketiga per 31 Desember 2018 yang telah dilakukan pelunasan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:



AKUN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	304.536.894	38.656.434	265.880.460,00	687,80
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	4.061.272.532	1.008.421.407	3.052.851.125,00	302,74
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	327.054.228	-	327.054.228,00	100,00
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	9.498.000	158.840.000	(149.342.000,00)	(94,02)
Total	4.702.361.654	1.205.917.841	3.496.443.813,00	289,94

1. Pada Inspektorat Jenderal terdiri dari belanja pegawai yang masih harus dibayar akibat kekurangan gaji pangkat fungsional atas nama Haris Uztad dan Widi Yudha Santika dan kekurangan pembayaran tunjangan kinerja atas nama Haris Uztad Onasis sebesar Rp1.171.000
2. Pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp7.070.114 dikarenakan:
 - a. Terdapat kesalahan pada SKPP dari tempat asal (Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat) sehingga pencairan Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan beras, Uang makan terlambat dicairkan atas nama Budy Gunawan pegawai pada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp6.383.900
 - b. Keterlambatan SK BKN sehingga terjadi keterlambatan SKPP atas nama Almarhumah Rina Retnoningrum bulan Mei sampai dengan Agustus 2018 sebesar Rp686.214 berupa gaji pokok dan tunjangan anak.
3. Pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial terdapat pembayaran utang pihak ketiga sebesar Rp304.442.172 dengan rincian sebagai berikut :

No	Satker	Uraian	Jumlah
1	BRSLU "Budhi Dharma" Di Bekasi	Belanja Pegawai yang belum dibayar	307.010
2	BBRSPDF "Prof. Dr. Soeharso" Di Surakarta		43.862.100
3	BBRSPDI "Kartini" Di Temanggung		2.563.950
4	BRSAMPK "Alyatama" Di Jambi		18.149.800
5	BRSAMPK "Rumbai" Di Pekanbaru		17.231.456
6	BRSAMPK "Toddopuli" Di Makassar		108.900
7	BRSLU "Gau Mabaji" Di Gowa		427.000
8	BRS ODHIV "Bahagia" Di Medan		9.855.000
9	BRSODHIV "Wasana Bahagia" Di Ternate		3.239.000
10	BRSPDF "Wirajaya" Di Makassar		1.923.440
11	BRSPDM "Budi Luhur" Di Banjarbaru		2.609.800
12	BRSPDSN "Wyata Guna" Di Bandung		2.564.716
13	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak		42.760.000
14	Dit Rehsos Anak		Sisa kegiatan hibah UNICEF
Total			304.135.162

4. Pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial terdapat pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp237.027.751 dengan rincian sebagai berikut:

No	Satker	Uraian	Jumlah
1	Setdijten Linjamsos	Tagihan Listrik Bulan Desember 2018	2.374.036
2	Setdijten Linjamsos	Tagihan Telepon Bulan Desember 2018	360.360
3	Setdijten Linjamsos	Tagihan TV Kabel Bulan Desember 2018	1.793.355
4	Dit. PSKBA	Paket Fullboard Meeting Luar Kota yang belum dibayar per 31 Desember 2018	193.500.000
5	Dit. PSKBA	Honor pendamping petugas penyaluran BSPS yang belum dibayar per 31 Desember 2018	39.000.000
Total			237.027.751

5. Pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin terdapat Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp612.820.000 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp254.400.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Pengadaan perlengkapan peserta Rapat Koordinasi Pelaporan Pusat dan Daerah di Yogyakarta oleh PT Gemilang Jaya Artelindo	56.400.000
2	Percetakan Leaflet Rastra yang disebabkan oleh keterlambatan pendaftaran suplier ke KPPN Per 31 Desember 2018	198.000.000
Total		254.400.000

- b. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I sebesar Rp70.000.000 dikarenakan adanya honor TKSK Provinsi Kepulauan Riau yang belum dibayar dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kabupaten Penerima	Provinsi	Nama Bank	Nomor Rekening	Nilai Rupiah
1	Karimun	Kep. Riau	BNI	0711138409	12.000.000
2	Natuna	Kep. Riau	BNI	0711142722	15.000.000
3	Kep. Anambas	Kep. Riau	BNI	0710620245	7.000.000
4	Bintan	Kep. Riau	BNI	0710620289	10.000.000
5	Lingga	Kep. Riau	BNI	0710620369	10.000.000
6	Kota Batam	Kep. Riau	BNI	0711143419	12.000.000
7	Kota Tanjung Pinang	Kep. Riau	BNI	0711136739	4.000.000
Jumlah					70.000.000

- c. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III berupa pembayaran honor dengan total sebesar Rp288.420.000 dengan rincian sebagai berikut:

NO	JABATAN	TOTAL
1	TKSK	217.500.000
2	Supervisor	25.000.000
3	Korteks	45.920.000
TOTAL		288.420.000

6. Badan Pendidikan dan Pelatihan terdapat pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp43.386.804 dengan rincian sebagai berikut:



No	Satker	Uraian	Jumlah
1	B2P3KS Yogyakarta	Tagihan pembayaran langganan air minum bulan Desember 2018	177.400
2	BBPPKS Bandung	Tagihan pembayaran langganan daya dan jasa (listrik dan telepon) bulan Desember 2018	13.101.094
3	BBPPKS Makasar	Kekurangan pembayaran uang makan bulan Desember dan pembayaran kekurangan gaji kenaikan pangkat an. Mustang, Erni dan Misnaw ati	9.122.590
4	STKS Bandung	Kekurangan tunjangan kinerja bulan Desember 2018	20.985.720
Total			43.386.804

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dirinci sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal sebesar Rp126.605.133 berupa:
 - a. Belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp124.037.133 dengan rincian:

No	Uraian Akun	Nominal
1	Belanja Gaji Pokok PNS TA 2019	14.930.700
2	Belanja Tunjangan Kinerja TA 2019	98.502.222
3	Belanja Tunjangan Anak PNS TA 2019	244.478
4	Belanja Tunjangan Fungsional PNS TA 2019	360.000
5	Belanja Tunjangan PPh PNS TA 2019	337.164
6	Belanja Tunjangan Struktural PNS TA 2019	4.870.000
7	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS TA 2019	973.550
8	Belanja Tunjangan Umum PNS TA 2019	1.130.000
9	Belanja Uang Makan PNS TA 2019	629.000
10	Belanja Pembulatan Gaji PNS TA 2019	2.691
11	Koreksi Lainnya (Belanja Gaji Pokok PNS TA 2018, Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS TA 2018, dan Belanja Tunjangan Anak PNS TA 2018)	2.057.328
Total		124.037.133

- b. Utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp2.568.000 dikarenakan adanya saldo di Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran akibat retur transfer pada unit kerja Biro Perencanaan atas pembayaran biaya perjalanan dinas atas nama Oktavia Dewi dan honor narasumber atas nama Ni Masjitoh pada kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial tanggal 13 Desember 2019 di Oasis Amir Hotel Jakarta.
2. Inspektorat Jenderal sebesar Rp1.261.400 berupa Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar akibat kekurangan gaji pegawai Inspektorat Jenderal untuk golongan IV dan golongan III sampai dengan bulan Desember 2019 dan diselesaikan pembayarannya pada bulan Januari 2020, dengan rincian sebagai berikut:

No	Golongan	Atas Nama	Nominal
1	Golongan IV	Dadang Iskandar	655.200
		Undang Saepuddin	199.800
2	Golongan III	Ady Kurnia Munggaran	108.000
		Widianto Nugroho	103.800
		Diyan Kusumarina	90.900
		Widi Yudha Santika	103.700
Total			1.261.400

3. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar Rp11.995.044 di satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial berupa:
 - a. Tunjangan khusus/ kegiatan yang belum dibayarkan sebesar Rp3.076.032 dengan



rincian:

No	Atas Nama	Nominal	Keterangan
1	Asriady	2.398.032	Telah di bayarkan dengan nomor SPM 00024/DYS-Sekt/2020 pada tanggal 13 Februari 2020
2	Deasy Rengkehati	678.000	Telah dibayarkan dengan nomor SPM 00068/DYSSekt/2020 pada tanggal 12 Maret 2020
Total		3.076.032	

- b. kenaikan gaji berkala bulan November dan Desember 2019, kenaikan pangkat bulan Oktober dan November 2019, serta kenaikan tunjangan bulan Oktober dan November 2019 sejumlah Rp8.919.012 yang belum dibayarkan dengan rincian:

Nama Akun	Kenaikan Gaji Berkala	Kenaikan Tunjangan	Kenaikan Pangkat	Jumlah
Gaji Pokok	3.831.800	232.000	2.321.000	6.384.800
Pembulatan	2.008	42	464	2.514
Tunjangan Istri/Suami	340.100	23.200	168.940	532.240
Tunjangan Anak	86.698	4.640	58.296	149.634
Tunjangan Jabatan Struktural	-	1.440.000	-	1.440.000
Tunjangan Jabatan Fungsional	-	300.000	-	300.000
Tunjangan Pajak Penghasilan	21.160	68.406	20.258	109.824
	4.281.766	2.068.288	2.568.958	8.919.012

Rapel kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan kenaikan tunjangan sebesar Rp8.919.012 telah dibayarkan kepada 33 pegawai PNS lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dengan rincian sebagai berikut :

NO	KETERANGAN	NO SPM	JUMLAH	TANGGAL SPM
1	Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji Berkala Bulan November & Desember 2019 (18 orang)	00039/DYS-Sekt/2020	3.266.999	26 February 2020
2	Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji Berkala Bulan Desember 2019 (2 orang)	00038/DYS-Sekt/2020	212.730	26 February 2020
3	Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji Berkala Bulan Oktober s.d Desember 2019 (2 orang)	00058/DYS-Sekt/2020	802.037	9 March 2020
4	Pembayaran Rapel Kenaikan Pangkat Bulan Oktober & November 2019 (8 orang)	00040/DYS-Sekt/2020	2.568.958	27 February 2020
5	Pembayaran Rapel Kenaikan Tunjangan Bulan Oktober & November 2019 (3 orang)	00041/DYS-Sekt/2020	2.068.288	27 February 2020
JUMLAH			8.919.012	



4. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp427.762.100 berupa honor kegiatan yang belum dibagikan kepada pegawai, dan kekurangan gaji pegawai yang belum dibayar dengan rincian sebagai berikut:

SATKER	NILAI	KETERANGAN
Balai Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus "Wasana"	3.059.000	Pembayaran Tagihan PDAM Bulan Desember 2019, yang dibayar pada bulan Januari 2020
Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra "Wyata Guna" Di Bandung	48.000	Pembayaran Tagihan PDAM Bulan Desember 2019, yang dibayar pada bulan Januari 2020
Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia "Gau Mabaji" Di Gow a	4.702.000	Pembayaran Tagihan PDAM Bulan Desember 2019, yang dibayar pada bulan Januari 2020
Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang	33.231.000	Pembayaran denda ke PT.PELNI bulan Oktober 2019 Kegiatan Pemulangan TKI
Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza	382.850.000	Pada periode 31 Desember 2019 Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp382.850.000 berasal dari honor SDM Peksos/Konselor Adiksi bulan November – Desember 2019 yang belum terbayarkan karena belum terselesaikannya Laporan Bulanan SDM Peksos/Konselor Adiksi, sehingga mengakibatkan keterlambatan pengajuan SPM.
Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental "Budi Luhur" Di	3.872.100	Pembayaran Tagihan PDAM Bulan Desember 2019, yang dibayar pada bulan Januari 2020
TOTAL	427.762.100	

5. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp164.548.535 dengan rincian sebagai berikut:

Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	
Tagihan listrik bulan Desember Tahun 2019	1.539.088
Tagihan telepon bulan Desember Tahun 2019	360.060
Tagihan TV Kabel bulan Desember 2019	2.488.307
Kekurangan pembayaran gaji tunjangan jabatan fungsional bulan november dan desember 2019 sebanyak 5 orang	5.940.000
Kekurangan pembayaran Tunjangan Kinerja dikarenakan adanya kenaikan grade jabatan dr calon perencana ke perencana an. Dina Elna Saragih selama 3 bulan dr oktober sd. desember 2019 dan kekurangan tunjangan kinerja an. Risky Banu Saputra dikarenakan Tugas Belajar seharusnya 80% pada bulan September 2019	2.408.580
Direktorat PSKBA	
Fullboard Yang belum dibayarkan 2019 (Paket meeting luar kota)	134.000.000
Direktorat PSKBS	
Belanja barang bantuan paket sembako kepada PT Manggora Jaya Sakti	17.812.500
Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2019	164.548.535

6. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp2.808.930.000 dirinci:

SATKER	NILAI	KETERANGAN
Setditjen PFM	6.930.000	Pembayaran belanja honor tenaga ahli yang tidak berhasil masuk rekening disebabkan tidak ditemukannya nomor rekening
Dit. PFM Wilayah I	2.724.600.000	Insentif Pendamping yang belum dibayarkan per 31 Desember 2019
	77.400.000	Pembayaran Fullboard Seleksi Pendamping yang belum dibayarkan per 31 Desember 2019
TOTAL	2.808.930.000	



7. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp1.161.259.442 di satuan kerja:

SATKER	NILAI	KETERANGAN
Set. Badiklit dan pensos	327.054.228	Kekurangan pembayaran Belanja modal Peralatan dan Mesin dikarenakan adanya keterlambatan pengajuan pembayaran Termin III Pelaksana Renovasi Gedung Kantor Pusdiklat Kesos dan akan dilakukan pembayaran pada tahun 2020
BP3KS Yogyakarta	10.715.900	Kekurangan Tukin bulan Agustus sd September 2019
	1.219.800	PDAM bulan Desember yang belum terbayar per 31 Desember 2019
Pusdiklat Kesejahteraan Sosial	15.649.298	Kekurangan Tukin Bulan Desember 2019
	148.500.000	Kekurangan Pembayaran Paket Full Board Hotel Aston banua Graha Sejahtera
	79.520.000	Kekurangan Pembayaran Perlengkapan peserta dalam w ordshop Waw asan Kebangsaan bagi ASN
	152.720.000	Kekurangan Pembayaran Pengadaan Snack Diklat Bela Negara
	183.600.000	Kekurangan Pembayaran Pengadaan Paket Full Board Diklat Arsiparis Angkatan II kerjasama dengan Biro Umum
	97.092.000	Kekurangan Pembayaran Pengadaan konsumsi diklat PIM 4 PNB
BBPPKS Bandung	12.658.677	Kekurangan Pembayaran Langganan daya dan jasa (listrik dan telepon) bulan Desember 2019
	501.762	Kekurangan Pembayaran gaji 2 orang pegaw ai yang telah menyelesaikan purna tugasnya
BBPPKS Yogyakarta	89.640.400	Tunjangan Kinerja Pegaw ai bulan Desember yang masin harus dibayar
	9.235.000	Kekurangan Uang Makan Bulan Desember 2019 para pegaw ai yang masih harus dibayar
BBPPKS Makassar	5.405.000	Kekurangan pembayaran uang Tunjangan Kinerja bulan Desember
	1.103.129	Kekurangan pembayaran gaji pokok untuk 3 orang pegaw ai
BBPPKS Padang	25.290.000	Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2019 yang masih harus dibayar
Pusbangprof Peksos dan Pensos	1.352.448	Kekurangan pembayaran gaji pegaw ai kenaikan pangkat
TOTAL	1.161.257.642	

Hibah Yang Belum Disahkan **C.21 HIBAH YANG BELUM DISAHKAN**

Disahkan
 Rp527.339.126,-

Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp527.339.126** dan **Rp0** yang berupa Hibah Langsung Yang Belum Disahkan.

Hibah Langsung Yang Belum Disahkan merupakan Hibah yang diterima langsung oleh K/L yang belum dilakukan proses pengesahan oleh Kuasa BUN

Hibah Langsung yang belum disahkan terdapat pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial di satuan kerja Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial atas barang Hadiah Tidak Tertebak/Hadiah Tidak Diambil Pemenang (HTT/HTDP) yang telah diterima oleh



Kementerian Sosial namun belum dilakukan proses pengesahan oleh Kuasa BUN sebesar Rp527.339.126

Pendapatan Diterima di Muka

C.22 PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Rp1.967.279.648

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp1.967.279.648** dan **Rp146.742.000**

Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan PNPB yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Rincian Pendapatan Diterima Di muka Kementerian Sosial per 31 Desember 2018 pada Satuan kerja Sekretariat Jenderal telah seluruhnya di setor ke Kas Negara per 31 Desember 2019.

Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2019 terdapat pada Sekretariat Jenderal di satuan kerja Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.967.279.648 dengan dirinci sebagai berikut:

1. Pendapatan jasa sewa gedung kantor Koperasi Pegawai Kementerian Sosial, sewa gedung kantor Bank BNI dan Bank BRI, ATM Bank Mandiri, Kantor Yayasan Anak Mandiri, dan sewa ruangan untuk penguat sinyal PT. Teknindo Bangun Sarana sebesar Rp759.279.648 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Rekanan	Nilai SSBP	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Daluwarsa		Pendapatan Diterima Dimuka
						s.d 31-Dec-18	Tahun Berjalan	
1	Koperasi Pegawai Kemensos	161.403.000	36 bulan	01/01/18	31/12/20	53.801.000	53.801.000	53.801.000
2	PT. Teknindo Bangun Sarana	156.560.000	60 bulan	01/04/15	31/03/20	117.420.000	31.312.000	7.828.000
3	Bank Rakyat Indonesia, Tbk	391.500.000	60 bulan	01/01/19	31/12/23	-	78.300.000	313.200.000
4	Bank Negara Indonesia, Tbk	505.296.000	36 bulan	01/01/19	31/12/21	-	168.432.000	336.864.000
5	Bank Mandiri, Tbk	52.128.000	36 bulan	01/09/19	31/08/22	-	5.792.000	46.336.000
6	Yayasan Anak Mandiri	1.250.648	36 bulan	01/01/20	31/12/22	-	-	1.250.648
TOTAL								759.279.648

2. Pendapatan diterima dimuka atas penerimaan uang muka sewa gedung Tahun 2019 untuk event/penggunaan sewa di Tahun 2020 sebesar Rp1.208.000.000 dirinci sebagai berikut:

Keterangan	Nominal
Gedung Aneka Bhakti (GAB) I Salemba	864.000.000
Gedung Aneka Bhakti (GAB) II Bekasi	74.000.000
Gedung Aneka Bhakti (GAB) III Cawang	270.000.000
Jumlah	1.208.000.000

Uang Muka dari KPPN

C.23 UANG MUKA DARI KPPN

Rp67.666.000

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp67.666.000** dan **Rp211.191.900**



Utang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang Jangka Pendek Lainnya
 Rp10.341.818*

C.24 UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp10.341.818** dan **Rp0**

Utang Jangka Pendek Lainnya Kementerian Sosial berupa Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor yang merupakan Utang yang berasal dari potongan/pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut, namun belum disetorkan ke Kas Negara pada satuan kerja Direktorat Perlindungan Sosial Korban bencana Alam sebesar Rp10.341.818 dengan rincian:

No	Kegiatan	PPN	NTPN	PPH 23	NTPN
1	Konsumsi Penyuluhan Pembentukan KSB di Cianjur	545.455	C2C455B6H8O8MKTU	109.091	3C17F0T323SBQRAJ
2	Sertifikat Pelatihan Pembentukan KSB di Cianjur	109.091	023901PGHUEQUA02	21.818	CE38E5B6H8OD9LVQ
3	Konsumsi Pelatihan Pembentukan KSB di Cianjur	327.273	3C1B02LU1P1DIG0H	65.455	F401E80FP8Q1B
4	Perlengkapan Pelatihan Pembentukan KSB di Cianjur	1.363.636	41120741GTTEAL1O	272.727	4DF435B6H8OMLLJU
5	Konsumsi Simulasi Pembentukan KSB di Cianjur	1.363.636	377B8741GTTGN29S	272.727	07BE431BHJK4O4BO
6	Sewa Sound System Pembentukan KSB di Cianjur	272.727	F35351PGHUFCNCQU	54.545	C541A00LI9AKJ63C
7	Sewa Kendaraan Pembentukan KSB di Cianjur	327.273	0A48900LI9ALDISG	65.455	79E4B741GTTPGJ34
8	Konsumsi Penyuluhan Pembentukan KSB di Lombok Utara	545.455	16E33741GTVF80IK	109.091	346930T323UP09PV
9	Sertifikat Pelatihan Pembentukan KSB di Lombok Utara	109.091	BFC2A0T323TCILJB	21.818	589AC741GTVB5VHG
10	Konsumsi Pelatihan Pembentukan KSB di Lombok Utara	327.273	664CC0T323TAITHF	65.455	476C72LU1P23V23V6L
11	Perlengkapan Pelatihan Pembentukan KSB di Lombok Utara	1.363.636	C618B1PGHUFLD0LE	272.727	2C1922LU1P22H7PP
12	Konsumsi Simulasi Pembentukan KSB di Lombok Utara	1.363.636	A84B20T323VGRTDV	272.727	AB0EA00LI9D4UN5C
13	Sewa Sound System Pembentukan KSB di Lombok Utara	272.727	E63FA0T323T4QQ0N	54.545	F43EB5B6H8P3BRK6
14	Sewa Kendaraan Pembentukan KSB di Lombok Utara	327.273	39731PGHUGIT2Q	65.455	A224700LI9AN4SBK
	Jumlah	8.618.182		1.723.636	
	Total		10.341.818		

*Ekuitas
 Rp23.969.492.796.843*

C.25 EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp23.969.492.796.843** dan **Rp5.978.367.271.420** terdapat kenaikan sebesar Rp17.991.125.525.423 atau 300,94 %

Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan Negara
 Bukan Pajak Lainnya
 Rp25.193.017.948*

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan pada Kementerian Sosial RI untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp25.193.017.948** dan **Rp19.875.486.431**

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya Per Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial RI untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya di Tiap Unit Kerja Eselon I
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

NO	Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	6.661.992.001	5.111.193.239	1.550.798.762	30,34
2	Inspektorat Jenderal	130.600	-	130.600	-
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	8.018.026.394	5.604.934.346	2.413.092.048	43,05
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	1.359.628.333	1.144.183.837	215.444.496	18,83
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	831.338.170	436.967.803	394.370.367	90,25
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	1.059.561.891	1.418.101.991	(358.540.100)	(25,28)
7	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	7.262.340.559	6.160.105.215	1.102.235.344	17,89
Jumlah		25.193.017.948	19.875.486.431	5.317.531.517	26,75

Rincian Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut;

*Perbandingan Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
1	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	95.668.000	135.959.954	(40.291.954)	(29,64)
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.916.070.220	5.779.143.999	(863.073.779)	(14,93)
3	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000	-	1.000.000	-
4	Pendapatan Perizinan Lainnya	1.245.189.272	752.822.200	492.367.072	65,40
5	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	571.900.000	576.000.000	(4.100.000)	(0,71)
6	Pendapatan Biaya Pendidikan	4.897.000.000	4.702.250.000	194.750.000	4,14
7	Pendapatan Pendidikan Lainnya	580.950.000	573.350.000	7.600.000	1,33
8	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	504.883.000	-	504.883.000	-
9	Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan	-	4.500.000	(4.500.000)	(100,00)
10	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	572.642.500	515.445.000	57.197.500	11,10
11	Pendapatan Jasa Lainnya	77.266.000	81.307.000	(4.041.000)	(4,97)
12	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	8.031.601.444	6.213.350.548	1.818.250.896	29,26
13	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	3.698.615.724	539.544.887	3.159.070.837	585,51
14	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	100.000	516.400	(416.400)	(80,64)
15	Pendapatan Anggaran Lain-lain	131.788	1.296.443	(1.164.655)	(89,83)
Jumlah		25.193.017.948	19.875.486.431	5.317.531.517	26,75



Berdasarkan pada tabel di atas, secara absolut total Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp5.317.531.517 atau sebesar 26,75% dengan kenaikan paling signifikan terdapat pada pos Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) dan Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah. Namun apabila dilihat dari rincian tiap pos pendapatan, terdapat kenaikan/penurunan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp40.291.954 atau sebesar 29,64% disebabkan oleh menurunnya penjualan hasil kegiatan ekonomi produktif yang berasal dari penjualan hasil keterampilan Penerima Manfaat di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp863.073.779 atau 14,93% dengan pendapatan terbesar berasal dari Sekretariat Jenderal. Penurunan persentase ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan yang diperoleh dari hasil sewa objek Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Sosial RI.
3. Diperolehnya Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.000.000 yang berasal dari satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Naibonat" di Kupang.
4. Pendapatan Perizinan Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp492.367.072 atau 65,40% disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari perizinan di Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.
5. Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan mengalami penurunan sebesar Rp4.100.000 atau 0,71% berasal dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung.
6. Pendapatan Biaya Pendidikan naik sebesar Rp194.750.000 atau 4,14% disebabkan meningkatnya penerimaan biaya pendidikan di satker Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung.
7. Pendapatan Pendidikan Lainnya naik sebesar Rp7.600.000 atau 1,33% yang berasal dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung.
8. Diperolehnya Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan sebesar Rp504.883.000 yang berasal dari satuan kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.
9. Pendapatan hasil Penelitian/Riset dan hasil Pengembangan mengalami penurunan sebesar Rp4.500.000 dikarenakan tidak adanya realisasi pendapatan pada pos tersebut untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019.
10. Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi naik sebesar Rp57.197.500 atau 11,10% berasal dari pendapatan dari satuan kerja di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
11. Pendapatan Jasa Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp4.041.000 atau 4,97% disebabkan oleh menurunnya penjualan hasil kegiatan ekonomi produktif yang berasal dari penjualan jasa keterampilan Penerima Manfaat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.
12. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) mengalami kenaikan sebesar Rp1.818.250.896 atau 29,26% dengan realisasi terbesar terdapat pada satuan kerja Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial.



13. Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan naik sebesar Rp3.159.070.837 atau 585,51% dengan realisasi terbesar disebabkan adanya pendapatan atas denda keterlambatan pihak ketiga atas pekerjaan sewa jaringan komunikasi data daerah, keterlambatan pekerjaan verifikasi validasi data, dan keterlambatan pekerjaan perangkat jaringan senilai pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
14. Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji mengalami penurunan sebesar Rp416.400 atau 80,64% yang berasal dari satuan kerja Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus “Toddopuli” di Makassar.
15. Pendapatan Anggaran Lain-lain turun sebesar Rp1.164.655 atau 89,83% yang berasal dari satuan kerja Inspektorat Jenderal dan Pusat Penyuluhan Sosial. Realisasi terbesar terdapat pada satuan kerja Inspektorat Jenderal yaitu sebesar Rp130.600 merupakan koreksi atas akun pendapatan yang semula dicatat sebagai akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) menjadi Pendapatan Anggaran Lain-Lain (425999).

Selanjutnya, terdapat perbedaan Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut:

No	LRA			LO			Perbedaan
	Nomor Akun	Uraian Akun	Nilai	Nomor Akun	Uraian Akun	Nilai	
1	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	95.668.000	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	95.668.000	-
2	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	7.728.973.868	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.916.070.220	2.812.903.648
3	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000	-
4	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	1.245.189.272	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	1.245.189.272	-
5	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	571.900.000	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	571.900.000	-
6	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	4.897.000.000	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	4.897.000.000	-
7	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	580.950.000	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	580.950.000	-
8	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	504.883.000	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	504.883.000	-
9	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	572.642.500	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	572.642.500	-
10	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	77.266.000	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	77.266.000	-
11	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	7.424.492.593	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	8.031.601.444	(607.108.851)
12	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	3.579.283.831	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	3.698.615.724	(119.331.893)
13	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	100.000	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	100.000	-
14	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	131.788	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	131.788	-
Jumlah							2.086.462.904



Penjelasan atas perbedaan nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan pada akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan disebabkan oleh:
 - a. Adanya penyetoran pendapatan yang diakui sebagai Kas di Bendahara Penerimaan pada TA 2018 pada Sekretariat Jenderal. Atas transaksi tersebut maka akan mengurangi nilai Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan secara akrual dalam Laporan Operasional sebesar (Rp992.366.000)
 - b. Adanya pengakuan Pendapatan Sewa Diterima Dimuka atas pendapatan yang diperoleh pada TA 2019 pada Sekretariat Jenderal. Atas transaksi tersebut maka akan mengurangi nilai Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan secara akrual dalam Laporan Operasional sebesar (Rp1.967.279.648)
 - c. Adanya jurnal balik awal tahun atas pengakuan Pendapatan Sewa Diterima Dimuka pada Sekretariat Jenderal. Jurnal balik tersebut akan menambah nilai Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan secara akrual dalam Laporan Operasional sebesar Rp146.742.000.
2. Perbedaan pada akun Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) disebabkan oleh adanya sejumlah saldo pada rekening bendahara pengeluaran yang merupakan bunga atau jasa giro yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp525.825.478 pada Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial dan sebesar Rp81.283.373 pada Direktorat Rehabilitas Sosial Anak. Kejadian tersebut akan menambah nilai Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) secara akrual pada Laporan Operasional sebesar Rp607.108.851
3. Perbedaan pada akun Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah disebabkan oleh adanya pengakuan Piutang Lainnya atas Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah TA 2019 sebesar Rp61.905.945 pada Dinas Sosial Kabupaten Nunukan (027.03.359904), sebesar Rp52.824.342 pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Asmat (027.03.251422), dan sebesar Rp4.601.606 pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (027.03.199135). Pengakuan piutang tersebut akan menambah nilai Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp119.331.893

Beban Pegawai

Rp480.563.464.039

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp480.563.464.039** dan **Rp471.370.541.398**

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Perbandingan Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 di tiap Unit Kerja Eselon I dapat dilihat dengan rincian pada tabel berikut:



Perbandingan Beban Begawai Per Eselon I

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

NO	Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	61.171.602.460	59.607.133.372	1.564.469.088	2,62
2	Inspektorat Jenderal	16.922.150.574	15.672.651.292	1.249.499.282	7,97
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	24.905.221.867	23.690.693.217	1.214.528.650	5,13
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	227.582.303.265	223.790.219.321	3.792.083.944	1,69
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	20.919.520.535	19.066.024.716	1.853.495.819	9,72
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	18.557.635.468	17.407.091.039	1.150.544.429	6,61
7	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	110.505.029.870	112.136.728.441	(1.631.698.571)	(1,46)
Jumlah		480.563.464.039	471.370.541.398	9.192.922.641	1,95

Perbandingan Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Pegawai

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	Uraian Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	194.743.883.410	187.095.269.078	7.648.614.332	4,09
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	2.743.467	2.564.846	178.621	6,96
3	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	13.572.736.162	13.122.070.966	450.665.196	3,43
4	Beban Tunjangan Anak PNS	3.734.791.972	3.643.126.863	91.665.109	2,52
5	Beban Tunjangan Struktural PNS	9.408.515.000	9.464.690.000	(56.175.000)	(0,59)
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS	9.904.725.001	9.784.631.850	120.093.151	1,23
7	Beban Tunjangan PPh PNS	1.165.099.200	952.795.189	212.304.011	22,28
8	Beban Tunjangan Beras PNS	9.081.707.720	9.168.378.840	(86.671.120)	(0,95)
9	Beban Uang Makan PNS	24.128.089.182	24.309.864.150	(181.774.968)	(0,75)
10	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	195.155.000	202.325.000	(7.170.000)	(3,54)
11	Beban Tunjangan Umum PNS	5.597.473.433	5.497.833.668	99.639.765	1,81
12	Beban Tunjangan Profesi Dosen	3.885.576.100	3.725.582.200	159.993.900	4,29
13	Beban Uang Lembur	1.389.553.800	1.214.887.925	174.665.875	14,38
14	Beban Pegawai (Tunj Khusus/Kegiatan)	203.753.414.592	203.186.520.823	566.893.769	0,28
Jumlah		480.563.464.039	471.370.541.398	9.192.922.641	1,95

Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,95% dibandingkan dengan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Kenaikan ini disebabkan diantaranya adanya penambahan pembayaran gaji dan tunjangan dikarenakan penambahan pegawai baru Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan pegawai dengan kontrak kerja, adanya kenaikan gaji pegawai sebesar 5%, dan adanya kenaikan pangkat pegawai.

Selanjutnya, terdapat perbedaan atas Belanja/Beban Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut:



No	LRA			LO			Perbedaan
	Nomor Akun	Uraian Akun	Nilai	Nomor Akun	Uraian Akun	Nilai	
1	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	194.724.868.010	511111	Beban Gaji Pokok PNS	194.743.883.410	(19.015.400)
2	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.740.158	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	2.743.467	(3.309)
3	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	13.571.103.192	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	13.572.736.162	(1.632.970)
4	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	3.735.448.096	511122	Beban Tunj. Anak PNS	3.734.791.972	656.124
5	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	9.402.205.000	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	9.408.515.000	(6.310.000)
6	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	9.898.605.001	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	9.904.725.001	(6.120.000)
7	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1.164.600.094	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1.165.099.200	(499.106)
8	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	9.082.576.760	511126	Beban Tunj. Beras PNS	9.081.707.720	869.040
9	511129	Belanja Uang Makan PNS	24.223.581.650	511129	Beban Uang Makan PNS	24.128.089.182	95.492.468
10	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	195.155.000	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	195.155.000	-
11	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	5.597.083.433	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	5.597.473.433	(390.000)
12	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	3.885.576.100	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	3.885.576.100	-
13	512211	Belanja Uang Lembur	1.389.553.800	512211	Beban Uang Lembur	1.389.553.800	-
14	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	203.744.462.117	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	203.753.414.592	(8.952.475)
Jumlah							54.094.372

Penjelasan atas perbedaan nilai Beban Pegawai tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengakuan Piutang Lainnya atas Beban Pegawai TA 2019, atas penyesuaian ini akan mengurangi nilai Beban Pegawai TA 2019 sebesar (Rp317.917.504)
2. Terdapat pengakuan Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar atas Beban Pegawai TA 2019, atas penyesuaian ini akan menambah nilai Beban Pegawai TA 2019 sebesar Rp302.479.566
3. Terdapat jurnal balik awal tahun atas Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar TA 2018. Dengan adanya jurnal tersebut maka akan mengurangi nilai Beban Pegawai sebesar (Rp38.656.434)

Beban Persediaan

Rp39.196.178.503

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp39.196.178.503** dan **Rp44.271.730.551** atau mengalami penurunan sebesar (11,46%).

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Perbandingan Beban Persediaan untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 di tiap Eselon I dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:



Rincian Beban Persediaan Per Eselon I

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

NO	Nama Eselon I	TA 2019	TA 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	7.116.157.023	4.972.629.943	2.143.527.080	43,11
2	Inspektorat Jenderal	637.451.500	754.214.750	(116.763.250)	(15,48)
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	33.098.000	298.791.500	(265.693.500)	(88,92)
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	26.603.128.172	33.631.569.899	(7.028.441.727)	(20,90)
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.134.164.036	2.184.192.229	(50.028.193)	(2,29)
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	909.921.045	656.460.600	253.460.445	38,61
7	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	1.762.258.727	1.773.871.630	(11.612.903)	(0,65)
Jumlah		39.196.178.503	44.271.730.551	(5.075.552.048)	(11,46)

Perbandingan rincian Beban Persediaan untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Persediaan

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	36.557.043.646,	41.572.027.324,	(5.014.983.678)	(12,06)
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges	0,	3.060.000,	(3.060.000)	(100,00)
Beban Persediaan Bahan Baku	245.422.207,	122.044.300,	123.377.907	101,09
Beban Persediaan Untuk Tujuan Strategis/berjaga-jaga	3.802.669,	59.765.697,	(55.963.028)	(93,64)
Beban Persediaan Lainnya	2.389.909.981,	2.514.833.230,	(124.923.249)	(4,97)
Jumlah Beban Persediaan	39.196.178.503	44.271.730.551	(5.075.552.048)	(11,46)

Beban Barang dan Jasa

Rp2.546.867.936.840

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp2.546.867.936.840** dan **Rp2.477.161.280.911**

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian perbandingan Beban Barang dan Jasa untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 di tiap Unit Kerja Eselon I dapat dilihat sebagai berikut:



NO	Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	172.880.247.510	162.585.611.471	10.294.636.039	6,33
2	Inspektorat Jenderal	4.870.293.950	4.869.512.728	781.222	0,02
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	169.862.436.450	166.692.599.547	3.169.836.903	1,90
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	229.780.674.465	223.587.679.137	6.192.995.328	2,77
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.636.916.909.620	1.680.453.135.882	(43.536.226.262)	(2,59)
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	166.465.384.630	155.949.271.200	10.516.113.430	6,74
7	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	166.091.990.215	83.023.470.946	83.068.519.269	100,05
Jumlah		2.546.867.936.840	2.477.161.280.911	69.706.655.929	2,81

Rincian perbandingan Beban Barang dan Jasa untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	61.117.657.227	48.566.512.848	12.551.144.379	25,84
Beban Pengadaan Bahan Makanan	9.865.661.915	16.681.035.374	(6.815.373.459)	(40,86)
Beban Penambahan Daya Tahan Tubuh	1.177.740.100	1.708.493.500	(530.753.400)	(31,07)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.190.077.487	1.833.179.824	(643.102.337)	(35,08)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	27.809.364.000	25.976.255.900	1.833.108.100	7,06
Beban Barang Operasional Lainnya	10.772.617.641	13.072.803.705	(2.300.186.064)	(17,60)
Beban Bahan	186.273.743.625	145.726.833.099	40.546.910.526	27,82
Beban Honor Output Kegiatan	1.509.699.049.586	1.524.168.139.786	(14.469.090.200)	(0,95)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	462.150.707.439	435.278.030.763	26.872.676.676	6,17
Beban Barang Persediaan Penghargaan dalam bentuk uang	6.602.824.000	6.596.436.000	6.388.000	0,10
Beban Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk uang	2.054.850.000	1.598.500.000	456.350.000	28,55
Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	1.185.381.078	11.700.000	1.173.681.078	10.031,46
Beban Langganan Listrik	16.699.924.335	15.118.848.109	1.581.076.226	10,46
Beban Langganan Telepon	1.468.159.144	1.440.535.621	27.623.523	1,92
Beban Langganan Air	1.200.613.425	1.322.535.203	(121.921.778)	(9,22)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	404.150.205	297.117.558	107.032.647	36,02
Beban Jasa Pos dan Giro	74.923.850	68.940.700	5.983.150	8,68
Beban Jasa Konsultan	44.687.523.917	48.562.410.434	(3.874.886.517)	(7,98)
Beban Sewa	99.390.935.282	81.043.342.426	18.347.592.856	22,64
Beban Jasa Profesi	64.042.471.918	63.901.477.500	140.994.418	0,22
Beban Jasa Lainnya	38.794.960.966	43.734.751.961	(4.939.790.995)	(11,29)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan & Mesin	204.599.700	453.400.600	(248.800.900)	(54,87)
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung & Bangunan	-	-	-	-
Jumlah	2.546.867.936.840	2.477.161.280.911	69.706.655.929	2,81

Beban Barang dan Jasa untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,81% dibanding periode untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Kenaikan ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan anggaran terhadap belanja barang sebesar 4,14% sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2019. Selain itu kenaikan juga dipengaruhi oleh beberapa akun yang mengalami kenaikan signifikan yaitu:



1. Beban Keperluan Perkantoran mengalami kenaikan sebesar Rp12.551.144.379 atau 25,84% yang terdapat di seluruh Unit Kerja Eselon I Kementerian Sosial dengan nilai paling signifikan terdapat pada Sekretariat Jenderal
2. Beban Bahan mengalami kenaikan sebesar Rp40.546.910.526 atau 27,82% yang terjadi di semua Unit Kerja Eselon I Kementerian Sosial dengan nilai paling signifikan terdapat pada Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.
3. Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam Bentuk Uang mengalami kenaikan sebesar 10031,46% yang terjadi di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.
4. Beban Sewa mengalami kenaikan sebesar Rp18.347.592.856 atau 22,64% yang terdapat di seluruh Unit Kerja Eselon I Kementerian Sosial dengan nilai paling signifikan terdapat pada Sekretariat Jenderal.

Catatan lain atas pos Beban Barang dan Jasa yaitu Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung & Bangunan mengalami perubahan dalam pengklasifikasian di Laporan Operasional dari Beban Barang dan Jasa menjadi Beban Pemeliharaan sesuai dengan Surat dari Kementerian Keuangan Nomor: S-127/PB.6/2019.

Selanjutnya, terdapat perbedaan atas Belanja/Beban Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut:

No	LRA			LO			Perbedaan
	Nomor Akun	Uraian Akun	Nilai	Nomor Akun	Uraian Akun	Nilai	
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	61.118.647.590	521111	Beban Keperluan Perkantoran	61.117.657.227	990.363
2	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	9.865.661.915	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	9.865.661.915	-
3	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1.177.740.100	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	1.177.740.100	-
4	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.190.077.487	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.190.077.487	-
5	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	27.809.364.000	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	27.809.364.000	-
6	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	10.772.617.641	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	10.772.617.641	-
7	521211	Belanja Bahan	186.204.400.625	521211	Beban Bahan	186.273.743.625	(69.343.000)
8	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1.509.410.551.496	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1.509.699.049.586	(288.498.090)
9	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	459.915.659.791	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	462.150.707.439	(2.235.047.648)
10	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	6.602.824.000	521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	6.602.824.000	-
11	521232	Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk uang	2.054.850.000	521232	Beban Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk uang	2.054.850.000	-
12	521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	1.185.381.078	521233	Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk	1.185.381.078	-
13	522111	Belanja Langganan Listrik	16.703.333.958	522111	Beban Langganan Listrik	16.699.924.335	3.409.623
14	522112	Belanja Langganan Telepon	1.468.543.902	522112	Beban Langganan Telepon	1.468.159.144	384.758
15	522113	Belanja Langganan Air	1.198.810.015	522113	Beban Langganan Air	1.200.613.425	(1.803.410)
16	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	404.150.205	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	404.150.205	-
17	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	74.923.850	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	74.923.850	-
18	522131	Belanja Jasa Konsultan	44.687.523.917	522131	Beban Jasa Konsultan	44.687.523.917	-
19	522141	Belanja Sewa	99.624.826.520	522141	Beban Sewa	99.390.935.282	233.891.238
20	522151	Belanja Jasa Profesi	64.074.371.918	522151	Beban Jasa Profesi	64.042.471.918	31.900.000
21	522191	Belanja Jasa Lainnya	38.794.960.966	522191	Beban Jasa Lainnya	38.794.960.966	-
22	-	-	-	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	204.599.700	(204.599.700)
Jumlah							(2.528.715.866)



Penjelasan atas perbedaan nilai Beban Barang/Jasa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengakuan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas beban barang/jasa. Atas pengakuan ini akan mengurangi nilai beban barang/jasa sebesar (Rp116.749.297)
2. Terdapat pengakuan Piutang Lainnya atas beban barang/jasa. Atas pengakuan ini akan mengurangi nilai beban barang/jasa sebesar (Rp332.807.518)
3. Terdapat reklasifikasi akun beban barang/jasa yang secara substansi bukan merupakan belanja barang/jasa. Atas hal tersebut akan mengurangi nilai beban barang/jasa sebesar (Rp80.128.500)
4. Terdapat jurnal balik awal tahun atas Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar TA 2018, atas jurnal tersebut maka akan mengurangi nilai beban barang/jasa secara akrual sebesar (Rp3.600.663.051)
5. Terdapat pengakuan Beban Aset Ekstrakomptabel yang akan menambah nilai beban barang/jasa sebesar Rp204.599.700
6. Terdapat pengakuan Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar atas beban barang/jasa TA 2019 yang akan menambah nilai beban barang/jasa secara akrual sebesar Rp6.435.372.532
7. Terdapat reklasifikasi akun yang akan menambah nilai beban barang/jasa sebesar Rp19.092.000

Beban Pemeliharaan

Rp78.468.609.329

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp78.468.609.329** dan **Rp79.929.210.304**.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Perbandingan Beban Pemeliharaan di tiap Unit Kerja Eselon I untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan Per Eselon I
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

NO	Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	20.692.751.254	21.985.629.848	(1.292.878.594)	(5,88)
2	Inspektorat Jenderal	426.319.700	471.732.700	(45.413.000)	(9,63)
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	10.677.152.069	10.122.958.749	554.193.320	5,47
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	27.289.279.985	26.746.843.410	542.436.575	2,03
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	6.464.848.298	6.536.954.371	(72.106.073)	(1,10)
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	1.115.096.180	1.163.558.700	(48.462.520)	(4,17)
7	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	11.803.161.843	12.901.532.526	(1.098.370.683)	(8,51)
	Jumlah	78.468.609.329	79.929.210.304	(1.460.600.975)	(1,83)



Adapun rincian perbandingan Beban Pemeliharaan untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

NO	URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33.846.594.852	31.665.427.281	2.181.167.571	6,89
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.223.844.529	2.066.424.243	(842.579.714)	(40,77)
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34.510.995.738	35.639.296.918	(1.128.301.180)	(3,17)
4	Beban Bahan Bakar Minyak & Pelumas (BMP) & Pelumas Khusus Non Pertamina	-	60.011.920	(60.011.920)	(100,00)
5	Beban Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya	3.365.884.398	4.678.774.857	(1.312.890.459)	(28,06)
6	Beban Pemeliharaan Jaringan	1.022.298.399	572.304.895	449.993.504	78,63
7	Beban Pemeliharaan Lainnya	3.557.650.263	3.983.072.000	(425.421.737)	(10,68)
8	Beban Persediaan bahan Untuk Pemeliharaan	612.941.150	393.016.190	219.924.960	55,96
9	Beban Persediaan Suku Cadang	-	376.832.000	(376.832.000)	(100,00)
10	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	328.400.000	494.050.000	(165.650.000)	(33,53)
	Jumlah	78.468.609.329	79.929.210.304	(1.460.600.975)	(1,83)

Berdasarkan pada tabel di atas, secara absolut total terdapat penurunan Beban Pemeliharaan sebesar 1,83% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018. Penurunan signifikan terjadi pada pos akun **Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin** serta pos akun **Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** dengan penurunan paling besar pada Sekretariat Jenderal.

Catatan lain atas pos Beban Pemeliharaan yaitu Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung & Bangunan yang mengalami perubahan dalam pengklasifikasian dari Beban Barang dan Jasa menjadi Beban Pemeliharaan sesuai dengan Surat dari Kementerian Keuangan Nomor: S-127/PB.6/2019.

Selanjutnya, terdapat perbedaan atas Belanja/Beban Pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut:

No	LRA			LO			Perbedaan
	Nomor Akun	Uraian Akun	Nilai	Nomor Akun	Uraian Akun	Nilai	
1	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33.877.854.852	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33.846.594.852	31.260.000
2	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.223.844.529	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.223.844.529	-
3	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34.002.504.880	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34.510.995.738	(508.490.858)
4	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.365.884.398	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.365.884.398	-
5	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	1.022.298.399	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	1.022.298.399	-
6	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	3.590.458.703	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	3.557.650.263	32.808.440
7	-	-	-	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	612.941.150	(612.941.150)
8	-	-	-	595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	328.400.000	(328.400.000)
			Jumlah				(1.385.763.568)



Penjelasan atas perbedaan nilai Beban Pemeliharaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengakuan Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan (593113) yang di mana secara akrual merupakan akun untuk penggunaan persediaan sebesar Rp612.941.150.
2. Terdapat pengakuan Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan sebesar Rp328.400.000
3. Terdapat pengakuan Belanja Barang Dibayar Dimuka atas Beban Pemeliharaan yang akan menambah nilai Beban Pemeliharaan secara akrual sebesar Rp508.490.858
4. Terdapat reklasifikasi akun yang akan mengurangi nilai Beban Pemeliharaan ke akun aset sebesar (Rp64.068.440)

Beban Perjalanan Dinas

Rp963.471.108.195

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp963.471.108.195** dan **Rp855.367.837.526**

Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas Kementerian Sosial di tiap Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per Eselon I
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

NO	Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	78.727.481.704	66.786.421.798	11.941.059.906	17,88
2	Inspektorat Jenderal	22.756.861.044	21.956.400.050	800.460.994	3,65
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	110.986.219.903	109.506.281.348	1.479.938.555	1,35
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	192.543.304.310	192.614.894.579	(71.590.269)	(0,04)
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	140.498.292.919	192.581.938.250	(52.083.645.331)	(27,04)
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	159.328.316.688	177.125.479.958	(17.797.163.270)	(10,05)
7	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	258.630.631.627	94.796.421.543	163.834.210.084	172,83
Jumlah		963.471.108.195	855.367.837.526	108.103.270.669	12,64

Adapun rincian perbandingan Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dapat dilihat sebagai berikut:



*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

NO	URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
1	Beban Perjalanan Biasa	372.242.763.430	308.955.207.435	63.287.555.995	20,48
2	Beban Perjalanan Tetap	149.215.356	107.244.300	41.971.056	39,14
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.338.020.644	35.888.099.047	6.449.921.597	17,97
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	193.227.230.047	156.913.691.259	36.313.538.788	23,14
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	350.353.407.410	350.895.648.726	(542.241.316)	(0,15)
6	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	3.251.784.531	1.563.848.582	1.687.935.949	107,93
7	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1.908.686.777	1.044.098.177	864.588.600	82,81
Jumlah		963.471.108.195	855.367.837.526	108.103.270.669	12,64

Beban Perjalanan Dinas sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp108.103.270.669 atau 12,64% jika dibandingkan dengan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dikarenakan adanya kegiatan perjalanan dinas dalam rangka pengembangan SDM dan mendukung program-program Kementerian Sosial RI.

Selanjutnya, terdapat perbedaan atas Belanja/Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut:

No	LRA			LO			Perbedaan
	Nomor Akun	Uraian Akun	Nilai	Nomor Akun	Uraian Akun	Nilai	
1	524111	Belanja Perjalanan Biasa	373.728.001.823	524111	Beban Perjalanan Biasa	372.242.763.430	1.485.238.393
2	524112	Belanja Perjalanan Tetap	149.215.356	524112	Beban Perjalanan Tetap	149.215.356	-
3	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.363.941.644	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.338.020.644	25.921.000
4	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	193.128.645.380	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	193.227.230.047	(98.584.667)
5	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	350.473.542.763	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	350.353.407.410	120.135.353
6	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	3.251.784.531	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	3.251.784.531	-
7	524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1.908.686.777	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1.908.686.777	-
Jumlah							1.532.710.079

Penjelasan atas perbedaan nilai Beban Perjalanan Dinas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengakuan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas Beban Perjalanan Dinas. Atas pengakuan tersebut akan mengurangi nilai Beban Perjalanan Dinas secara akrual sebesar (Rp1.277.094.615)
2. Terdapat pengakuan Piutang Lainnya atas Beban Perjalanan Dinas. Atas pengakuan tersebut akan mengurangi nilai Beban Perjalanan Dinas sebesar (Rp482.157.108)
3. Terdapat pengakuan Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar atas Beban Perjalanan Dinas TA 2019. Atas pengakuan tersebut akan menambah nilai Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp543.500.000
4. Terdapat jurnal balik awal tahun atas Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar TA 2018 yang mempengaruhi nilai Beban Perjalanan Dinas. Atas jurnal balik tersebut maka akan mengurangi nilai Beban Perjalanan Dinas sebesar (Rp325.358.356)



5. Terdapat koreksi akun yang menambah nilai Beban Perjalanan Dinas yang bukan berasal dari Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp8.400.000

*Beban Barang untuk
 Diserahkan kepada
 Masyarakat*
 Rp29.550.568.283

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp29.550.568.283** dan **Rp25.773.356.581** atau mengalami kenaikan sebesar 14,66%. *Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.*

Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Kementerian Sosial di tiap Unit Kerja Eselon I dapat dilihat pada tabel berikut:

*Perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per Eselon I
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

NO	Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (penurunan)	Naik (Turun) %
1	Ditjen Pemberdayaan Sosial	4.235.752.300	11.751.871.797	(7.516.119.497)	(63,96)
2	Ditjen Rehabilitasi Sosial	7.601.435.428	11.907.386.645	(4.305.951.217)	(36,16)
3	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	13.728.085.810	1.701.260.187	12.026.825.623	706,94
4	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	3.985.294.745	412.837.952	3.572.456.793	865,34
Jumlah		29.550.568.283	25.773.356.581	3.777.211.702	14,66

Adapun rincian perbandingan Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dapat dilihat sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

NO	URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
1	Beban Persediaan Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	4.091.043.000	1.841.700.000	2.249.343.000	122,13
2	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	7.796.043.220	9.120.359.625	(1.324.316.405)	(14,52)
3	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	17.663.482.063	14.651.936.956	3.011.545.107	20,55
4	Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	-	63.000.000	(63.000.000)	(100,00)
5	Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Uang	-	96.360.000	(96.360.000)	(100,00)
Jumlah		29.550.568.283	25.773.356.581	3.777.211.702	14,66



Beban Bantuan Sosial

Rp51.221.474.250.664

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp51.221.474.250.664** dan **Rp37.255.869.069.772**

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Sesuai dengan surat KSAP Nomor: S-35/K.1/KSAP/III/2018 Beban Bantuan Sosial diakui pada saat Bantuan Sosial berupa Uang/Barang/ Jasa telah diserahkan pada pihak yang berhak menerima bantuan sosial.

Beban bantuan sosial merupakan saldo realisasi belanja bantuan sosial berbasis kas setelah dikurangi dengan jurnal manual atas sisa dana bantuan sosial yang akan disetorkan ke kas negara pada periode berikutnya (diakui sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dan Piutang Lainnya pada Neraca) dan jurnal manual atas sisa dana bantuan sosial yang akan disalurkan kembali pada periode berikutnya (diakui sebagai Dana Lainnya pada Neraca). Selain itu beban bantuan sosial juga termasuk hasil akumulasi dari penggunaan bantuan sosial dalam bentuk barang.

Beban Bantuan Sosial Kementerian Sosial RI di tiap Unit Kerja Eselon I per untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial Per Eselon I
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

NO	Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (penurunan)	Naik (Turun) %
1	Ditjen Pemberdayaan Sosial	171.266.583.572	153.222.845.743	18.043.737.829	11,78
2	Ditjen Rehabilitasi Sosial	381.545.513.605	242.464.286.678	139.081.226.927	57,36
3	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	32.742.269.516.133	17.757.675.627.271	14.984.593.888.862	84,38
4	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	17.926.392.637.354	19.102.506.310.080	(1.176.113.672.726)	(6,16)
Jumlah		51.221.474.250.664	37.255.869.069.772	13.965.605.180.892	37,49

Rincian Perbandingan Beban Bantuan Sosial Kementerian Sosial RI untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:



*Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	374.182.945.121,	236.342.618.650	137.840.326.471	58,32
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam bentuk uang	29.742.839.000	14.395.860.000	15.346.979.000	100,00
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial Dalam bentuk Bentuk barang/jasa	3.865.055.584.003	12.296.936.121.583	(8.431.880.537.580)	(68,57)
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk uang	32.629.517.606.981	17.652.918.950.539	14.976.598.656.442	84,84
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk uang	14.263.597.074.714	7.030.960.719.000	7.232.636.355.714	234,82
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk uang	59.378.200.845	24.314.800.000	35.063.400.845	144,21
Jumlah	51.221.474.250.664	37.255.869.069.772	13.965.605.180.892	37,49

Beban Bantuan Sosial untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 37,49% jika dibanding dengan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan target penerima manfaat di tahun 2019 menjadi 10 juta KPM pada satker Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, adanya penambahan anggaran untuk kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial yang dibiayai dari BA-BUN untuk pemberian jadup dari belanja bansos terhadap daerah terkena bencana, serta adanya peningkatan penyaluran bantuan penanggulangan bencana yang disebabkan oleh alam pada satker Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan bantuan penanggulangan bencana yang disebabkan oleh manusia seperti konflik yang terjadi di masyarakat pada satker Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.

Selanjutnya, terdapat perbedaan atas Belanja/Beban Bantuan Sosial pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional (LO) dengan rincian sebagai berikut:

No	LRA			LO			Perbedaan
	Nomor Akun	Uraian Akun	Nilai	Nomor Akun	Uraian Akun	Nilai	
1	571111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	383.915.458.300	571111	Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	374.182.945.121	9.732.513.179
2	573111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang	29.742.839.000	573111	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang	29.742.839.000	-
3	574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	32.827.318.253.000	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	32.629.517.606.981	197.800.646.019
4	575111	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan dalam Bentuk Uang	16.126.710.705.435	575111	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang	14.263.597.074.714	1.863.113.630.721
5	576111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang	59.378.200.845	576111	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang	59.378.200.845	-
Jumlah							2.070.646.789.919

Penjelasan atas perbedaan nilai Beban Bantuan Sosial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengakuan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas Beban Bantuan Sosial. Atas pengakuan tersebut akan mengurangi nilai Beban Bantuan Sosial sebesar (Rp2.348.960.950.991)



2. Terdapat pengakuan Piutang Lainnya atas Beban Bantuan Sosial. Atas pengakuan tersebut akan mengurangi nilai Beban Bantuan Sosial sebesar (Rp208.317.594.153)
3. Terdapat pengakuan Dana Lainnya atas Beban Bantuan Sosial. Atas pengakuan tersebut akan mengurangi nilai Beban Bantuan Sosial sebesar (Rp1.375.401.829.437)
4. Terdapat penyetoran ke kas negara atas Beban Bantuan Sosial tahun anggaran sebelumnya yang diakui sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada TA 2018. Atas penyetoran tersebut akan menambah nilai Beban Bantuan Sosial sebesar Rp1.033.383.923.669
5. Terdapat penyaluran ke KPM atas Beban Bantuan Sosial tahun anggaran sebelumnya yang diakui sebagai Dana Lainnya pada TA 2018. Atas penyaluran tersebut akan menambah nilai Beban Bantuan Sosial sebesar Rp828.649.660.993

Untuk perbedaan belanja/beban bantuan sosial dalam bentuk barang disebabkan perbedaan basis akuntansi, di mana belanja bantuan sosial digunakan untuk mencatat adanya pembelian persediaan dalam rangka bantuan sosial TA 2019, sedangkan beban bantuan sosial digunakan untuk mencatat penggunaan persediaan dalam rangka bansos.

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rp252.849.834.076

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp252.849.834.076** dan **Rp242.521.247.609** dengan rincian per Eselon I sebagai berikut:

*Beban Penyusutan dan Amortisasi Per Eselon I
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

NO	Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	69.910.245.653	75.946.393.196	(6.036.147.543)	(7,95)
2	Inspektorat Jenderal	892.428.755	680.261.065	212.167.690	31,19
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	16.220.508.485	21.428.399.029	(5.207.890.544)	(24,30)
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	70.517.686.074	77.203.202.687	(6.685.516.613)	(8,66)
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	60.064.133.087	66.340.345.556	(6.276.212.469)	(9,46)
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	2.547.907.545	2.313.974.243	233.933.302	10,11
7	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	32.696.924.477	33.475.222.209	(778.297.732)	(2,32)
8	Satker Konsolidasi Kementerian Sosial	-	(34.866.550.376)	34.866.550.376	-
Jumlah		252.849.834.076	242.521.247.609	10.328.586.467	4,26

Adapun rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Kementerian Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:



*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	162.678.633.333,	175.773.954.302,	(7,45)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	67.606.129.167,	45.910.158.054,	47,26
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	7.694.501.065,	5.213.250.996,	47,60
Beban Penyusutan Irigasi	2.053.880.963,	1.894.976.019,	8,39
Beban Penyusutan Jaringan	1.014.384.630,	974.665.379,	4,08
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	141.281.086,	322.165.367,	(56,15)
Beban Amortisasi <i>Software</i>	11.511.020.309,	12.304.066.410,	(6,45)
Beban Amortisasi Lisensi	9.542.500,	0,	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	0,	664.125,	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam operasi Pemerintah	140.461.023,	127.346.957,	10,30
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	252.849.834.076	242.521.247.609	4,26

*Beban Penyisihan
 Piutang Tak Tertagih*

Rp1.799.954.514

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp1.799.954.514** dan **(Rp155.775.095)** yang terdiri dari Beban Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp1.799.357.854 dan Beban Penyisihan Piutang PNBPN sebesar Rp596.660.

Beban Penyisihan Piutang di tiap Unit Kerja Eselon I dapat dilihat dalam tabel berikut :

*Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih menurut UKE I
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

NO	Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan (penurunan)	Naik (Turun) %
1	Sekretariat Jenderal	1.137.773	286.745	851.028	296,79
2	Inspektorat Jenderal	20.646	42.893	(22.247)	(51,87)
3	Ditjen Pemberdayaan Sosial	1.886.375	499.907	1.386.468	277,35
4	Ditjen Rehabilitasi Sosial	44.065.611	395.845	43.669.766	11.032,04
5	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.750.541.040	(157.281.789)	1.907.822.829	(1.213,00)
6	Ditjen Penanganan Fakir Miskin	(5.071)	135.381	(140.452)	(103,75)
7	Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial	2.308.140	145.923	2.162.217	1.481,75
	Jumlah	1.799.954.514	(155.775.095)	1.955.729.609	(1.255,48)

*Surplus/Defisit
 Pelepasan Aset Non
 Lancar*

Rp1.447.303.661

D.11.Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus/Defisit dari pelepasan Aset Non Lancar terdiri dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar.

Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar Kementerian Sosial untuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp1.447.303.661** dan **(Rp562.426.872)**. Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar pada Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan 357,33%.



Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar merupakan selisih antara Total Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Sebesar **Rp1.656.887.086** dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar **Rp209.583.425** dengan rincian berikut:

*Perbandingan Rincian Pelepasan Aset Non Lancar
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Pelepasan Aset Non Lancar	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	16.200.000	1.200.000	15.000.000	1.250,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	152.683.386	244.304.967	(91.621.581)	(37,50)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.488.003.700	331.826.473	1.156.177.227	348,43
Total Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.656.887.086	577.331.440	1.079.555.646	186,99
Beban Kerugian Pelepasan Aset non Lancar	(209.583.425)	(1.139.758.312)	930.174.887	(81,61)
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	1.447.303.661	(562.426.872)	2.009.730.533	(357,33)

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berdasarkan Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

*Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per UKE I
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Sekretariat Jenderal	483.210.000	26.159.200	457.050.800	1.747,19
Inspektorat Jenderal	80.455.900	14.700.000	65.755.900	447,32
Ditjen Pemberdayaan Sosial	250.108.000	-	250.108.000	-
Ditjen Rehabilitasi Sosial	501.910.986	327.670.240	174.240.746	53,18
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	82.855.200	55.000.000	27.855.200	50,65
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	390.000	-	390.000	-
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	257.957.000	153.802.000	104.155.000	67,72
Total	1.656.887.086	577.331.440	1.079.555.646	186,99

Sedangkan rincian Beban Kerugian Pelepasan Aset Non Lancar berdasarkan Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Sekretariat Jenderal	-	109.161.964	(109.161.964)	(100,00)
Inspektorat Jenderal	-	-	-	-
Ditjen Pemberdayaan Sosial	-	1.503.330.630	(1.503.330.630)	(100,00)
Ditjen Rehabilitasi Sosial	143.566.070	92.726.079	50.839.991	54,83
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	7.492.500	76.576.000	(69.083.500)	(90,22)
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	11.053.285	-	11.053.285	-
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	47.471.570	43.488.446	3.983.124	9,16
Konsolidasi Kementerian Sosial	-	(685.524.807)	685.524.807	(100,00)
Total	209.583.425	1.139.758.312	(1.615.699.694)	(81,61)



Surplus dari Kegiatan
 Non Operasional
 Lainnya

Rp451.787.461.118

D.12. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dan Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya.

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Kementerian Sosial RI untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing Rp451.787.461.118 dan Rp285.594.170.903

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 merupakan selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya sebesar Rp501.672.920.191 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp49.885.459.073 dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Perbandingan Pendapatan dan Beban dari Kegiatan Non Operasional
 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Uraian Kegiatan Non Operasional Lainnya	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikann (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	17.500.000	71.694.457	(54.194.457)	(75,59)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	185.434.790	51.481.508	133.953.282	260,20
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2.478.917.791	7.863.079.400	(5.384.161.609)	(68,47)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	242.264.228	(242.264.228)	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	429.155.299.440	274.386.724.630	154.768.574.810	56,41
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	69.835.768.170	222.098.906.924	(152.263.138.754)	(68,56)
Total Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	501.672.920.191	504.714.151.147	(3.041.230.956)	(0,60)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	49.702.862.943	218.995.698.244	(169.292.835.301)	(77,30)
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	182.596.130	124.282.000	58.314.130	100,00
Total Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	49.885.459.073	219.119.980.244	(169.234.521.171)	(77,23)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	451.787.461.118	285.594.170.903	166.193.290.215	58,19

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional berdasarkan Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut:



Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Sekretariat Jenderal	419.620.812	5.110.225.443	(4.690.604.631)	(91,79)
Inspektorat Jenderal	38.862.290	19.068.350	19.793.940	103,81
Ditjen Pemberdayaan Sosial	792.990.606	106.548.115.657	(105.755.125.051)	(99,26)
Ditjen Rehabilitasi Sosial	447.955.458	76.324.353.768	(75.876.398.310)	(99,41)
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	113.166.930.933	103.258.279.643	9.908.651.290	9,60
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	386.625.901.020	212.619.601.050	174.006.299.970	81,84
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	180.659.072	834.507.236	(653.848.164)	(78,35)
Total	501.672.920.191	504.714.151.147	(3.041.230.956)	(0,60)

Adapun perincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya menurut Unit Kerja Eselon I dapat dilihat dalam tabel berikut:

Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ (Penurunan)	NAIK (TURUN) %
Sekretariat Jenderal	76.752.690	227.006.905	(150.254.215)	(66,19)
Inspektorat Jenderal	5.953.200	9.076.500	(3.123.300)	(34,41)
Ditjen Pemberdayaan Sosial	100.168.000	105.415.926.937	(105.315.758.937)	(99,90)
Ditjen Rehabilitasi Sosial	69.482.560	75.760.954.800	(75.691.472.240)	(99,91)
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	49.600.527.643	37.504.983.477	12.095.544.166	32,25
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	11.559.000	18.362.900	(6.803.900)	(37,05)
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	21.015.980	183.668.725	(162.652.745)	(88,56)
Total	49.885.459.073	219.119.980.244	(169.234.521.171)	(77,23)

Pos Luar Biasa

D.13 POS LUAR BIASA

Rp0.

Kementerian Sosial Tidak ada kejadian atau transaksi Pos-pos Luar Biasa.

Defisit LO

D.14 Defisit LO

(Rp55.135.814.121.716)

Defisit Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah sebesar ***(Rp55.135.814.121.716)*** dan ***(Rp41.147.201.269.095)***



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp5.978.367.271.420

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 1 Januari 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp5.978.367.271.420** dan **Rp6.282.333.008.178**. Perincian Ekuitas Awal di tiap Unit Kerja Eselon I ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

URAIAN	1 Januari 2019	1 Januari 2018
Sekretariat Jenderal	3.965.906.903.863	4.111.419.503.699
Inspektorat Jenderal	1.734.568.009	1.536.998.603
Pemberdayaan Sosial	7.118.117.233.843	7.090.215.462.289
Rehabilitasi Sosial	7.635.820.018.090	7.651.346.198.719
Perlindungan dan Jaminan Sosial	559.820.489.944	757.486.374.230
Penanganan Fakir Miskin	34.711.094.179	13.902.522.183
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	1.892.830.659.677	1.882.736.583.291
Satker Konsolidasi Kementerian Sosial RI	(15.230.573.696.185)	(15.226.310.634.836)
Jumlah	5.978.367.271.420	6.282.333.008.178

Terdapat Satker Konsolidasi Kementerian Sosial RI dikarenakan terdapat kebijakan dari Kementerian Keuangan berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan No : S-338/PB/2018 tentang Petunjuk Teknis Koreksi Data Revaluasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2017, maka hasil Revaluasi seluruh BMN pada tahun 2017 agar tidak disajikan dalam face LKKL tahun 2017.

Hasil revaluasi aset BMN telah disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian Sosial tahun 2017 (Unaudited), Kementerian Sosial perlu melakukan koreksi atas hasil revaluasi dimaksud melalui Satker Konsolidasi.

Berdasarkan Nota Kesepakatan Koreksi Pencatatan Hasil Penilaian Kembali BMN tahun 2017-2019 Pada Laporan Keuangan Kementerian Sosial Nomor :NK-027/46/TO-REVALBMN/2019 maka Kementerian Sosial melakukan jurnal koreksi pada Satker Konsolidasi terhadap aset-aset yang telah dilakukan penilaian kembali. Pada tanggal 26 Juni 2019 berdasarkan Lampiran III surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-625/PB/2019 tentang Pedoman Penyusunan, Penyajian, dan Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) Semester I Tahun 2019 huruf B No 3 untuk periode Semester I Tahun Anggaran 2019 tidak perlu dilakukan jurnal balik atas jurnal koreksi hasil penilaian kembali BMN (jurnal takeout revaluasi BMN) yang telah dilakukan pada Satker Konsolidasi dalam LKKL Tahun 2018.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan bahwa laporan keuangan level satker, wilayah, eselon I, serta laporan barang level satker sampai dengan level konsolidasian seluruh K/L (Laporan Barang Milik Negara/LBMN) masih mengandung saldo terkait revaluasi, Kementerian Sosial dipandang perlu untuk melakukan koreksi pencatatan atas transaksi-transaksi lanjutan yang terjadi atas BMN yang merupakan objek revaluasi tahun 2017-2018, di mana transaksi-transaksi lanjutan tersebut terjadi selama semester I tahun 2019. Terdapat tambahan jurnal lanjutan terkait koreksi pencatatan



atas transaksi-transaksi lanjutan yang terjadi atas BMN semester II yang merupakan objek revaluasi. Jurnal-jurnal tersebut dilakukan pada triwulan III tahun 2019.

Per 31 Desember 2019 dilakukan jurnal pencatatan kembali *take in* atas hasil revaluasi sesuai dengan Surat dari Kementerian Keuangan Nomor: S-58/PB/2020 tanggal 24 Januari 2020 hal: Rilis *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 Menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA. Kementerian Sosial melakukan Jurnal untuk memasukkan kembali (*take in*) Hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan yang telah dikeluarkan (*take out*) dari Laporan Keuangan tahun 2018 dan semester I tahun 2019 menggunakan aplikasi SAIBA melalui Satker Konsolidasi, serta melakukan pencatatan perbaikan atau koreksi hasil IP tahun 2017 dan 2018 dalam Laporan Keuangan Kementerian Sosial tahun 2019 menggunakan aplikasi SIMAK BMN. Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan No: S-189/PB/2020 tanggal 5 Maret 2020 Hal: Petunjuk Teknis Pencatatan Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Setelah Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga Tahun 2019 Unaudited serta Rilis *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.3.1 Kementerian Sosial melakukan koreksi atas revaluasi aset tetap tersebut pada Laporan Keuangan Audited Tahun 2019.

Surplus/ (Defisit) LO

(Rp55.135.814.121.716)

E.2 Surplus/ (Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit)LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar **(Rp55.135.814.121.716)** dan **(Rp41.147.201.269.095)**.

Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Perincian dan penjelasan atas Surplus (Defisit) LO disajikan dalam Laporan Operasional.

*Koreksi yang Menambah
/Mengurangi Ekuitas*

Rp15.860.408.652.182

E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Nilai Koreksi yang Menambah /Mengurangi Ekuitas 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp15.860.408.652.182** dan **(Rp120.504.149.420)**. Penjelasan atas pos-pos Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas adalah sebagai berikut:

Koreksi Nilai Persediaan

Rp1.858.337.865

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi atas nilai persediaan sampai dengan periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp1.858.337.865** dan **Rp5.573.051.184**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode



sebelumnya.

Nilai Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp1.858.337.865 terdapat pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial di satker Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam karena adanya koreksi terhadap saldo awal persediaan dalam rangka bantuan sosial.

Koreksi atas Reklasifikasi

(Rp936.795.743)

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas nilai reklasifikasi sampai dengan periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **(Rp936.795.743)** dan **Rp0**

Koreksi atas Reklasifikasi mencerminkan koreksi yang timbul atas nilai transaksi reklasifikasi aset tetap/persediaan/aset lainnya.

Nilai Koreksi atas Reklasifikasi sebesar (Rp936.795.743) per UKE I adalah sebagai berikut:

Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	-	-
Inspektorat Jenderal	-	-
Ditjen Pemberdayaan Sosial	-	-
Ditjen Rehabilitasi Sosial	(5.382.000)	-
Ditjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial	(936.063.743)	-
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	-	-
Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluhan Sosial	4.650.000	-
Konsolidasi Kementerian Sosial	-	-
Total	(936.795.743)	-

Penjelasan Koreksi atas Reklasifikasi disetiap Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial di satker Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental "Dharma Guna" di Bengkulu sebesar (Rp5.382.000). Hal ini dikarenakan penyesuaian kodefikasi BMN yaitu Reklasifikasi Keluar Bangunan Lainnya menjadi Reklasifikasi Masuk Papan Visual/Papan Nama yang berdampak pada akun Koreksi Atas Reklasifikasi.
2. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial di satker:
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp62.461.257. Hal ini dikarenakan terdapat selisih antara Reklasifikasi Masuk dan Reklasifikasi keluar senilai Rp 5.300.000 yang disebabkan perubahan kodifikasi Tas Kamera sebanyak 8 unit yang masuk dalam kategori Aset Ekstrakomptabel. Atas hal diatas, mempengaruhi pula penyusutan Aset tersebut yang berdampak pada akun Koreksi Atas Reklasifikasi.
 - b. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga sebesar (Rp998.525.000) dikarenakan terdapat Reklasifikasi Keluar ATB Lainnya menjadi Reklasifikasi Masuk Software yang berdampak pada Akun Koreksi Atas Reklasifikasi.
3. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial di satker Pusat Penyuluhan Sosial sebesar Rp4.650.000 dikarenakan terdapat transaksi reklasifikasi Keluar dan Reklasifikasi masuk akibat penyesuaian harga booklet pada persediaan.



Selisih Revaluasi Aset Tetap

Rp15.421.011.225.108

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian kembali Aset Tetap yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018 dan hasil perbaikan/ koreksi pada tahun 2019. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing **Rp15.421.011.225.108** dan **Rp0**. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut dari penilaian kembali atas Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air.

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.

Selisih Revaluasi Aset Tetap di setiap Unit Kerja Eselon I dapat dirinci sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	72.907.753.000	
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	198.672.942.528	-
Inspektorat Jenderal	-	-
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	-	-
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	(128.188.029.452)	-
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	(4.744.659.000)	-
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	-	-
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	21.835.367.000	-
Satker Konsolidasi Kementerian Sosial RI	15.260.527.851.032	-
Jumlah	15.421.011.225.108	-

Saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap pada Satker Konsolidasi per 31 Desember 2019 dikarenakan dilakukannya jurnal pencatatan kembali take in atas hasil revaluasi sesuai dengan Surat dari Kementerian Keuangan Nomor: S-58/PB/2020 tanggal 24 Januari 2020 hal: Rilis Update Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 Menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA. (Kementerian Sosial melakukan Jurnal untuk memasukkan kembali (take in) Hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan yang telah dikeluarkan (take out) dari Laporan Keuangan tahun 2018 dan semester I tahun 2019 menggunakan aplikasi SAIBA melalui Satker Konsolidasi, serta melakukan pencatatan perbaikan atau koreksi hasil IP tahun 2017 dan 2018 dalam Laporan Keuangan Kementerian Sosial tahun 2019 menggunakan aplikasi SIMAK BMN.

Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : S-189/PB/2020 tanggal 5 Maret 2020 Hal: Petunjuk Teknis Pencatatan Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Setelah Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga Tahun 2019



Unaudited serta Rilis Update Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.3.1, Kementerian Sosial melakukan koreksi atas revaluasi aset tetap tersebut pada Laporan Keuangan Audited Tahun 2019. Atas koreksi tersebut berdampak pada akun Revaluasi Aset Tetap pada Laporan Keuangan Kementerian Sosial Audited Tahun 2019.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
(Rp.12.754.363.462)

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar **(Rp12.754.363.462)** dan **(Rp125.665.910.604)**

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi sebesar (Rp12.754.363.462) di tiap Unit Kerja Eselon I dapat dilihat sebagai berikut:

Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	(91.529.911)	(83.185.216.682)
Inspektorat Jenderal	-	-
Ditjen Pemberdayaan Sosial	(474.090.557)	-
Ditjen Rehabilitasi Sosial	15.979.772.407	(7.702.140.484)
Ditjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial	172.458.619	24.131.250
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	-	-
Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluhan Sosial	1.613.180.827	(4.780.197.103)
Konsolidasi Kementerian Sosial	(29.954.154.847)	(30.022.487.585)
Total	(12.754.363.462)	(125.665.910.604)

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Kementerian Sosial terdiri dari:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(12.537.671.405)	(125.777.524.441)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(216.692.057)	111.613.837
Jumlah	(12.754.363.462)	(125.665.910.604)

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi sebesar (Rp12.537.671.405) per Eselon I adalah sebagai berikut:

Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	8.052.127	(83.185.216.682)
Inspektorat Jenderal	-	-
Ditjen Pemberdayaan Sosial	(474.090.557)	-
Ditjen Rehabilitasi Sosial	16.105.715.289	(7.762.490.755)
Ditjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial	163.504.073	(29.700.000)
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	-	-
Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluhan Sosial	1.612.330.827	(4.780.197.103)
Konsolidasi Kementerian Sosial	(29.953.183.164)	(30.019.919.901)
Total	(12.537.671.405)	(125.777.524.441)



Rincian Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar (Rp216.692.057) sebagai berikut:

Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	(99.582.038)	-
Inspektorat Jenderal	-	-
Ditjen Pemberdayaan Sosial	-	-
Ditjen Rehabilitasi Sosial	(125.942.882)	60.350.271
Ditjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial	8.954.546	53.831.250
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	-	-
Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluhan Sosial	850.000	-
Konsolidasi Kementerian Sosial	(971.683)	(2.567.684)
Total	(216.692.057)	111.613.837

Pencatatan dan penyajian koreksi hasil inventarisasi dan penilaian kembali Barang Milik Negara dalam Laporan Keuangan Kementerian Sosial sesuai dengan surat S-58/PB/2020, maka dilakukan jurnal balik atas jurnal *take out* yang telah dilakukan pada tahun 2018 dan semester I tahun 2019, serta menyesuaikan (*mapping*) beberapa akun tertentu menjadi akun ekuitas, dalam hal ini akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi. Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor : S-189/PB/2020 tanggal 5 Maret 2020 Hal: Petunjuk Teknis Pencatatan Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Setelah Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga Tahun 2019 Unaudited serta Rilis Update Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.3.1, Kementerian Sosial melakukan koreksi atas revaluasi aset tetap tersebut pada Laporan Keuangan Audited Tahun 2019. Atas koreksi tersebut berdampak pada akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada Laporan Keuangan Kementerian Sosial Audited Tahun 2019.

Koreksi Lain-lain

Rp451.230.248.414

E.4 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp451.230.248.414** dan **(Rp411.290.000)**.

Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Rincian Koreksi Lain-Lain sebesar Rp451.230.248.414 di tiap Unit Kerja Eselon I dapat dilihat sebagai berikut:

Nama Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	(2.057.328)	-
Inspektorat Jenderal	-	-
Ditjen Pemberdayaan Sosial	-	-
Ditjen Rehabilitasi Sosial	-	-
Ditjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial	152.019.669.074	-
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	299.212.636.668	(411.290.000)
Badan Pendidikan, Penelitian Dan Penyuluhan Sosial	-	-
Konsolidasi Kementerian Sosial	-	-
Total	451.230.248.414	(411.290.000)



Pada Sekretariat Jenderal satker Sekretariat Jenderal terdapat Koreksi Lain-lain senilai (Rp 2.057.328) merupakan koreksi atas kekurangan pembayaran Gaji Pokok, Tunjangan Suami/Istri, dan Tunjangan Anak tahun 2018 yang belum dibayarkan per 31 Desember 2019.

Pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin terdapat Koreksi Lain-Lain senilai Rp299.212.636.668 dikarenakan terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas atas realisasi tahun 2017 dan 2018 terhadap dana Bantuan Sosial BPNT yang disesuaikan pada Laporan Keuangan Kementerian Sosial Audited Tahun Anggaran 2019.

Pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial terdapat Koreksi Lain-Lain senilai Rp152.019.669.074 merupakan penyesuaian atas beban bantuan sosial tahun 2016-2018 untuk mengakui Piutang Lainnya atas saldo rekening KPM yang tidak bertransaksi sampai dengan 31 Desember 2019 pada Bank BRI dan BNI, serta KKS tidak terdistribusi pada Bank BNI.

Transaksi Antar Entitas

Rp57.266.530.994.957

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp57.266.530.994.957** dan **Rp40.963.739.681.757**

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian/Lembaga, antar Kementerian/Lembaga, antar Bendahara Umum Negara, maupun Kementerian/Lembaga dengan Bendahara Umum Negara.

Rincian Transaksi Antar Entitas di tiap UKE I ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Unit Kerja Eselon I	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	432.968.915.576	319.645.314.206
Inspektorat Jenderal	47.979.915.694	44.577.693.034
Ditjen Pemberdayaan Sosial	557.407.586.049	513.395.470.899
Ditjen Rehabilitasi Sosial	1.152.414.443.006	1.017.148.877.312
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	34.668.585.505.367	19.458.176.275.871
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	19.720.004.933.200	19.264.322.803.056
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial.	687.169.696.065	346.473.247.379
Konsolidasi Kementerian Sosial	-	-
Total	57.266.530.994.957	40.963.739.681.757

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Ditagihkan ke Entitas Lain	57.636.484.135.381	41.163.912.263.928
Diterima dari Entitas Lain	(516.740.242.519)	(338.356.086.414)
Transfer Keluar	(718.750.608.475)	(1.006.407.534.481)
Transfer Masuk	714.040.295.270	1.006.075.155.871
Pengesahan Hibah Langsung	152.047.168.600	122.632.869.003
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(549.753.300)	(414.986.150)
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	-	16.298.000.000
Total	57.266.530.994.957	40.963.739.681.757



E.5.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dan Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dan Diterima dari Entitas Lain (DDEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2019, nilai DKEL sebesar **Rp57.636.484.135.381** sedangkan untuk nilai DDEL sebesar **(Rp516.740.242.519)**.

Realisasi Belanja (Netto) Kementerian Sosial RI adalah sebesar **Rp57.726.645.452.081** sehingga terdapat selisih dengan DKEL sebesar **Rp90.161.316.700**. Penjelasan atas Selisih Realisasi Belanja (Netto) dan DKEL adalah sebagai berikut:

1. Terdapat Belanja Bantuan Sosial yang berasal dari Hibah Langsung Dalam Negeri sebesar Rp82.991.626.000
2. Terdapat Belanja Bantuan Sosial yang berasal dari Hibah Langsung Luar Negeri sebesar Rp7.169.690.700

Realisasi Pendapatan (Netto) Kementerian Sosial RI adalah sebesar **Rp516.740.242.519** sehingga tidak terdapat selisih dengan DDEL.

E.5.2 Transfer Keluar dan Transfer Masuk

Transfer Keluar dan Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar **(Rp718.750.608.475)** dan **Rp714.040.295.270**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Terdapat selisih antara Transfer Keluar dan Transfer Masuk untuk periode sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar (Rp4.710.313.205) dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan Transfer Keluar dan Transfer Masuk di satker Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam sebesar (Rp19.407.500) dikarenakan sistem aplikasi SIMAK BMN saat pengiriman ke aplikasi SAIBA.
2. Terdapat perbedaan Transfer Keluar dan Transfer Masuk sebesar (Rp157.677.000) pada Sekretariat Jenderal di satker Sekretariat Jenderal dikarenakan transaksi Transfer Keluar ke Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara berupa Aset Tetap Renovasi atas Rumah Negara Widya Chandra IV No.18 Jakarta.
3. Terdapat perbedaan Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar (Rp4.533.228.705) dikarenakan adanya hasil revaluasi dan penilaian berdasarkan LHIP yang usulannya masih menggunakan Satuan Kerja yang telah dilikuidasi (PSBR Bambu Apus). Untuk proses kapitalisasi asetnya pada entitas lama dengan melakukan penarikan data file csv dari aplikasi SIMAN, sedangkan kapitalisasi asetnya pada satker baru (BRSKPN Bambu Apus) menggunakan transaksi koreksi transfer masuk (323), hal ini mengakibatkan Akun Akumulasi Penyusutan yang ditransfer keluar pada satker lama tidak terakomodir di satker baru sehingga mengakibatkan selisih pada Transfer Keluar dan Transfer Masuk dengan perincian sebagai berikut:



Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar di PSBR Bambu Apus	Transfer Masuk di BRSKPN Bambu Apus
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	249.003.414	0
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.284.225.291	0
	Total	4.533.228.705	0

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung, Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung, dan Pengesahan Hibah Langsung TAYL

Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar **Rp152.047.168.600**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung Kementerian/Lembaga dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp152.047.168.600 terdapat pada:

1. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial di satker Direktorat Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial sebesar Rp143.239.196.600
2. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp8.807.972.000 di satker:
 - a. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra "Wyata Guna" di Bandung sebesar Rp345.821.200
 - b. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial di satker Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik "Prof. Dr. Soeharso" di Surakarta sebesar Rp580.876.000
 - c. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Rp7.077.308.800
 - d. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual "Ciung Wanara" di Bogor sebesar Rp803.966.000

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar (Rp549.753.300) terdapat pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satker:

1. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra "Wyata Guna" di Bandung sebesar Rp200
2. Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak sebesar Rp549.753.100

Kenaikan/Penurunan

Ekuitas

Rp17.991.125.525.423

E.6 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Nilai Kenaikan/Penurunan Ekuitas 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp17.991.125.525.423** dan **(Rp303.965.736.758)**

Kenaikan/ Penurunan Ekuitas di setiap Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

UKE I	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	102.771.528.083	(145.512.599.836)
Inspektorat Jenderal	1.587.885.115	197.569.406
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	256.378.535.999	27.901.771.554
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	(121.210.140.807)	(15.526.180.629)
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	256.682.340.864	(197.665.884.286)
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	2.131.563.916.655	20.808.571.996
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	132.777.763.329	10.094.076.386
Satker Konsolidasi	15.230.573.696.185	(4.263.061.349)
Total	17.991.125.525.423	(303.965.736.758)



Ekuitas Akhir

Rp23.969.492.796.843

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp23.969.492.796.843** dan **Rp5.978.367.271.420**

Ekuitas Akhir di setiap Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

UKEI	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Sekretariat Jenderal	4.068.678.431.946	3.965.906.903.863
Inspektorat Jenderal	3.322.453.124	1.734.568.009
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	7.374.495.769.842	7.118.117.233.843
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	7.514.609.877.283	7.635.820.018.090
Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	816.502.830.808	559.820.489.944
Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	2.166.275.010.834	34.711.094.179
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	2.025.608.423.006	1.892.830.659.677
Satker Konsolidasi	-	(15.230.573.696.185)
Total	23.969.492.796.843	5.978.367.271.420



F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Pergantian Menteri Sosial

Pada hari Kamis Tanggal 24 Oktober 2019, terjadi pergantian Menteri Sosial dari Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi Bapak Juliari Peter Batubara. Pergantian ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2019.

F.2 Likuidasi dan Perubahan Nomenklatur

Pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial satker Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Bambu Apus Jakarta telah melakukan Likuidasi PSBR Bambu Apus Jakarta ke BRSKPN Bambu Apus Jakarta berdasarkan BAST Likuidasi No. 646/BRSKPN/PL.04/06/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh pihak PSBR Bambu Apus dan Pihak BRSKPN Bambu Apus serta diketahui oleh Sekretaris Ditjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 23 Tahun 2018 Kementerian Sosial menambah satuan kerja untuk menunjang program-program pemerintah sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan 9 satker baru dengan kewenangan Tugas Pembantuan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Satker	Uraian Satker
1	091327	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti
2	160256	Dinas Sosial Kabupaten Paser
3	190637	Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja
4	205402	Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan
5	200365	Dinas Sosial Kabupaten Muna
6	280907	Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu
7	210446	Dinas Sosial Kabupaten Buru
8	253008	Dinas Sosial Kabupaten Dogiyai
9	359904	Dinas Sosial Kabupaten Nunukan



2. Terdapat penambahan 34 Satker dengan kewenangan Satker Dekonsentrasi pada Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Satker	Uraian Satker
1	418820	Dinas Sosial Aceh
2	418821	Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara
3	418822	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
4	418823	Dinas Sosial Provinsi Riau
5	418824	Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi
6	418825	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
7	418826	Dinas Sosial Provinsi Lampung
8	418857	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu
9	418865	Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10	418863	Dinas Sosial Provinsi Banten
11	418810	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
12	418816	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
13	418817	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
14	418818	Dinas Sosial Provinsi D.I.Yogyakarta
15	418819	Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
16	418836	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat
17	418837	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
18	418838	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
19	418839	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
20	418853	Dinas Sosial Provinsi Bali
21	418854	Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat
22	418855	Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur
23	418850	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
24	418841	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
25	418851	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara
26	418866	Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
27	418840	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara
28	418862	Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara
29	418852	Dinas Sosial Provinsi Maluku
30	418856	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua
31	418868	Dinas Sosial Provinsi Papua Barat
32	418867	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
33	418869	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
34	418870	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara

3. Pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin terdapat perubahan nomenklatur pada Direktorat sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No 22 Tahun 2018 sebagai berikut:

No	Nomenklatur Lama	Nomenklatur Baru
1	Direktorat Penangan Fakir Miskin Perdesaan	Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I
2	Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan	Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II
3	Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Perbatasan Antar Negara	Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III

F.3 Koreksi Pencatatan Hasil Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

Revaluasi aset Kementerian Sosial dilakukan sesuai dengan *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara*. Aset yang dilakukan Penilaian Kembali tersebut adalah, **Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan** serta **Irigasi**. Terkoreksinya nilai aset diikuti juga dengan nilai penyusutannya pada masing-masing aset tersebut.

Pada tanggal 21 Februari 2019 berdasarkan Nota Kesepakatan Koreksi Pencatatan Hasil Penilaian Kembali BMN tahun 2017-2019 Pada Laporan Keuangan Kementerian Sosial Nomor :NK-027/46/TO-REVALBMN/2019 maka Kementerian Sosial melakukan jurnal koreksi pada satker konsolidasi terhadap aset-aset yang telah dilakukan penilaian kembali. Rincian jurnal koreksi hasil penilaian kembali BMN dapat dilihat pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Pada tanggal 22 April 2019 berdasarkan undangan dari Kementerian Keuangan No : UND-48/KN/2019, dilaksanakan pembahasan tiga pihak (tripartit) antara Kementerian Keuangan, BPK, dan Kementerian Sosial untuk memperoleh kesepakatan untuk melakukan jurnal koreksi atas take out revaluasi BMN tahap II dimana Kementerian Keuangan melakukan pengujian kembali atas nilai BMN pada Tripartit Tahap I dan dilakukan dikoreksi pada Laporan Keuangan Kementerian Sosial RI TA 2018 (*Audited*).

Pada tanggal 26 Juni 2019 berdasarkan Lampiran III surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Nomor: S-625/PB/2019 tentang Pedoman Penyusunan, Penyajian, dan Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) Semester I Tahun 2019 huruf B No 3 untuk periode Semester I Tahun Anggaran 2019 tidak perlu dilakukan jurnal balik atas jurnal koreksi hasil penilaian kembali BMN (jurnal takeout revaluasi BMN) yang telah dilakukan pada Satker Konsolidasi dalam LKKL Tahun 2018.

Pada Tanggal 26 Juli 2019 berdasarkan Surat dari Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor :S-892/PB/2019, Kementerian Sosial melakukan jurnal koreksi (*take out*) atas transaksi-transaksi lanjutan yang terjadi terhadap BMN yang merupakan objek revaluasi tahun 2017-2018, yang terjadi selama semester I tahun 2019.

Terdapat tambahan jurnal lanjutan terkait koreksi pencatatan atas transaksi-transaksi lanjutan yang terjadi atas BMN yang merupakan objek revaluasi. Jurnal-jurnal tersebut dilakukan pada periode triwulan III Tahun Anggaran 2019.

Per 31 Desember 2019 berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Nomor: S-58/PB/2020 Hal: Rilis Update Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 Menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA, Kementerian Sosial melakukan Jurnal untuk memasukkan kembali (*take in*) Hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan yang telah dikeluarkan (*take out*) dari Laporan Keuangan tahun 2018 dan semester I tahun 2019 menggunakan aplikasi SAIBA melalui Satker Konsolidasi, serta melakukan pencatatan perbaikan atau koreksi hasil IP tahun 2017 dan 2018 dalam Laporan Keuangan tahun 2019 *Unaudited* menggunakan aplikasi SIMAK BMN.

Pada tanggal 05 Maret 2020 diterbitkan kembali surat Nomor: S-189/PB/2020 oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hal: Petunjuk Teknis Pencatatan Koreksi

Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Setelah Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 *Unaudited* serta Rilis Update Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.3.1. Bahwa berdasarkan hasil hasil telaah dan verifikasi LKKL Tahun 2019 *Unaudited*, masih terdapat indikasi bahwa belum seluruh perbaikan/koreksi hasil IP BMN dicatat dan disajikan dalam LKKL tahun 2019 *Unaudited*. Seluruh satker yang terkena revaluasi di Kementerian Sosial diwajibkan melakukan perbaikan data yang kemudian akan menjadi bagian koreksi audit dan disajikan dalam LKKL Tahun 2019 *Audited*.

F.4 Satker Tidak Aktif Namun Memiliki Saldo Aset Tetap

Terdapat satker Tugas Pembantuan pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial yang memiliki status tidak aktif atau tidak memiliki anggaran/DIPA satker namun terdapat saldo Aset Tetap dikarenakan belum dilakukannya Penyerahan Aset/ Hibah dan Likuidasi sebagai berikut:

No	KDSATKER	NMSATKER	KODE	AKUN	RPHREAL
1	209115	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	TP	Gedung dan Bangunan	131.896.000
	209115	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	TP	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7.494.090)
2	039161	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH	TP	Gedung dan Bangunan	143.437.000
	039161	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH	TP	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7.881.155)
3	029004	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	TP	Gedung dan Bangunan	141.820.000
	029004	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	TP	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7.993.015)
4	239020	DINAS SOSIAL PROVINSI NTB	TP	Gedung dan Bangunan	205.719.000
	239020	DINAS SOSIAL PROVINSI NTB	TP	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(174.861.150)

F.5 Aset Tetap Renovasi dalam Proses Penghapusan

Kronologi dan Proses tindak lanjut terkait Aset Tetap Renovasi pada Direktorat Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakwanan, dan Restorasi Sosial (KKKRS) sebesar Rp350.000.000 adalah sebagai berikut:

Aset tetap dalam renovasi tersebut berasal dari APBN tahun 2008 untuk rehab TMP di Timor Leste. Aset tersebut sudah dilakukan proses hibah sesuai persyaratan yang terdapat di PMK No. 96 dan sudah terbit SK persetujuan hibah dari Kementerian Keuangan namun sampai saat ini masih terkendala BAST. BAST yang sudah di tandatangani Direktur dan diketahui Dirjen dipandang kurang tepat sehingga perlu diperbaiki kembali dan di tandatangani oleh Menteri atau Presiden mengingat sudah menjadi hubungan lintas negara sehingga memerlukan cukup banyak waktu untuk penyelesaian hibah aset tetap dalam renovasi senilai Rp.350.000.000,- tersebut. sampai saat ini masih dalam proses untuk permohonan penghapusan ATR tersebut. Satker sudah mengirimkan surat kepada Eselon I dengan Nomor Surat No.1098/3.4/PL.05/10/2019, tanggal 1 Oktober 2019, Perihal: Permohonan Penghapusan ATR TMP Seroja Dili di Timor Leste.

F.6 Revisi Anggaran Kementerian Sosial RI

Selama periode berjalan, Kementerian Sosial RI telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan anggaran belanja pemerintah Tahun Anggaran 2019 dan perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, situasi, serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan anggaran awal menjadi anggaran setelah revisi TA 2019 berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal TA 2019	Anggaran Setelah Revisi s.d. 31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
Belanja				
Belanja Pegawai	482.787.452.000	489.387.325.000	6.599.873.000	1,37
Belanja Barang	3.908.241.317.000	3.814.831.867.000	(93.409.450.000)	(2,39)
Belanja Modal	214.683.130.000	322.514.274.000	107.831.144.000	50,23
Belanja Bantuan Sosial	54.244.364.133.000	54.412.473.325.000	168.109.192.000	0,31
Jumlah Belanja	58.850.076.032.000	59.039.206.791.000	189.130.759.000	0,32

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

*Tabel Rekapitulasi Revisi Anggaran Belanja menurut Unit Kerja Eselon I
 Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019*

Eselon 1	Anggaran Awal TA 2019	Revisi	Anggaran Setelah Revisi
Sekretariat Jenderal	372.227.070.000	85.200.000.000	457.427.070.000
Inspektorat Jenderal	47.302.812.000	1.203.412.000	48.506.224.000
Ditjen. Pemberdayaan Sosial	429.362.610.000	93.151.626.000	522.514.236.000
Ditjen. Rehabilitasi Sosial	1.162.906.423.000	26.854.340.000	1.189.760.763.000
Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	34.709.359.285.000	81.349.400.000	34.790.708.685.000
Ditjen. Penanganan Fakir Miskin	21.405.310.213.000	(100.200.000.000)	21.305.110.213.000
Badiklit Pensos	723.607.619.000	1.571.981.000	725.179.600.000
Jumlah	58.850.076.032.000	189.130.759.000	59.039.206.791.000

F.7 Pemulihan PAGU

Selama periode berjalan, terdapat beberapa satuan kerja yang mengajukan pemulihan PAGU dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode UKE I	Uraian Satker	Akun	Nominal Pemulihan PAGU
1	027.05	Direktorat Jaminan Sosial Keluarga	524111	319.430.500
			524119	2.581.497.000
2	027.06	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara	521115	8.100.000
3	027.06	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	524113	600.000
			524111	350.000
4	027.11	Sekretariat Badiklit Pensos	524114	403.247.622
5	027.11	BBPPKS Banjarmasin	533111	1.013.769.442
Jumlah				4.326.994.564

F.8 Hibah

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak menerima bantuan dana hibah luar negeri dalam dari UNICEF yang berbentuk hibah langsung berupa uang tunai. Per 31 Desember 2019 Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak juga masih menerima bantuan dana hibah luar negeri dari UNICEF yang berbentuk hibah langsung berupa uang tunai. Adapun dana kerjasama Kementerian Sosial RI dan Unicef untuk 31 Desember 2018 sesuai SP2HL sebesar Rp7.077.308.800 yang terdiri dari:

1. Saldo awal TA 2019 sebesar Rp.0
2. Pendapatan Hibah TA 2019 sebesar Rp7.077.308.800
3. Belanja Hibah selama TA 2018 sebesar Rp7.077.308.800 terdiri dari :
 - a. 521211 Rp356.783.700
 - b. 521213 Rp151.600.000
 - c. 522141 Rp113.670.000
 - d. 522151 Rp209.000.000
 - e. 522191 Rp24.000.000
 - f. 524111 Rp1.009.713.100
 - g. 524113 Rp116.108.000
 - h. 524114 Rp35.179.000
 - i. 524119 Rp4.433.428.900
 - j. 524211 Rp28.073.000
4. Saldo Akhir TA 2019 sebesar Rp549.753.100
5. Pengembalian Hibah langsung selama TA 2019 sebesar Rp549.753.100
6. Saldo Akhir 31 Desember TA 2019 sebesar Rp.0

BBRSPDF “Prof.Dr.Soeharso”Surakarta

Pada tahun 2019 BBRSPDF “Prof.Dr.Soeharso” Surakarta mendapatkan dana Hibah Luar Negeri dari The Korea Disabled People’s Development Institute “KoDDi” dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Register	Tanggal Penerimaan Hibah	Nilai	No. Rekening
1	2NX15G9A	09-April-2019	580.876.000	RPL 140 PDHL BBRSPDF - 2NX15G9A

Atas dana hibah luar negeri tersebut pada Semester II Tahun 2019 sudah disahkan/digunakan untuk beberapa kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Nominal
1	Nilai Hibah yang Diterima	580.876.000
	Pengesahan	
2	Pengesahan (SP2HL No 190)	273.083.600
3	Pengesahan (SP2HL No 191)	100.000.000
4	Pengesahan (SP2HL No 414)	207.792.400
	Total Pengesahan	580.876.000
	Saldo Akhir Dana Hibah	-

BRSPDI Ciungwanara

Pada tahun anggaran 2019 BRSPDI Ciungwanara Bogor terdapat hibah dalam bentuk barang dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Register	Nama Project	Tanggal Penerimaan Hibah	Nilai	Nomor BAST
1	2J5BXC3A	Hibah langsung barang dari Siloam Center For The Blind	7 Jan 2019	781.966.000	11/PSBG/KS.02/01/2019
2	2WHE2DYA	Hibah langsung barang dari PP SOIna	3 Mei 2019	22.000.000	019//PP SOIna/V.2019

Penjelasan atas hibah luar negeri dalam bentuk barang pada BRSPDI Ciungwanara Bogor adalah sebagai berikut:

Siloam Center for the Blind of Korea :

Hibah ini diberikan oleh Siloam Center for the Blind of Korea yang berasal dari negara Korea Selatan. Adapun BAST Hibah tersebut dengan nomor 11/PSBG/KS.02/01/2019 telah diberikan per tanggal 7 Januari 2019 (BAST Terlampir). Hibah tersebut telah melalui proses dari mendapatkan nomor register 2J5BXC3A tanggal 31 Oktober 2019 dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) karena merupakan hibah langsung dari luar negeri, sampai dengan pengesahan dari KPPN Bogor pada tanggal 5 Desember dengan nomor 2019023560504001. Total nilai untuk hibah langsung berupa barang tersebut sebesar Rp781.966.000. Barang-barang tersebut terdiri dari Lapangan futsal, alat-alat olahraga, alat-alat musik, alat okupasi terapi.

Daftar Hibah Langsung Barang

Siloam Center for The Blind of Korea

Sesuai dengan BAST No. 11/PSBG/KS.02/01/2019

No	Uraian	Nilai
1	Gedung lapangan futsal	649.820.000
2	Peralatan olahraga	20.225.000
3	Peralatan seni	38.621.000
4	Peralatan okupasi terapi	73.300.000
	Jumlah	781.966.000

Setelah dilakukan inventarisir atas barang-barang tersebut, maka terdapat beberapa barang yang masuk ke dalam aset tetap lainnya, persediaan dan juga aset ekstrakomptabel. Berikut adalah rincian dari hasil inventarisir hibah Siloam :

1. Gedung dan bangunan yaitu lapangan futsal dengan nilai Rp649.820.000
2. Peralatan dan mesin dengan nilai Rp57.662.000
3. Aset tetap lainnya dengan nilai Rp33.794.000
4. Persediaan dengan nilai Rp18.600.000
5. Peralatan dan mesin ekstrakomptabel dengan nilai Rp22.090.000

Special Olympics Indonesia (Soina)

Hibah yang kedua adalah hibah langsung berupa barang dari Special Olympics Indonesia (Soina). Hibah tersebut merupakan hibah berupa seperangkat computer, yaitu monitor dan cpu sebanyak 10 unit dengan nilai total Rp22.000.000, dengan BAST Nomor : 019/PP

SOIna/V.2019 tanggal 3 Mei 2019. Hibah tersebut telah melalui proses di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor wilayah Jawa Barat untuk nomor register dengan nomor 2WHE2DYA tanggal 29 November 2019, dan pengesahan dari KPPN Bogor dengan nomor pengesahan 2019023560504002 pada tanggal 5 Desember 2019.

BLBI Abiyoso

BLBI Abiyoso menerima hibah luar negeri dari Siloam Centre for The Blind Korea pada 7 Januari 2019 berupa software aplikasi Audio Mobile Library (AML). Pada saat proses pencatatan nomor register hibah, Berita Acara Serah Terima (BAST) yang sudah ditandatangani oleh Siloam dan BLBI Abiyoso ditolak oleh Bagian Umum Ditjen Rehabilitasi Sosial dikarenakan ada dua item dalam BAST tersebut yang tidak bisa diakui apabila akan dicatat dalam BMN, yaitu berupa koneksi internet dan layanan server dimana keduanya berada di Korea. Setelah melalui proses konfirmasi antara Siloam dengan BLBI Abiyoso, pada akhirnya Siloam menyetujui untuk membuat BAST baru yang memuat item dan tanggal yang telah diperbarui, yaitu per tanggal 2 Januari 2020. Untuk selanjutnya BAST tersebut akan di proses untuk mendapatkan nomor registernya.

BRSPDSN “Wyata Guna” Bandung

Pada tahun 2019 BRSPDSN Wyata Guna Bandung mendapat hibah dari Siloam Centre For The Blind (Korea) untuk kegiatan Barista dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Register	Nama Project	Bentuk	Nilai	Nomor Rekening/ BAST
1	2LTNU7PA	Barista Training and Coffee Shop Project for Women with Visual Disabilities in Indonesia	Uang	17.864.000	2101-219000064-11/1000-676-593
2	2LTNU7PA	Barista Training and Coffee Shop Project for Women with Visual Disabilities in Indonesia	Uang	43.395.200	2101-219000064-11/1000-676-593
3	-	Barista Training and Coffee Shop Project for Women with Visual Disabilities in Indonesia	Barang/ Jasa	128.700.000	434/BRSPDSN/HM.02/03/2019
4	-	Barista Training and Coffee Shop Project for Women with Visual Disabilities in Indonesia	Barang/ Jasa	155.862.000	435/BRSPDSN/HM.02/03/2019

Adapun kronologis penerimaan hibah untuk kegiatan barista tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 13 Maret 2019 telah dilakukan penandatanganan MOM antara Siloam Centre For The Blind (Korea) dengan Kementerian Sosial (BRSPDSN Wyata Guna) tentang pemberian Hibah Kegiatan Barista di BRSPDSN Wyata Guna,
2. Pada tanggal 12 April 2019 telah diregister hibah sebesar 356.000 USD untuk kegiatan barista selama 3 tahun,
3. Tanggal 25 April 2019 diterbitkan Persetujuan Pembukaan Rekening dr KPPN KPH,
4. Pembukaan rekening dilakukan pada tgl 29 April 2019 di KEB Hana Bank Kantor Cabang Bandung Dago dengan Nama rekening RPL 140 PDHL BRSPDSN Wyata Guna 2LTNU7PA
5. Pada saat pembukaan rekening, sesuai dengan syarat yang diberikan pihak KEB Hana Bank, pihak Siloam harus memasukkan uang sebesar Rp1.100.000, Rp100.000 untuk



biaya administrasi pembukaan rekening dan pembelian buku cek, sedangkan yang Rp1.000.000 adalah uang yang harus mengendap di tabungan.

6. Transaksi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Hibah :
 - a. Tanggal 10 Mei 2019 Siloam mentransfer uang sebesar Rp17.864.000
 - b. Tanggal 15 Mei 2019 dilakukan penarikan sebesar Rp17.164.000 yang digunakan untuk kegiatan Barista,
 - c. Tanggal 30 Agustus 2019 Siloam mengirim mentrasfer kembali uang sebesar Rp43.395.200
 - d. Tanggal 7 Oktober 2019 dilakukan penarikan sebesar Rp20.000.000
 - e. Tanggal 21 November 2019 dilakukan penarikan sebesar Rp23.900.000
 - f. Tanggal 17 Desember 2019 dilakukan penarikan terakhir sebesar Rp150.200,
 - g. Tanggal 17 Desember 2019, posisi uang di KEB Hana Bank Rp1.000.000, merupakan dana yang harus mengendap di tabungan,
7. Rehabilitasi gedung dan pembelian peralatan untuk barista sebesar Rp284.562.000, dengan rincian Gedung dan Bangunan Rp128.700.000 (Rehabilitasi Gedung untuk Ruang Barista) Peralatan dan Mesin Rp150.780.000, Persediaan Rp5.082.000 (Bahan pelatihan barista)
8. Pengesahan hibah dalam barang dilakukan melalui KPPN Mitra (KPPN Bandung I) dengan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/ Jasa/Surat Berharga No. 00268/WG/MPHL-BJS/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan disahkan oleh KPPN dengan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga No. 2019022369148001 tanggal 30 Desember 2019.
9. Pengesahan hibah dalam bentuk uang dilakukan melalui KPPN KPH dengan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung No.00277/WG/SP2HL/12/2019 tanggal 30 Desember 2019, disahkan dengan Surat Pengesahan Hibah Langsung No. 191400000000059 tanggal 31 Desember 2019.
10. Sisa hibah sebesar Rp. 200 sudah disetor ke Negara dengan SSPB.

Penginputan hibah barang Peralatan dan Mesin ada pengurangan nilai yang semula Rp150.780.000 berkurang sebesar Rp1.260.000 menjadi Rp149.520.000. Nilai tersebut masuk ke dalam hibah barang persediaan, yang semula Rp5.082.000 menjadi Rp6.342.000

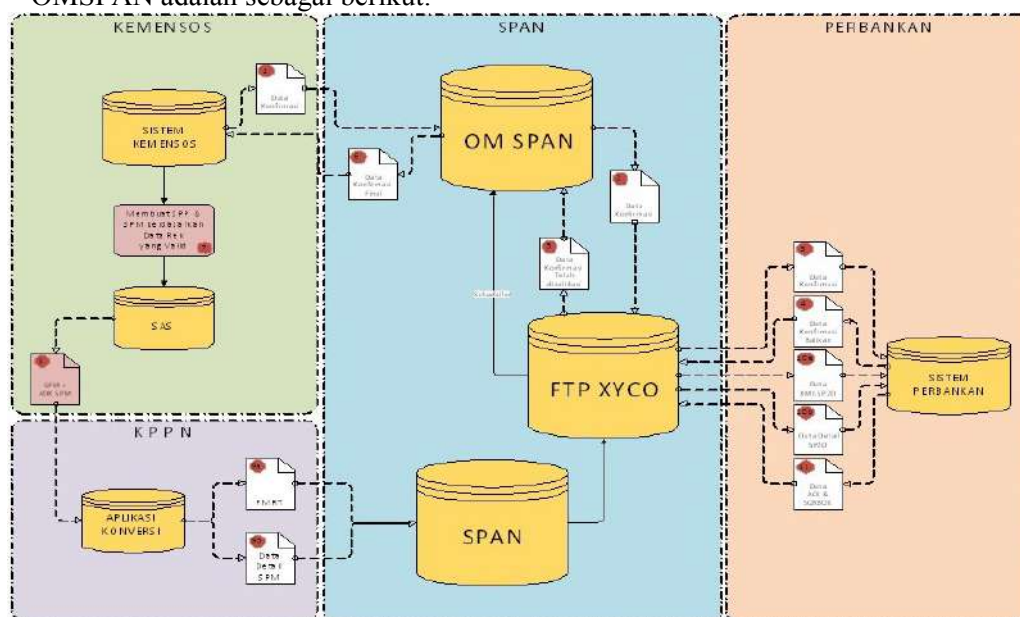
F.9 Bantuan Sosial pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin

1. Perubahan Proses Penyaluran BPNT Tahun 2019

Terdapat perubahan proses penyaluran Bantuan Pangan Nontunai. Bulan Januari s.d Mei 2019 masih menggunakan *multi account* dengan *escrow* di Bank BNI. Pada Juni s.d September 2019 berubah menjadi *single wallet* dimasing masing Bank, kecuali Bank BTN dikarenakan Bank BTN belum memiliki mesin EDC sendiri, sehingga masih menggunakan *escrow* Bank BNI. Pada Bulan Oktober s.d Desember 2019 menggunakan aplikasi OMSPAN milik Kementerian Keuangan sehingga transaksi dari masing masing Bank ke KPM dapat terpantau melalui sistem OMSPAN. Mekanisme penyaluran bansos sebagai berikut:



Proses Bisnis Penyaluran Bansos BPNT dalam hubungannya Monitoring melalui OMSPAN adalah sebagai berikut:



2. Dasar Kebijakan Perluasan BPNT Tahun 2019

Pada tahun 2019 terdapat perluasan wilayah penyaluran BPNT tahun 2019 dengan mempertimbangkan wilayah yang telah dilakukan verifikasi pada 295 kabupaten non BPNT dengan rincian sebagai berikut:

Tahap	Bulan	Jumlah Kabupaten	Jumlah KPM
Tahap 1	Juni 2019	93	2.393.509
Tahap 2	Agustus 2019	83	1.379.248
Tahap 3	Oktober 2019	119	1.573.232
Jumlah		295	5.345.989


Adapun dasar kebijakan perluasan program BPNT tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Lampiran Risalah pada Surat Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial No. B-237/D-II/KPS.01.00/02/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal hasil kesepakatan koordinasi teknis persiapan dan konsinyering perluasan BPNT 2019 menyatakan rekomendasi wilayah dan waktu pentahapan pelaksanaan BPNT tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap.
- b. Surat edaran Menteri Sosial No. 01/MS/K/07/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Perum Bulog sebagai penyedia komoditas bantuan pangan non tunai menyatakan, mulai September 2019 Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan dilaksanakan diseluruh kabupaten kota se-Indonesia.

F.10 Informasi terkait Barang Kadaluarsa pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

Berdasarkan surat pengajuan penghapusan barang persediaan (*bufferstock*) Nomor 44/3.1/PL.05.03/01/2020 tanggal 8 Januari 2020 perihal Persetujuan Penghapusan/Pemusnahan Barang Persediaan (*bufferstock*) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, terdapat barang yang sudah kadaluarsa dan sedang dalam proses pemusnahan dengan rincian barang sebagai berikut:

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA BARANG PERSEDIAAN (BUFFER STOCK) YANG DISETUJUI UNTUK DIHAPUSKAN PADA DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM									
No	Nama Barang	Gudang			Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Total	Keterangan
		Bekasi	Palembang	Makassar					
1	Makanan Anak Tahun 2018	-	200	-	Paket	200	59,532	11,906,400	Exp. Juni 2019 (biscuit gandum dan biscuit susu), Exp. Juli 2019 (biscuit roma marie susu)
2	Mie Instan	32,520	12,600	31,000	Bks	76,120	1,826	138,995,120	Exp. Oktober 2019
3	Lauk Pauk	34,673	600	5,000	Botol	40,273	4,355	175,388,915	Exp. 17 Oktober 2019 (sambel pedas)
								326,290,435	

Sekretaris,

 Justina Dwi Noviantari

F. 11 Barang Milik Negara berupa Aset Bersejarah (*Heritage Asset*)

Pada Kementerian Sosial RI terdapat barang bersejarah sebanyak 5 (lima) unit pada satuan kerja:

1. Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial sebanyak 2 (dua) unit di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata berupa gerbang utama TMPN yang dibangun pada tahun 1953 dan didesain oleh arsitek Masyhur Frederich Silaban.
2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial sebanyak 2 (dua) unit.
3. Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik "Prof. Dr. Soeharso" di Surakarta sebanyak 1 (satu) Unit.

F.12 Pengungkapan atas Program Percepatan Penurunan *Stunting*

Menindaklanjuti surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-129/PB/2020 tentang Pengungkapan Lebih Lanjut atas Program Percepatan Penurunan *Stunting* pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019, Kementerian Sosial diharapkan untuk mengungkapkan pagu dan realisasi atas kegiatan yang berkaitan dengan Program Percepatan Penurunan *Stunting*. Program percepatan penurunan *stunting* di Kementerian Sosial meliputi program pemberian bantuan tunai bersyarat pada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, program bantuan sosial pangan pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, dan program pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi pendamping program bantuan tunai bersyarat. Rincian pagu dan realisasi dari masing-masing program adalah sebagai berikut:

No.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	Pagu	Realisasi	%
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
A	Jenis Intervensi (Intervensi Gizi Spesifik/Intervensi Gizi Sensitif/Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis)			
027 05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
07	2251 Jaminan Sosial Keluarga			
	1 Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Tunai Bersyarat	32.747.075.217.000	32.746.113.550.000	100,00%
5873	Penanganan Fakir Miskin Wilayah I			
	003 KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan	7.274.806.140.000	7.123.262.134.377	97,92%
5874	Penanganan Fakir Miskin Wilayah II			
	002 KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan	6.918.728.247.000	6.772.282.498.406	97,88%
5875	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III			
	003 KPM Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pangan	6.395.076.532.000	5.805.900.031.610	90,79%
B	Jenis Intervensi (Intervensi Gizi Spesifik/Intervensi Gizi Sensitif/Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis)			
027 11	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial			
04	2254 Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional (I-VI)			
	2 Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Pendamping Program Bantuan Tunai Bersyarat	197.705.664.000	195.372.558.967	98,82%
	TOTAL	53.533.391.800.000	52.642.930.773.360	98,34%

F.13 Penjelasan Dampak Penanganan Pandemi COVID-19

Pada bulan Maret 2020, Pemerintah Indonesia mulai mengumumkan adanya masyarakat yang terdeteksi Covid-19. Sejak saat itu, Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan khusus terkait dengan Penanganan Covid-19 dan membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pada tanggal 14 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menyatakan Pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional yang sebelumnya PBB juga telah mengumumkan Covid-19 sebagai *Pandemic Global*.

Upaya pencegahan yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden ialah dengan memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH), baik untuk Kementerian Negara/Lembaga maupun perusahaan-perusahaan swasta. Membatasi aktivitas-aktivitas bertatap muka, melakukan rapat/pertemuan menggunakan video conference, dan mengalokasikan anggaran belanja negara untuk upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Kementerian Sosial dalam hal ini merespon dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bekerja di Kantor dan Bekerja



dari Rumah (*Work From Home*) bagi ASN Kementerian Sosial dalam rangka antisipasi pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19.

Penanganan pandemi Covid-19 juga berdampak pada penghematan anggaran sesuai dengan Perpres No 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 189.1/KMK/02/2020 tentang Rincian Anggaran dan Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020 yang disahkan dengan Surat Kementerian Keuangan NoS-714/AG/2020 Hal: Pengesahan Revisi Penghematan Anggaran pada Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2020 dan dirinci sebagai berikut:

Unit Kerja Eselon I	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Penghematan
Sekretariat Jenderal	467.946.558.000	340.307.494.000	127.639.064.000
Inspektorat Jenderal	46.550.770.000	32.550.770.000	14.000.000.000
Ditjen Pemberdayaan Sosial	391.757.849.000	261.757.849.000	130.000.000.000
Ditjen Rehabilitasi Sosial	961.906.496.000	881.906.496.000	80.000.000.000
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	42.951.070.025.000	42.411.332.725.000	539.737.300.000
Ditjen Penanganan Fakir Miskin	60.934.883.200.000	59.900.383.200.000	1.034.500.000.000
Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial	525.220.148.000	370.220.148.000	155.000.000.000
Total	106.279.335.046.000	104.198.458.682.000	2.080.876.364.000

Akibat penghematan pada belanja tersebut, maka terdapat potensi terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada tahun anggaran 2020, hal ini disebabkan karena Pekerjaan Perencanaan telah dilaksanakan sedangkan pekerjaan fisik, dan pengawasannya masuk dalam anggaran yang terkena dampak penghematan. KDP tersebut diperkirakan akan muncul di laporan Keuangan tahun 2020, namun demikian komitmen terhadap pekerjaan yang tertunda karena penghematan akibat pandemi Covid 19 akan tetap dilanjutkan apabila tahun mendatang mendapatkan alokasi belanja modal yang memadai.

Dampak penanganan Covid-19 terhadap penghematan belanja barang perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, dan belanja non operasional lainnya serta belanja barang lainnya yang terhambat dapat ditunda di tahun anggaran berikutnya, hal ini berpengaruh secara simultan dengan pembatasan dan penundaan pencairan anggaran yang mengakibatkan kewajiban kepada pihak ke 3 berpotensi belum dapat diselesaikan dan kegiatan lain yang sudah dilaksanakan tidak dapat direalisasikan secara keuangan.

Pembatasan aktivitas-aktivitas bertatap muka, melakukan rapat/pertemuan menggunakan video conference, dan mengalokasikan anggaran belanja negara untuk upaya pencegahan penyebaran Covid-19 akan berpotensi terhadap mengakibatkan turunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang signifikasinya bersumber dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan serta Pendapatan Perizinan Lainnya. Penerimaan Hibah Langsung juga berpotensi terdampak karena pembatasan aktivitas sosial yang proses operasionalnya melibatkan pihak ketiga baik dari donor pemberi hibah maupun Kementerian Keuangan sebagai lembaga yang menangani proses Pengesahan Hibah Langsung dalam Negeri.

F.14 Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang, Belanja Bantuan Sosial Pangan dan Program Keluarga Harapan Tahun 2019 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sosial dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, dan Riau sesuai LHP No. 280/HP/XVI/12/2019

1. *Informasi terkait Tindak Lanjut Temuan PDDT BPK.* Pada satker BBPPKS Lembang di Bandung terdapat temuan PDDT BPK tahun 2019 terkait adanya kelebihan pembayaran Belanja Barang kegiatan diklat P2K2 FDS pada beberapa pihak penyedia sebesar Rp2.773.967.268 yang harus dikembalikan ke kas negara. Pada tahun 2020, telah dilakukan penyetoran ke kas negara dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Penyetoran ke Kas Negara (Rp)	Saldo (Rp)	Tgl Setor	No NTPN
1	Total temuan	-	2.773.967.268	-	-
2	Pengembalian kelebihan pembayaran sewa peralatan Diklat FDS	167.682.036	2.606.285.232	16/01/2020	2DB000N9UUS74GC2
3	Pengembalian kelebihan pembayaran paket fullboard meeting luar kota Diklat FDS	92.160.000	2.514.125.232	16/01/2020	1DE852G4UK1104BC
4	Pengembalian kelebihan pembayaran pertengkapan peserta Diklat FDS	41.688.000	2.472.437.232	23/01/2020	5118C7QLTJFJOCS4
5	Pengembalian kelebihan pembayaran paket fullboard meeting dalam kota Diklat FDS	130.000.000	2.342.437.232	23/01/2020	082637QLTJFJOB8S
6	Pengembalian kelebihan pembayaran paket fullboard meeting dalam kota Diklat FDS	100.000.000	2.242.437.232	27/01/2020	3806F55DE3OHK3QT
7	Pengembalian kelebihan pembayaran sewa kendaraan PBL Diklat FDS	16.646.768	2.225.790.464	28/01/2020	96AF348VU966B6PK
8	Pengembalian kelebihan pembayaran sewa peralatan Diklat FDS	24.937.000	2.200.853.464	28/01/2020	B54F53CIEEJPU5L1
9	Pengembalian kelebihan pembayaran paket fullboard meeting luar kota Diklat FDS	100.000.000	2.100.853.464	24/03/2020	003C755DE3UDI6AH
10	Pengembalian kelebihan pembayaran paket fullboard meeting dalam kota Diklat FDS	133.000.000	1.967.853.464	06/04/2020	A4A0648VU9ED3DJ0
Total Setoran		806.113.804			

Berdasarkan rincian penyetoran diatas, dari saldo temuan sebesar Rp2.773.967.268 telah disetorkan ke kas negara secara diangsur sebesar Rp806.113.804, sehingga masih terdapat sisa saldo temuan sebesar Rp1.967.853.464 yang masih dalam proses tindak lanjut.

2. Terdapat pengembalian Kelebihan Belanja Bahan Akomodasi Peserta Diklat FDS sebesar Rp514.526.760 pada satker BBPPKS Yogyakarta.

3. Terdapat beberapa pengembalian belanja atas temuan BPK pada satker Politeknik Kesejahteraan Sosial – Bandung dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pengembalian Belanja Honor Jasa Profesi atas temuan PDTT BPK sebesar Rp35.155.000.
 - 2) Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin atas Temuan BPK sebesar Rp9.088.639.
 - 3) Pengembalian Belanja Bahan Kegiatan Wisuda atas Temuan BPK sebesar Rp16.225.430.
 - 4) Pengembalian Belanja Sewa Kendaraan Dinas TA 2019 atas Temuan BPK sebesar Rp62.620.000.

F.15 Pengungkapan Penting Lainnya

1. Sekretariat Jenderal

- a. Terdapat kekurangan volume pekerjaan Pembuatan Partisi Ruang Pantry, Ruang Rapat, Ruang Center File, dan Mushola Bagian Perlengkapan pada Biro Umum Sekretariat Jenderal sebesar Rp21.573.650.
- b. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor: 90C/LHP/XVI/05/2018 tanggal 14 Mei 2018 nomor 1.2.2 terdapat temuan pada Satker Sekretariat Jenderal (unit kerja Biro Umum) atas belanja barang untuk operasional pemeliharaan kendaraan dinas dilingkungan Biro Umum yang tidak mempedomani mekanisme pertanggungjawaban Uang Persediaan dan terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp.529.641.315. Kemudian diterbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Nomor: 1468/1.5/PPK.01/5/2019 tanggal 27 Mei 2019 yang berisi bahwa atas temuan ini dibebankan kepada Kepala Biro Umum untuk melakukan pengembalian ke kas negara selama 24 kali setoran terhitung sejak Bulan Juni 2019 s.d Juni 2021. Sampai dengan bulan Maret 2020, telah dilakukan 12 kali penyetoran dengan total Rp.189.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Penyetoran atas TLHP BPK Tahun 2018
 Satker Sekretariat Jenderal*

No	Uraian	Mutasi		Saldo (Rp)	Tgl Setor	No NTPN
		Tambah	Kurang			
1	Saldo awal	-	-	529.641.315	-	-
2	Cicilan ke 1	-	50.000.000	479.641.315	17/06/2019	694684DD01LBH74P
3	Cicilan ke 2	-	10.000.000	469.641.315	29/07/2019	E687748VU0E20TV8
4	Cicilan ke 3	-	10.000.000	459.641.315	16/08/2019	FDE9F0N9UM741J2M
5	Cicilan ke 4	-	10.000.000	449.641.315	17/09/2019	977963CIE619E6UR
6	Cicilan ke 5	-	10.000.000	439.641.315	07/10/2019	DC5B36U8DGDH0CVU
7	Cicilan ke 6	-	21.000.000	418.641.315	23/10/2019	73ADC6U8DGE0U1VD
8	Cicilan ke 7	-	10.000.000	408.641.315	08/11/2019	9C5C00N9UMFQNMV
9	Cicilan ke 8	-	10.000.000	398.641.315	03/12/2019	BDA372G4UBNEBAGV
10	Cicilan ke 9	-	28.000.000	370.641.315	10/12/2019	718E12G4UBNKN3PM
11	Cicilan ke 10	-	10.000.000	360.641.315	06/01/2020	7F2957QLTJF2P4SU
12	Cicilan ke 11	-	10.000.000	350.641.315	06/02/2020	C7D450N9UUUVDF0
13	Cicilan ke 12	-	10.000.000	340.641.315	06/03/2020	DEB643CIEEP44QKL
Total Setoran			189.000.000			

Berdasarkan rincian penyetoran diatas, masih terdapat sisa temuan yang masih harus dilunasi hingga maksimal Juni 2021 sebesar Rp.340.641.315.



2. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

- a. Terdapat selisih pencatatan lebih/kurang antara catatan persediaan HTT Direktorat PSDBS dengan catatan persediaan di Dinas Sosial.
- b. Terdapat potensi persediaan dari HTT/HTDP yang tidak dilaporkan kepada Kementerian Sosial. Data SIMPPSDBS menunjukkan bahwa selama Tahun 2019, terdapat 2.274 kegiatan penyelenggaraan UGB, namun hanya sebanyak 457 kegiatan yang sudah didukung laporan penyelenggaraan dan sebanyak 1.817 kegiatan yang belum didukung laporan penyelenggaraan.
- c. Terdapat proses pinjam pakai yang tidak sesuai prosedur, yaitu di Dinsos Provinsi Papua terdapat pinjam pakai 2 unit motor scoopy dimana Berita Acara Pinjam Pakai (BAPP) diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua bukan oleh Direktur PSDBS. Satu unit motor tersebut saat ini berada di Polda Provinsi Papua karena terkena razia kendaraan pada 16 Oktober 2019 akibat belum memiliki STNK.
- d. Nilai dana UKS dari penyelenggaraan UGB yang telah jatuh tempo namun per 31 Desember 2019 belum diterima dari Penyelenggara UGB sebesar Rp1.138.301.735 belum dilakukan pencatatan.
- e. Penerima Bantuan Sosial dari Dana Hibah Langsung Dalam Negeri (HLDN) Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Tahun 2019 sampai dengan 6 Februari 2020 belum mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Sosial yang diterima secara tertulis didukung bukti-bukti yang sah sebesar Rp31.455.620.500.
- f. Penerima Bantuan Sosial dari Dana HLDN UKS Tahun 2018 sampai dengan 28 Februari 2020 belum mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Sosial yang diterima secara tertulis didukung bukti-bukti yang sah sebesar Rp1.080.001.000.
- g. Penerima Bantuan Sosial dari Dana HLDN UKS Tahun 2017 sampai dengan 28 Februari 2020 belum mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Sosial yang diterima secara tertulis didukung bukti-bukti yang sah sebesar Rp701.458.000.
- h. Terdapat Biaya Perizinan Tahun 2019 yang per 31 Desember 2019 telah ada hak tagih namun belum diterima dari Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) atau Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) terkait Biaya Perizinan dan Biaya Promosi sebesar Rp29.600.000 pada satker Dit. PSDBS. Atas potensi piutang tersebut belum dilakukan pencatatan akuntansi yang memadai, sehingga belum dapat disajikan dalam Laporan Keuangan.
- i. *Informasi Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS)*. Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2014 atas Pekerjaan Pengadaan Personalisasi dari pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) Tahun 2013 yang berasal dari anggaran safeguarding yang ada di Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh PT. POS Indonesia senilai Rp1.452.128.870 belum sesuai dengan ketentuan dan masih dalam proses tindak lanjut oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.

3. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak sebesar Rp1.053.407.538,49 dan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp176.187.979,20 pada Pembangunan Pusat Rehabilitasi Sosial ODHIV di Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan oleh PT Arus Jaya (AJ), sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 04/PPK/SET-RS/07/2019 tgl 1 Juli 2019, dengan Addendum Kontrak Nomor 110/PPK/SET-RS/11/2019 tgl 16 November 2019 dan Addendum Kedua Kontrak Nomor 120/PPK/SET-RS/12/2019 tgl 17 Desember 2019.



4. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pinjam Pakai pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Tahun 2019 tidak memadai dimana belum seluruhnya didukung dengan berita acara pinjam pakai (BAPP), BAPP yang tidak dimutakhirkan, serta perbedaan pencatatan aset pinjam pakai Direktorat PSKBA dengan fisik yang sebenarnya.
- b. Terdapat kelemahan pengendalian dalam pengelolaan bansos PKH, diantaranya dalam hal penggunaan rekening penampungan yang tidak diinformasikan kepada Kemensos, pelaporan dan tindak lanjut penelitian atas KKS tidak terdistribusi dan KPM tidak bertransaksi tidak memadai, serta rekonsiliasi yang belum optimal, berdampak pada penyaluran bansos non tunai PKH menjadi tidak sesuai ketentuan, yaitu.
 - 1) Terdapat saldo dana bansos PKH di rekening penampungan BRI dan Bank Mandiri per 31 Desember 2019 yang tidak didukung dengan penjelasan dan bukti yang memadai sebesar Rp159.508.582;
 - 2) Nilai saldo bansos PKH yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp305.872.453.426;
 - 3) Nilai saldo bansos PKH per 31 Desember 2019 yang berpotensi sebagai hak negara sebesar Rp150.940.755.833;
 - 4) Penyaluran bansos PKH yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp5.016.609.286 dan tidak dapat dilakukan pengujian untuk meyakini kelayakan penyalurannya sebesar Rp20.817.426.423.
- c. Pembayaran honorarium SDM PKH tidak sesuai dengan SBML Tahun 2019 periode Maret s.d. September berdasarkan LHP No. 280/HP/XVI/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp25.003.653.000 dan untuk periode Oktober s.d. Desember sebesar Rp9.217.749.500.
- d. Terdapat penitipan uang tunai di brankas bendahara pengeluaran atas dana bansos hibah pada satker Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
- e. Persediaan dalam rangka bantuan sosial di Provinsi DKI Jakarta yang disajikan dalam Neraca per 31/12/2019 sebesar Rp1.109.817.373 tidak dapat diyakini kewajarannya karena pencatatan persediaan yang tidak akurat sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung mundur saldo persediaan ke posisi tanggal 31 Desember 2019 pada satker Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
- f. Terdapat pengembalian Dana Bansos PKH, KPM Ganda TL LHP BPKP tahun 2017 yang disetor tahun 2020 Kab.Lombok Timur Prov. NTB sebesar Rp65.839.855 pada satker Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.
- g. Informasi terkait Tindak Lanjut atas Rekonsiliasi Penyaluran Dana Bantuan Sosial PKH Tahun 2018. Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat selisih atas Penyaluran Dana Bantuan Sosial yang masih dalam proses Rekonsiliasi antara Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dengan Himbara sebesar Rp1.267.842.369 dengan perincian sebagai berikut:



Keterangan	Nominal
Nilai SP2D	17.520.807.749.200
Penyaluran ke KPM	17.447.236.721.850
Data Rekening RPL	31.740.135.105
SSPB	54.390.734.614
Pemulihan Pagu	11.292.000.000
Selisih	(1.267.842.369)

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut:

URAIAN	PAGU (Rp)	SERAPAN (Rp)	PENYALURAN KE TABUNGAN	SELISIH	PENGEMBALIAN BELANJA	REK ESCROW DAN RPL
PAGU BANTUAN	17,520,807,819,000					
BNI						
Tahap I		2,063,952,000,000	2,053,912,500,000	10,039,500,000	1,547,000,000	8,492,500,000
Tahap II		2,049,965,000,000	2,037,881,500,000	12,083,500,000	2,884,500,000	9,199,000,000
Tahap III		2,054,597,000,000	2,044,044,500,000	10,552,500,000	40,000,000	10,512,500,000
Tahap IV		1,143,298,553,750	1,143,281,403,700	17,150,050	17,150,050	-
Total BNI		7,311,812,553,750	7,279,119,903,700	32,692,650,050	4,488,650,050	28,204,000,000
BRI						
Tahap I		1,948,578,500,000	1,936,257,500,000	12,321,000,000	12,321,000,000	-
Tahap II		1,942,439,500,000	1,916,699,500,000	25,740,000,000	25,740,000,000	-
Tahap III		1,939,557,500,000	1,930,227,500,000	9,330,000,000	9,330,000,000	-
Tahap IV		1,058,155,496,050	1,058,133,507,100	21,988,950	21,988,950	-
Total BRI		6,888,730,996,050	6,841,318,007,100	47,412,988,950	47,412,988,950	-
MANDIRI						
Tahap I		770,696,000,000	770,545,918,500	150,081,500	11,500,000	138,581,500
Tahap II		780,831,500,000	780,656,650,000	174,850,000	14,000,000	160,850,000
Tahap III		818,657,000,000	817,877,285,190	779,714,810	364,000,000	415,714,810
Tahap IV		438,286,364,750	437,382,070,050	904,294,700	5,593,350	898,701,350
Total MANDIRI		2,808,470,864,750	2,806,461,923,740	2,008,941,010	395,093,350	1,613,847,660
BTN						
Tahap I		155,434,500,000	154,936,000,000	498,500,000	442,000,000	40,500,000
Tahap II		147,265,500,000	144,435,905,000	2,829,595,000	1,855,595,000	977,630,000
Tahap III		144,886,500,000	144,469,000,000	417,500,000	91,500,000	325,500,000
Tahap IV		75,498,834,650	75,263,825,000	235,009,650	-	235,209,650
Total BTN		523,085,334,650	519,104,730,000	3,980,604,650	2,389,095,000	1,578,839,650
Grand Total	17,520,807,819,000	17,532,099,749,200	17,446,004,564,540	86,095,184,660	54,685,827,350	31,396,687,310

Total pengembalian belanja pada tabel di atas adalah nilai pengembalian belanja yang sudah dikurangi dengan pemulihan pagu (Rp54.390.734.614-Rp11292.000.000 = Rp43.098.734.614).

Berdasarkan data di atas, terdapat nominal penyaluran pada Bank Mandiri dimana nominal penyaluran tahap I dan III lebih besar daripada SP2D. Hal ini dijelaskan oleh Bank Mandiri pada saat rekonsiliasi terakhir bahwa nominal penyalurannya bukan seperti yang tertuang di tabel diatas. Selanjutnya HIMBARA diminta untuk memberikan data penyaluran yang benar kepada Subdit Bansos.

Setelah rekonsiliasi beberapa kali dengan pihak HIMBARA, data penyaluran di atas adalah **bukan data penyaluran yang final untuk periode 31 Desember 2018**. Sehingga Subdit Bansos meminta data penyaluran final per 31 Desember 2018, dengan hasil sebagai berikut:



URAIAN	PAGU (Rp)	SERAPAN (Rp)	PENYALURAN KE TABUNGAN	SELISIH	PENGEMBALIAN BELANJA	REK ESCROW DAN RPL
PAGU BANTUAN	17,520,807,819,000					
BNI						
Tahap I		2,063,952,000,000	2,053,912,500,000	10,039,500,000	1,547,000,000	8,492,500,000
Tahap II		2,049,965,000,000	2,037,881,500,000	12,083,500,000	2,884,500,000	9,199,000,000
Tahap III		2,054,597,000,000	2,044,044,500,000	10,552,500,000	40,000,000	10,512,500,000
Tahap IV		1,143,298,553,750	1,143,281,403,700	17,150,050	17,150,050	-
Total BNI		7,311,812,553,750	7,279,119,903,700	32,692,650,050	4,488,650,050	28,204,000,000
BRI						
Tahap I		1,948,578,500,000	1,936,257,500,000	12,321,000,000	12,321,000,000	
Tahap II		1,942,439,500,000	1,916,699,500,000	25,740,000,000	25,740,000,000	
Tahap III		1,939,557,500,000	1,930,227,500,000	9,330,000,000	9,330,000,000	
Tahap IV		1,058,155,496,050	1,058,133,507,100	21,988,950	21,988,950	
Total BRI		6,888,730,996,050	6,841,318,007,100	47,412,988,950	47,412,988,950	-
MANDIRI						
Tahap I		770,696,000,000	770,545,918,500	150,081,500	11,500,000	138,581,500
Tahap II		780,831,500,000	780,656,650,000	174,850,000	14,000,000	160,850,000
Tahap III		818,657,000,000	817,877,285,190	779,714,810	364,000,000	415,714,810
Tahap IV		438,286,364,750	437,382,070,050	904,294,700	5,593,350	898,701,350
Total MANDIRI		2,808,470,864,750	2,806,461,923,740	2,008,941,010	395,093,350	1,613,847,660
BTN						
Tahap I		155,434,500,000	154,936,000,000	498,500,000	442,000,000	40,500,000
Tahap II		147,265,500,000	144,435,905,000	2,829,595,000	1,855,595,000	977,630,000
Tahap III		144,886,500,000	144,469,000,000	417,500,000	91,500,000	325,500,000
Tahap IV		75,498,834,650	75,263,825,000	235,009,650	-	235,209,650
Total BTN		523,085,334,650	519,104,730,000	3,980,604,650	2,389,095,000	1,578,839,650
Grand Total	17,520,807,819,000	17,532,099,749,200	17,446,004,564,540	86,095,184,660	54,685,827,350	31,396,687,310

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Nominal penyaluran dari bank ke KPM berubah dari Rp17.447.236.721.850 menjadi Rp17.446.004.564.540. Sehingga nilai selisih antara SP2D dengan nominal penyaluran juga berubah, dari Rp84.863.027.350 menjadi Rp86.095.184.660.
- 2) Nominal dana Bansos PKH yang ada di rekening penampungan terdapat perbedaan karena bank melaporkannya sebesar Rp31.396.687.310 sedangkan yang tercatat dalam data sebelumnya adalah senilai Rp31.740.135.105, sehingga terjadi selisih sebesar Rp343.447.795. Selisih ini menurut Bank Mandiri adalah dana yang di luar dana penyaluran bansos PKH 2018.
- 3) Namun, untuk data pengembalian belanja yang ada di Simponi dengan nominal belanja sesuai pengakuan bank ada perubahan, dimana bank melaporkan yang sudah dikembalikan senilai Rp54.685.827.350 sedangkan di Simponi sebesar Rp54.390.734.614 sehingga perlu ditelusuri lagi dengan bukti setor yang ada dari bank.
- 4) Jumlah selisih antara SP2D dengan penyaluran adalah nominal pengembalian belanja ditambah nominal dana di rekening penampungan adalah sebesar Rp12.670.000 dijelaskan sebagai berikut:

Selisih Penyaluran dengan SP2D	=	Pengembalian Belanja	+	Dana PKH di Rek Penampung
86,095,184,660	=	54,685,827,350	+	31,396,687,310
86,095,184,660	=	86,082,514,660		
Selisih	=	12,670,000		

Jumlah selisih Rp12.670.000 dijelaskan dalam surat BTN Nomor: 09/S/SQND/GP/I/2019 tanggal 17 Januari 2019.

Penelusuran pengembalian belanja di Simponi (Sistem Informasi PNPB Online) 2018 dengan yang dilaporkan oleh bank, terdapat selisih seperti dalam tabel di bawah ini:

Asal Dana Pengembalian	Simponi	Bank
BNI	4,488,650,050	4,488,650,050
BNI (dana di luar RPL & Escrow)	90,253,414	
BRI	47,412,988,950	47,412,988,950
BRI (dana di luar RPL & Escrow)	44,248,850	
Mandiri	395,593,350	395,093,350
Mandiri (dana di luar RPL & Escrow)	812,000,000	500,000
BTN	1,147,000,000	2,389,095,000
Total	54,390,734,614	54,686,327,350
	Selisih	295,592,736

Dari tabel di atas, dapat diinformasikan hal – hal sebagai berikut :

- 1) BNI melaporkan pengembalian belanja hanya sebesar Rp4.488.650.050 sedangkan di Simponi ada kelebihan sebesar Rp90.253.414 karena ini adalah pengembalian belanja yang asal dananya dari KPM dan dikolektif oleh Dinsos (KPM NE).
- 2) BRI melaporkan pengembalian belanja hanya sebesar Rp47.412.988.950 sedangkan di Simponi ada kelebihan sebesar Rp44.248.850 karena ini adalah pengembalian belanja yang asal dananya dari KPM dan dikolektif oleh Dinsos (KPM NE).
- 3) Bank Mandiri melaporkan pengembalian sebesar Rp395.093.350 yang disetorkan melalui RPL dan Rp500.000 didebit dari rekening KPM, maka bagi bank dianggap sudah penyaluran. Sedangkan di Simponi masih ada kelebihan Rp812.000.000 yang asal dananya seperti BNI dan BRI yang pengembaliannya langsung dari KPM dan dikolektif oleh Dinsos (KPM NE).
- 4) Setelah dicek kembali, ada pengembalian sebesar Rp1.249.068.572 di tahun 2018 tetapi masuk dalam pencatatan pengembalian belanja Tahun Anggaran- Untuk BTN, berbeda kasus karena di Simponi hanya mencatat pengembalian sebesar Rp1.147.000.000 sedangkan bank melaporkan pengembalian sebesar Rp2.389.095.000 sehingga terjadi selisih sebesar Rp1.242.095.000.
- 5) Berdasarkan surat nomor : 1360/LJS.JSK.TU/07/2018 perihal penyetoran dana bansos ke kas negara, terdapat temuan BPK tahun 2017 senilai Rp1.249.068.572 sehingga Dit. JSK memberikan persetujuan kepada BTN untuk pengurangan bantuan kepada KPM yang melakukan transaksi ganda di Tahap II. Dari nominal pengembalian belanja tersebut, termasuk di dalamnya adalah nominal pengurangan bantuan kepada KPM senilai Rp1.242.095.000.

Setelah dilakukan pengecekan pengembalian belanja tahun 2018 di atas dan disesuaikan kembali dengan data yang berasal dari HIMBARA, perhitungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



URAIAN	PAGU (Rp)	SERAPAN (Rp)	PENYALURAN KE TABUNGAN	SELISIH	PENGEMBALIAN BELANJA	REK ESCROW DAN RPL
PAGU BANTUAN	17,520,807,819,000					
BNI						
Tahap I		2,063,952,000,000	2,053,912,500,000	10,039,500,000	1,547,000,000	8,492,500,000
Tahap II		2,049,965,000,000	2,037,881,500,000	12,083,500,000	2,884,500,000	9,199,000,000
Tahap III		2,054,597,000,000	2,044,044,500,000	10,552,500,000	40,000,000	10,512,500,000
Tahap IV		1,143,298,553,750	1,143,281,403,700	17,150,050	17,150,050	-
Total		7,311,812,553,750	7,279,119,903,700	32,692,650,050	4,488,650,050	28,204,000,000
Tambahan Pengembalian Belanja					90,253,414	
Total BNI		7,311,812,553,750	7,279,029,650,286	32,782,903,464	4,578,903,464	28,204,000,000
BRI						
Tahap I		1,948,578,500,000	1,936,257,500,000	12,321,000,000	12,321,000,000	
Tahap II		1,942,439,500,000	1,916,699,500,000	25,740,000,000	25,740,000,000	
Tahap III		1,939,557,500,000	1,930,227,500,000	9,330,000,000	9,330,000,000	
Tahap IV		1,058,155,496,050	1,058,133,507,100	21,988,950	21,988,950	
Total		6,888,730,996,050	6,841,318,007,100	47,412,988,950	47,412,988,950	-
Tambahan Pengembalian Belanja					44,248,850	
Total BRI		6,888,730,996,050	6,841,273,758,250	47,457,237,800	47,457,237,800	-
MANDIRI						
Tahap I		770,696,000,000	770,545,918,500	150,081,500	11,500,000	138,581,500
Tahap II		780,831,500,000	780,656,650,000	174,850,000	14,000,000	160,850,000
Tahap III		818,657,000,000	817,877,285,190	779,714,810	364,000,000	415,714,810
Tahap IV		438,286,364,750	437,382,070,050	904,294,700	5,593,350	898,701,350
Total		2,808,470,864,750	2,806,461,923,740	2,008,941,010	395,093,350	1,613,847,660
Tambahan Pengembalian Belanja					812,500,000	
Total Mandiri		2,808,470,864,750	2,805,649,423,740	2,821,441,010	1,207,593,350	1,613,847,660
BTN						
Tahap I		155,434,500,000	154,936,000,000	498,500,000	442,000,000	40,500,000
Tahap II		147,265,500,000	144,435,905,000	2,829,595,000	1,855,595,000	977,630,000
Tahap III		144,886,500,000	144,469,000,000	417,500,000	91,500,000	325,500,000
Tahap IV		75,498,834,650	75,263,825,000	235,009,650	-	235,209,650
Total		523,085,334,650	519,104,730,000	3,980,604,650	2,389,095,000	1,578,839,650
Pengembalian Belanja TAYL yang asalnya dari mengurangi bantuan KPM					1,242,095,000	
Total BTN		523,085,334,650	520,346,825,000	2,738,509,650	1,147,000,000	1,578,839,650
Grand Total	17,520,807,819,000	17,532,099,749,200	17,446,299,657,276	85,800,091,924	54,390,734,614	31,396,687,310

- h. Berdasarkan tabel di atas, untuk BNI, BRI dan Bank Mandiri pengembalian belanja menurut laporan bank sudah ditambahkan dengan yang ada di Simponi dan ini berarti mengurangi jumlah penyaluran dari bank ke KPM. Untuk selisih dana antara penyaluran dan pengembalian belanja dan sisa dana di rekening penampungan sudah balance. Sedangkan untuk BTN, karena bank melaporkan pengembalian belanjanya lebih besar senilai Rp1.242.095.000 yang sebenarnya adalah pengembalian untuk tahun 2017 (pengurangan bantuan kepada KPM) maka pada hitungan tabel di atas justru mengurangi nominal pengembalian belanja dan menambah nominal penyaluran bansos PKH 2018.

5. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin

Pengendalian atas pengelolaan dana BPNT belum memadai dimana terdapat beberapa rekening penampungan yang digunakan oleh bank penyalur namun tidak terinformasikan kepada Kemensos, proses rekonsiliasi antara Kemensos dengan Bank Penyalur belum berjalan optimal, dan antar bank penyalur belum saling melaksanakan rekonsiliasi untuk memastikan kebenaran transaksi penyaluran dan saldo dana yang terdapat di rekening. Kelemahan tersebut mengakibatkan:

- a. Kas Lainnya dan Setara Kas belum dapat disajikan seluruhnya
 - 1) Nilai saldo di rekening *escrow* Tahun 2017 dan di rekening *escrow* Tahun 2018 per 31 Desember 2019 pada BRI belum didukung dengan rincian *by name by address*;
 - 2) Terdapat saldo dana BPNT per 31 Desember 2019 di rekening bank penyalur yang belum dapat dijelaskan, yaitu saldo di rekening Simsem Bank Mandiri sebesar Rp332.314.761. Saldo ini terindikasi merupakan *time out transaction* atas KPM dari bank penyalur lainnya yang bertransaksi menggunakan agen Bank Mandiri.
 - 3) Terdapat saldo BPNT di rekening bank penyalur (BRI) yang belum dapat dijelaskan, yaitu saldo di rekening Simsem BRI per 31 Desember 2018 sebesar

- Rp1.288.940.075.991 dan mutasinya hingga saldo per 31 Desember 2019 menjadi Rp473.330.318. Hal ini menjadikan belum dapat dilakukannya pengujian untuk mengidentifikasi keberadaan hak negara pada rekening Simsem BRI tersebut. Selain itu, data *timeout transaction* yang telah disajikan oleh BRI Tahun 2018 dan Tahun 2019 belum dapat diyakini kelengkapannya.
- b. Terdapat hak negara dari *time out transaction* yang mengendap di rekening agen minimal sebesar Rp13.718.654.336, yang hingga berakhirnya pemeriksaan, belum disetorkan ke Kas Negara. Namun, dari nilai tersebut, masih terdapat hak negara atas *time out transaction* Tahun 2018 yang belum teridentifikasi di BRI untuk wilayah I yang hingga saat pemeriksaan berakhir belum dapat disajikan karena keterbatasan data. Selain itu, terdapat saldo *time out transaction* KPM BTN belum diketahui keberadaannya di agen bank penyalur karena belum dilakukan rekonsiliasi.
 - c. Nilai Beban Bantuan Sosial yang sewajarnya per 31 Desember 2019 menjadi tidak dapat disajikan karena terdapat pembatasan lingkup pengujian untuk menetapkan nilai wajar Kas Lainnya dan Setara Kas, yang menjadi salah satu komponen pembentuk nilai Beban Bantuan Sosial.
 - d. Dana BPNT yang harus disetorkan ke Kas Negara adalah sebesar Rp1.209.770.156.391.
 - e. Terdapat penyaluran BPNT yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.384.118.129.

6. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial

- a. Proses pengadaan tanah pada Kampus II Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Tahun 2019 sebesar Rp72.449.805.888 tidak sesuai ketentuan, dimana terdapat perbedaan luasan bidang tanah antara luasan bidang tanah hasil pemeriksaan fisik dengan luasan bidang tanah yang dijadikan dasar pembayaran ganti rugi.
- b. Hasil verifikasi Inspektorat atas tindak lanjut LHP No. 280/HP/XVI/12/2019 terkait Belanja Barang pada Kegiatan Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) *Family Development Session* (FDS) di BBPPKS Bandung Tahun 2019 mengungkapkan beberapa hal sebagai berikut.
 - 1) Verifikasi dilakukan terhadap dana yang masuk ke rekening sebesar Rp8.277.152.279 dan dari dana tersebut, diperoleh bukti pengeluaran riil hanya sebesar Rp7.260.147.474. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengeluaran untuk menunjang diklat FDS sebesar Rp4.357.130.587, pengeluaran untuk operasional kantor di luar diklat FDS sebesar Rp1.945.694.903, pengeluaran untuk pribadi sebesar Rp1.341.687.665, dan pengeluaran tidak didukung bukti pertanggungjawaban riil sebesar Rp632.639.124.
 - 2) Terdapat pengadaan konsumsi dinilai tidak wajar dan tumpang tindih sebesar Rp405.290.000, yaitu sebesar Rp247.790.000 untuk Gelombang I s.d. Gelombang VI dan sebesar Rp157.500.000 untuk Gelombang VII s.d. Gelombang XII.
- c. Terdapat belanja barang kegiatan Diklat P2K2 pada BBPPKS Bandung digunakan untuk pengadaan 1 unit laptop merk Lenovo V-310 14LSK namun hingga berakhirnya pemeriksaan bukti pembeliannya belum diperoleh, dan terdapat pengadaan peralatan sebesar Rp56.829.650 namun tidak ditemukan saat pemeriksaan fisik.



- d. Terdapat kekurangan volume pada Pekerjaan Pembuatan Sekat Ruang Widyaiswara di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung Tahun 2019 sebesar Rp8.388.576.
- e. Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak sebesar Rp36.803.532 dan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp133.549.300 pada Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Pusdiklat Kesos yang dilaksanakan oleh PT Eckholm Seraya Pratama (ESP) dengan KSO CV. Tiga Empat (TE) sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 2424/6.1/PL.02.01/10/209 tanggal 30 Oktober 2019 sebesar Rp5.950.000.000 dan Addendum Kontrak Nomor 2833/6.1/PL.02.01/12/209 tanggal 2 Desember 2019 sebesar Rp6.534.550.000

#KEMENSOS
Hadir

LRA FACE E-REKON



www.kemsos.go.id

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.F.W.1
Tanggal : 30/04/20 12:45 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_kl_komparatif --

NO	URAIAN	2019				2018			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	12,026,705,400	516,740,242,519	(504,713,537,119)	4297	11,321,634,000	338,356,086,414	(327,034,452,414)	2989
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	12,026,705,400	516,740,242,519	(504,713,537,119)	4297	11,321,634,000	338,356,086,414	(327,034,452,414)	2989
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	489,387,325,000	480,617,558,411	8,769,766,589	98	483,523,265,000	471,787,790,216	11,735,474,784	98
	BELANJA BARANG	3,814,831,867,000	3,665,853,868,269	148,977,998,731	96	3,663,144,397,000	3,472,332,616,879	190,811,780,121	95
	BELANJA MODAL	322,514,274,000	319,344,518,246	3,169,755,754	99	136,894,897,000	134,171,280,952	2,723,616,048	98
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	54,412,473,325,000	53,260,829,507,155	1,151,643,817,845	98	39,109,574,370,000	37,155,851,182,997	1,953,723,187,003	95
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	59,039,206,791,000	57,726,645,452,081	1,312,561,338,919	98	43,393,136,929,000	41,234,142,871,044	2,158,994,057,956	95
C	PEMBIAYAAN				0				0

#KEMENSOS
Hadir

NERACA FACE E-REKON



www.kemsos.go.id

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 30/04/2020 12:45 AM
lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	67,666,000	211,191,900	(143,525,900)	(67.96)
Kas di Bendahara Penerimaan	0	992,366,000	(992,366,000)	(100.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	2,011,950,360,632	391,775,845,227	1,620,174,515,405	413.55
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	508,490,858	(508,490,858)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	360,334,178,898	343,275,773	359,990,903,125	104,869.30
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(1,801,670,900)	(1,716,386)	(1,799,954,514)	104,868.86
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	358,532,507,998	341,559,387	358,190,948,611	104,869.30
Persediaan	455,884,848,039	451,765,319,891	4,119,528,148	0.91
JUMLAH ASET LANCAR	2,826,435,382,669	845,594,773,263	1,980,840,609,406	234.25
ASET TETAP				
Tanah	18,532,038,706,705	3,495,475,164,694	15,036,563,542,011	430.17
Peralatan dan Mesin	1,904,924,241,165	1,788,554,554,510	116,369,686,655	6.51
Gedung dan Bangunan	1,798,628,848,267	1,513,338,943,015	285,289,905,252	18.85
Jalan, Irigasi dan Jaringan	102,663,682,834	116,099,265,531	(13,435,582,697)	(11.57)
Aset Tetap Lainnya	21,990,010,062	14,798,697,676	7,191,312,386	48.59
Konstruksi Dalam Pengerjaan	281,836,313	623,272,587	(341,436,274)	(54.78)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(1,775,435,334,121)	(1,821,543,916,226)	46,108,582,105	(2.53)
JUMLAH ASET TETAP	20,585,091,991,225	5,107,345,981,787	15,477,746,009,438	303.05
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	98,538,827,706	94,613,896,087	3,924,931,619	4.15
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	549,179,306,589	2,655,138,145	546,524,168,444	20,583.64
Aset Lain-lain	26,297,974,644	27,417,688,583	(1,119,713,939)	(4.08)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(108,775,697,744)	(97,696,354,704)	(11,079,343,040)	11.34
JUMLAH ASET LAINNYA	565,240,411,195	26,990,368,111	538,250,043,084	1,994.23
JUMLAH ASET	23,976,767,785,089	5,979,931,123,161	17,996,836,661,928	300.95
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	4,702,361,654	1,205,917,841	3,496,443,813	289.94
Hibah Yang Belum Disahkan	527,339,126	0	527,339,126	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	1,967,279,648	146,742,000	1,820,537,648	1,240.64
Uang Muka dari KPPN	67,666,000	211,191,900	(143,525,900)	(67.96)
Utang Jangka Pendek Lainnya	10,341,818	0	10,341,818	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7,274,988,246	1,563,851,741	5,711,136,505	365.20
JUMLAH KEWAJIBAN	7,274,988,246	1,563,851,741	5,711,136,505	365.20
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	23,969,492,796,843	5,978,367,271,420	17,991,125,525,423	300.94
JUMLAH EKUITAS	23,969,492,796,843	5,978,367,271,420	17,991,125,525,423	300.94

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
 PER DESEMBER 2019 DAN 2018
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 30/04/2020 12:45 AM
 lap_neraca_kl_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2019	2018	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH EKUITAS	23,969,492,796,843	5,978,367,271,420	17,991,125,525,423	300.94
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	23,976,767,785,089	5,979,931,123,161	17,996,836,661,928	300.95

#KEMENSOS
Hadir

LAPORAN OPERASIONAL E-REKON



www.kemsos.go.id

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 30/04/20 11:53
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	25,193,017,948	19,875,486,431	5,317,531,517	26.754
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	25,193,017,948	19,875,486,431	5,317,531,517	26.754
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	25,193,017,948	19,875,486,431	5,317,531,517	26.754
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	480,563,464,039	471,370,541,398	9,192,922,641	1.95
Beban Persediaan	39,196,178,503	44,271,730,551	(5,075,552,048)	(11.465)
Beban Barang dan Jasa	2,546,867,936,840	2,477,161,280,911	69,706,655,929	2.814
Beban Pemeliharaan	78,468,609,329	79,929,210,304	(1,460,600,975)	(1.827)
Beban Perjalanan Dinas	963,471,108,195	855,367,837,526	108,103,270,669	12.638
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	29,550,568,283	25,773,356,581	3,777,211,702	14.655
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LO.KL
Tanggal : 30/04/20 11:53
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_kl --
Tgl Data : 20/05/19 12:00

URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	51,221,474,250,664	37,255,869,069,772	13,965,605,180,892	37.486
Beban Penyusutan dan Amortisasi	252,849,834,076	242,521,247,609	10,328,586,467	4.259
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1,799,954,514	(155,775,095)	1,955,729,609	(1,255.483)
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	55,614,241,904,443	41,452,108,499,557	14,162,133,404,886	34.165
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(55,589,048,886,495)	(41,432,233,013,126)	(14,156,815,873,369)	34.169
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	1,447,303,661	(562,426,872)	2,009,730,533	(357.332)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1,656,887,086	577,331,440	1,079,555,646	186.991
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	209,583,425	1,139,758,312	(930,174,887)	(81.612)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	451,787,461,118	285,594,170,903	166,193,290,215	58.192
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	501,672,920,191	504,714,151,147	(3,041,230,956)	(0.603)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	49,885,459,073	219,119,980,244	(169,234,521,171)	(77.234)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	453,234,764,779	285,031,744,031	168,203,020,748	59.012
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(55,135,814,121,716)	(41,147,201,269,095)	(13,988,612,852,621)	33.997
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(55,135,814,121,716)	(41,147,201,269,095)	(13,988,612,852,621)	33.997

#KEMENSOS
Hadir

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS E-REKON



www.kemsos.go.id

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT KEMENTERIAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LPE.KL

Tanggal : 30/04/20 12:45

Halaman : 1

Prg ID : lap_lpe_kl --

URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	5,978,367,271,420	6,282,333,008,178	(303,965,736,758)	(4.838)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(55,135,814,121,716)	(41,147,201,269,095)	(13,988,612,852,621)	33.997
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	15,860,408,652,182	(120,504,149,420)	15,980,912,801,602	(13,261.712)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	1,858,337,865	5,573,051,184	(3,714,713,319)	(66.655)
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	(936,795,743)	0	(936,795,743)	()
SELISIH REVALUASI ASET	15,421,011,225,108	0	15,421,011,225,108	
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(12,754,363,462)	(125,665,910,604)	112,911,547,142	(89.851)
LAIN-LAIN	451,230,248,414	(411,290,000)	451,641,538,414	(109,810.97)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	57,266,530,994,957	40,963,739,681,757	16,302,791,313,200	39.798
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	17,991,125,525,423	(303,965,736,758)	18,295,091,262,181	(6,018.8)
EKUITAS AKHIR	23,969,492,796,843	5,978,367,271,420	17,991,125,525,423	300.937

#KEMENSOS
Hadir

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH



www.kemsos.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 30/04/20 11:46 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	95,668,000	0	95,668,000	0
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	16,200,000	0	16,200,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	152,683,386	0	152,683,386	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,738,111,700	250,108,000	1,488,003,700	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,179,859,400	7,728,973,868	0	7,728,973,868	184.91
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	1,000,000	0	1,000,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	4,179,859,400	9,732,636,954	250,108,000	9,482,528,954	226.86
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	700,000,000	1,245,189,272	0	1,245,189,272	177.88
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	700,000,000	1,245,189,272	0	1,245,189,272	177.88
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	511,200,000	571,900,000	0	571,900,000	111.87
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	4,892,150,000	4,897,000,000	0	4,897,000,000	100.1
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	574,750,000	580,950,000	0	580,950,000	101.08
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	504,883,000	504,883,000	0	504,883,000	100
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	6,482,983,000	6,554,733,000	0	6,554,733,000	101.11
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	663,863,000	572,642,500	0	572,642,500	86.26
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	77,266,000	0	77,266,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	663,863,000	649,908,500	0	649,908,500	97.9
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	7,424,492,593	0	7,424,492,593	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.1

Tanggal : 30/04/20 11:46 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_akun_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0	17,500,000	0	17,500,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	7,441,992,593	0	7,441,992,593	0
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	3,579,283,831	0	3,579,283,831	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	3,579,283,831	0	3,579,283,831	0
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	521,898,243	0	521,898,243	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,485,730,111	0	2,485,730,111	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	439,564,333	0	439,564,333	0
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	0	484,339,181,894	0	484,339,181,894	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	100,000	0	100,000	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	131,788	0	131,788	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	487,786,606,369	0	487,786,606,369	0
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	12,026,705,400	516,990,350,519	250,108,000	516,740,242,519	4,296.61
	JUMLAH PENDAPATAN	12,026,705,400	516,990,350,519	250,108,000	516,740,242,519	4,296.61

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 30/04/20 11:53

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	SEKRETARIAT JENDERAL					
027010100K	BA(027) ES1(01) DKI JAKARTA					
418939	PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	0	2,654,704,523	0	2,654,704,523	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027010100KP BA(027) ES1(01) DKI JAKARTA	0	2,654,704,523	0	2,654,704,523	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
440121	SEKRETARIAT JENDERAL	3,550,750,000	7,678,661,514	0	7,678,661,514	216.25
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	3,550,750,000	7,678,661,514	0	7,678,661,514	216.25
027010700	BA(027) ES1(01) SUMATERA UTARA					
070007	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA	0	4,944	0	4,944	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027010700 BA(027) ES1(01) SUMATERA UTARA	0	4,944	0	4,944	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
230017	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0	12,564,000	0	12,564,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	12,564,000	0	12,564,000	
	JUMLAH PENDAPATAN 01 SEKRETARIAT JENDERAL	3,550,750,000	10,345,934,981	0	10,345,934,981	291.37
02	INSPEKTORAT JENDERAL					
027020100K	Kode UAPPAW Tidak Ada					
426638	INSPEKTORAT JENDERAL	0	110,153,920	0	110,153,920	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027020100KP Kode UAPPAW Tidak Ada	0	110,153,920	0	110,153,920	
	JUMLAH PENDAPATAN 02 INSPEKTORAT JENDERAL	0	110,153,920	0	110,153,920	
03	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL					
027030100K	BA(027) ES1(03) DKI JAKARTA					
418940	DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL	700,000,000	7,153,134,852	0	7,153,134,852	1021.88
440213	DIREKTORAT KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL	0	161,822,658	0	161,822,658	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 30/04/20 11:53

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
630859	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL	0	654,115,787	250,108,000	404,007,787	0
682033	DIREKTORAT PEMBERDAYAAN SOSIAL PERORANGAN, KELUARGA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	0	209,983,620	0	209,983,620	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027030100KP BA(027) ES1(03) DKI JAKARTA	700,000,000	8,179,056,917	250,108,000	7,928,948,917	1,168.44
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
059014	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	0	146,201	0	146,201	0
069006	DINAS SOSIAL ACEH	0	640,000	0	640,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	786,201	0	786,201	
027030700	BA(027) ES1(03) SUMATERA UTARA					
079003	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA	0	96,635	0	96,635	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027030700 BA(027) ES1(03) SUMATERA UTARA	0	96,635	0	96,635	
027030700T	BA(027) ES1(03) TP					
079134	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA	0	166	0	166	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027030700TP BA(027) ES1(03) TP	0	166	0	166	
027030800T	BA(027) ES1(03) SUMATERA BARAT					
089141	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT	0	2,858,036	0	2,858,036	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027030800TP BA(027) ES1(03) SUMATERA BARAT	0	2,858,036	0	2,858,036	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
109129	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI	0	996,594,368	0	996,594,368	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	996,594,368	0	996,594,368	
027031400X	BA(027) ES1(03) KALIMANTAN TENGAH					
149017	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0	22,500,000	0	22,500,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027031400XX BA(027) ES1(03) KALIMANTAN TENGAH	0	22,500,000	0	22,500,000	
027031800D	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 30/04/20 11:53

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
189013	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	0	1,224,000	0	1,224,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027031800DK DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	0	1,224,000	0	1,224,000	
027031800T	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH					
189141	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	0	248,004,430	0	248,004,430	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027031800TP DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	0	248,004,430	0	248,004,430	
027031900	BA(027) ES1(03) SULAWESI SELATAN					
199135	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	0	1,917,336	0	1,917,336	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027031900 BA(027) ES1(03) SULAWESI SELATAN	0	1,917,336	0	1,917,336	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
209013	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0	3,000,000	0	3,000,000	0
205402	DINAS SOSIAL KABUPATEN BUTON SELATAN	0	2,730,368	0	2,730,368	0
229011	DINAS SOSIAL PROVINSI BALI	0	20,000,000	0	20,000,000	0
239020	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0	16,724,175	0	16,724,175	0
230574	Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa	0	18,940,232	0	18,940,232	0
249167	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0	6,200,000	0	6,200,000	0
289016	DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA	0	18,000,000	0	18,000,000	0
289110	DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA	0	9,102,976	0	9,102,976	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	94,697,751	0	94,697,751	
0003100TP	Koordinator UAPPA-W Satker TP Provinsi Gorontalo					
319096	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO	0	2,873,695	0	2,873,695	0
	JUMLAH PENDAPATAN 0003100TP Koordinator UAPPA-W Satker TP Provinsi Gorontalo	0	2,873,695	0	2,873,695	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
340458	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN POLEWALI MANDAR	0	16,512,875	0	16,512,875	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 30/04/20 11:53

Halaman : 4

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	16,512,875	0	16,512,875	
	JUMLAH PENDAPATAN 03 DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	700,000,000	9,567,122,410	250,108,000	9,317,014,410	1,366.73
04	DITJEN REHABILITASI SOSIAL					
027040100K	BA(027) ES1(04) DKI JAKARTA					
352594	BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "BAMBU APUS" DI JAKARTA	22,752,000	51,538,400	0	51,538,400	226.52
426701	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "HANDAYANI" DI JAKARTA	4,168,000	5,375,703	0	5,375,703	128.98
426710	BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS WANITA TUNA SUSILA "MULYA JAYA" DI JAKARTA	3,569,000	36,205,161	0	36,205,161	1014.43
560532	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "MELATI" DI JAKARTA	3,504,000	22,246,038	0	22,246,038	634.88
	JUMLAH PENDAPATAN 027040100KD BA(027) ES1(04) DKI JAKARTA	33,993,000	115,365,302	0	115,365,302	339.38
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
440222	DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL ANAK	57,000,000	116,964,131	0	116,964,131	205.2
440238	DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA	0	17,550,000	0	17,550,000	0
440244	DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	0	2,522,000	0	2,522,000	0
440269	DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA	0	25,828,850	0	25,828,850	0
630842	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL	5,670,000	266,911,844	0	266,911,844	4707.44
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	62,670,000	429,776,825	0	429,776,825	685.78
027040200K	BA(027) ES1(04) JAWA BARAT					
020650	LOKA REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "KAHURIPAN" DI SUKABUMI	0	16,494,300	0	16,494,300	0
369110	BALAI LITERASI BRAILLE INDONESIA "ABIYOSO" DI CIMAH	59,877,000	74,024,060	0	74,024,060	123.63
369131	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "PHALA MARTHA" DI SUKABUMI	2,158,000	39,023,779	0	39,023,779	1808.33
369148	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "WYATA GUNA" DI BANDUNG	404,000,000	555,644,646	0	555,644,646	137.54
426669	BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS "PANGUDI LUHUR" DI BEKASI	20,100,000	16,695,606	0	16,695,606	83.06

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 30/04/20 11:53

Halaman : 5

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
426732	BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "BUDHI DHARMA" DI BEKASI	92,620,000	51,046,549	0	51,046,549	55.11
426814	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TAN MIYAT" DI BEKASI	40,000,000	38,817,948	0	38,817,948	97.04
526071	BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "GALIH PAKUAN" DI BOGOR	1,376,000	31,514,165	0	31,514,165	2290.27
560504	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "CIUNG WANARA" DI BOGOR	2,200,000	11,679,819	0	11,679,819	530.9
613057	BALAI BESAR REHABILITASI VOKASIONAL PENYANDANG DISABILITAS DI CIBINONG	21,600,000	35,790,001	0	35,790,001	165.69
	JUMLAH PENDAPATAN 027040200KD BA(027) ES1(04) JAWA BARAT	643,931,000	870,730,873	0	870,730,873	135.22
027040300K	BA(027) ES1(04) JAWA TENGAH					
030952	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "MARGO LARAS" DI PATI	2,970,000	36,034,119	0	36,034,119	1213.27
031558	BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "SATRIA" DI BATURRADEN	5,127,000	9,152,463	0	9,152,463	178.51
369169	BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "PROF. DR. SOEHARSO" DI SURAKARTA	25,544,000	55,688,817	0	55,688,817	218.01
369173	BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "KARTINI" DI TEMANGGUNG	24,591,000	173,563,667	0	173,563,667	705.8
426772	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "ANTASENA" DI MAGELANG	71,513,000	58,247,160	0	58,247,160	81.45
	JUMLAH PENDAPATAN 027040300KD BA(027) ES1(04) JAWA TENGAH	129,745,000	332,686,226	0	332,686,226	256.42
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
049015	DINAS SOSIAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	0	803,843	0	803,843	0
059015	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	0	11,963	0	11,963	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	815,806	0	815,806	
027040600K	BA(027) ES1(04) NANGGROE ACEH DARUSSALAM					
690243	LOKA REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "DARUSSA'ADAH" DI ACEH	1,236,000	4,723,095	0	4,723,095	382.13
	JUMLAH PENDAPATAN 027040600KD BA(027) ES1(04) NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1,236,000	4,723,095	0	4,723,095	382.13
027040700K	Panti Sosial Pamardi Putra "Insyaf" Sumatera Utara					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 30/04/20 11:53

Halaman : 6

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
070161	BALAI REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "BAHAGIA" DI MEDAN	1,613,000	5,018,738	0	5,018,738	311.14
	JUMLAH PENDAPATAN 027040700KD Panti Sosial Pamardi Putra "Insyaf" Sumatera Utara	1,613,000	5,018,738	0	5,018,738	311.14
027040700D	DINAS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA					
079004	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA	0	131,464	0	131,464	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027040700DK DINAS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA	0	131,464	0	131,464	
027040700K	Panti Sosial Pamardi Putra "Insyaf" Sumatera Utara					
426763	BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "INSYAF" DI MEDAN	3,072,000	24,581,884	0	24,581,884	800.19
	JUMLAH PENDAPATAN 027040700KD Panti Sosial Pamardi Putra "Insyaf" Sumatera Utara	3,072,000	24,581,884	0	24,581,884	800.19
027040900K	BA(027) ES1(04) RIAU					
426675	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "RUMBAI" DI PEKANBARU	22,150,000	13,122,363	0	13,122,363	59.24
	JUMLAH PENDAPATAN 027040900KD BA(027) ES1(04) RIAU	22,150,000	13,122,363	0	13,122,363	59.24
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
109010	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI	0	1,106,283	0	1,106,283	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	1,106,283	0	1,106,283	
027041000K	BA(027) ES1(04) JAMBI					
426794	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "ALYATAMA" DI JAMBI	1,100,000	931,128	0	931,128	84.65
	JUMLAH PENDAPATAN 027041000KD BA(027) ES1(04) JAMBI	1,100,000	931,128	0	931,128	84.65
027041100K	BA(027) ES1(04) SUMATERA SELATAN					
369600	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "BUDI PERKASA" DI PALEMBANG	2,748,000	9,180,395	0	9,180,395	334.08
	JUMLAH PENDAPATAN 027041100KD BA(027) ES1(04) SUMATERA SELATAN	2,748,000	9,180,395	0	9,180,395	334.08
027041500K	BA(027) ES1(04) KALIMANTAN SELATAN					
526092	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "BUDI LUHUR" DI BANJARBARU	3,900,000	6,185,114	0	6,185,114	158.59

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 30/04/20 11:53

Halaman : 7

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN 027041500KD BA(027) ES1(04) KALIMANTAN SELATAN	3,900,000	6,185,114	0	6,185,114	158.59
027041600D 169008	027041600DK DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0	3,740,730	0	3,740,730	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027041600DK 027041600DK	0	3,740,730	0	3,740,730	
027041700K 426741	BA(027) ES1(04) SULAWESI UTARA BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TUMOU TOU" DI MANADO	2,220,000	23,595,947	0	23,595,947	1062.88
	JUMLAH PENDAPATAN 027041700KD BA(027) ES1(04) SULAWESI UTARA	2,220,000	23,595,947	0	23,595,947	1,062.88
027041800K 560511	BA(027) ES1(04) SULAWESI TENGAH BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "NIPOTOWE" DI PALU	5,600,000	5,655,600	0	5,655,600	100.99
	JUMLAH PENDAPATAN 027041800KD BA(027) ES1(04) SULAWESI TENGAH	5,600,000	5,655,600	0	5,655,600	100.99
027041900K 426644	BA(027) ES1(04) SULAWESI SELATAN BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "WIRAJAYA" DI MAKASSAR	50,000,000	48,405,468	0	48,405,468	96.81
426690	BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "GAU MABAJI" DI GOWA	3,336,000	6,535,218	0	6,535,218	195.9
627343	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "TODDOPULI" DI MAKASSAR	2,000,000	1,832,002	0	1,832,002	91.6
	JUMLAH PENDAPATAN 027041900KD BA(027) ES1(04) SULAWESI SELATAN	55,336,000	56,772,688	0	56,772,688	102.6
027042000K 690250	BA(027) ES1(04) SULAWESI TENGGARA LOKA REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "MEOHAI" DI KENDARI	12,000,000	7,850,079	0	7,850,079	65.42
690264	LOKA REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "MINAULA" DI KENDARI	1,200,000	6,720,000	0	6,720,000	560
	JUMLAH PENDAPATAN 027042000KD BA(027) ES1(04) SULAWESI TENGGARA	13,200,000	14,570,079	0	14,570,079	110.38
027042200K 426650	BA(027) ES1(04) BALI BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "MAHATMIYA" DI TABANAN	0	68,160,000	0	68,160,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027042200KD BA(027) ES1(04) BALI	0	68,160,000	0	68,160,000	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 30/04/20 11:53

Halaman : 8

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
239021	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0	10,049,200	0	10,049,200	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	10,049,200	0	10,049,200	
027042300K	BA(027) ES1(04) NUSA TENGGARA BARAT					
526085	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "PARAMITA" DI MATARAM	1,716,000	55,894,759	0	55,894,759	3257.27
	JUMLAH PENDAPATAN 027042300KD BA(027) ES1(04) NUSA TENGGARA BARAT	1,716,000	55,894,759	0	55,894,759	3,257.27
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
249018	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0	625,000	0	625,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	625,000	0	625,000	
027042400K	BA(027) ES1(04) NUSA TENGGARA TIMUR					
426808	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "NAIBONAT" DI KUPANG	803,000	9,620,320	0	9,620,320	1198.05
560550	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "EFFATA" DI KUPANG	3,120,000	37,287,800	0	37,287,800	1195.12
	JUMLAH PENDAPATAN 027042400KD BA(027) ES1(04) NUSA TENGGARA TIMUR	3,923,000	46,908,120	0	46,908,120	1,195.72
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
560525	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "DHARMA GUNA" DI BENGKULU	4,444,000	40,264,131	0	40,264,131	906.03
285138	BALAI REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "WASANA BAHAGIA" DI TERNATE	3,211,000	4,535,334	0	4,535,334	141.24
289017	DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA	0	20,037,045	0	20,037,045	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	7,655,000	64,836,510	0	64,836,510	846.98
027042900	BA(027) ES1(04) BANTEN					
299014	DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN	0	381,267	0	381,267	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027042900 BA(027) ES1(04) BANTEN	0	381,267	0	381,267	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
309017	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0	560,000	0	560,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 30/04/20 11:53

Halaman : 9

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	560,000	0	560,000	
	JUMLAH PENDAPATAN 04 DITJEN REHABILITASI SOSIAL	995,808,000	2,166,105,396	0	2,166,105,396	217.52
05	DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
019030	DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA	0	2,000,000	0	2,000,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	2,000,000	0	2,000,000	
027050100K	BA(027) ES1(05) DKI JAKARTA					
426820	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	0	113,430,564	0	113,430,564	0
440275	DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	0	1,070,029,773	0	1,070,029,773	0
440281	DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	0	277,609,209	0	277,609,209	0
440310	DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL KELUARGA	0	92,681,442,623	0	92,681,442,623	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027050100KP BA(027) ES1(05) DKI JAKARTA	0	94,142,512,169	0	94,142,512,169	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
059016	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	0	3,211,027	0	3,211,027	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	3,211,027	0	3,211,027	
027050700	BA(027) ES1(05) SUMATERA UTARA					
079005	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA	0	1,052,046	0	1,052,046	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027050700 BA(027) ES1(05) SUMATERA UTARA	0	1,052,046	0	1,052,046	
027051600D	027051600DK					
169009	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0	4,699,800	0	4,699,800	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027051600DK 027051600DK	0	4,699,800	0	4,699,800	
027051800D	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH					
189015	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	0	5,455,000	0	5,455,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 30/04/20 11:53

Halaman : 10

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN 027051800DK DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	0	5,455,000	0	5,455,000	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
239023	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0	38,485,000	0	38,485,000	0
289018	DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA	0	52,573,000	0	52,573,000	0
309018	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0	15,815,000	0	15,815,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	106,873,000	0	106,873,000	
	JUMLAH PENDAPATAN 05 DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	0	94,265,803,042	0	94,265,803,042	
06	DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN					
027060100K	BA(027) ES1(06) DKI JAKARTA					
418941	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR	0	79,759,838	0	79,759,838	0
418942	DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH I	0	103,087,783,477	0	103,087,783,477	0
418943	DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH II	0	164,764,536,619	0	164,764,536,619	0
418944	DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH III	0	124,869,406,727	0	124,869,406,727	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027060100KP BA(027) ES1(06) DKI JAKARTA	0	392,801,486,661	0	392,801,486,661	
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
418950	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	0	10,065	0	10,065	0
418974	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0	13,994,900	0	13,994,900	0
418979	DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA	0	12,154,440	0	12,154,440	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	26,159,405	0	26,159,405	
	JUMLAH PENDAPATAN 06 DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN	0	392,827,646,066	0	392,827,646,066	
11	BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL					
027110100K	Kode UAPPAW Tidak Ada					
369059	SEKRETARIAT BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUH SOSIAL	0	230,477,995	0	230,477,995	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 30/04/20 11:53

Halaman : 11

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
418991	PUSAT PENYULUHAN SOSIAL	0	13,499,542	0	13,499,542	0
440326	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	508,063,000	638,831,304	0	638,831,304	125.74
682040	PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI PEKERJA SOSIAL DAN PENYULUH SOSIAL	0	18,393,212	0	18,393,212	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027110100KP Kode UAPPAW Tidak Ada	508,063,000	901,202,053	0	901,202,053	177.38
027110200K	BA(027) ES1(11) JAWA BARAT					
369070	SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS) BANDUNG	6,022,350,000	6,138,283,856	0	6,138,283,856	101.93
369084	BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) LEMBANG - BANDUNG	7,500,000	30,102,565	0	30,102,565	401.37
	JUMLAH PENDAPATAN 027110200KD BA(027) ES1(11) JAWA BARAT	6,029,850,000	6,168,386,421	0	6,168,386,421	102.3
027110400K	BA(027) ES1(11) DI YOGYAKARTA					
369180	BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) YOGYAKARTA	40,834,400	21,662,200	0	21,662,200	53.05
369202	BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (B2P3KS) YOGYAKARTA	35,220,000	26,620,000	0	26,620,000	75.58
	JUMLAH PENDAPATAN 027110400KD BA(027) ES1(11) DI YOGYAKARTA	76,054,400	48,282,200	0	48,282,200	63.48
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
418819	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	0	6,778	0	6,778	0
418820	DINAS SOSIAL ACEH	0	5,999	0	5,999	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	12,777	0	12,777	
027110700	BA(027) ES1(11) SUMATERA UTARA					
418821	DINAS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA	0	27,785	0	27,785	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027110700 BA(027) ES1(11) SUMATERA UTARA	0	27,785	0	27,785	
027110800K	Kode UAPPAW Tidak Ada					
369283	BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) PADANG	50,300,000	7,681,199	0	7,681,199	15.27
	JUMLAH PENDAPATAN 027110800KD Kode UAPPAW Tidak Ada	50,300,000	7,681,199	0	7,681,199	15.27
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 30/04/20 11:53

Halaman : 12

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
418823	DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU	0	14,400,000	0	14,400,000	0
418836	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0	9,294	0	9,294	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	14,409,294	0	14,409,294	
027111400D	BA(027) ES1(11) KALIMANTAN TENGAH					
418837	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0	2,172	0	2,172	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027111400DK BA(027) ES1(11) KALIMANTAN TENGAH	0	2,172	0	2,172	
027111500K	BA(027) ES1(11) KALIMANTAN SELATAN					
369752	BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) BANJARMASIN	15,880,000	462,474,921	0	462,474,921	2912.31
	JUMLAH PENDAPATAN 027111500KD BA(027) ES1(11) KALIMANTAN SELATAN	15,880,000	462,474,921	0	462,474,921	2,912.31
027111900K	BA(027) ES1(11) SULAWESI SELATAN					
369965	BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) MAKASSAR	40,000,000	57,837,271	0	57,837,271	144.59
	JUMLAH PENDAPATAN 027111900KD BA(027) ES1(11) SULAWESI SELATAN	40,000,000	57,837,271	0	57,837,271	144.59
null	Kode UAPPAW Tidak Ada					
418855	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0	307	0	307	0
	JUMLAH PENDAPATAN null Kode UAPPAW Tidak Ada	0	307	0	307	
027112500K	BA(027) ES1(11) PAPUA					
578995	BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) JAYAPURA	60,000,000	47,250,000	0	47,250,000	78.75
	JUMLAH PENDAPATAN 027112500KD BA(027) ES1(11) PAPUA	60,000,000	47,250,000	0	47,250,000	78.75
027112600	BA(027) ES1(11) BENGKULU					
418857	DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI BENGKULU	0	12,803	0	12,803	0
	JUMLAH PENDAPATAN 027112600 BA(027) ES1(11) BENGKULU	0	12,803	0	12,803	
0003100DK	Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo					
418866	DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO	0	5,501	0	5,501	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.2

Tanggal : 30/04/20 11:53

Halaman : 13

Prg ID : lap_lra_pen_org_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN 0003100DK Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo	0	5,501	0	5,501	
	JUMLAH PENDAPATAN 11 BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL	6,780,147,400	7,707,584,704	0	7,707,584,704	113.68
	JUMLAH PENDAPATAN	12,026,705,400	516,990,350,519	250,108,000	516,740,242,519	4,298.69

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 30/04/20 12:46

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
01	SEKRETARIAT JENDERAL					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	483,210,000	0	483,210,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3,550,750,000	6,958,594,182	0	6,958,594,182	195.98
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	4,944	0	4,944	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2,516,296,523	0	2,516,296,523	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	54,961,295	0	54,961,295	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	292,067,172	0	292,067,172	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	40,800,865	0	40,800,865	0
	JUMLAH PENDAPATAN 01 SEKRETARIAT JENDERAL	3,550,750,000	10,345,934,981	0	10,345,934,981	291.37
02	INSPEKTORAT JENDERAL					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	80,455,900	0	80,455,900	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	29,567,420	0	29,567,420	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	130,600	0	130,600	0
	JUMLAH PENDAPATAN 02 INSPEKTORAT JENDERAL	0	110,153,920	0	110,153,920	
03	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	500,216,000	250,108,000	250,108,000	0
425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	700,000,000	1,245,189,272	0	1,245,189,272	177.88
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	5,906,715,082	0	5,906,715,082	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	220,964,669	0	220,964,669	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	99,981,375	0	99,981,375	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	481,869,569	0	481,869,569	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,555,912	0	4,555,912	0
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran	0	1,107,630,531	0	1,107,630,531	0
	JUMLAH PENDAPATAN 03 DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	700,000,000	9,567,122,410	250,108,000	9,317,014,410	1,366.73

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 30/04/20 12:46

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
04	DITJEN REHABILITASI SOSIAL					
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	95,668,000	0	95,668,000	0
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	16,200,000	0	16,200,000	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	152,683,386	0	152,683,386	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	333,027,600	0	333,027,600	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	331,945,000	500,083,452	0	500,083,452	150.65
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	1,000,000	0	1,000,000	0
425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	663,863,000	572,642,500	0	572,642,500	86.26
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	77,266,000	0	77,266,000	0
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	4,715,234	0	4,715,234	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	26,869,774	0	26,869,774	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	140,746,613	0	140,746,613	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	108,115,682	0	108,115,682	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	20,742,329	0	20,742,329	0
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran	0	116,244,826	0	116,244,826	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	100,000	0	100,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN 04 DITJEN REHABILITASI SOSIAL	995,808,000	2,166,105,396	0	2,166,105,396	217.52
05	DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	82,855,200	0	82,855,200	0
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	454,012,769	0	454,012,769	0
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	17,500,000	0	17,500,000	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	377,325,401	0	377,325,401	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	21,364,164	0	21,364,164	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,357,376,191	0	1,357,376,191	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 30/04/20 12:46

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	351,604,658	0	351,604,658	0
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran	0	91,603,764,659	0	91,603,764,659	0
	JUMLAH PENDAPATAN 05 DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN	0	94,265,803,042	0	94,265,803,042	
06	DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	390,000	0	390,000	0
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	1,058,888,888	0	1,058,888,888	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	673,003	0	673,003	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	76,364,335	0	76,364,335	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	179,787,962	0	179,787,962	0
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran	0	391,511,541,878	0	391,511,541,878	0
	JUMLAH PENDAPATAN 06 DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN	0	392,827,646,066	0	392,827,646,066	
11	BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	257,957,000	0	257,957,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	297,164,400	270,296,234	0	270,296,234	90.96
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	511,200,000	571,900,000	0	571,900,000	111.87
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	4,892,150,000	4,897,000,000	0	4,897,000,000	100.1
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	574,750,000	580,950,000	0	580,950,000	101.08
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	504,883,000	504,883,000	0	504,883,000	100
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	155,676	0	155,676	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	437,154,461	0	437,154,461	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	98,913,041	0	98,913,041	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	66,513,535	0	66,513,535	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	21,860,569	0	21,860,569	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	1,188	0	1,188	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.P.KL.3

Tanggal : 30/04/20 12:46

Halaman : 4

Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_kl --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN 11 BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN	6,780,147,400	7,707,584,704	0	7,707,584,704	113.68
	JUMLAH PENDAPATAN	12,026,705,400	516,990,350,519	250,108,000	516,740,242,519	4,298.69

#KEMENSOS
Hadir

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA



www.kemsos.go.id

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 30/04/20 11:45 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	184,234,040,000	196,530,624,000	194,803,540,170	78,672,160	194,724,868,010	99.12	1,805,755,990
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4,830,000	4,327,000	3,024,313	284,155	2,740,158	69.89	1,586,842
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	13,189,247,000	13,790,012,000	13,574,173,932	3,070,740	13,571,103,192	98.43	218,908,808
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	3,791,875,000	3,833,108,000	3,735,699,870	251,774	3,735,448,096	97.46	97,659,904
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	9,432,488,000	9,573,268,000	9,405,890,000	3,685,000	9,402,205,000	98.25	171,063,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	9,890,763,000	10,188,908,000	9,921,610,000	23,004,999	9,898,605,001	97.38	290,302,999
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,145,721,000	1,316,433,000	1,164,600,094	0	1,164,600,094	88.47	151,832,906
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	10,461,812,000	9,370,788,000	9,083,735,480	1,158,720	9,082,576,760	96.94	288,211,240
511129	Belanja Uang Makan PNS	31,958,742,000	25,943,269,000	24,255,552,300	31,970,650	24,223,581,650	93.49	1,719,687,350
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	212,700,000	212,700,000	195,155,000	0	195,155,000	91.75	17,545,000
511147	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar	98,644,000	30,042,000	0	0	0	0	30,042,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	6,463,322,000	5,885,049,000	5,619,955,000	22,871,567	5,597,083,433	95.5	287,965,567
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	3,731,390,000	3,885,577,000	3,885,576,100	0	3,885,576,100	100	900
511192	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI	15,725,000	1,000	0	0	0	0	1,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	275,631,299,000	280,564,106,000	275,648,512,259	164,969,765	275,483,542,494	98.25	5,080,563,506
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	1,884,982,000	1,635,817,000	1,391,764,550	2,210,750	1,389,553,800	85.08	246,263,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	1,884,982,000	1,635,817,000	1,391,764,550	2,210,750	1,389,553,800	85.08	246,263,200
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	205,271,171,000	207,187,402,000	203,818,410,001	73,947,884	203,744,462,117	98.37	3,442,939,883
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	205,271,171,000	207,187,402,000	203,818,410,001	73,947,884	203,744,462,117	98.37	3,442,939,883
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	482,787,452,000	489,387,325,000	480,858,686,810	241,128,399	480,617,558,411	98.26	8,769,766,589
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	59,292,269,000	61,733,771,000	61,139,322,760	20,675,170	61,118,647,590	99.04	615,123,410
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	13,134,875,000	10,268,720,000	9,869,475,827	3,813,912	9,865,661,915	96.11	403,058,085
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1,465,366,000	1,202,455,000	1,177,740,100	0	1,177,740,100	97.94	24,714,900
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,450,053,000	1,536,307,000	1,194,126,487	4,049,000	1,190,077,487	77.73	346,229,513
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	29,345,900,000	28,599,244,000	27,836,678,500	27,314,500	27,809,364,000	97.33	789,880,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	11,103,144,000	11,999,932,000	11,133,421,041	360,803,400	10,772,617,641	92.78	1,227,314,359
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	115,791,607,000	115,340,429,000	112,350,764,715	416,655,982	111,934,108,733	97.41	3,406,320,267
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	164,789,945,000	195,363,886,000	186,309,917,720	105,517,095	186,204,400,625	95.37	9,159,485,375

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 30/04/20 11:45 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,615,117,610,000	1,516,916,217,000	1,510,218,972,621	808,421,125	1,509,410,551,496	99.56	7,505,665,504
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	587,294,647,000	481,674,561,000	460,306,408,142	390,748,351	459,915,659,791	95.56	21,758,901,209
521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	6,830,200,000	6,633,324,000	6,602,824,000	0	6,602,824,000	99.54	30,500,000
521232	Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk uang	4,409,600,000	2,054,850,000	2,054,850,000	0	2,054,850,000	100	0
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	1,710,450,000	2,207,100,000	1,185,381,078	0	1,185,381,078	53.71	1,021,718,922
521234	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang	139,500,000	153,475,000	153,419,000	0	153,419,000	99.96	56,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,380,291,952,000	2,205,003,413,000	2,166,831,772,561	1,304,686,571	2,165,527,085,990	98.27	39,476,327,010
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	39,108,603,000	38,936,354,000	37,471,908,607	6,191,353	37,465,717,254	96.24	1,470,636,746
521813	Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	2,100,000	0	0	0	0	0	0
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	143,000,000	78,000,000	77,995,150	0	77,995,150	99.99	4,850
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	2,509,666,000	2,198,293,000	2,168,100,850	0	2,168,100,850	98.63	30,192,150
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	41,763,369,000	41,212,647,000	39,718,004,607	6,191,353	39,711,813,254	96.37	1,500,833,746
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	18,783,371,000	17,050,414,000	16,705,589,737	2,255,779	16,703,333,958	97.98	347,080,042
522112	Belanja Langganan Telepon	2,265,757,000	1,659,673,000	1,468,580,409	36,507	1,468,543,902	88.49	191,129,098
522113	Belanja Langganan Air	1,615,196,000	1,301,323,000	1,198,810,015	0	1,198,810,015	92.12	102,512,985
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	475,208,000	446,138,000	404,150,205	0	404,150,205	90.59	41,987,795
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	134,597,000	146,152,000	74,923,850	0	74,923,850	51.26	71,228,150
522131	Belanja Jasa Konsultan	57,786,822,000	45,545,533,000	44,687,523,917	0	44,687,523,917	98.12	858,009,083
522141	Belanja Sewa	109,677,830,000	108,249,476,000	99,688,348,138	63,521,618	99,624,826,520	92.09	8,624,649,480
522151	Belanja Jasa Profesi	69,232,567,000	71,957,355,000	64,772,155,797	697,783,879	64,074,371,918	90.01	7,882,983,082
522191	Belanja Jasa Lainnya	30,449,522,000	39,441,611,000	38,794,960,966	0	38,794,960,966	98.36	646,650,034
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	290,420,870,000	285,797,675,000	267,795,043,034	763,597,783	267,031,445,251	93.7	18,766,229,749
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	32,004,163,000	34,247,737,000	33,919,331,504	41,476,652	33,877,854,852	99.04	369,882,148
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	522,477,000	591,852,000	580,977,600	0	580,977,600	98.16	10,874,400
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,882,000,000	1,233,837,000	1,224,079,456	234,927	1,223,844,529	99.21	9,992,471
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37,040,494,000	34,823,730,000	34,009,667,180	7,162,300	34,002,504,880	97.66	821,225,120
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21,632,000	22,412,000	16,724,000	0	16,724,000	74.62	5,688,000
523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,072,591,000	3,379,227,000	3,365,884,398	0	3,365,884,398	99.61	13,342,602
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	363,063,000	1,036,147,000	1,022,298,399	0	1,022,298,399	98.66	13,848,601
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	75,600,000	87,600,000	87,600,000	0	87,600,000	100	0
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	3,606,178,000	3,637,478,000	3,590,458,703	0	3,590,458,703	98.71	47,019,297
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	78,588,198,000	79,060,020,000	77,817,021,240	48,873,879	77,768,147,361	98.43	1,291,872,639

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 30/04/20 11:45 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_ira_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	408,388,903,000	406,909,079,304	384,393,173,563	10,665,171,740	373,728,001,823	94.47	33,181,077,481
524112	Belanja Perjalanan Tetap	153,350,000	153,670,000	149,215,356	0	149,215,356	97.1	4,454,644
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51,872,500,000	47,178,929,000	43,037,464,998	673,523,354	42,363,941,644	91.22	4,814,987,356
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	185,746,748,000	204,714,748,696	195,530,469,185	2,401,823,805	193,128,645,380	95.51	11,586,103,316
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	313,810,982,000	384,306,957,000	364,569,736,959	14,096,194,196	350,473,542,763	94.86	33,833,414,237
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	959,972,483,000	1,043,263,384,000	987,680,060,061	27,836,713,095	959,843,346,966	94.67	83,420,037,034
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	2,648,656,000	3,770,821,000	3,404,669,917	152,885,386	3,251,784,531	90.29	519,036,469
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	2,496,417,000	2,360,582,000	1,992,653,605	83,966,828	1,908,686,777	84.41	451,895,223
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	5,145,073,000	6,131,403,000	5,397,323,522	236,852,214	5,160,471,308	88.03	970,931,692
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	15,073,750,000	16,995,050,000	16,989,812,000	0	16,989,812,000	99.97	5,238,000
526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	800,000,000	1,800,000,000	1,676,128,906	0	1,676,128,906	93.12	123,871,094
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	15,873,750,000	18,795,050,000	18,665,940,906	0	18,665,940,906	99.31	129,109,094
5263	Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda							
526311	Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	20,394,015,000	20,227,846,000	20,211,508,500	0	20,211,508,500	99.92	16,337,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5263	20,394,015,000	20,227,846,000	20,211,508,500	0	20,211,508,500	99.92	16,337,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,908,241,317,000	3,814,831,867,000	3,696,467,439,146	30,613,570,877	3,665,853,868,269	96.9	148,977,998,731
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531111	Belanja Modal Tanah	88,584,250,000	91,069,248,000	90,527,836,808	0	90,527,836,808	99.41	541,411,192
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	88,584,250,000	91,069,248,000	90,527,836,808	0	90,527,836,808	99.41	541,411,192
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47,557,776,000	127,432,235,000	126,386,005,186	17,943,546	126,368,061,640	99.18	1,064,173,360
532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	0	2,280,000	2,280,000	0	2,280,000	100	0
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	78,070,000	77,300,000	0	77,300,000	99.01	770,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	47,557,776,000	127,512,585,000	126,465,585,186	17,943,546	126,447,641,640	99.18	1,064,943,360
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56,089,629,000	48,593,372,000	48,064,488,879	3,683,600	48,060,805,279	98.91	532,566,721
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	125,943,000	125,943,000	91,853,300	0	91,853,300	72.93	34,089,700
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	204,057,000	1,647,147,000	1,611,431,804	18,649,932	1,592,781,872	97.83	54,365,128
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	619,080,000	618,817,699	180,235,300	438,582,399	99.96	180,497,601
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	16,806,205,000	35,016,321,000	34,812,462,775	19,149,876	34,793,312,899	99.42	223,008,101

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

Kode Lap : LRA.B.KL.1
Tanggal : 30/04/20 11:45 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_ira_bel_akun_kl --rekon17

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	73,225,834,000	86,001,863,000	85,199,054,457	221,718,708	84,977,335,749	99.07	1,024,527,251
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534121	Belanja Modal Irigasi	0	338,000,000	338,000,000	0	338,000,000	100	0
534131	Belanja Modal Jaringan	500,000,000	1,432,590,000	1,426,888,800	0	1,426,888,800	99.6	5,701,200
534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	325,000,000	320,816,650	0	320,816,650	98.71	4,183,350
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	500,000,000	2,095,590,000	2,085,705,450	0	2,085,705,450	99.53	9,884,550
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	4,815,270,000	6,540,114,000	6,484,052,550	10,513,423	6,473,539,127	99.14	66,574,873
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0	9,294,874,000	8,833,309,472	850,000	8,832,459,472	95.03	462,414,528
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	4,815,270,000	15,834,988,000	15,317,362,022	11,363,423	15,305,998,599	96.73	528,989,401
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	214,683,130,000	322,514,274,000	319,595,543,923	251,025,677	319,344,518,246	99.1	3,169,755,754
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL							
5711	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial							
571111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	379,105,793,000	389,460,577,000	384,260,095,920	344,637,620	383,915,458,300	98.66	5,545,118,700
571112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang	17,058,100,000	14,488,600,000	13,882,837,084	0	13,882,837,084	95.82	605,762,916
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5711	396,163,893,000	403,949,177,000	398,142,933,004	344,637,620	397,798,295,384	98.56	6,150,881,616
5731	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial							
573111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk	980,000,000	29,889,738,000	29,890,374,000	147,535,000	29,742,839,000	100	146,899,000
573112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk	98,809,000,000	98,809,000,000	91,052,403,473	4,320,000	91,048,083,473	92.15	7,760,916,527
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5731	99,789,000,000	128,698,738,000	120,942,777,473	151,855,000	120,790,922,473	93.97	7,907,815,527
5741	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial							
574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	32,651,342,800,000	32,828,279,920,000	32,828,279,903,000	961,650,000	32,827,318,253,000	100	961,667,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5741	32,651,342,800,000	32,828,279,920,000	32,828,279,903,000	961,650,000	32,827,318,253,000	100	961,667,000
5751	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan							
575111	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam	9,343,137,200,000	17,167,365,300,000	16,424,717,270,000	298,006,564,565	16,126,710,705,435	95.67	1,040,654,594,565
575112	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam	11,666,212,800,000	3,747,612,350,000	3,652,062,050,160	0	3,652,062,050,160	97.45	95,550,299,840
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5751	21,009,350,000,000	20,914,977,650,000	20,076,779,320,160	298,006,564,565	19,778,772,755,595	95.99	1,136,204,894,405
5761	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana							
576111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk	19,400,000,000	59,449,400,000	59,424,800,000	46,599,155	59,378,200,845	99.96	71,199,155
576112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk	68,318,440,000	77,118,440,000	76,787,593,958	16,514,100	76,771,079,858	99.57	347,360,142
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5761	87,718,440,000	136,567,840,000	136,212,393,958	63,113,255	136,149,280,703	99.74	418,559,297
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 57	54,244,364,133,000	54,412,473,325,000	53,560,357,327,595	299,527,820,440	53,260,829,507,155	98.43	1,151,643,817,845
	JUMLAH BELANJA	58,850,076,032,000	59,039,206,791,000	58,057,278,997,474	330,633,545,393	57,726,645,452,081	98.34	1,312,561,338,919

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 30/04/20 12:45

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	SEKRETARIAT JENDERAL							
51	BELANJA PEGAWAI	68,954,333,000	62,154,333,000	61,137,039,341	18,772,793	61,118,266,548	98.33	1,036,066,452
52	BELANJA BARANG	284,007,926,000	292,857,926,000	281,268,008,983	1,766,058,944	279,501,950,039	95.44	13,355,975,961
53	BELANJA MODAL	19,264,811,000	102,414,811,000	101,817,663,636	33,388,300	101,784,275,336	99.38	630,535,664
	JUMLAH BELANJA (01) SEKRETARIAT JENDERAL	372,227,070,000	457,427,070,000	444,222,711,960	1,818,220,037	442,404,491,923	97.11	15,022,578,077
02	INSPEKTORAT JENDERAL							
51	BELANJA PEGAWAI	15,836,320,000	17,039,732,000	16,966,228,267	31,460,463	16,934,767,804	99.38	104,964,196
52	BELANJA BARANG	29,381,142,000	29,381,142,000	28,815,763,944	156,953,000	28,658,810,944	97.54	722,331,056
53	BELANJA MODAL	2,085,350,000	2,085,350,000	2,003,110,500	0	2,003,110,500	96.06	82,239,500
	JUMLAH BELANJA (02) INSPEKTORAT JENDERAL	47,302,812,000	48,506,224,000	47,785,102,711	188,413,463	47,596,689,248	98.51	909,534,752
03	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL							
51	BELANJA PEGAWAI	23,921,330,000	25,048,950,000	25,005,380,549	15,592,557	24,989,787,992	99.76	59,162,008
52	BELANJA BARANG	301,165,580,000	303,618,847,000	297,403,044,120	1,615,691,455	295,787,352,665	97.42	7,831,494,335
53	BELANJA MODAL	4,486,700,000	10,905,813,000	10,383,341,625	0	10,383,341,625	95.21	522,471,375
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL	99,789,000,000	182,940,626,000	175,004,029,473	175,275,000	174,828,754,473	95.57	8,111,871,527
	JUMLAH BELANJA (03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	429,362,610,000	522,514,236,000	507,795,795,767	1,806,559,012	505,989,236,755	97.18	16,524,999,245
04	DITJEN REHABILITASI SOSIAL							
51	BELANJA PEGAWAI	221,781,260,000	230,441,654,000	227,727,633,608	99,845,494	227,627,788,114	98.78	2,813,865,886
52	BELANJA BARANG	495,411,715,000	499,683,785,000	481,287,200,153	3,359,966,678	477,927,233,475	95.65	21,756,551,525
53	BELANJA MODAL	49,549,555,000	63,595,682,000	63,197,225,911	213,103,777	62,984,122,134	99.04	611,559,866
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL	396,163,893,000	396,039,642,000	390,414,034,004	321,217,620	390,092,816,384	98.5	5,946,825,616
	JUMLAH BELANJA (04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL	1,162,906,423,000	1,189,760,763,000	1,162,626,093,676	3,994,133,569	1,158,631,960,107	97.72	31,128,802,893
05	DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
51	BELANJA PEGAWAI	18,585,015,000	21,080,090,000	20,940,621,431	1,869,516	20,938,751,915	99.33	141,338,085
52	BELANJA BARANG	1,941,961,295,000	1,827,002,399,000	1,806,520,260,539	5,339,258,394	1,801,181,002,145	98.59	25,821,396,855
53	BELANJA MODAL	9,751,735,000	11,483,139,000	11,299,074,250	0	11,299,074,250	98.4	184,064,750
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL	32,739,061,240,000	32,931,143,057,000	32,930,787,593,958	1,024,763,255	32,929,762,830,703	100	1,380,226,297
	JUMLAH BELANJA (05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN	34,709,359,285,000	34,790,708,685,000	34,769,547,550,178	6,365,891,165	34,763,181,659,013	99.94	27,527,025,987
06	DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN							
51	BELANJA PEGAWAI	18,944,940,000	18,744,940,000	18,581,530,950	3,562,902	18,577,968,048	99.11	166,971,952
52	BELANJA BARANG	375,675,273,000	380,475,273,000	339,338,602,286	13,977,256,463	325,361,345,823	85.51	55,113,927,177
53	BELANJA MODAL	1,340,000,000	3,540,000,000	3,506,213,800	0	3,506,213,800	99.05	33,786,200
57	BELANJA BANTUAN SOSIAL	21,009,350,000,000	20,902,350,000,000	20,064,151,670,160	298,006,564,565	19,766,145,105,595	94.56	1,136,204,894,405
	JUMLAH BELANJA (06) DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN	21,405,310,213,000	21,305,110,213,000	20,425,578,017,196	311,987,383,930	20,113,590,633,266	95.87	1,191,519,579,734

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / JENIS BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 30/04/20 12:45
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
11	BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL							
51	BELANJA PEGAWAI	114,764,254,000	114,877,626,000	110,500,252,664	70,024,674	110,430,227,990	96.13	4,447,398,010
52	BELANJA BARANG	480,638,386,000	481,812,495,000	461,834,559,121	4,398,385,943	457,436,173,178	94.94	24,376,321,822
53	BELANJA MODAL	128,204,979,000	128,489,479,000	127,388,914,201	4,533,600	127,384,380,601	99.14	1,105,098,399
	JUMLAH BELANJA (11) BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN	723,607,619,000	725,179,600,000	699,723,725,986	4,472,944,217	695,250,781,769	96.49	29,928,818,231
	JUMLAH BELANJA	58,850,076,032,000	59,039,206,791,000	58,057,278,997,474	330,633,545,393	57,726,645,452,081	98.34	1,312,561,338,919

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/20 11:53
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
01	SEKRETARIAT JENDERAL							
0003100DK	Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo							
310014	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO	211,786,000	211,786,000	193,417,289	2,460,000	190,957,289	90.17	20,828,711
	JUMLAH BELANJA Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo	211,786,000	211,786,000	193,417,289	2,460,000	190,957,289	91.33	20,828,711
027010100KP	BA(027) ES1(01) DKI JAKARTA							
418939	PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	135,159,676,000	181,159,676,000	170,974,408,669	1,026,491,512	169,947,917,157	93.81	11,211,758,843
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(01) DKI JAKARTA	135,159,676,000	181,159,676,000	170,974,408,669	1,026,491,512	169,947,917,157	94.38	11,211,758,843
027010700	BA(027) ES1(01) SUMATERA UTARA							
070007	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA	327,078,000	327,078,000	317,080,000	0	317,080,000	96.94	9,998,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(01) SUMATERA UTARA	327,078,000	327,078,000	317,080,000	0	317,080,000	96.94	9,998,000
027010800	BA(027) ES1(01) SUMATERA BARAT							
080038	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT	258,419,000	258,419,000	245,308,200	0	245,308,200	94.93	13,110,800
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(01) SUMATERA BARAT	258,419,000	258,419,000	245,308,200	0	245,308,200	94.93	13,110,800
027011400DK	BA(027) ES1(01) KALIMANTAN TENGAH							
140029	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	239,416,000	239,416,000	235,956,400	0	235,956,400	98.55	3,459,600
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(01) KALIMANTAN TENGAH	239,416,000	239,416,000	235,956,400	0	235,956,400	98.55	3,459,600
027011600DK	027011600DK							
160013	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	240,540,000	240,540,000	236,056,700	0	236,056,700	98.14	4,483,300
	JUMLAH BELANJA 027011600DK	240,540,000	240,540,000	236,056,700	0	236,056,700	98.14	4,483,300
027011800DK	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH							
180014	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	248,768,000	248,768,000	247,250,400	0	247,250,400	99.39	1,517,600
	JUMLAH BELANJA DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	248,768,000	248,768,000	247,250,400	0	247,250,400	99.39	1,517,600
027011900	BA(027) ES1(01) SULAWESI SELATAN							
190005	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	318,341,000	318,341,000	291,255,000	0	291,255,000	91.49	27,086,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(01) SULAWESI SELATAN	318,341,000	318,341,000	291,255,000	0	291,255,000	91.49	27,086,000
027012600	BA(027) ES1(01) BENGKULU							
260013	DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU	236,148,000	236,148,000	208,657,000	0	208,657,000	88.36	27,491,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(01) BENGKULU	236,148,000	236,148,000	208,657,000	0	208,657,000	88.36	27,491,000
027012900	BA(027) ES1(01) BANTEN							
290013	DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN	209,430,000	209,430,000	204,672,000	186,000	204,486,000	97.64	4,944,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(01) BANTEN	209,430,000	209,430,000	204,672,000	186,000	204,486,000	97.73	4,944,000
027013400	BA(027) ES1(01) SULAWESI BARAT							
340007	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT	220,856,000	220,856,000	211,966,200	1,240,000	210,726,200	95.41	10,129,800

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/20 11:53
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl--

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(01) SULAWESI BARAT	220,856,000	220,856,000	211,966,200	1,240,000	210,726,200	95.97	10,129,800
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
010087	DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA	181,903,000	181,903,000	181,038,000	0	181,038,000	99.52	865,000
020005	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	276,924,000	276,924,000	276,281,000	0	276,281,000	99.77	643,000
030003	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH	321,708,000	321,708,000	320,107,900	0	320,107,900	99.5	1,600,100
040025	DINAS SOSIAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	200,522,000	200,522,000	198,688,200	0	198,688,200	99.09	1,833,800
050029	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	387,808,000	387,808,000	360,561,151	36,120,000	324,441,151	83.66	63,366,849
060008	DINAS SOSIAL ACEH	274,027,000	274,027,000	267,816,900	0	267,816,900	97.73	6,210,100
090030	DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU	236,758,000	236,758,000	234,577,800	0	234,577,800	99.08	2,180,200
100011	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI	206,443,000	206,443,000	206,233,400	0	206,233,400	99.9	209,600
110008	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	259,409,000	259,409,000	254,019,100	0	254,019,100	97.92	5,389,900
120015	DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG	216,303,000	216,303,000	215,237,100	0	215,237,100	99.51	1,065,900
130027	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	218,882,000	218,882,000	216,274,000	0	216,274,000	98.81	2,608,000
150012	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	234,296,000	234,296,000	229,848,400	0	229,848,400	98.1	4,447,600
170014	DINAS SOSIAL PROPINSI SULAWESI UTARA	232,883,000	232,883,000	249,573,000	18,740,000	230,833,000	99.12	2,050,000
200015	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	225,502,000	225,502,000	225,362,000	0	225,362,000	99.94	140,000
210012	DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU	271,605,000	271,605,000	263,735,000	0	263,735,000	97.1	7,870,000
220032	DINAS SOSIAL PROVINSI BALI	224,692,000	224,692,000	221,716,100	0	221,716,100	98.68	2,975,900
230017	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	258,228,000	258,228,000	252,720,200	0	252,720,200	97.87	5,507,800
240036	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	299,897,000	299,897,000	297,397,000	36,111,400	261,285,600	87.13	38,611,400
250044	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA	435,792,000	435,792,000	430,742,000	0	430,742,000	98.84	5,050,000
280015	DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA	245,997,000	245,997,000	244,107,000	0	244,107,000	99.23	1,890,000
300022	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	223,100,000	223,100,000	199,638,000	0	199,638,000	89.48	23,462,000
320003	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU	201,982,000	201,982,000	199,382,000	0	199,382,000	98.71	2,600,000
330005	DINAS SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT	382,640,000	382,640,000	382,640,000	0	382,640,000	100	0
417729	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA	181,697,000	181,697,000	174,505,500	0	174,505,500	96.04	7,191,500
440121	SEKRETARIAT JENDERAL	228,357,614,000	267,557,614,000	264,754,483,351	696,871,125	264,057,612,226	98.69	3,500,001,774
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	234,556,612,000	273,756,612,000	270,856,684,102	787,842,525	270,068,841,577	98.94	3,687,770,423
	JUMLAH BELANJA 01	372,227,070,000	457,427,070,000	444,222,711,960	1,818,220,037	442,404,491,923	97.11	15022578077
02	INSPEKTORAT JENDERAL							
027020100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada							
426638	INSPEKTORAT JENDERAL	47,302,812,000	48,506,224,000	47,785,102,711	188,413,463	47,596,689,248	98.12	909,534,752
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	47,302,812,000	48,506,224,000	47,785,102,711	188,413,463	47,596,689,248	98.51	909,534,752

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/20 11:53
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA 02	47,302,812,000	48,506,224,000	47,785,102,711	188,413,463	47,596,689,248	98.51	909534752
03 0003100DK 319011	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO	2,112,141,000	2,112,141,000	2,104,051,584	3,000,000	2,101,051,584	99.47	11,089,416
	JUMLAH BELANJA Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo	2,112,141,000	2,112,141,000	2,104,051,584	3,000,000	2,101,051,584	99.62	11,089,416
0003100TP 319096	Koordinator UAPPA-W Satker TP Provinsi Gorontalo DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO	5,274,050,000	5,274,050,000	5,114,250,257	0	5,114,250,257	96.97	159,799,743
	JUMLAH BELANJA Koordinator UAPPA-W Satker TP Provinsi Gorontalo	5,274,050,000	5,274,050,000	5,114,250,257	0	5,114,250,257	96.97	159,799,743
027030100KP 418940 440193 440213 630859 682033	BA(027) ES1(03) DKI JAKARTA DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DIREKTORAT KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, KESETIAKAWANAN DAN RESTORASI SOSIAL SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL DIREKTORAT PEMBERDAYAAN SOSIAL PERORANGAN, KELUARGA DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	14,451,982,000 20,098,554,000 38,442,413,000 59,273,230,000 83,027,066,000	97,603,608,000 20,098,554,000 48,442,413,000 59,273,230,000 83,027,066,000	97,319,081,354 19,885,649,820 47,174,034,833 58,613,627,871 82,729,702,662	257,410,170 294,991,346 185,351,319 711,033,038 145,947,289	97,061,671,184 19,590,658,474 46,988,683,514 57,902,594,833 82,583,755,373	99.44 97.47 97 97.69 99.47	541,936,816 507,895,526 1,453,729,486 1,370,635,167 443,310,627
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(03) DKI JAKARTA	215,293,245,000	308,444,871,000	305,722,096,540	1,594,733,162	304,127,363,378	99.12	4,317,507,622
027030700 079003	BA(027) ES1(03) SUMATERA UTARA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA	4,712,325,000	4,712,325,000	4,569,099,790	0	4,569,099,790	96.96	143,225,210
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(03) SUMATERA UTARA	4,712,325,000	4,712,325,000	4,569,099,790	0	4,569,099,790	96.96	143,225,210
027030700TP 079134	BA(027) ES1(03) TP DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA	2,261,310,000	2,261,310,000	2,163,634,106	1,852,500	2,161,781,606	95.6	99,528,394
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(03) TP	2,261,310,000	2,261,310,000	2,163,634,106	1,852,500	2,161,781,606	95.68	99,528,394
027030800DK 089029	Kode UAPPAW Tidak Ada DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT	2,922,500,000	2,922,500,000	2,904,893,500	1,210,000	2,903,683,500	99.36	18,816,500
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	2,922,500,000	2,922,500,000	2,904,893,500	1,210,000	2,903,683,500	99.4	18,816,500
027030800TP 089141	BA(027) ES1(03) SUMATERA BARAT DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT	3,834,690,000	3,834,690,000	3,497,664,000	0	3,497,664,000	91.21	337,026,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(03) SUMATERA BARAT	3,834,690,000	3,834,690,000	3,497,664,000	0	3,497,664,000	91.21	337,026,000
027030900TP 091327 099323	BA(027) ES1(03) RIAU TP DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU	1,558,710,000 77,060,000	1,558,710,000 77,060,000	1,530,299,068 75,320,000	0 0	1,530,299,068 75,320,000	98.18 97.74	28,410,932 1,740,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/20 11:53
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(03) RIAU TP	1,635,770,000	1,635,770,000	1,605,619,068	0	1,605,619,068	98.16	30,150,932
027031400XX	BA(027) ES1(03) KALIMANTAN TENGAH							
149017	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2,540,669,000	2,540,669,000	2,536,321,000	6,670,000	2,529,651,000	99.57	11,018,000
149122	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	5,401,510,000	5,401,510,000	5,375,601,100	0	5,375,601,100	99.52	25,908,900
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(03) KALIMANTAN TENGAH	7,942,179,000	7,942,179,000	7,911,922,100	6,670,000	7,905,252,100	99.62	36,926,900
027031600DK	027031600DK							
169007	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	2,300,439,000	2,300,439,000	2,216,027,800	0	2,216,027,800	96.33	84,411,200
	JUMLAH BELANJA 027031600DK	2,300,439,000	2,300,439,000	2,216,027,800	0	2,216,027,800	96.33	84,411,200
027031600TP	027031600TP							
169123	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	2,950,270,000	2,950,270,000	2,936,876,160	0	2,936,876,160	99.55	13,393,840
	JUMLAH BELANJA 027031600TP	2,950,270,000	2,950,270,000	2,936,876,160	0	2,936,876,160	99.55	13,393,840
027031700	BA(027) ES1(03) SULAWESI UTARA							
179009	DINAS SOSIAL PROPINSI SULAWESI UTARA	2,791,956,000	2,791,956,000	2,757,166,063	11,443,000	2,745,723,063	98.34	46,232,937
179111	DINAS SOSIAL PROPINSI SULAWESI UTARA	5,495,150,000	5,495,150,000	5,150,904,893	400,000	5,150,504,893	93.73	344,645,107
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(03) SULAWESI UTARA	8,287,106,000	8,287,106,000	7,908,070,956	11,843,000	7,896,227,956	95.43	390,878,044
027031800DK	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH							
189013	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	2,714,604,000	2,714,604,000	2,619,834,750	3,460,300	2,616,374,450	96.38	98,229,550
	JUMLAH BELANJA DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	2,714,604,000	2,714,604,000	2,619,834,750	3,460,300	2,616,374,450	96.51	98,229,550
027031800TP	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH							
189141	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	4,357,190,000	4,357,190,000	4,002,990,584	0	4,002,990,584	91.87	354,199,416
	JUMLAH BELANJA DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	4,357,190,000	4,357,190,000	4,002,990,584	0	4,002,990,584	91.87	354,199,416
027031900	BA(027) ES1(03) SULAWESI SELATAN							
199007	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	4,271,492,000	4,271,492,000	4,220,206,070	400,000	4,219,806,070	98.79	51,685,930
199135	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	1,947,230,000	1,947,230,000	1,713,029,427	0	1,713,029,427	87.97	234,200,573
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(03) SULAWESI SELATAN	6,218,722,000	6,218,722,000	5,933,235,497	400,000	5,932,835,497	95.41	285,886,503
027032100	BA(027) ES1(03) MALUKU							
219018	DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU	2,454,768,000	2,454,768,000	2,440,687,000	0	2,440,687,000	99.43	14,081,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(03) MALUKU	2,454,768,000	2,454,768,000	2,440,687,000	0	2,440,687,000	99.43	14,081,000
027032600	BA(027) ES1(03) BENGKULU							
269019	DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU	2,182,496,000	2,182,496,000	2,136,971,934	2,000,000	2,134,971,934	97.82	47,524,066
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(03) BENGKULU	2,182,496,000	2,182,496,000	2,136,971,934	2,000,000	2,134,971,934	97.91	47,524,066
027032900	BA(027) ES1(03) BANTEN							
299012	DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN	2,463,619,000	2,463,619,000	2,376,627,000	0	2,376,627,000	96.47	86,992,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/20 11:53
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(03) BANTEN	2,463,619,000	2,463,619,000	2,376,627,000	0	2,376,627,000	96.47	86,992,000
027033400	BA(027) ES1(03) SULAWESI BARAT							
340011	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT	1,752,596,000	1,752,596,000	1,748,810,000	0	1,748,810,000	99.78	3,786,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(03) SULAWESI BARAT	1,752,596,000	1,752,596,000	1,748,810,000	0	1,748,810,000	99.78	3,786,000
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
019028	DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA	1,682,541,000	1,682,541,000	1,618,016,000	0	1,618,016,000	96.17	64,525,000
029004	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	5,876,870,000	5,876,870,000	5,854,312,800	0	5,854,312,800	99.62	22,557,200
039000	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH	5,703,141,000	5,703,141,000	5,660,618,500	0	5,660,618,500	99.25	42,522,500
049014	DINAS SOSIAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	2,503,259,000	2,503,259,000	2,499,298,248	0	2,499,298,248	99.84	3,960,752
059014	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	6,373,957,000	6,373,957,000	5,934,319,099	31,532,000	5,902,787,099	92.61	471,169,901
069006	DINAS SOSIAL ACEH	3,722,809,000	3,722,809,000	3,661,384,500	0	3,661,384,500	98.35	61,424,500
069143	DINAS SOSIAL ACEH	2,272,010,000	2,272,010,000	2,218,678,300	0	2,218,678,300	97.65	53,331,700
099018	DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU	2,711,996,000	2,711,996,000	2,643,116,971	2,609,710	2,640,507,261	97.36	71,488,739
109009	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI	2,577,612,000	2,577,612,000	2,429,273,000	0	2,429,273,000	94.25	148,339,000
109129	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI	3,205,290,000	3,205,290,000	2,918,363,000	0	2,918,363,000	91.05	286,927,000
119009	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	3,173,978,000	3,173,978,000	3,031,549,400	5,710,000	3,025,839,400	95.33	148,138,600
119140	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	1,140,030,000	1,140,030,000	1,054,528,290	0	1,054,528,290	92.5	85,501,710
129016	DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG	3,025,142,000	3,025,142,000	3,023,529,000	0	3,023,529,000	99.95	1,613,000
139011	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	2,646,189,000	2,646,189,000	2,592,232,000	0	2,592,232,000	97.96	53,957,000
139136	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	2,871,890,000	2,871,890,000	2,835,052,250	0	2,835,052,250	98.72	36,837,750
159008	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2,769,723,000	2,769,723,000	2,588,969,512	0	2,588,969,512	93.47	180,753,488
159117	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	235,900,000	235,900,000	235,568,000	0	235,568,000	99.86	332,000
160256	DINAS SOSIAL KABUPATEN PASER	2,897,770,000	2,897,770,000	112,991,600	0	112,991,600	3.9	2,784,778,400
190637	DINAS SOSIAL KABUPATEN TANA TORAJA	2,146,360,000	2,146,360,000	2,101,392,500	0	2,101,392,500	97.9	44,967,500
200365	DINAS SOSIAL KABUPATEN MUNA	1,234,280,000	1,234,280,000	1,218,069,000	0	1,218,069,000	98.69	16,211,000
205402	DINAS SOSIAL KABUPATEN BUTON SELATAN	1,672,540,000	1,672,540,000	1,597,641,000	0	1,597,641,000	95.52	74,899,000
209013	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	2,962,244,000	2,962,244,000	2,916,906,963	0	2,916,906,963	98.47	45,337,037
210446	DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU	1,829,640,000	1,829,640,000	1,815,469,200	0	1,815,469,200	99.23	14,170,800
219096	DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU	3,555,110,000	3,555,110,000	3,470,405,550	0	3,470,405,550	97.62	84,704,450
229011	DINAS SOSIAL PROVINSI BALI	1,936,302,000	1,936,302,000	1,850,919,000	10,000,000	1,840,919,000	95.07	95,383,000
230459	DINAS SOSIAL KABUPATEN BIMA	3,526,380,000	3,526,380,000	3,471,464,950	0	3,471,464,950	98.44	54,915,050
230574	Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa	2,289,550,000	2,289,550,000	2,220,383,200	5,220,000	2,215,163,200	96.75	74,386,800
239020	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	2,558,759,000	2,558,759,000	2,552,694,550	0	2,552,694,550	99.76	6,064,450

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/20 11:53
Halaman : 6
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
249017	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	3,813,306,000	3,813,306,000	3,781,678,700	116,467,740	3,665,210,960	96.12	148,095,040
249167	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	3,061,370,000	3,061,370,000	3,000,551,650	320,000	3,000,231,650	98	61,138,350
250163	DINAS SOSIAL KABUPATEN JAYAPURA	4,783,890,000	4,783,890,000	4,727,630,000	0	4,727,630,000	98.82	56,260,000
251422	DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN ASMAT	7,034,700,000	7,034,700,000	6,472,590,211	8,096,000	6,464,494,211	91.89	570,205,789
251739	DINAS SOSIAL KABUPATEN KEEROM	6,256,310,000	6,256,310,000	6,126,213,964	0	6,126,213,964	97.92	130,096,036
253008	DINAS SOSIAL KABUPATEN DOGIYAI	3,070,160,000	3,070,160,000	3,052,382,000	0	3,052,382,000	99.42	17,778,000
259023	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA	5,796,901,000	5,796,901,000	5,796,901,000	0	5,796,901,000	100	0
259105	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA	2,752,010,000	2,752,010,000	2,587,885,157	0	2,587,885,157	94.04	164,124,843
280907	DINAS SOSIAL KABUPATEN PULAU TALIABU	1,790,750,000	1,790,750,000	1,750,591,779	0	1,750,591,779	97.76	40,158,221
289016	DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA	2,518,818,000	2,518,818,000	2,500,818,000	0	2,500,818,000	99.29	18,000,000
289110	DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA	2,258,410,000	2,258,410,000	2,252,694,863	0	2,252,694,863	99.75	5,715,137
309016	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1,652,142,000	1,652,142,000	1,612,173,681	0	1,612,173,681	97.58	39,968,319
329001	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1,983,204,000	1,983,204,000	1,968,685,037	0	1,968,685,037	99.27	14,518,963
330834	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAIMANA	3,136,280,000	3,136,280,000	2,894,117,330	0	2,894,117,330	92.28	242,162,670
339000	DINAS SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT	2,993,996,000	2,993,996,000	2,038,275,000	0	2,038,275,000	68.08	955,721,000
339094	DINAS SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT	2,483,490,000	2,483,490,000	2,422,685,600	0	2,422,685,600	97.55	60,804,400
340458	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN POLEWALI MANDAR	2,687,830,000	2,687,830,000	2,625,160,694	0	2,625,160,694	97.67	62,669,306
359904	DINAS SOSIAL KABUPATEN NUNUKAN	2,238,440,000	2,238,440,000	828,488,226	0	828,488,226	37.01	1,409,951,774
417730	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1,521,881,000	1,521,881,000	1,129,627,572	1,434,600	1,128,192,972	74.13	393,688,028
427895	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN MALINAU	857,110,000	857,110,000	826,233,286	0	826,233,286	96.4	30,876,714
681555	DINAS SOSIAL KABUPATEN TELUK WONDAMA	3,541,470,000	3,541,470,000	3,053,446,638	0	3,053,446,638	86.22	488,023,362
681562	DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SULA	2,358,850,000	2,358,850,000	2,306,456,370	0	2,306,456,370	97.78	52,393,630
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	147,692,590,000	147,692,590,000	137,882,433,141	181,390,050	137,701,043,091	93.36	9,991,546,909
	JUMLAH BELANJA 03	429,362,610,000	522,514,236,000	507,795,795,767	1,806,559,012	505,989,236,755	97.18	16524999245
04	DITJEN REHABILITASI SOSIAL							
0003100DK	Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo							
319012	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO	1,663,345,000	1,372,145,000	1,364,748,902	10,800,700	1,353,948,202	98.67	18,196,798
	JUMLAH BELANJA Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo	1,663,345,000	1,372,145,000	1,364,748,902	10,800,700	1,353,948,202	99.46	18,196,798
027040100KD	BA(027) ES1(04) DKI JAKARTA							
352594	BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "BAMBU APUS" DI JAKARTA	10,443,621,000	12,040,621,000	11,938,466,350	7,332,236	11,931,134,114	99.09	109,486,886

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/20 11:53
Halaman : 7
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
426701	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "HANDAYANI" DI JAKARTA	10,709,043,000	12,423,043,000	12,296,753,137	5,588,363	12,291,164,774	98.94	131,878,226
426710	BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS WANITA TUNA SUSILA "MULYA JAYA" DI JAKARTA	11,597,618,000	11,591,498,000	11,435,096,412	11,848,459	11,423,247,953	98.55	168,250,047
560532	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "MELATI" DI JAKARTA	9,449,629,000	9,930,629,000	9,455,590,992	48,508,130	9,407,082,862	94.73	523,546,138
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) DKI JAKARTA	42,199,911,000	45,985,791,000	45,125,906,891	73,277,188	45,052,629,703	98.13	933,161,297
027040200KD	BA(027) ES1(04) JAWA BARAT							
020650	LOKA REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "KAHURIPAN" DI SUKABUMI	5,370,476,000	5,903,476,000	5,773,145,215	14,473,731	5,758,671,484	97.55	144,804,516
369110	BALAI LITERASI BRAILLE INDONESIA "ABIYOSO" DI CIMAH	12,168,335,000	12,647,335,000	12,348,536,089	303,664	12,348,232,425	97.64	299,102,575
369131	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "PHALA MARTHA" DI SUKABUMI	8,533,743,000	9,564,743,000	9,328,875,377	30,011,123	9,298,864,254	97.22	265,878,746
369148	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "WYATA GUNA" DI BANDUNG	16,722,798,000	16,409,057,000	16,220,830,455	13,752,346	16,207,078,109	98.77	201,978,891
426669	BALAI REHABILITASI SOSIAL EKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS "PANGUDI LUHUR" DI BEKASI	14,276,673,000	15,354,673,000	15,255,254,984	189,802	15,255,065,182	99.35	99,607,818
426732	BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "BUDHI DHARMA" DI BEKASI	11,971,308,000	12,972,308,000	12,626,845,511	74,068,047	12,552,777,464	96.77	419,530,536
426814	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TAN MIYAT" DI BEKASI	9,891,548,000	11,321,548,000	11,297,052,322	565,907	11,296,486,415	99.78	25,061,585
526071	BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "GALIH PAKUAN" DI BOGOR	16,031,739,000	16,106,739,000	15,610,685,984	77,107,435	15,533,578,549	96.44	573,160,451
560504	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "CIUNG WANARA" DI BOGOR	8,716,737,000	9,148,737,000	8,928,453,971	13,971,682	8,914,482,289	97.44	234,254,711
613057	BALAI BESAR REHABILITASI VOKASIONAL PENYANDANG DISABILITAS DI CIBINONG	20,590,679,000	21,426,679,000	21,231,057,936	33,938,664	21,197,119,272	98.93	229,559,728
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) JAWA BARAT	124,274,036,000	130,855,295,000	128,620,737,844	258,382,401	128,362,355,443	98.29	2,492,939,557
027040300KD	BA(027) ES1(04) JAWA TENGAH							
030952	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "MARGO LARAS" DI PATI	8,169,995,000	8,502,303,000	8,395,143,582	10,496,676	8,384,646,906	98.62	117,656,094
031558	BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "SATRIA" DI BATURRADEN	9,292,669,000	9,561,669,000	9,518,641,160	741,958	9,517,899,202	99.54	43,769,798
369169	BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "PROF. DR. SOEHARSO" DI SURAKARTA	27,324,823,000	29,380,699,000	29,114,630,514	2,448,996	29,112,181,518	99.09	268,517,482
369173	BALAI BESAR REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "KARTINI" DI TEMANGGUNG	23,396,495,000	24,363,495,000	23,985,128,270	1,127,699	23,984,000,571	98.44	379,494,429
426772	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "ANTASENSA" DI MAGELANG	11,293,128,000	11,508,888,000	11,291,675,069	20,082,947	11,271,592,122	97.94	237,295,878
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) JAWA TENGAH	79,477,110,000	83,317,054,000	82,305,218,595	34,898,276	82,270,320,319	98.79	1,046,733,681
027040600KD	BA(027) ES1(04) NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
690243	LOKA REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN	6,305,532,000	7,146,358,000	7,117,888,705	11,167,724	7,106,720,981	99.45	39,637,019

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/20 11:53
Halaman : 8
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	PERLINDUNGAN KHUSUS "DARUSSA'ADAH" DI ACEH							
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) NANGGROE ACEH	6,305,532,000	7,146,358,000	7,117,888,705	11,167,724	7,106,720,981	99.6	39,637,019
027040700DK	DINAS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA							
079004	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA	2,707,403,000	2,536,303,000	2,521,330,400	0	2,521,330,400	99.41	14,972,600
	JUMLAH BELANJA DINAS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA	2,707,403,000	2,536,303,000	2,521,330,400	0	2,521,330,400	99.41	14,972,600
027040700KD	Panti Sosial Pamardi Putra "Insyaf" Sumatera Utara							
070161	BALAI REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "BAHAGIA" DI MEDAN	8,099,880,000	8,074,880,000	7,935,861,910	3,185,030	7,932,676,880	98.24	142,203,120
426763	BALAI REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA "INSYAF" DI MEDAN	11,376,806,000	11,711,806,000	11,640,106,741	2,624,560	11,637,482,181	99.37	74,323,819
	JUMLAH BELANJA Panti Sosial Pamardi Putra "Insyaf" Sumatera Utara	19,476,686,000	19,786,686,000	19,575,968,651	5,809,590	19,570,159,061	98.94	216,526,939
027040800	BA(027) ES1(04) SUMATERA BARAT							
089030	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT	2,490,753,000	2,436,923,000	2,251,278,500	11,219,000	2,240,059,500	91.92	196,863,500
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) SUMATERA BARAT	2,490,753,000	2,436,923,000	2,251,278,500	11,219,000	2,240,059,500	92.38	196,863,500
027040900KD	BA(027) ES1(04) RIAU							
426675	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "RUMBAI" DI PEKANBARU	8,889,483,000	8,393,183,000	8,232,604,757	925,034	8,231,679,723	98.08	161,503,277
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) RIAU	8,889,483,000	8,393,183,000	8,232,604,757	925,034	8,231,679,723	98.09	161,503,277
027041000KD	BA(027) ES1(04) JAMBI							
426794	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "ALYATAMA" DI JAMBI	7,025,958,000	7,100,958,000	6,835,020,728	2,189,525	6,832,831,203	96.22	268,126,797
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) JAMBI	7,025,958,000	7,100,958,000	6,835,020,728	2,189,525	6,832,831,203	96.25	268,126,797
027041100KD	BA(027) ES1(04) SUMATERA SELATAN							
369600	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "BUDI PERKASA" DI PALEMBANG	11,299,760,000	11,604,760,000	11,348,659,087	7,309,977	11,341,349,110	97.73	263,410,890
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) SUMATERA SELATAN	11,299,760,000	11,604,760,000	11,348,659,087	7,309,977	11,341,349,110	97.79	263,410,890
027041400DK	BA(027) ES1(04) KALIMANTAN TENGAH							
149018	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1,666,390,000	1,473,850,000	1,460,220,000	0	1,460,220,000	99.08	13,630,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) KALIMANTAN TENGAH	1,666,390,000	1,473,850,000	1,460,220,000	0	1,460,220,000	99.08	13,630,000
027041500KD	BA(027) ES1(04) KALIMANTAN SELATAN							
526092	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "BUDI LUHUR" DI BANJARBARU	8,346,723,000	8,625,723,000	8,584,099,146	8,416,064	8,575,683,082	99.42	50,039,918
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) KALIMANTAN SELATAN	8,346,723,000	8,625,723,000	8,584,099,146	8,416,064	8,575,683,082	99.52	50,039,918
027041600DK	027041600DK							
169008	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	2,231,385,000	1,973,175,000	1,916,259,300	2,920,000	1,913,339,300	96.97	59,835,700
	JUMLAH BELANJA 027041600DK	2,231,385,000	1,973,175,000	1,916,259,300	2,920,000	1,913,339,300	97.12	59,835,700

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/20 11:53
Halaman : 9
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
027041700KD 426741	BA(027) ES1(04) SULAWESI UTARA BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TUMOU TOU" DI MANADO	7,290,406,000	7,566,406,000	7,518,674,152	1,883,488	7,516,790,664	99.34	49,615,336
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) SULAWESI UTARA	7,290,406,000	7,566,406,000	7,518,674,152	1,883,488	7,516,790,664	99.37	49,615,336
027041800DK 189014	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	1,966,434,000	1,928,644,000	1,921,323,500	19,794,800	1,901,528,700	98.59	27,115,300
	JUMLAH BELANJA DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	1,966,434,000	1,928,644,000	1,921,323,500	19,794,800	1,901,528,700	99.62	27,115,300
027041800KD 560511	BA(027) ES1(04) SULAWESI TENGAH BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL "NIPOTOWE" DI PALU	9,963,726,000	9,938,726,000	9,749,264,534	23,275,853	9,725,988,681	97.86	212,737,319
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) SULAWESI TENGAH	9,963,726,000	9,938,726,000	9,749,264,534	23,275,853	9,725,988,681	98.09	212,737,319
027041900KD 426644	BA(027) ES1(04) SULAWESI SELATAN BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "WIRAJAYA" DI MAKASSAR	12,351,331,000	12,528,331,000	12,392,055,288	9,633,286	12,382,422,002	98.84	145,908,998
426690	BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "GAU MABAJI" DI GOWA	9,580,456,000	9,500,456,000	9,390,956,721	20,071,391	9,370,885,330	98.64	129,570,670
627343	BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "TODDOPULI" DI MAKASSAR	8,510,524,000	8,822,524,000	8,774,099,564	2,804,244	8,771,295,320	99.42	51,228,680
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) SULAWESI SELATAN	30,442,311,000	30,851,311,000	30,557,111,573	32,508,921	30,524,602,652	99.05	326,708,348
027042000KD 690250	BA(027) ES1(04) SULAWESI TENGGARA LOKA REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "MEOHAI" DI KENDARI	6,846,669,000	7,294,669,000	7,210,091,219	1,754,403	7,208,336,816	98.82	86,332,184
690264	LOKA REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "MINAULA" DI KENDARI	8,945,857,000	9,225,857,000	8,758,824,530	1,288	8,758,823,242	94.94	467,033,758
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) SULAWESI TENGGARA	15,792,526,000	16,520,526,000	15,968,915,749	1,755,691	15,967,160,058	96.66	553,365,942
027042200KD 426650	BA(027) ES1(04) BALI BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "MAHATMIYA" DI TABANAN	7,948,565,000	8,023,565,000	7,791,370,777	2,882	7,791,367,895	97.11	232,197,105
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) BALI	7,948,565,000	8,023,565,000	7,791,370,777	2,882	7,791,367,895	97.11	232,197,105
027042300KD 526085	BA(027) ES1(04) NUSA TENGGARA BARAT BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "PARAMITA" DI MATARAM	9,530,305,000	9,787,305,000	9,580,219,466	13,955,997	9,566,263,469	97.74	221,041,531
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) NUSA TENGGARA BARAT	9,530,305,000	9,787,305,000	9,580,219,466	13,955,997	9,566,263,469	97.88	221,041,531
027042400KD 426808	BA(027) ES1(04) NUSA TENGGARA TIMUR BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "NAIBONAT" DI KUPANG	8,218,939,000	8,745,939,000	8,398,591,427	2,269,118	8,396,322,309	96	349,616,691
560550	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA "EFFATA" DI KUPANG	8,298,487,000	8,620,487,000	8,383,064,226	2,338,834	8,380,725,392	97.22	239,761,608
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) NUSA TENGGARA TIMUR	16,517,426,000	17,366,426,000	16,781,655,653	4,607,952	16,777,047,701	96.63	589,378,299
027042600KD 269020	BA(027) ES1(04) BENGKULU DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU	1,714,040,000	1,613,640,000	1,477,665,500	0	1,477,665,500	91.57	135,974,500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/20 11:53
Halaman : 10
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) BENGKULU	1,714,040,000	1,613,640,000	1,477,665,500	0	1,477,665,500	91.57	135,974,500
027042900	BA(027) ES1(04) BANTEN							
299014	DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN	1,722,082,000	1,481,862,000	1,454,225,000	0	1,454,225,000	98.13	27,637,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) BANTEN	1,722,082,000	1,481,862,000	1,454,225,000	0	1,454,225,000	98.13	27,637,000
027043400	BA(027) ES1(04) SULAWESI BARAT							
340012	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT	1,431,411,000	1,421,611,000	1,227,783,670	0	1,227,783,670	86.37	193,827,330
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(04) SULAWESI BARAT	1,431,411,000	1,421,611,000	1,227,783,670	0	1,227,783,670	86.37	193,827,330
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
019029	DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA	1,192,537,000	982,857,000	975,295,000	0	975,295,000	99.23	7,562,000
029005	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	2,434,045,000	2,519,495,000	2,418,117,000	0	2,418,117,000	95.98	101,378,000
039004	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH	2,679,938,000	3,021,078,000	2,984,357,840	222,500	2,984,135,340	98.78	36,942,660
049015	DINAS SOSIAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	2,312,085,000	2,312,085,000	2,260,860,816	0	2,260,860,816	97.78	51,224,184
059015	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	3,242,003,000	2,865,743,000	2,856,668,600	18,550,000	2,838,118,600	99.04	27,624,400
069007	DINAS SOSIAL ACEH	1,777,531,000	1,985,991,000	1,880,344,058	0	1,880,344,058	94.68	105,646,942
099019	DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU	1,627,827,000	1,517,427,000	1,400,232,400	6,412,000	1,393,820,400	91.85	123,606,600
109010	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI	2,157,095,000	2,034,695,000	1,954,339,000	0	1,954,339,000	96.05	80,356,000
119010	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	2,558,253,000	2,451,263,000	2,430,881,272	0	2,430,881,272	99.17	20,381,728
129017	DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG	2,755,438,000	2,685,158,000	2,682,008,000	0	2,682,008,000	99.88	3,150,000
139012	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	2,647,444,000	2,572,324,000	2,572,044,000	0	2,572,044,000	99.99	280,000
159009	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	2,684,790,000	2,396,290,000	2,137,182,086	0	2,137,182,086	89.19	259,107,914
179010	DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	2,874,070,000	2,766,470,000	2,499,766,342	32,978,400	2,466,787,942	89.17	299,682,058
199008	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	2,124,550,000	2,190,450,000	2,178,561,200	4,524,000	2,174,037,200	99.25	16,412,800
209014	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1,820,380,000	1,912,680,000	1,882,280,000	0	1,882,280,000	98.41	30,400,000
219019	DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU	2,188,359,000	1,990,309,000	1,888,501,000	0	1,888,501,000	94.88	101,808,000
229012	DINAS SOSIAL PROVINSI BALI	1,822,565,000	1,720,165,000	1,626,575,300	0	1,626,575,300	94.56	93,589,700
239021	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	1,380,056,000	1,380,056,000	1,275,645,700	120,000	1,275,525,700	92.43	104,530,300
249018	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	3,219,132,000	3,291,412,000	3,148,556,800	67,485,754	3,081,071,046	93.61	210,340,954
259024	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA	1,411,675,000	1,258,165,000	1,231,104,500	0	1,231,104,500	97.85	27,060,500
285138	BALAI REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "WASANA BAHAGIA" DI TERNATE	9,486,992,000	9,953,992,000	9,854,442,329	3,527,053	9,850,915,276	98.96	103,076,724
289017	DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA	2,356,990,000	2,356,990,000	2,356,340,000	0	2,356,340,000	99.97	650,000
309017	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1,571,805,000	1,590,855,000	1,331,371,207	650,000	1,330,721,207	83.65	260,133,793
329002	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2,510,362,000	2,432,822,000	2,422,888,384	0	2,422,888,384	99.59	9,933,616
339001	DINAS SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT	1,025,695,000	1,025,695,000	973,608,000	0	973,608,000	94.92	52,087,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/20 11:53
Halaman : 11
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
417731	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1,037,356,000	1,035,996,000	831,318,733	27,983,000	803,335,733	77.54	232,660,267
440222	DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL ANAK	113,577,930,000	120,314,587,000	119,705,974,416	429,715,789	119,276,258,627	99.14	1,038,328,373
440238	DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA	152,404,107,000	155,073,187,000	153,507,902,234	248,054,453	153,259,847,781	98.83	1,813,339,219
440244	DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	139,002,097,000	138,709,097,000	127,704,439,938	996,012,930	126,708,427,008	91.35	12,000,669,992
440250	DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG	44,385,643,000	44,189,243,000	43,114,173,629	651,139,470	42,463,034,159	96.09	1,726,208,841
440269	DIREKTORAT REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA	108,871,461,000	108,765,961,000	107,906,156,358	398,459,854	107,507,696,504	98.84	1,258,264,496
560525	BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS MENTAL "DHARMA GUNA" DI BENGKULU	8,728,691,000	9,101,691,000	8,991,943,909	26,229,293	8,965,714,616	98.51	135,976,384
630842	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL	110,663,814,000	112,248,308,000	110,354,062,545	556,968,010	109,797,094,535	97.82	2,451,213,465
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	740,532,716,000	750,652,537,000	731,337,942,596	3,469,032,506	727,868,910,090	97.43	22,783,626,910
	JUMLAH BELANJA 04	1,162,906,423,000	1,189,760,763,000	1,162,626,093,676	3,994,133,569	1,158,631,960,107	97.72	31128802893
05	DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
0003100DK	Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo							
319013	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO	5,783,934,000	5,783,934,000	5,734,765,522	15,525,000	5,719,240,522	98.88	64,693,478
	JUMLAH BELANJA Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo	5,783,934,000	5,783,934,000	5,734,765,522	15,525,000	5,719,240,522	99.15	64,693,478
027050100KP	BA(027) ES1(05) DKI JAKARTA							
426820	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	52,392,659,000	54,787,634,000	53,913,859,108	460,415,471	53,453,443,637	97.56	1,334,190,363
440275	DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	113,186,537,000	153,235,937,000	152,944,967,336	245,281,147	152,699,686,189	99.65	536,250,811
440281	DIREKTORAT PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	41,925,879,000	98,225,879,000	97,492,771,415	301,962,680	97,190,808,735	98.95	1,035,070,265
440310	DIREKTORAT JAMINAN SOSIAL KELUARGA	34,239,628,287,000	34,222,233,312,000	34,210,367,707,922	5,067,945,519	34,205,299,762,403	99.95	16,933,549,597
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(05) DKI JAKARTA	34,447,133,362,000	34,528,482,762,000	34,514,719,305,781	6,075,604,817	34,508,643,700,964	99.96	19,839,061,036
027050700	BA(027) ES1(05) SUMATERA UTARA							
079005	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA	10,087,830,000	10,087,830,000	9,834,209,195	0	9,834,209,195	97.49	253,620,805
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(05) SUMATERA UTARA	10,087,830,000	10,087,830,000	9,834,209,195	0	9,834,209,195	97.49	253,620,805
027050800	BA(027) ES1(05) SUMATERA BARAT							
089031	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT	6,518,020,000	6,518,020,000	6,509,448,600	0	6,509,448,600	99.87	8,571,400
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(05) SUMATERA BARAT	6,518,020,000	6,518,020,000	6,509,448,600	0	6,509,448,600	99.87	8,571,400
027051400DK	BA(027) ES1(05) KALIMANTAN TENGAH							
149019	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	5,759,401,000	5,759,401,000	5,729,861,100	0	5,729,861,100	99.49	29,539,900
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(05) KALIMANTAN TENGAH	5,759,401,000	5,759,401,000	5,729,861,100	0	5,729,861,100	99.49	29,539,900
027051600DK	027051600DK							
169009	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	4,743,458,000	4,743,458,000	4,708,062,040	2,000,000	4,706,062,040	99.21	37,395,960

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/20 11:53
Halaman : 12
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA 027051600DK	4,743,458,000	4,743,458,000	4,708,062,040	2,000,000	4,706,062,040	99.25	37,395,960
027051800DK 189015	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	6,044,662,000	6,044,662,000	5,844,868,500	500,000	5,844,368,500	96.69	200,293,500
	JUMLAH BELANJA DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	6,044,662,000	6,044,662,000	5,844,868,500	500,000	5,844,368,500	96.69	200,293,500
027051900 199009	BA(027) ES1(05) SULAWESI SELATAN DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	9,245,552,000	9,245,552,000	8,728,193,543	12,550,000	8,715,643,543	94.27	529,908,457
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(05) SULAWESI SELATAN	9,245,552,000	9,245,552,000	8,728,193,543	12,550,000	8,715,643,543	94.4	529,908,457
027052600 269021	BA(027) ES1(05) BENGKULU DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU	5,839,924,000	5,839,924,000	5,295,423,713	250,000	5,295,173,713	90.67	544,750,287
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(05) BENGKULU	5,839,924,000	5,839,924,000	5,295,423,713	250,000	5,295,173,713	90.68	544,750,287
027052900 299015	BA(027) ES1(05) BANTEN DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN	7,891,876,000	7,891,876,000	7,793,876,000	0	7,793,876,000	98.76	98,000,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(05) BANTEN	7,891,876,000	7,891,876,000	7,793,876,000	0	7,793,876,000	98.76	98,000,000
027053400 340014	BA(027) ES1(05) SULAWESI BARAT DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT	4,543,250,000	4,543,250,000	4,275,752,400	0	4,275,752,400	94.11	267,497,600
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(05) SULAWESI BARAT	4,543,250,000	4,543,250,000	4,275,752,400	0	4,275,752,400	94.11	267,497,600
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
019030	DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA	7,627,450,000	7,627,450,000	7,593,785,000	0	7,593,785,000	99.56	33,665,000
029006	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	19,875,558,000	19,875,558,000	19,254,185,420	94,000	19,254,091,420	96.87	621,466,580
039005	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH	19,334,855,000	19,334,855,000	18,572,528,309	10,829,448	18,561,698,861	96	773,156,139
049016	DINAS SOSIAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	5,938,710,000	5,938,710,000	5,916,775,977	0	5,916,775,977	99.63	21,934,023
059016	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	20,566,740,000	20,566,740,000	20,004,085,225	37,492,400	19,966,592,825	97.08	600,147,175
069008	DINAS SOSIAL ACEH	9,166,292,000	9,166,292,000	8,770,493,031	300,000	8,770,193,031	95.68	396,098,969
099020	DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU	5,741,802,000	5,741,802,000	5,339,793,750	8,638,800	5,331,154,950	92.85	410,647,050
109011	DINAS, SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI	5,684,613,000	5,684,613,000	5,681,696,201	0	5,681,696,201	99.95	2,916,799
119011	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	8,996,383,000	8,996,383,000	8,974,060,000	0	8,974,060,000	99.75	22,323,000
129018	DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG	7,763,480,000	7,763,480,000	7,727,069,585	0	7,727,069,585	99.53	36,410,415
139013	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	6,472,633,000	6,472,633,000	6,439,342,766	0	6,439,342,766	99.49	33,290,234
159010	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	5,926,771,000	5,926,771,000	5,888,635,155	0	5,888,635,155	99.36	38,135,845
179011	DINAS SOSIAL PROPINSI SULAWESI UTARA	5,746,268,000	5,746,268,000	5,722,412,431	9,510,000	5,712,902,431	99.42	33,365,569
209015	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	6,433,997,000	6,433,997,000	6,407,381,500	0	6,407,381,500	99.59	26,615,500
219020	DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU	6,572,934,000	6,572,934,000	6,156,805,000	5,375,000	6,151,430,000	93.59	421,504,000
229013	DINAS SOSIAL PROVINSI BALI	4,672,610,000	4,672,610,000	4,241,288,195	6,800,000	4,234,488,195	90.62	438,121,805

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/20 11:53
Halaman : 13
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
239023	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	6,352,884,000	6,352,884,000	6,221,177,275	0	6,221,177,275	97.93	131,706,725
249019	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	11,102,557,000	11,102,557,000	10,692,187,723	140,925,900	10,551,261,823	95.03	551,295,177
259025	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA	10,060,117,000	10,060,117,000	10,058,794,600	0	10,058,794,600	99.99	1,322,400
289018	DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA	4,898,546,000	4,898,546,000	4,781,988,850	21,600,000	4,760,388,850	97.18	138,157,150
309018	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3,236,495,000	3,236,495,000	3,020,999,293	5,165,800	3,015,833,493	93.18	220,661,507
329003	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU	3,841,061,000	3,841,061,000	3,835,919,000	0	3,835,919,000	99.87	5,142,000
339002	DINAS SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT	6,885,057,000	6,885,057,000	6,748,690,000	0	6,748,690,000	98.02	136,367,000
417732	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA	2,870,203,000	2,870,203,000	2,323,689,498	12,730,000	2,310,959,498	80.52	559,243,502
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	195,768,016,000	195,768,016,000	190,373,783,784	259,461,348	190,114,322,436	97.24	5,653,693,564
	JUMLAH BELANJA 05	34,709,359,285,000	34,790,708,685,000	34,769,547,550,178	6,365,891,165	34,763,181,659,013	99.94	27527025987
06	DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN							
0003100DK	Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo							
418982	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI GORONTALO	3,365,408,000	3,365,408,000	3,339,471,700	13,555,000	3,325,916,700	98.83	39,491,300
	JUMLAH BELANJA Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo	3,365,408,000	3,365,408,000	3,339,471,700	13,555,000	3,325,916,700	99.23	39,491,300
027060100KP	BA(027) ES1(06) DKI JAKARTA							
418941	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR	75,212,711,000	78,783,176,000	76,656,806,377	857,899,811	75,798,906,566	96.21	2,984,269,434
418942	DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH I	7,622,570,836,000	7,459,784,172,000	7,297,882,399,860	6,647,282,328	7,291,235,117,532	97.74	168,549,054,468
418943	DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH II	7,101,252,650,000	7,078,494,679,000	6,957,582,902,776	144,189,592,781	6,813,393,309,995	96.25	265,101,369,005
418944	DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN WILAYAH III	6,482,098,970,000	6,563,873,140,000	5,971,245,239,283	160,210,303,410	5,811,034,935,873	88.53	752,838,204,127
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(06) DKI JAKARTA	21,281,135,167,000	21,180,935,167,000	20,303,367,348,296	311,905,078,330	19,991,462,269,966	95.86	1,189,472,897,034
027060700DK	BA(027)ES1(06)DK							
418957	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA	3,861,150,000	3,861,150,000	3,861,150,000	0	3,861,150,000	100	0
	JUMLAH BELANJA BA(027)ES1(06)DK	3,861,150,000	3,861,150,000	3,861,150,000	0	3,861,150,000	100	0
027061400DK	BA(027) ES1(06) KALIMANTAN TENGAH							
418965	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	4,129,500,000	4,129,500,000	4,106,398,900	0	4,106,398,900	99.44	23,101,100
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(06) KALIMANTAN TENGAH	4,129,500,000	4,129,500,000	4,106,398,900	0	4,106,398,900	99.44	23,101,100
027061600DK	027061600DK							
418967	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	4,367,600,000	4,367,600,000	4,325,947,300	0	4,325,947,300	99.05	41,652,700
	JUMLAH BELANJA 027061600DK	4,367,600,000	4,367,600,000	4,325,947,300	0	4,325,947,300	99.05	41,652,700
027061800DK	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH							
418969	DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	3,343,800,000	3,343,800,000	3,343,800,000	1,530,000	3,342,270,000	99.95	1,530,000
	JUMLAH BELANJA DINAS SOSIAL DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH	3,343,800,000	3,343,800,000	3,343,800,000	1,530,000	3,342,270,000	100	1,530,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/20 11:53
Halaman : 14
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
027061900 418970	BA(027) ES1(06) SULAWESI SELATAN DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	3,693,520,000	3,693,520,000	3,692,765,000	0	3,692,765,000	99.98	755,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(06) SULAWESI SELATAN	3,693,520,000	3,693,520,000	3,692,765,000	0	3,692,765,000	99.98	755,000
027062400DK 418975	BA(027) ES1(06) NUSA TENGGARA TIMUR DK DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	4,708,500,000	4,708,500,000	4,293,319,200	32,907,600	4,260,411,600	90.48	448,088,400
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(06) NUSA TENGGARA TIMUR DK	4,708,500,000	4,708,500,000	4,293,319,200	32,907,600	4,260,411,600	91.18	448,088,400
027062600 418978	BA(027) ES1(06) BENGKULU DINAS SOSIAL PROVINSI BENGKULU	3,776,650,000	3,776,650,000	3,751,660,575	0	3,751,660,575	99.34	24,989,425
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(06) BENGKULU	3,776,650,000	3,776,650,000	3,751,660,575	0	3,751,660,575	99.34	24,989,425
027062900DK 418980	DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN	4,311,650,000	4,311,650,000	4,247,500,000	0	4,247,500,000	98.51	64,150,000
	JUMLAH BELANJA DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN	4,311,650,000	4,311,650,000	4,247,500,000	0	4,247,500,000	98.51	64,150,000
null	Kode UAPPAW Tidak Ada							
417787	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA	3,333,800,000	3,333,800,000	2,953,166,708	700,000	2,952,466,708	88.56	381,333,292
418945	DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA	2,920,000,000	2,920,000,000	2,797,743,750	0	2,797,743,750	95.81	122,256,250
418947	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	3,784,840,000	3,784,840,000	3,781,720,000	0	3,781,720,000	99.92	3,120,000
418948	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH	4,436,000,000	4,436,000,000	4,394,166,200	5,150,000	4,389,016,200	98.94	46,983,800
418949	DINAS SOSIAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	4,376,000,000	4,376,000,000	4,365,486,200	0	4,365,486,200	99.76	10,513,800
418950	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	3,527,010,000	3,527,010,000	3,491,833,200	0	3,491,833,200	99	35,176,800
418951	DINAS SOSIAL ACEH	3,822,610,000	3,822,610,000	3,806,781,750	0	3,806,781,750	99.59	15,828,250
418958	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT	3,819,196,000	3,819,196,000	3,814,715,500	5,250,000	3,809,465,500	99.75	9,730,500
418959	DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU	3,878,430,000	3,878,430,000	3,667,673,000	0	3,667,673,000	94.57	210,757,000
418960	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI	3,767,990,000	3,767,990,000	3,730,309,000	0	3,730,309,000	99	37,681,000
418962	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	3,752,650,000	3,752,650,000	3,715,622,121	14,800,000	3,700,822,121	98.62	51,827,879
418963	DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG	3,752,650,000	3,752,650,000	3,749,515,040	0	3,749,515,040	99.92	3,134,960
418964	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	4,480,000,000	4,480,000,000	4,401,175,000	0	4,401,175,000	98.24	78,825,000
418966	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	4,113,000,000	4,113,000,000	4,048,720,279	0	4,048,720,279	98.44	64,279,721
418968	DINAS SOSIAL PROPINSI SULAWESI UTARA	3,821,585,000	3,821,585,000	3,793,316,280	5,013,000	3,788,303,280	99.13	33,281,720
418971	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	3,390,535,000	3,390,535,000	3,381,110,000	0	3,381,110,000	99.72	9,425,000
418972	DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU	3,720,612,000	3,720,612,000	3,674,918,700	0	3,674,918,700	98.77	45,693,300
418973	DINAS SOSIAL PROVINSI BALI	4,235,300,000	4,235,300,000	4,162,468,500	0	4,162,468,500	98.28	72,831,500
418974	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	4,351,000,000	4,351,000,000	4,336,932,300	0	4,336,932,300	99.68	14,067,700
418976	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA	3,147,348,000	3,147,348,000	3,147,347,997	0	3,147,347,997	100	3

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/20 11:53
Halaman : 15
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
418979	DINAS SOSIAL PROPINSI MALUKU UTARA	2,157,800,000	2,157,800,000	2,152,190,000	0	2,152,190,000	99.74	5,610,000
418981	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2,893,940,000	2,893,940,000	2,871,912,100	3,400,000	2,868,512,100	99.12	25,427,900
418984	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU	3,474,290,000	3,474,290,000	3,449,511,000	0	3,449,511,000	99.29	24,779,000
418985	DINAS SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT	1,920,612,000	1,920,612,000	1,857,112,000	0	1,857,112,000	96.69	63,500,000
418986	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT	1,740,070,000	1,740,070,000	1,703,209,600	0	1,703,209,600	97.88	36,860,400
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	88,617,268,000	88,617,268,000	87,248,656,225	34,313,000	87,214,343,225	98.46	1,402,924,775
	JUMLAH BELANJA 06	21,405,310,213,000	21,305,110,213,000	20,425,578,017,196	311,987,383,930	20,113,590,633,266	95.87	1191519579734
11	BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL							
0003100DK	Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo							
418866	DINAS SOSIAL PROVINSI GORONTALO	283,040,000	283,040,000	279,701,100	2,300,000	277,401,100	98.01	5,638,900
	JUMLAH BELANJA Koordinator UAPPA-W Satker DK Provinsi Gorontalo	283,040,000	283,040,000	279,701,100	2,300,000	277,401,100	98.82	5,638,900
027110100KP	Kode UAPPAW Tidak Ada							
369059	SEKRETARIAT BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUH SOSIAL	42,750,867,000	53,773,908,000	52,879,187,489	723,999,889	52,155,187,600	96.99	1,618,720,400
418991	PUSAT PENYULUHAN SOSIAL	16,055,991,000	16,055,991,000	15,353,971,544	56,048,360	15,297,923,184	95.28	758,067,816
440326	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	68,011,519,000	68,011,519,000	62,713,476,242	3,381,165	62,710,095,077	92.21	5,301,423,923
440332	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN	35,643,520,000	35,158,475,000	28,710,150,437	184,859,715	28,525,290,722	81.13	6,633,184,278
682040	PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI PEKERJA SOSIAL DAN PENYULUH SOSIAL	47,412,686,000	47,412,686,000	46,036,173,642	1,993,208,231	44,042,965,411	92.89	3,369,720,589
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	209,874,583,000	220,412,579,000	205,692,959,354	2,961,497,360	202,731,461,994	93.32	17,681,117,006
027110200KD	BA(027) ES1(11) JAWA BARAT							
369070	SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS) BANDUNG	128,885,360,000	131,956,612,000	130,392,181,571	34,322,659	130,357,858,912	98.79	1,598,753,088
369084	BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) LEMBANG - BANDUNG	65,593,515,000	65,893,515,000	65,546,861,990	59,994,519	65,486,867,471	99.38	406,647,529
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(11) JAWA BARAT	194,478,875,000	197,850,127,000	195,939,043,561	94,317,178	195,844,726,383	99.03	2,005,400,617
027110400KD	BA(027) ES1(11) DI YOGYAKARTA							
369180	BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) YOGYAKARTA	74,221,321,000	73,974,756,000	72,218,665,892	153,642,888	72,065,023,004	97.42	1,909,732,996
369202	BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (B2P3KS) YOGYAKARTA	36,787,991,000	35,079,218,000	32,763,494,081	225,748,135	32,537,745,946	92.76	2,541,472,054
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(11) DI YOGYAKARTA	111,009,312,000	109,053,974,000	104,982,159,973	379,391,023	104,602,768,950	96.27	4,451,205,050
027110700	BA(027) ES1(11) SUMATERA UTARA							
418821	DINAS KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA	437,600,000	437,600,000	433,130,000	0	433,130,000	98.98	4,470,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(11) SUMATERA UTARA	437,600,000	437,600,000	433,130,000	0	433,130,000	98.98	4,470,000
027110800DK	BA(027) ES1(11) SUMATERA BARAT							
418822	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT	284,040,000	284,040,000	268,800,000	338,900	268,461,100	94.52	15,578,900

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/20 11:53
Halaman : 16
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(11) SUMATERA BARAT	284,040,000	284,040,000	268,800,000	338,900	268,461,100	94.63	15,578,900
027110800KD 369283	Kode UAPPAW Tidak Ada BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) PADANG	54,264,964,000	54,711,671,000	54,291,397,059	35,429,066	54,255,967,993	99.17	455,703,007
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	54,264,964,000	54,711,671,000	54,291,397,059	35,429,066	54,255,967,993	99.23	455,703,007
027111400DK 418837	BA(027) ES1(11) KALIMANTAN TENGAH DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	435,620,000	435,620,000	434,820,000	0	434,820,000	99.82	800,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(11) KALIMANTAN TENGAH	435,620,000	435,620,000	434,820,000	0	434,820,000	99.82	800,000
027111500KD 369752	BA(027) ES1(11) KALIMANTAN SELATAN BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) BANJARMASIN	69,255,735,000	58,232,694,000	56,204,331,674	46,152,296	56,158,179,378	96.44	2,074,514,622
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(11) KALIMANTAN SELATAN	69,255,735,000	58,232,694,000	56,204,331,674	46,152,296	56,158,179,378	96.52	2,074,514,622
027111600DK 418839	027111600DK DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	446,880,000	446,880,000	397,615,000	500,000	397,115,000	88.86	49,765,000
	JUMLAH BELANJA 027111600DK	446,880,000	446,880,000	397,615,000	500,000	397,115,000	88.98	49,765,000
027111900KD 369965 418850	BA(027) ES1(11) SULAWESI SELATAN BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) MAKASSAR DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN	37,893,084,000 289,040,000	38,087,489,000 289,040,000	37,011,785,810 288,495,000	39,610,397 0	36,972,175,413 288,495,000	97.07 99.81	1,115,313,587 545,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(11) SULAWESI SELATAN	38,182,124,000	38,376,529,000	37,300,280,810	39,610,397	37,260,670,413	97.2	1,115,858,587
027112500KD 578995	BA(027) ES1(11) PAPUA BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) JAYAPURA	33,453,686,000	33,453,686,000	32,677,878,571	888,791,797	31,789,086,774	95.02	1,664,599,226
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(11) PAPUA	33,453,686,000	33,453,686,000	32,677,878,571	888,791,797	31,789,086,774	97.68	1,664,599,226
027112600 418857	BA(027) ES1(11) BENGKULU DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI BENGKULU	284,040,000	284,040,000	252,040,000	0	252,040,000	88.73	32,000,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(11) BENGKULU	284,040,000	284,040,000	252,040,000	0	252,040,000	88.73	32,000,000
027112900DK 418863	DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN	283,040,000	283,040,000	280,440,000	0	280,440,000	99.08	2,600,000
	JUMLAH BELANJA DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN	283,040,000	283,040,000	280,440,000	0	280,440,000	99.08	2,600,000
027113400 418869	BA(027) ES1(11) SULAWESI BARAT DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI BARAT	443,400,000	443,400,000	439,800,000	2,470,000	437,330,000	98.63	6,070,000
	JUMLAH BELANJA BA(027) ES1(11) SULAWESI BARAT	443,400,000	443,400,000	439,800,000	2,470,000	437,330,000	99.19	6,070,000
null 418810 418816	Kode UAPPAW Tidak Ada DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	393,040,000 319,040,000	393,040,000 319,040,000	385,350,000 318,490,000	0 0	385,350,000 318,490,000	98.04 99.83	7,690,000 550,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT ESELON I / WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 30/04/20 11:53
Halaman : 17
Prg ID : lap_lra_bel_org_kl --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
418817	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH	283,040,000	283,040,000	275,774,000	3,200,000	272,574,000	96.3	10,466,000
418818	DINAS SOSIAL PROVINSI D.I.YOGYAKARTA	363,040,000	363,040,000	362,940,000	0	362,940,000	99.97	100,000
418819	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR	287,040,000	287,040,000	277,669,270	0	277,669,270	96.74	9,370,730
418820	DINAS SOSIAL ACEH	435,620,000	435,620,000	435,423,639	2,550,000	432,873,639	99.37	2,746,361
418823	DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU	437,640,000	437,640,000	405,566,820	0	405,566,820	92.67	32,073,180
418824	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAMBI	437,640,000	437,640,000	437,630,000	0	437,630,000	100	10,000
418825	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN	438,860,000	438,860,000	429,487,400	0	429,487,400	97.86	9,372,600
418826	DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG	438,940,000	438,940,000	438,940,000	0	438,940,000	100	0
418836	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	438,940,000	438,940,000	438,940,000	0	438,940,000	100	0
418838	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	284,040,000	284,040,000	273,708,955	0	273,708,955	96.36	10,331,045
418840	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI UTARA	437,640,000	437,640,000	437,200,000	1,516,200	435,683,800	99.55	1,956,200
418841	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH	435,700,000	435,700,000	433,370,000	0	433,370,000	99.47	2,330,000
418851	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	438,940,000	438,940,000	438,940,000	6,850,000	432,090,000	98.44	6,850,000
418852	DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU	438,860,000	438,860,000	426,800,000	0	426,800,000	97.25	12,060,000
418853	DINAS SOSIAL PROVINSI BALI	454,140,000	454,140,000	395,604,800	0	395,604,800	87.11	58,535,200
418854	DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	448,820,000	448,820,000	448,130,700	0	448,130,700	99.85	689,300
418855	DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	446,800,000	446,800,000	446,800,000	0	446,800,000	100	0
418856	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA	304,040,000	304,040,000	304,040,000	0	304,040,000	100	0
418862	DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU UTARA	446,720,000	446,720,000	446,720,000	0	446,720,000	100	0
418865	DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	443,480,000	443,480,000	443,274,400	0	443,274,400	99.95	205,600
418867	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU	437,640,000	437,640,000	433,787,500	0	433,787,500	99.12	3,852,500
418868	DINAS SOSIAL PROVINSI PAPUA BARAT	454,140,000	454,140,000	450,000,000	0	450,000,000	99.09	4,140,000
418870	DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN UTARA	446,880,000	446,880,000	264,741,400	8,030,000	256,711,400	57.45	190,168,600
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	10,190,680,000	10,190,680,000	9,849,328,884	22,146,200	9,827,182,684	96.65	363,497,316
	JUMLAH BELANJA 11	723,607,619,000	725,179,600,000	699,723,725,986	4,472,944,217	695,250,781,769	96.49	29928818231
	JUMLAH BELANJA	58,850,076,032,000	59,039,206,791,000	58,057,278,997,474	330,633,545,393	57,726,645,452,081	98.34	1,312,561,338,919

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 30/04/20 12:45

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
04	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial							
2260	Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial	125,267,834,000	126,767,105,000	125,477,439,849	21,982,659	125,455,457,190	98.97	1,311,647,810
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 04	125,267,834,000	126,767,105,000	125,477,439,849	21,982,659	125,455,457,190	98.983	1,311,647,810
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial							
2224	Tata Kelola Kehumasan	17,696,806,000	19,116,806,000	19,215,504,980	110,702,512	19,104,802,468	99.94	12,003,532
2225	Tata Kelola Keuangan	86,817,630,000	80,017,630,000	78,844,672,731	88,627,118	78,756,045,613	98.42	1,261,584,387
2226	Tata kelola Organisasi dan Kepegawaian	10,384,868,000	12,884,868,000	12,707,581,123	13,446,940	12,694,134,183	98.52	190,733,817
2227	Perencanaan dan Penganggaran	23,169,024,000	23,169,024,000	22,467,940,902	174,367,679	22,293,573,223	3381.85	875,450,777
2228	Penguatan Tata Kelola Administrasi Umum dan Sistem Pengelolaan Aset Barang Milik Negara	90,769,944,000	132,939,944,000	132,088,245,233	253,737,363	131,834,507,870	99.17	1,105,436,130
2230	Tata Kelola Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	8,229,122,000	8,139,122,000	7,924,358,322	150,846,913	7,773,511,409	95.51	365,610,591
5870	Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	135,159,676,000	181,159,676,000	170,974,408,669	1,026,491,512	169,947,917,157	93.81	11,211,758,843
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01	372,227,070,000	457,427,070,000	444,222,711,960	1,818,220,037	442,404,491,923	97.113	15,022,578,077
03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial							
2231	Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	4,345,000,000	4,345,000,000	4,323,325,220	40,279,200	4,283,046,020	98.57	61,953,980
2232	Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Rehabilitasi Sosial	3,455,500,000	3,455,500,000	3,440,151,580	21,276,400	3,418,875,180	98.94	36,624,820
2233	Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	4,088,805,000	4,088,805,000	4,057,733,000	49,289,800	4,008,443,200	98.03	80,361,800
2234	Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Penunjang	3,671,801,000	3,671,801,000	3,413,063,850	11,801,300	3,401,262,550	92.63	270,538,450
2235	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Sosial	31,741,706,000	32,945,118,000	32,550,829,061	65,766,763	32,485,062,298	98.6	460,055,702
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03	47,302,812,000	48,506,224,000	47,785,102,711	188,413,463	47,596,689,248	98.513	909,534,752

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 30/04/20 12:45

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
04	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial							
2254	Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional (I-VI)	334,682,305,000	324,353,811,000	317,950,920,996	1,223,620,963	316,727,300,033	584.5	7,626,510,967
2255	Penelitian Terapan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	36,787,991,000	35,079,218,000	32,763,494,081	225,748,135	32,537,745,946	92.76	2,541,472,054
2257	Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Pusat	67,687,706,000	67,687,706,000	62,596,858,242	3,381,165	62,593,477,077	92.47	5,094,228,923
2258	Penelitian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	35,643,520,000	35,158,475,000	28,710,150,437	184,859,715	28,525,290,722	81.13	6,633,184,278
2259	Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial	47,412,686,000	47,412,686,000	46,036,173,642	1,993,208,231	44,042,965,411	92.89	3,369,720,589
2261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badiklitpensos	42,750,867,000	53,773,908,000	52,879,187,489	723,999,889	52,155,187,600	96.99	1,618,720,400
5871	Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial	29,433,371,000	29,433,371,000	28,278,141,528	83,803,460	28,194,338,068	3376.14	1,239,032,932
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 04	594,398,446,000	592,899,175,000	569,214,926,415	4,438,621,558	564,776,304,857	96.005	28,122,870,143
06	Program Rehabilitasi Sosial							
2242	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza	164,446,371,000	166,616,871,000	164,680,929,952	509,026,243	164,171,903,709	3750.26	2,444,967,291
2243	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	390,031,802,000	399,057,110,000	383,357,746,074	1,277,806,311	382,079,939,763	5216.17	16,977,170,237
2244	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang	98,496,494,000	100,346,974,000	98,383,618,509	714,185,545	97,669,432,964	3760.62	2,677,541,036
2245	Rehabilitasi Sosial Anak	194,218,269,000	197,390,755,000	195,536,833,531	525,379,071	195,011,454,460	4157.74	2,379,300,540
2246	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	204,518,948,000	205,918,428,000	202,687,910,865	410,768,389	202,277,142,476	3598.03	3,641,285,524
2247	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Rehabilitasi Sosial	110,663,814,000	112,248,308,000	110,354,062,545	556,968,010	109,797,094,535	97.82	2,451,213,465
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	1,162,375,698,000	1,181,578,446,000	1,155,001,101,476	3,994,133,569	1,151,006,967,907	97.751	30,571,478,093
07	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							
2248	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	232,882,324,000	272,931,724,000	270,177,152,159	364,736,595	269,812,415,564	3415.83	3,119,308,436
2249	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	48,849,657,000	105,149,657,000	104,198,301,958	312,631,380	103,885,670,578	3374.37	1,263,986,422

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 30/04/20 12:45

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
2251	Jaminan Sosial Keluarga	34,375,234,645,000	34,357,839,670,000	34,341,258,236,953	5,228,107,719	34,336,030,129,234	3361.21	21,809,540,766
2253	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	52,392,659,000	54,787,634,000	53,913,859,108	460,415,471	53,453,443,637	97.56	1,334,190,363
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 07	34,709,359,285,000	34,790,708,685,000	34,769,547,550,178	6,365,891,165	34,763,181,659,013	99.939	27,527,025,987
08	Program Pemberdayaan Sosial							
2236	Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	50,693,365,000	60,693,365,000	59,261,574,074	194,625,019	59,066,949,055	3433.4	1,626,415,945
2239	Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	158,943,554,000	158,943,554,000	156,108,150,268	295,300,229	155,812,850,039	3367.96	3,130,703,961
2240	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	136,425,479,000	136,425,479,000	127,374,068,692	317,983,556	127,056,085,136	5877.18	9,369,393,864
2241	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Pemberdayaan Sosial	59,273,230,000	59,273,230,000	58,613,627,871	711,033,038	57,902,594,833	97.69	1,370,635,167
5872	Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	23,471,361,000	23,471,361,000	22,906,398,862	116,662,170	22,789,736,692	3314.47	681,624,308
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 08	428,806,989,000	438,806,989,000	424,263,819,767	1,635,604,012	422,628,215,755	96.686	16,178,773,245
09	Program Penanganan Fakir Miskin							
5873	Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	7,663,155,232,000	7,500,368,568,000	7,338,082,969,946	6,670,732,328	7,331,412,237,618	1186.86	168,956,330,382
5874	Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	7,151,015,000,000	7,128,257,029,000	7,006,015,927,113	144,228,350,381	6,861,787,576,732	1261.44	266,469,452,268
5875	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	6,515,927,270,000	6,597,701,440,000	6,004,822,313,760	160,230,401,410	5,844,591,912,350	1178.22	753,109,527,650
5876	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Penanganan Kemiskinan	75,212,711,000	78,783,176,000	76,656,806,377	857,899,811	75,798,906,566	96.21	2,984,269,434
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 09	21,405,310,213,000	21,305,110,213,000	20,425,578,017,196	311,987,383,930	20,113,590,633,266	95.872	1,191,519,579,734
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	58,845,048,347,000	58,941,803,907,000	57,961,090,669,552	330,450,250,393	57,630,640,419,159	98.336	1,311,163,487,841
04	PNBP							
04	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial							
2260	Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial	3,617,526,000	5,189,507,000	4,914,741,722	12,340,000	4,902,401,722	94.47	287,105,278

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 30/04/20 12:45

Halaman : 4

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
2257	Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Pusat	323,813,000	323,813,000	116,618,000	0	116,618,000	36.01	207,195,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 04	3,941,339,000	5,513,320,000	5,031,359,722	12,340,000	5,019,019,722	91.258	494,300,278
06	Program Rehabilitasi Sosial							
2243	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	374,514,000	374,514,000	357,890,000	0	357,890,000	173.55	16,624,000
2244	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang	3,566,000	3,566,000	3,566,000	0	3,566,000	100	0
2245	Rehabilitasi Sosial Anak	100,541,000	100,541,000	90,947,000	0	90,947,000	250.71	9,594,000
2246	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	52,104,000	52,104,000	2,898,500	0	2,898,500	5.56	49,205,500
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	530,725,000	530,725,000	455,301,500	0	455,301,500	85.789	75,423,500
08	Program Pemberdayaan Sosial							
5872	Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	555,621,000	555,621,000	540,350,000	0	540,350,000	97.25	15,271,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 08	555,621,000	555,621,000	540,350,000	0	540,350,000	97.252	15,271,000
	JUMLAH BELANJA PNPB	5,027,685,000	6,599,666,000	6,027,011,222	12,340,000	6,014,671,222	91.323	584,994,778
10	HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI							
08	Program Pemberdayaan Sosial							
5872	Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	0	83,151,626,000	82,991,626,000	170,955,000	82,820,671,000	99.6	330,955,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 08	0	83,151,626,000	82,991,626,000	170,955,000	82,820,671,000	99.808	330,955,000
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	0	83,151,626,000	82,991,626,000	170,955,000	82,820,671,000	99.808	330,955,000
11	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI							
06	Program Rehabilitasi Sosial							
2243	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	0	642,135,000	642,135,000	0	642,135,000	200	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 30/04/20 12:45

Halaman : 5

Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_kl --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
2245	Rehabilitasi Sosial Anak	0	7,009,457,000	6,527,555,700	0	6,527,555,700	93.12	481,901,300
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	0	7,651,592,000	7,169,690,700	0	7,169,690,700	93.702	481,901,300
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI	0	7,651,592,000	7,169,690,700	0	7,169,690,700	93.702	481,901,300
	JUMLAH	58,850,076,032,000	59,039,206,791,000	58,057,278,997,474	330,633,545,393	57,726,645,452,081	98.34	1,312,561,338,919

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 30/04/20 12:45

Halaman : 1

Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
04	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial							
2260	Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial	125,267,834,000	126,767,105,000	125,477,439,849	21,982,659	125,455,457,190	98.97	1,311,647,810
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 04	125,267,834,000	126,767,105,000	125,477,439,849	21,982,659	125,455,457,190	98.983	1,311,647,810
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial							
2224	Tata Kelola Kehumasan	17,696,806,000	19,116,806,000	19,215,504,980	110,702,512	19,104,802,468	99.94	12,003,532
2225	Tata Kelola Keuangan	86,817,630,000	80,017,630,000	78,844,672,731	88,627,118	78,756,045,613	98.42	1,261,584,387
2226	Tata kelola Organisasi dan Kepegawaian	10,384,868,000	12,884,868,000	12,707,581,123	13,446,940	12,694,134,183	98.52	190,733,817
2227	Perencanaan dan Penganggaran	23,169,024,000	23,169,024,000	22,467,940,902	174,367,679	22,293,573,223	96.22	875,450,777
2228	Penguatan Tata Kelola Administrasi Umum dan Sistem Pengelolaan Aset Barang Milik Negara	90,769,944,000	132,939,944,000	132,088,245,233	253,737,363	131,834,507,870	99.17	1,105,436,130
2230	Tata Kelola Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum	8,229,122,000	8,139,122,000	7,924,358,322	150,846,913	7,773,511,409	95.51	365,610,591
5870	Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial	135,159,676,000	181,159,676,000	170,974,408,669	1,026,491,512	169,947,917,157	93.81	11,211,758,843
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 01	372,227,070,000	457,427,070,000	444,222,711,960	1,818,220,037	442,404,491,923	97.113	15,022,578,077
03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial							
2231	Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	4,345,000,000	4,345,000,000	4,323,325,220	40,279,200	4,283,046,020	98.57	61,953,980
2232	Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Rehabilitasi Sosial	3,455,500,000	3,455,500,000	3,440,151,580	21,276,400	3,418,875,180	98.94	36,624,820
2233	Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	4,088,805,000	4,088,805,000	4,057,733,000	49,289,800	4,008,443,200	98.03	80,361,800
2234	Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Penunjang	3,671,801,000	3,671,801,000	3,413,063,850	11,801,300	3,401,262,550	92.63	270,538,450
2235	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian Sosial	31,741,706,000	32,945,118,000	32,550,829,061	65,766,763	32,485,062,298	98.6	460,055,702
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 03	47,302,812,000	48,506,224,000	47,785,102,711	188,413,463	47,596,689,248	98.513	909,534,752

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 30/04/20 12:45
Halaman : 2
Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
04	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial							
2254	Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional (I-VI)	334,682,305,000	324,353,811,000	317,950,920,996	1,223,620,963	316,727,300,033	97.65	7,626,510,967
2255	Penelitian Terapan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	36,787,991,000	35,079,218,000	32,763,494,081	225,748,135	32,537,745,946	92.76	2,541,472,054
2257	Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Pusat	67,687,706,000	67,687,706,000	62,596,858,242	3,381,165	62,593,477,077	92.47	5,094,228,923
2258	Penelitian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	35,643,520,000	35,158,475,000	28,710,150,437	184,859,715	28,525,290,722	81.13	6,633,184,278
2259	Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial	47,412,686,000	47,412,686,000	46,036,173,642	1,993,208,231	44,042,965,411	92.89	3,369,720,589
2261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badiklitpensos	42,750,867,000	53,773,908,000	52,879,187,489	723,999,889	52,155,187,600	96.99	1,618,720,400
5871	Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial	29,433,371,000	29,433,371,000	28,278,141,528	83,803,460	28,194,338,068	95.79	1,239,032,932
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 04	594,398,446,000	592,899,175,000	569,214,926,415	4,438,621,558	564,776,304,857	96.005	28,122,870,143
06	Program Rehabilitasi Sosial							
2242	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza	164,446,371,000	166,616,871,000	164,680,929,952	509,026,243	164,171,903,709	98.53	2,444,967,291
2243	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	390,031,802,000	399,057,110,000	383,357,746,074	1,277,806,311	382,079,939,763	95.75	16,977,170,237
2244	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang	98,496,494,000	100,346,974,000	98,383,618,509	714,185,545	97,669,432,964	97.33	2,677,541,036
2245	Rehabilitasi Sosial Anak	194,218,269,000	197,390,755,000	195,536,833,531	525,379,071	195,011,454,460	98.79	2,379,300,540
2246	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	204,518,948,000	205,918,428,000	202,687,910,865	410,768,389	202,277,142,476	98.23	3,641,285,524
2247	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Rehabilitasi Sosial	110,663,814,000	112,248,308,000	110,354,062,545	556,968,010	109,797,094,535	97.82	2,451,213,465
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	1,162,375,698,000	1,181,578,446,000	1,155,001,101,476	3,994,133,569	1,151,006,967,907	97.751	30,571,478,093
07	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							
2248	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	232,882,324,000	272,931,724,000	270,177,152,159	364,736,595	269,812,415,564	98.86	3,119,308,436
2249	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	48,849,657,000	105,149,657,000	104,198,301,958	312,631,380	103,885,670,578	98.8	1,263,986,422

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 30/04/20 12:45

Halaman : 3

Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
2251	Jaminan Sosial Keluarga	34,375,234,645,000	34,357,839,670,000	34,341,258,236,953	5,228,107,719	34,336,030,129,234	99.94	21,809,540,766
2253	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	52,392,659,000	54,787,634,000	53,913,859,108	460,415,471	53,453,443,637	97.56	1,334,190,363
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 07	34,709,359,285,000	34,790,708,685,000	34,769,547,550,178	6,365,891,165	34,763,181,659,013	99.939	27,527,025,987
08	Program Pemberdayaan Sosial							
2236	Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	50,693,365,000	60,693,365,000	59,261,574,074	194,625,019	59,066,949,055	97.32	1,626,415,945
2239	Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	158,943,554,000	158,943,554,000	156,108,150,268	295,300,229	155,812,850,039	98.03	3,130,703,961
2240	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	136,425,479,000	136,425,479,000	127,374,068,692	317,983,556	127,056,085,136	93.13	9,369,393,864
2241	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Pemberdayaan Sosial	59,273,230,000	59,273,230,000	58,613,627,871	711,033,038	57,902,594,833	97.69	1,370,635,167
5872	Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	23,471,361,000	23,471,361,000	22,906,398,862	116,662,170	22,789,736,692	97.1	681,624,308
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 08	428,806,989,000	438,806,989,000	424,263,819,767	1,635,604,012	422,628,215,755	96.686	16,178,773,245
09	Program Penanganan Fakir Miskin							
5873	Penanganan Fakir Miskin Wilayah I	7,663,155,232,000	7,500,368,568,000	7,338,082,969,946	6,670,732,328	7,331,412,237,618	97.75	168,956,330,382
5874	Penanganan Fakir Miskin Wilayah II	7,151,015,000,000	7,128,257,029,000	7,006,015,927,113	144,228,350,381	6,861,787,576,732	96.26	266,469,452,268
5875	Penanganan Fakir Miskin Wilayah III	6,515,927,270,000	6,597,701,440,000	6,004,822,313,760	160,230,401,410	5,844,591,912,350	88.59	753,109,527,650
5876	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Penanganan Kemiskinan	75,212,711,000	78,783,176,000	76,656,806,377	857,899,811	75,798,906,566	96.21	2,984,269,434
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 09	21,405,310,213,000	21,305,110,213,000	20,425,578,017,196	311,987,383,930	20,113,590,633,266	95.872	1,191,519,579,734
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	58,845,048,347,000	58,941,803,907,000	57,961,090,669,552	330,450,250,393	57,630,640,419,159	98.336	1,311,163,487,841
04	PNBP							
04	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial							
2260	Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial	3,617,526,000	5,189,507,000	4,914,741,722	12,340,000	4,902,401,722	94.47	287,105,278

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 30/04/20 12:45

Halaman : 4

Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
2257	Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Pusat	323,813,000	323,813,000	116,618,000	0	116,618,000	36.01	207,195,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 04	3,941,339,000	5,513,320,000	5,031,359,722	12,340,000	5,019,019,722	91.258	494,300,278
06	Program Rehabilitasi Sosial							
2243	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	374,514,000	374,514,000	357,890,000	0	357,890,000	95.56	16,624,000
2244	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang	3,566,000	3,566,000	3,566,000	0	3,566,000	100	0
2245	Rehabilitasi Sosial Anak	100,541,000	100,541,000	90,947,000	0	90,947,000	90.46	9,594,000
2246	Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	52,104,000	52,104,000	2,898,500	0	2,898,500	5.56	49,205,500
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	530,725,000	530,725,000	455,301,500	0	455,301,500	85.789	75,423,500
08	Program Pemberdayaan Sosial							
5872	Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	555,621,000	555,621,000	540,350,000	0	540,350,000	97.25	15,271,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 08	555,621,000	555,621,000	540,350,000	0	540,350,000	97.252	15,271,000
	JUMLAH BELANJA PNPB	5,027,685,000	6,599,666,000	6,027,011,222	12,340,000	6,014,671,222	91.323	584,994,778
10	HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI							
08	Program Pemberdayaan Sosial							
5872	Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	0	83,151,626,000	82,991,626,000	170,955,000	82,820,671,000	99.6	330,955,000
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 08	0	83,151,626,000	82,991,626,000	170,955,000	82,820,671,000	99.808	330,955,000
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI	0	83,151,626,000	82,991,626,000	170,955,000	82,820,671,000	99.808	330,955,000
11	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI							
06	Program Rehabilitasi Sosial							
2243	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	0	642,135,000	642,135,000	0	642,135,000	100	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN DESEMBER2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : LRA.B.S.

Tanggal : 30/04/20 12:45

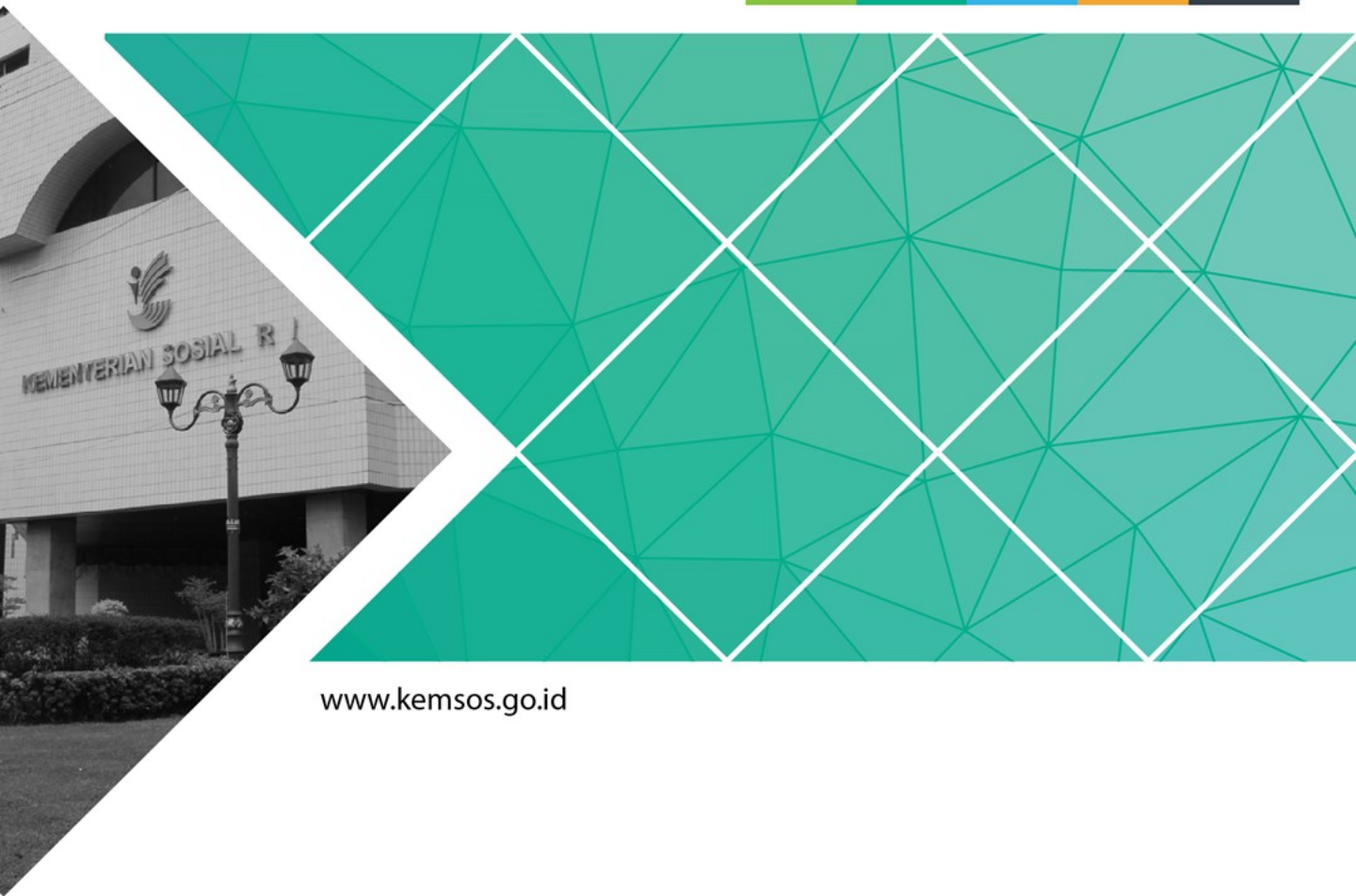
Halaman : 5

Prg ID : lap_bel_fsf_kl --rekon17

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
2245	Rehabilitasi Sosial Anak	0	7,009,457,000	6,527,555,700	0	6,527,555,700	93.12	481,901,300
	JUMLAH BELANJA PROGRAM 06	0	7,651,592,000	7,169,690,700	0	7,169,690,700	93.702	481,901,300
	JUMLAH BELANJA HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI	0	7,651,592,000	7,169,690,700	0	7,169,690,700	93.702	481,901,300
	JUMLAH	58,850,076,032,000	59,039,206,791,000	58,057,278,997,474	330,633,545,393	57,726,645,452,081	98.34	1,312,561,338,919

#KEMENSOS
Hadir

NERACA PERCOBAAN



www.kemsos.go.id

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2019 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 30/04/2020
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	211,191,900	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	992,366,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	54,485,196,960	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	337,290,648,267	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	508,490,858	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	343,275,773	0
0.0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	1,716,386
0.0	117111	Barang Konsumsi	7,213,665,962	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	27,927,250	0
0.0	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	102,682,236,481	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	17,645,838,126	0
0.0	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	1,700,516,000	0
0.0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1,386,026,850	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	19,502,730,167	0
0.0	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	1,175,916,032	0
0.0	117131	Bahan Baku	1,805,750	0
0.0	117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	299,846,152,930	0
0.0	117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	17,562,386	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	564,941,957	0
0.0	131111	Tanah	3,495,475,164,694	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	1,788,554,554,510	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,513,338,943,015	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	60,059,211,237	0
0.0	134112	Irigasi	40,017,530,053	0
0.0	134113	Jaringan	16,022,524,241	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	350,000,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	14,448,697,676	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	623,272,587	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,402,111,593,278
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	361,072,631,791
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	37,269,132,533
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	11,300,575,647
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	6,359,104,282
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	3,430,878,695
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	0
0.0	162151	Software	86,297,896,087	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
PER 1 JANUARI 2019 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 30/04/2020
lap_neraca_percobaan_sawal_akrua1_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	8,316,000,000	0
0.0	163119	Dana Lainnya	2,655,138,145	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	27,186,605,531	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	231,083,052	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	24,858,951,495
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	72,659,127,907
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	178,275,302
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	38,656,434
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	1,008,421,407
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	158,840,000
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	146,742,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	211,191,900
0.0	391111	Ekuitas	0	5,978,367,271,420
JUMLAH			7,899,173,110,477	7,899,173,110,477

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 03/05/2020 12:09 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	1,312,561,338,919	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	504,713,537,119	0
2.0	425131	Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,179,859,400	0
2.0	425259	Estimasi Pendapatan Perizinan Lainnya Yang Dialokasikan	700,000,000	0
2.0	425411	Estimasi Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan Yang	511,200,000	0
2.0	425412	Estimasi Pendapatan Biaya Pendidikan Yang Dialokasikan	4,892,150,000	0
2.0	425419	Estimasi Pendapatan Pendidikan Lainnya Yang Dialokasikan	574,750,000	0
2.0	425421	Estimasi Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau	504,883,000	0
2.0	425692	Estimasi Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	663,863,000	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	196,530,624,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	4,327,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	13,790,012,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	3,833,108,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	9,573,268,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	10,188,908,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	1,316,433,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	9,370,788,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	25,943,269,000
2.0	511138	Allotment Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	212,700,000
2.0	511147	Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS	0	30,042,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	5,885,049,000
2.0	511153	Allotment Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0	3,885,577,000
2.0	511192	Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS	0	1,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	1,635,817,000
2.0	512411	Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	207,187,402,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	61,733,771,000
2.0	521112	Allotment Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	10,268,720,000
2.0	521113	Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	1,202,455,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	1,536,307,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	28,599,244,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	11,999,932,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	195,363,886,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	1,516,916,217,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	481,674,561,000
2.0	521231	Allotment Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam	0	6,633,324,000
2.0	521232	Allotment Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS	0	2,054,850,000
2.0	521233	Allotment Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional	0	2,207,100,000
2.0	521234	Allotment Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam	0	153,475,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	38,936,354,000
2.0	521813	Allotment Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai	0	0
2.0	521821	Allotment Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	78,000,000
2.0	521832	Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	2,198,293,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 03/05/2020 12:09 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	17,050,414,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	1,659,673,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	1,301,323,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	446,138,000
2.0	522121	Allotment Belanja Jasa Pos dan Giro	0	146,152,000
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	45,545,533,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	108,249,476,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	71,957,355,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	39,441,611,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	34,247,737,000
2.0	523112	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung	0	591,852,000
2.0	523119	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	1,233,837,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	34,823,730,000
2.0	523123	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan	0	22,412,000
2.0	523129	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	3,379,227,000
2.0	523133	Allotment Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	1,036,147,000
2.0	523191	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	87,600,000
2.0	523199	Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	3,637,478,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	406,909,079,304
2.0	524112	Allotment Belanja Perjalanan Tetap	0	153,670,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	47,178,929,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	0	204,714,748,696
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	384,306,957,000
2.0	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	3,770,821,000
2.0	524219	Allotment Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	2,360,582,000
2.0	526112	Allotment Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan	0	16,995,050,000
2.0	526113	Allotment Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan	0	1,800,000,000
2.0	526311	Allotment Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan	0	20,227,846,000
2.0	531111	Allotment Belanja Modal Tanah	0	91,069,248,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	127,432,235,000
2.0	532113	Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor	0	2,280,000
2.0	532121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	78,070,000
2.0	533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	48,593,372,000
2.0	533113	Allotment Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor	0	125,943,000
2.0	533115	Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	0	1,647,147,000
2.0	533118	Allotment Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	619,080,000
2.0	533121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	35,016,321,000
2.0	534121	Allotment Belanja Modal Irigasi	0	338,000,000
2.0	534131	Allotment Belanja Modal Jaringan	0	1,432,590,000
2.0	534161	Allotment Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	325,000,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	6,540,114,000
2.0	536121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya	0	9,294,874,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 03/05/2020 12:09 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	571111	Allotment Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	389,460,577,000
2.0	571112	Allotment Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	14,488,600,000
2.0	573111	Allotment Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan	0	29,889,738,000
2.0	573112	Allotment Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan	0	98,809,000,000
2.0	574111	Allotment Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	0	32,828,279,920,000
2.0	575111	Allotment Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan	0	17,167,365,300,000
2.0	575112	Allotment Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan	0	3,747,612,350,000
2.0	576111	Allotment Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan	0	59,449,400,000
2.0	576112	Allotment Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan	0	77,118,440,000
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	95,668,000
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	16,200,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	152,683,386
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,738,111,700
3.1	425129	Pengembalian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	250,108,000	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	7,728,973,868
3.0	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	1,000,000
3.0	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	0	1,245,189,272
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	571,900,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	4,897,000,000
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	580,950,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	504,883,000
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	572,642,500
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	77,266,000
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	7,424,492,593
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	17,500,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	3,579,283,831
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	521,898,243
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	2,485,730,111
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	0	439,564,333
3.0	425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun	0	484,339,181,894
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	100,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	131,788
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	194,803,540,170	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	78,672,160
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3,024,313	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	284,155
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	13,574,173,932	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	3,070,740
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	3,735,699,870	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	251,774
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	9,405,890,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	3,685,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 03/05/2020 12:09 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	9,921,610,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	23,004,999
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,164,600,094	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	9,083,735,480	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	1,158,720
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	24,255,552,300	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	31,970,650
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	195,155,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	5,619,955,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	22,871,567
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	3,885,576,100	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	1,391,764,550	0
3.1	512211	Pengembalian Belanja Uang Lembur	0	2,210,750
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	203,818,410,001	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/	0	73,947,884
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	61,139,322,760	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	20,675,170
3.0	521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	9,869,475,827	0
3.1	521112	Pengembalian Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	3,813,912
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1,177,740,100	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,194,126,487	0
3.1	521114	Pengembalian Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	4,049,000
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	27,836,678,500	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	27,314,500
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	11,133,421,041	0
3.1	521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	360,803,400
3.0	521211	Belanja Bahan	186,309,917,720	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	105,517,095
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,510,218,972,621	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	808,421,125
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	460,306,408,142	0
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	390,748,351
3.0	521231	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	6,602,824,000	0
3.0	521232	Belanja Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk	2,054,850,000	0
3.0	521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam	1,185,381,078	0
3.0	521234	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk	153,419,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	37,471,908,607	0
3.1	521811	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	6,191,353
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	77,995,150	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	2,168,100,850	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	16,705,589,737	0
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	2,255,779

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 03/05/2020 12:09 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,468,580,409	0
3.1	522112	Pengembalian Belanja Langganan Telepon	0	36,507
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,198,810,015	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	404,150,205	0
3.0	522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	74,923,850	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	44,687,523,917	0
3.0	522141	Belanja Sewa	99,688,348,138	0
3.1	522141	Pengembalian Belanja Sewa	0	63,521,618
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	64,772,155,797	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	697,783,879
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	38,794,960,966	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33,919,331,504	0
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	41,476,652
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	580,977,600	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,224,079,456	0
3.1	523119	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	234,927
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34,009,667,180	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	7,162,300
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	16,724,000	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,365,884,398	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	1,022,298,399	0
3.0	523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	87,600,000	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	3,590,458,703	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	384,393,173,563	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	10,665,171,740
3.0	524112	Belanja Perjalanan Tetap	149,215,356	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43,037,464,998	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	673,523,354
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	195,530,469,185	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	0	2,401,823,805
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	364,569,736,959	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	14,096,194,196
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	3,404,669,917	0
3.1	524211	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	152,885,386
3.0	524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1,992,653,605	0
3.1	524219	Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	83,966,828
3.0	526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada	16,989,812,000	0
3.0	526113	Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada	1,676,128,906	0
3.0	526311	Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	20,211,508,500	0
3.0	531111	Belanja Modal Tanah	90,527,836,808	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126,386,005,186	0
3.1	532111	Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	17,943,546

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 03/05/2020 12:09 PM
lap_neraca_percobaan_kas_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	2,280,000	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	77,300,000	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48,064,488,879	0
3.1	533111	Pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	3,683,600
3.0	533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	91,853,300	0
3.0	533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan	1,611,431,804	0
3.1	533115	Pengembalian Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan	0	18,649,932
3.0	533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	618,817,699	0
3.1	533118	Pengembalian Belanja Modal Perjalanan Gedung dan	0	180,235,300
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	34,812,462,775	0
3.1	533121	Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	0	19,149,876
3.0	534121	Belanja Modal Irigasi	338,000,000	0
3.0	534131	Belanja Modal Jaringan	1,426,888,800	0
3.0	534161	Belanja Penambahan Nilai Jaringan	320,816,650	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	6,484,052,550	0
3.1	536111	Pengembalian Belanja Modal Lainnya	0	10,513,423
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau	8,833,309,472	0
3.1	536121	Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap	0	850,000
3.0	571111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam	384,260,095,920	0
3.1	571111	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi	0	344,637,620
3.0	571112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam	13,882,837,084	0
3.0	573111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam	29,890,374,000	0
3.1	573111	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan	0	147,535,000
3.0	573112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam	91,052,403,473	0
3.1	573112	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan	0	4,320,000
3.0	574111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam	32,828,279,903,000	0
3.1	574111	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan	0	961,650,000
3.0	575111	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	16,424,717,270,000	0
3.1	575111	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial untuk	0	298,006,564,565
3.0	575112	Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	3,652,062,050,160	0
3.0	576111	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	59,424,800,000	0
3.1	576111	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Untuk	0	46,599,155
3.0	576112	Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	76,787,593,958	0
3.1	576112	Pengembalian Belanja Bantuan Sosial Untuk	0	16,514,100
JUMLAH			59,886,830,686,912	59,886,830,686,912

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 30/04/2020 11:52 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	58,728,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	8,938,000	0
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1,618,418,390,121	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	393,531,970,511	0
0.0	111827	Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	0	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	0	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	119,331,893	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	360,214,847,005	0
0.0	115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0	596,660
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	1,801,074,240
0.0	117111	Barang Konsumsi	7,990,376,411	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	27,944,000	0
0.0	117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada	98,591,193,481	0
0.0	117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	31,558,594,906	0
0.0	117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada	1,700,516,000	0
0.0	117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1,386,026,850	0
0.0	117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	22,228,558,086	0
0.0	117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat -	5,130,176,957	0
0.0	117131	Bahan Baku	0	0
0.0	117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	286,839,684,347	0
0.0	117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	13,759,717	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	418,017,284	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	18,532,038,706,705	0
0.0	131211	Tanah Belum Diregister	0	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	1,904,924,241,165	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,798,628,848,267	0
0.0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	46,551,709,875	0
0.0	134112	Irigasi	38,341,743,268	0
0.0	134113	Jaringan	17,770,229,691	0
0.0	134213	Jaringan Belum Diregister	0	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	7,153,651,140	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	14,836,358,922	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	281,836,313	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,552,647,621,419
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	182,053,118,595
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	23,402,850,397
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	6,491,545,017

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 30/04/2020 11:52 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	7,373,488,912
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	3,466,709,781
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti	0	0
0.0	162151	Software	98,151,352,706	0
0.0	162161	Lisensi	190,850,000	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	196,625,000	0
0.0	163119	Dana Lainnya	549,179,306,589	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	26,060,951,592	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	237,023,052	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	0	23,337,779,234
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	85,268,906,958
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	9,542,500
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	0	159,469,052
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	304,536,894
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	4,061,272,532
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	327,054,228
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	9,498,000
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	527,339,126
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	1,967,279,648
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	67,666,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	10,341,818
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	57,636,484,135,381
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	516,740,242,519	0
0.0	313211	Transfer Keluar	718,750,608,475	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	714,040,295,270
0.0	391111	Ekuitas	0	5,978,367,271,420
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	1,858,337,865
0.0	391114	Revaluasi Aset Tetap	0	15,421,011,225,108
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	12,537,671,405	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	216,692,057	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	451,230,248,414
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	152,047,168,600
0.0	391132	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	549,753,300	0
0.0	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	936,795,743	0
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	95,668,000
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	16,200,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	152,683,386
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	1,738,111,700
3.1	425129	Pengembalian Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	250,108,000	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	4,916,070,220
3.0	425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	1,000,000
3.0	425259	Pendapatan Perizinan Lainnya	0	1,245,189,272

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 30/04/2020 11:52 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	571,900,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	4,897,000,000
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	580,950,000
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	504,883,000
3.0	425692	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	572,642,500
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	77,266,000
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	8,031,601,444
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	17,500,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	3,698,615,724
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	0	185,434,790
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang	0	2,478,917,791
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0
3.0	425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran	0	429,155,299,440
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	100,000
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	131,788
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	69,835,768,170
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	194,822,555,570	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	78,672,160
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	3,027,622	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	284,155
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	13,575,806,902	0
3.1	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	3,070,740
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	3,735,043,746	0
3.1	511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	0	251,774
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	9,412,200,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	3,685,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	9,927,730,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	23,004,999
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,165,099,200	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	9,082,866,440	0
3.1	511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	0	1,158,720
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	24,160,059,832	0
3.1	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	31,970,650
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	195,155,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	5,620,345,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	22,871,567
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	3,885,576,100	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	1,391,764,550	0
3.1	512211	Pengembalian Beban Uang Lembur	0	2,210,750
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	203,827,362,476	0
3.1	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	73,947,884
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	61,138,332,397	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 30/04/2020 11:52 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	20,675,170
3.0	521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	9,869,475,827	0
3.1	521112	Pengembalian Beban Pengadaan Bahan Makanan	0	3,813,912
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	1,177,740,100	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,194,126,487	0
3.1	521114	Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	4,049,000
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	27,836,678,500	0
3.1	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	27,314,500
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	11,133,421,041	0
3.1	521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	360,803,400
3.0	521211	Beban Bahan	186,379,260,720	0
3.1	521211	Pengembalian Beban Bahan	0	105,517,095
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,510,507,470,711	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	808,421,125
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	462,541,455,790	0
3.1	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	390,748,351
3.0	521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	6,602,824,000	0
3.0	521232	Beban Barang Pemberian Beasiswa Non PNS dalam bentuk	2,054,850,000	0
3.0	521233	Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk	1,185,381,078	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	16,702,180,114	0
3.1	522111	Pengembalian Beban Langganan Listrik	0	2,255,779
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,468,195,651	0
3.1	522112	Pengembalian Beban Langganan Telepon	0	36,507
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,200,613,425	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	404,150,205	0
3.0	522121	Beban Jasa Pos dan Giro	74,923,850	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	44,687,523,917	0
3.0	522141	Beban Sewa	99,454,456,900	0
3.1	522141	Pengembalian Beban Sewa	0	63,521,618
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	64,740,255,797	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	697,783,879
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	38,794,960,966	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33,888,071,504	0
3.1	523111	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	41,476,652
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1,224,079,456	0
3.1	523119	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	234,927
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34,518,158,038	0
3.1	523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	7,162,300
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,365,884,398	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	1,022,298,399	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	3,557,650,263	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	382,907,935,170	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 30/04/2020 11:52 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	10,665,171,740
3.0	524112	Beban Perjalanan Tetap	149,215,356	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	43,011,543,998	0
3.1	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	673,523,354
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	195,629,053,852	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam	0	2,401,823,805
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	364,449,601,606	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar	0	14,096,194,196
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	3,404,669,917	0
3.1	524211	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	152,885,386
3.0	524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1,992,653,605	0
3.1	524219	Pengembalian Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	0	83,966,828
3.0	571111	Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk	374,527,582,741	0
3.1	571111	Pengembalian Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	344,637,620
3.0	573111	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam	29,890,374,000	0
3.1	573111	Pengembalian Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan	0	147,535,000
3.0	573112	Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam	3,865,055,584,003	0
3.0	574111	Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk	32,630,479,256,981	0
3.1	574111	Pengembalian Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan	0	961,650,000
3.0	575111	Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	14,561,603,639,279	0
3.1	575111	Pengembalian Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan	0	298,006,564,565
3.0	576111	Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam	59,424,800,000	0
3.1	576111	Pengembalian Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan	0	46,599,155
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	162,678,633,333	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	67,606,129,167	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	7,694,501,065	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	2,053,880,963	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	1,014,384,630	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	141,281,086	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	11,511,020,309	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	9,542,500	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	140,461,023	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	36,557,043,646	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	612,941,150	0
3.0	593122	Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau	4,091,043,000	0
3.0	593124	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau	7,796,043,220	0
3.0	593128	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	17,663,482,063	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	245,422,207	0
3.0	593141	Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	3,802,669	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	2,389,909,981	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	49,702,862,943	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNB	596,660	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 027

KEMENTERIAN SOSIAL

Tgl. Cetak 30/04/2020 11:52 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_kl --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	1,799,357,854	0
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	204,599,700	0
3.0	595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	328,400,000	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	209,583,425	0
3.0	596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	182,596,130	0
JUMLAH			83,107,454,800,557	83,107,454,800,557

#KEMENSOS
Hadir

TELAAH LAPORAN KEUANGAN



www.kemsos.go.id

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT KL
PERIODE TA. 2019 AUDITED

Kode BA dan Nama BA : (027) Kementerian Sosial

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (v) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab	V		Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>	V		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	V		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrual	V		Ada
2. Neraca Percobaan Kas	V		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	V		Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2018?	V		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca Balance	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak <i>balance</i> ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance "		V	Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE	V		Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca	V		Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>			
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref)		V	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun " <i>Beban Penyisihan Piutang</i> " dan " <i>Kas dan Bank BLU Belum Disahkan</i> "		V	Tidak
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.		V	Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (<i>Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN</i>)		V	Tidak

Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		V	Tidak
2.	Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (<i>Cek di Neraca Percobaan saldo awal</i>)		V	Ya/Tidak
2.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2019? (<i>untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan</i>)		V	Ya
3.	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		V	Tidak
<i>Sehubungan terbitnya Surat S-1815/PB/2019 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i>				
4.	Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya \leq akun 218211 ?		V	Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan		V	Tidak
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		V	Tidak
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap	V		Ya
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	V		Ada/Tidak
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya	V		Ya
6.	Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung \geq akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah		V	Ya
<i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i>				
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)				
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK	160.603.350.065		
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTU secara absolut tsb ?</i>				
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan	4.710.313.205		
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)				
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?		V	Tidak

Ketepatan penggunaan Akun PNBPN Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 423xxx		V	Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		V	Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		V	Tidak
4. Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		V	Tidak
Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		V	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/ Kejaksaan terdapat pada Kementerian Kesehatan		V	Tidak
2. Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		V	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah		V	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?		V	Ya/Tidak
2. Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		V	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxx)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?	V		Tidak
TELAH TERKAIT BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		V	Tidak
2. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? (cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU		V	Tidak
2. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		V	Tidak
3. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511			69.835.768.170
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311			49.702.862.943
3. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311			20.132.905.227
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?		V	Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>			
5 Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)		V	Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>			

LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		V	Tidak
2.	Adakah pendapatan Hibah		V	Tidak
3.	Adakah beban bunga		V	Tidak
4.	Adakah beban subsidi		V	Tidak
5.	Adakah beban hibah		V	Tidak
6.	Adakah beban transfer		V	Tidak
7.	Adakah beban lain-lain		V	Tidak
Pengecekan saldo Normal		Ada	Tidak	Seharusnya
8.	Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (<i>saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi</i>)		V	Tidak
9.	Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	V		Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>				
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015		Ya	Tidak	Seharusnya
10.	Saldo Awal Penyisihan Piutang (<i>Jk.Pendek dan Jk.Panjang</i>) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (<i>Jk.Pendek dan Jk.Panjang</i>) = Beban Penyisihan Piutang LO	V		Ya
<i>Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.</i>				
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"	V		Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.</i>				
2.	Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>				
Pengecekan akun koreksi		Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119				
1.	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	V		Ya
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.				
Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan.				
NERACA				
		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
2.	Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?		V	Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>				
3.	Dari kolom perbandingan antara 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018 adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		V	Tidak
4.	Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2018, Apakah demikian?	V		Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	V		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:	V		Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)	V		Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	V		Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		V	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	V		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	V		Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan	V		Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan	V		Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	V		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	V		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	V		Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?	V		Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?	V		Ya
7. Adakah beban bansos?	V		Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?	V		Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)?	V		Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?	V		Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?	V		Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		V	Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?	V		Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca	V		Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?		V	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2019 di e-Rekon&LK?		V	Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
3. Apakah menurut e-Rekon-Ik terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?	V		Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?	V		Ya

Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon	Ada	Tidak	Seharusnya
Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , 1. Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")	V		
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")		V	Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?		V	Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		V	Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?		V	Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		V	Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		V	Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		V	Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		V	Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>			
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
Satker Konsolidasian	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2018 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?	V		
2. Apakah Jurnal tahun 2018 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?	V		
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2019</i>			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?	V		Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	V		Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan	V		Tidak
4. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	V		Ya
5. Adakan PNBPN digunakan langsung?		V	Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	V		Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	V		Ya
8.			Ya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	V		Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	V		Ya

3.	Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	V		Ya
4.	Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	V		Ya
5.	Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	V		Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>				
7.	Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?	V		Ya
8.	Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	V		Ya

ANALISIS LAINNYA

Analisis Laporan Keuangan Lainnya		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional		V	Ya
2.	Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang	V		Ya
3.	Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2019 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2019		V	Ya
4.	Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (rumus perhitungan beban persediaan terlampir)		V	Ya

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN

- Selisih Transfer Keluar-Transfer Masuk disebabkan adanya hasil revaluasi dan penilaian berdasarkan LHIP yang usulannya masih menggunakan satuan kerja yang telah dilikuidasi (PSBR Bambu Apus), adanya transaksi transfer keluar ke Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara berupa Aset Tetap Renovasi atas Rumah Negara Widya Chandra, serta selisih TK-TM akibat dari sistem aplikasi SIMAK BMN saat pengiriman ke aplikasi SAIBA pada satuan kerja Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam*
- Perbedaan antara realisasi belanja pegawai dan beban pegawai disebabkan adanya pengakuan piutang lainnya atas pengembalian belanja pegawai TA 2019 di mana atas pengembalian tersebut belum dilakukan penyetoran ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2019. Selain itu juga disebabkan adanya belanja pegawai yang masih harus dibayar sehingga mempengaruhi nilai beban pegawai pada laporan keuangan.*
- Terdapat selisih pada penyusutan aset tetap dikarenakan adanya selisih penyusutan akibat adanya perbedaan nilai penyusutan saat terjadi revaluasi dan penilaian kembali aset pada satker PSBR Bambu Apus yang merupakan satker likuidasi*
- Analisa atas mutasi persediaan Kementerian Sosial menunjukkan bahwa terdapat mutasi persediaan yang berasal dari transaksi transfer, hibah, koreksi nilai persediaan, reklasifikasi, serta penyesuaian nilai persediaan.*

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

(Ali Idris Sardi)
NIP. 197809172010121001

Jakarta, Mei 2019
Penelaah,

(Adhi Prasetya Dwi Nugraha)
NIP.198904282018021001

#KEMENSOS
Hadir

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK



www.kemsos.go.id

MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial Tahun 2018

Lampiran 4.31

No	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Tindak Lanjut Entitas yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Kesimpulan	Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah		
	Judul	Jml	Nilai	Uraian	Jml	Nilai		Sesuai		Belum Sesuai		Belum		Tidak Dapat					
								Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Mekanisme Pembayaran Uang Sewa Pengelolaan Gedung Aneka Bakti I dan Gedung Aneka Bakti II Belum Diatur dan Pungutan PNBP Melebihi Tarif yang Ditetapkan	1		BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial agar: a.Menginstruksikan Sekretaris Jenderal untuk: 1)Memerintahkan Tim Pengelola PNBP pada Sekretariat Jenderal untuk segera menyusun aturan tentang Pengelolaan PNBP di lingkungan Kementerian Sosial; 2)Mengelola anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dengan optimal sehingga tidak memungut uang sewa gedung melebihi tarif yang telah ditetapkan; BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial agar: b.Menginstruksikan Inspektur Jenderal Kementerian Sosial untuk melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang bersumber dari kelebihan pemungutan sewa kantin Tahun 2018 sebesar Rp96.784.152. Apabila terdapat penggunaan yang tidak sesuai ketentuan atau terdapat kelebihan atas dana tersebut, agar segera disetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.	1		- Surat Menteri Sosial no 36/MS/C/06/2019 kepada Sekjen perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP SPI 1.1.1.a) Tgl 21/6/19 untuk 1) Memerintahkan Tim Pengelola PNBP pada Sekretariat Jenderal untuk segera menyusun aturan tentang Pengelolaan PNBP di lingkungan Kementerian Sosial; 2) Mengelola anggaran Belanja Pemeliharaan Gedung dengan optimal sehingga tidak memungut uang sewa gedung melebihi tarif yang telah ditetapkan - Surat Menteri Sosial no 37/MS/C/06/2019 kepada Inspektur Jenderal Perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP SPI 1.1.1.b) Tgl 21/6/19 untuk melakukan verifikasi atas penggunaan dana yang bersumber dari kelebihan pemungutan sewa kantin Tahun 2018 sebesar Rp96.784.152. Apabila terdapat penggunaan yang tidak sesuai ketentuan atau terdapat kelebihan atas dana tersebut, agar segera disetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK 12/31/2019 12:00:00 AM - "Tindak lanjut Semester II 2019 *Nota Dinas Nomor 186/IR.BP/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 perihal Hasil verifikasi atas penggunaan dana yang bersumber dari kelebihan pemungutan sewa kantin tahun 2018. Hasil verifikasi didapikannya pertanggungjawaban penggunaan dana bahwa dokumen/bukti pertanggungjawaban sebesar Rp80.459.500 digunakan untuk perbaikan/pemeliharaan gedung kantin tahun 2018 dan terdapat kekurangan SPI sebesar Rp 16.324.652. Saran tim verifikasi bahwa agar Biro Umum Setjen agar segera menyetorkan ke KAs Negara selisih/kekurangan SPI atas penggunaan dana yang bersumber dari kelebihan pemungutan sewa kantin tahun 2018. Atas kekurangan SPI tersebut telah di setor ke kas negara sebesar Rp16.324.652 tanggal 31 Juli 2019 dengan No NTPN EA1F92G4UB9C7D06 * Surat dari Ijen Kepada Inspektur Irbid. Penunjang dan Pim no 853/IJ/08/2019 atas Perintah atas LHP BPK LK 2018 SPI 1.1.1.b tgl 20 Agustus 2019" * Hasil verifikasi atas penggunaan dana yang bersumber dari pemungutan sewa kantin 2018 (Hasil verifikasi 96.784.152 terdapat selisih atau kekurangan dokumen sebesar Rp 16.324.652 dan telah di setor ke kas negara sebesar Rp16.324.652 tanggal 31 Juli 2019	0		1		0		0		0		Belum terdapat aturan Pengelolaan PNBP di lingkungan Kemensos	
2	Terdapat Bansos Rastra yang Dialokasikan Ganda pada Daftar Penerima Manfaat Tahun 2018	1		BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar menginstruksikan: a Kepala Pusdatin Kesos selaku Pokja Data agar dalam menyajikan data terpadu program penanganan fakir miskin lebih akurat;	1		- Surat Menteri Sosial no 38/MS/C/06/2019 kepada Kepala Pusdatin Perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP SPI 1.2.1.a) Tgl 21/6/19 agar dalam menyajikan data terpadu program penanganan fakir miskin lebih akurat	0		1		0		0		Belum terdapat DT PPFM yang akurat dari Pusdatin			

			BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar menginstruksikan: b. Direktur Jenderal PFM agar memerintahkan PPK melakukan seleksi atas daftar penerima manfaat yang diusulkan oleh Pokja Data.	1		- Surat Menteri Sosial no 39/MS/C/06/2019 kepada Dirjen PFM Perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP SPI 1.2.1.b) Tgl 21/6/19 M agar memerintahkan PPK melakukan seleksi atas daftar penerima manfaat yang diusulkan oleh Pokja Data 12/31/2019 12:00:00 AM - Tindak lanjut Semester II 2019 • Surat Dirjen PFM Kepada PPK Direktorat Wil LII,III No 2543/4/KS/06/2019 Perihal Surat perintah LHP SPI Tp 1.2.1.b no 26 juni 2019 berisikan perintah kepada PPK untuk melakukan seleksi atas Daftar Penerima Manfaat yang diusulkan oleh Pokja Data • Surat dari Dirjen PFM Kepada PPK Direktorat Wil LII,III No 2543/4/KS/06/2019 Perihal Surat perintah LHP SPI Tp 1.2.1.b no 26 juni 2019 berisikan perintah kepada PPK untuk melakukan seleksi atas Daftar Penerima Manfaat yang diusulkan oleh Pokja Data	0	1	0	0	0	Belum terdapat surat balasan dari PPK yang menyatakan telah melakukan seleksi atas Daftar Penerima Manfaat yang diusulkan oleh Pokja Data
3	Terdapat Penyaluran Bansos Rastra Kepada Keluarga Penerima Manfaat di 10 Kabupaten/Kota yang Tidak Tepat Sasaran	1	BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar: a. Menginstruksikan Kepala Pusdatin Kesos lebih optimal dalam mengelola DT-PPFM OTM yang meliputi penghapusan, penggantian, penambahan dan pemeringkatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar: b. Meminta Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan verifikasi dan validasi DT-PPFM dan OTM secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar: c. Menginstruksikan Direktur Jenderal PFM untuk memerintahkan PPK Dit. PFM Wilayah I, PPK Dit. Wilayah II dan PPK Dit. Wilayah III untuk melakukan seleksi penerima bansos rastra agar permasalahan ini tidak terulang kembali; BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar: d. Menginstruksikan KPA untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi atas ketepatan pelaksanaan program secara optimal, dengan mengesahkan KPM dan Keluarga Pengganti penerima Bansos Rastra yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar: e. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyeleksi penerima bansos rastra.	1		- Surat Menteri Sosial no 40/MS/C/06/2019 kepada Kepala Pusdatin Perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP SPI 1.2.2.a) Tgl 21/6/19 agar lebih optimal dalam mengelola DT-PPFM OTM yang meliputi penghapusan, penggantian, penambahan dan pemeringkatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku • Surat Menteri Sosial no 40/MS/C/06/2019 kepada Kepala Pusdatin Perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP SPI 1.2.2.a) Tgl 21/6/19 agar lebih optimal dalam mengelola DT-PPFM OTM yang meliputi penghapusan, penggantian, penambahan dan pemeringkatan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku • Surat Menteri Sosial no 41/MS/C/06/2019 kepada Bupati/Walikota Perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP SPI 1.2.2.b) Tgl 21/6/19 untuk melaksanakan verifikasi dan validasi DT-PPFM dan OTM secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan • Surat Menteri Sosial no 42/MS/C/06/2019 kepada Dirjen PFM Perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP SPI 1.2.2.c) Tgl 21/6/19 untuk memerintahkan PPK Dit. PFM Wilayah I, PPK Dit. Wilayah II dan PPK Dit. Wilayah III untuk melakukan seleksi penerima bansos rastra agar permasalahan ini tidak terulang kembali 12/31/2019 12:00:00 AM - "Tindak lanjut Semester II 2019 • Surat Dirjen PFM Kepada PPK Wil LII,III No 2545/4/KS/06/2019 Perihal Surat perintah SPI Tp 1.2.2.c no 26 juni 2019 agar PPK untuk melakukan seleksi penerima Bansos Rastra agar permasalahan ini tidak terulang kembali" • Surat dari Dirjen PFM Kepada PPK Wil LII,III No 2545/4/KS/06/2019 Perihal Surat perintah SPI Tp 1.2.2.c no 26 juni 2019 agar PPK untuk melakukan seleksi penerima Bansos Rastra agar permasalahan ini tidak terulang kembali • Surat Menteri Sosial no 43/MS/C/06/2019 kepada KPA PFM Wil I, II dan III Perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP SPI 1.2.2.d) Tgl 21/6/19 A untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi atas ketepatan pelaksanaan program secara optimal, dengan mengesahkan KPM dan Keluarga Pengganti penerima Bansos Rastra yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan yang berlaku • Surat Menteri Sosial no 44/MS/C/06/2019 kepada PPK PFM Wil I, II dan III Tgl 21/6/19 perihal sanksi tertulis karena tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyeleksi penerima bansos rastra	1	0	0	0	Sesuai dengan rekomendasi	
				1			0	1	0	0	0	Belum terdapat hasil verifikasi dan validasi DT PPFM OTM
				1			0	1	0	0	0	Belum terdapat surat balasan dari PPK yang menyatakan telah melakukan seleksi penerima Bansos Rastra agar permasalahan ini tidak terulang kembali
				1			0	0	0	0	0	sesuai dengan rekomendasi
				1			0	0	0	0	0	sesuai dengan rekomendasi

4	Penerima Manfaat Bantuan Sosial UEP-KUBE di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Jawa Timur Tidak Terdaftar di DT-PPFM & OTM	<p>BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar menginstruksikan Direktur Jenderal PFM untuk:</p> <p>a.Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dana Dekonsentrasi Program PFM Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Timur yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan;</p> <p>BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar menginstruksikan Direktur Jenderal PFM untuk:</p> <p>b.Memerintahkan PPK Dana Dekonsentrasi Program PFM Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan seleksi penerima Bansos UEP KUBE dan melakukan sosialisasi terkait penggunaan Bansos UEP KUBE kepada penerima sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	1	<p>• Surat Menteri Sosial no 45/MS/C/06/2019 kepada Dirjen PFM Perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP SPI 1.2.3) Tgl 21/6/19 untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dana Dekonsentrasi Program PFM Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Kalimantan Timur yang tidak m</p> <p>12/31/2019 12:00:00 AM - "Tindak lanjut Semester II 2019</p> <p>• Surat dari Dirjen PFM Kepada PPK Dana Dekonsentrasi Prov DKI, Kaltim, Jawa Timur No 2548/4/KS/06/2019 Perihal Sanksi dan perintah Tp SPI 1.2.3 no 26 juni 2019 yang berisikan sanksi secara tertulis kepada saudara karena tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan memerintahkan kepada saudara untuk melakukan seleksi penerima Bansos UEP KUBE sesuai ketentua yang berlaku"</p> <p>• Surat dari Dirjen PFM Kepada PPK Dana Dekonsentrasi Prov DKI, Kaltim, Jawa Timur No 2548/4/KS/06/2019 Perihal Sanksi dan perintah Tp SPI 1.2.3 no 26 juni 2019 yang berisikan sanksi secara tertulis kepada saudara karena tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan memerintahkan kepada saudara untuk melakukan seleksi penerima Bansos UEP KUBE sesuai ketentua yang berlaku</p>	1	0	0	0	Terdapat sanksi kepada PPK Dana Dekonsentrasi Prov DKI, Kaltim, Jawa Timur
5	Pengendalian Pertanggungjawaban Dana Hibah Usaha Kesejahteraan Sosial Belum Memadai	<p>BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar:</p> <p>a.Menginstruksikan kepada Direktur Jenderal Dayasos, Direktur Jenderal Rehsos dan Direktur Jenderal PFM supaya:</p> <p>1)Lebih optimal dalam memantau realisasi laporan pertanggungjawaban bantuan sosial dari dana hibah UKS;</p> <p>2)Memerintahkan Direktur PSPKKM, Direktur K2KRS, Direktur Rehsos Anak, Direktur Rehsos Lansia, Direktur Rehsos Penyandang Disabilitas dan Direktur PFM Wilayah III selaku pemohon bantuan segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sosial dari dana hibah UKS.</p>	1	<p>• Surat Menteri Sosial no 46/MS/C/06/2019 kepada Direktur Jenderal Dayasos, Direktur Jenderal Rehsos dan Direktur Jenderal PFM perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP SPI 1.2.4.a) Tgl 21/6/19 supaya :</p> <p>1) Lebih optimal dalam memantau realisasi laporan pertanggungjawaban bantuan sosial dari dana hibah UKS;</p> <p>2) Memerintahkan Direktur PSPKKM, Direktur K2KRS, Direktur Rehsos Anak, Direktur Rehsos Lansia, Direktur Rehsos Penyandang Disabilitas dan Direktur PFM Wilayah III selaku pemohon bantuan segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan sosial dari dana hibah UKS</p> <p>12/31/2019 12:00:00 AM - "Tindak lanjut Semester II 2019 Dayasos</p> <p>• Surat Dirjen Dayasos kepada Direktur PSPKKM, direktur K2KRS, direktur Rehsos Anak, direktur lansia, direktur RSPD, direktur PFM Wil III no 1923/PS/04/02/06/2019 Perihal Instruksi TLHP BPK atas LK Kemensos 2018 LHP TP SPI 1.2.4.a tgl 24/6/2019</p> <p>• Surat Irjen Kepada Inspektur Irbid Dayasos dan Pfm no 854/II/08/2019 atas Perintah atas LHP BPK LK 2018 Kep 1.2.4.B tgl 20 Agustus</p> <p>Rehsos</p> <p>• Surat Direktur Rehsos Anak kepada Direktur PSDBS NO 275/2.2/PS.02/04/2019 Perihal TLHP BPK TP 1.2.4 SPI Tgl 26/4/2019</p> <p>• Rekapitulasi laporan pertanggungjawaban dana hibah th 2018 PFM</p> <p>• Surat Dirjen PFM Kepada Direktur Wil III, dan PPK Wil III No 2549/4/KS/06/2019 Perihal Surat perintah Tp SPI 1.2.4.a no 26 juni 2019</p> <p>• Nota dinas Direktur PFM Wil III no 861/4.4.3/BS/04/2019 dari kepada Sekretaris direktorat Dayasos perihal laporan</p>	0	1	0	0	Direktur PSPKKM, Direktur K2KRS, Direktur Rehsos Anak, Direktur Rehsos Lansia, Direktur Rehsos Penyandang Disabilitas belum menyampaikan LPJ sebesar Rp2.786.036.000

			BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar: b.Menginstruksikan Inspektur Jenderal untuk melakukan verifikasi terhadap bukti pertanggungjawaban penggunaan sosial dari dana hibah UKS, apabila ditemukan penggunaan dana hibah diluar ketentuan agar disetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.	1		1	0	0	0	Belum terdapat hasil verifikasi bukti penggunaan bansos dari dana hibah UKS
6	Selisih Saldo Escrow BPNT dengan Nilai Transaksi pada e-Wallet Sebesar Rp58.268.511.860	1	BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial untuk menginstruksikan Dirjen PFM agar memerintahkan PPK PFM Wilayah masing-masing supaya : a.Meminta Himbara : 1)Melakukan pengembalian dana BPNT ke masing-masing rekening escrow seluruhnya sebesar Rp58.268.511.860; 2)Melakukan setting wallet per masing-masing bank untuk memudahkan melakukan pemantauan transaksi penyaluran BPNT. BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial untuk menginstruksikan Dirjen PFM agar memerintahkan PPK PFM Wilayah masing-masing supaya : b.Melakukan rekonsiliasi penyaluran dengan Himbara berdasarkan saldo escrow	1	1	1	0	0	0	Belum terdapat penyetoran dana BPNT ke rekening escrow sebesar Rp58.268.511.860 dan hasil setting wallet pada masing-masing bank penyalur
			BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial untuk menginstruksikan Dirjen PFM agar memerintahkan PPK PFM Wilayah masing-masing supaya : b.Melakukan rekonsiliasi penyaluran dengan Himbara berdasarkan saldo escrow	1		1	0	0	0	Belum terdapat perintah kepada PPK dan hasil rekonsiliasi penyaluran dengan Himbara berdasarkan saldo escrow
7	Keluarga Penerima Manfaat PKH Sebanyak 611.048 Tidak Terdaftar di Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	1	BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial untuk menginstruksikan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial agar: a.Memerintahkan Seksi Validasi melakukan penyesuaian atas KPM PKH dengan menggunakan DT PPFM dan OTM yang mutakhir dalam melakukan validasi atas peserta penerima PKH; BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial untuk menginstruksikan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial agar: b.Memerintahkan KPA/PPK melakukan monitoring dan evaluasi atas ketepatan pelaksanaan program secara optimal.	1	1	1	0	0	0	Belum terdapat perintah kepada Kasie Validasi untuk melakukan penyesuaian atas KPM PKH dengan menggunakan DT PPFM dan OTM yang mutakhir dalam melakukan validasi atas peserta penerima PKH; Belum terdapat surat balasan KPA/PPK telah melakukan monitoring dan evaluasi atas ketepatan pelaksanaan program secara optimal
			BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial untuk menginstruksikan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial agar: b.Memerintahkan KPA/PPK melakukan monitoring dan evaluasi atas ketepatan pelaksanaan program secara optimal.	1		1	0	0	0	Belum terdapat surat balasan KPA/PPK telah melakukan monitoring dan evaluasi atas ketepatan pelaksanaan program secara optimal

			BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial untuk menginstruksikan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial agar: c.Memerintahkan Kepala Pusdatin Kesos untuk melakukan verifikasi dan validasi data secara akurat untuk ditetapkan sebagai DT PPFM OTM.	1		- • Surat Menteri Sosial no 49/MS/C/06/2019 kepada Dirjen Linjamos Perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP SPI 1.2.6) Tgl 21/6/19 agar memerintahkan Kepala Pusdatin Kesos untuk melakukan verifikasi dan validasi data secara akurat untuk ditetapkan sebagai DT PPFM OTM 12/31/2019 12:00:00 AM - Tindak lanjut Semester II 2019 • Surat dari Dirjen Linjamos kepada Direktur Jamsoskel no 1145 b/LJS/06/2019 Perihal TLHP SPI LK Kemensos TAH 2018 SPI 1.2.6.b tgl 26 Juni 2019	0	1	0	0	0	Belum terdapat perintah kepada Kepala Pusdatin
8	Pengelolaan Data Terpadu untuk KPM Peserta BPNT Belum Memadai	1	BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial agar: a.Menginstruksikan Direktorat PFM masing-masing wilayah, Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Pusdatin untuk meningkatkan koordinasi terkait feedback pemutakhiran data KPM yang gagal burekol di SIKS NG; BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial agar: b.Menginstruksikan Kepala Pusdatin Kesos untuk: 1)Menyusun mekanisme konsolidasi data dashboard penyaluran BPNT antara Himbara dengan Pusdatin Kesos selaku pengelola Basis Data Terpadu (BDT) terkait KPM gagal setting wallet, data double, gagal burekol, tidak transaksi dan KKS yang tidak terdistribusi; 2)Berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyempurnakan aplikasi SIKS-NG agar dapat menyajikan data sesuai format yang diperlukan oleh Himbara untuk dapat dilakukan pergantian KPM.	1		- • Surat Menteri Sosial no 50/MS/C/06/2019 kepada para Direktur PFM Wilayah, para Kepala Dinas Sosial, Kepala Pusdatin Kesos perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP SPI 1.2.7.a) Tgl 21/6/19 untuk meningkatkan koordinasi terkait feedback pemutakhiran data KPM yang gagal burekol di SIKS NG • Surat Menteri Sosial no 51/MS/C/06/2019 kepada Kepala Pusdatin Kesos perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP SPI 1.2.7.b) Tgl 21/6/19 untuk : 1) Menyusun mekanisme konsolidasi data dashboard penyaluran BPNT antara Himbara dengan Pusdatin Kesos selaku pengelola Basis Data Terpadu (BDT) terkait KPM gagal setting wallet, data double, gagal burekol, tidak transaksi dan KKS yang tidak terdistribusi; 2) Berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyempurnakan aplikasi SIKS-NG agar dapat menyajikan data sesuai format yang diperlukan oleh Himbara untuk dapat dilakukan pergantian KPM.	0	1	0	0	0	Belum terdapat feedback pemutakhiran data KPM yang gagal burekol di SIKS NG Belum terdapat mekanisme konsolidasi data dashboard antara Himbara dengan Pusdatin dan hasil koordinasi dengan Kemenkominfo terkait penyempurnaan aplikasi SIKS NG
9	Selisih Sisa Dana PKH Tahun 2018 sebesar Rp1.267.842.369 Tidak Dapat Dijelaskan	1	BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial untuk menginstruksikan Direktur Jaminan Sosial Keluarga agar: a.Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas PKH yang menjadi tanggung jawabnya; BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial untuk menginstruksikan Direktur Jaminan Sosial Keluarga agar: b.Memerintahkan Kepala Subdit Bansos untuk melakukan rekonsiliasi dengan Himbara terkait selisih realisasi bansos PKH sebesar Rp1.267.842.369 dan melaporkan hasilnya kepada BPK. Apabila terdapat kelebihan dana penyaluran bansos PKH, agar menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setornya kepada BPK.	1		- • Surat Menteri Sosial no 52/MS/C/06/2019 kepada Direktur JSK Perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP SPI 1.2.8) Tgl 21/6/19 agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas PKH yang menjadi tanggung jawabnya • Surat Menteri Sosial no 52/MS/C/06/2019 kepada Direktur JSK Perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP SPI 1.2.8) Tgl 21/6/19 agar memerintahkan Kepala Subdit Bansos untuk melakukan rekonsiliasi dengan Himbara terkait selisih realisasi bansos PKH sebesar Rp1.267.842.369 dan melaporkan hasilnya kepada BPK. Apabila terdapat kelebihan dana penyaluran bansos PKH, agar menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setornya kepada BPK 12/31/2019 12:00:00 AM - Tindak lanjut Semester II 2019 • Surat dari Dirjen Linjamos kepada Direktur Jamsoskel no 1145 c/LJS/06/2019 Perihal TLHP SPI LK Kemensos TAH 2018 SPI 1.2.8 tgl 26 Juni 2019 • Surat Dirjen Linjamos kepada Auditor Utama KN III BPK tgl 18 Oktober 2019 Nomor 1972/LJS/PS.04.02/10/2019 perihal penyelesaian TLHP LK Kemensos I tahun 2018 TP 1.2.8.b • Berita acara kegiatan rekonsiliasi selisih dana PKH 2018 Rp1.267.842.369 tidak dapat dijelaskan tgl 1 Oktober 2019 bahwa pada BNI, BRI, Mandiri dan BTN terdapat selisih lebih pencatatan pada aplikasi Simponi sedangkan pada BTN • Berita acara kegiatan rekonsiliasi selisih dana PKH 2018 Rp1.267.842.369 pada bulan April 2019 dengan kesimpulan bahwa telah diraikan berupa penjelasan bahwa dana PKH tahun 2018 senilai Rp1.267.842.369 telah dapat dijelaskan dan tidak ada selisih danan bansos PKH 2018 yang perlu disetorkan ke kas negara • Surat Direktur Jamsoskel tanggal 13 Juli 2018 perihal penyetoran dana bansos ke kas negara nomor 1360/LJS.JSK.TU/07/2018 • Surat Dirjen Linjamos kepada Direktur Jamsoskel nomor 1145c/LJS/06/2019 tanggal 26 Juni 2019 perihal tindak lanjut LHP th 2018 • Surat dari BTN Nomor 199/S/ SQND/NA/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 kepada Kemensos perihal permohonan E-billing penyetoran	1	0	0	0	0	sesuai dengan rekomendasi Perlu penjelasan lebih lanjut terkait hasil Berita Acara Rekonsiliasi

10	Kesalahan Klasifikasi Belanja Sebesar Rp2.130.214.632 pada Empat Satuan Kerja	1	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial untuk menginstruksikan:</p> <p>a. Kuasa Pengguna anggaran dalam mengklasifikasikan anggaran belanja memperhatikan ketentuan yang berlaku;</p> <p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial untuk menginstruksikan:</p> <p>b. Tim Penyusun Anggaran lebih cermat dalam memverifikasi dan menyetujui anggaran yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.</p> <p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial untuk menginstruksikan:</p> <p>c. PPK lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan (belanja barang) yang seharusnya dikapitalisasi menjadi belanja modal.</p>	1	<p>- Surat Menteri Sosial no 53/MS/C/06/2019 kepada KPA eq PPK Biro Umum, KPA eq PPK Biro Humas, KPA Setditjen Dayasos, KPA Setditjen Linjamsos perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP SPI 1.2.9.a) Tgl 21/6/19 agar dalam mengklasifikasikan anggaran belanja memperhatikan ketentuan yang berlaku</p> <p>12/31/2019 12:00:00 AM - Tindak lanjut Semester II 2019</p> <p>• Surat dari Dirjen Linjamsos kepada Sekretaris Dirjen Linjamsos no 1145.d/LJS/06/2019 Perihal TLHP SPI LK Kemensos TA 2018 SPI 1.2.10 tgl 26 Juni 2019 yang berisikan tentang intruksi agar lebih teliti dalam mengklasifikasikan anggaran belanja dan memperhatikan ketentuan yang berlaku</p>	0	1	0	0	0	0	0	<p>Belum ada Surat balasan KPA bahwa telah mengklasifikasikan anggaran belanja memperhatikan ketentuan yang berlaku</p> <p>Belum ada Surat Balasan dari TPA bahwa telah memverifikasi dan menyetujui anggaran yang diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan cermat</p> <p>Belum ada Surat balasan dari PPK telah melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan (belanja barang) yang seharusnya dikapitalisasi menjadi belanja modal</p>		
11	Pengadaan Aplikasi Tata Kelola Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan pada Direktorat Jamsoskel Tidak Dimanfaatkan	1	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial untuk menginstruksikan Dirjen Linjamsos agar memerintahkan Kepala Subdit Bansos untuk berkoordinasi dengan PPK (Non Bansos) terkait pengadaan aplikasi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.</p>	1	<p>- Surat Menteri Sosial no 56/MS/C/06/2019 Perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP SPI 1.2.10) Tgl 21/6/19 agar memerintahkan Kepala Subdit Bansos untuk berkoordinasi dengan PPK (Non Bansos) terkait pengadaan aplikasi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal</p> <p>12/31/2019 12:00:00 AM - Tindak lanjut Semester II 2019</p> <p>• Surat dari Dirjen Linjamsos kepada Sekretaris Dirjen Linjamsos no 1145.g/LJS/06/2019 Perihal TLHP SPI LK Kemensos TAH 2018 SPI 1.2.10 tgl 26 Juni 2019 tentang intruksi agar kepala Subdit Bansos untuk berkoordinasi dengan PPK (non bansos) terkait pengadaan aplikasi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal</p>	0	1	0	0	0	0	0	<p>Belum terdapat surat perintah Direktur ke Kasubdit Bansos</p>		
12	Pengelolaan Persediaan Hadiah Tidak Tertebak (HTT)/Hadiah Tidak Diambil Pemenang (HTDP) Belum Memadai	1	<p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial untuk menginstruksikan Dirjen Dayasos memerintahkan Direktur PSDBS agar:</p> <p>a. Lebih optimal dalam melaksanakan tupoksinya terhadap pemantauan penyelenggaraan UGB;</p> <p>BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial untuk menginstruksikan Dirjen Dayasos memerintahkan Direktur PSDBS agar:</p> <p>b. Mengajukan penghapusan atas HTT/HTDP yang kedaluwarsa dan tidak memiliki nilai ekonomis, menyusun dan menetapkan SOP yang rinci mengenai jangka waktu pemindahtanganan persediaan melalui penjualan/pelelangan serta menetapkan kriteria mengenai Penerima Manfaat yang sesuai untuk masing-masing kategori persediaan HTT/HTDP.</p>	1	<p>- Surat Menteri Sosial no 57/MS/C/06/2019 kepada Dirjen Dayasos Perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP SPI 1.3.1) Tgl 21/6/19 memerintahkan Direktur PSDBS Lebih optimal dalam melaksanakan tupoksinya terhadap pemantauan penyelenggaraan UGB</p> <p>- Surat Menteri Sosial no 57/MS/C/06/2019 kepada Dirjen Dayasos Perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP SPI 1.3.1) Tgl 21/6/19 memerintahkan Direktur PSDBS mengajukan penghapusan atas HTT/HTDP yang kedaluwarsa dan tidak memiliki nilai ekonomis, menyusun dan menetapkan SOP yang rinci mengenai jangka waktu pemindahtanganan persediaan melalui penjualan/ pelelangan serta menetapkan kriteria mengenai Penerima Manfaat yang sesuai untuk masing-masing kategori persediaan HTT/HTDP</p>	0	1	0	0	0	0	0	<p>Belum terdapat perintah kepada Direktur PSDBS</p> <p>Belum terdapat perintah kepada Direktur PSDBS dan penghapusan atas HTT/HTDP yang kedaluwarsa dan tidak memiliki nilai ekonomis, penetapan SOP yang rinci serta kriteria Penerima Manfaat yang sesuai kategori persediaan HTT/HTDP</p>		

13	Penatausahaan Aset Tetap pada Kementerian Sosial Belum Tertib	1	123.122.127.00	BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial untuk membuat SOP terkait tata cara penyimpanan dokumen kepemilikan BMN dan menetapkan pejabat penyimpan dan petugas penyimpan dokumen kepemilikan BMN serta menyelesaikan seluruh tindak lanjut atas rekomendasi BPK.	1	<ul style="list-style-type: none"> Surat Menteri Sosial no 58/MS/C/06/2019 kepada Sekretaris Jenderal Perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP SPI 1.3.2) Tgl 21/6/19 untuk membuat SOP terkait tata cara penyimpanan dokumen kepemilikan BMN dan menetapkan pejabat penyimpan dan petugas penyimpan dokumen kepemilikan BMN serta menyelesaikan seluruh tindak lanjut atas rekomendasi BPK 	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum terdapat SOP Tata cara penyimpanan dokumen dan penetapan Pejabat Penyimpan		
2.Kepatuhan																							
1	Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Sebesar Rp123.122.127	1	123.122.127.00	<p>BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar menginstruksikan Kepala BRSAMPK, Kepala PSBRW Melati, Direktur Rehsos, Kepala Badiklit dan Direktur PFM secara berjenjang untuk:</p> <p>a.Memerintahkan setiap Pegawai untuk tertib dalam menyampaikan surat keterangan tidak masuk kerja sebagai dasar perhitungan Tunjangan Kinerja masing-masing pegawai sesuai aturan dan batas waktu yang telah ditentukan;</p> <p>BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar menginstruksikan Kepala BRSAMPK, Kepala PSBRW Melati, Direktur Rehsos, Kepala Badiklit dan Direktur PFM secara berjenjang untuk:</p> <p>b.Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan kepada masing-masing Petugas Aplikasi Tunjangan Kinerja yang tidak teliti dalam melakukan perhitungan atas pengurangan tunjangan kinerja pegawai;</p>	1	<ul style="list-style-type: none"> Surat Menteri Sosial no 59/MS/C/06/2019 kepada Kepala BRSAMPK, Kepala PSBRW Melati, Direktur Rehsos, Kepala Badiklit dan Direktur PFM Wil II Perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP SPI 1.3.2) Tgl 21/6/19 untuk memerintahkan setiap Pegawai untuk tertib dalam menyampaikan surat keterangan tidak masuk kerja sebagai dasar perhitungan Tunjangan Kinerja masing-masing pegawai sesuai aturan dan batas waktu yang telah ditentukan Surat dari Direktur RSPD kepada Para Pegawai Dit. RSPD no.277/2.3/KU/06/2019 Perihal TLHP atas LK 2018 KEP 1.1.1 (Perintah) tgl 24/6/2019 setiap Pegawai untuk lebih tertib dalam menyampaikan surat keterangan tidak masuk kerja sebagai dasar perhitungan Tunjangan Kinerja masing-masing pegawai sesuai aturan dan batas waktu yang telah ditentukan Surat Kepala BRSAMPK Melati kepada para pegawai BRSPDSRW Melati no 583/202.3.1/KU.03.02/07/2019 tanggal 24 Juni 2019 perihal Sanksi teguran tertulis untuk tertib dalam menyampaikan surat keterangan tidak masuk kerja sebagai dasar perhitungan Tunjangan Kinerja masing-masing pegawai sesuai aturan dan batas waktu yang telah ditentukan Surat Direktur RSPD kepada para pegawai RSPD no 277/2.3/KU/06/2019 Perihal TLHP LK 2018 TP 1.1.1 (sanksi) tgl 24 juni 2019, untuk tertib dalam menyampaikan surat keterangan tidak masuk kerja sebagai dasar perhitungan Tunjangan Kinerja masing-masing pegawai sesuai aturan dan batas waktu yang telah ditentukan Surat Kepala BRSAMPK Paramitha kepada para pegawai BRSAMPK Paramitha mataram no 312.a/TU.Um/BRSAMPKPP/07/2019 tanggal 24 Juni 2019 perihal perintah kepada seluruh pegawai untuk lebih tertib dalam menyampaikan surat keterangan tidak Surat Menteri Sosial no 59/MS/C/06/2019 kepada Kepala BRSAMPK, Kepala PSBRW Melati, Direktur Rehsos, Kepala Badiklit dan Direktur PFM Wil II Perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP SPI 1.3.2) Tgl 21/6/19 untuk mengenakan sanksi sesuai ketentuan kepada masing-masing Petugas Aplikasi Tunjangan Kinerja yang tidak teliti dalam melakukan perhitungan atas pengurangan tunjangan kinerja pegawai Surat dari Direktur RSPD kepada Petugas Aplikasi Tunjangan Kinerja Dit. RSPD no 277/2.3/KU/06/2019 Perihal TLHP atas LK 2018 KEP 1.1.1 (Sanksi teguran tertulis) tgl 24/6/2019 agar lebih cermat dan teliti dalam melakukan perhitungan atas pengurangan tunjangan kinerja pegawai Surat Kepala BRSAMPK Paramitha Mataram kepada petugas Aplikasi tunjangan kinerja no.315.a/TU.Um/BRSAMPKPP/07/2019 tanggal 24 Juli 2019 Perihal Sanksi teguran tertulis untuk lebih cermat dan teliti dalam melakukan perhitungan atas pengurangan tunjangan kinerja pegawai Surat Direktur RSPD Kepada Petugas Aplikasi tunjangan kinerja RSPD no 277/2.3/KU/07/2019 tgl 24 juni 2019 perihal sanksi teguran tertulis TP 1.1.1 untuk lebih cermat dan teliti dalam melakukan perhitungan atas pengurangan tunjangan kinerja pegawai Surat Direktur PFM Wil II kepada Aplikator Tukin Dit. PFM Wil II No 1543/4.3/KS.01/07/2019 tgl 5 juli 2019 perihal sanksi LK 2018 KEP 1.1.1.b karena tidak teliti dalam melakukan perhitungan 	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tindak lanjut sesuai rekomendasi
					1		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tindak lanjut sesuai rekomendasi			

2	Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Sebesar Rp306.744.935 pada Lima Satuan Kerja	306.744.935,00	BPK merekomendasikan Menteri Sosial untuk menginstruksikan Dirjen Dayasos, Kepala Badiklit, Sekretaris Jenderal, Dirjen Linjamos dan Dirjen PFM secara berjenjang agar: a. Memberikan sanksi kepada Bendahara Pengeluaran yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pembayaran atas belanja perjalanan dinas;	1		<ul style="list-style-type: none"> Surat Menteri Sosial no 60/MS/C/06/2019 kepada Dirjen Dayasos, Kepala Badiklit, Sekretaris Jenderal, Dirjen Linjamos dan Dirjen PFM Perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP Keputuhan 1.2.1) Tgl 21/6/19 agar memberikan sanksi kepada Bendahara Pengeluaran yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pembayaran atas belanja perjalanan dinas 12/31/2019 12:00:00 AM - Tindak lanjut Semester II 2019 Surat Sekretaris Ditjen Dayasos kepada Bendahara Pengeluaran no 1068/3.1/PS.04.02/06/2019 tgl 24/6/2019 perihal TLHP BPK atas LK Kemensos 2018 LHP TP 1.2.1 sanksi teguran karena tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pembayaran atas belanja perjalanan dinas Surat Sekretaris Badiklit kepada Bendahara Sekretaris Badiklit no 1167/6.1/KU.01/7/2019 Tgl 9/7/2019 Surat dari Dirjen Linjamos kepada Kadinsos Prov Kaltim no 1145.h/LJS/06/2019 perihal instruksi TLHP Keputuhan LK Kemensos TA 2018 KEP 1.2.1 tgl 26 Juni 2019 Surat Dirjen PFM kepada Bendahara Dit PFM Wilayah II No 2568/4/KS/06/2019 tanggal 27 Juni 2019 perihal sanksi karena tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pembayaran atas belanja perjalanan dinas 	0		1	0	0	0	Belum terdapat sanksi kepada Bendahara Dana Dekonsentrasi Dinsos Prov Kaltim, dan Bendahara Pengeluaran Biro Humas	
		168.241.200,00	BPK merekomendasikan Menteri Sosial untuk menginstruksikan Dirjen Dayasos, Kepala Badiklit, Sekretaris Jenderal, Dirjen Linjamos dan Dirjen PFM secara berjenjang agar: b. Memerintahkan pelaksana perjalanan dinas untuk menyetorkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp168.241.200 (Rp306.744.935 - Rp51.966.000 - Rp24.812.200 - Rp32.824.035 - Rp10.360.000 - Rp4.699.800 - Rp13.841.700) ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.	1	168.241.200,00	<ul style="list-style-type: none"> Surat Menteri Sosial no 60/MS/C/06/2019 kepada Dirjen Dayasos, Kepala Badiklit, Sekretaris Jenderal, Dirjen Linjamos dan Dirjen PFM Perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP Keputuhan 1.2.1) Tgl 21/6/19 agar memerintahkan pelaksana perjalanan dinas untuk menyetorkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp168.241.200 (Rp306.744.935 - Rp51.966.000 - Rp24.812.200 - Rp32.824.035 - Rp10.360.000 - Rp4.699.800 - Rp13.841.700) ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK setditjen dayasos Setor sebesar Rp7.129.800 NTPN 5EE465KURB1MJET9 Tgl 18/6/19 (Keg Pembinaan Bag Umum) Setor sebesar Rp4.830.000 NTPN EFBC05KV11FGICT9 tgl 18/6/19 (Keg FGD Bagian PP) Setor sebesar Rp2.454.000 NTPN 71B385L05Q33GT9 tgl 18/6/19 (Peliputan Penguatan Bag. OHH) K2KRS Setor sebesar Rp67.428.000 NTPN E5BFD302H8DIOUIP TGL 17/5/19 Biro Humas Bukti setor sebesar Rp6.400.000 NTPN 1EE4880K077VKH71 tgl 27 Mei 2019 PFM Setor Sebesar Rp2.440.000 NTPN 2DF610VKRQF37P4P tgl 25/4/2019 (Henni Nurul) Setor Sebesar Rp2.500.000 NTPN DA0720VL81K2E34P tgl 25/4/2019 (Widi Prasetyo) Setor Sebesar Rp1.380.000 NTPN DDECD08RIK4SK8RP tgl 3/5/2019 (Irwan Jamiat) Setor Sebesar Rp2.440.000 NTPN 09CA508QN8MMOQRP tgl 3/5/2019 (Gimanjar Sugih) 	0	145.277.800,00	1	22.963.400,00	0	0	Belum terdapat perintah kepada pelaksana perjalanan dinas dan penyetoran sebesar Rp22.963.000	283.781.935.00
3	Belanja Barang untuk Operasional Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tidak Mempedomani Mekanisme Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp529.641.315 serta terdapat Saldo Kartu BBM Sebesar Rp508.490.858	529.641.315,00	BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar: a. Menginstruksikan Sekretaris Jenderal untuk membuat ketentuan atau SOP mengenai mekanisme pertanggungjawaban belanja operasional kendaraan dinas di lingkungan Kementerian Sosial; BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar: b. Menginstruksikan KPA Biro Umum, Setditjen Dayasos, Ijen, dan Setditjen PFM untuk meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan atas penganggaran, pengendalian realisasi pertanggungjawaban kegiatan operasional BBM kendaraan dinas;	1		<ul style="list-style-type: none"> Surat Menteri Sosial no 61/MS/C/06/2019 kepada Sekretaris Jenderal perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP Keputuhan 1.2.2.a) Tgl 21/6/19 untuk membuat ketentuan atau SOP mengenai mekanisme pertanggungjawaban belanja operasional kendaraan dinas di lingkungan Kementerian Sosial 	0		1	0	0	0	Belum terdapat SOP mekanisme belanja operasional kendaraan dinas	
				1		<ul style="list-style-type: none"> Surat Menteri Sosial no 62/MS/C/06/2019 kepada KPA Biro Umum, Setditjen Dayasos, Ijen, dan Setditjen PFM perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP Keputuhan 1.2.2.b) Tgl 21/6/19 untuk meningkatkan fungsi pengendalian dan pengawasan atas penganggaran, pengendalian realisasi pertanggungjawaban kegiatan operasional BBM kendaraan dinas 	1		0	0	0	0	Sesuai dengan rekomendasi	

			BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar: c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK Biro Umum yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengendalikan pertanggungjawaban kegiatan operasional BBM kendaraan dinas dan memerintahkan PPK pada Biro Umum untuk menyeter kelebihan pembayaran sebesar Rp529.641.315 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setornya kepada BPK;	1	529.641.315,00	• Surat Menteri Sosial no 63/MS/C/06/2019 perihal Sanksi Tertulis kepada PPK Biro Umum yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengendalikan pertanggungjawaban kegiatan operasional BBM kendaraan dinas (LHP Keputusan 1.2.2.c) Tgl 21/6/19 dan memerintahkan PPK pada Biro Umum untuk menyeter kelebihan pembayaran sebesar Rp529.641.315 ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setornya kepada BPK - SPTJM An. Adi Wahyono no.1468/1.5/PPK.01/5/19 - Bukti setor sebesar Rp50.000.000,00 NTPN 6946884DD01LH74P tgl 17/6/19 12/31/2019 12:00:00 AM - Tindak lanjut Semester II 2019 Biro Umum • Setoran sebesar Rp10.000.000 NTPN E687748VU0E20TV8 tanggal 29 Juli 2019 • Setoran sebesar Rp10.000.000 NTPN FDE9F09UM741J2M tanggal 16 Agustus 2019 • Setoran sebesar Rp10.000.000 NTPN 977963CIE619E6UR tanggal 17 September 2019 • Setoran sebesar Rp10.000.000 NTPN DCSB36U8DGDH0CVU tanggal 7 Oktober 2019 • Setoran sebesar Rp10.000.000 NTPN 9C5C00N9UMFQNMV tanggal 8 November 2019 • Setoran sebesar Rp21.000.000 NTPN 73ADC6U8DGE0U1VD tanggal 29 Juli 2019 • Setoran sebesar Rp10.000.000 NTPN BDA372G4UBNEBAGV tanggal 3 Desember 2019 • Setoran sebesar Rp28.000.000 NTPN 718E12G4UBNKN3PM tanggal 10 Desember 2019	0	159.000.000,00	1	370.641.315,00	0	-	0	Belum terdapat penyeteroran sebesar Rp370.641.315	159.000.000,00	
			BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar: d. PPK Setdijen Dayasos supaya lebih cermat dalam memverifikasi, menyetujui pembayaran belanja dan bukti pertanggungjawabannya serta melaksanakan rekonsiliasi berkala dengan PT Pertamina Retail;	1		• Surat Menteri Sosial no 64/MS/C/06/2019 kepada PPK Setdijen Dayasos perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP Keputusan 1.2.2.d) Tgl 21/6/19 s supaya lebih cermat dalam memverifikasi, menyetujui pembayaran belanja dan bukti pertanggungjawabannya serta melaksanakan rekonsiliasi berkala dengan PT Pertamina Retail	1	0	0	0	0	Sesuai dengan rekomendasi				
			BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar: e. Bendahara pengeluaran Biro Umum, Setdijen Dayasos, Ijen, dan Setdijen PFM supaya lebih cermat dalam menyalurkan dana dan mempertanggungjawabkan GUP sesuai ketentuan	1		• Surat Menteri Sosial no 65/MS/C/06/2019 kepada Bendahara pengeluaran Biro Umum, Setdijen Dayasos, Ijen, dan Setdijen PFM perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP Keputusan 1.2.2.e) Tgl 21/6/19 supaya lebih cermat dalam menyalurkan dana dan mempertanggungjawabkan GUP sesuai ketentuan	1	0	0	0	0	Sesuai dengan rekomendasi				
4	Terdapat Kelebihan Bayar atas Paket Pekerjaan Sewa Kendaraan Dinas pada Biro Umum Tahun 2018 senilai Rp159.865.000	1	159.865.000,00	BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar memerintahkan: a. PPK menarik kelebihan bayar kepada pelaksana kegiatan sebesar Rp159.865.000 dan selanjutnya menyetorkan ke Kas Negara serta menyampaikan bukti salinan bukti setornya kepada BPK.	1	159.865.000,00	• Surat Menteri Sosial no 66/MS/C/06/2019 kepada PPK Biro Umum perihal Perintah TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP Keputusan 1.2.3.a) Tgl 21/6/19 menarik kelebihan bayar kepada pelaksana kegiatan sebesar Rp159.865.000 dan selanjutnya menyetorkan ke Kas Negara serta menyampaikan bukti salinan bukti setornya kepada BPK 12/31/2019 12:00:00 AM - Tindak lanjut Semester II 2019 • Setoran Setjen sebesar Rp 30.000.000 NTPN B8D0848VU0DUB56M tanggal 24I uli /2019 (PT Jati Jayakarta)	0	30.000.000,00	1	129.865.000,00	0	-	0	Belum terdapat penyeteroran sebesar Rp129.865.000	30.000.000,00
			BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar memerintahkan: b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan PPHP yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan sewa kendaraan dinas.	1		• Surat Menteri Sosial no 67/MS/C/06/2019 perihal Sanksi tertulis kepada PPK dan PPHP Biro Umum yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan sewa kendaraan dinas (LHP Keputusan 1.2.3.b) Tgl 21/6/19	1	0	0	0	0	Sesuai dengan rekomendasi				
5	Belanja Bantuan Pemerintah Tidak Mempedomani Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah dan Belum Dipertanggungjawabkan senilai Rp1.166.500.000 serta Sisa Dana sebesar Rn141.774.470 belum	1	141.274.420,00	BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar: a. Memerintahkan KPA pada Direktorat PSPKKM, Satker Dekon Prov Kaltim dan Prov DKI Jakarta supaya mempedomani ketentuan yang berlaku terkait mekanisme pelaksanaan belanja bantuan pemerintah;	1		• Surat Menteri Sosial no 68/MS/C/06/2019 kepada KPA pada Direktorat PSPKKM, Satker Dekon Prov Kaltim dan Prov DKI Jakarta Perihal Perintah TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP Keputusan 1.2.4.a) Tgl 21/6/19 supaya mempedomani ketentuan yang berlaku terkait mekanisme pelaksanaan belanja bantuan pemerintah	1	0	0	0	0	Sesuai dengan rekomendasi			

disetorkan ke Kas Negara	BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar: b.Menyusun Juknis dan Perjanjian Kerja yang antara lain mengatur tentang Kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Operasional kelengkapan, Batas waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dan Pengesahan laporan pertanggungjawaban oleh PPK serta sanksi yang tegas apabila penerima bantuan operasional tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu.	1		- Surat Menteri Sosial no 69/MS/C/06/2019 kepada Dirjen Dayasos perihal Perintah TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP Keputusan 1.2.4.b) Tgl 21/6/19 menyusun Juknis dan Perjanjian Kerja yang antara lain mengatur tentang Kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Operasional kelengkapan, Batas waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dan Pengesahan laporan pertanggungjawaban oleh PPK serta sanksi yang tegas apabila penerima bantuan operasional tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu 12/31/2019 12:00:00 AM - Tindak lanjut Semester II 2019 • Surat Dirjen Dayasos kepada direktur PSKKM no 194/3/PS.04.02/06/2019 perihal Perintah TLHP BPK atas LK Kemensos 2018 LHP TP 1.2.4.b tanggal 24 Juni 2019 • Panduan / juknis pengelolaan biaya operasional SLRT dan Puskesmas TA 2019	1	0	0	0	0	Sesuai dengan rekomendasi		
	BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar: c.Memerintahkan PPK Dit PSPKKM agar meminta penerima bantuan operasional SLRT dan Puskesmas untuk mengembalikan sisa dana bantuan operasional sebesar Rp139.274.420 (Rp141.274.420-Rp2.000.000) ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setornya kepada BPK;	1	139.274.420,00	• Surat Menteri Sosial no 70/MS/C/06/2019 kepada PPK Dit PSPKKM perihal Perintah TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP Keputusan 1.2.4.c) Tgl 21/6/19 agar meminta penerima bantuan operasional SLRT dan Puskesmas untuk mengembalikan sisa dana bantuan operasional sebesar Rp139.274.420 (Rp141.274.420-Rp2.000.000) ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setornya kepada BPK PSKKM • Bukti Setor sebesar Rp30.000.000 NTPN B668A3U2NATCNP6P tgl 29/4/19 • Bukti Setor sebesar Rp10.000.000 NTPN F182D468CGDHIB6P tgl 29/4/19 • Bukti Setor sebesar Rp10.000.000 NTPN 1E1565GC2I6RK8V9 tgl 30/4/19 • Bukti Setor sebesar Rp30.000.000 NTPN BFA0B22B078L332 tgl 2/5/19 • Bukti Setor sebesar Rp10.000.000 NTPN 06CB73HRAG7VDFTI tgl 7/5/19 • Bukti Setor sebesar Rp10.000.000 NTPN 535EC1ARGTGTUSV2 tgl 30/4/19 • Bukti Setor sebesar Rp5.818.500 NTPN 927AA43IITHKVL06P tgl 29/4/19 • Bukti Setor sebesar Rp255.920 NTPN F3D1A56A224J5AV9 tgl 30/4/19 • Bukti Setor sebesar Rp3.200.000 NTPN 284C42Q5KV7S5T9 tgl 26/4/19 • Bukti Setor sebesar Rp30.000.000 NTPN 851167LAEMSRE039 tgl 2/5/19	1	139.274.420,00	0	0	0	0	Sesuai dengan rekomendasi	141.274.420,00
	BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar: d.Memerintahkan Inspektoral Jenderal untuk melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban belanja bantuan sebesar Rp1.166.500.000, apabila terdapat penggunaan bantuan yang tidak sesuai ketentuan, agar menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setornya kepada BPK.	1		• Surat Menteri Sosial no 71/MS/C/06/2019 kepada Inspektur Jenderal perihal Perintah TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP Keputusan 1.2.4.d) Tgl 21/6/19 untuk melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban belanja bantuan sebesar Rp1.166.500.000, apabila terdapat penggunaan bantuan yang tidak sesuai ketentuan, agar menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setornya kepada BPK 12/31/2019 12:00:00 AM - Tindak lanjut Semester II 2019 • Nota Dinas Inspektur Jenderal kepada Inspektur Bidang Dayasos dan PFM No 851/J/08/2019 atas Perintah atas LHP BPK LK 2018 Kep 1.2.4.d agar melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban belanja bantuan sebesar Rp1.166.500.000, apabila terdapat penyelewengan penggunaan agar direkomendasikan untuk menyetorkan ke Kas Negara dan menyampaikan salinan bukti setornya kepada BPK	0		1	0	0	0	Belum terdapat hasil verifikasi pertanggungjawaban belanja bantuan sebesar Rp1.165.500.000	

6	1	110.003.075.00	BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar memerintahkan: a. Pelaksana kegiatan Satker Dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi NTB dan BRSAMPK Paramita Mataram untuk menyetorkan kelebihan bayar sebesar Rp110.003.075 ke Kas Negara, dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.	1	110.003.075.00	<ul style="list-style-type: none"> Surat Menteri Sosial no 72/MS/C/06/2019 kepada Pelaksana kegiatan Satker Dekonsentrasi Dinas Sosial Provinsi NTB dan BRSAMPK Paramita Mataram perihal Perintah TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP Keputusan 1.2.5.a) Tgl 21/6/19 untuk menyetorkan kelebihan bayar sebesar Rp110.003.075 ke Kas Negara, dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK 12/31/2019 12:00:00 AM - Tindak lanjut Semester II 2019 Setor sebesar Rp 18.150.800 NTPN 833557QLTAN8BAPK tgl 16/7/2019 (Setor melalui bank mandiri) Setor sebesar Rp16.724.175,00 NTPN 4F59B6U8DG54ONL4 tgl 1/8/2019 Setor sebesar Rp10.049.200 NTPN EBB3C7QLTAN9FVK1 tgl 18/7/2019 Setor sebesar Rp12.564.000 NTPN 082A12G4UB96JR62 TGL 29/7/2019 Setor sebesar Rp13.994.900 NTPN 6A7382G4UB938NCU tgl 22/7/2019 Setor sebesar Rp 8.700.000 NTPN 8.700.000 NTPN 66C8VU0DVI0JT tgl 25/7/2019 Setor sebesar Rp29.785.000 NTPN 92EA748VU0E2P39A tgl 29/7/2019 	0	109.968.075,00	1	35.000,00	0	0	0	Belum terdapat penyetoran sebesar Rp35.000	109.968.075,00
			BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar memerintahkan: b. KPA untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK Dinas Sosial Provinsi NTB dan PPK BRSAMPK Paramita Mataram yang tidak melaksanakan tugasnya dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban realisasi Belanja Barang dan Jasa sesuai ketentuan.	1		<ul style="list-style-type: none"> Surat Menteri Sosial no 73/MS/C/06/2019 kepada KPA Dinsos Provinsi NTB dan KPA BRSAMPK Mataram perihal Perintah TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP Keputusan 1.2.5.b) Tgl 21/6/19 A untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK Dinas Sosial Provinsi NTB dan PPK BRSAMPK Paramita Mataram yang tidak melaksanakan tugasnya dalam memverifikasi bukti pertanggungjawaban realisasi Belanja Barang dan Jasa sesuai ketentuan 12/31/2019 12:00:00 AM - Tindak lanjut Semester II 2019 Surat Kepala BRSAMPK Paramita Mataram kepada PPK no 317.a/TU.Um/BRSAMPK/07/2019 perihal Perintah TLHP atas LK Kemensos 2018 (TP 1.5.b.1 LK 2018) sanksi agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban realisasi Belanja Barang dan Jasa sesuai ketentuan berlaku Surat dari Kepala Dinas NTB kepada PPK No 478/1./Dinsos tgl 18 Juli 2018 perihal Sanksi Teguran tertulis agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak mengulangi lagi 	1	0	0	0	0	0	Tindak lanjut sesuai rekomendasi		
7	1		BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial agar: a. Menginstruksikan Inspektur Jenderal agar memerintahkan Inspektur terkait untuk melakukan verifikasi dan mengembalikan potongan dana insentif Tagana kepada yang berhak menerima sebesar Rp26.260.000; BPK merekomendasikan kepada Menteri Sosial agar: b. Menginstruksikan KPA agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Sdr Amn (Staf PSKBA) sebagai koordinator penerima dana insentif Tagana Provinsi NTB yang melakukan pemotongan insentif Tagana.	1		<ul style="list-style-type: none"> Surat Menteri Sosial no 74/MS/C/06/2019 kepada Inspektur Jenderal Inspektur TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP Keputusan 1.2.6.a) Tgl 21/6/19 agar memerintahkan Inspektur terkait untuk melakukan verifikasi dan mengembalikan potongan dana insentif Tagana kepada yang berhak menerima sebesar Rp26.260.000 12/31/2019 12:00:00 AM - Tindak lanjut Semester II 2019 Surat Irjen kepada Inspektur Irbid. Linjamsos no 789/I/08/2019 perihal perintah agar melakukan verifikasi dan menetapkan pengembalian potongan dana insentif Tagana Provinsi NTB sebesar Rp26.260.000 untuk kemudian kepada yang berhak Nota dinas Inspektur Bidang Linjamsos no 112/I/IR.LJS/08/2019 kepada Irjen dari perihal Laporan Verifikasi Dokumen Tindak lanjut 1.2.6.a tanggal 12 Agustus 2019, dengan hasil kesimpulan bahwa pengembalian pembayaran insentif Tagana Provinsi NTB telah dilaksanakan seluruhnya senilai Rp26.260.000 (dilampiri surat pernyataan terima uang dari 13 orang Tagana) 	1	0	0	0	0	0	Tindak lanjut sesuai rekomendasi		
				1		<ul style="list-style-type: none"> Surat Menteri Sosial no 75/MS/C/06/2019 kepada KPA Dinas Sosial Provinsi NTB perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP Keputusan 1.2.6.b) Tgl 21/6/19 agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Sdr Amn (Staf PSKBA) sebagai koordinator penerima dana insentif Tagana Provinsi NTB yang melakukan pemotongan insentif Tagana 12/31/2019 12:00:00 AM - Tindak lanjut Semester II 2019 Surat Dirjen Linjamsos kepada Kadinsos Prov NTB no 1145.I/LJS/06/2019 Perihal TLHP Keputusan LK Kemensos TAH 2018 KEP 1.2.6.b tgl 26 Juni 2019 Surat Kepala Dinas NTB kepada Sdr Amran No 477/1./Dinsos tertulis tgl 18 Juli 2018 perihal Sanksi Teguran agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak mengulangi lagi 	1	0	0	0	0	0	Tindak lanjut sesuai rekomendasi		

8	Kelebihan Pembayaran atas Tiga Paket Pekerjaan sebesar Rp336.754.546	1	336.754.546,00	BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada PPK yang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pengadaan.	1	- Surat Menteri Sosial no 76/MS/C/06/2019 Sanksi Tertulis kepada PPK Non Bansos Dit JSK yang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pengadaan (LHP Keputusan 1.3.1.) Tgl 21/6/19 12/31/2019 12:00:00 AM - Tindak lanjut Semester II 2019 • Surat Dirjen Linjamsos kepada Direktur Jamsoskel no 1145/JJS/06/2019 tgl 26 Juni 2019 perihal TLHP Keputusan LK Kemensos Tahun 2018 KEP 1.3.2. instruksi pemberian sanksi tertulis kepada PPK yang tidak mempedomani ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pengadaan	1	0	0	0	0	0	TL Semester I 2019 Sesuai dengan rekomendasi	336,754,546.00
9	Terdapat Keterlambatan Pekerjaan pada Aplikasi SIM PKH yang Belum Dikenakan Denda Keterlambatan sebesar Rp293.880.275	1	293.880.275,00	BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar: a.Memerintahkan Inspektur Jenderal untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atas penyelesaian pekerjaan pembuatan aplikasi SIM PKH dan mengenakan denda keterlambatan sampai dengan seluruh pekerjaan dinyatakan selesai, dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK; BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar: b.Mengenaikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan PPHP yang tidak melakukan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dokumen kontrak.	1	- Surat Menteri Sosial no 77/MS/C/06/2019 kepada Inspektur Jenderal perihal Perintah TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP Keputusan 1.3.2.a) Tgl 21/6/19 untuk melakukan pemeriksaan lanjutan atas penyelesaian pekerjaan pembuatan aplikasi SIM PKH dan mengenakan denda keterlambatan sampai dengan seluruh pekerjaan dinyatakan selesai, dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK 12/31/2019 12:00:00 AM - Tindak lanjut Semester II 2019 • Surat Irjen no 1129/IJ/11/2019 tgl 4/11/2019 kepada Inspektur Bid Linjamsos perihal perintah atas LHP BPK LK 2018 Kep TP 1.3.2.a • Surat Menteri Sosial no 78/MS/C/06/2019 Sanksi tertulis kepada PPK Non Bansos dan PPHP Dit JSK yang tidak melakukan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dokumen kontrak (LHP Keputusan 1.3.2.b) Tgl 21/6/19 12/31/2019 12:00:00 AM - Tindak lanjut Semester II 2019 • Surat Dirjen Linjamsos kepada Direktur Jamsoskel no 1145.k/LJS/06/2019 Perihal TLHP Keputusan LK Kemensos Tahun 2018 KEP 1.3.2.b tgl 26 Juni 2019	0	1	0	0	0	0	Belum terdapat hasil pemeriksaan lanjutan dan penyetoran denda keterlambatan minimal sebesar Rp293.880.275 TL Semester I 2019 Sesuai dengan rekomendasi	293,880,275.00
10	Kekurangan Volume atas Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran pada Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Tahun 2018 Sebesar Rp19.210.569	1	19.210.569,00	BPK merekomendasikan Menteri Sosial menginstruksikan KPA agar: a.Memerintahkan PPHP supaya lebih cermat dalam melakukan perhitungan volume pekerjaan pada pembayaran akhir pekerjaan. BPK merekomendasikan Menteri Sosial menginstruksikan KPA agar: b.Memerintahkan PPK supaya melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan secara memadai serta lebih cermat dalam melaksanakan pembayaran pekerjaan; BPK merekomendasikan Menteri Sosial menginstruksikan KPA agar: c.Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan PPHP yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengendalian dan pengawasan pekerjaan dan perhitungan volume pekerjaan pada saat pembayaran.	1	- Surat Menteri Sosial no 79/MS/C/06/2019 kepada KPA Pusdiklat Kesos Perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP Keputusan 1.3.3) Tgl 21/6/19 supaya lebih cermat dalam melakukan perhitungan volume pekerjaan pada pembayaran akhir pekerjaan • Surat Menteri Sosial no 79/MS/C/06/2019 kepada KPA Pusdiklat Kesos Perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP Keputusan 1.3.3) Tgl 21/6/19 agar memerintahkan PPK supaya melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan secara memadai serta lebih cermat dalam melaksanakan pembayaran pekerjaan • Surat Menteri Sosial no 79/MS/C/06/2019 kepada KPA Pusdiklat Kesos Perihal Instruksi TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP Keputusan 1.3.3) Tgl 21/6/19 agar Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan PPHP yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengendalian dan pengawasan pekerjaan dan perhitungan volume pekerjaan pada saat pembayaran	0	1	0	0	0	0	Belum terdapat perintah kepada PPHP Belum terdapat perintah kepada PPK Belum terdapat sanksi kepada PPK dan PPHP	19,210,569.00
11	Sebanyak 220.219 KKS Tidak Dapat Didistribusikan kepada KPM BPNT pada Ditjen PFM Sebesar Rp74.751.628.534	1	74.751.628.534,00	BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar memerintahkan: a.Direktur PFM Wilayah II dan Direktur PFM Wilayah III agar menindaklanjuti laporan yang diberikan oleh Himbara tentang KKS yang tidak dapat didistribusikan kepada KPM berikut dana BPNT yang sudah tidak dapat disalurkan	1	- Surat Menteri Sosial no 80/MS/C/06/2019 kepada Direktur PFM Wilayah II dan III Perihal Perintah TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP Keputusan 1.4.1.a) Tgl 21/6/19 agar menindaklanjuti laporan yang diberikan oleh Himbara tentang KKS yang tidak dapat didistribusikan kepada KPM berikut dana BPNT yang sudah tidak dapat disalurkan	0	1	0	0	0	0	Belum terdapat tindak lanjut atas laporan KKS tidak dapat didistribusikan dari Himbara dan dana BPNT yang sudah tidak dapat disalurkan	

			BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar memerintahkan: b.PPK Direktorat PFM Wilayah II dan PPK Direktorat PFM Wilayah III agar melakukan penelitian atas KPM yang KKS nya tidak dapat didistribusikan serta memerintahkan Himbara melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp74.751.628.534, dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.	1	74.751.628.534,00	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Menteri Sosial no 81/MS/C/06/2019 kepada PPK Dit PFM Wilayah II dan III perihal Perintah TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP Keputusan 1.4.1.b) Tgl 21/6/19 agar melakukan penelitian atas KPM yang KKS nya tidak dapat didistribusikan serta memerintahkan Himbara melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp74.751.628.534, dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK 12/31/2019 12:00:00 AM - Tindak lanjut Semester II 2019 PFM Wilayah II • Surat Direktur PFM Wil II Kepada Divisi BNI No 1341/4.3/BS.02/06/2019 tgl 24 juni 2018 perihal Instruksi pengembalian sisa dana BPNT TA 2018 atas KKS tidak terdistribusi kota Bontang • Surat VP Divisi HLB BNI kepada PFM Wil II no HLB/4.6/1900 tanggal 8 Juli 2019 • Setoran BNI sebesar Rp258.610.000 NTPN B22E32DEPC6D2679 tgl 2/7/2019 KKS BPNT Tidak Dstribusi Kota Bontang • Surat Direktur Wil II Kepada BRI No 1342.3/BS.02/06/2019 tgl 24/6/2019 perihal Instruksi pengembalian sisa dana BPNT atas KKS Tidak Distribusi Prov Kaltim dan NTB • Surat BRI kepada Dit. Wil II no B.278-SEN/05/2019 Perihal Pelaporan saldo akhir KKS BPNT Kaltim dan NTB Hasil opname kartu tgl 16 mei 2019 • Setoran BRI sebesar Rp 3.605.030.000 NTPN 4B0AE53L0DRCLB12 tgl 28/6/219 (KKS BPNT Tidak Dstribusi Prov Kaltim dan NTB) PFM Wilayah III • Surat PPK PFM Wil III kepada Senior VP GVP 1 Bank Mandiri No 1225/4.3/BS/06/2019 tanggal 10 Juni 2019 perihal pengembalian dana BPNT ke kas negara (Kota Kediri dan Kota Madiun) 	0	57.042.828.534,00	1	17.708.800.000,00	0	0	0	0	Belum terdapat penyetoran sebesar Rp17.708.800.000	57,042,828,534.00
12	Sisa Bantuan Sosial PKH atas Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang Tidak Dapat Didistribusikan kepada KPM Sebesar Rp41.602.820.723	1	41.602.820.723,00	BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar memerintahkan: a Subdit VT dan Subdit Kepesertaan pada Dit. JSK supaya melakukan validasi dan pemutakhiran BNBA dengan optimal pada data final closing sebagai dasar menetapkan SK Penerima Bansos dan Data Bayar KPM;	1		<ul style="list-style-type: none"> • Surat Menteri Sosial no 82/MS/C/06/2019 tanggal 21 Juni 2019 kepada Kepala Subdit VT dan Kepala Subdit Kepesertaan perihal Perintah supaya melakukan validasi dan pemutakhiran BNBA dengan optimal pada data final closing sebagai dasar menetapkan SK Penerima Bansos dan Data Bayar KPM 12/31/2019 12:00:00 AM - Tindak lanjut Semester II 2019 • Surat Dirjen Linjamos kepada Direktur Jamsoskel no 1145.L/JS/06/2019 perihal TLHP Keputusan LK Kemensos Tahun 2018 KEP 1.4.2.a tgl 26 Juni 2019 untuk memerintahkan Kepala Subdit VT dan Kepala Subdit Kepesertaan pada Dit. JSK supaya melakukan validasi dan pemutakhiran BNBA dengan optimal pada data final closing sebagai dasar menetapkan SK Penerima Bansos dan Data Bayar KPM 	1	0	0	0	0	TL Semester I 2019 Sesuai dengan rekomendasi			
		1	41.602.820.723,00	BPK merekomendasikan Menteri Sosial agar memerintahkan: b.PPK Bansos Direktorat JSK berkoordinasi dengan Himbara supaya melampirkan jumlah KKS yang tidak dapat didistribusikan dalam Laporan Penyaluran PKH kepada Kemensos di setiap tahap penyaluran serta menyetorkan dana KKS yang tidak dapat didistribusikan dan KKS double PKH-BPNT yang belum dapat dimanfaatkan sebesar Rp41.602.820.723 ke Kas Negara, dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.	1	41.602.820.723,00	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Menteri Sosial no 83/MS/C/06/2019 kepada PPK Bansos Dit JSK perihal Perintah TLHP atas LK Kemensos 2018 (LHP Keputusan 1.4.2.b) Tgl 21/6/19 berkoordinasi dengan Himbara supaya melampirkan jumlah KKS yang tidak dapat didistribusikan dalam Laporan Penyaluran PKH kepada Kemensos di setiap tahap penyaluran serta menyetorkan dana KKS yang tidak dapat didistribusikan dan KKS double PKH-BPNT yang belum dapat dimanfaatkan sebesar Rp41.602.820.723 ke Kas Negara, dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK 12/31/2019 12:00:00 AM - Tindak lanjut Semester II 2019 • Surat Dirjen Linjamos kepada Direktur Jamsoskel no 1145.M/LJS/06/2019 perihal TLHP Keputusan LK Kemensos Tahun 2018 KEP 1.4.2.b tgl 26 Juni 2019 untuk memerintahkan PPK Bansos Direktorat JSK berkoordinasi dengan Himbara supaya melampirkan jumlah KKS yang tidak dapat didistribusikan dalam Laporan Penyaluran PKH kepada Kemensos di setiap tahap penyaluran serta menyetorkan dana KKS yang tidak dapat didistribusikan dan KKS double PKH-BPNT yang belum dapat dimanfaatkan sebesar Rp41.602.820.723 ke Kas Negara, dan menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK • Berita acara kegiatan koordinasi pembahasan KKS tidak terdistribusi LK 2018 antara Jamsoskel dan himbara tanggal 18 Juni 2019 • Surat Direktur Jamsoskel Direktur HLB BNI Nomor 1375/LJS.JSK/PS.04.02/09/2019 tgl 6 September 2019 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan KKS tidak terdistribusi LK 2018 untuk medistribusikan 1761 KKS sebesar Rp3.768.339.634 dan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp8.632.565.128 • Surat Direktur Jamsoskel kepada Direktur HLB BNI Nomor 1605/LJS.JSK/PS.04.02/10/2019 tgl 15 Oktober 2019 perihal setor 	0	16.059.530.432,00	1	25.543.290.291,00	0	0	0	Belum terdapat penyetoran ke kas negara sebesar Rp25.543.290.291	16,059,530,432.00

#KEMENSOS
Hadir

BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN MENTERI SOSIAL



www.kemsos.go.id



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Sembilan Belas berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 113 / P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 - 2024, diadakan Upacara Serah Terima Jabatan antara :

1. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA, yang selanjutnya disebut sebagai :

===== PIHAK PERTAMA =====

2. JULIARI P BATUBARA, yang selanjutnya disebut sebagai :

===== PIHAK KEDUA =====

Dalam Upacara Serah Terima Jabatan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA Jabatan Menteri Sosial Republik Indonesia, dengan segala wewenang, hak, tugas, dan kewajiban yang bertalian dengan jabatan itu.

Hal-hal yang bersangkutan paut dengan kelengkapan Serah Terima Jabatan ini akan diselesaikan dikemudian hari.

Demikian Berita Acara Serah Terima Jabatan ini dibuat, sebagai bukti kebenarannya ditanda tangani oleh kedua pihak di Jakarta

PIHAK KEDUA



JULIARI P BATUBARA

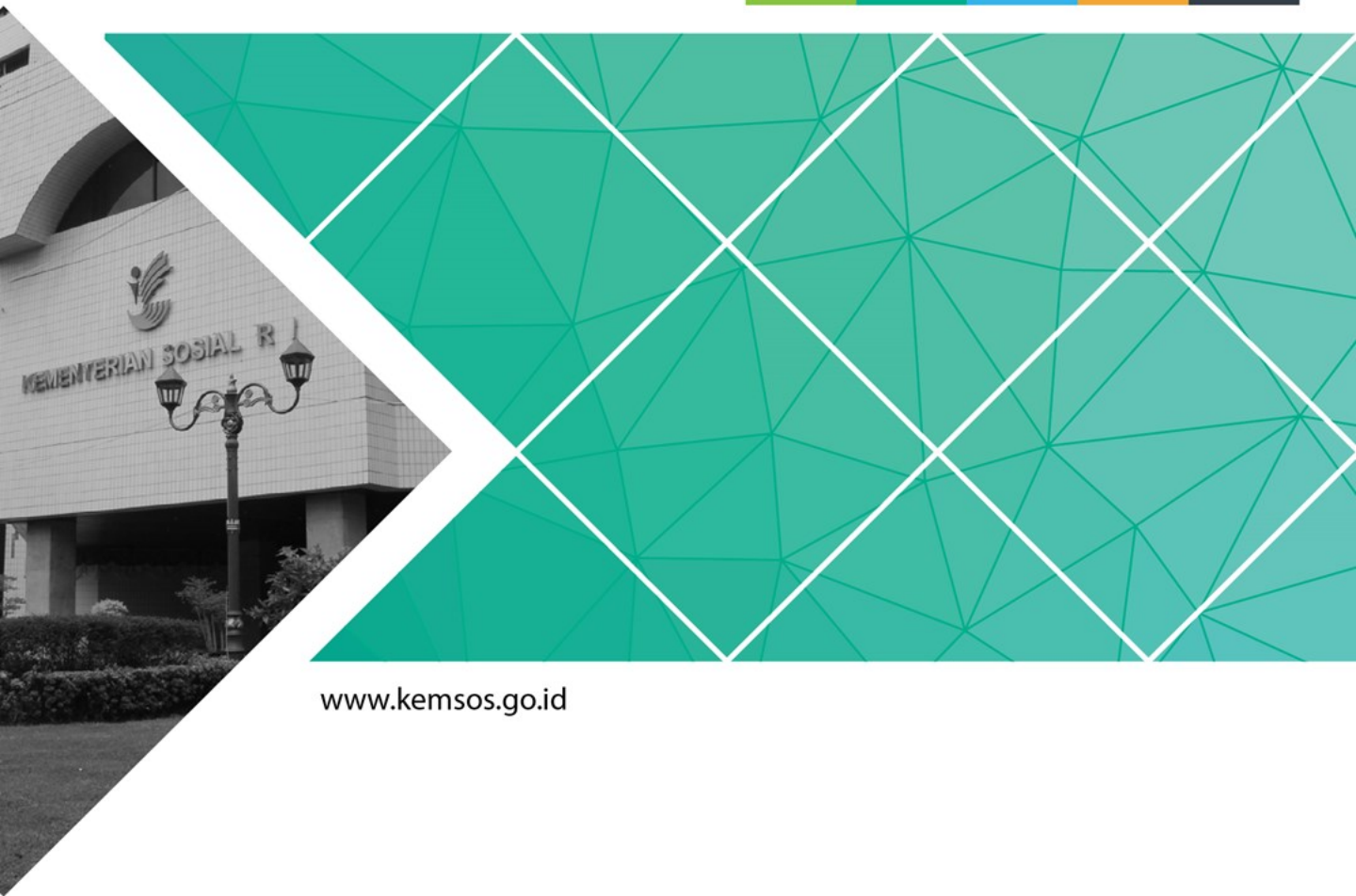
PIHAK PERTAMA



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

#KEMENSOS
Hadir

KEBIJAKAN AKUNTANSI BANTUAN SOSIAL



www.kemsos.go.id



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LT.2
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
Telepon: (021) 3449230 Ext 5311
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 35 /K.1/KSAP/III/2018 21Maret 2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Pengakuan Belanja Bansos Non Tunai
Pada Kementerian Sosial

Yth. Kepala Biro Keuangan
Kementerian Sosial
Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 501/KEU/BS.02/3/2018 tanggal 8 Maret 2018 hal tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Buletin Teknis Nomor 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrual memberikan panduan yaitu:
 - a. Belanja bantuan sosial diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara sebesar pembayaran belanja bantuan sosial yang dikeluarkan dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam tahun anggaran tersebut atau dalam bentuk barang/jasa yang dianggarkan dan dibeli pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja bantuan sosial dimaksud disajikan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar nilai realisasi belanjanya.
 - b. Beban bantuan sosial dapat diakui pada saat bantuan sosial berupa uang/barang/jasa telah diserahkan kepada pihak yang berhak menerima bantuan sosial. Beban bantuan sosial dimaksud disajikan di Laporan Operasional (LO) sebesar nilai bantuan sosial berupa uang/barang/jasa yang telah diserahkan kepada masyarakat penerima bantuan sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial yang telah terealisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a namun sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima oleh pihak yang berhak, belum dapat diakui sebagai beban bantuan sosial di LO. Dengan demikian, dalam laporan keuangan ada kemungkinan nilai belanja bantuan sosial (LRA) tidak sama dengan besarnya nilai beban bantuan sosial (LO), yaitu sebesar belanja bantuan sosial yang belum didistribusikan kepada masyarakat, baik berupa uang maupun barang. Hal ini tergantung dari kontrol dan kepemilikan uang maupun barang dimaksud.
2. Implementasi Buletin Teknis Nomor 19 tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrual terhadap pengakuan beban bantuan sosial dapat berbeda-beda tergantung dengan skema penyaluran bantuan sosial.
3. Dalam skema bantuan sosial berupa uang yang disalurkan dengan mekanisme penyaluran langsung ke masing-masing rekening penerima bantuan sosial yang ada pada lembaga penyalur (perbankan, kantor pos, atau agen layanan keuangan digital), pengakuan beban bantuan sosial tergantung dari status kepemilikan rekening penerima dimaksud.
4. Dalam hal dana bantuan sosial didistribusikan langsung ke rekening penerima bantuan sosial yang berada pada lembaga penyalur, maka beban bantuan sosial diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara.

5. Dalam hal rekening dana bantuan sosial merupakan milik lembaga penyalur atau rekening pemerintah pada lembaga penyalur, maka beban bantuan sosial diakui pada saat dana bantuan sosial tersebut disalurkan kepada penerima bantuan sosial. Penyaluran tersebut dapat dilakukan baik melalui pengambilan langsung tunai pada lembaga penyalur, transfer dana ke rekening milik penerima bantuan sosial, maupun penambahan saldo pada alat bayar elektronik atau uang elektronik yang dipersamakan yang dikuasai oleh penerima bantuan sosial.
6. Selanjutnya, terhadap sisa dana bantuan sosial yang belum tersalurkan sampai dengan tanggal laporan keuangan yang berada di rekening milik lembaga penyalur atau rekening milik pemerintah pada lembaga penyalur serta entitas akuntansi/pelaporan yang mempunyai hak pengendalian atas dana tersebut, sisa tersebut tidak diakui sebagai beban bantuan sosial, namun disajikan sebagai Kas yang Dibatasi Penggunaannya (apabila sisa dana bantuan sosial tersebut akan disalurkan kembali kepada penerima) dan/atau Kas Lainnya (apabila sisa dana bantuan sosial tersebut akan disetorkan ke rekening kas negara).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

JALAN SALEMBA RAYA NOMOR 28 JAKARTA PUSAT 10430

TELEPON 3100406 LAMAN : <http://www.kemsos.go.id>

Nomor : 501/KEU/BS.02/3/2018

8 Maret 2018

Lampiran : -

Hal : Pengakuan Belanja Bansos Non Tunai pada Kementerian Sosial

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah
Kementerian Keuangan RI
di – Jakarta

Menindaklanjuti hasil rapat dengan Tim Auditor Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 6 Maret 2018 tentang pengakuan Belanja Bantuan Sosial Non Tunai pada Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2017 di Kementerian Sosial. Bersama ini kami sampaikan proses bisnis terkait Bantuan Sosial PKH dan BPNT sebagai berikut :

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan Sosial PKH merupakan salah satu Bantuan Sosial berupa uang yang diberikan kepada keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial berdasarkan penetapan Kemensos selaku Pemberi Bantuan Sosial dalam bentuk tabungan yang dapat diambil kapanpun sesuai kebutuhan penerima bantuan setelah tahapan penyaluran dan Bantuan Sosial tersebut dapat ditabung.

Mekanisme penyaluran untuk bantuan PKH secara non tunai disalurkan melalui Bank Umum Milik Negara, atau Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).

Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial PKH :

- a. Melakukan pemindahbukuan Dana Bantuan Sosial ke rekening Kemensos di bank penyalur :
 - 1) Kemensos memberikan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum Negara sebagai dasar untuk pencairan dana Bantuan Sosial.
 - 2) Bendahara Umum Negara melakukan pencairan dana dari rekening kas umum Negara kepada rekening Kemensos di Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kemensos sebagai pemberi Bantuan Sosial.

Pengembalian Sisa Dana Bantuan Sosial

Pengembalian sisa dana bantuan sosial yang terdapat di lembaga bayar ke kas Negara dikarenakan :

- a. Tidak memenuhi syarat kepesertaan PKH
- b. Tidak optimalnya penyaluran bantuan sosial yang disebabkan oleh kondisi *force majeure*
- c. Bagi peserta baru tidak yang tidak mengambil KKS mengacu pada PMK 228/PMK.05/2016

Pengembalian sisa dana tersebut berdasarkan surat perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga ke lembaga bayar. Jangka waktu pengembalian paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya surat penyeteroran dari PPK.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di E-Warong yang bekerja sama dengan bank.

Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan program transformasi Program Subsidi Rastra. Diberikan dalam bentuk uang Rp110.00,- per bulan. Bahan pangan yang disediakan berupa beras (kualitas medium) dan telur. Tahun 2017 diujicobakan pada 44 kota.

Sasaran penerima BPNT :

- a. Penerima Program Subsidi Rastra
- b. Penerima Program PKH

Tanggung jawab

- a. Kementerian Sosial

Menyalurkan dana BPNT kepada Bank Penyalur melalui KPPN dan memonitor dana sampai pada KPM melalui Dinas Sosial Provinsi/Kota.

- b. Himbara

Mencetak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), menyalurkan dana BPNT pada e-wallet dan mendistribusikan KKS serta melaporkan realisasi pembelanjaan di e-warong.

- b. Menyalurkan dana bantuan PKH ke rekening KPM, bank penyalur mengkreditkan dana PKH dari rekening Pemberi Bantuan di Bank Penyalur ke rekening uang elektronik (*e-wallet*) KPM. Selanjutnya dilakukan pemindahbukuan ke rekening tabungan.
- c. Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial paling lama 30 (tiga puluh hari) kalender sejak dana bansos ditransfer dari rekening pemberi bantuan ke rekening penerima bantuan. Dalam hal lembaga bayar tidak dapat menyalurkan sampai dengan batas waktu, maka satu minggu sebelum batas waktu dapat mengajukan perpanjangan waktu sampai dengan 15 (lima belas) hari kalender. Pengajuan disampaikan kepada lembaga bayar melalui surat resmi ke penerima bantuan.

Skema Alur Penyaluran Bantuan Sosial :

A. Koordinasi Pelaksanaan	B. Pembukaan Rekening KPM	C. Sosialisasi dan Edukasi	D. Penyaluran Bantuan	E. Distribusi KKS dan Penarikan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan data 2. Sosialisasi dan Edukasi 3. Penandatanganan PKS 4. Bimbingan Teknis 5. BA Serah terima data KPM 6. Mapping Data KPM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan rekening secara kolektif (<i>Bulk Account Opening</i>) 2. Cetak (perso) kartu 3. Produksi PIN <i>Mailer</i> 4. Distribusi KKS, Buku Tabungan dan PIN <i>Mailer</i> dari KP ke KC 5. Laporan hasil proses <i>Bulk Account Opening</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Bansos Non Tunai PKH kepada agen dan KPM 2. Penandatanganan Aplikasi Pembukaan Rekening 3. Laporan hasil penerimaan aplikasi pembukaan rekening 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemindahbukuan dana dari Kas Negara ke Rekening Pemberi Bantuan 2. Menyalurkan dan bantuan PKH ke rekening KPM 3. laporan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi KKS, Buku Tabungan dan PIN <i>Mailer</i> dari KC kepada KPM 2. <i>Full</i> aktivasi 3. Penarikan dana bantuan

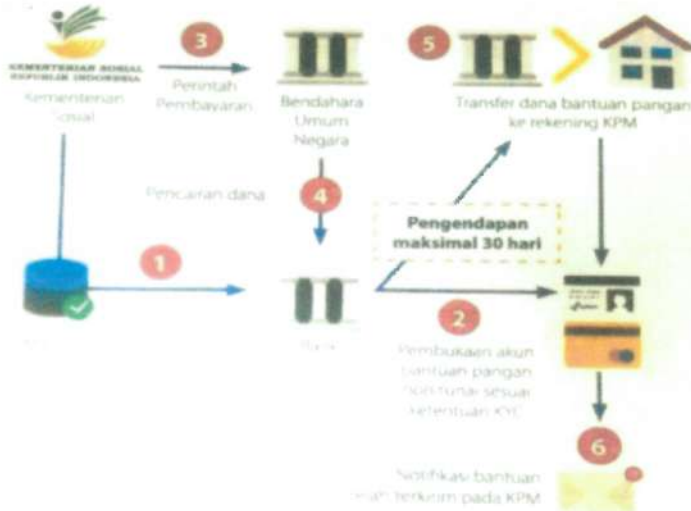
c. Dinas Sosial Kota

Bersama-sama dengan Cabang Bank Himbara mendistribusikan KKS, melaporkan KKS yang bermasalah, melaporkan penggantian KPM untuk ditetapkan melalui SK Kementerian Sosial dan melaporkan KPM yang belanja bahan pangan di e-warong.

Mekanisme penyaluran :

- a. Pembukaan rekening oleh Himbara
- b. Cetak KKS oleh Himbara
- c. Pendistribusian KKS oleh Himbara dengan Dinas Sosial
- d. Proses pencairan dana BPNT oleh Direktorat PFM Perkotaan ke KPPN
- e. Perintah pemindahbukuan dari rekening penyalur ke e-wallet KPM oleh Direktorat PFM Perkotaan.
- f. Setting e-wallet/pemindahbukuan KPM oleh Himbara.
- g. Pemberitahuan kepada Dinas Sosial bahwa dana BPNT sudah masuk e-wallet dan segera dibelanjakan bahan pangan oleh Direktorat PFM Perkotaan.
- h. Pembelanjaan di e-warong.
- i. Laporan Himbara dan Dinas Sosial tentang kendala pendistribusian KKS.
- j. Laporan Himbara dan laporan Dinas Sosial tentang realisasi pembelanjaan e-warong.

SKEMA PENYALURAN BPNT



Sesuai dengan proses bisnis dimaksud, bersama ini kami mohon untuk dapat diberikan penjelasan mengenai penyaluran Bansos Non Tunai untuk program di lingkungan Kementerian Sosial sebagai berikut :

1. Pengakuan beban Bansos apakah ketika dana Bansos masih dalam rekening e-wallet;
2. Pengakuan beban Bansos apakah ketika dana Bansos sudah dalam rekening penerima (KPM);
3. Pengakuan beban Bansos apakah setelah dilakukan aktivasi kartu oleh penerima (KPM);
4. Pengakuan beban Bansos apakah setelah dimanfaatkan oleh penerima.

Berdasarkan pertanyaan kami di atas, kami mohon agar Saudara dapat memberikan penjelasan terkait pengakuan Belanja Bansos tersebut yang akan kami gunakan dalam membuat kebijakan dan menjawab pertanyaan dari Tim BPK.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.


Kepala Biro Keuangan
R. Amin Raharjo

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial
2. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial
3. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial
4. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial
5. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial.

#KEMENSOS
Hadir

JURNAL TAKE OUT REVALUASI SEMESTER I TA 2019



www.kemsos.go.id



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA
TELEPON. (021) 3449230 EXT 5200, 5201 FAKSIMILE (021) 3457490
WEBSITE. www.djpbk.kemenkeu.go.id

Nomor : S- **892**/PB/2019 26 Juli 2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Petunjuk Teknis Koreksi Pencatatan Hasil Penilaian Kembali
Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan
Keuangan Semester I Tahun 2019

Yth. Para Kepala Biro Keuangan/Umum/Kapusku/Direktur/Deputi
Kementerian Negara/Lembaga (Daftar Terlampir)
Jakarta

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019, serta sehubungan dengan surat kami nomor S-625/PB/2019 tanggal 26 Juni 2019 hal Pedoman Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka menjaga kualitas laporan keuangan, Pemerintah telah memutuskan untuk tidak menyajikan hasil penilaian kembali (revaluasi) BMN tahun 2017-2018 dalam LKKL dan LKPP tahun 2018. Hasil penilaian kembali BMN akan disajikan setelah dilakukan perbaikan dan hasilnya dapat diterima oleh BPK.
2. Hingga saat ini, upaya perbaikan atas hasil penilaian kembali BMN masih terus dilakukan, sehingga hasil penilaian kembali BMN belum dapat disajikan dalam LKKL dan LKPP semester I tahun 2019.
3. Menindaklanjuti hal sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dalam rangka penyusunan LKKL dan LKPP tahun 2019:
 - a. K/L tidak perlu melakukan jurnal balik terhadap jurnal koreksi penilaian kembali BMN (jurnal *take out*) yang telah dilakukan pada Satker Konsolidasi dalam LKKL tahun 2018.
 - b. K/L agar melakukan jurnal koreksi (jurnal *take out*) atas transaksi-transaksi lanjutan yang terjadi terhadap BMN yang merupakan objek revaluasi tahun 2017-2018, yang terjadi selama semester I tahun 2019.

4. Koreksi...

4. Koreksi atas transaksi lanjutan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b dilakukan pada LKKL semester I tahun 2019 melalui penjurnalan pada Satker Konsolidasi, sesuai dengan petunjuk teknis yang dituangkan dalam Lampiran II surat ini.
5. Laporan keuangan tingkat UAKPA, UAPPA-W, dan UAPPA-E1, serta laporan barang tingkat UAKPB, UAPPB-W, UAPPB-E1, dan UAPB semester I tahun 2019 masih menyajikan angka hasil revaluasi BMN dimaksud.
6. Penjelasan atas perbedaan data BMN pada LKKL dan Laporan Barang Pengguna (LBP) agar diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN). Adapun ilustrasi pengungkapan informasi terkait selisih nilai tersebut adalah sebagaimana dituangkan dalam Lampiran III surat ini

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



R. Wiwin Istanti R. D

Tembusan:

1. Wakil Menteri Keuangan
2. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum/Deputi Kementerian Negara/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di seluruh K/L
3. Para Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala SPI/Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Negara/Lembaga di seluruh K/L
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
6. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
7. Direktur Barang Milik Negara – Ditjen Kekayaan Negara
8. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
9. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
10. Para Kepala KPPN

LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-892/PB/2019

Tanggal : 26 Juli 2019

Yth.

No.	Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga:
1	Kepala Biro Keuangan Setjen Majelis Permusyawaratan Rakyat
2	Kepala Biro Keuangan Setjen Dewan Perwakilan Rakyat
3	Kepala Biro Keuangan Setjen Badan Pemeriksa Keuangan
4	Kepala Biro Keuangan Setjen Mahkamah Agung
5	Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung
6	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
7	Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Setjen Kementerian Dalam Negeri
8	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Luar Negeri
9	Kepala Pusat Pelaporan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan Kementerian Pertahanan
10	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kementerian Keuangan
12	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Pertanian
13	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Perindustrian
14	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
15	Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Perhubungan
16	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
17	Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Kesehatan
18	Kepala Biro Keuangan dan BMN Setjen Kementerian Agama
19	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Ketenagakerjaan
20	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Sosial
21	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan
23	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
25	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
26	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
27	Kepala Biro Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
28	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Pariwisata
29	Kepala Biro Umum dan Humas Kementerian Badan Usaha Milik Negara

R

No.	Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga:
30	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
31	Kepala Biro Keuangan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
32	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
33	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
34	Kepala Biro SDM dan Umum Sekretariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
35	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Intelijen Negara
36	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Lembaga Sandi Negara
37	Kepala Biro Keuangan Setjen Dewan Ketahanan Nasional
38	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik
39	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
40	Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang
41	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Perpustakaan Nasional
42	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Komunikasi dan Informatika
43	Kepala Pusat Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia
44	Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
45	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga Ketahanan Nasional
46	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
47	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional
48	Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
49	Kepala Biro Keuangan dan Pengolahan BMN Sekretariat Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
50	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
51	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
52	Kepala Biro Keuangan Setjen Komisi Pemilihan Umum
53	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Mahkamah Konstitusi
54	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
55	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
56	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
57	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
58	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
59	Kepala Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial
60	Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan TU Sekretariat Utama Badan Standardisasi Nasional

No.	Kepala Biro Keuangan/Umum Kementerian Negara/Lembaga:
61	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
62	Kepala Biro Umum Lembaga Administrasi Negara
63	Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Arsip Nasional Republik Indonesia
64	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Kepegawaian Negara
65	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
66	Kepala Biro Keuangan Setjen Kementerian Perdagangan
67	Kepala Biro Keuangan Badan Ekonomi Kreatif
68	Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga
69	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
70	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
71	Kepala Biro Umum Komisi Yudisial
72	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
73	Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
74	Kepala Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
75	Kepala Biro Umum Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
76	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
77	Kepala Biro Keuangan Umum Sekretariat Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
78	Kepala Biro Umum Setjen Ombudsman RI
79	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan
80	Kepala Biro Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
81	Kepala Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
82	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kabinet
83	Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
84	Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
85	Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
86	Deputi Komersil Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PB Sabang

h

3. Apabila terdapat transaksi lanjutan berupa **penghapusan BMN**, maka Satker Konsolidasi melakukan jurnal koreksi untuk menyesuaikan nilai transaksi penghapusan beserta penyusutan transaksionalnya sebagai berikut:

- a. Dalam hal hasil revaluasi BMN menambah nilai aset tetap, maka koreksi pencatatan hasil revaluasi akan berdampak pada penurunan nilai BMN. Dengan demikian, nilai transaksi penghapusan BMN beserta penyusutan transaksionalnya perlu dilakukan pengurangan.

D	Aset Tetap/Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	xxx
K	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xxx
Jurnal koreksi untuk mengurangi nilai transaksi penghapusan BMN yang terjadi setelah transaksi revaluasi.		

D	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xxx
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	xxx
Jurnal koreksi untuk mengurangi nilai penghapusan BMN yang terjadi setelah transaksi revaluasi.		

- b. Dalam hal hasil revaluasi BMN menurunkan nilai aset tetap, maka koreksi pencatatan hasil revaluasi akan berdampak pada kenaikan nilai BMN. Dengan demikian, nilai transaksi penghapusan BMN beserta penyusutan transaksionalnya perlu dilakukan penambahan.

D	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xxx
K	Aset tetap/Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	xxx
Jurnal koreksi untuk menambah nilai transaksi penghapusan BMN yang terjadi setelah transaksi revaluasi.		

D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	xxx
K	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xxx
Jurnal koreksi untuk menambah nilai transaksi penghapusan BMN yang terjadi setelah transaksi revaluasi.		

4. Apabila terdapat transaksi lanjutan berupa **transfer keluar BMN**, maka Satker Konsolidasi melakukan jurnal koreksi untuk menyesuaikan nilai transaksi transfer keuar beserta penyusutan transaksionalnya sebagai berikut:

- a. Dalam hal hasil revaluasi BMN menambah nilai aset tetap, maka koreksi pencatatan hasil revaluasi akan berdampak pada penurunan nilai BMN. Dengan demikian, nilai transaksi transfer keluar BMN beserta penyusutan transaksionalnya perlu dilakukan pengurangan.

D	Aset Tetap	xxx
K	Transfer Keluar	xxx
Jurnal koreksi untuk mengurangi nilai transaksi transfer keluar yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

D	Transfer Keluar	xxx
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx

R

Jurnal koreksi untuk mengurangi nilai transaksi transfer keluar yang terjadi setelah revaluasi BMN.

- a. Dalam hal hasil revaluasi BMN menurunkan nilai aset tetap, maka koreksi pencatatan hasil revaluasi akan berdampak pada kenaikan nilai BMN. Dengan demikian, nilai transaksi transfer keluar BMN beserta penyusutan transaksionalnya perlu dilakukan penambahan.

D	Transfer Keluar	xxx
K	Aset Tetap	xxx
Jurnal koreksi untuk menambah nilai transaksi transfer keluar yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
K	Transfer Keluar	xxx
Jurnal koreksi untuk menambah nilai transaksi transfer keluar yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

5. Apabila terdapat transaksi lanjutan berupa **transfer masuk BMN**, maka Satker Konsolidasi melakukan jurnal koreksi untuk menyesuaikan nilai transaksi transfer masuk beserta akumulasi penyusutannya sebagai berikut:

- a. Dalam hal hasil revaluasi BMN menambah nilai aset tetap, maka koreksi pencatatan hasil revaluasi akan berdampak pada penurunan nilai BMN. Dengan demikian, nilai transaksi transfer masuk BMN beserta penyusutan transaksionalnya perlu dilakukan pengurangan.

D	Transfer Masuk	xxx
K	Aset Tetap	xxx
Jurnal koreksi untuk mengurangi nilai transfer masuk yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
K	Transfer Masuk	xxx
Jurnal koreksi untuk mengurangi nilai transfer masuk yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

- b. Dalam hal hasil revaluasi BMN mengurangi nilai aset tetap, maka koreksi pencatatan hasil revaluasi akan berdampak pada kenaikan nilai BMN. Dengan demikian, nilai transaksi transfer masuk BMN beserta penyusutan transaksionalnya perlu dilakukan penambahan.

D	Aset Tetap	xxx
K	Transfer Masuk	xxx
Jurnal koreksi untuk menambah nilai transfer masuk yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

D	Transfer Masuk	xxx
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
Jurnal koreksi untuk menambah nilai transfer masuk yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

R

6. Apabila terdapat transaksi lanjutan berupa **reklasifikasi keluar BMN**, maka Satker Konsolidasi melakukan jurnal koreksi untuk menyesuaikan nilai transaksi reklasifikasi keluar BMN beserta penyusutan transaksionalnya sebagai berikut:

- a. Dalam hal hasil revaluasi BMN menambah nilai aset tetap, maka koreksi pencatatan hasil revaluasi akan berdampak pada penurunan nilai BMN. Dengan demikian, nilai transaksi reklasifikasi keluar BMN beserta penyusutan transaksionalnya perlu dilakukan pengurangan.

D	Aset Tetap	xxx
K	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	Xxx
Jurnal koreksi untuk mengurangi nilai transaksi direklasifikasi keluar yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

D	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
Jurnal koreksi untuk mengurangi nilai transaksi direklasifikasi keluar yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

D	Beban Penyusutan Aset Tetap	xxx
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
Jurnal koreksi untuk mengurangi nilai transaksi direklasifikasi keluar yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

- b. Dalam hal hasil revaluasi BMN menurunkan nilai aset tetap, maka koreksi pencatatan hasil revaluasi akan berdampak pada kenaikan nilai BMN. Dengan demikian, nilai transaksi reklasifikasi keluar BMN beserta penyusutan transaksionalnya perlu dilakukan penambahan.

D	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx
K	Aset Tetap	xxx
Jurnal koreksi untuk menambah nilai transaksi reklasifikasi keluar yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
K	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx
Jurnal koreksi untuk menambah nilai transaksi reklasifikasi keluar yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
K	Beban Penyusutan Aset Tetap	xxx
Jurnal koreksi untuk menambah nilai transaksi reklasifikasi keluar yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

7. Apabila terdapat transaksi lanjutan berupa **reklasifikasi masuk BMN**, maka Satker Konsolidasi melakukan jurnal koreksi untuk menyesuaikan nilai transaksi reklasifikasi masuk beserta penyusutan transaksionalnya sebagai berikut:

R

- a. Dalam hal hasil revaluasi BMN menambah nilai aset tetap, maka koreksi pencatatan hasil revaluasi akan berdampak pada penurunan nilai BMN. Dengan demikian, nilai transaksi reklasifikasi masuk BMN beserta penyusutan transaksionalnya perlu dilakukan pengurangan.

D	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx
K	Aset Tetap	xxx
Jurnal koreksi untuk mengurangi nilai reklasifikasi masuk yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
K	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx
Jurnal koreksi untuk mengurangi nilai reklasifikasi masuk yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
K	Beban Penyusutan Aset Tetap	xxx
Jurnal koreksi untuk mengurangi nilai reklasifikasi masuk yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

- b. Dalam hal hasil revaluasi BMN menurunkan nilai aset tetap, maka koreksi pencatatan hasil revaluasi akan berdampak pada kenaikan nilai BMN. Dengan demikian, nilai transaksi reklasifikasi masuk BMN beserta penyusutan transaksionalnya perlu dilakukan penambahan.

D	Aset Tetap	xxx
K	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx
Jurnal koreksi untuk menambah nilai reklasifikasi masuk yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

D	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	xxx
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
Jurnal koreksi untuk menambah nilai reklasifikasi masuk yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

D	Beban Penyusutan Aset Tetap	xxx
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
Jurnal koreksi untuk menambah nilai reklasifikasi masuk yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

8. Apabila terdapat transaksi lanjutan berupa **hibah keluar BMN**, maka Satker Konsolidasi melakukan jurnal koreksi untuk menyesuaikan nilai transaksi hibah keluar beserta penyusutan transaksionalnya sebagai berikut:

- a. Dalam hal hasil revaluasi BMN menambah nilai aset tetap, maka koreksi pencatatan hasil revaluasi akan berdampak pada penurunan nilai BMN. Dengan demikian, nilai transaksi hibah keluar BMN beserta penyusutan transaksionalnya perlu dilakukan pengurangan.

A

D	Aset Tetap	xxx
K	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xxx
Jurnal koreksi untuk mengurangi nilai transaksi hibah keluar yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

D	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xxx
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
Jurnal koreksi untuk mengurangi nilai transaksi hibah keluar yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

- b. Dalam hal hasil revaluasi BMN menurunkan nilai aset tetap, maka koreksi pencatatan hasil revaluasi akan berdampak pada kenaikan nilai BMN. Dengan demikian, nilai transaksi hibah keluar BMN beserta penyusutan transaksionalnya perlu dilakukan penambahan.

D	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xxx
K	Aset Tetap	xxx
Jurnal koreksi untuk menambah nilai hibah keluar yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
K	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xxx
Jurnal koreksi untuk menambah nilai hibah keluar yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

9. Apabila terdapat transaksi lanjutan berupa **normalisasi BMN**, maka Satker Konsolidasi melakukan jurnal koreksi untuk menyesuaikan nilai transaksi normalisasi beserta penyusutan transaksionalnya sebagai berikut:

- a. Dalam hal hasil revaluasi BMN menambah nilai aset tetap, maka koreksi pencatatan hasil revaluasi akan berdampak pada penurunan nilai BMN. Dengan demikian, nilai transaksi normalisasi BMN beserta penyusutan transaksionalnya perlu dilakukan pengurangan.

D	Aset Tetap	xxx
K	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	xxx
Jurnal koreksi untuk mengurangi nilai transaksi normalisasi BMN yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

D	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	xxx
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Non Revaluasi	xxx
Jurnal koreksi untuk mengurangi nilai transaksi normalisasi BMN yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

- b. Dalam hal hasil revaluasi BMN menurunkan nilai aset tetap, maka koreksi pencatatan hasil revaluasi akan berdampak pada kenaikan nilai BMN. Dengan demikian, nilai transaksi normalisasi BMN beserta penyusutan transaksionalnya perlu dilakukan penambahan.

D	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	xxx
K	Aset Tetap	xxx
Jurnal koreksi untuk menambah nilai transaksi normalisasi BMN yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

R

D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Non Revaluasi	xxx
K	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	xxx
Jurnal koreksi untuk menambah nilai transaksi normalisasi BMN yang terjadi setelah revaluasi BMN.		

E. Ketentuan Lain-lain

1. Setiap jurnal koreksi yang dimaksud dalam surat ini agar dilengkapi dengan Memo Penyesuaian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, disertai dokumen pendukung terkait.
2. Setelah melakukan perekaman seluruh jurnal koreksi pada Aplikasi SAIBA, Satker Konsolidasi mengunggah ADK SAIBA ke Aplikasi e-Rekon&LK dengan memperhatikan batas waktu penyampaian laporan keuangan semester I tahun 2019. Dalam hal diperlukan, K/L dapat mengajukan surat permintaan *open period* untuk pengunggahan ADK SAIBA ke Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan. Untuk K/L pengguna Aplikasi SAKTI, setelah dilakukan perekaman seluruh jurnal koreksi perlu dilakukan *push* data ulang ke Aplikasi e-Rekon&LK dengan memperhatikan batas waktu penyampaian laporan keuangan semester I tahun 2019.
3. Dalam rangka telaah laporan keuangan semester I tahun 2019, K/L agar memastikan bahwa Pos Selisih Nilai Revaluasi Aset Tetap pada LPE bersaldo nihil. Dalam hal saldo Pos Selisih Nilai Revaluasi Aset Tetap pada LPE tidak bersaldo nihil, K/L agar melakukan pengecekan kembali untuk memastikan tidak terdapat kesalahan jurnal koreksi.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada masing-masing K/L agar melakukan verifikasi dan/atau reuview atas pelaksanaan pencatatan koreksi nilai transaksi lanjutan yang dilakukan oleh Satker Konsolidasi.
5. Selisih nilai antara LKKL dengan LBP agar diungkapkan secara memadai dalam CaLBMN dan CaLK. Adapun ilustrasi pengungkapan informasi terkait selisih nilai akibat koreksi revaluasi BMN dalam CaLK adalah sebagaimana tertuang dalam Lampiran III surat ini.
6. Sesuai Surat kami nomor S-625/PB/2019 tanggal 26 Juni 2019 hal Pedoman Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019, batas waktu penyampaian LKKL semester I tahun 2019 kepada Menteri Keuangan adalah tanggal 31 Juli 2019 pada jam kerja.

R

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-892/PB/2019

Tanggal : 26 Juli 2019

Petunjuk Teknis Koreksi Pencatatan Hasil Penilaian Kembali (Revaluasi) BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019

A. Kebijakan Umum terkait Koreksi Pencatatan Hasil Revaluasi BMN

1. Koreksi pencatatan hasil revaluasi BMN (koreksi pencatatan) dilakukan pada laporan keuangan level K/L, sedangkan untuk laporan keuangan level satker, wilayah, eselon I, serta laporan barang level satker sampai dengan level konsolidasian seluruh K/L (Laporan Barang Milik Negara/LBMN) tidak perlu dilakukan koreksi.
2. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, objek revaluasi terdiri dari BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015, dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Aset tetap berupa: tanah; gedung dan bangunan; serta jalan, irigasi, dan jaringan (jalan, jembatan, dan bangunan air) pada K/L.
 - b. Aset lainnya berupa aset tetap pada K/L yang sedang dilaksanakan pemanfaatan.
3. Koreksi pencatatan dilakukan terhadap:
 - a. Akun-akun yang timbul dari perekaman transaksi revaluasi (Koreksi Penilaian Kembali dan Koreksi Kesalahan Input IP dengan kode transaksi 205, 224, dan 225), misalnya akun Aset Tetap/Aset Kemitraan yang merupakan objek revaluasi BMN dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Kemitraan di Neraca, Beban Penyusutan Aset Tetap/Aset Kemitraan di Laporan Operasional (LO), Revaluasi Aset Tetap di Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta akun-akun lain yang terdampak sesuai dengan transaksi BMN yang terjadi setelah transaksi revaluasi.
 - b. Akun-akun yang timbul dari perekaman transaksi barang berlebih (kode transaksi 120 dan 130), misalnya akun Aset Tetap yang merupakan objek revaluasi BMN dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap di Neraca, Beban Penyusutan Aset Tetap di Laporan Operasional (LO), Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi di Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta akun-akun lain yang terdampak sesuai dengan transaksi BMN yang terjadi setelah transaksi barang berlebih.
4. Dalam penyusunan LKKL dan LKPP tahun 2018, telah dilakukan koreksi pencatatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a dan huruf b. Mengingat bahwa hingga saat ini hasil penilaian kembali BMN belum dapat disajikan dalam laporan keuangan, maka dalam rangka penyusunan LKKL dan LKPP semester I tahun 2019, koreksi dimaksud tidak perlu dilakukan jurnal balik.
5. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan bahwa laporan keuangan level satker, wilayah, eselon I, serta laporan barang level satker sampai dengan level konsolidasian seluruh K/L (Laporan Barang Milik Negara/LBMN) masih mengandung saldo terkait revaluasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dipandang perlu untuk melakukan koreksi pencatatan atas transaksi-transaksi lanjutan yang terjadi atas BMN yang merupakan objek revaluasi tahun 2017-2018, di mana transaksi-transaksi lanjutan tersebut terjadi selama semester I tahun 2019.

LAMPIRAN III

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- /PB/2019

Tanggal : Juli 2019

Ilustrasi Pengungkapan Koreksi Nilai Hasil Revaluasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, telah dilakukan Revaluasi terhadap BMN yang merupakan objek revaluasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih nilai revaluasi atas BMN berupa Tanah yang telah dilaksanakan pada tahun 2017-2018 sebesar Rpxxx.

Saldo BMN berupa Tanah pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo Tanah dengan memperhitungkan nilai hasil revaluasi (saldo pada laporan barang)	Saldo Tanah tanpa memperhitungkan nilai hasil revaluasi (saldo pada laporan keuangan)
xxx	yyy

2. Selisih nilai revaluasi atas BMN berupa Gedung dan Bangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017-2018 sebesar Rpxxx.

Saldo BMN berupa Gedung dan Bangunan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

	Saldo Gedung dan Bangunan dengan memperhitungkan nilai hasil revaluasi (saldo pada laporan barang)	Saldo Gedung dan Bangunan tanpa memperhitungkan nilai hasil revaluasi (saldo pada laporan keuangan)
Gedung dan Bangunan	xxx	yyy
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	aaa	bbb

3. Selisih nilai revaluasi atas BMN berupa Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2017-2018 sebesar Rpxxx.

Saldo BMN berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

	Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan memperhitungkan nilai hasil revaluasi (saldo pada laporan barang)	Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan tanpa memperhitungkan nilai hasil revaluasi (saldo pada laporan keuangan)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	yyy
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	aaa	bbb

Hasil revaluasi beserta dampaknya akan disajikan dalam Laporan Keuangan setelah dilakukan perbaikan dan hasilnya dapat diterima oleh BPK.

f

6. Sebagaimana koreksi pencatatan pada laporan keuangan tahun 2018, koreksi pencatatan atas transaksi lanjutan selama semester I tahun 2019 dilakukan oleh Satker Konsolidasi pada masing-masing K/L melalui Aplikasi SAIBA atau Modul GL SAKTI, berdasarkan data yang disediakan oleh Kementerian Keuangan.
7. Data koreksi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan mencakup daftar jurnal per K/L, yang dapat diunduh dari tautan bit.ly/to_smt1_19. Data detail per satker akan disampaikan lebih lanjut kepada masing-masing K/L.
8. Petunjuk penggunaan dan kodifikasi Satker Konsolidasi agar berpedoman pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2228/PB/2017 tanggal 28 Februari 2017 hal Pembentukan Satker Konsolidasi.

B. Sumber Data Koreksi

1. Data koreksi atas transaksi lanjutan yang terjadi selama semester I tahun 2019 yang disediakan oleh Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 6 diperoleh dari Aplikasi e-Rekon&LK, berdasarkan data SIMAK BMN dan SAIBA yang telah diunggah oleh seluruh satker sampai dengan tanggal 18 Juli 2019.
2. Khusus untuk Kementerian Keuangan serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, data koreksi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan diperoleh berdasarkan data Aplikasi e-Rekon&LK yang telah di-push dari Aplikasi SAKTI per tanggal 18 Juli 2019.

C. Koreksi atas Nilai Penyusutan Reguler Semester I Tahun 2019

Berdasarkan data koreksi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan, Satker Konsolidasi agar melakukan koreksi atas nilai penyusutan aset tetap/aset lainnya yang terdampak (penyusutan reguler semester I tahun 2019), dengan jurnal koreksi sebagai berikut:

D	Beban Penyusutan Aset Tetap/Aset Kemitraan	xxx
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Kemitraan	xxx
Jurnal koreksi untuk menaikkan kembali nilai akumulasi penyusutan reguler aset tetap/aset kemitraan semester I tahun 2019, akibat adanya koreksi transaksi revaluasi dan barang berlebih.		

D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Kemitraan	xxx
K	Beban Penyusutan Aset Tetap/Aset Kemitraan	xxx
Jurnal koreksi untuk mengurangi kembali nilai akumulasi penyusutan reguler aset tetap/aset kemitraan semester I tahun 2019, akibat adanya koreksi transaksi revaluasi dan barang berlebih.		

D. Koreksi atas Nilai Hasil Pencatatan Transaksi-transaksi Lanjutan yang Terjadi Selama Semester I Tahun 2019

Selain koreksi atas penyusutan reguler semester I tahun 2019, Satker Konsolidasi juga melakukan koreksi atas nilai transaksi-transaksi lanjutan BMN yang terjadi selama semester I tahun 2019. Koreksi ini dimungkinkan berbeda antara 1 K/L dengan K/L yang lain, tergantung pada transaksi lanjutan yang terjadi pada K/L masing-masing.

Beberapa ilustrasi variasi jurnal koreksi nilai terkait transaksi lanjutan BMN yang mungkin terjadi selama semester I tahun 2019 antara lain:

1. Apabila terdapat transaksi lanjutan berupa **koreksi nilai** (baik koreksi penambahan maupun pengurangan nilai), maka Satker Konsolidasi melakukan jurnal koreksi untuk

R

penyusutan transaksionalnya, sedangkan nilai aset telah otomatis terkoreksi dengan adanya koreksi nilai revaluasi.

- a. Dalam hal hasil revaluasi BMN menambah nilai aset, maka koreksi pencatatan nilai revaluasi akan berdampak pada penurunan nilai aset. Dengan demikian, nilai penyusutan transaksional yang terbentuk pada saat transaksi koreksi nilai juga perlu dikurangi.

D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Kemitraan	xxx
K	Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi	xxx

- b. Dalam hal hasil revaluasi BMN menurunkan nilai aset, maka koreksi pencatatan nilai revaluasi akan berdampak pada kenaikan nilai aset. Dengan demikian, nilai penyusutan transaksional yang terbentuk pada saat transaksi koreksi nilai juga perlu ditambah.

D	Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi	xxx
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Aset Kemitraan	xxx

2. Apabila terdapat transaksi lanjutan berupa **penghentian BMN**, maka Satker Konsolidasi melakukan jurnal koreksi untuk menyesuaikan nilai transaksi penghentian beserta penyusutan transaksionalnya sebagai berikut:

- a. Dalam hal hasil revaluasi BMN menambah nilai aset tetap, maka koreksi pencatatan hasil revaluasi akan berdampak pada penurunan nilai BMN. Dengan demikian, nilai transaksi penghentian BMN beserta penyusutan transaksionalnya perlu dilakukan pengurangan.

D	Aset Tetap	xxx
K	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	xxx
Jurnal koreksi untuk mengurangi nilai transaksi penghentian BMN setelah transaksi revaluasi.		

D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	xxx
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
Jurnal koreksi untuk mengurangi nilai transaksi penghentian BMN setelah transaksi revaluasi.		

- b. Dalam hal hasil revaluasi BMN menurunkan nilai aset tetap, maka koreksi pencatatan hasil revaluasi akan berdampak pada kenaikan nilai BMN. Dengan demikian, nilai BMN yang dilakukan penghentian beserta penyusutan transaksionalnya perlu dilakukan penambahan.

D	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	xxx
K	Aset Tetap	xxx
Jurnal koreksi untuk menambah nilai transaksi penghentian setelah transaksi revaluasi.		

D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	xxx
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	xxx
Jurnal koreksi untuk menambah nilai transaksi penghentian setelah transaksi revaluasi.		

R

I - JURNAL KOREKSI BEBAN PENYUSUTAN

KL	KD-PERK	URAIAN AKUN	D	K
027	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,225,996,289	-
027	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	2,225,996,289
027	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	526,059,518	-
027	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	526,059,518
027	591312	Beban Penyusutan Irigasi	155,078,431	-
027	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	-	155,078,431
027	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	8,536,961,839	-
027	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	8,536,961,839
027	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	956,654,856	-
027	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	956,654,856
027	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	228,181,841	-
027	591312	Beban Penyusutan Irigasi	-	228,181,841

II - JURNAL KOREKSI TRANSAKSI LANJUTAN (ASET TETAP)

KL	KD-PERK	URAIAN AKUN	D	K
027	131111	Tanah	515144466925	0
027	313211	Transfer Keluar	0	515144466925
027	313211	Transfer Keluar	13592516990	0
027	133111	Gedung dan Bangunan	0	13592516990
027	133111	Gedung dan Bangunan	67202627849	0
027	313211	Transfer Keluar	0	67202627849
027	313211	Transfer Keluar	96961169	0
027	134111	Jalan Jembatan	0	96961169
027	134111	Jalan Jembatan	3,410,326,000	-
027	313211	Transfer Keluar	-	3,410,326,000

III - JURNAL KOREKSI TRANSAKSI LANJUTAN (PENYUSUTAN ASET TETAP)

KL	KD-PERK	URAIAN AKUN	D	K
027	313211	Transfer Keluar	19,238,484,626	-
027	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	19,238,484,626
027	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,000,857,131	-
027	313211	Transfer Keluar	-	3,000,857,131
027	313211	Transfer Keluar	309,507,856	-
027	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	309,507,856
027	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	116,669,962	-
027	313211	Transfer Keluar	-	116,669,962

IV - JURNAL KOREKSI TRANSAKSI LANJUTAN (ASET TETAP YANG DIHENTIKAN)

KL	KD-PERK	URAIAN AKUN	D	K
027	133111	Gedung dan Bangunan	281,536,000	-
027	166112	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pem	-	281,536,000

V - JURNAL KOREKSI TRANSAKSI LANJUTAN (PENYUSUTAN ASET TETAP YANG DIHENTIKAN)

KL	KD-PERK	URAIAN AKUN	D	K
027	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	70,384,000	-
027	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	70,384,000

VI - JURNAL KOREKSI TRANSAKSI LANJUTAN (BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP YANG DIHENTIKAN)

KL	KD-PERK	URAIAN AKUN	D	K
027	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	15,048,483	0
027	592222	Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	0	15,048,483

VII - JURNAL KOREKSI TRANSAKSI LANJUTAN (TRANSFER MASUK ASET TETAP)

KL	KD-PERK	URAIAN AKUN	D	K
NIHIL				

VIII - JURNAL KOREKSI TRANSAKSI LANJUTAN (TRANSFER MASUK PENYUSUTAN ASET TETAP)

KL	KD-PERK	URAIAN AKUN	D	K
NIHIL				

I - JURNAL KOREKSI BEBAN PENYUSUTAN

KL	KD-PERK	URAIAN AKUN	D	K
027	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	171,865,457	-
027	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	171,865,457
027	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	4,097,616	-
027	591312	Beban Penyusutan Irigasi	-	4,097,616

VI - JURNAL KOREKSI TRANSAKSI LANJUTAN (BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP YANG DIHENTIKAN)

KL	KD-PERK	URAIAN AKUN	D	K
NIHIL				

I - JURNAL KOREKSI BEBAN PENYUSUTAN

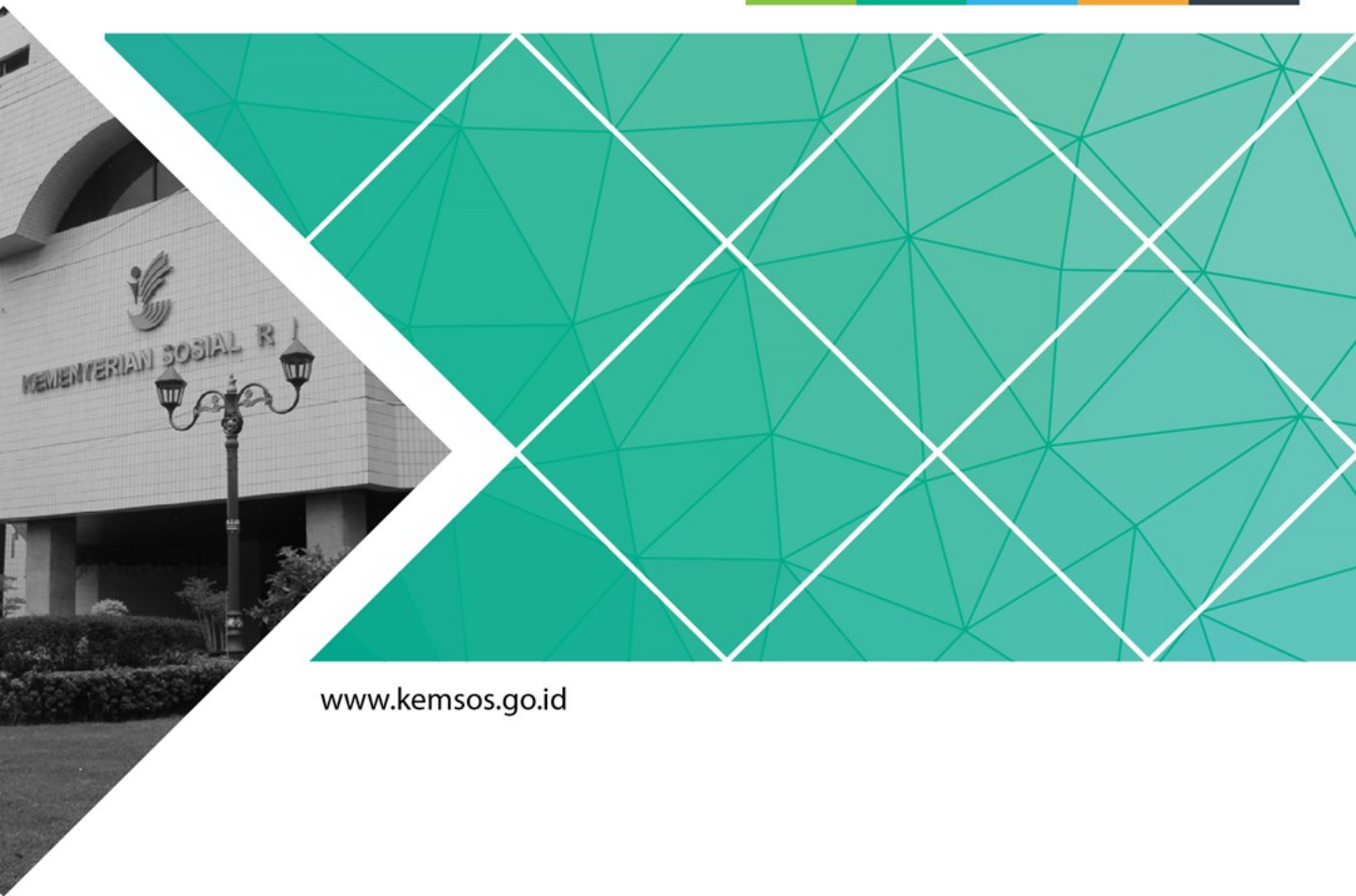
KL	KD-PERK	URAIAN AKUN	D	K
027	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	171,865,457	-
027	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	171,865,457
027	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	4,097,616	-
027	591312	Beban Penyusutan Irigasi	-	4,097,616

VI - JURNAL KOREKSI TRANSAKSI LANJUTAN (BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP YANG DIHENTIKAN)

KL	KD-PERK	URAIAN AKUN	D	K
NIHIL				

#KEMENSOS
Hadir

JURNAL KOREKSI TAKE IN REVALUASI 31 DESEMBER 2019



www.kemsos.go.id



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA
TELEPON: (021) 3449230 EXT. 5200, 5201 FAKSIMILE (021) 3457490
WEBSITE: www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 58 /PB/2020 24 Januari 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Rilis *Update* Aplikasi SIMAK BMN Versi 19.2 serta Petunjuk Teknis Pencatatan dan Penyajian Koreksi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 Menggunakan Aplikasi SIMAK BMN dan SAIBA

- Yth. 1. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum/Deputi Kementerian Negara/Lembaga/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan
2. Para Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur/Kepala SPI/Aparat Pengawas Intern Pemerintah

pada Kementerian Negara/Lembaga (terlampir)
di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali (IP) Barang Milik Negara (BMN), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 hingga 2018, Pemerintah telah melakukan IP (revaluasi) atas seluruh BMN berupa tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, jembatan, dan bangunan air yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
2. Hingga saat ini, hasil IP BMN belum disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), namun tetap disajikan dalam laporan BMN tingkat satker sampai dengan K/L serta laporan keuangan tingkat satker sampai dengan eselon I. Hal ini dikarenakan:
 - a. Pada tahun 2017, proses IP belum selesai untuk seluruh BMN, sehingga tidak seharusnya sebagian aset disajikan menggunakan nilai perolehan dan sebagian menggunakan nilai wajar hasil IP.
 - b. Pada tahun 2018, terdapat temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas IP BMN tahun 2017-2018 yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah.Dengan demikian, nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 dapat disajikan dalam laporan keuangan setelah BPK menyatakan menerima hasil pelaksanaan IP BMN.
3. Berdasarkan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka perbaikan IP BMN, BPK berpendapat bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 *unaudited* sesuai mekanisme yang berlaku.

h

4. Berdasarkan hal-hal di atas, dalam rangka pencatatan dan penyajian hasil IP BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKKL tahun 2019 *unaudited*, setiap K/L yang memiliki BMN objek IP agar melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Satker Konsolidasi melakukan jurnal untuk memasukkan kembali (*take in*) hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan yang telah dikeluarkan (*take out*) dari LKKL tahun 2018 dan semester I tahun 2019 menggunakan Aplikasi SAIBA.
 - b. Setiap satker yang memiliki BMN objek IP melakukan pencatatan perbaikan atau koreksi hasil IP tahun 2017-2018 dalam laporan keuangan tahun 2019 *unaudited* menggunakan Aplikasi SIMAK BMN.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dan penyajian hasil IP BMN tahun 2017-2018 dalam laporan keuangan tahun 2019 dituangkan dalam lampiran surat ini.

5. Selain itu, dalam rangka pencatatan perbaikan atau koreksi hasil IP tahun 2017-2018 dalam laporan keuangan tahun 2019 *unaudited* sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf (b), seluruh satker agar menggunakan *update* Aplikasi SIMAK BMN versi terbaru yang dapat diunduh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan alamat <https://djpb.kemenkeu.go.id>.
6. Selanjutnya, kami meminta bantuan Saudara untuk menyampaikan maksud surat ini kepada seluruh satker lingkup K/L Saudara, serta melakukan monitoring atas pelaksanaannya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

an Direktur Jenderal,
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



R. Wiwin Istanti

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
4. Direktur Barang Milik Negara – Ditjen Kekayaan Negara
5. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
6. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
7. Para Kepala KPPN

LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 58 /PB/2020

Tanggal : 24 Januari 2020

Yth.

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Deputi Administrasi/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara
1	Sekretaris Jenderal MPR RI
2	Sekretaris Jenderal DPR RI
3	Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah RI
4	Sekretaris Jenderal BPK RI
5	Sekretaris Mahkamah Agung RI
6	Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI
7	Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI
8	Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
9	Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
10	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
11	Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
12	Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
13	Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
14	Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
15	Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
16	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
17	Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
18	Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
19	Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
20	Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
21	Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
22	Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
23	Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
24	Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
25	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI
26	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
27	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
28	Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
29	Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI
30	Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
31	Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional RI
32	Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI

LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 58 /PB/2020

Tanggal : 24 Januari 2020

Yth.

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Deputi Administrasi/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara
33	Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
34	Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
35	Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
36	Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
37	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
38	Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
39	Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
40	Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
41	Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional
42	Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
43	Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
44	Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
45	Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
46	Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
47	Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
48	Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
49	Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
50	Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
51	Sekretaris Utama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
52	Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
53	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
54	Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
55	Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
56	Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
57	Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
58	Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
59	Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
60	Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
61	Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
62	Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
63	Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
64	Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara

R

LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 58 /PB/2020

Tanggal : 29 Januari 2020

Yth.

No.	Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Deputi Administrasi/Kepala/Wakil Kepala/Direktur Umum Kementerian Negara
65	Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
66	Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
67	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
68	Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
69	Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
70	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71	Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72	Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73	Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
74	Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75	Sekretaris Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76	Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
77	Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78	Anggota 1 / Deputi Bidang Administrasi dan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79	Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80	Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet
81	Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu
82	Direktur SDM dan Umum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83	Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
84	Deputi Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85	Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
86	Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 58 /PB/2020

Tanggal : 24 Januari 2020

Yth.

No.	Inspektur/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga
1	Kepala Biro Administrasi dan Pengawasan MPR
2	Inspektur I Dewan Perwakilan Rakyat
3	Inspektur I Badan Pemeriksa Keuangan
4	Sekretaris Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung
5	Inspektur Keuangan Pada Jaksa Agung Muda Pengawasan
6	Inspektur Kementerian Sekretariat Negara
7	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
8	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri
9	Inspektur Keuangan Kementerian Pertahanan
10	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11	Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
12	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
13	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
14	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
15	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
16	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
17	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
18	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
19	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
20	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial
21	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
22	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
23	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
24	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Polhukam
25	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
26	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
27	Inspektur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
28	Inspektur Kementerian Badan Usaha Milik Negara
29	Inspektur Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
30	Inspektur Kementerian Koperasi dan UKM
31	Inspektur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32	Inspektur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 58 /PB/2020

Tanggal : 24 Januari 2020

Yth.

No.	Inspektur/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga
33	Inspektur Utama Badan Intelijen Negara
34	Inspektur Badan Siber dan Sandi Negara
35	Inspektur Dewan Ketahanan Nasional
36	Inspektur Utama Badan Pusat Statistik
37	Inspektur Bidang Administrasi Umum Kementerian PPN/Bappenas
38	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang
39	Inspektur Perpustakaan Nasional
40	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
41	Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara RI
42	Inspektur Badan POM
43	Inspektur Lembaga Ketahanan Nasional
44	Inspektur Badan Koordinasi Penanaman Modal
45	Inspektur Badan Narkotika Nasional
46	Inspektur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
47	Inspektur Wilayah I BKKBN
48	Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Internal dan Kerjasama Komnas HAM
49	Inspektur Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
50	Kepala Biro Pengawasan Komisi Pemilihan Umum
51	Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Mahkamah Konstitusi RI
52	Inspektur Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
53	Inspektur Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
54	Inspektur Badan Tenaga Nuklir Nasional
55	Inspektur Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
56	Inspektur Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
57	Inspektur Badan Informasi Geospasial
58	Inspektur Badan Standardisasi Nasional
59	Inspektur Badan Pengawas Tenaga Nuklir
60	Inspektur Lembaga Administrasi Negara
61	Inspektur Arsip Nasional RI
62	Inspektur Badan Kepegawaian Negara
63	Inspektur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
64	Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan
65	Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga

f

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 58 /PB/2020

Tanggal : 24 Januari 2020

Yth.

No.	Inspektur/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Negara/Lembaga
66	Direktur Pengawasan Internal Komisi Pemberantasan Korupsi
67	Inspektur Sekretariat Jenderal DPD RI
68	Ketua SPI Komisi Yudisial
69	Inspektur Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
70	Inspektur BNP2TKI
71	Inspektur Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
72	Inspektur Badan SAR Nasional
73	Kepala Satuan Pengawas Internal KPPU
74	Kepala Divisi Pengendalian Pembangunan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
75	Kepala Biro Perencanaan Pengawasan dan Kerjasama Ombudsman RI
76	Inspektur I Itjen Kementerian Dalam Negeri (APIP BNPP)
77	Kepala Satuan Pemeriksa Internal Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
78	Inspektur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
79	Inspektur Sekretariat Kabinet
80	Inspektur I Deputy Pengawasan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
81	Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal Badan Pengawas Pemilu
82	Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI
83	Kepala Satuan Pengawas Internal LPP TVRI
84	Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
85	Inspektur Badan Keamanan Laut
86	Kepala Biro Pengawasan Internal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

f

LAMPIRAN III

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-58 /PB/2020

Tanggal : 24 Januari 2020

PETUNJUK TEKNIS PENCATATAN DAN PENYAJIAN KOREKSI HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA MENGUNAKAN APLIKASI SIMAK BMN DAN SAIBA

LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

Ruang lingkup Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) yang di atur dalam PMK Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN mencakup seluruh BMN pada Kementerian Negara/Lembaga berupa Aset Tetap yang terklasifikasi sebagai:

1. Tanah;
2. Gedung dan Bangunan; serta
3. Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi: Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air sesuai dengan kodefikasi BMN.

BMN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 3 di atas diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Pada tahun 2017 - 2018, pemerintah melakukan Inventarisasi dan Penilaian Kembali (IP) BMN atau revaluasi BMN berupa tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Adapun kronologi pelaksanaan atas Penilaian Kembali BMN adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017, penilaian kembali BMN belum diselesaikan untuk semua BMN. Untuk menghindari ketidak-konsistenan penyajian BMN dalam laporan keuangan, di mana sebagian barang dalam satu kelompok BMN yang telah dilakukan penilaian kembali disajikan menggunakan nilai wajar sedangkan sebagian lagi yang belum dilakukan penilaian kembali disajikan menggunakan nilai historis, maka nilai wajar hasil Penilaian Kembali belum disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017. Namun demikian, nilai wajar hasil Penilaian Kembali tersebut tetap disajikan dalam laporan BMN tingkat satker sampai dengan K/L serta laporan keuangan tingkat satker sampai dengan eselon I tahun 2017. Selanjutnya, pemerintah melanjutkan dan menyelesaikan proses IP pada tahun 2018.
2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 pada Kementerian Keuangan Selaku Pengelola Barang, Kementerian/Lembaga (K/L) Selaku Pengguna Barang, dan Instansi Terkait

Lainnya Nomor 119/LHP/XV/12/2018 tanggal 31 Desember 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan tidak dapat menerima hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018, karena terdapat beberapa permasalahan antara lain mekanisme pengendalian internal dan kontrol kualitas dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN tidak akurat. Untuk tetap menjaga kualitas LKKL dan LKPP, Pemerintah memutuskan hasil penilaian kembali BMN tidak disajikan dalam LKKL dan LKPP tahun 2018. Hasil penilaian kembali BMN akan disajikan setelah dilakukan perbaikan dan hasilnya dapat diterima oleh BPK. Sebagaimana tahun 2017, nilai wajar hasil penilaian kembali tetap disajikan dalam laporan BMN tingkat satker sampai dengan K/L serta laporan keuangan tingkat satker sampai dengan eselon I tahun 2018.

3. Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut, maka koreksi atas hasil penilaian kembali yang sebelumnya telah dilakukan dalam LKKL dikeluarkan kembali dari LKKL. Proses mengeluarkan nilai wajar hasil IP beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan dari LKKL dan LKPP tahun 2017 dan 2018, atau disebut dengan istilah *take out*, dilakukan melalui penjurnalan pada Aplikasi SAIBA menggunakan identitas Satker Konsolidasi masing-masing K/L. Hal ini mengakibatkan selisih saldo BMN dan akumulasi penyusutannya antara laporan keuangan dengan laporan BMN, yang harus dijelaskan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
4. Selain jurnal *take out* pada LKKL dan LKPP tahun 2017 dan 2018, Pemerintah juga telah melakukan jurnal *take out* untuk mengeluarkan dampak IP terhadap transaksi-transaksi lanjutan pada LKKL dan LKPP semester I tahun 2019.
5. Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut di atas, Pemerintah telah melakukan perbaikan alur bisnis baik pelaksanaan inventarisasi oleh satuan kerja maupun teknis pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana ditetapkan dalam PMK Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.
6. Menanggapi perbaikan penilaian kembali BMN yang dilakukan oleh pemerintah, melalui surat nomor 338/S/XV/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019 hal Perkembangan Hasil Reviu dan Pengujian Terbatas atas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada LHP Penilaian kembali Barang Milik Negara Tahun 2017 dan 2018, Auditor Utama Keuangan Negara II menyatakan bahwa secara umum penyempurnaan atas desain pengendalian dan metodologi Penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 yang dilakukan oleh Pemerintah telah memadai, namun implementasinya masih memerlukan perbaikan.
7. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah terus melakukan upaya perbaikan sebagaimana temuan dan rekomendasi BPK. Upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah disampaikan kepada BPK melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-937/MK.06/2019 tanggal 23 Desember 2019 hal Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2017-2018.
8. Menanggapi Surat Menteri Keuangan tersebut, Anggota BPK menyampaikan surat nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas

Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018, di mana BPK berpendapat bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 *unaudited* sesuai mekanisme yang berlaku.

PERBAIKAN/KOREKSI ATAS HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI BMN (REVALUASI)

Perbaikan atas BMN objek IP tahun 2017-2018 yang berdampak pada laporan keuangan tahun 2019 antara lain meliputi koreksi nilai wajar hasil IP dan penyesuaian tambahan masa manfaat.

Perbaikan nilai wajar hasil revaluasi tahun 2017-2018 yang dicatat pada tahun 2019 dimungkinkan berdampak pada:

1. Koreksi nilai BMN (setelah transaksi revaluasi dan transaksi-transaksi lanjutan sampai dengan semester II tahun 2019).
2. Koreksi nilai penyusutan per periode sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan tanggal transaksi perbaikan/koreksi revaluasi (semester II tahun 2019).
3. Koreksi nilai transaksi lanjutan yang terjadi sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan tanggal transaksi perbaikan/koreksi revaluasi (semester II tahun 2019).

Jenis transaksi serta jurnal yang terbentuk dari transaksi perbaikan revaluasi dimungkinkan berbeda-beda antara satu BMN dengan BMN yang lain, tergantung pada:

1. Periode dilakukannya IP atau penerbitan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN (LHIP), apakah semester II tahun 2017, tahun 2018, atau tahun 2019.
2. Jenis transaksi lanjutan yang terjadi setelah transaksi revaluasi, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berubah tidaknya identitas satker, kodefikasi BMN, dan NUP BMN.
3. Periode terjadinya transaksi lanjutan, yang dibedakan antara Tahun Anggaran Berjalan/TAB (tahun 2019) atau Tahun Anggaran Yang Lalu/TAYL (2017-2018).

Variasi transaksi lanjutan yang dimungkinkan terjadi pada suatu BMN setelah tanggal transaksi revaluasi sampai dengan saat ini antara lain:

1. Penyusutan reguler (semesteran).
2. Transaksi yang tidak merubah kepemilikan, kodefikasi, maupun Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN.
Transaksi yang termasuk dalam kategori ini antara lain mencakup pengembangan, koreksi perubahan nilai/kuantitas, penerimaan aset dari ATR, koreksi pencatatan, penghentian dari penggunaan, dan penggunaan kembali BMN yang dihentikan.
3. Transaksi yang tidak merubah kepemilikan BMN, namun merubah kodefikasi dan/atau NUP BMN

Transaksi yang termasuk dalam kategori ini antara lain mencakup transaksi reklasifikasi masuk, reklasifikasi keluar, dan input normalisasi.

4. Transaksi yang tidak merubah kepemilikan BMN, namun BMN tersebut keluar dari neraca

Transaksi yang termasuk dalam kategori ini antara lain mencakup penghapusan, reklasifikasi ke BPYBDS, usulan barang hilang, usulan barang rusak berat, dan normalisasi.

5. Transaksi yang merubah kepemilikan dan NUP BMN, namun masih dalam satu entitas pemerintah pusat

Transaksi yang termasuk kategori ini adalah transfer keluar dan transfer masuk.

6. Transaksi yang merubah kepemilikan BMN dan keluar dari entitas pemerintah pusat, yaitu transaksi hibah keluar.

Penyesuaian penambahan masa manfaat atas BMN objek revaluasi yang diatur dalam PMK Nomor 107/PMK.06/2019 merupakan salah satu tindak lanjut atas temuan BPK, di mana Pemerintah menyesuaikan pengaturan sebagai berikut:

PMK Nomor 118/PMK.06/2017	PMK Nomor 107/PMK.06/2019
<p>Pasal 22 Ayat (2):</p> <p>Dalam hal BMN hasil Penilaian sudah tidak memiliki sisa masa manfaat pada saat pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian, maka ditentukan masa manfaat baru atas BMN yang bersangkutan oleh Tim Pelaksana.</p>	<p>Pasal 22 Ayat (2):</p> <p>Dalam hal BMN yang menjadi objek Penilaian Kembali sudah tidak memiliki masa manfaat pada periode waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, maka Tim Pelaksana menentukan masa manfaat baru atas BMN yang bersangkutan.</p>
<p>Lampiran VII:</p> <p>BMN yang pada saat dilakukan Penilaian Kembali telah habis masa manfaatnya, maka Tim Pelaksana menentukan masa manfaat baru atas objek BMN dimaksud.</p>	<p>Lampiran I:</p> <p>BMN yang pada saat dilakukan Penilaian Kembali habis masa manfaatnya pada tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023, maka Tim Pelaksana menentukan masa manfaat baru atas objek BMN tersebut.</p>
<p>Formula masa manfaat baru:</p> <p>Masa Manfaat Baru = Faktor Penyesuaian x Masa Manfaat Perolehan Baru BMN</p>	<p>Formula masa manfaat baru:</p> <p>Masa Manfaat Baru = Faktor Penyesuaian x Masa Manfaat Perolehan Baru BMN</p>
<p>Faktor Penyesuaian adalah persentase penyesuaian atas kondisi BMN berdasarkan LHIP:</p> <p>a. Kondisi Baik: 30%</p> <p>b. Kondisi Rusak Ringan: 20%</p>	<p>Faktor Penyesuaian adalah persentase penyesuaian atas kondisi BMN berdasarkan LHIP:</p> <p>a. Kondisi Baik: 30%</p> <p>b. Kondisi Rusak Ringan: 20%</p>

f

Kondisi Rusak Berat: 5%	Kondisi Rusak Berat: 0%
--------------------------------	--------------------------------

Berdasarkan ketentuan di atas:

1. BMN yang pada saat dilakukan IP masih memiliki sisa masa manfaat, namun masa manfaat tersebut akan habis pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 tidak diberikan tambahan masa manfaat. Dengan adanya perbaikan IP tahun 2019, BMN dengan kondisi tersebut diberikan tambahan masa manfaat. Dengan demikian, akan muncul perhitungan penyusutan reguler BMN tersebut sejak tanggal IP sampai dengan semester II tahun 2019. Total nilai penyusutan BMN tersebut dibukukan dalam laporan keuangan tahun 2019.
2. BMN yang pada saat dilakukan IP telah habis masa manfaatnya dan dalam kondisi rusak berat, telah diberi masa manfaat baru sebesar 5% x masa manfaat baru. Dengan demikian, telah terjadi penyusutan reguler atas BMN dimaksud sejak tanggal revaluasi hingga semester I tahun 2019. Dengan adanya perbaikan IP tahun 2019, BMN dengan kondisi tersebut dibatalkan penambahan masa manfaatnya. Sehingga, penyusutan reguler atas BMN dimaksud sejak tanggal revaluasi hingga semester I tahun 2019 dilakukan eliminasi. Mengingat bahwa atas BMN dimaksud tidak lagi memiliki sisa manfaat, maka nilai wajar hasil IP langsung disusutkan 100% sehingga nilai buku BMN tersebut menjadi nihil. Eliminasi penyusutan reguler serta pembentukan penyusutan sebesar nilai wajar hasil IP tersebut dibukukan dalam laporan keuangan tahun 2019.

Dengan mempertimbangkan pengaturan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan, penyajian hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya diatur sebagai berikut:

1. Nilai wajar hasil revaluasi tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dicatat sebagai transaksi tahun 2019, serta disajikan dalam LKKL dan LKPP tahun 2019.
2. Perbaikan atau koreksi revaluasi beserta dampaknya terhadap seluruh transaksi lanjutan diperhitungkan sejak tanggal penilaian (tanggal transaksi revaluasi) tahun 2017-2018.
3. Laporan keuangan tahun 2017, 2018, dan semester I tahun 2019 tidak perlu disajikan ulang.
4. Penyajian hasil revaluasi tahun 2017-2018 beserta perbaikannya diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

PROSEDUR PENCATATAN DAN PENYAJIAN HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI BMN TAHUN 2017-2018 BESERTA PERBAIKANNYA

Pencatatan dan penyajian nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKKL dan LKPP tahun 2019 mencakup:

1. Pencatatan dan penyajian nilai wajar IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan yang terjadi sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan semester I tahun 2019.

f

2. Pencatatan perbaikan nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan tanggal transaksi perbaikan revaluasi (semester II tahun 2019).

Penjelasan lebih lanjut terakait prosedur pencatatan dan penyajian hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya adalah sebagai berikut:

1. Penyajian nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan yang terjadi sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan semester I tahun 2019

Nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan semester I tahun 2019 merupakan angka-angka yang telah dilakukan penjurnalan *take out* oleh Satker Konsolidasi pada masing-masing K/L, pada saat melakukan penyusunan LKKL tahun 2018 dan semester I tahun 2019.

Dalam rangka penyajian dalam LKKL dan LKPP tahun 2019, Satker Konsolidasi agar melakukan jurnal untuk memasukkan kembali (*take in*) angka-angka dimaksud. Jurnal *take in* dilakukan dengan membalik seluruh jurnal *take out*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sebelum melakukan penjurnalan, pastikan bahwa Satker Konsolidasi telah melakukan *backup* data Aplikasi SAIBA.
- b. Satker Konsolidasi agar melakukan identifikasi dan inventarisasi seluruh jurnal *take out* terkait revaluasi beserta transaksi lanjutan, yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan LKKL tahun 2018 dan semester I tahun 2019.
- c. Satker Konsolidasi melakukan jurnal balik terhadap seluruh jurnal *take out* tersebut, dengan membedakan periode dilakukannya jurnal *take out*:
 - 1) Untuk jurnal *take out* yang dilakukan dalam rangka penyusunan LKKL tahun 2018, jurnal *take in* dilakukan dengan membalik jurnal *take out*, serta menyesuaikan (*mapping*) beberapa akun tertentu menjadi akun ekuitas, dalam hal ini akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi (391116).

Mapping akun dalam rangka membalik jurnal *take out* tahun 2018 adaah sebagai berikut:

Akun Jurnal Take Out	Akun Jurnal Take In (Jurnal Balik)	Keterangan
Aset Tetap	Aset Tetap	Tetap
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Tetap
Revaluasi Aset Tetap	Revaluasi Aset Tetap	Tetap
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Tetap
Beban Penyusutan Aset Tetap	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Di- <i>mapping</i>
Beban Pelepasan Aset	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Di- <i>mapping</i>

Transfer Masuk	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Di-mapping
Transfer Keluar	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Di-mapping
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/ Aset Tetap/ Aset Lainnya	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	Di-mapping

Contoh jurnal *take in* atas jurnal *take out* yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan LKKL tahun 2018:

Jurnal Take Out		Laporan Keuangan	Jurnal Take In (Jurnal Balik)		Laporan Keuangan
D	Aset Tetap	Neraca	D	Revaluasi Aset Tetap	LPE
K	Revaluasi Aset Tetap	LPE	K	Aset Tetap	Neraca
D	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE	D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Neraca
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Neraca	K	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
D	Beban Penyusutan Aset Tetap	LO	D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Neraca
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Neraca	K	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
D	Beban Pelepasan Aset	LO	D	Aset Tetap	Neraca
K	Aset Tetap	Neraca	K	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
D	Transfer Keluar	LPE	D	Aset Tetap	Neraca
K	Aset Tetap	Neraca	K	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
D	Aset Tetap	Neraca	D	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
K	Transfer Masuk	LPE	K	Aset Tetap	Neraca
D	Koreksi atas Reklasifikasi	LPE	D	Aset Tetap	Neraca

f

	Persediaan/ Tetap/ Lainnya	Aset Aset	
K	Aset Tetap		Neraca

K	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/ Aset Tetap/ Aset Lainnya		LPE

- 2) Untuk jurnal *take out* yang dilakukan dalam rangka penyusunan LKKL semester I tahun 2019, jurnal *take in* dilakukan dengan membalik jurnal *take out*, tanpa melakukan penyesuaian akun (*mapping*).

Contoh jurnal *take in* atas jurnal *take out* yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan LKKL semester I tahun 2019:

Jurnal Take Out		Laporan Keuangan
D	Aset Tetap	Neraca
K	Revaluasi Aset Tetap	LPE
D	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Neraca
D	Beban Penyusutan Aset Tetap	LO
K	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Neraca
D	Beban Pelepasan Aset	
K	Aset Tetap	Neraca
D	Transfer Keluar	
K	Aset Tetap	Neraca
D	Aset Tetap	Neraca
K	Transfer Masuk	
D	Koreksi atas Reklasifikasi	

Jurnal Take In (Jurnal Balik)		Laporan Keuangan
D	Revaluasi Aset Tetap	LPE
K	Aset Tetap	Neraca
D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Neraca
K	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE
D	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Neraca
K	Beban Penyusutan Aset Tetap	LO
D	Aset Tetap	Neraca
K	Beban Pelepasan Aset	
D	Aset Tetap	Neraca
K	Transfer Keluar	LPE
D	Transfer Masuk	
K	Aset Tetap	Neraca
D	Aset Tetap	Neraca

f

	Persediaan/ Tetap/ Lainnya	Aset Aset	
K	Aset Tetap		Neraca

K	Koreksi Reklasifikasi Persediaan/ Tetap/ Lainnya	atas Aset Aset	LPE

- d. Jurnal *take in* dilakukan melalui menu Jurnal Umum pada Aplikasi SAIBA dan diberi tanggal buku 31 Desember 2019.
 - e. Jurnal *take in* dilengkapi dengan Memo Penyesuaian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dengan dilampiri dokumen pendukung terkait. Dokumen pendukung terkait sebagai lampiran Memo Penyesuaian dapat berupa daftar rincian dan/atau rekapitulasi jurnal *take out* tahun 2018 dan semester I tahun 2019.
 - f. Setelah melakukan penjurnalan dan proses *posting*, Satker Konsolidasi agar memastikan bahwa seluruh jurnal *take in* dimaksud telah tersaji dalam laporan keuangan dengan semestinya, serta memastikan bahwa saldo Selisih Revaluasi Aset Tetap telah tersaji dalam LPE.
 - g. Satker Konsolidasi melakukan pengunggahan data dari Aplikasi SAIBA ke Aplikasi e-Rekon&LK dengan memperhatikan jadwal *open - closed period*. Setelah melewati periode pmutakhiran data dan laporan (periode OLAP), Satker Konsolidasi agar memastikan bahwa saldo laporan keuangan pada Aplikasi e-Rekon&LK telah sesuai dengan Aplikasi SAIBA.
2. Pencatatan perbaikan nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan sejak tanggal transaksi revaluasi sampai dengan tanggal transaksi perbaikan revaluasi (semester II tahun 2019).

Selain memasukkan kembali nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan sampai dengan semester I tahun 2019 melalui jurnal *take in* sebagaimana dimaksud dalam angka 1, K/L perlu melakukan pencatatan koreksi nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018. Koreksi atas nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 juga berdampak pada koreksi atas transaksi lanjutan yang terjadi sejak tanggal IP tahun 2017-2018 sampai dengan tanggal koreksi IP (semester II tahun 2019).

Pencatatan transaksi koreksi nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 dilakukan oleh masing-masing satker dan/atau anak satker yang memiliki BMN objek IP. Mekanisme pencatatan koreksi nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dapat dibedakan menjadi:

- a. Koreksi melalui penerimaan ADK dari SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN
- b. Koreksi melalui perekaman manual
- c. Koreksi atas BMN objek IP yang telah dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah (telah direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya)

R

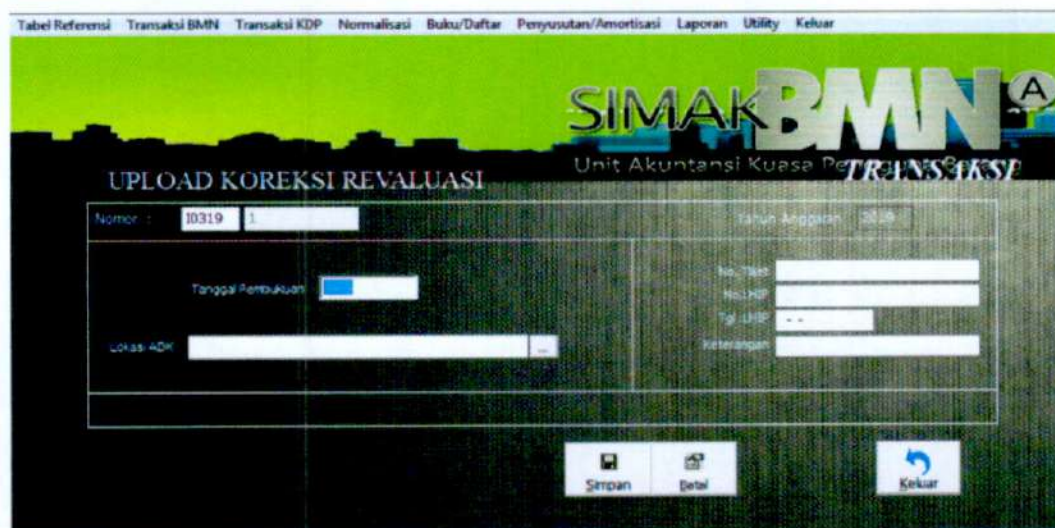
Penjelasan lebih lanjut terkait mekanisme pencatatan transaksi koreksi nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya adalah sebagai berikut:

a. Koreksi melalui penerimaan ADK dari SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN

Pada prinsipnya, koreksi melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN dapat dilakukan terhadap seluruh BMN objek IP yang mengalami berbagai variasi transaksi lanjutan seperti pengembangan, koreksi nilai atau kuantitas, koreksi pencatatan, hibah keluar, penghapusan, transfer keluar, reklasifikasi keluar, normalisasi, usulan barang hilang, usulan barang rusak berat, dan lain sebagainya. Koreksi melalui penerimaan ADK tidak dapat dilakukan terhadap BMN yang diperoleh melalui transaksi transfer masuk, reklasifikasi masuk, dan input normalisasi, di mana BMN tersebut telah dilakukan IP sebelumnya.

Pencatatan perbaikan hasil IP tahun 2017-2018 beserta transaksi lanjutannya melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Masing-masing satker dan anak satker mengunduh ADK dari Aplikasi SIMAN. ADK dimaksud dibuat per LHIP, di mana dalam satu LHIP dimungkinkan mencakup data beberapa NUP BMN dan beberapa anak satker sekaligus. Satker dan/atau beberapa anak satker dimungkinkan mengunduh lebih dari satu ADK sesuai jumlah LHIP dan dimungkinkan mengunduh ADK yang sama.
- 2) ADK dari SIMAN memuat data BMN yang dilakukan perbaikan IP, antara lain terdiri dari: identitas satker (20 digit kode UAKPB); identitas BMN (kode sub-subkelompok beserta NUP); nilai wajar hasil IP yang seharusnya; penambahan masa manfaat yang seharusnya; identitas dokumen LHIP awal (tanggal dan nomor); kuantitas akhir BMN yang seharusnya (nilai menjadi); kondisi barang pada saat IP; jenis transaksi perbaikan revaluasi.
- 3) Pastikan bahwa seluruh transaksi terkait BMN tahun 2019 telah dilakukan perekaman pada Aplikasi SIMAK BMN.
- 4) Sebelum melakukan penerimaan ADK pada Aplikasi SIMAK BMN, satker dan/atau anak satker agar melakukan proses *backup* data.
- 5) Satker atau anak satker mengunggah ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN melalui menu Transaksi BMN >> Inventarisasi dan Penilaian Kembali >> Upload Koreksi Penilaian Kembali.



- 6) Pada menu ini, satker wajib merekam tanggal pembukuan dengan tanggal 31 Desember 2019. Penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN agar dilakukan sebelum melakukan penyusutan semester II tahun 2019. Setelah merekam tanggal pembukuan, satker mengunggah ADK koreksi hasil IP dengan memilih ADK yang dikehendaki melalui kolom pilih lokasi ADK. Setelah ADK yang dikehendaki dipilih maka kolom isian nomor tiket, nomor LHIP, dan tanggal LHIP akan terisi otomatis sesuai data yang terdapat dalam ADK yang dipilih.
- 7) Aplikasi SIMAK BMN menerima dan memproses data di dalam ADK sesuai dengan identitas satker (20 digit).
- 8) Aplikasi SIMAK BMN melakukan validasi untuk mengecek kesesuaian detail data yang diterima dari Aplikasi SIMAN. Apabila terdapat data dalam ADK yang tidak memenuhi kriteria validasi, Aplikasi SIMAK BMN

f

menolak ADK tersebut serta memunculkan notifikasi dan alasan penolakan data. Penolakan data suatu NUP BMN tertentu dalam satu ADK mengakibatkan seluruh NUP BMN yang terdapat dalam ADK tersebut tidak dapat diproses oleh Aplikasi SIMAK BMN.

- 9) Terhadap ADK yang mengalami penolakan oleh Aplikasi SIMAK BMN tersebut, anak satker agar berkoordinasi dengan satker, dan satker agar berkoordinasi dengan KPKNL mitra kerjanya. Satker juga dapat menyampaikan permasalahan dimaksud melalui haloDJKN dengan alamat <https://halodjkn.kemenkeu.go.id>.
- 10) Setelah satker memperoleh tanggapan dari KPKNL mitra kerja atau haloDJKN, satker dapat mengunduh ulang ADK yang telah disesuaikan dari Aplikasi SIMAN, serta mengunggah ulang ke Aplikasi SIMAK BMN.
- 11) Aplikasi SIMAK BMN secara otomatis memproses ADK dari SIMAN dan melakukan perhitungan koreksi atas nilai wajar hasil IP beserta perbaikannya, termasuk transaksi-transaksi lanjutannya.
- 12) Pastikan bahwa seluruh ADK dari Aplikasi SIMAN telah berhasil diterima dan diproses oleh Aplikasi SIMAK BMN.
- 13) Lakukan verifikasi data dan laporan sebelum dan setelah pencatatan perbaikan hasil IP tahun 2017-2018, antara lain melalui pengecekan daftar dan/atau laporan terkait serta jurnal kiriman yang terbentuk.

b. Koreksi melalui perekaman manual pada Aplikasi SIMAK BM

BMN objek IP tahun 2017-2018 dimungkinkan mengalami transaksi lanjutan berupa transfer keluar – transfer masuk, reklasifikasi keluar - reklasifikasi masuk, serta normalisasi - input normalisasi. Transaksi lanjutan berupa reklasifikasi keluar – reklasifikasi masuk serta normalisasi – input normalisasi mengakibatkan perubahan NUP dan/atau kodefikasi BMN. Sedangkan transaksi transfer keluar – transfer masuk mengakibatkan perubahan kepemilikan serta NUP dan/atau kodefikasi BMN.

Untuk akurasi pencatatan dan penyajian perbaikan IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam laproan keuangan tahun 2019, koreksi harus dilakukan baik terhadap BMN dengan NUP lama maupun NUP baru. Untuk BMN objek IP yang telah mengalami transaksi lanjutan berupa transfer keluar – transfer masuk, koreksi harus dilakukan baik oleh satker pengirim maupun satker penerima transfer.

Koreksi nilai transaksi lanjutan berupa transfer keluar, reklasifikasi keluar, dan normalisasi dapat dilakukan melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN sebagaimana dijelaskan pada huruf a. Sedangkan koreksi nilai transaksi transfer masuk, reklasifikasi masuk, dan input normalisasi atas BMN yang sebelumnya telah dilakukan IP harus dilakukan melalui perekaman manual pada Aplikasi SIMAK BMN, khususnya menu Transaksi BMN >> Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN >> Input Koreksi Penilaian Kembali.



Tahapan koreksi nilai atas BMN objek IP yang diperoleh melalui transaksi transfer masuk, reklasifikasi masuk, dan input normalisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Satker melakukan inventarisasi atas seluruh BMN objek IP yang mengalami transaksi lanjutan berupa transfer keluar, reklasifikasi keluar, dan normalisasi.
- 2) Satker melakukan inventarisasi atas seluruh BMN objek IP yang diperoleh melalui transaksi transfer masuk, reklasifikasi masuk, dan input normalisasi sejak tanggal IP tahun 2017-2018 sampai dengan semester II tahun 2019.
- 3) Transaksi reklasifikasi keluar – reklasifikasi masuk serta transaksi normalisasi – input normalisasi seharusnya terjadi pada satker yang sama. Untuk itu, satker agar mengidentifikasi dan menghubungkan BMN yang direklasifikasi keluar dengan BMN yang direklasifikasi masuk serta BMN yang dinormalisasi dengan BMN yang di-input normalisasi berdasarkan kodefikasi dan NUP. Satker agar mengidentifikasi data terkait BMN tersebut sebagai dasar perekaman koreksi nilai BMN yang direklasifikasi masuk atau di-input normalisasi. Data terkait BMN yang perlu diidentifikasi sekurang-kurangnya mencakup:
 - a) Identitas BMN (kodefikasi dan NUP)
 - b) Nilai wajar hasil IP lama (sesuai LHIP awal)
 - c) Nilai wajar hasil IP baru (sesuai LHIP revisi)
 - d) Koreksi nilai akumulasi penyusutan (diperoleh dari Hiistori BMN)
 - e) Penambahan masa manfaat yang seharusnya (sesuai LHIP revisi)
 - f) Jenis/kode transaksi perbaikan hasil IP yang direkam atas BMN dengan NUP dan/atau kodefikasi lama, apakah transaksi 224 atau 225. Informasi ini dapat diperoleh dari Histori BMN.
- 4) Berdasarkan identifikasi data sebagaimana dimaksud pada poin 3), satker melakukan perekaman koreksi melalui menu Transaksi BMN >>

Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN >> Input Koreksi Penilaian Kembali >> Koreksi Reklasifikasi Masuk, Koreksi Input Normalisasi, Koreksi Reklasifikasi Masuk 224, atau Koreksi Input Normalisasi 224. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai sub-submenu dimaksud beserta jurnal yang terbentuk dituangkan dalam subbab tersendiri.

- 5) Perekaman koreksi transaksi reklasifikasi masuk atau input normalisasi pada Aplikasi SIMAK BMN berdampak pada perbaikan nilai BMN beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan sejak tanggal transaksi reklasifikasi masuk sampai dengan tanggal transaksi perbaikan IP (semester II tahun 2019).
- 6) Transaksi transfer keluar – transfer masuk melibatkan dua satker yang berbeda. Satker pengirim agar berkoordinasi dengan satker penerima transfer, serta menyampaikan data terkait BMN yang ditransfer sebagai dasar pencatatan koreksi nilai BMN yang ditransfer masuk. Data yang disampaikan oleh satker pengirim kepada satker penerima sekurang-kurangnya mencakup:
 - a) Identitas BMN (kodefikasi dan NUP)
 - b) Nilai wajar hasil IP lama (sesuai LHIP awal)
 - c) Nilai wajar hasil IP baru (sesuai LHIP revisi)
 - d) Koreksi nilai akumulasi penyusutan (diperoleh dari Histori BMN)
 - e) Penambahan masa manfaat yang seharusnya
 - f) Jenis/kode transaksi perbaikan hasil IP yang direkam oleh satker pengirim transfer, apakah transaksi 224 atau 225. Informasi ini dapat diperoleh dari Histori BMN.
 - g) Salinan LHIP awal
 - h) Salinan LHIP koreksi
 - i) Salinan Berita Acara Serah Terima (BAST)
- 7) Berdasarkan informasi dari satker pengirim transfer sebagaimana dimaksud pada poin 5), satker penerima transfer melakukan perekaman koreksi transfer masuk pada Aplikasi SIMAK BMN melalui menu Transaksi BMN >> Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN >> Input Koreksi Penilaian Kembali >> Koreksi Transfer Masuk.
- 8) Perekaman koreksi transaksi transfer masuk pada Aplikasi SIMAK BMN berdampak pada perbaikan nilai BMN beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan sejak tanggal transaksi transfer masuk sampai dengan tanggal transaksi perbaikan IP (semester II tahun 2019).
- 9) Perekaman koreksi nilai BMN objek IP yang diperoleh dari transfer masuk, reklasifikasi masuk, dan input normalisasi dilakukan dengan tanggal buku 31 Desember 2019, sebelum dilakukan penyusutan reguler semester II tahun 2019.
- 10) Pastikan bahwa perekaman seluruh koreksi transaksi transfer masuk, reklasifikasi masuk, dan input normalisasi atas BMN objek IP berhasil dilakukan dan disimpan.
- 11) Lakukan verifikasi data dan laporan sebelum dan setelah perekaman koreksi transaksi transfer masuk, reklasifikasi masuk, dan input normalisasi, antara lain melalui pengecekan daftar dan/atau laporan terkait, serta jurnal kiriman yang terbentuk.

- 12) Selanjutnya, satker melakukan pengiriman data dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SIMAN dalam rangka sinkronisasi data. Sinkronisasi data merupakan salah satu prosedur untuk memastikan bahwa seluruh perbaikan hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya telah berhasil diproses pada Aplikasi SIMAK BMN.
 - 13) Lakukan pengiriman data dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA, dan pastikan bahwa saldo pos-pos terkait BMN antara Aplikasi SIMAK BMN dengan Aplikasi SAIBA telah sama.
- c. Koreksi atas BMN objek IP yang telah dihentikan dari penggunaannya dari operasional pemerintah (telah direklasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya).

BMN objek IP tahun 2017-2018 dimungkinkan mengalami transaksi lanjutan berupa penghentian dari penggunaan operasional pemerintah, sehingga BMN dimaksud mengalami perubahan klasifikasi pada neraca, dari akun Aset Tetap menjadi akun Aset Lainnya.

Dalam hal terdapat perbaikan hasil IP tahun 2017-2018 terhadap BMN dengan kondisi tersebut, pencatatan koreksi hasil IP dapat dilakukan melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN sebagaimana dijelaskan dalam huruf a di atas. Namun demikian, terdapat beberapa prosedur tambahan yang wajib dilakukan oleh satker sebelum dan setelah melakukan pengunggahan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN, sebagai berikut:

- 1) Lakukan *backup* data Aplikasi SIMAK BMN.
- 2) Untuk BMN objek IP yang memiliki transaksi lanjutan berupa penghentian dari penggunaan operasional pemerintah sehingga saat ini disajikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca, dan akan dilakukan perbaikan hasil IP tahun 2017-2018, satker agar melakukan reklasifikasi kembali dari Aset Lainnya ke Aset Tetap melalui menu Transaksi BMN >> Penggunaan Kembali BMN yang Dihentikan pada Aplikasi SIMAK BMN.
- 3) Lakukan prosedur pencatatan koreksi hasil IP tahun 2017-2018 melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN sebagaimana dijelaskan dalam huruf a di atas.
- 4) Penerimaan ADK dalam rangka perbaikan hasil IP atas BMN dengan transaksi lanjutan berupa penghentian dari penggunaan operasional pemerintah tidak dilakukan secara terpisah dari BMN dengan transaksi lanjutan yang lain, karena ADK yang dihasilkan oleh Aplikasi SIMAN tidak diklasifikasikan berdasarkan jenis transaksi lanjutan.
- 5) Setelah penerimaan ADK serta proses perhitungan koreksi hasil IP beserta transaksi lanjutan berhasil dilakukan, satker agar mereklasifikasi kembali BMN dimaksud ke Aset Lainnya melalui menu Transaksi BMN >> Penghentian BMN dari Penggunaan pada Aplikasi SIMAK BMN.
- 6) Lakukan verifikasi data dan laporan sebelum dan setelah perekaman koreksi transaksi transfer masuk, reklasifikasi masuk, dan input normalisasi, antara lain melalui pengecekan daftar dan/atau laporan terkait, serta jurnal kiriman yang terbentuk.

f

- 7) Selanjutnya, satker melakukan pengiriman data dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SIMAN dalam rangka sinkronisasi data. Sinkronisasi data merupakan salah satu prosedur untuk memastikan bahwa seluruh perbaikan hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya telah berhasil diproses pada Aplikasi SIMAK BMN.
- 8) Lakukan pengiriman data dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA, dan pastikan bahwa saldo pos-pos terkait BMN antara Aplikasi SIMAK BMN dengan Aplikasi SAIBA telah sama.

JENIS TRANSAKSI DAN JURNAL KIRIMAN TERKAIT TRANSAKSI PERBAIKAN HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI BMN TAHUN 2017-2018 BESERTA PERBAIKANNYA

Perbaikan hasil IP tahun 2017-2018 menghasilkan jenis transaksi serta jurnal kiriman yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi atau perbaikan yang dilakukan terhadap BMN tersebut serta transaksi lanjutan yang terjadi setelah tanggal transaksi IP. Jenis transaksi terkait perbaikan IP antara lain terdiri dari:

1. Barang Berlebih Hasil Inventarisasi (120)
2. Koreksi BMN Berlebih Hasil Inventarisasi (130)
3. Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi (321)
4. Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi (121)
5. Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi (221)
6. Koreksi Kuantitas Hasil Inventarisasi (222)
7. Koreksi IP atas BMN Tidak Ditemukan (229)
8. BMN Ditemukan Kembali (237)
9. Koreksi Transfer Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 (232)
10. Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 (240)
11. Koreksi Input Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 (241)
12. Koreksi Transfer Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 224 (242)
13. Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 224 (243)
14. Koreksi Input Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali 224 (244)
15. Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi penilaian Kembali (245)
16. Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (205)
17. Koreksi Penilaian Kembali BMN (224)
18. Koreksi Kesalahan Input IP (225)

Beberapa transaksi terkait IP di atas telah tersedia pada Aplikasi SIMAK BMN sejak pelaksanaan IP tahun 2017-2018 serta koreksi IP tahun 2018. Penjelasan mengenai beberapa menu di atas telah dituangkan dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8117/PB/2017 tanggal 18 September 2017 hal Rilis *Update* Aplikasi dan Referensi SIMAK-BMN Tingkat Satker Versi 17.0 serta Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-7529/PB.6/2018 tanggal 28 September 2018 hal Rilis *Update* Aplikasi Persediaan Versi 18.1, Aplikasi SIMAK BMN Versi 18.2, dan Aplikasi SAIBA Versi 5.2. Namun demikian, penggunaan menu-menu di atas dilakukan melalui perekaman secara manual.

f

Dalam rangka pencatatan dan penyajian hasil IP tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam laporan keuangan tahun 2019, telah dilakukan penyesuaian di mana sebagian besar menu di atas tidak lagi memerlukan perekaman secara manual, melainkan melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN.

Jenis transaksi perbaikan hasil IP yang dicatat melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN antara lain terdiri dari:

1. BMN Berlebih (Transaksi 120)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat barang yang secara hak merupakan aset suatu satker namun karena satu dan lain hal belum pernah dicatat dalam laproan BMN dan/atau laporan keuangan. Jenis transaksi ini digunakan atas BMN objek IP dengan LHIP baru (bukan LHIP perbaikan/revisi) yang diterbitkan pada periode yang sama dengan tanggal pembukuan hasil IP (semester II tahun 2019).

Transaksi ini membentuk jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal untuk mencatat BMN dengan nilai wajar hasil IP			

2. Koreksi BMN Berlebih (Transaksi 130)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat BMN berlebih dalam LHIP tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2019, namun hasil IP tersebut belum dicatat dalam laporan BMN dan/atau laporan keuangan sampai dengan semester II tahun 2019. Jenis transaksi ini digunakan atas BMN objek IP dengan LHIP baru maupun LHIP revisi yang diterbitkan pada periode sebelum tanggal transaksi perbaikan/koreksi hasil IP.

Transaksi ini dapat membentuk jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal untuk mencatat aset tetap dengan nilai wajar hasil IP			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal untuk mencatat penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal untuk mencatat penyusutan tahun anggaran yang lalu			

f

3. Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (205)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat nilai wajar hasil IP dengan LHIP baru yang diterbitkan pada periode yang sama dengan tanggal buku koreksi IP.

Transaksi ini dapat membentuk jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Revaluasi Aset Tetap		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi tambah nilai BMN berdasarkan LHIP			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Revaluasi Aset Tetap	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi kurang nilai BMN berdasarkan LHIP			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Revaluasi Aset Tetap		999.999.999	LPE
Jurnal untuk mengeliminasi akumulasi penyusutan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Revaluasi Aset Tetap	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Jurnal semu untuk menyesuaikan nilai aset menjadi nilai buku			

4. Koreksi Penilaian Kembali (Transaksi 224)

Jenis transaksi ini digunakan untuk melakukan perekaman nilai wajar hasil IP tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2019, namun hasil IP tersebut belum pernah dilakukan pencatatan sampai dengan semester II tahun 2019. Jenis transaksi ini digunakan atas BMN objek IP dengan LHIP baru maupun LHIP revisi yang diterbitkan pada periode sebelum tanggal perbaikan/koreksi IP.

Transaksi ini membentuk jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Revaluasi Aset Tetap		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi tambah nilai BMN			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Revaluasi Aset Tetap	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi kurang nilai BMN			

f

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Revaluasi Aset Tetap		999.999.999	LPE
Jurnal untuk mengeliminasi akumulasi penyusutan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Revaluasi Aset Tetap	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi semu untuk menurunkan nilai aset menjadi nilai buku			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah penyusutan tahun anggaran yang lalu			

5. Koreksi Kesalahan Input IP (Transaksi 225)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat koreksi nilai wajar hasil IP tahun 2017-2018 yang sebelumnya telah direkam, namun belum tepat nilainya. Jenis transaksi ini digunakan atas BMN objek IP dengan LHIP baru maupun LHIP revisi yang telah terbit pada periode sebelum tanggal transaksi perbaikan/koreksi hasil IP.

Transaksi ini dapat membentuk jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Revaluasi Aset Tetap		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi tambah nilai BMN sesuai LHIP revisi			

h

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Revaluasi Aset Tetap	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi kurang nilai BMN sesuai LHIP revisi			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

6. Koreksi IP atas BMN Tidak Ditemukan (Transaksi 229)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mengeliminasi koreksi hasil IP yang sebelumnya telah dicatat dengan jenis transaksi 205, 224, dan/atau 225, namun pada hakikatnya BMN tersebut tidak ditemukan. Jenis transaksi ini digunakan atas BMN dengan LHIP yang diterbitkan pada tahun 2017-2018 dan telah ditindaklanjuti dengan pencatatan, kemudian diterbitkan LHIP revisi yang menyatakan bahwa BMN tersebut tidak ditemukan.

Transaksi ini mengeliminasi hasil IP yang sebelumnya telah dicatat serta memberi *flag* atau penanda bahwa BMN tersebut teridentifikasi sebagai BMN tidak ditemukan. Namun demikian, transaksi ini tidak serta merta menghapus BMN dari daftar dan/atau laporan BMN.

Transaksi ini dapat membentuk jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Revaluasi Aset Tetap		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi apabila hasil IP sebelumnya mengurangi nilai aset			

f

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Revaluasi Aset Tetap	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi apabila hasil IP sebelumnya menambah nilai aset			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Revaluasi Aset Tetap	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi untuk mengembalikan nilai akumulasi penyusutan yang dieliminasi pada saat dilakukan perekaman nilai wajar hasil IP			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Revaluasi Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Jurnal untuk membalik koreksi semu yang terbentuk pada saat dilakukan perekaman nilai wajar hasil IP			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah penyusutan tahun anggaran yang lalu			

7. Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi (321)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat reklasifikasi keluar BMN sehubungan dengan pelaksanaan IP.

R

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		999.999.999	LPE

8. Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi (121)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat transaksi reklasifikasi masuk BMN sehubungan dengan pelaksanaan IP.

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		999.999.999	LPE
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca

9. Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi (221)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat BMN yang selama ini telah dibukukan namun dalam pelaksanaan IP barang tersebut secara fisik tidak ditemukan keberadaannya. Perekaman melalui menu ini tidak serta merta menghapus BMN dari pembukuan, namun hanya mengidentifikasi BMN yang tidak ditemukan fisiknya. Dengan demikian, pencatatan pada menu ini tidak membentuk jurnal dan tidak berdampak pada nilai BMN.

10. Koreksi Kuantitas Hasil Inventarisasi (222)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat perubahan kuantitas BMN sehubungan dengan pelaksanaan IP. Transaksi ini digunakan atas BMN tertentu yang secara karakteristik dapat berubah kuantitasnya, seperti tanah, jalan, dan jembatan. Transaksi ini tidak menghasilkan jurnal dan tidak berdampak pada nilai BMN.

11. BMN Ditemukan Kembali (237)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat koreksi hasil IP atas BMN yang sebelumnya tidak ditemukan pada saat pelaksanaan IP dan telah dicatat sebagai barang tidak ditemukan (221), namun saat ini BMN tersebut ditemukan kembali dan telah dilakukan IP. Transaksi ini merupakan transaksi penanda bahwa BMN yang sebelumnya tidak ditemukan berubah statusnya menjadi BMN ditemukan. Transaksi ini tidak menghasilkan jurnal, namun demikian transaksi ini memicu terbentuknya transaksi Koreksi Penilaian Kembali BMN (224) secara

otomatis, untuk mencatat nilai wajar hasil IP sesuai LHIP revisi. Apabila satker telah melakukan reklasifikasi atas BMN tersebut menjadi Aset Lainnya dikarenakan pada saat pelaksanaan IP BMN dimaksud tidak ditemukan, satker agar melakukan reklasifikasi menjadi Aset Tetap kembali sebelum melakukan pencatatan koreksi hasil IP.

12. Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali (245)

Jenis transaksi ini digunakan untuk mencatat koreksi hasil IP atas BMN yang sebelumnya telah dicatat sebagai barang berlebih (120 atau 130).

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang nilai aset			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang penyusutan tahun anggaran berjalan			

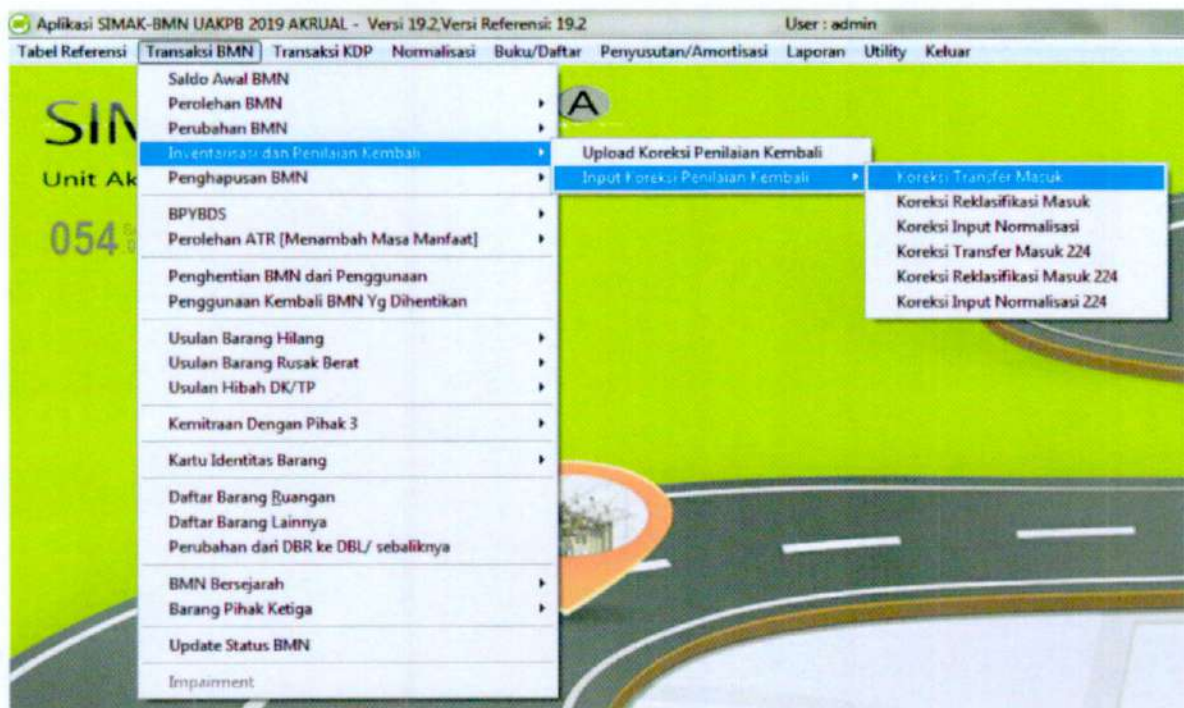
Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO

Akumulasi Penyusutan	999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah penyusutan tahun anggaran berjalan		

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Jenis transaksi perbaikan hasil IP yang direkam secara manual oleh satker melalui menu Transaksi BMN >> Input Koreksi Penilaian Kembali terdiri dari:

1. Koreksi Transfer Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 (241)



Handwritten signature or mark.

Aplikasi SIMAK-BMN UAKPB 2019 AKRUAL - Versi 19.2, Versi Referensi 19.2 User : admin

Tabel Referensi Transaksi BMN Transaksi KDP Normalisasi Buku/Daftar Penyusutan/Amortisasi Laporan Utility Keluar

SIMAK BMN A

TRANSAKSI KOREKSI TRANSFER MASUK AKIBAT PENILAIAN KEMBALI BMN

Nomor: 10419 1 Unit Akuntansi: Kuasa Pengguna Barang

RINCIAN ASET	
Kode Aset	[Dropdown]
Nomor Urut Pendaftaran	
Awal 0 Akhir 0	
Tgl. Perolehan	--
Nomor LHIP	[Input]
Tanggal LHIP	--
Nilai Wajar	[Input]

RINCIAN PEROLEHAN	
Tanggal Pembukuan	--
Dasar Harga	<input checked="" type="radio"/> Perolehan <input type="radio"/> Taksiran

RINCIAN KAPITAL ISASI	
Kuantitas	[Input] 0
Nilai Aset	[Input] 0
Revaluasi Awal	[Input] 0
Revaluasi Baru	[Input] 0
Nilai Penyusutan	[Input] 0

Penambahan Masa Manfaat	
Semester	0
Penambahan Masa Manfaat	0
Nilai Masa Manfaat	0
penambahan	0
Total	0

Tgl Revisi [Input] User ID [Input]

Simpan Batal Keluar

Submenu ini digunakan untuk mencatat koreksi atas BMN objek IP yang diperoleh dari transaksi transfer masuk, di mana BMN tersebut telah dilakukan IP pada satker pengirim transfer.

Pada kondisi ini, satker pengirim transfer sebelumnya telah mencatat hasil IP berdasarkan LHIP awal dengan transaksi 205, 224, dan/atau 225. Selanjutnya, diterbitkan LHIP revisi sehingga satker pengirim transfer melakukan pencatatan perbaikan/koreksi hasil IP dengan jenis transaksi 225 melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN.

Menindaklanjuti koreksi hasil IP yang dilakukan oleh satker pengirim transfer, satker penerima transfer mencatat perbaikan koreksi hasil IP melalui perekaman manual melalui submenu ini, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kode aset dipilih sesuai kodefikasi BMN yang ditransfer masuk.
- NUP diisi sesuai NUP BMN baru hasil transfer masuk.
- Tanggal pembukuan diisi 31 Desember 2019.
- Revaluasi awal diisi dengan nilai wajar hasil IP sesuai LHIP awal.
- Revaluasi baru diisi dengan nilai wajar hasil IP sesuai LHIP revisi.
- Nilai penyusutan diisi dengan koreksi nilai akumulasi penyusutan yang ditransfer masuk. Nilai ini diperoleh dari nilai koreksi akumulasi penyusutan yang ditransfer keluar, yang tercantum dalam Histori BMN pada satker pengirim transfer. Nilai tersebut dapat diidentifikasi dengan menjumlahkan nilai penyusutan transaksional (S03) bersaldo minus yang tercantum dalam Histori BMN satker pengirim transfer, yang terjadi pada tanggal pembukuan

f

transaksi Koreksi Transfer Keluar akibat perekaman koreksi penilaian kembali (225).

NAMA UAPKPS : 011.01.00.403732.000 403732

Kode Lap : L06MHS

BUN SUB KELOMPOK BARANG		NSIP	SAT	TGL. BUKU2	DIB. TRN	URAIAN TRANSAKSI	TGL. ORJH	BERCATAT	KORREKSI-NO KB	NILAI
KODE	URAIAN									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.01.02.01.001	Transferan Dulu Jalan Nasional Aspal	1	M2	02 07 2017	100	Suku Aspal	08-07-2012	TRH		999.000,000
5.01.02.01.001	Transferan Dulu Jalan Nasional Aspal	1	M2	02 07 2017	348	Depresiasi Akumulasi Transmisional	--			-8.000,000
5.01.02.01.001	Transferan Dulu Jalan Nasional Aspal	1	M2	03 07 2017	348					-41.000,000
5.01.02.01.001	Transferan Dulu Jalan Nasional Aspal	1	M2	10 10 2017	204	Koreksi Nilai Tim Description Asst	08-07-2012	TRH		999.000,000
5.01.02.01.001	Transferan Dulu Jalan Nasional Aspal	1	M2	10 10 2017	223	Koreksi Sewa/Hari Denda/Kasir Kaca/E				-40.000,000
5.01.02.01.001	Transferan Dulu Jalan Nasional Aspal	1	M2	10 10 2017	348	Depresiasi Akumulasi Transmisional	--			90.000,000
5.01.02.01.001	Transferan Dulu Jalan Nasional Aspal	1	M2	11 12 2017	302	Depresiasi Akumulasi Rigiditas Sewa/rent				-18.999,999
5.01.02.01.001	Transferan Dulu Jalan Nasional Aspal	1	M2	10 08 2018	302					-18.999,999
5.01.02.01.001	Transferan Dulu Jalan Nasional Aspal	1	M2	11 12 2018	302					-18.999,999
5.01.02.01.001	Transferan Dulu Jalan Nasional Aspal	1	M2	03 08 2019	302	Transfer Keluar	08-07-2012	TRH		-1.500.000,000
5.01.02.01.001	Transferan Dulu Jalan Nasional Aspal	1	M2	03 08 2019	302	Depresiasi Akumulasi Transmisional	--			10.000,000
5.01.02.01.001	Transferan Dulu Jalan Nasional Aspal	1	M2	12 12 2019	223	Koreksi/Kumulatif Input DP	08-07-2012	TRH		300.000,000
5.01.02.01.001	Transferan Dulu Jalan Nasional Aspal	1	M2	13 12 2019	302	Koreksi/Transfer Keluar mas 224				-500.000,000
5.01.02.01.001	Transferan Dulu Jalan Nasional Aspal	1	M2	13 12 2019	308	Depresiasi Akumulasi Transmisional	--			-1.015.139
5.01.02.01.001	Transferan Dulu Jalan Nasional Aspal	1	M2	13 12 2019	308					-1.015.139
5.01.02.01.001	Transferan Dulu Jalan Nasional Aspal	1	M2	13 12 2019	308					-1.015.139
5.01.02.01.001	Transferan Dulu Jalan Nasional Aspal	1	M2	12 12 2019	308					1.015.139
5.01.02.01.001	Transferan Dulu Jalan Nasional Aspal	1	M2	12 12 2019	308					1.015.139
5.01.02.01.001	Transferan Dulu Jalan Nasional Aspal	1	M2	13 12 2019	308					1.015.139
										0
										0

g. Nomor dan tanggal LHIP diisi dengan nomor dan tanggal LHIP awal.

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Transfer Masuk		999.999.999	LPE
Transfer Masuk	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca

Jurnal koreksi tambah nilai aset yang ditransfer dalam hal transaksi transfer masuk terjadi pada tahun anggaran berjalan

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Transfer Masuk	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Transfer Masuk		999.999.999	LPE

Jurnal koreksi kurang nilai aset yang ditransfer dalam hal transaksi transfer masuk terjadi pada tahun anggaran berjalan

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca

Jurnal koreksi tambah nilai aset yang ditransfer dalam hal transaksi transfer masuk terjadi pada tahun anggaran yang lalu

R

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang ditransfer dalam hal transaksi transfer masuk terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

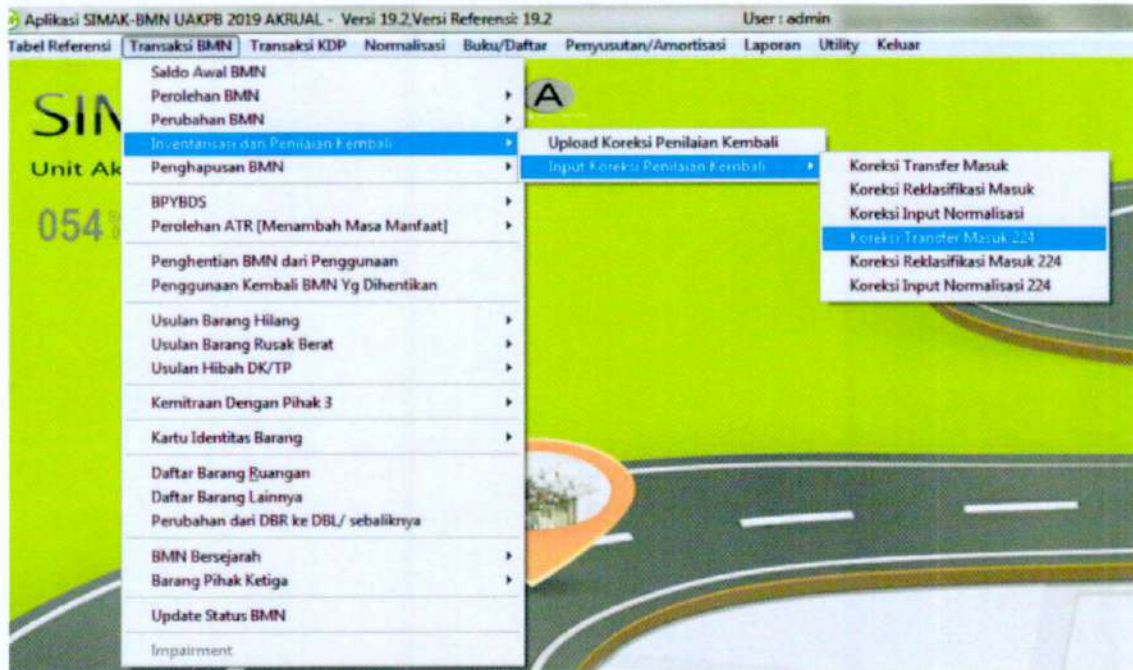
Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	Beban
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			

R

2. Koreksi Transfer Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 224 (242)



Submenu ini digunakan untuk mencatat koreksi atas BMN objek IP yang diperoleh dari transaksi transfer masuk, di mana BMN tersebut telah dilakukan IP pada satker pengirim transfer, dengan LHIP yang diterbitkan pada tahun 2017 sampai dengan semester I tahun 2019.

f

Pada kondisi ini, satker pengirim transfer belum mencatat hasil IP berdasarkan LHIP awal. Selanjutnya, diterbitkan LHIP revisi sehingga satker pengirim transfer melakukan pencatatan hasil IP tersebut dengan transaksi 224 melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN.

Menindaklanjuti koreksi hasil IP yang dilakukan oleh satker pengirim transfer, satker penerima transfer mencatat perbaikan koreksi hasil IP melalui perekaman manual melalui submenu ini, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kode aset dipilih sesuai kodefikasi BMN yang ditransfer masuk.
- NUP diisi sesuai NUP BMN baru hasil transfer masuk.
- Tanggal pembukuan diisi 31 Desember 2019.
- Nilai perolehan saat LHIP diisi dengan nilai BMN sesaat sebelum transaksi IP awal (nilai BMN sebelum LHIP awal).
- Nilai wajar diisi dengan nilai wajar hasil IP sesuai LHIP revisi.
- Nilai penyusutan diisi dengan koreksi nilai akumulasi penyusutan yang ditransfer masuk. Nilai ini diperoleh dari nilai koreksi akumulasi penyusutan yang ditransfer keluar, yang tercantum dalam Histori BMN pada satker pengirim transfer. Nilai tersebut dapat diidentifikasi dengan melihat nilai transaksi 226 (Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil Revaluasi) dalam Histori BMN satker pengirim transfer, yang terjadi pada tanggal pembukuan transaksi Koreksi Transfer Keluar.

SUB-SUB KELOMPOK BARANG										
KODE	URAIAN	NUP	SAT	TGL BUKU	NSB IKY	URAIAN TRANSAKSI	TGL OLJH	BERCATAT	KODE RUANG/NO KB	NEAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.02.08.002	Transfer ke Denda Jalan Nasional Kabupaten	1	M2	02-01-2017	100	Saleh Awai	08-07-2012	DBL		900.000,000
1.01.02.08.002	Transfer ke Denda Jalan Nasional Kabupaten	1	M2	03-07-2017	500	Perbaikan Asuransi Transmigrasi	--			-9.000,000
1.01.02.08.002	Transfer ke Denda Jalan Nasional Kabupaten	1	M2	03-07-2017	500					-81.000,000
1.01.02.08.002	Transfer ke Denda Jalan Nasional Kabupaten	1	M2	31-12-2017	500	Perbaikan Asuransi Reguler Transmigrasi				-9.000,000
1.01.02.08.002	Transfer ke Denda Jalan Nasional Kabupaten	1	M2	20-08-2018	500					-9.000,000
1.01.02.08.002	Transfer ke Denda Jalan Nasional Kabupaten	1	M2	31-12-2018	500					-9.000,000
1.01.02.08.002	Transfer ke Denda Jalan Nasional Kabupaten	1	M2	30-09-2019	500					-9.000,000
1.01.02.08.002	Transfer ke Denda Jalan Nasional Kabupaten	1	M2	10-10-2019	500	Transfer Keluar	08-07-2012	DBL		-900.000,000
1.01.02.08.002	Transfer ke Denda Jalan Nasional Kabupaten	1	M2	10-10-2019	500	Perbaikan Asuransi Transmigrasi	--			111.000,000
1.01.02.08.002	Transfer ke Denda Jalan Nasional Kabupaten	1	M2	10-10-2019	500					9.000,000
1.01.02.08.002	Transfer ke Denda Jalan Nasional Kabupaten	1	M2	31-12-2019	220	Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil Revaluasi	08-07-2012	DBL		-99.000,000
1.01.02.08.002	Transfer ke Denda Jalan Nasional Kabupaten	1	M2	31-12-2019	221	Koreksi Transfer Keluar atas DPA				-1.040.000,000
1.01.02.08.002	Transfer ke Denda Jalan Nasional Kabupaten	1	M2	31-12-2019	221					90.000,000
1.01.02.08.002	Transfer ke Denda Jalan Nasional Kabupaten	1	M2	31-12-2019	224	Koreksi Perbaikan Kuebel BDN				1.040.000,000
1.01.02.08.002	Transfer ke Denda Jalan Nasional Kabupaten	1	M2	31-12-2019	500	Perbaikan Asuransi Transmigrasi	--			-99.000,000
1.01.02.08.002	Transfer ke Denda Jalan Nasional Kabupaten	1	M2	31-12-2019	500					18.223,222
1.01.02.08.002	Transfer ke Denda Jalan Nasional Kabupaten	1	M2	31-12-2019	500					18.223,222
1.01.02.08.002	Transfer ke Denda Jalan Nasional Kabupaten	1	M2	31-12-2019	500					-18.223,222
1.01.02.08.002	Transfer ke Denda Jalan Nasional Kabupaten	1	M2	31-12-2019	500					-18.223,222
1.01.02.08.002	Transfer ke Denda Jalan Nasional Kabupaten	1	M2	31-12-2019	500					-18.223,222
1.01.02.08.002	Transfer ke Denda Jalan Nasional Kabupaten	1	M2	31-12-2019	500					-18.223,222
1.01.02.08.002	Transfer ke Denda Jalan Nasional Kabupaten	1	M2	31-12-2019	500					18.223,222
1.01.02.08.002	Transfer ke Denda Jalan Nasional Kabupaten	1	M2	31-12-2019	500					18.223,222
1.01.02.08.002	Transfer ke Denda Jalan Nasional Kabupaten	1	M2	31-12-2019	500					90.000,000

g. Nomor dan tanggal LHIP diisi dengan nomor dan tanggal LHIP awal.

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Transfer Masuk		999.999.999	LPE
Transfer Masuk	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset yang ditransfer dalam hal transaksi transfer masuk terjadi pada tahun anggaran berjalan			

f

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Transfer Masuk	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Transfer Masuk		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang ditransfer dalam hal transaksi transfer masuk terjadi pada tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset yang ditransfer dalam hal transaksi transfer masuk terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang ditransfer dalam hal transaksi transfer masuk terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

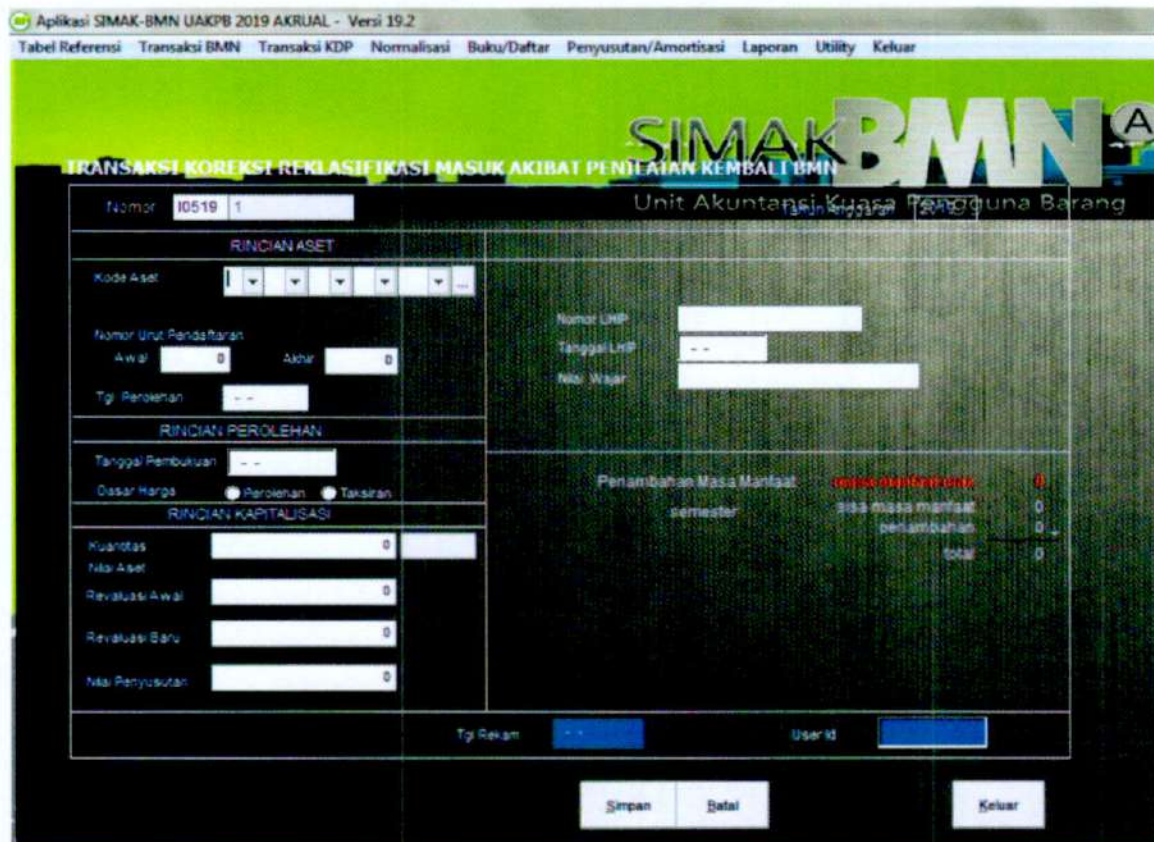
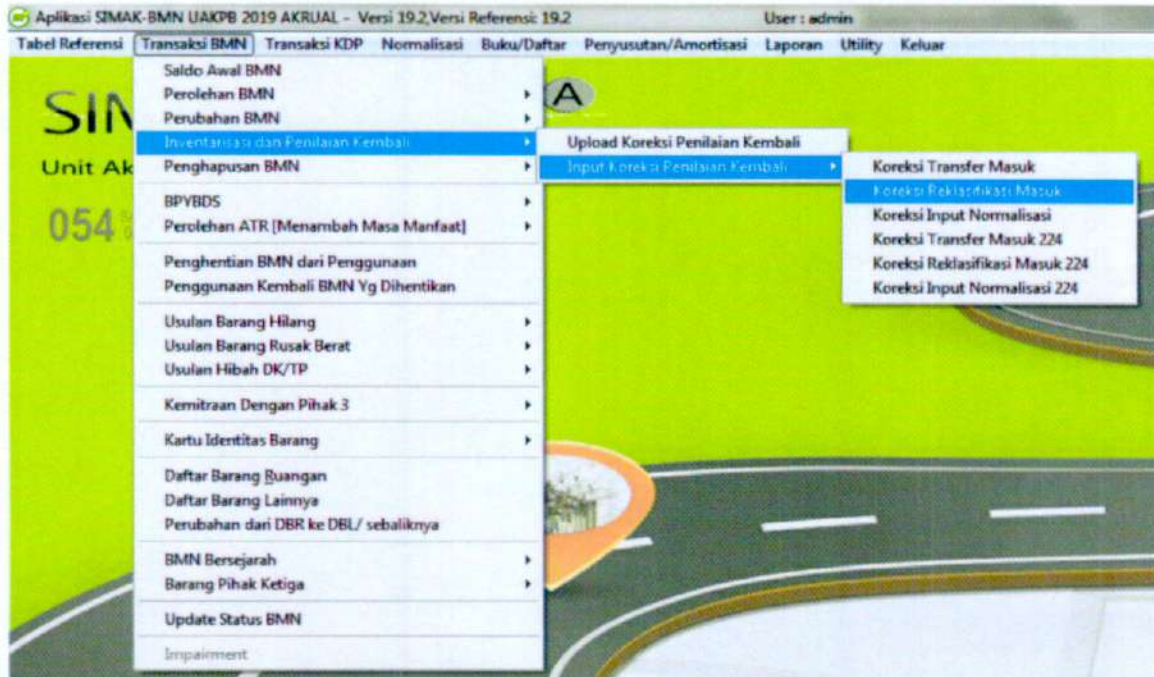
Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu		

3. Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 (240)



R

Submenu ini digunakan untuk mencatat koreksi IP atas BMN objek IP yang diperoleh dari transaksi reklasifikasi masuk, di mana BMN tersebut telah dilakukan IP.

Pada kondisi ini, BMN lama (NUP dan/atau kodefikasi lama) telah dilakukan IP dan telah dicatat hasil IP-nya dengan transaksi 205 atau 224. Selanjutnya, terbit LHIP revisi sehingga atas BMN lama tersebut dilakukan pencatatan perbaikan/koreksi IP dengan transaksi 225 melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN.

Menindaklanjuti koreksi hasil IP yang dilakukan terhadap BMN lama, perlu dilakukan pencatatan perbaikan koreksi hasil IP terhadap BMN baru (NUP dan/atau kodefikasi baru) melalui perekaman manual melalui submenu ini, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kode aset dipilih sesuai kodefikasi BMN yang direklasifikasi masuk.
- b. NUP diisi sesuai NUP BMN baru hasil reklasifikasi masuk.
- c. Tanggal pembukuan diisi 31 Desember 2019.
- d. Nilai perolehan saat LHIP diisi dengan nilai BMN sesaat sebelum transaksi IP awal (nilai BMN sebelum LHIP awal).
- e. Nilai wajar diisi dengan nilai wajar hasil IP sesuai LHIP revisi.
- f. Nilai penyusutan diisi dengan koreksi nilai akumulasi penyusutan yang direklasifikasi masuk. Nilai ini diperoleh dari nilai koreksi akumulasi penyusutan yang direklasifikasi keluar, yang tercantum dalam Histori BMN lama. Nilai tersebut dapat diidentifikasi dengan menjumlahkan nilai penyusutan transaksional (S03) bersaldo minus yang tercantum dalam Histori BMN lama, yang terjadi pada tanggal pembukuan transaksi Koreksi Reklasifikasi Keluar akibat perekaman koreksi penilaian kembali (225).

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		999.999.999	LPE
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset yang direklasifikasi dalam hal transaksi reklasifikasi terjadi pada tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		999.999.999	LPE

Jurnal koreksi kurang nilai aset yang direklasifikasi dalam hal transaksi reklasifikasi terjadi pada tahun anggaran berjalan

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca

Jurnal koreksi tambah nilai aset yang direklasifikasi dalam hal transaksi reklasifikasi terjadi pada tahun anggaran yang lalu

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE

Jurnal koreksi kurang nilai aset yang direklasifikasi dalam hal transaksi reklasifikasi terjadi pada tahun anggaran yang lalu

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca

Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	Beban

Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran berjalan

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca

Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE

Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu

a

4. Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 224 (243)



Submenu ini digunakan untuk mencatat koreksi IP atas BMN objek IP yang diperoleh dari transaksi reklasifikasi masuk, di mana BMN tersebut telah dilakukan IP.

R

Pada kondisi ini, BMN lama (NUP dan/atau kodefikasi lama) telah dilakukan IP namun belum dicatat hasil IP-nya. Selanjutnya, terbit LHIP revisi sehingga atas BMN lama tersebut dilakukan pencatatan hasil IP dengan transaksi 224 melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN.

Menindaklanjuti koreksi hasil IP yang dilakukan terhadap BMN lama, perlu dilakukan pencatatan perbaikan koreksi hasil IP terhadap BMN baru (NUP dan/atau kodefikasi baru) melalui perekaman manual melalui submenu ini, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kode aset dipilih sesuai kodefikasi BMN yang direklasifikasi masuk.
- b. NUP diisi sesuai NUP BMN baru hasil reklasifikasi masuk.
- c. Tanggal pembukuan diisi 31 Desember 2019.
- d. Nilai perolehan saat LHIP diisi dengan nilai BMN sesaat sebelum transaksi IP awal (nilai BMN sebelum LHIP awal).
- e. Nilai wajar diisi dengan nilai wajar hasil IP sesuai LHIP revisi.
- f. Nilai penyusutan diisi dengan koreksi nilai akumulasi penyusutan yang direklasifikasi masuk. Nilai ini diperoleh dari nilai koreksi akumulasi penyusutan yang direklasifikasi keluar, yang tercantum dalam Histori BMN lama. Nilai tersebut dapat diidentifikasi dengan melihat nilai transaksi 226 (Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil Revaluasi) yang tercantum dalam Histori BMN lama, yang terjadi pada tanggal pembukuan transaksi Koreksi Reklasifikasi Keluar akibat perekaman koreksi penilaian kembali (224).

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		999.999.999	LPE
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset yang direklasifikasi dalam hal transaksi reklasifikasi terjadi pada tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang direklasifikasi dalam hal transaksi reklasifikasi terjadi pada tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset yang direklasifikasi dalam hal transaksi reklasifikasi terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang direklasifikasi dalam hal transaksi reklasifikasi terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

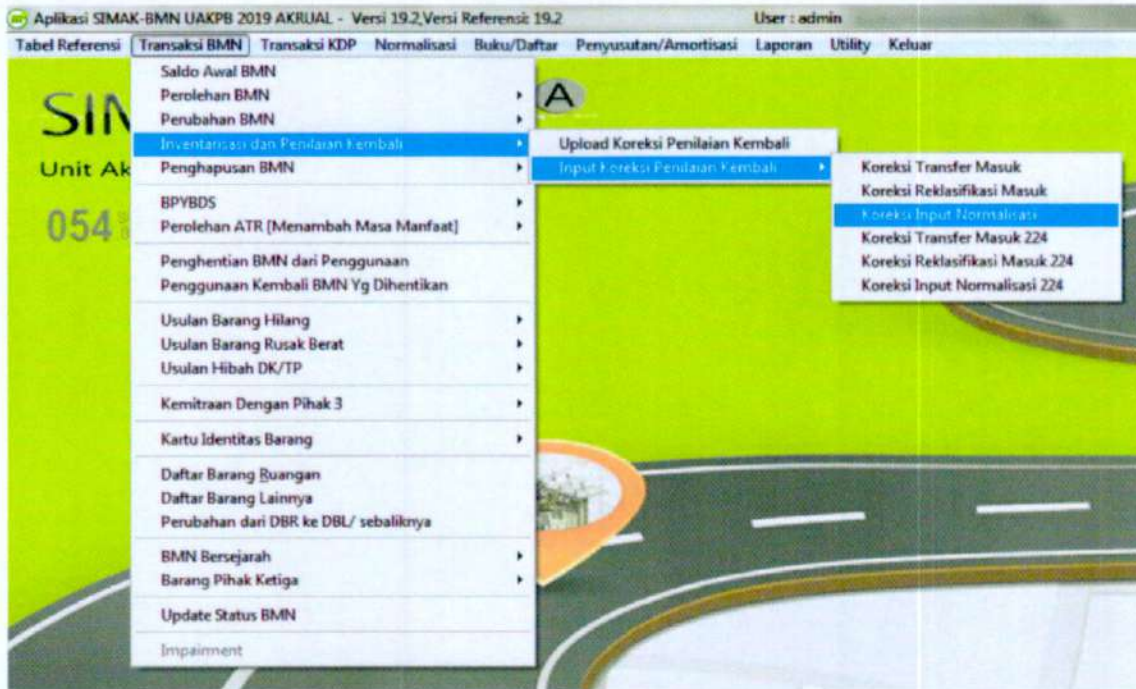
Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	Beban
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			

a

5. Koreksi Input Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225 (241)



R

Submenu ini digunakan untuk mencatat koreksi IP atas BMN objek IP yang diperoleh dari transaksi input normalisasi, di mana BMN tersebut telah dilakukan IP.

Pada kondisi ini, BMN lama (NUP dan/atau kodefikasi lama) telah dilakukan IP dan telah dicatat hasil IP-nya dengan transaksi 205 atau 224. Selanjutnya, terbit LHIP revisi sehingga atas BMN lama tersebut dilakukan pencatatan perbaikan/koreksi IP dengan transaksi 225 melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN.

Menindaklanjuti koreksi hasil IP yang dilakukan terhadap BMN lama, perlu dilakukan pencatatan perbaikan koreksi hasil IP terhadap BMN baru (NUP dan/atau kodefikasi baru) melalui perekaman manual melalui submenu ini, dengan penjelasan:

- a. Kode aset dipilih sesuai kodefikasi BMN yang di-input normalisasi.
- b. NUP diisi sesuai NUP BMN baru hasil input normalisasi.
- c. Tanggal pembukuan diisi 31 Desember 2019.
- d. Revaluasi awal diisi dengan nilai wajar berdasarkan LHIP awal.
- e. Revaluasi baru diisi dengan nilai wajar berdasarkan LHIP revisi.
- f. Nilai penyusutan diisi dengan koreksi nilai akumulasi penyusutan yang di-input normalisasi. Nilai ini diperoleh dari nilai koreksi semu yang dinormalisasi, yang tercantum dalam Histori BMN lama. Nilai tersebut dapat diidentifikasi dengan menjumlahkan nilai penyusutan transaksional (S03) bersaldo minus yang tercantum dalam yang tercantum dalam Histori BMN lama, yang terjadi pada tanggal pembukuan transaksi Normalisasi akibat perekaman koreksi penilaian kembali (225).
- g. Nomor dan tanggal LHIP diisi dengan nomor dan tanggal LHIP awal.

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset yang di-input normalisasi dalam hal transaksi input normalisasi terjadi pada tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca

f

Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang di-input normalisasi dalam hal transaksi input normalisasi terjadi pada tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset yang di-input normalisasi dalam hal transaksi input normalisasi terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang di-input normalisasi dalam hal transaksi input normalisasi terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

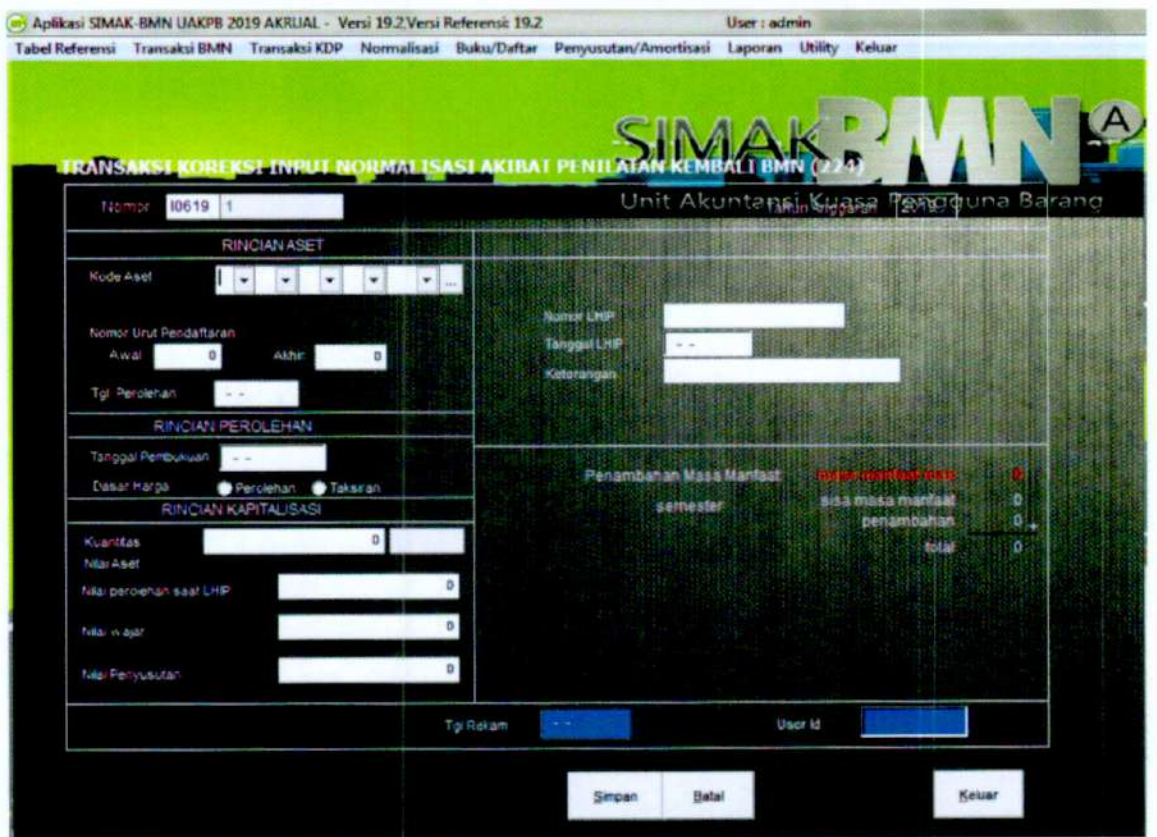
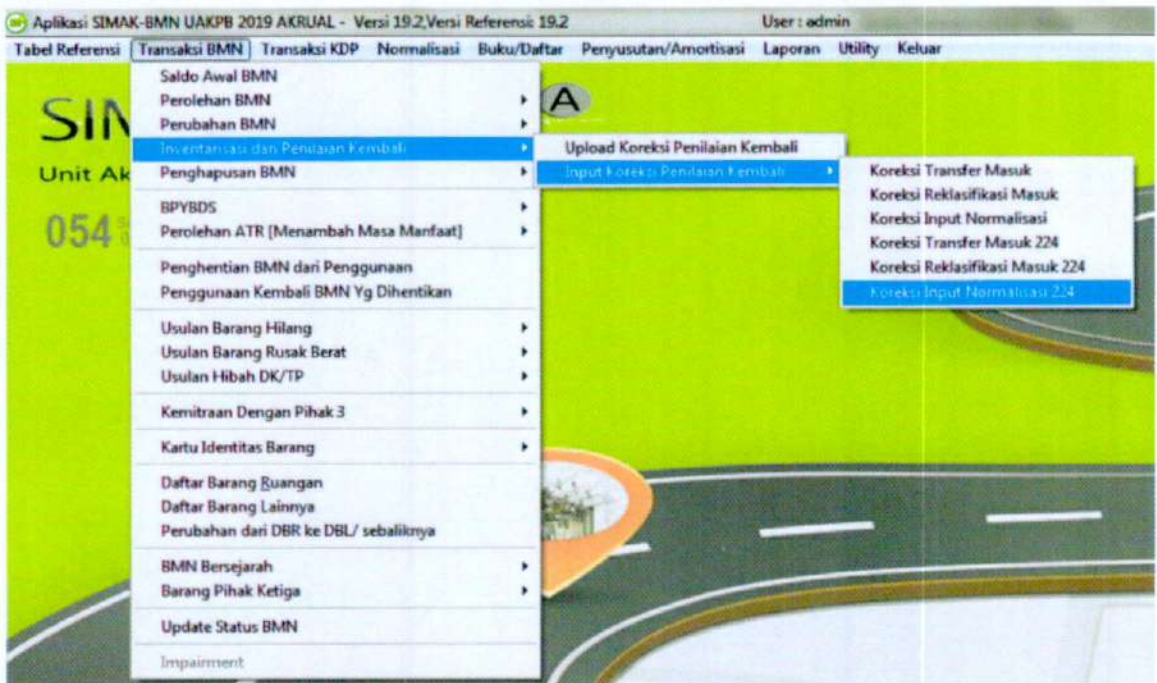
Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			

h

6. Koreksi Input Normalisasi Akibat Koreksi penilaian Kembali 224 (244)



Submenu ini digunakan untuk mencatat koreksi IP atas BMN objek IP yang diperoleh dari transaksi input normalisasi, di mana BMN tersebut telah dilakukan IP.

R

Pada kondisi ini, BMN lama (NUP dan/atau kodefikasi lama) telah dilakukan IP namun belum dicatat hasil IP-nya. Selanjutnya, terbit LHIP revisi sehingga atas BMN lama tersebut dilakukan pencatatan hasil IP dengan transaksi 224 melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN.

Menindaklanjuti koreksi hasil IP yang dilakukan terhadap BMN lama, perlu dilakukan pencatatan perbaikan koreksi hasil IP terhadap BMN baru (NUP dan/atau kodefikasi baru) melalui perekaman manual melalui submenu ini, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Kode aset dipilih sesuai kodefikasi BMN yang di-input normalisasi.
- b. NUP diisi sesuai NUP BMN baru hasil input normalisasi.
- c. Tanggal pembukuan diisi 31 Desember 2019.
- d. Nilai perolehan saat LHIP diisi dengan nilai BMN sesaat sebelum dilakukan IP (nilai BMN sebelum terbit LHIP).
- e. Nilai wajar diisi dengan nilai wajar hasil IP sesuai LHIP revisi.
- f. Nilai penyusutan diisi dengan koreksi nilai akumulasi penyusutan yang di-input normalisasi. Nilai ini diperoleh dari nilai koreksi semu yang dinormalisasi, yang tercantum dalam Histori BMN lama. Nilai tersebut dapat diidentifikasi dengan melihat nilai transaksi 226 (Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil Revaluasi) yang tercantum dalam Histori BMN lama, yang terjadi pada tanggal pembukuan transaksi Normalisasi akibat perekaman koreksi penilaian kembali (224).
- g. Nomor dan tanggal LHIP diisi dengan nomor dan tanggal LHIP awal.

Transaksi ini dapat menghasilkan jurnal berupa:

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset yang di-input normalisasi dalam hal transaksi input normalisasi terjadi pada tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang di-input normalisasi dalam hal transaksi input normalisasi terjadi pada tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Aset Tetap	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai aset yang di-input normalisasi dalam hal transaksi input normalisasi terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Aset Tetap		999.999.999	Neraca
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai aset yang di-input normalisasi dalam hal transaksi input normalisasi terjadi pada tahun anggaran yang lalu			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Beban Penyusutan	999.999.999		LO
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Beban Penyusutan		999.999.999	LO
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran berjalan			

Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	999.999.999		LPE
Akumulasi Penyusutan		999.999.999	Neraca
Jurnal koreksi tambah nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			

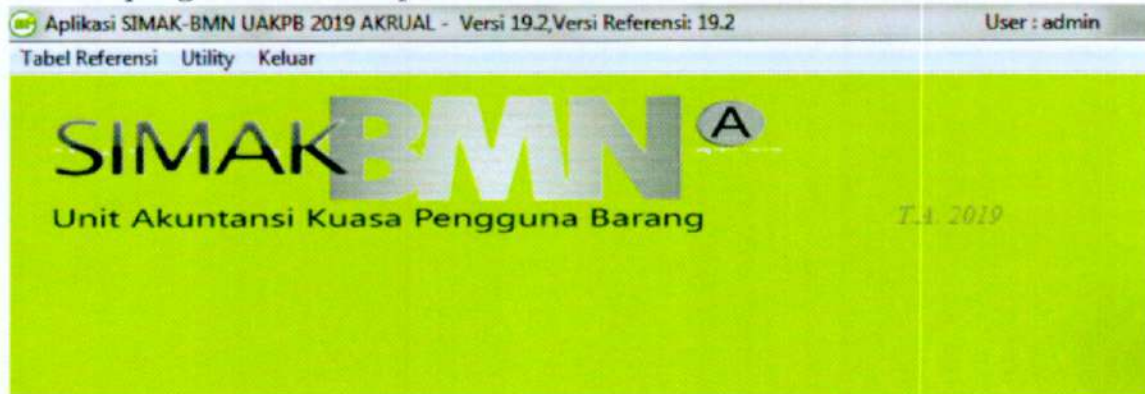
Uraian Akun	Debet	Kredit	Laporan
Akumulasi Penyusutan	999.999.999		Neraca
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		999.999.999	LPE
Jurnal koreksi kurang nilai penyusutan tahun anggaran yang lalu			

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MELAKUKAN PENCATATAN DAN PENYAJIAN KOREKSI HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN KEMBALI

1. Satker agar mengunduh dan meng-*update* Aplikasi dan Referensi SIMAK BMN versi 19.2.

f

2. Sebelum melakukan proses *update* Aplikasi dan Referensi SIMAK-BMN versi 19.2, satker agar melakukan *backup* data melalui menu *Utility* atau *copy database* SIMAK BMN (dbbmn10) ke folder lain.
3. Setelah melakukan proses *update*, pastikan bahwa proses *update* berhasil melalui pengecekan versi aplikasi dan referensi melalui *user admin*.



4. Sebelum melakukan pencatatan transaksi koreksi IP, satker agar memastikan bahwa seluruh transaksi terkait BMN yang terjadi pada tahun 2019 telah dicatat ke dalam Aplikasi SIMAK BMN.
5. Koreksi IP dibukukan sebelum penyusutan reguler semester II tahun 2019. Pastikan bahwa penyusutan reguler semester II tahun 2019 merupakan transaksi terakhir yang direkam sebagai transaksi tahun 2019.
6. Lakukan *backup* data sebelum melakukan pencatatan koreksi hasil IP, baik melalui penerimaan ADK dari Aplikasi SIMAN ke Aplikasi SIMAK BMN maupun melalui menu perekaman manual.
7. Lakukan verifikasi data dan laporan sebelum dan setelah melakukan pencatatan koreksi hasil IP, melalui pengecekan saldo BMN pada daftar dan laporan terkait serta jurnal kiriman yang terbentuk.
8. Setelah seluruh transaksi BMN tahun 2019 direkam ke Aplikasi SIMAK BMN, lakukan pengiriman data dari Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA, dilanjutkan dengan rekonsiliasi internal untuk memastikan bahwa saldo BMN antara Aplikasi SAIBA dengan Aplikasi SIMAK BMN telah sama.
9. Lakukan pengiriman data dari Aplikasi SAIBA ke Aplikasi e-Rekon&LK sesuai jadwal *open - closed period*. Pastikan bahwa proses *upload* data SIMAK BMN berhasil.
10. Dalam hal diperlukan reset BAR dalam rangka *upload* data ulang, satker dapat berkoordinasi dengan KPPN mitra kerja dan unit akuntansi di atasnya.
11. Setelah melalui periode pemutakhiran data dan laporan (periode OLAP) pada Aplikasi e-Rekon&LK, pastikan bahwa data keuangan dan BMN pada Aplikasi e-Rekon&LK telah sesuai dengan Aplikasi SAIBA dan SIMAK BMN.
12. Aplikasi SIMAK BMN versi 19.2 mencakup tambahan referensi jenis transaksi terkait koreksi hasil IP, sedangkan pada Aplikasi SAIBA versi 19.0.2 belum tersedia tambahan referensi tersebut. Dengan demikian, penerimaan ADK Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA versi 19.0.2 akan berdampak pada munculnya jenis transaksi BMN NULL pada saat dilakukan rekonsiliasi internal. Namun, hal ini dapat diabaikan untuk sementara waktu karena tidak berdampak pada salah saji laporan.

f

LAMPIRAN IV

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S- 58 /PB/2020

Tanggal : 24 Januari 2020

ILUSTRASI PENGUNGKAPAN HASIL PENILAIAN KEMBALI (REVALUASI) ASET TETAP DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

A. Latar Belakang

Pengungkapan penilaian kembali (Revaluasi) Aset Tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 merupakan penjelasan lebih lanjut atas penerapan penilaian kembali terhadap pos-pos Laporan Keuangan khususnya Neraca. Beberapa ketentuan yang menjadi latar belakang adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara /Daerah menyatakan bahwa Penilaian Kembali adalah proses revaluasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai Standar Penilaian. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa Penilaian Kembali Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Gedung dan Bangunan; dan
 - c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan meliputi Jalan dan Jembatan, dan Bangunan Air, pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup aset tetap yang dilakukan Penilaian Kembali adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan pada paragraf 42 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada paragraf 82 menyatakan bahwa jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal berikut harus diungkapkan:

- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
- c. Jika ada, nama penilai independen;
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga mengungkapkan secara memadai atas perubahan kebijakan akuntansi tersebut pada CaLK. Huruf B Lampiran ini menyajikan ilustrasi pengungkapan yang diperlukan. Kementerian Negara/Lembaga dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan karakteristik dan jenis transaksinya.

B. Ilustrasi Pengungkapan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan

1. Ilustrasi Pengungkapan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan tingkat UAKPA, UAPPA-W, dan UAPPA-E1

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

dst.....

Aset

(1) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

dst.....

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk obyek penilaian kembali selain Tanah.
- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa

kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

dst.....

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

dst.....

Tanah
Rp10.938.114.000

C. 16. Tanah

Tanah yang dimiliki Kantor Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Yogyakarta per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp10.938.114.000 dan Rp8.345.000.000. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp	8.345.000.000
Mutasi tambah:		
.....		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	2.593.114.000
.....		
Mutasi kurang		
.....		
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	10.938.114.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp	10.938.114.000

Mutasi tambah:

- Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Tanah merupakan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Tanah dari hasil koreksi/perbaikan adalah sebagai berikut:

No.	Luas	Lokasi	Selisih Nilai Revaluasi
1	2.000 m2	Jl. Tamantirto No. 23, Yogyakarta	Rp1.503.114.000
2	1.500 m2	Jl. Tirtonirmolo No. 2, Yogyakarta	Rp1.090.000.000

dst.....

Mutasi kurang:

dst.....

*Gedung dan
Bangunan
Rp24.970.000.000*

C.18 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp24.970.000.000 dan Rp22.300.000.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp	22.300.000.000
Mutasi tambah:		
.....		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	2.670.000.000
.....		
Mutasi kurang		
.....		
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	24.970.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp	(13.290.600.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp	11.679.400.000

Mutasi tambah:

- Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan merupakan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan dari hasil koreksi/perbaikan adalah sebagai berikut:

h

No.	Uraian	Selisih Nilai Revaluasi
1	Gedung A	Rp1.500.000.000
2	Gedung B	Rp1.170.000.000

dst.....

Mutasi kurang:

dst.....

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp987.000.000

C. 19 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp987.000.000 dan Rp766.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	Rp	766.000.000
Mutasi tambah:		
.....		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	221.000.000
.....		
Mutasi kurang		
Koreksi pencatatan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	987.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp	(386.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp	601.000.000

Mutasi tambah:

- Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan merupakan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018. Selisih nilai revaluasi sebesar Rp221.000.000.

dst.....

Mutasi kurang:

dst.....

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp5.484.114.000*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk tahun 2019 merupakan selisih yang muncul atas koreksi/perbaikan terhadap hasil penilaian kembali Aset Tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.484.114.000 dan Rp11.100.000.000. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut dari penilaian kembali atas Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air.

dst.....

2. Ilustrasi Pengungkapan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan tingkat UAPA

<i>Kebijakan Akuntansi</i>	A.5. Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). dst.....
<i>Aset</i>	(2) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya. dst.....
<i>Aset Tetap</i>	b. Aset Tetap <ul style="list-style-type: none">• Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.• Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.• Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.• Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah

dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan irigasi berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup obyek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian kembali dilakukan dengan survei lapangan untuk obyek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk obyek penilaian kembali selain Tanah.

- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan untuk penyempurnaan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Berdasarkan Surat Anggota BPK Nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018 dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 *Unaudited* sesuai mekanisme yang berlaku.
- Nilai Aset Tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai Aset Tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

R

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari Neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

dst.....

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

dst.....

Tanah
Rp95.008.000.000

C. 16. Tanah

Tanah yang dimiliki Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp95.008.000.000 dan Rp68.555.000.000. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp	68.555.000.000
Mutasi tambah:		
.....		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	26.453.000.000
.....		
Mutasi kurang		
.....		
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	95.008.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp	95.008.000.000

Mutasi tambah:

- Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Tanah merupakan hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018 dan hasil

perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018. Total Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp26.453.000.000. Adapun rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa tanah terdapat pada:

No.	Entitas	Selisih Nilai Revaluasi
1	Deputi Administrasi	Rp4.000.000.000
2	Deputi Akuntansi	Rp1.000.000.000
3	Sekretariat	Rp1.000.000.000
4	dst	
5	dst	

dst.....

Mutasi kurang:

dst.....

Gedung dan
Bangunan
Rp152.970.000.000

C.18 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp152.970.000.000 dan Rp142.000.000.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	Rp	142.000.000.000
Mutasi tambah:		
.....		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	10.970.000.000
.....		
Mutasi kurang		
.....		
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	152.970.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp	(63.290.600.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp	89.679.400.000

Mutasi tambah:

- Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan merupakan hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018 dan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018. Total Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp10.970.000.000. Adapun rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan terdapat pada:

No.	Entitas	Selisih Nilai Revaluasi
1	Deputi Akuntansi	Rp1.500.000.000
2	Sekretariat	Rp3.500.000.000
3	dst	
4	dst	

dst.....

Mutasi kurang:

dst.....

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp14.040.000.000

C. 19 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp14.040.000.000 dan Rp12.300.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	Rp	12.300.000.000
Mutasi tambah:		
.....		
Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	1.740.000.000
.....		
Mutasi kurang		
.....		
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	14.040.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	Rp	(4.386.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp	9.754.000.000

Mutasi tambah:

- Selisih Revaluasi Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018 dan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019 atas hasil penilaian kembali yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018. Total Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp1.740.000.000. Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan akumulasi Penyusutannya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

dst.....

Mutasi kurang:

dst.....

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp39.163.000.000*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian kembali Aset Tetap yang dilaksanakan pada semester II tahun 2018 dan hasil perbaikan/koreksi pada tahun 2019. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp39.163.000.000 dan Rp0. Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut dari penilaian kembali atas Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa Jalan, Jembatan, dan Bangunan Air.

dst.....



Jurnal Take In Revaluasi 2019 Unaudited atas Jurnal Take Out Revaluasi 2018

Nomor Akun Debet	Uraian Akun Debet	Nomor Akun Kredit	Uraian Akun Kredit	Rupiah
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	14,546,708
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	79,198,615
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	1,020,272,240
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	465,892,580
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	1,519,954
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	700,397,247
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	8,498,782
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	133111	Gedung dan Bangunan	36,261,000
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	22,039,995
391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	971,683
131111	Tanah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	8,299,143,570
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	4,178,104,794
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	134111	Jalan dan Jembatan	218,365,185
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	134112	Irigasi	103,218,366
131111	Tanah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	2,897,488,800,725
133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	119,576,015,291
134111	Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4,877,139,000
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	134112	Irigasi	1,061,879,351
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,394,265,318
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	181,982,672
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	225,721,123
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	79,261,627,462
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,020,272,240
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	465,892,580
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	369,638,861
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	4,034,575
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	368,786,746
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	379,063,711
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	4,097,616
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	742,551
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	742,551
133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	130,000,000
131111	Tanah	391114	Revaluasi Aset Tetap	14,746,841,357,203
133111	Gedung dan Bangunan	391114	Revaluasi Aset Tetap	206,902,031,053
391114	Revaluasi Aset Tetap	134111	Jalan dan Jembatan	11,391,253,362
391114	Revaluasi Aset Tetap	134112	Irigasi	9,499,840,943
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391114	Revaluasi Aset Tetap	290,701,573,786
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	391114	Revaluasi Aset Tetap	29,302,628,925
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	391114	Revaluasi Aset Tetap	7,671,354,370
131111	Tanah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	5,663,546,000
133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	24,851,263,000
134112	Irigasi	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	266,282,000
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	16,142,907,513
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,505,617,864
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	403,683,220
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	16,094,234,349
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	1,213,499,030
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	222,966,163
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	8,830,356,958
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	710,212,796
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	207,787,927
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	86,712,610
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	3,872,135,571
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3,613,545
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	86,741,872
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	103,933,450
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3,613,545
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	193,325
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	131111	Tanah	8,299,143,570
133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4,178,104,794
134111	Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	218,365,185
134112	Irigasi	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	103,218,366
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	131111	Tanah	2,897,488,800,725
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	119,576,015,291
133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	9,031,000
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	173,419,000

391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	640,034,400
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	134111	Jalan dan Jembatan	4,877,139,000
134112	Irigasi	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,061,879,351
134112	Irigasi	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3,480,000
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	313,279,000
134112	Irigasi	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	36,595,558
134111	Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	218,365,185
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,394,265,318
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	181,982,672
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	225,721,123
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	79,261,627,462
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,859,660
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	134112	Irigasi	1,005,956,590
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	44,046,000
133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	44,046,000
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,394,265,318
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,394,265,318
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	181,982,672
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	181,982,672
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	225,721,123
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	225,721,123
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4,681,719
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,519,954
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	131111	Tanah	8,299,143,570
131111	Tanah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	8,299,143,570
133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4,178,104,794
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	4,702,731,406
133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	519,764,400
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	134111	Jalan dan Jembatan	218,365,185
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	20,668,862
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	869,931,386
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	173,810,018
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	36,962,573
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	25,759,683
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	473,552,798
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	25,759,683
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	31,570,187
131111	Tanah	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	8,299,143,570
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	131111	Tanah	8,299,143,570
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	4,178,104,794
133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	4,702,731,406
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	134111	Jalan dan Jembatan	218,365,185
134111	Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	218,365,185
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	134112	Irigasi	103,218,366
134112	Irigasi	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	103,218,366
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	524,626,612
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	133111	Gedung dan Bangunan	27,625,512,538
134112	Irigasi	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,005,956,590
133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	27,625,512,538
134111	Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	218,365,185
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	134111	Jalan dan Jembatan	218,365,185
134112	Irigasi	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	103,218,366
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	134112	Irigasi	103,218,366
133111	Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	524,626,612
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,394,265,318
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,394,265,318
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	181,982,672
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	181,982,672
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	225,721,123
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	225,721,123
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4,681,719
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	5,835,095,076
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	1,505,617,864
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	1,854,293,318
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	20,668,863
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	859,745,027
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	173,810,023

Jurnal Take In Revaluasi 2019 Unaudited atas Jurnal Take Out Revaluasi Semester I 2019

Nomor Akun Debet	Uraian Akun Debet	Nomor Akun Kredit	Uraian Akun Kredit	Rupiah
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	313211	Transfer Keluar	19,238,484,626
313211	Transfer Keluar	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,000,857,131
134111	Jalan dan Jembatan	313211	Transfer Keluar	96,961,169
313211	Transfer Keluar	133111	Gedung dan Bangunan	67,202,627,849
133111	Gedung dan Bangunan	313211	Transfer Keluar	13,592,516,990
313211	Transfer Keluar	131111	Tanah	515,144,466,925
591312	Beban Penyusutan Irigasi	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	228,181,841
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	956,654,856
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	8,536,961,839
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	591312	Beban Penyusutan Irigasi	155,078,431
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	526,059,518
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,225,996,289
313221	Transfer Masuk	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	309,507,856
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	313221	Transfer Masuk	116,669,962
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	313221	Transfer Masuk	3,000,857,131
313221	Transfer Masuk	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	19,238,484,626
131111	Tanah	313221	Transfer Masuk	515,144,466,925
313221	Transfer Masuk	134111	Jalan dan Jembatan	96,961,169
134111	Jalan dan Jembatan	313221	Transfer Masuk	3,410,326,000
313221	Transfer Masuk	133111	Gedung dan Bangunan	13,592,516,990
133111	Gedung dan Bangunan	313221	Transfer Masuk	67,202,627,849
591312	Beban Penyusutan Irigasi	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	4,097,616
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	171,865,457
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	15,048,483
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	70,384,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	133111	Gedung dan Bangunan	281,536,000
313211	Transfer Keluar	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	116,669,962
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	313211	Transfer Keluar	309,507,856
313211	Transfer Keluar	134111	Jalan dan Jembatan	3,410,326,000

#KEMENSOS
Hadir

NARASI ASET BERSEJARAH KEMENTERIAN SOSIAL



www.kemsos.go.id

NARASI ASET BERSEJARAH KEMENTERIAN SOSIAL RI

TAMAN MAKAM PAHLAWAN KALIBATA

Jl. Raya Kalibata No.14, RT.14/RW.1, Kalibata,
Jakarta Selatan



- TMP Kalibata, Jakarta Selatan, mulai dibangun pada 1953. Gerbang utama TMP didesain oleh arsitek Masyhur Frederich Silaban yang juga pernah mendesain masjid Istiqlal. Tepat pada hari pahlawan 10 November 1954, Presiden Sukarno meresmikan TMP Kalibata sebagai tempat pemakaman yang baru menggantikan Ancol.
- Seiring perkembangan tata letak kota, TMP Ancol dianggap tidak layak dan dipindahkan ke wilayah Kalibata dengan luas lima hektare. Pemindahan tersebut atas instruksi Presiden Pertama RI, Soekarno. Pembangunan TMP Kalibata ini dimulai pada tahun 1953 yang dilakukan oleh Zeni Angkatan Darat dengan menggandeng seorang arsitek bernama F Silaban.
- Setahun kemudian, proses pembangunannya selesai. Dan, diresmikan bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1954 oleh Presiden Soekarno. Kemudian, pada era kepemimpinan Soeharto, presiden kedua Indonesia, tempat ini diperluas. Yang sebelumnya lima hektare, menjadi 25 hektare.

- Selanjutnya, tepat pada Hari Pahlawan tahun 1974, Soeharto meresmikan monumen TMP Kalibata. Proses pembangunan tempat ini terus berlanjut hingga tahun 1976. Dua tahun kemudian, melalui Keppres RI Nomor 18 Tahun 1976 tanggal 6 April 1976, TMP Kalibata ditetapkan sebagai Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN).
- Dalam memperingati hari Proklamasi RI pada malam tanggal 17 Agustus dan peringatan hari Pahlawan tanggal 10 November setiap tahunnya.
- Perkembangan saat ini telah dibangun Gedung Convension Center yang terletak disamping danau TMP Kalibata yang digunakan untuk acara rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang berskala nasional maupun kegiatan lainnya.
- Saat ini Gedung Convension Center tersebut sebagai posko penyaluran bantuan sosial yang terkena dampak menyebarnya virus covid-19 khususnya di daerah DKI Jakarta.
- Adanya lapangan parkir yang digunakan untuk acara resmi yaitu parkir kendaraan roda 4 dan roda 2 dan digunakan juga sebagai posyandu dan pos RW untuk membantu masyarakat serta digunakan oleh para pedagang kaki lima dan pedagang permanent.

Jakarta, 15 April 2020
Kasubag Penatausahaan BMN

TTD

DANANG, M.M.

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 03/05/20 10:48 PM

Halaman : 1

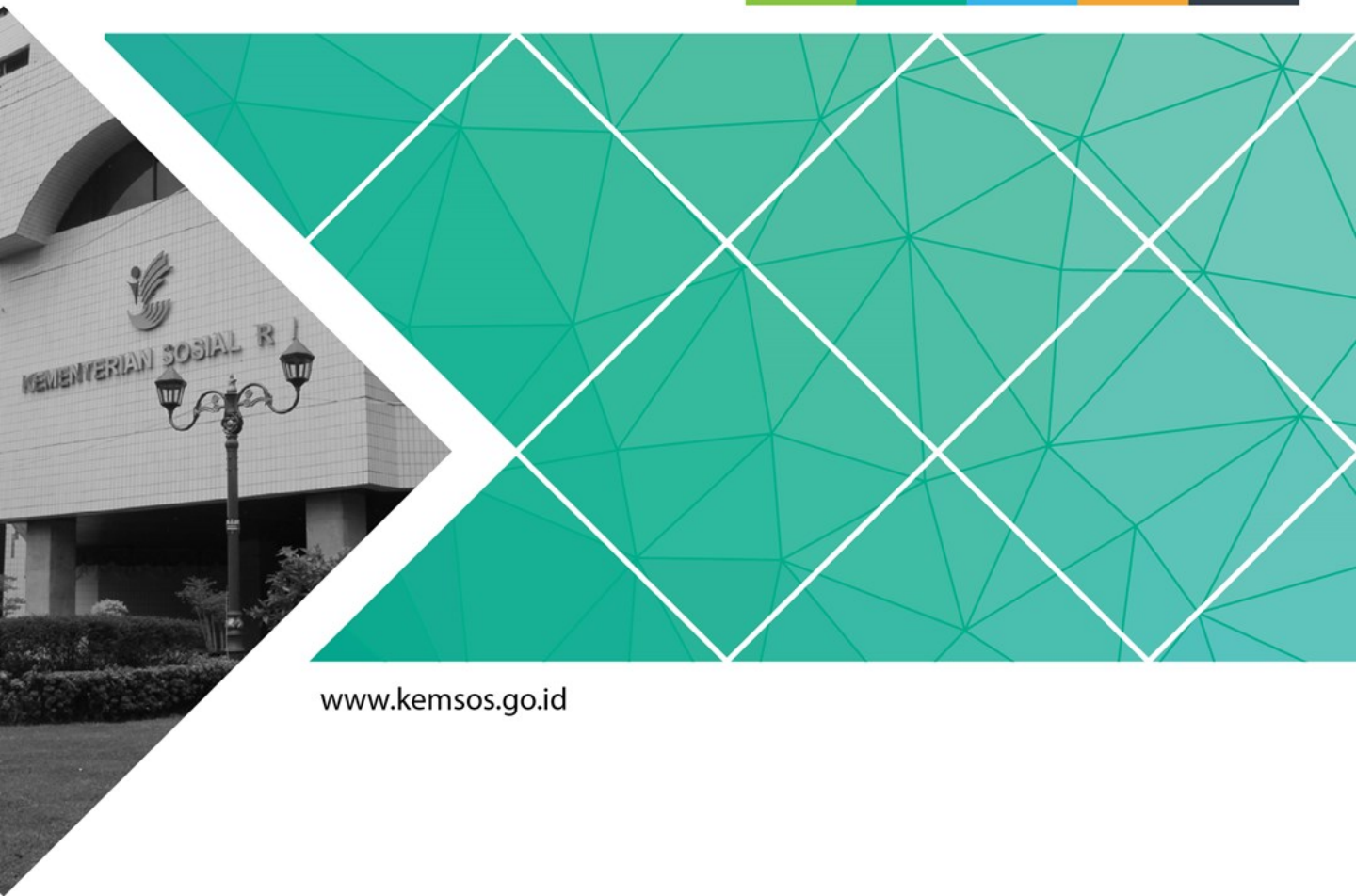
Kode Lap : lap_bmn_sejarah_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2019
			BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
1	2	4	5	6	7
133111	Gedung dan Bangunan	5	0	0	5
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	5	0	0	5
TOTAL		5	0	0	5

#KEMENSOS
Hadir

DAFTAR PENANGANAN KASUS TERKAIT ASET



www.kemsos.go.id

DAFTAR PENANGANAN KASUS TERKAIT ASET PER FEBRUARI 2020

NO 01	KASUS 02	STATUS 03	PERMASALAHAN 04	KETERANGAN 05
1	Tanah di PSBPLK "Wasana Bahagia" Ternate	Masih dalam proses penyediaan lahan pengganti oleh Pemkot Ternate	Tanah seluas 1.420 M2 yang berada di Desa Kalumata Kecamatan Ternate Selatan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Utara (sekarang Ternate) adalah milik Departemen Sosial RI berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 11, tanggal 4 September 1997, Desa Kalumata, Surat Ukur tanggal 11 Januari 1997 No. 21. Saat ini di atas tanah tersebut telah berdiri Gedung SDN 2 Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan.	Telah dilakukan pembayaran PBB dan sudah ada surat pernyataan pembayaran BPHTB NIHIL oleh Pemerintah Kota Ternate
	Aset di Jl. Karanganyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat	Masih dalam proses inventarisasi penghuni diatas tanah tersebut	Aset tersebut merupakan milik Kementerian Sosial namun belum bersertifikat, tapi hanya berdasarkan bukti kepemilikan berupa : a. Eigendom Verponding No. 14664 dan 18938 tanggal perolehan 24 November 1918 b. KIB pada aplikasi SIMAK BMN Pemprov DKI berkeinginan untuk mengajukan permohonan hibah atas tanah tersebut dalam rangka pengembangan PD. Pasar Jaya milik Pemprov DKI Jakarta	Saat ini tanah tersebut tidak dikuasai Kementerian Sosial tapi dikuasai sebagian oleh pihak ketiga (masyarakat) yang berupa pemukiman warga setempat dan para pemegang izin penggunaan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Karanganyar RT 001/RW 02 dan RT 001/RW 05 Kel. Karanganyar Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Kepala Kanwil Depsos DKI Jakarta nomor 1692/TU-3/073.543 A tentang penunjukan nama-nama pemegang izin penggunaan tanah dan bangunan
	Tanah dan bangunan Wisma Abimanyu, Jl Kolam No. 12, Ciumbuleuit Bandung No. Reg 217/PK/2009/MA	Sengketa tanah dan bangunan Wisma Abimanyu yang terletak di Jalan Kolam. No 12 Ciumbuleuit, Bandung yang dikuasai oleh istri dan anak pihak Kol. Soeprapto (alm)	Tanggal 25 November 2009 Mahkamah Agung telah memutuskan Peninjauan Kembali tersebut, yang isi putusannya menyatakan bahwa "Peninjauan Kembali Pihak Kementerian Sosial RI ditolak". Pada saat ini Kementerian Sosial RI akan menggugat kembali ahli waris Alm. Soeprapto. Sehingga diperlukan persiapan alat bukti untuk menggugat kembali terhadap ahli waris Kol. W. Soeprapto (gugatan baru) : – Mencari alat bukti baru dengan menelusuri di Pengadilan Negeri Bandung, Dinas Perumahan Kota Bandung, BPN Kota Bandung, salah satu Notaris di Bandung yang membuat akta salinan kuasa dari seorang ahli waris yang berwarga negara Belanda	Kementerian Sosial RI melalui Biro Hukum mengupayakan mencari alat bukti baru untuk menggugat kembali. Pada 27 Desember 2016 terdapat Surat dari BPN Kota Bandung yang menyatakan bahwa di atas tanah tersebut terbit Hak Pakai No. 6 Kecamatan Cidadap atas nama Departemen Sosial Republik Indonesia. Alat bukti tambahan berupa Eigendom Verponding nomor 10467 atas nama Ferdinand Beirhake tidak dapat ditemukan di BPN Kota Bandung.

			<p>untuk menjual bangunan Rumah Wisma tersebut kepada Kolonel Suprpto.</p> <p>– Biro Hukum juga telah melakukan penelusuran ke BPN Pusat, Kedutaan Besar Belanda, dan Kedutaan Besar Amerika serta meminta bantuan kepada Kementerian Luar Negeri RI dengan maksud untuk mendapatkan data dari Pemilik bangunan Rumah Wisma tersebut atas nama Ny. H. E. Wilke Bierhake(Warga Negara Belanda).</p> <p>Biro Hukum telah berkoordinasi dengan notaris di Bandung yang pernah membuat salinan kuasa ahli waris tersebut dan pada intinya bersedia membantu Kementerian Sosial dalam mencari bukti baru guna pengajuan gugatan baru .</p>	
Gugatan dari Hj. Zakiyah H (Penggugat) terhadap Kementerian Sosial RI (Tergugat 1) Perkara No. 252/Pdt.G/2016/PN.Mtr	Gugatan dari Hj. Zakiyah H atas tanah seluas 3.780 M2 yang terletak di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Pipil No. 106, Percil No. 27	<p>Gugatan ini merupakan gugatan Penggugat yang keempat kalinya kepada Tergugat I (Kementerian Sosial RI) atas objek sengketa yang sama dimana pada gugatan-gugatan sebelumnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh majelis hakim.</p> <p>Pada tanggal 16 Mei 2017 Majelis Hakim PN Mataram telah memutus perkara No. 252/Pdt.G/2016/PN.Mtr dengan bunyi putusan :</p> <p>I. Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Tergugat I</p> <p>II. Dalam Pokok Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.611.000 <p>Atas putusan tersebut Penggugat telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 30 Mei 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram.</p>	<p>Banding gugatan tersebut telah diputus dengan nomor 199/PDT/2017/PT.MTR dan amar putusan berbunyi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula sebagai Penggugat; b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram 252/Pdt.G/2016/ PN.Mtr. tanggal 24 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut; c. Menghukum Pemanding semula sebagai Penggugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); <p>Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI.</p>	
Gugatan nomor 127/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Tim	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian oleh	<p>Penggugat : Pengurus YCHU</p> <p>Tergugat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Sosial 	<p>Pada tanggal 18 September 2018, Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela dengan amar putusannya menyatakan :</p>	

		kuasa hukum an. Pengurus YCHU atas aset Kementerian Sosial, Cawang Kencana	<ol style="list-style-type: none"> 2. BPK 3. Kantor Pertanahan Jakarta Timur 4. DJKN Kementerian Keuangan 5. PT CSU (Turut Tergugat) <p>Inti Gugatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan tanah dan bangunan Cawang Kencana berdasarkan sertifikat Hak Pakai nomor 158 an. YCHU adalah sah milik Penggugat 2. Menyatakan SHP 159, 160 dan 161 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum 3. Menghukum para Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.10.470.720 dan immateriil sebesar Rp. 15.000.000.000 	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I sampai IV b. Menyatakan PN Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa perkara ' nomor 127/Pdt.G/2018/PN.JKT.TIM c. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.286.000 <p>Berdasarkan informasi dari SIPP PN Jakarta Timur, Penggugat mengajukan Banding yang hingga saat ini masih belum di putus oleh Pengadilan</p>
Tanah dan Bangunan di Setiabudi	Masih dalam proses pengosongan dan mediasi dengan ahli waris	Berawal dari ditematinya rumah dinas golongan II oleh Pegawai bernama Bapak Soerodiharjo di Jln. Setiabudi Tengah II Persil 496 Jakarta Selatan. Sampai dengan saat ini, ahli waris dari alm. Soerodiharjo masih menempati rumah tersebut dan terus berusaha melakukan permohonan pengalihan status rumah menjadi golongan III.	Telah dibentuk tim penertiban BMN berupa tanah dan bangunan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal nomor 843/1/PL.04/04/2019.	
Tanah dan Bangunan di Jatinegara	Masih dalam proses pengosongan dan mediasi dengan ahli waris	Berawal dari ditematinya rumah dinas golongan II oleh mantan pegawai. Sampai dengan saat ini, masih dilakukan proses pengosongan dan mediasi terhadap mantan pegawai yang menempati.	Telah dibentuk tim penertiban BMN berupa tanah dan bangunan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal nomor 843/1/PL.04/04/2019.	
Tanah SDN 2 Bengkel di Desa Bengkel Lombok Barat NTB.	Masih dilakukan upaya pembicaraan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	Tanah yang selama ini menjadi obyek sengketa, menurut pernyataan Drs. Haryo Sumitro yang dibuat dihadapan Notaris Heni Hapsari SH di Mataram, dibeli oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 1979/1980 berdasarkan Daftar Isian Proyek (DIP) Proyek Rehabilitasi Tuna Sosial dengan luas 3.713 m2 (termasuk yang telah disertifikatkan seluas 2.361 m2) yang lokasi tanahnya tersebut terpisah dari perkantoran PSMP "Paramita" Mataram, yaitu lokasi tanah sengketa terdapat di Jl. Tgh Faisal No.339 Bengkel Kec.Labuapi Kab. Lombok Barat. Atas tanah sengketa-tersebut telah	Biro hukum akan membantu Pemkab. Lombok Barat dalam menyediakan alat bukti baru untuk upaya Peninjauan Kembali yang akan diajukan oleh Pemkab. Lombok Barat. Selain itu, Pihak Pemkab. Lombok Barat akan membuat surat pernyataan bahwa tanah yang ditempati oleh SDN 2 Bengkel adalah benar milik Kementerian Sosial. Selanjutnya akan dilakukan pensertifikatan atas nama Kementerian Sosial.	

			dicatatkan dalam Laporan Tahunan Inventaris PSMP "Paramita" Mataram sejak tahun 1994 akan tetapi belum memiliki sertifikat tanah yang tanahnya digunakan oleh gedung SDN 4 Bengkel (sekarang SDN 2 Bengkel).	
	Tanah dan Bangunan di Wyata Guna Bandung	Telah dilakukan pinjam pakai	Telah dilakukan perjanjian pinjam pakai antara Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat untuk BMN Kementerian SOSial yang digunakan oleh SLBN A.	Telah dibentuk tim penertiban BMN berupa tanah dan bangunan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal nomor 843/1/PL.04/04/2019.
	Kasus gugatan Class Action pengungsi Maluku dan Maluku Utara oleh Syamsuri Launa dkk Perkara No. 318/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. Gugatan Class Action Pengungsi Maluku dan Maluku Utara oleh Kuasa hukum A.n Syamsuri Launa (Penggugat) terhadap Pemerintah RI (Kementerian Sosial RI sebagai Tergugat III). Karena Pemerintah RI dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan para pengungsi merasa tidak pernah menerima bantuan dari Pemerintah RI.	Dalam Proses Peninjauan Kembali	<p>Pada tanggal 18 Desember 2012 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan yang isinya mengabulkan gugatan penggugat sebageian (gugatan penggugat dimenangkan).</p> <p>Atas putusan tersebut para Tergugat menyatakan banding. Pada tanggal 11 Mei 2015 telah ada putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan amar putusan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Menerima permohonan banding dari para Pemanding/para Tergugat;</i> - <i>Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Desember 2012 Nomor: 318/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST yang dimohonkan banding;</i> - <i>Menghukum para Pemanding/para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).</i> <p>Atas putusan banding tersebut, para Tergugat melakukan Kasasi melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 19 Oktober 2017 telah ada putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI dengan amar putusan menyatakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tolak kasasi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII;</i> 	<p>Pada tanggal 31 Juli 2019 Majelis Hakim PK Mahkamah Agung telah memutus permohonan PK dari Kementerian Sosial dengan amar putusan TOLAK dimana dalam amar putusannya berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan X: 1. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 2. MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA (DAHULU MENTERI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL), 3. GUBERNUR MALUKU UTARA, 4. MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS, 5. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, 6. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 8. GUBERNUR PROVINSI MALUKU, 9. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 10. MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN (MENKO POLHUKAM), tersebut; 2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan X untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

			<p>- <i>Mengabulkan Kasasi Tergugat I.</i></p> <p>Atas putusan kasasi tersebut, Para Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Oktober 2018 melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun sampai dengan saat ini belum ada putusan dari Mahkamah Agung RI atas Peninjauan Kembali tersebut.</p>	<p>Relaas pemberitahuan putusan dan penyampaian putusan Peninjauan Kembali telah kami terima pada tanggal 12 Februari 2020.</p>
--	--	--	--	---

#KEMENSOS
Hadir

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA (CaLBMN)



www.kemsos.go.id



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
JALAN SALEMBA RAYA NO.28 JAKARTA PUSAT 10430
TELEPON 3103591 LAMAN: <http://www.kemsos.go.id>

Nomor : 06 /1/PL.04/05/2020 5 Mei 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Barang Milik Negara
Kementerian Sosial RI Tahunan Tahun 2019 (*Audited*)

Yth. Direktur Barang Milik Negara
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan RI
di-
Jakarta

Berdasarkan surat Kementerian Keuangan Nomor : S-51/KN.2/2020 tanggal 30 April 2020 perihal Penyesuaian Jadwal Penyampaian Laporan Barang Milik Negara Tahun 2019 *Audited*, bersama ini kami sampaikan Laporan Barang Milik Negara Kementerian Sosial RI Tahunan Tahun 2019 (*Audited*) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya (terlampir).

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

KEPALA BIRO UMUM,

ADI WAHYONO
NIP.19661008 199302 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI (sebagai laporan)

**LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
TAHUNAN TAHUN 2019 (AUDITED)**



**KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

**UNIT AKUNTANSI PENGGUNA BARANG
KEMENTERIAN SOSIAL RI
TAHUN 2019**

JALAN SALEMBA RAYA NO. 28 JAKARTA PUSAT

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang – Undang APBN Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Sosial RI adalah salah satu Kementerian / Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan menyusun Laporan Barang Milik Negara berupa Neraca, dan Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara.

Sehubungan dengan Laporan Barang Milik Negara Kementerian Sosial RI Tahunan Tahun 2019 (*Audited*) ini, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Barang Milik Negara Periode 31 Desember 2019 (*Audited*). Dari Neraca tersebut di informasikan bahwa nilai Barang Milik Negara Kementerian Sosial RI berupa Aset Lancar (Persediaan) adalah sebesar Rp. 455.884.848.039,- dan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap adalah sebesar Rp. 22.584.270.344.625,-.
2. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara dimaksudkan agar pengguna Laporan Barang Milik Negara dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam Laporan Barang Milik Negara. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara meliputi uraian tentang penjelasan pos-pos Laporan Barang Milik Negara, daftar rincian atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Belanja dan Neraca.
3. Laporan Barang Milik Negara Kementerian Sosial RI Tahunan periode 31 Desember 2019 ini berstatus sebagai Laporan Barang Milik Negara yang sudah diperiksa (*Audited*).

Kami menyadari bahwa Laporan Barang Milik negara Kementerian Sosial RI Tahunan Tahun 2019 (*Audited*) ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para Pengguna Laporan Barang Milik Negara ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Barang Milik Negara yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan Laporan Barang Milik Negara ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, 04 Mei 2020

SEKRETARIS JENDRAL,



HARTONO LARAS

NIP. 19630306 198503 1 005

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
KEMENTERIAN SOSIAL RI
TAHUNAN TAHUN 2019 (AUDITED)

*Dasar
Hukum*

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagian Akun Standar;
17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 620/KMK.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
20. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
21. Surat Ditjen KN Nomor S-1327/KN/2016 tanggal 7 November 2016 tentang Implementasi Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Kementerian/Lembaga Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;

B. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penyusunan dan penyajian Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun 2014 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Barang Milik Negara Biro Umum adalah sebagai berikut:

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
2. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

3. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - ~ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - ~ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - ~ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
4. Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
5. Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
6. Penyajian Aset Tetap pada neraca didasarkan pada nilai Kapitalisasi BMN yang merupakan batas nilai minimum per satuan BMN, sebelum terbitnya PMK Nomor 181/PMK.6/2016 nilai kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
7. Sedangkan penyajian Aset Tetap pada neraca didasarkan pada nilai Kapitalisasi BMN yang merupakan batas nilai minimum per satuan BMN, setelah terbitnya PMK Nomor 181/PMK.6/2016 nilai kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
8. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
9. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas

kekayaan intelektual.

10. Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

11. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

- a. Tanah
- b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukannya penghapusan.

a. Nilai Penyusutan

Nilai yang dapat disusutkan atas BMN yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 1/PMK.06/2013 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012, merupakan nilai buku per 31 Desember 2012.
- b. Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, dapat digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Penghitungan dan Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

b. Metode Penyusutan Yang Digunakan

Penyusutan atas seluruh Barang Milik Negara berupa aset tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 1/PMK.06/2013 dilakukan dengan Metode Garis Lurus. Dengan formula :

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

c. Masa Manfaat Yang Digunakan

Masa manfaat atas BMN berupa Aset Tetap dalam rangka penerapan penyusutan mengacu pada Tabel Masa Manfaat I dan Tabel Masa Manfaat II sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 59/KMK.6/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel Masa Manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode

- a. Penyajian atas nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku atas BMN berupa Aset Tetap per kodefikasi barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 29/PMK.06/2010, dengan mengacu pada Laporan Penyusutan yang merupakan bagian dari Laporan Barang Kuasa Pengguna/Laporan Barang Pengguna.
- b. Penyajian atas nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku atas BMN berupa Aset Tetap per akun neraca, dijelaskan seperti halaman dibawah ini.

e. Berdasarkan PMK No 90/PMK.06/2014, sepanjang Aset Tetap diperoleh sebelum Tahun 2005, maka sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan penilaian :

- 1) Perhitungan penyusutan dilakukan sejak Tahunan Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap
- 2) Pencatatan penyusutan dalam neraca dilakukan sejak perhitungan Penyusutan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

12. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua telah mengatur bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan Aset Tak Berwujud, yaitu:

a. Metode Amortisasi

Metode amortisasi memberikan gambaran pola konsumsi atas manfaat ekonomis Amortisasi atas Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan dengan menggunakan metode garis lurus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

251/PMK.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

b. Masa Manfaat

Aset Tak Berwujud yang merupakan objek amortisasi adalah Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Penjelasan lebih lanjut atas masa manfaat ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tanggal 31 Desember 2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat, yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan, sebagai berikut :

Masa manfaat atas Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud merupakan masa manfaat terbatas yang digunakan dalam rangka amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tanggal 31 Desember 2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

c. Nilai perolehan bruto atas Aset Tak Berwujud disajikan berdasarkan jenis Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.06/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;

d. Penyajian atas nilai perolehan bruto Aset Tak Berwujud, akumulasi penyusutan, dan nilai buku atas Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud

13. Penilaian Kembali BMN

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:

- a. "Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/Daerah"
- b. "Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional"

Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap :

- a. tanah,
- b. gedung dan bangunan, dan
- c. jalan, irigasi, dan jaringan yang meliputi:
 - 1) jalan dan jembatan, dan
 - 2) bangunan air

pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-761/MK.06/2017 tanggal 14 September 2017 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan sesuai setelah penancangan pada tanggal 29 Agustus 2017.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

C. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2019 (Audited) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Kementerian Sosial.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahunan Tahun Anggaran 2019 (Audited) ini adalah sebesar *Rp 22.398.678.145.608,-* yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar *Rp 21.930.552.054.578,-* dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2019 sebesar *Rp 468,126,091,030,-*. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Penyusutan;
8. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
9. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
11. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
12. Arsip Data Komputer (ADK).

Penjelasan Pos Neraca **D. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA**

D.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Saldo Awal Tahun Anggaran 2019

Nilai BMN per *31 Desember 2018 (Audited)* menurut Kementerian Sosial adalah sebesar *Rp 22.477.785.626.195,-* yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar *Rp 22.465.892.326.083,-* dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar *Rp 11.893.300.112,-*.

Posisi Neraca Tahunan Tahun Anggaran 2019

Posisi Neraca secara umum untuk aset Kementerian Sosial RI per *31 Desember 2019 (Audited)* mengalami perubahan dari posisi sebelumnya.

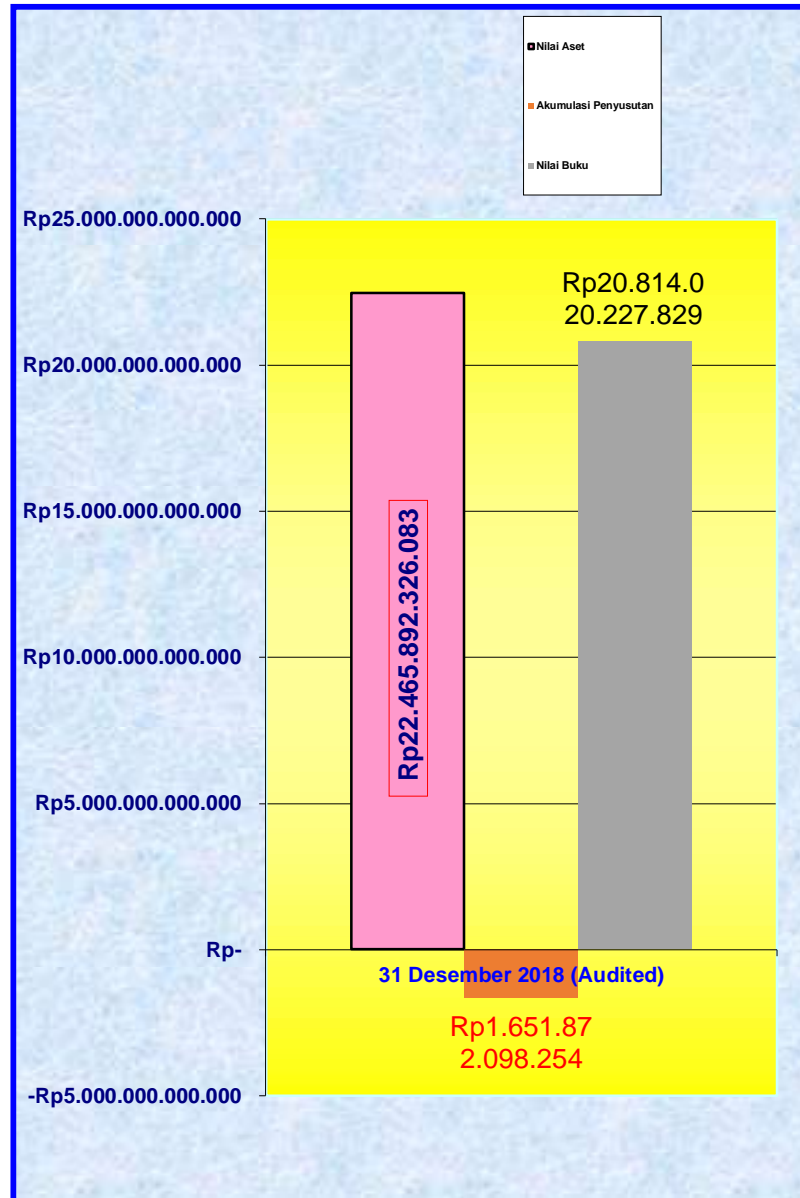
Komposisi Neraca per *31 Desember 2019 (Audited)* adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	31 Desember 2019 (Audited)	Kenaikan / (penurunan)
Nilai Aset	Rp 22.465.892.326.083	Rp 22.941.248.975.735	
Akumulasi Penyusutan	Rp1.651.872.098.254	Rp1.884.211.031.865	
Nilai Buku	Rp 20.814.020.227.829	Rp 21.057.037.943.870	

Nilai Perolehan Aset per *31 Desember 2019 (Audited)* sebesar *Rp. 22.941.248.975.735,-* terdiri dari Aset Lancar sebesar *Rp. 455.884.848.039,-* dan Aset Tetap sebesar *Rp. 22.485.364.127.696,-*.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 (Audited) sebesar Rp. 1.884.211.031.865,- sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp. 21.057.037.943.870,-

Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti dibawah ini



E.2. PENJELASAN PER POS NERACA

E.2.1. ASET LANCAR PERSEDIAAN

E.2.1.1 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan Kementerian Sosial RI Periode *31 Desember 2018 (Audited)* sebesar *Rp. 451,765,319,891,-* dan periode *31 Desember 2019 (Audited)* sebesar *Rp. 455.884.848.039,-* sehingga mengalami kenaikan sebesar *Rp. 4.119.528.148,-* yang terdiri dari :

Persediaan per Eselon I dirinci dalam tabel di bawah ini :

Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2018 (Audited)	Mutasi	31 Desember 2019 (Audited)
1	Sekretariat Jenderal	Rp 2.178.312.872	Rp (76.061.059)	Rp 2.102.251.813
2	Inspektorat Jenderal	Rp 5.632.500	Rp 2.542.000	Rp 8.174.500
3	Ditjen. Pemberdayaan Sosial dan PK	Rp 19.876.893.195	Rp 7.425.546.107	Rp 27.302.439.302
4	Ditjen. Rehabilitasi Sosial	Rp 132.214.692.816	Rp (6.654.866.097)	Rp 125.559.826.719
5	Ditjen. Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 292.462.953.710	Rp (8.044.891.929)	Rp 284.418.061.781
6	Ditjen. Fakir Miskin	Rp 4.138.673.500	Rp (3.945.781.045)	Rp 192.892.455
11	Badan Pendidikan dan Penelitian Kesos	Rp 888.161.298	Rp 15.413.040.171	Rp 16.301.201.469
	Total	Rp 451.765.319.891	Rp 4.119.528.148	Rp 455.884.848.039

Barang Persediaan dilingkungan Kementerian Sosial RI per *31 Desember 2019 (Audited)* senilai *Rp. 455.884.848.039,-* yang terdiri dari barang persediaan yaitu :

Rincian Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	MUTASI	31 Desember 2019
1	Bansos	Rp 299.846.152.930	Rp (13.006.468.583)	Rp 286.839.684.347
2	Barang Konsumsi	Rp 7.213.665.962	Rp 776.710.449	Rp 7.990.376.411
3	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp 27.927.250	Rp 16.750	Rp 27.944.000
4	Suku Cadang		Rp -	
5	Pita Cukai Materai dan Leges		Rp -	
6	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Rp 102.682.236.481	Rp (4.091.043.000)	Rp 98.591.193.481
7	Hewan dan Tanaman untuk Dijual			
8	Peralatan dan Mesin untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Rp 17.645.838.126	Rp 13.912.756.780	Rp 31.558.594.906
9	Jalan irigasi dan Jaringan Untuk diserahkan	Rp 1.700.516.000	Rp -	Rp 1.700.516.000
10	Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat		Rp -	
11	Aset Lain-lain untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp 1.386.026.850	Rp -	Rp 1.386.026.850
12	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Rp 19.502.730.167	Rp 2.725.827.919	Rp 22.228.558.086
13	Bahan Baku	Rp 1.805.750	Rp (1.805.750)	Rp -
14	Persediaan untuk Tujuan Strategi/Berjaga-jaga	Rp 17.562.386	Rp (3.802.669)	Rp 13.759.717
15	Persediaan Lainnya	Rp 564.941.957	Rp (146.924.673)	Rp 418.017.284
16	Persediaan Dalam Proses	Rp 1.175.916.032	Rp 3.954.260.925	Rp 5.130.176.957
	Jumlah	Rp 451.765.319.891	Rp 4.119.528.148	Rp 455.884.848.039

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Nilai Persediaan Sekretariat Jenderal Tahunan per 31 Desember 2019 (Audited) sebesar **Rp. 2.102.251.813,-** sehingga mengalami penurunan sebesar **Rp. 2.529.988.888,-** yang terdiri dari :

Rincian Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2019 (Audited)	MUTASI	31 Desember 2018 (Audited)
1	Barang konsumsi	Rp 1.846.783.860	Rp (2.353.328.761)	Rp 4.200.112.621
2	Suku Cadang			
3	Pita Cukai, Materai dan Leges			
4	Bahan untuk Pemeliharaan			
5	Barang Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat			
6	Bahan Baku			
7	Persediaan Lainnya	Rp 255.467.953	Rp (176.660.127)	Rp 432.128.080
	Jumlah	Rp 2.102.251.813	Rp (2.529.988.888)	Rp 4.632.240.701

Nilai Persediaan unit Eselon 1 Sekretariat Jenderal Tahunan per 31 Desember 2019 (Audited) sebesar **Rp. 2.102.251.813,-**

Berikut data Persediaan per Satuan Kerja :

No	Satker	Uraian		Jumlah
		Barang Konsumsi	Persediaan Lainnya	
1	Sekretariat Jenderal	1.839.597.460	255.467.953	2.095.065.413
2	Pusdatin	6.136.900		6.136.900
3	Dinsos Prov. Bali	1.049.500		1.049.500
	Jumlah	1.846.783.860	255.467.953	2.102.251.813

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

Nilai Persediaan per **31 Desember 2018 (Audited)** sebesar **Rp.5.632.500,-** dan per **31 Desember 2019 (Audited)** sebesar **Rp.8.174.500,-** sehingga mengalami kenaikan sebesar **Rp.2.542.000,-**. Berdasarkan data tersebut, rincian daftar barang persediaan per **31 Desember 2019 (Audited)** adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai
1	Alat Tulis	4 dos	140.000
2	Ordner dan Map	100 buah	1.600.000
3	Kertas HVS	16 rim	850.000
4	Bahan Cetak Lainnya	127 buku	4.184.500
5	Tinta/Toner Printer	8 dos	1.400.000
	Jumlah	151	8.174.500

Rincian beban persediaan berupa Barang Konsumsi pada Neraca Tahunan Tahun 2019 (**Audited**) adalah sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2018	MUTASI	31 Desember 2019
1	Barang konsumsi	Rp 5.632.500	Rp 2.542.000	Rp 8.174.500
2	Suku Cadang	Rp -	Rp -	Rp -
3	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp -	Rp -	Rp -
4	Barang Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	Rp -	Rp -	Rp -
5	Persediaan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp 5.632.500	Rp 2.542.000	Rp 8.174.500

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Nilai Persediaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Periode 31 Desember 2018 (Audited) sebesar Rp.19.876.893.195,- dan periode 31 Desember 2019 (Audited) sebesar Rp.24.528.060.263,- sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp.4.651.167.068,- yang terdiri dari :

Persediaan per Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dirinci dalam tabel di bawah ini :

No	Satker	Konsumsi	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kpd Masyarakat Dalam-Proses	Persediaan Lainnya Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	JUMLAH
1	Sekretariat	Rp 454.088.800		Rp 199.196.500	Rp 653.285.300
2	Dit PSDBS	Rp 20.308.400		Rp 21.179.704.519	Rp 21.200.012.919
3	Dinsos Jabar	Rp 917.000		Rp -	Rp 917.000
4	Dinsos NTT		Rp 174.146.536		Rp 174.146.536
5	Dinsos Kab Nunukan		Rp 619.075.600		Rp 619.075.600
6	Dinsos Papua	Rp -	Rp 204.494.002	Rp -	Rp 204.494.002
7	Dit K2KRS	Rp -	Rp 1.676.128.906	Rp -	Rp 1.676.128.906
	Jumlah	Rp 475.314.200	Rp 2.673.845.044	Rp 21.378.901.019	Rp 24.528.060.263

Barang Persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial per 31 Desember 2019 (Audited) senilai Rp.24.528.060.263,- yang terdiri dari:

Rincian Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2018	MUTASI	31 Desember 2019
1	Barang konsumsi	Rp 475.314.200	Rp -	Rp 475.314.200
2	Persediaan Lainnya utk dijual/diserahkan kpd msy dlm proses	Rp 1.175.916.032	Rp 1.497.929.012	Rp 2.673.845.044
3	Tanah dan Bangunan utk dijual/diserahkan kepada masyarakat	Rp -	Rp -	Rp -
4	Barang Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	Rp 18.225.662.963	Rp 3.153.238.056	Rp 21.378.901.019
5	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp 19.876.893.195	Rp 4.651.167.068	Rp 24.528.060.263
	Mutasi			

1. Barang Konsumsi

Pada Rincian Persediaan berupa Barang Konsumsi tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan sebesar Rp. 475.314.200,- dari tahun 2019 dikarenakan tidak ada Mata Anggaran 521811 yang membentuk Persediaan.

2. Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat Dalam Proses

Persediaan Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat Dalam Proses per 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.673.845.044 mengalami kenaikan pada Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Berkaitan hal tersebut di atas, maka Bersama ini disampaikan kronologis keputusan kontrak & sanksi administrasi **Dinas Sosial Kab Nunukan** sebagai berikut :

1. Telah diberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) dengan melampirkan laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik) dan foto dokumentasi di lapangan :
 - a). surat teguran I Nomor : 01/PKAT/027/X/2019 tanggal 21 oktober 2019 dengan realisasi fisik sebesar 51,08% (lima puluh satu koma tujuh puluh Sembilan persen):
 - b) surat teguran II Nomor : 02/PKAT/027/X/2019 tanggal 14 Nopember 2019 dengan realisasi fisik sebesar 54,58% (lima puluh empat koma lima puluh delapan persen) terjadi deviasi sebesar : 41,93% (empat puluh satu koma Sembilan puluh tiga persen);
 - c). surat teguran III Nomor : 03/PKAT/027/X/2019 tanggal 02 Desember 2019 dengan realisasi fisik sebesar 54,58% (lima puluh empat koma lima puluh delapan persen) terjadi diviasi sebesar : 41, 93% (empat puluh satu koma Sembilan puluh tiga persen);
2. Dilakukan Rapat Bersama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat penguji tagihan /penandatanganan SPM, Aplikator saiba, Bendahara, Tim Teknis dan Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada hari jumat, tanggal 06 Desember 2019, terkait dokumentasi pekerjaan dilapangan sebagai lampiran Keputusan Kontrak & Sanksi Administrasi.
3. Pembuktian dilapangan Bersama wakil bupati nunukan, kepala dinas social kabupaten nunukan, kabag pembangunan, pejabat pembuatan komitmen, tim pphp tim teknis dan lain-lain pada tanggal 9 desember 2019;
4. Lokasi Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Pekerjaan Pembangunan Rumah Bantuan Stimulan Permukiman Sosial, Desa Paluan Kec. Lumbis Ogong, pada jalur anak sungai dengan debit air kecil menunggu banjir untuk mobilisasi material kelokasi pekerjaan dengan jarak ± 2 KM.
 - a. Melihat laporan pekerjaan kemajuan pertanggal 21 oktober 2019 sebesar 51,08 % (lima puluh satu koma nol delapan persen) dengan deviasi sebesar : 9,79% (Sembilan koma tujuh puluh Sembilan persen) ssampai dengan tanggal 06 Desember 2019 sebesar 54,05% (lima puluh empat koma nol lima persen) dengan deviasi sebesar 45, 95% (empat puluh lima koma Sembilan puluh lima persen), pihak penyediaan tidak ada kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan.

- b. Pada satker **Dinas Sosial Provinsi Papua Tugas Pembantuan** sebesar Rp204.949.002,00 merupakan pekerjaan pembangunan rumah Komunitas Adat Terpencil di Kampung Papane Distrik Gamelia Kabupaten Lany Jaya tahun 2017 senilai Rp404.700.094 tidak dapat direalisasikan karena adanya masalah kesalahpahaman dari masyarakat sekitar yang tidak mendapatkan bantuan, telah dilakukan musyawarah tetapi tidak menghasilkan kesepakatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal terhadap persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp404.700.094 telah di setor ke kas negara senilai Rp. 2merupakan 00.206.092 dengan NTPN Nomor: EE6001OL96005IO tanggal 5 April 2018 sehingga per 31 Desember 2018 menjadi Rp. 204.494.002.
 - c. Pada **Satker Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tugas Pembantuan** sebesar Rp174.146.536,00 merupakan pekerjaan pemberian bantuan stimulan pemukiman sosial bagi warga Komunitas Adat Terpencil di lokasi Letkole Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang tidak dapat direalisasikan karena wanprestasi CV. Binna Karyda selaku Penyedia Barang/Jasa sehingga PPK melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Surat Nomor Dinsos.460/411/BPS.1/NTT/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang telah diawali dengan pemberian Surat Peringatan I sampai dengan III. Akibat dari PHK tersebut dilakukan klaim terhadap pemberian jaminan (Bank NTT) untuk mengembalikan sisa uang muka tersebut dengan rincian nilai kontrak Rp1.366.820.000,00 uang muka 30% sebesar Rp410.046.000 Realisasi Uang Muka 12,74% sebesar Rp174.146.536 sisa uang muka yang dikembalikan sebesar Rp235.899.464,00 NTPN DC56D2U58QEA73D2 tanggal 16 Oktober 2018 jaminan pelaksanaan (5%) sebesar Rp68.341.000 dan sisa kontrak yang tidak terealisasi sebesar Rp1.192.673.646,00.
 - d. Pada Satker Dinas Sosial Kabupaten Asmat Distrik Kairi bahwa rumah KAT tersebut ternyata tidak 100 % pembangunannya baru 93% maka Aplikator Persediaan mengeluarkan atau mengkoreksi pencatatan menjadi Persediaan dalam proses sebesar Rp. 2.456.331.913
- 3. Barang lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat**
Barang lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 21.497.751.645,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.471.283.182,- dari tahun 2018. Adapun Rincian Barang Lainnya untuk dijual/diserahkan Kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Nilai Persediaan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Periode **31 Desember 2018 Audited** sebesar **Rp. 132.214.692.816,-** dan periode **31 Desember 2019 Audited** dengan nilai sebesar **Rp. 125.559.826.719,-** terjadi penurunan sebesar **Rp. 6.654.866.097,-**, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Uraian	31 Desember 2018	MUTASI	31 Desember 2019
Barang konsumsi	Rp 3,137,244,106	Rp 348,478,979	Rp 3,485,723,085
Bahan untuk Pemeliharaan	Rp 19,532,000	Rp 964,500	Rp 20,496,500
Suku Cadang	Rp -	Rp -	Rp -
Pita Cukai, Materai dan Leges	Rp -	Rp -	Rp -
Tanah Bangunan untuk dijual/diserahkan kemasyarakat	Rp 102,682,236,481	Rp (4,091,043,000)	Rp 98,591,193,481
Hewan dan Tanaman untuk dijual	Rp -	Rp -	Rp -
Peralatan dan Mesin Untuk dijual diserahkan kepada masyarakat	Rp 17,645,838,126	Rp (659,104,000)	Rp 16,986,734,126
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat	Rp 1,700,516,000		Rp 1,700,516,000
Aset Tetap lainnya untuk diserahkan	Rp -	Rp -	Rp -
Aset Lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat	Rp 1,386,026,850	Rp -	Rp 1,386,026,850
Barang Persediaan Lainnya untuk diserahkan masyarakat	Rp 1,021,454,578	Rp (1,020,746,928)	Rp 707,650
Bahan Baku	Rp 1,793,750	Rp (1,793,750)	Rp -
Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial	Rp 4,401,360,850	Rp (1,188,055,400)	Rp 3,213,305,450
Persediaan untuk tujuan strategi/berjaga	Rp 17,514,386	Rp (3,770,669)	Rp 13,743,717
Persediaan Lainnya	Rp 201,175,689	Rp (39,795,829)	Rp 161,379,860
Jumlah	Rp 132,214,692,816	Rp (6,654,866,097)	Rp 125,559,826,719

Nilai persediaan **31 Desember 2019** pada **Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebesar Rp. 125.559.826.719,-**, baik Satuan Kerja vertikal maupun Dekonsentrasi. Berdasarkan data tabel persediaan diatas, maka dapat dijelaskan rincian per sub kelompok barang persediaan pada satuan kerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

(05) DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Nilai Persediaan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Periode 31 Desember 2018 (Audited) sebesar Rp. 292.462.953.710,- dan periode 31 Desember 2019 (Audited) sebesar Rp. 284.418.061.781,- sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 8.044.891.929,-, yang terdiri dari :

Rincian Persediaan

Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	MUTASI	31 Desember 2019 (Audited)
Barang konsumsi	Rp 631,109,109,554	Rp (630,387,396,736)	Rp 721,712,818
Bahan untuk Pemeliharaan	Rp 1,332,700	Rp (876,200)	Rp 456,500
Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/ diserahkan ke masyarakat	Rp 80,571,376	Rp (11,073,810)	Rp 69,497,566
Persediaan dlmRangka Bansos	Rp 291,749,892,080	Rp (8,123,513,183)	Rp 283,626,378,897
Persediaan untuk tujuan strategi/	Rp 48,000	Rp (32,000)	Rp 16,000
Jumlah	Rp 922,940,953,710	Rp (638,522,891,929)	Rp 284,418,061,781

Nilai Persediaan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Periode 31 Desember 2019 (Audited) sebesar Rp. 284.418.061.781,- per Satuan Kerja :

NO	NAMA SATKER	URAIAN					JUMLAH
		Barang Konsumsi	Persediaan untuk tujuan strategi/berjaga-jaga	Bahan Untuk Pemeliharaan	Barang Persediaan Lainnya Untuk Dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat	Persediaan dlm Rangka Bantuan Sosial	
1	Sekretariat	110,251,100		-	-		110,251,100
2	Direktorat PSKBA	-			67,954,069	256,745,804,740	256,813,758,809
3	Direktorat PSKBS	1,200,000			-	26,880,574,157	26,881,774,157
6	Direktorat Jamsos	610,261,718	16,000	456,500	1,543,497		612,277,715
JUMLAH		721,712,818	16,000	456,500	69,497,566	283,626,378,897	284,418,061,781

Berdasarkan data tersebut terjadi penurunan dikarenakan adanya barang persediaan yang Habis Pakai berupa Barang konsumsi yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, Persediaan untuk tujuan strategi/berjaga-jaga , Bahan untuk pemeliharaan, Barang Persediaan dalam rangka Bantuan Sosial

(06) DITJEN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Nilai Persediaan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Periode *31 Desember 2018 (Audited)* sebesar *Rp4.138.673.500,00* dan periode *31 Desember 2019 (Audited)* sebesar *Rp192.892.455,00* sehingga mengalami penurunan sebesar *Rp3.945.781.045,00* yang terdiri dari :

Persediaan per Eselon I dirinci dalam tabel di bawah ini :

Kode	Uraian Eselon I	31 Desember 2018 (audited)	Mutasi	31 Desember 2019
1	Setditjen Penanganan Fakir Miskin	Rp 108.100.700	Rp (34.561.095)	Rp 73.539.605
2	Dit. PFM Wilayah I	Rp 221.812.800	Rp (216.319.950)	Rp 5.492.850
3	Dit. PFM Wilayah II	Rp 75.970.000	Rp -	Rp 75.970.000
4	Dit. PFM Wilayah III	Rp 3.732.790.000	Rp (3.694.900.000)	Rp 37.890.000
	Total	Rp 4.138.673.500	Rp (3.945.781.045)	Rp 192.892.455

Barang Persediaan dilingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin per *31 Desember 2019* senilai *Rp192.892.455,00* yang terdiri dari barang persediaan yaitu :

Rincian Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2018 (audited)	MUTASI	31 Desember 2019
1	Persediaan Bantuan Sosial	Rp 3.694.900.000	Rp (3.694.900.000)	Rp -
2	Barang Konsumsi	Rp 443.773.500	Rp (250.881.045)	Rp 192.892.455
3	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp -	Rp -	Rp -
4	Suku Cadang	Rp -	Rp -	Rp -
5	Pita Cukai Materai dan Leges	Rp -	Rp -	Rp -
6	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	Rp -	Rp -	Rp -
7	Hewan dan Tanaman untuk Dijual	Rp -	Rp -	Rp -
8	Peralatan dan Mesin untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Rp -	Rp -	Rp -
9	Jalan irigasi dan Jaringan Untuk diserahkan	Rp -	Rp -	Rp -
10	Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp -	Rp -	Rp -
11	Aset Lain-lain untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp -	Rp -	Rp -
12	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Rp -	Rp -	Rp -
13	Bahan Baku	Rp -	Rp -	Rp -
14	Persediaan untuk Tujuan Strategi/Berjaga-jaga	Rp -	Rp -	Rp -
15	Persediaan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
16	Persediaan Dalam Proses	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp 4.138.673.500	Rp (3.945.781.045)	Rp 192.892.455

Barang persediaan yang ada pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin berupa Alat Tulis Kantor untuk menunjang kegiatan sehari-hari perkantoran dengan rincian terlampir.

(11) BADIKLIT KESOS PENSOS

Nilai Persediaan BP3S Periode 31 Desember 2018 (Audited) sebesar Rp. 888.161.298,- dan periode 31 Desember 2019 (Audited) sebesar Rp.16.301.201.469,- sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 15.413.040.171,- yang terdiri dari:

Rincian Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2018 (Audited)	Mutasi	31 Desember 2019 (Audited)
1	Barang konsumsi	Rp 704.728.925	Rp 555.046.568	Rp 1.259.775.493
2	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp 7.062.550	Rp (71.550)	Rp 6.991.000
3	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan	Rp -	Rp 14.571.860.780	Rp 14.571.860.780
4	Barang Lainnya untuk dijual/diserahkan ke	Rp 175.041.250	Rp 286.363.475	Rp 461.404.725
5	Bahan Baku	Rp 12.000	Rp (12.000)	Rp -
6	Persediaan Lainnya	Rp 1.316.573	Rp (147.102)	Rp 1.169.471
	Jumlah	Rp 888.161.298	Rp 15.413.040.171	Rp 16.301.201.469

Berdasarkan data tersebut terjadi penurunan pada Barang Konsumsi, Bahan untuk Pemeliharaan dan Barang Lainnya untuk dijual/diserahkan.

Rincian Persediaan Pada Masing-Masing satker

No	SATKER	NILAI
1	Sekretariat Badiklitpensos	6.287.000
2	Puspensos	680.666.900
3	Puslitbang Kesos	409.700.043
4	Pusbangprof Peksos dan Pensos	98.500
5	Pusdiklat Kesos	14.576.450.280
6	STKS Bandung	135.834.221
7	BBPPKS Bandung	10.785.000
8	BBPPKS Yogyakarta	1.665.000
9	B2P3KS Yogyakarta	446.345.525
10	BBPPKS Padang	369.000
11	BBPPKS Banjarmasin	-
12	BBPPKS Makassar	-
13	BBPPKS Jayapura	33.000.000
	Jumlah	16.301.201.469

Berdasarkan hasil asersi terdapat penambahan persediaan pada satker pusdiklat berupa (toolkit) peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat senilai Rp.14.576.450.280,-

E.2.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per *31 Desember 2019 (Audited)* dibandingkan dengan periode sebelumnya, adalah sebagai berikut :

Posisi Aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian	31 Desember 2018 (Audited)			31 Desember 2019 (Audited)			Kenaikan / (penurunan) %
		Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	
1	Tanah	18.247.980.067.897	0	18.247.980.067.897	18.532.038.706.705	0	18.532.038.706.705	1,53
2	Peralatan dan Mesin	1.788.554.554.510	1.042.111.593.278	746.442.961.232	1.904.924.241.165	1.552.647.621.419	352.276.619.746	(111,89)
3	Gedung dan Bangunan	1.744.588.039.068	121.168.838.761	1.623.419.200.307	1.798.628.848.267	182.053.118.595	1.616.575.729.672	(0,42)
4	Jalan dan Jembatan	48.667.957.875	16.573.320.799	32.094.637.076	46.551.709.875	23.402.850.397	23.148.859.478	(38,64)
5	Irigasi	30.824.046.668	4.553.076.047	26.270.970.621	38.341.743.268	6.491.545.017	31.850.198.251	17,52
6	Jaringan	16.022.524.241	6.359.104.282	9.663.419.959	17.770.229.691	7.373.488.912	10.396.740.779	7,05
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	350.000.000	0	350.000.000	7.153.651.140		7.153.651.140	95,11
8	Aset Tetap Lainnya	14.448.697.676	3.430.878.695	11.017.818.981	14.836.358.922	3.466.709.781	11.369.649.141	3,09
9	Konstruksi Dalam Pengerjaan	623.272.587		623.272.587	281.836.313		281.836.313	(121,15)
10	Software	86.297.896.087	72.659.127.907	13.638.768.180	98.151.352.706	85.268.906.958	12.882.445.748	(5,87)
11	Lisensi	0	0	0	190.850.000	9.542.500	181.307.500	100,00
12	Aset Tak Berwujud Lainnya	8.316.000.000	0	8.316.000.000	196.625.000		196.625.000	(4.129,37)
13	Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam operasi pemerintah	27.222.866.531	24.837.883.183	2.384.983.348	26.060.951.592	23.337.779.234	2.723.172.358	12,42
14	Aset Tak Berwujud yang Tidak digunakan dalam operasi pemerintah	231.083.052	178.275.302	52.807.750	237.023.052	159.469.052	77.554.000	31,91
	JUMLAH	22.014.127.006.192	1.291.872.098.254	20.722.254.907.938	22.485.364.127.696	1.884.211.031.865	20.601.153.095.831	(0,59)

E.2.2.1 Tanah

Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional spemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Nilai Perolehan tanah pada Kementerian Sosial RI per *31 Desember 2018 (Audited)* sebesar *Rp. 18,247,980,067,897,-* dan *31 Desember 2019 (Audited)* sebesar *Rp. 18,532,038,706,705,-*

Mutasi/perubahan Tanah Tahunan Tahun 2019 (Audited) sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018 (Audited)	Rp 18.247.980.067.897
Mutasi Tambah :	
Transfer Masuk	Rp 645.733.000.000
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp 83.471.253.408
Pengembangan Nilai Aset	Rp 8.651.400
Pengembangan Melalui KDP	Rp 7.047.932.000
Koreksi Kesalahan Input IP	Rp 192.657.017.000
Koreksi Nilai Barang Berlebih	Rp 873.785.000
Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	Rp 47.231.259.000
Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	Rp 67.029.050.000
Mutasi Kurang :	
Koreksi Transfer Masuk	Rp (67.029.050.000)
Transfer Keluar	Rp (645.733.000.000)
Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	Rp (47.231.259.000)
Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 18.532.038.706.705

TRANSFER MASUK

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi Penambahan nilai neraca **Tanah** dengan transaksi **Transfer Masuk (102) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Transfer Masuk (102) berupa Tanah** sebesar **Rp.645.733.000.000,- pada Satuan Kerja BRSKP NAPZA Bambu Apus** dikarenakan perubahan nomenkelatur dari pelayanan Anak menjadi Napza berdasarkan **Berita Acara Nomor:646/BRSKPN/PL.04/06/2019** dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	Q'TY	NILAI
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah			645.733.000.000
JUMLAH		0	645.733.000.000

PENYELESAIAN PEMBANGUNAN DENGAN KDP

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi Penambahan nilai neraca **Tanah** dengan transaksi **Penyelesaian Pembangunan dengan KDP (105) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Penyelesaian Pembangunan dengan KDP (105)** sebesar **Rp. 112.776.000,-** pada **Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial** dikarenakan adanya **pengadaan pembelian akses tanah untuk jalan khusus kompleks pada Pusat Rehabilitasi Sosial Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan** untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	Q'TY	NILAI
Tanah Untuk Jalan Khusus Komplek		11 45	112.776.000
JUMLAH		1145	112.776.000

(11) BADIKLITPENSOS

1. Pada Satker **BBPPKS Banjarmasin** adanya penyelesaian pembangunan dengan KDP seluas 20.639m2 senilai **Rp.10.908.671.520,-**
2. Pada satker **Poltekesos** Terdapat penyelesaian pembangunan dengan KDP seluas **92.153m2** senilai **Rp.72.449.805.888,-**

PENGEMBANGAN NILAI ASET

(11) BADIKLITPENSOS

Pada Satker **BBPPKS Banjarmasin** Terdapat pengembangan nilai aset sejumlah **Rp.8.651.400,-**

PENGEMBANGAN MELALUI KDP

(03) DITJEN. DAYASOS

Terjadi Mutasi Tambah berupa Aset Tanah dengan transaksi Pengembangan Melalui KDP yang terjadi di Direktorat K2KRS di Taman Makam Pahlawan Utama Nasional Kalibata dipergunakan untuk Taman dan Makam sebesar **Rp. 7.047.932.000,-**

Satker			
3301994402130000KP			
K2KRS			7.047.932.000
		Kuantitas	Nilai
Tanah			
Pengembangan Melalui KDP	0		7.047.932.000

KOREKSI KESALAHAN INPUT IP

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Adanya Proses Penginputan nilai Koreksi Transfer Masuk pada Satker Setjen berdasarkan LHIP tahun 2019 Satker Biro umum. Dimana Penginputan ini dilakukan di Satker Setjen secara Manual melalui menu **"koreksi transfer masuk hasil IP"** di Aplikasi SIMAK BMN, hal ini dikarenakan Satker Biro Umum merupakan Satker likuidasi tahun 2018

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	Satker Setjen		Rp 47.231.259.000	
2	Koreksi Kesalahan Input IP (biro Umum)	Satker Biro Umum		Rp 47.231.259.000	
3	Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi (biro Umum)	Satker Biro Umum		Rp (47.231.259.000)	
	TOTAL			Rp 47.231.259.000	

1. MUTASI TAMBAH TANAH Berupa KOREKSI TRANSFER MASUK PENILAIAN KEMBALI

131111	TANAH		267.773	Rp 54.112.509.000
2.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M 2	981	Rp 229.216.000
2.01.01.02.003	Tanah Bangunan Gudang	M 2	420	Rp 94.794.000
2.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M 2	69889	Rp 30.169.383.000
2.01.01.04.002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	M 2	7496	Rp 5.127.501.000
2.01.01.04.018	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	M 2	79	Rp 16.065.000
2.01.02.02.001	Tanah Tegalan	M 2	5957	Rp 431.860.000
2.01.02.02.002	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	M 2	182006	Rp 17.995.126.000
2.01.03.01.003	Tanah Lapangan Badminton/Bulutangkis	M 2	630	Rp 35.778.000
2.01.03.01.999	Tanah Lapangan Lainnya		315	Rp 12.786.000

2. MUTASI KURANG TANAH Berupa KOREKSI TRANSFER MASUK PENILAIAN KEMBALI

			99433	-Rp 6.881.250.000
2.01.01.01.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M 2	1676	-Rp 240.827.000
2.01.01.01.005	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	M 2	18795	-Rp 1.552.843.000
2.01.01.01.999	Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya		74000	-Rp 4.013.168.000
2.01.01.04.007	Tanah Bangunan Poliklinik	M 2	413	-Rp 3.680.000
2.01.01.04.999	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya		494	-Rp 105.681.000
2.01.01.06.001	Tanah Untuk Bangunan Masjid	M 2	1216	-Rp 254.303.000
2.01.03.01.001	Tanah Lapangan Tenis	M 2	909	-Rp 142.377.000
2.01.03.01.002	Tanah Lapangan Basket	M 2	1930	-Rp 568.371.000

(03) **DITJEN. DAYASOS**

Terjadi Mutasi Tambah berupa Aset Tanah dengan transaksi Koreksi Kesalahan Input IP pada Tanah Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata pada Satker K2KRS sebesar Rp. 223.304.280.000,-

itker			
J301994402130000KP			
K2KRS			223.304.280.000
		Kuantitas	Nilai
Tanah			
Koreksi Kesalahan Input IP	0		223.304.280.000

(04) **DITJEN REHABILITASI SOSIAL**

Mutasi Penambahan nilai neraca **Tanah** dengan transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Tanah** sebesar **(Rp. 844.945.000,-)** pada **Satuan Kerja BRSPDSRW Melati** dikarenakan revaluasi atas penilaian kembali BMN berdasarkan **Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Nomor:100/REV/WKN.07** dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	Q'TY	NILAI
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah			- 844.945.000
JUMLAH		0	- 844.945.000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Tanah** sebesar **Rp. 514.674.000,-** pada Satuan Kerja **BRKP Napza Satria Baturaden** dikarenakan revaluasi atas penilaian kembali BMN berdasarkan **Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Nomor:136/REV/WKN.09**, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	Q'TY	NILAI
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		10.120	514.674.000
JUMLAH		10.120	514.674.000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Tanah** sebesar **(Rp. 16.679.933.000,-)** pada Satuan Kerja **BRSPDF Budi Perkasa** dikarenakan revaluasi atas penilaian kembali BMN berdasarkan **Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Nomor:065/REV/WKN.04**, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	Q'TY	NILAI
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah			-16.679.933.000
JUMLAH			-16.679.933.000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Tanah** sebesar **(Rp. 386.770.000,-)** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Toddopuli** dikarenakan revaluasi atas penilaian kembali BMN berdasarkan **Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Nomor:275/REV/WKN.15**, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	Q'TY	NILAI
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah			-386.770.000
JUMLAH			-386.770.000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Tanah** sebesar **Rp. 521.418.000,-** pada Satuan Kerja **BRSPDI Nipotowe Palu** dikarenakan revaluasi atas penilaian kembali BMN berdasarkan **Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Nomor:149/REV/WKN.16**, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	Q'TY	NILAI
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah			521.418.000
JUMLAH			521.418.000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Tanah** sebesar **(Rp. 24.871.000,-)** pada **Satuan Kerja BRSLU Gau Mabaji** dikarenakan revaluasi atas penilaian kembali BMN berdasarkan **Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Nomor:612/REV/WKN.15**, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	Q'TY	NILAI
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah			-24.871.000
JUMLAH			-24.871.000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Tanah** sebesar **(Rp. 130.018.000,-)** pada **Satuan Kerja BRSPDSN Wyata Guna** dikarenakan revaluasi atas penilaian kembali BMN berdasarkan **Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Nomor : 336/REV/WKN.08**, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	Q'TY	NILAI
Tanah Persil			-130.018.000
JUMLAH			-130.018.000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Tanah** sebesar **(Rp. 45.750.060.000,-)** pada **Satuan Kerja BRS Watunas Mulya Jaya** dikarenakan revaluasi atas penilaian kembali BMN berdasarkan **Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Nomor : 90/REV/WKN.07**, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	Q'TY	NILAI
Tanah Persil			-45.750.060.000
JUMLAH			-45.750.060.000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Tanah** sebesar **Rp. 2.090.536.000,-** pada **Satuan Kerja BRSAMPK Alyatama** dikarenakan revaluasi atas penilaian kembali BMN berdasarkan **Laporan**

Hasil Inventarisasi dan Penilaian Nomor : 90/REV/WKN.04, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	Q'TY	NILAI
Tanah Persil			2.090.536.000
JUMLAH			2.090.536.000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Tanah** sebesar **Rp. 2.801.316.000-** pada Satuan Kerja **BRSPDM Budi Luhur** dikarenakan revaluasi atas penilaian kembali BMN berdasarkan **Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Nomor : 90/REV/WKN.04**, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	Q'TY	NILAI
Tanah Persil			2.801.316.000
JUMLAH			2.801.316.000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Tanah** sebesar **(Rp. 67.029.050.000,-)** pada Satuan Kerja **BRSKP NAPZA Bambu Apus** dikarenakan revaluasi atas penilaian kembali BMN berdasarkan **Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian**, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	Q'TY	NILAI
Tanah Persil			-67.029.050.000
JUMLAH			-67.029.050.000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Tanah** sebesar **Rp. 12.897.368.000-**, pada Satuan Kerja **BBRSBD Prof Dr Soeharso** dikarenakan revaluasi atas penilaian kembali BMN berdasarkan **Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian Nomor:178.1/REV/WKN/2019**, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	Q'TY	NILAI
Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan			12.897.368.000
JUMLAH			12.897.368.000

(11) BADIKLITPENSOS

1. Pada Satker **BBPPKS Banjarmasin**
Terdapat kesalahan input IP seluas **528 m2** senilai **Rp.1.609.507.000,-**
2. Pada satker **BBPPKS Yogyakarta**
Terdapat koreksi kesalahan input IP senilai **Rp.(776.999.000,-)**

3. Pada satker **BBPPKS Makassar**
Terdapat koreksi kesalahan input IP senilai **Rp.1.454.157.000,-**
4. Pada satker **B2P3KS Yogyakarta**
Terdapat koreksi kesalahan input IP senilai **Rp.31.865.148.000,-**
5. Pada satker **Pusdiklat Kesos**
Terdapat koreksi kesalahan input IP senilai **Rp.(10.000.000,-)**

KOREKSI NILAI BARANG BERLEBIH

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca **Tanah** dengan transaksi **Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali (245) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali (245) berupa Tanah** sebesar **Rp. 873.785.000,-** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Alyatama** dikarenakan adanya revaluasi BMN berdasarkan **LHIP : 090/REV/WKN.04** dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	Q'TY	NILAI
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah			873.785.000
JUMLAH		0	873.785.000

KOREKSI EKUITAS AKIBAT AKIBAT KOREKSI REVALUASI

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Adanya Proses Penginputan nilai Koreksi Transfer Masuk pada Satker Setjen berdasarkan LHIP tahun 2019 Satker Biro umum. Dimana Penginputan ini dilakukan di Satker Setjen secara Manual melalui menu **"koreksi transfer masuk hasil IP"** di Aplikasi SIMAK BMN, hal ini dikarenakan Satker Biro Umum merupakan Satker likuidasi tahun 2018

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Koreksi Ekuitas akibat koreksi revaluasi			Rp 47.231.259.000	
TOTAL				Rp 47.231.259.000	

KOREKSI TRANSFER KELUAR AKIBAT KOREKSI REVALUASI

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca **Tanah** dengan transaksi **Koreksi Transfer Keluar (331) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Koreksi Transfer Keluar (331) berupa Tanah** sebesar

Rp. 67.029.050.000,- pada Satuan Kerja BRSKP NAPZA Bambu Apus dikarenakan revaluasi BMN, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	Q'TY	NILAI
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah			67.029.050.000
JUMLAH		0	67.029.050.000

KOREKSI TRANSFER MASUK

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Adanya transaksi **Koreksi Transfer Masuk (232) berupa Tanah** sebesar **(Rp. 67.029.050.000,-) pada Satuan Kerja BRSKP NAPZA Bambu Apus** dikarenakan revaluasi BMN, dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	Q'TY	NILAI
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah			-67.029.050.000
JUMLAH		0	-67.029.050.000

TRANSFER KELUAR

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca **Tanah** dengan transaksi **Transfer Keluar (302) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Transfer Keluar (302) berupa Tanah** sebesar **Rp.645.733.000.000,- pada Satuan Kerja BRSKP NAPZA Bambu Apus** dikarenakan perubahan nomenkelatur dari pelayanan Anak menjadi Napza berdasarkan **Berita Acara Nomor:646/BRSKPN/PL.04/06/2019** dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SATUAN	Q'TY	NILAI
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah			645.733.000.000
JUMLAH		0	645.733.000.000

KOREKSI PENGHAPUSAN AKIBAT KOREKSI REVALUASI

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Adanya Proses Penginputan nilai Koreksi Transfer Masuk pada Satker Setjen berdasarkan LHIP tahun 2019 Satker Biro umum. Dimana Penginputan ini dilakukan di Satker Setjen secara Manual melalui menu **"koreksi transfer masuk hasil IP"** di Aplikasi SIMAK BMN, hal ini dikarenakan Satker Biro Umum merupakan Satker likuidasi tahun 2018

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Koreksi Ekuitas akibat koreksi revaluasi			Rp (47.231.259.000)	
	TOTAL			-Rp 47.231.259.000	

E.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin adalah Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Nilai Perolehan Peralatan dan Mesin pada Kementerian Sosial RI per **31 Desember 2018 (Audited)** sebesar **Rp. 1,788,554,554,510,-** dan **31 Desember 2019 (Audited)** sebesar **Rp. 1,904,924,241,165,-** Akumulasi Penyusutan per **31 Desember 2019 (Audited)** sebesar **Rp. 1,552,647,621,419,-** sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar **Rp. 352,276,619,746,-**.

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin Tahunan Tahun 2019 (Audited) sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018 (Audited)	Rp	1.788.554.554.510
Mutasi Tambah :		
Koreksi Saldo Awal	Rp	95.178.950
Pembelian	Rp	111.733.088.224
Transfer Masuk	Rp	22.322.624.628
Hibah Masuk	Rp	229.182.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	15.673.905.372
Reklasifikasi Masuk	Rp	11.182.645.472
Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Rp	254.005.100
Pengembangan Nilai Aset	Rp	80.938.000
Mutasi Kurang :		
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	(75.143.738)
Transaksi Normalisasi BMN	Rp	(34.096.000)
Penghapusan	Rp	(1.068.842.266)
Transfer Keluar	Rp	(22.079.444.583)
Hibah Keluar	Rp	(2.163.173.050)
Reklasifikasi Keluar	Rp	(10.048.527.412)
Usulan Barang Hilang ke Pengelola	Rp	(41.042.000)
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	(9.691.612.042)
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	1.904.924.241.165
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019	Rp	(1.552.647.621.419)
Nilai Buku per 31 Desember 2019	Rp	352.276.619.746

KOREKSI SALDO AWAL**(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL**

Mutasi penambahan nilai neraca ***Peralatan dan Mesin*** dengan transaksi ***Saldo Awal (100) 31 Desember 2019***, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi **Saldo Awal (100)** pada Satuan Kerja **BRSKP Napza Galih Pakuan Bogor** senilai **Rp. 5.397.500,-**, dikarenakan terdapat temuan tim auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial pada Tahun Anggaran 2018 atas aset tetap yang belum terkapitalisasi dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Kipas Angin	2	3,598,000
Tangga	1	1,799,500
JUMLAH	3	5,397,500

(11) BADIKLITPENSOS

Terdapat penambahan saldo awal pada satker BBPPKS Yogyakarta senilai Rp.89.781.450,- dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
A.C. SPLIT	Rp 88.000.000	
EXHAUST FAN	Rp 1.781.450	
Jumlah Pembelian	Rp 89.781.450	

PEMBELIAN

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat pembelian pada Satker Setjen dan Satker Pusdatin Berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Pembelian	Satker Setjen		Rp 20.678.689.439	
		Satker Pusdatin		Rp 51.081.142.260	
	TOTAL		0	Rp 71.759.831.699	

Rincian Pembelian Satker Setjen

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
1	2	4	5
132111	PERALATAN DAN MESIN	1.906	20.678.689.439
3.01.03.04.001	Transportable Generating Set	1	79.700.000
3.01.03.05.010	Pompa Air	17	513.139.000
3.01.03.12.020	Selang Air	34	185.702.000
3.02.01.01.003	Station Wagon	1	540.000.000
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	2	55.900.000
3.02.02.01.001	Gerobak Tarik	2	12.800.000
3.02.02.01.004	Lori Dorong	9	37.738.000
3.02.05.01.016	Pesawat tak berawak	3	201.973.504

Laporan Barang Milik Negara Kementerian Sosial RI Tahunan Tahun 2019 per 31 Desember 2019 (Audited)

3.03.01.03.003	Transformator	1	199.100.000
3.03.02.05.002	Tool Kit Box	3	17.000.000
3.04.01.08.017	Perangkap Lainnya	3	8.250.000
3.05.01.02.007	Mesin Penghitung Uang	1	6.985.000
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	3	14.185.000
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	72	1.236.399.080
3.05.01.04.003	Rak Besi	8	38.385.600
3.05.01.04.004	Rak Kayu	4	41.052.000
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	11	43.297.500
3.05.01.04.007	Brandkas	2	13.200.000
3.05.01.04.013	Buffet	9	72.930.000
3.05.01.04.015	Locker	43	223.245.000
3.05.01.04.020	Lemari Display	5	104.755.221
3.05.01.05.001	Tabung Pemadam Api	131	403.781.950
3.05.01.05.005	Rambu-Rambu	16	74.500.000
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	6	475.949.170
3.05.01.05.008	Papan Visual/Papan Nama	8	44.167.500
3.05.01.05.010	White Board	3	4.785.000
3.05.01.05.014	Peta	1	12.550.000
3.05.01.05.015	Alat Penghancur Kertas	8	65.617.170
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	4	29.500.000
3.05.01.05.038	Laser Pointer	3	5.445.000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	5	168.550.600
3.05.01.05.052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	1	1.595.000
3.05.01.05.057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	3	17.160.000
3.05.01.05.058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	4.202.700
3.05.01.05.059	Alat Detektor Barang Terlarang	8	12.000.000
3.05.01.05.061	Papan Gambar	8	184.644.720
3.05.01.05.088	Sirine	1	5.000.000
3.05.01.05.999	Perkakas Kantor Lainnya	1	1.155.000
3.05.02.01.001	Meja Kerja Besi/Metal	3	18.650.000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	177	1.167.948.357

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	QTY	NILAI
1	2	4	5
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	366	842.702.793
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	15	67.760.000
3.05.02.01.005	Sice	52	457.061.250
3.05.02.01.008	Meja Rapat	5	107.220.000
3.05.02.01.011	Tempat Tidur Kayu	9	96.260.000
3.05.02.01.014	Meja Resepsionis	5	95.780.000
3.05.02.01.016	Kasur/Spring Bed	2	40.969.500
3.05.02.01.018	Meja Makan Besi	2	15.070.000
3.05.02.01.019	Meja Makan Kayu	16	110.979.000
3.05.02.01.020	Kursi Fiber Glas/Plastik	1	12.870.000
3.05.02.01.022	Partisi	3	80.486.450

Laporan Barang Milik Negara Kementerian Sosial RI Tahunan Tahun 2019 per 31 Desember 2019 (Audited)

3.05.02.01.025	Gantungan Jas	1	7.865.000
3.05.02.01.999	Meubelair Lainnya	22	120.793.618
3.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	1	4.070.000
3.05.02.03.004	Mesin Cuci	4	20.757.000
3.05.02.03.999	Alat Pembersih Lainnya	6	6.900.000
3.05.02.04.001	Lemari Es	11	74.064.000
3.05.02.04.002	A.C. Sentral	45	2.238.085.965
3.05.02.04.004	A.C. Split	63	634.868.750
3.05.02.04.006	Kipas Angin	3	10.230.000
3.05.02.04.007	Exhause Fan	21	36.736.500
3.05.02.04.009	Reach In Frezzer	2	9.900.000
3.05.02.04.011	Up Right Chiller/Frezzer	5	136.265.000
3.05.02.05.002	Kompor Gas (Alat Dapur)	4	51.128.000
3.05.02.05.004	Teko Listrik	2	4.686.000
3.05.02.05.005	Rice Cooker (Alat Dapur)	2	3.993.000
3.05.02.05.006	Oven Listrik	4	24.613.600
3.05.02.05.008	Kitchen Set	2	176.247.500
3.05.02.05.015	Rak Piring Aluminium	1	1.980.000
3.05.02.05.018	Blender	3	18.590.000
3.05.02.05.019	Mixer	5	57.322.800
3.05.02.05.999	Alat Dapur Lainnya	3	85.195.000
3.05.02.06.002	Televisi	25	568.683.000
3.05.02.06.005	Amplifier	1	18.612.000
3.05.02.06.006	Equalizer	2	23.107.400
3.05.02.06.007	Loudspeaker	44	688.126.400
3.05.02.06.011	Karaoke	1	29.425.000
3.05.02.06.014	Microphone	16	156.599.000
3.05.02.06.020	Camera Video	1	56.642.000
3.05.02.06.027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	18.150.000
3.05.02.06.029	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1	24.750.000

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	QTTY	NILAI
1	2	4	5
3.05.02.06.033	Water Filter	2	22.033.000
3.05.02.06.034	Tangga Aluminium	1	4.125.000
3.05.02.06.035	Kaca Hias	2	3.135.000
3.05.02.06.036	Dispenser	5	19.019.000
3.05.02.06.045	Coffee Maker	2	5.280.000
3.05.02.06.056	Karpet	21	241.138.600
3.05.02.06.057	Vertikal Blind	30	825.855.410
3.05.02.06.058	Gordyin/Kray	4	171.324.670
3.05.02.06.059	Kabel Roll	15	53.625.000

Laporan Barang Milik Negara Kementerian Sosial RI Tahunan Tahun 2019 per 31 Desember 2019 (Audited)

3.05.02.06.066	Panggung	4	88.000.000
3.05.02.06.072	Lampu	5	7.425.000
3.05.02.06.078	Bingkai Foto	1	23.800.000
3.05.02.06.083	Lampu Tegak/Standing Lamp	1	1.963.227
3.05.02.06.084	Lampu Dinding	1	26.367.000
3.05.02.06.999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5	77.687.500
3.05.02.99.999	Alat Rumah Tangga Lainnya	4	44.270.000
3.06.01.01.002	Audio Mixing Portable	2	24.640.000
3.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC	5	56.232.000
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	4	5.129.000
3.06.01.01.051	Automatic Voltage Regulator (AVR)	2	27.060.000
3.06.01.01.056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1	13.600.000
3.06.01.01.060	Power Amplifier	4	52.258.200
3.06.01.01.091	Digital LED Running Text	1	4.455.000
3.06.01.02.038	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	1	6.661.400
3.06.01.02.061	Lensa Kamera	1	13.500.000
3.06.01.02.086	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	2	10.098.000
3.06.01.02.128	Camera Digital	5	155.590.644
3.06.01.02.135	LCD Monitor	2	144.100.000
3.06.01.02.148	VTR Recorder	1	15.180.000
3.06.01.02.151	Splitter	1	1.375.000
3.06.01.02.999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	1	13.222.392
3.06.01.99.999	Alat Studio Lainnya	6	30.591.000
3.06.02.01.001	Telephone (PABX)	1	60.720.000
3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	6	18.975.000
3.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	41	180.460.000
3.06.02.99.999	Alat Komunikasi Lainnya	5	49.060.000
3.06.03.20.001	Self Supporting Tower	2	163.900.000
3.06.03.47.002	Genset	1	199.980.000
3.07.01.01.097	Lemari Obat (Kaca)	2	20.020.000
3.08.01.14.024	Rotator	2	41.000.000
3.08.01.41.005	Alat Pemadam Kebakaran	54	197.208.000

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	QTTY	NILAI
1	2	4	5
3.08.01.41.111	Grinder	2	11.440.000
3.08.01.41.194	Personal Computer	1	9.250.000
3.08.01.41.251	Stabilizer/UPS	1	8.496.000
3.08.01.41.325	Juicer	1	1.705.000
3.08.02.03.117	Panel Uto Power	3	274.760.700
3.09.02.01.999	Alat Keamanan Lainnya	1	23.650.000
3.09.04.03.004	GPS	3	30.265.000
3.09.04.03.061	Remote Speaker Mikropone	2	29.510.000
3.09.04.03.063	GM338 Mobil Radio, Select 5,	4	39.850.000

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara

	UHF (450-527MHz)		
3.09.04.07.016	Lemari Suhu	1	18.480.000
3.10.01.01.002	Mini Komputer	2	18.920.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	62	1.046.764.000
3.10.01.02.002	Lap Top	81	1.605.221.218
3.10.01.02.009	Tablet PC	13	166.307.000
3.10.02.01.012	Hard Disk	7	7.420.000
3.10.02.01.013	Keyboard (Peralatan Mainframe)	1	5.225.000
3.10.02.02.017	Speaker Komputer	1	1.017.500
3.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	16.170.000
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29	83.095.500
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	118.000.000
3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	3	4.455.000
3.10.02.04.001	Server	1	76.065.000
3.10.02.04.023	Wireless Access Point	3	13.299.880
3.10.02.04.024	Switch	1	7.150.000
3.10.02.04.999	Peralatan Jaringan Lainnya	1	90.326.500
3.15.04.04.004	Closed Circuit Television (CCTV)	7	198.800.000
3.19.01.02.999	Peralatan Permainan Lainnya	15	74.497.500

Rincian Pembelian Satker Pusdatin

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	QTTY	NILAI
1	2	4	5
3.03.02.05.014	Crimping Tolls	1	4.369.900
3.04.01.04.003	Rak-Rak Penyimpan	89	151.035.000
3.04.01.04.004	Lemari Penyimpan	14	103.851.500
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	1	19.565.700
3.05.01.04.014	Mobile File	2	107.621.800
3.05.01.04.020	Lemari Display	1	17.374.500
3.05.01.05.027	Alat Pencetak Label	3	28.659.000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	2	92.000.000
3.05.01.05.053	Acces Control System	6	46.800.000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	4	11.110.000
3.05.02.01.005	Sice	9	28.008.750
3.05.02.01.008	Meja Rapat	2	15.104.000
3.05.02.01.022	Partisi	2	37.812.500
3.05.02.02.004	Control Clock	1	10.450.000
3.05.02.04.004	A.C. Split	1	6.714.000
3.05.02.06.008	Sound System	1	3.500.000
3.05.02.06.014	Microphone	2	8.500.000
3.05.02.06.020	Camera Video	1	23.500.000
3.05.02.06.034	Tangga Aluminium	2	4.620.000
3.05.02.06.036	Dispenser	1	3.274.000

3.05.02.06.046	Handy Cam	1	23.400.000
3.05.02.06.080	Bracket Standing Peralatan	2	11.880.000
3.06.01.01.088	Voice Recorder	2	18.500.000
3.06.01.02.045	Tripod Camera	2	7.500.000
3.06.01.02.061	Lensa Kamera	1	19.800.000
3.06.01.02.128	Camera Digital	2	80.000.000
3.06.01.02.129	Tas Kamera	2	2.000.000
3.06.01.02.130	Lampu Blitz Kamera	2	7.300.000
3.06.01.02.131	Lensa Filter	1	1.238.640
3.06.01.02.135	LCD Monitor	9	189.656.000
3.06.02.07.005	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	2	7.243.500
3.07.01.04.108	Kursi Zeis	116	213.374.000
3.08.01.11.151	Process Calibrator Fluke	2	55.000.000
3.08.01.11.228	Vaccum Cleaner Wet & Dry	2	10.577.600
3.08.01.56.081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	31	203.733.000
3.08.03.06.039	Infrared Thermometer	1	2.934.300
3.09.04.07.005	Lemari Camera	1	6.000.000
3.10.01.01.003	Local Area Network (LAN)	110	703.425.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	4	101.900.000
3.10.01.02.002	Lap Top	32	741.150.000

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

Rincian Mutasi Tambah **Peralatan dan Mesin** berupa :

a. Pembelian

No	Jenis Barang	NUP	Jumlah	Nilai (Rp.)
1.	Sedan	3	1	635.000.000
2.	Station Wagon	21	1	411.000.000
3.	Laptop	65	1	19.178.500
4.	Laptop	66	1	19.178.500
5.	Laptop	67	1	19.178.500
6.	Laptop	68	1	19.178.500
7.	Laptop	69	1	19.178.500
8.	Laptop	70	1	19.178.500
9.	Laptop	71	1	19.178.500
10.	Laptop	72	1	19.178.500
11.	Laptop	73	1	19.178.500
12.	Laptop	74	1	19.178.500
13.	Laptop	75	1	19.178.500
14.	Laptop	76	1	19.178.500
15.	Laptop	77	1	19.178.500
16.	Laptop	78	1	19.178.500
17.	Laptop	79	1	19.178.500
18.	Laptop	80	1	19.178.500
19.	Laptop	81	1	19.178.500
20.	Laptop	82	1	19.178.500
21.	Laptop	83	1	19.178.500

22.	Laptop	84	1	19.178.500
23.	Laptop	85	1	19.178.500
24.	Laptop	86	1	19.178.500
25.	Laptop	87	1	19.178.500
26.	Laptop	88	1	19.178.500
27.	Laptop	89	1	19.178.500
28.	Handycam	6	1	17.101.000
29.	Printer	115	1	4.895.000
30.	Printer	116	1	4.895.000
31.	Printer	117	1	4.895.000
32.	Printer	118	1	4.895.000
33.	Printer	119	1	4.895.000
34.	External Hardisk	3	1	1.127.000
35.	External Hardisk	4	1	1.127.000
36.	External Hardisk	5	1	1.127.000
37.	External Hardisk	6	1	1.127.000
38.	External Hardisk	7	1	1.127.000
39.	Handy Talkie	1	1	2.707.000
40.	Handy Talkie	2	1	2.707.000
41.	Handy Talkie	3	1	2.707.000
42.	Tripod Camera	3	1	2.615.500
43.	LCD Projector/Infocus	8	1	9.421.500
44.	LCD Projector/Infocus	9	1	9.421.500
45.	Scanner	2	1	13.147.500
46.	Scanner	3	1	13.147.500
47.	Camera Digital	11	1	7.060.500
48.	Camera Digital	12	1	7.060.500
49.	Camera Digital	13	1	7.060.500
50.	Camera Digital	14	1	7.060.500
51.	Camera Digital	15	1	7.060.500
52.	Camera Digital	16	1	21.055.000
53.	Televisi	28	1	4.634.000
54.	Alat Penghancur Kertas	16	1	19.600.000
55.	Pesawat Tak Berawak	1	1	23.519.000
56.	Software Komputer	28	1	180.000.000
57.	Meja Rapat Kayu	5	1	10.000.000
58.	Meja Rapat Kayu	6	1	10.000.000
59.	Meja Kerja Kayu	242	1	1.800.000
60.	Meja Kerja Kayu	243	1	1.800.000
61.	Meja Kerja Kayu	244	1	1.800.000
62.	Meja Kerja Kayu	245	1	1.800.000
63.	Meja Kerja Kayu	246	1	1.800.000
64.	Meja Kerja Kayu	247	1	1.800.000
65.	Meja Kerja Kayu	248	1	1.800.000
66.	Meja Kerja Kayu	249	1	1.800.000
67.	Meja Kerja Kayu	250	1	1.800.000
68.	Meja Kerja Kayu	251	1	1.800.000
69.	Meja Kerja Kayu	252	1	1.800.000
70.	Meja Kerja Kayu	253	1	1.800.000

71.	Meja Kerja Kayu	254	1	1.800.000
72.	Coffee Maker	1	1	6.500.000
73.	Microphone Cable	1	1	550.000
74.	Microphone Cable	2	1	550.000
75.	Microphone	13	1	700.000
76.	Sound System	2	1	4.850.000
77.	Dispenser	6	1	3.075.000
78.	Baggage Trolley	1	1	1.700.000
79.	Wireless Amplifier	1	1	2.400.000
	Jumlah		79	1.800.373.500

(03) DITJEN. DAYASOS

Terdapat transaksi Pembelian atas Peralatan dan Mesin pada Satker Ditjen Pemberdayaan Sosial senilai **Rp. 2.402.016.500** terdiri dari:

Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial

Terdapat Transaksi Pembelian Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial sebesar **Rp 1.527.113.500,-** dengan rincian sebagai berikut:

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027030199630859000KP			
	Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	163	1.527.113.500
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	649.300.000
	CCTV- Camera Control Television ystem	1	13.000.000
	Meja Kerja Kayu	48	143.176.000
	Meja Rapat	1	29.964.000
	Partisi	50	55.698.500
	A.C Split	11	68.650.000
	Kipas angin	12	16.200.000
	Camera Digital	1	44.500.000
	Mesin Barcode	5	7.500.000
	P.C Unit	7	83.750.000
	Lap Top	23	401.500.000
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	13.875.000

Direktorat K2KRS

Terdapat transaksi Pembelian atas Peralatan dan Mesin pada Satker K2KRS senilai Rp 874.903.000 terdiri dari :

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
0270301994402130000KP			
K2KRS		15	874.903.000
	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	2	4.994.000
	Mesin Pel/ Pole	1	194.343.000
	A.C Sentral	5	170.000.000
	Sound System	1	129.647.000
	Karpet	1	199.768.000
	Video Presenter	1	66.300.000
	Camera Digital	1	59.851.000
	Tenda	3	50.000.000

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca **Peralatan dan Mesin** dengan transaksi **Pembelian (101) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRKPNAPZA Bambu Apus** senilai **Rp. 238.272.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
CCTV	1	15.950.000
Papan Visual/Papan Nama	2	39.237.000
Meja Kerja Kayu	4	19.360.000
Sice	2	22.495.000
AC Split	7	30.800.000
Televisi	2	24.859.900
Dispenser	2	9.328.000
Karpet	3	6.972.900
Vertikal Blind	7	11.299.200
LCD Monitor	1	2.860.000
PC Unit	1	15.895.000
Lap Top	2	33.715.000
Printer	2	5.500.000
JUMLAH	36	238.272.000

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Handayani Jakarta** senilai **Rp. 277.877.500,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Handy Talk	7	28,370,000
Lemari Kayu	3	13,200,000
CCTV	1	20,295,000
Papan Visual	1	49,802,500
Alat Perekam Suara	2	3,300,000
Meja Kerja Kayu	2	5,060,000
Kursi Besi	4	5,940,000
Sice	2	15,950,000
Lemari Es	1	4,950,000
AC Split	6	37,950,000
Televisi	1	11,000,000
Sound System	1	24,750,000
Dispenser	1	4,730,000
Camera Digital	1	10,450,000
Alat Vocasional Assesment	1	18,480,000
Meja Kerja	1	4,400,000
Lap Top	1	15,950,000
Printer	1	3,300,000
JUMLAH	37	277,877,500

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRS Watunas Mulya Jaya** senilai **Rp. 174.700.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Papan Visual	1	74,800,000
Sice	1	13,000,000
Meja Rapat	1	9,450,000
Tempat Tidur Besi	1	8,000,000
Meja Makan Kayu	1	8,000,000
Lemari Es	1	5,950,000
AC Split	2	16,000,000
Dispenser	1	3,500,000
Alat Pemanas Prosecing	1	4,000,000
Kursi Zies	10	15,000,000
Camera Digital	1	10,000,000
Printer	1	7,000,000
JUMLAH	22	174,700,000

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSPDSRW Melati** senilai **Rp. 25.732.625,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Papan Visual	1	25,732,625
JUMLAH	1	25,732,625

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **Direktorat KSA** senilai **Rp. 499.781.700,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mobil Unit Rehabilitasi Sosial Keliling	1	453,630,000
Televisi	1	36,000,000
Printer	1	10,151,700
JUMLAH	3	499,781,700

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **Direktorat RTS & KPO** senilai **Rp. 197.403.700,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mesin Hitung	1	3,383,000
Camera Digital	1	8,999,000
Printer	1	11,235,000
P.C Unit	9	168,150,600
Wireless Acces Point	3	5,636,100
JUMLAH	15	197,403,700

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **Direktorat KP NAPZA** senilai **Rp. 49.600.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
LCD Projector Infocus	1	16,200,000
Televisi	2	27,900,000
TV Conector	1	5,500,000
JUMLAH	4	49,600,000

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial** senilai **Rp. 9.242.550.911,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Stand	1	15,012,250
Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya	4	1,863,864,000
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	6	1,415,700,000
Sepeda Motor	14	261,725,000
Mobil Unit Rehabilitasi Sosial Keliling	6	2,220,000,000
Sepeda	4	13,200,000
Mesin Pompa air PMK	1	4,800,000
Lemari Penyimpan	3	6,828,516
Lemari Besi/Metal	66	213,400,000
Lemari Kayu	2	21,122,000
Filing Cabinet Besi	8	17,600,000
Buffet	3	6,600,000
Papan Visual/Papan Nama	3	15,832,190
Alat Penghancur Kertas	2	11,000,000
LCD Projector/Infocus	5	34,246,200
Focusing Screen/Layar LCD Projector	5	10,710,000
Alat Penghancur Jarum	2	14,300,000
Alat Kantor Lainnya	1	61,600,000
Meja Kerja Kayu	53	261,081,394
Kursi Besi/Metal	327	513,574,105
Sice	9	118,903,802
Meja Rapat	28	110,162,800
Tempat Tidur Besi	54	265,920,600
Kasur/Spring Bed	1	5,400,000
Meja Makan Besi	5	35,750,000
Partisi	1	9,986,166
Backdrop TV/Wardrobe	1	8,081,168
Mesin Pemotong Rumput	5	38,516,500
Mesin Cuci	4	19,800,000
Lemari Es	7	44,385,000
A.C. Split	31	215,920,367
Kompor Gas (Alat Dapur)	2	5,500,000
Rice Cooker (Alat Dapur)	2	2,860,000
Kitchen Set	1	9,900,000
Rak Piring Alumunium	2	11,000,000
Blender	2	2,640,000
Televisi	7	108,500,000
Loudspeaker	2	8,800,000
Sound System	3	160,600,000
Wireless	1	3,899,500
Dispenser	12	42,894,000
Handy Cam	1	8,910,000

NAMA	QTY	NILAI
Karpet	3	4,950,000
Vertikal Blind	66	118,818,091
Bracket Standing Peralatan	1	1,750,000
Home Theater	1	1,710,500
Camera Digital	3	54,725,880
Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	2	5,637,500
Tensimeter	1	1,430,000
Tabung O2	1	2,200,000
Sepeda Statis	2	11,000,000
Tripod	1	1,540,000
Freezer - 30 Derajat Celcius	1	4,950,000
Meja Kerja Stainless	32	172,076,302
P.C Unit	14	163,518,200
Lap Top	6	74,892,300
Note Book	17	240,000,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	34	65,726,600
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	5,499,980
Alat Tenis Meja	1	11,000,000
Alat Badminton	1	44,000,000
Matras	1	1,400,000
Peralatan Fitnes	3	14,300,000
Treadmill	2	17,600,000
Sit Up Board	2	3,300,000
Total	893	9,242,550,911

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **LRSODHA Sukabumi** senilai **Rp. 74.500.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Papan Visual	2	74,500,000
JUMLAH	2	74,500,000

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BPBI Abiyoso** senilai **Rp. 529.100.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mesin Pompa Air PMK	1	4,500,000
DCP Alat Sensor	8	10,800,000
Papan Visual	2	58,000,000
Alat Perekam Suara	1	4,700,000
Meja Rapat	1	47,500,000
Mesin Pemetong Rumput	1	7,250,000
AC Split	2	22,500,000
Tangga Almunium	1	2,600,000
CD Player	1	5,500,000
UPS	8	11,000,000
Peralatan Studio Lainnya	2	114,000,000
Alat Komunikasi Digital & Konvensional Lainnya	1	63,750,000
Grafic Printer	1	165,000,000
Scanner	2	12,000,000
JUMLAH	32	529,100,000

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSPDM Phalamarta** senilai **Rp. 286.659.156,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Lemari Penyimpan	2	13,860,000
Papan Visual	1	74,200,000
Sice	4	34,859,000
Rak Sepatu	2	2,495,000
Lemari ES	1	6,930,000
AC Split	5	29,997,000
Sound System	1	19,800,000
Dispenser	1	3,410,000
Gordain	1	5,973,000
Alat Rumah Tangga Lainnya	1	7,200,000
Aquarium	1	3,000,000
Meja Kerja	4	23,980,000
Laptop	1	13,559,156
Printer	1	5,600,000
CCTV	1	19,800,000
Mixer	2	17,996,000
Televisi	1	4,000,000
JUMLAH	30	286,659,156

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BBRVBD Cibinong** senilai **Rp. 665.644.040,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mesin Pompa Air PMK	3	48,290,560
Mesin Penghitung Uang	1	1,826,600
Lemari Kayu	35	82,882,800
Papan Visual/Papan	1	74,250,000
A.C. Split	13	106,126,000
Sound System	1	23,970,000
P.C Unit	2	36,085,500
Lap Top	8	71,150,400
Locker	7	14,734,720
Meja Kerja Kayu	35	58,478,420
Kursi Besi Metal	3	6,117,540
Tempat Tidur Kayu	35	73,673,600
Televisi	5	24,996,400
Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	31,711,500
Alat Tenis Meja	1	11,350,000
JUMLAH	160	665,644,040

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSPDSN Wyata Guna Bandung** senilai **Rp. 88.197.890,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Kendaraan Bermotor Roda 3 Pengangkut Barang	1	26,361,890
Lemari Besi/Metal	2	3,600,000
Filing Cabinet Besi	4	6,400,000
Papan Visual	1	29,336,000
Alat Kantor Lainnya	15	15,000,000
Alat Pemadam Kebakaran	5	7,500,000
JUMLAH	28	88,197,890

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSEGP Pangudi Luhur** senilai **Rp. 231.769.800,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Lemari Besi/Metal	2	5,000,000
Lemari Kayu	2	6,900,000
CCTV	1	35,000,000
White Board	2	3,600,000
Meja Kerja Kayu	10	15,000,000
Kursi Besi	32	44,950,000
Sice	2	9,450,000
AC Split	4	18,000,000
Alat Pendingin	4	6,000,000
Televisi	2	11,050,000
Loadspeker	1	3,300,000
Dispenser	2	3,000,000
Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1	1,870,000
PC Unit	1	8,786,400
Lap top	2	17,468,000
Printer	4	10,550,400
Papan Visual	1	31,845,000
JUMLAH	73	231,769,800

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSLU Budi Darma** senilai **Rp. 785.999.300,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mobil Jenazah	1	346,930,000
Lemari Besi	4	9,600,000
Filing Cabinet Besi	3	6,120,000
CCTV	1	8,981,000
Papan Visual/Papan Nama	1	14,262,000
LCD Projector/Infocus	2	18,339,500
Meja Kerja Besi/Metal	2	6,152,200
Meja Kerja Kayu	1	2,277,000
Bangku Panjang Besi/Metal	4	16,666,600
Meja Rapat	1	6,767,000
Air Cleaner	1	3,096,500
A.C. Split	18	140,019,000
Rice Cooker (Alat Dapur)	1	3,294,000
Televisi	2	23,909,000
Loudspeaker	6	26,308,000
Tangga Aluminium	1	2,600,000
Lampu Dinding	1	2,530,000
Microphone/Wireless MIC	3	6,433,000
Kursi Zeis	2	2,530,000
Food Trolley	5	6,600,000
P.C Unit	3	24,464,000
Lap Top	2	22,562,000
Note Book	4	23,543,500
Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	34,208,000
Alat Tennis Meja	1	23,000,000
Treadmill	1	4,807,000
JUMLAH	81	785,999,300

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSPDSN Tan Miyat** senilai **Rp. 211.635.790,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Lemari Kayu	3	15,000,000
CCTV - Camera Control Television System	1	14,225,000
Papan Visual/Papan	1	12,500,000
LCD Projector/Infocus	1	8,000,000
Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	5,048,850
Meja Kerja Kayu	4	10,000,000
Kursi Besi/Metal	14	18,350,000
Sice	7	38,700,000
Meja Resepsionis	1	4,950,000
A.C. Split	6	39,750,000
Televisi	1	4,749,120
Dispenser	1	3,950,000
Lampu Tegak/Standing Lamp	2	2,900,000
TV Monitor	1	7,275,520
P.C Unit	1	7,978,180
Speaker Komputer	1	1,500,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	4,159,120
Peralatan Studio Audio Lainnya	1	12,600,000
JUMLAH	48	211,635,790

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSKPNAPZA Galih Pakuan** senilai **Rp. 22.308.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Papan Visaul	1	22,308,000
JUMLAH	1	22,308,000

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSPDI Ciung Wanara** senilai **Rp. 74.400.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Papan Visaul	7	74,400,000
JUMLAH	7	74,400,000

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSPDM Margo Laras Pati** senilai **Rp. 20.120.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Papan Visaul	1	20,120,000
JUMLAH	1	20,120,000

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSKPNAPZA Satria Baturaden** senilai **Rp. 203.607.578,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Penggiling Kopi	1	29,760,000
Lemari Kayu	1	3,600,000
Buffet	1	12,500,000
LCD Projector/Infocus	2	23,900,000
Meja Kerja Kayu	1	2,900,000
Kursi Besi/Metal	8	24,000,000
A.C. Split	2	9,000,000
Sound System	1	6,400,000
Blender	1	1,720,000
Grinder	1	18,500,000
Perkakas Bengkel Service Lainnya (Alat Bengkel Bermesin)	1	18,850,000
Alat Penggiling Kopi	1	29,760,000
Lampu	1	14,500,000
Peralatan Umum Lainnya	1	3,600,000
Alat Peraga Pelatihan Lainnya	2	30,027,578
Meja Kerja Besi	2	4,350,000
JUMLAH	27	203,607,578

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSBD Prof Dr Soeharso Surakarta** senilai **Rp. 371.416.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Camera Control Television System	1	3,250,000
LCD Projector/Infocus	1	7,070,000
Meja Kerja Kayu	5	15,650,000
Kursi Besi/Metal	12	24,000,000
Sice	4	29,650,000
Meja Komputer	1	2,300,000
Lemari Es	1	6,600,000
A.C. Split	8	42,500,000
Televisi	2	19,300,000
Sound System	6	11,000,000
Mesin Jahit	8	50,600,000
Dispenser	2	6,200,000
Home Theater	1	5,750,000
Engine Dinamo Meter	12	18,216,000
Uninterrupted Power Supply (UPS)	4	5,200,000
Internet	1	3,250,000
P.C Unit	9	96,080,000
Lap Top	1	15,800,000
Monitor	5	6,250,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	2,750,000
JUMLAH	85	371,416,000

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSBG Kartini Temanggung** senilai **Rp. 224.500.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Rak Kayu	6	46,145,000
Papan Visual/Papan Nama	1	25,500,000
LCD Projector/Infocus	1	14,850,000
Kursi Kayu	1	5,170,000
Sice	2	11,935,000
Meja Rapat	11	27,225,000
Meja Komputer	1	8,195,000
Meja Resepsionis	1	9,900,000
Lemari Es	1	1,870,000
A.C. Split	2	19,250,000
Televisi	7	7,150,000
Kursi Zeis	16	16,720,000
P.C Unit	1	13,650,000
Lap Top	1	13,640,000
Peralatan Permainan Lainnya	1	3,300,000
JUMLAH	53	224,500,000

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Antasena** senilai **Rp. 34.885.030,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Papan Visaul	1	34,885,030
JUMLAH	1	34,885,030

- transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSODH Bahagia** senilai **Rp. 46.497.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Papan Visaul	1	16,500,000
Meubelir Lainnya	11	29,997,000
JUMLAH	12	46,497,000

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSKPNAPZA Insyaf** senilai **Rp. 8.500.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Papan Visaul	1	8,500,000
JUMLAH	1	8,500,000

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Rumbai** senilai **Rp. 15.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Papan Visaul	1	15,000,000
JUMLAH	1	15,000,000

- transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Alyatama** senilai **Rp. 20.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Papan Visaul	1	20,000,000
JUMLAH	1	20,000,000

- transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSPDF Budi Perkasa** senilai **Rp. 94.549.750,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Papan Visaul	1	8,150,000
Perkakasa Bengkel Khusus Lainnya	17	86,399,750
JUMLAH	18	94,549,750

- transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSPDM Budi Luhur** senilai **Rp. 23.925.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Papan Visaul	1	23,925,000
JUMLAH	1	23,925,000

- transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSPDSN Tumotou** senilai **Rp. 30.545.455,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Papan Visaul	1	30,545,455
JUMLAH	1	30,545,455

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSPDI Nipotowe Palu** senilai **Rp. 72.375.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mesin Penghitung Uang	1	2,000,000
LCD Projector/Infocus	2	16,000,000
Alat Tennis Meja	1	19,210,000
Papan Visual	1	1,975,000
Televisi	3	11,821,364
Loadspeker	1	2,068,636
Alat Rumah Tangga Lainnya	3	3,300,000
Fingger Print	1	4,000,000
Target Drone	1	12,000,000
JUMLAH	14	72,375,000

- transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSPDF Wirajaya** senilai **Rp. 13.929.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Papan Visaul	1	13,929,000
JUMLAH	1	13,929,000

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSLU Gau Mabaji** senilai **Rp. 409.520.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Pompa Air	4	11,880,000
Papan Visual/Papan	1	12,265,000
LCD Projector/Infocus	2	29,040,000
Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	4,180,000
Meja Kerja Kayu	30	74,250,000
Kursi Besi/Metal	41	71,982,900
Sice	2	27,365,600
Meja Rapat	1	4,331,200
Tempat Tidur Besi	1	2,310,000
Kasur/Spring Bed	1	4,950,000
A.C. Split	8	43,972,500
Cold Storage (Alat Pendingin)	1	5,390,000
Kompur Listrik (Alat Dapur)	1	1,347,500
Kitchen Set	6	14,256,000
Televisi	2	9,889,000
Loudspeaker	2	6,735,300
Karaoke	1	27,225,000
Alat Pangkas Rambut Listrik	1	1,320,000
Home Theater	1	8,580,000
Telephone (PABX)	1	14,232,500
Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	1	1,760,000
UV Sterilizer	1	7,095,000
Instrument Trolley, Stainless Steel	2	2,640,000
Blood Pressure Meter/Tensimeter	2	6,930,000
Infrared Lamp	1	1,155,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	12,017,500
Heat Gun Dryer (Hair Dryer)	1	2,420,000
JUMLAH	123	409,520,000

- transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Toddopuli** senilai **Rp. 25.500.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Papan Visaul	1	25,500,000
JUMLAH	1	25,500,000

- transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **LRSPDSRW Meohai** senilai **Rp. 28.025.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Papan Visaul	1	28,025,000
JUMLAH	1	28,025,000

- transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **LRSLU Minaula** senilai **Rp. 40.925.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Papan Visaul	1	40,925,000
JUMLAH	1	40,925,000

- transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSPDSN Mahatmiya** senilai **Rp. 24.970.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Papan Visaul	1	24,970,000
JUMLAH	1	24,970,000

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Paramita Mataram** senilai **Rp. 85.900.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Lemari Es	1	20,000,000
Genset	1	52,000,000
Papan Visual	1	13,900,000
JUMLAH	3	85,900,000

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Naibonat Kupang** senilai **Rp. 268.119.100,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Engine Stand	1	1,649,450
Rak Besi	1	1,980,000
CCTV - Camera Control Television System	2	7,997,000
Papan Visual/Papan Nama	1	23,595,000
Mesin Absensi	1	3,712,500
LCD Projector / Infocus	1	16,500,000
Kursi Besi/Metal	34	46,656,432
Meja Rapat	16	35,013,568
Meja Resepsionis	3	6,820,000
Mesin Pemotong Rumput	3	6,750,000
Mixer	1	6,820,550
Equalizer	1	2,604,800
Loudspeaker	2	18,838,050
Microphone Table Stand	1	1,320,000
Kabel	1	1,980,000
Lampu	1	4,950,000
Microphone/Wireless MIC	1	3,080,000
Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	5,995,000
Microphone Cable	2	4,840,000
Nasofaringoscope	3	22,950,000
Stavol	1	2,200,000
Pompa Air	2	4,800,000
Kamera Digital	1	5,073,250
PC Unit	1	11,995,500
Laptop	2	19,998,000
JUMLAH	84	268,119,100

- transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSPDSRW Efata** senilai **Rp. 17.352.500,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Papan Visaul	1	17,352,500
JUMLAH	1	17,352,500

- transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSPDM Dharma Guna** senilai **Rp. 15.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Papan Visaul	1	15,000,000
JUMLAH	1	15,000,000

- Terdapat transaksi **Pembelian (101)** pada Satuan Kerja **BRSODH Wasana Bahagia Ternate** senilai **Rp. 176.465.000,-** dengan rincian

sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
A.C. Split	8	49,815,000
Kapasitas Sedang	1	82,900,000
Papan Visual	1	27,250,000
LCD Projector	1	6,750,000
TV	2	9,750,000
JUMLAH	13	176,465,000

(05) DITJEN. LINJAMSOS

Terdapat transaksi Pembelian atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp.10.113.001.250,- terdiri dari:

a. Sekretariat Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	290	1,372,397,800
	Mesin penghitung uang	1	4,013,800
	Lemari Kayu	12	143,400,000
	LCD Projector/Infocus	1	3,949,000
	Meja Kerja Kayu	71	319,000,000
	Kursi Besi /Metal	144	294,431,000
	Sice	6	46,000,000
	Televisi	2	82,020,000
	Dispenser	3	12,932,000
	Gordyin/Kray	2	24,178,000
	Kabel Roll	1	22,750,000
	Bracket Standing Peralatan	1	3,000,000
	Tripod Camera	3	11,346,000
	Camera Digital	1	29,280,000
	Clipp On	2	4,636,000
	P.C Unit	2	33,062,000
	Lap Top	12	245,037,000
	Tablet PC	1	10,980,000
	Personal Komputer Lainnya	2	24,400,000
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	20	43,233,200
	Snanner (Peralatan Personal Komputer)	3	14,749,800

b. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

027.05.00.440275			
	Direktorat PSKBA	16	7,122,696,000
	Mobil Tangki Air	5	1,986,600,000
	Rescue Truck	9	3,951,000,000
	Ran Jeep Kommab	2	1,185,096,000

c. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440310.000			
	Direktorat Jaminan Sosial	105	1,617,907,450
	Filing Cabinet Besi	1	1,428,900
	Brandkas	2	28,000,000
	Lemari Katalog	2	33,880,000
	Box Camera	1	1,540,000
	ur Kertas	1	17,812,300
	Alat Kantor Lainnya	1	6,000,000
	Meja Kerja Kayu	7	36,630,000
	A.C. Split	3	33,220,550
	Kitchen Set	1	16,940,000
	Camera Vidio	1	51,910,100
	Dispenser	1	1,815,000
	Gordyin/Kray	1	14,003,000
	Alat Pemas Prosesing (Water Heater)	1	4,400,000
	Lampu Blitz Kamera	1	1,210,000
	Finger Printer Time and Attand Acces Control System	3	17,350,000
	Switcher Combination	1	38,000,000
	Kursi Dorong	9	26,950,000
	Refrigerator	2	4,070,000
	Kamera Digital	1	14,505,000
	Digital Camera	1	50,701,000
	Lap Top	15	300,142,000
	Ultra Mobile P.C	2	10,340,000
	Hard Disk	2	33,308,000
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	9,235,600
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	25,620,000
	Wireless Access Point	11	376,750,000
	Peralatan Komputer Lainnya	29	459,196,000
	Fingerprint Kits	1	2,950,000

(06) DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN

Terdapat transaksi Pembelian atas Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin senilai **Rp2.302.007.900,00** dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN PEMBELIAN INTRA		QTY	TOTAL
PERALATAN DAN MESIN		294	2.302.007.900
Lemari Kayu	Buah	15	82.910.430
Rak Kayu	Buah	2	23.067.000
Meja Kerja Kayu	Buah	121	386.627.000
Kursi Besi/Metal	Buah	26	67.881.000
Kursi Kayu	Buah	3	4.950.000
Sice	Buah	1	17.325.000
Partisi	Buah	5	7.143.570
Nakas	Buah	12	16.500.000
Backdrop TV/Wardrobe	set	2	29.304.000
A.C. Split	Buah	1	17.160.000
Kitchen Set	Buah	2	25.249.600
Televisi	Buah	3	130.254.500
Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	Buah	1	4.818.000
Paper Tape Scanner	Buah	8	160.000.000
P.C Unit	Buah	22	400.020.400
Lap Top	Buah	34	644.804.600
Note Book	Buah	12	170.521.500
Tablet PC	Buah	3	48.767.800
Serial Printer	Buah	21	64.703.500

(11) BADIKLITPENSOS

Terdapat transaksi Pembelian atas peralatan dan mesin pada BP3S Senilai Rp.7.408.098.550,- pada satker:

- Sekretariat BP3S Rp.1.811.244.900,-

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
027110199369059000KP - SEKRETARIAT BADIKLIT PENSOS				
1	Lemari Kayu	Buah	5	100.540.000
2	CCTV	Buah	1	6.986.000
3	Alat Penghancur Kertas	Buah	2	8.030.000
4	LCD Projector/Infocus	Buah	2	39.500.000
5	Kursi Besi/Metal	Buah	1	10.560.000
6	Kursi Kayu	Buah	6	12.540.000
7	Sice	Buah	5	45.210.000
8	Kasur/Spring Bed	Buah	3	33.110.000
9	Meja Makan Kayu	Buah	1	8.580.000
10	Partisi	Buah	1	55.000.000
11	Lemari Es	Buah	1	5.500.000
12	Kompas Gas (Alat Dapur)	Buah	1	1.650.000
13	Kitchen Set	Buah	2	12.650.000
14	Televisi	Buah	4	83.221.000
15	Dispenser	Buah	1	4.675.000
16	Coffee Maker	Buah	1	16.670.500
17	Lensa Kamera	Buah	3	103.402.000
18	Kamera Udara	Buah	1	60.550.000
19	Personal Computer	Buah	4	80.170.000
20	Kamera Digital	Buah	3	131.967.400
21	Note Book	Buah	30	632.960.000
22	Tablet PC	Buah	1	10.237.000
23	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	4.500.000
24	Keyboard (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	3.600.000
25	Peralatan Mini Komputer Lainnya		1	1.600.000
26	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	11	33.781.000
27	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	84.000.000
28	Air Conditioning (AC)	Buah	14	220.055.000
TOTAL				1.811.244.900

- Pusdiklat Kesos senilai Rp.449.995.000,-

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
0271101994403260000KP - PUSDIKLAT KESOS				
1	Kasur/Spring Bed	Buah	120	356.660.000
2	Finger Print Camera	Buah	1	15.400.000
3	P.C Unit	Buah	2	35.640.000
4	Lap Top	Buah	1	15.895.000
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5	26.400.000
TOTAL				449.995.000

- Puslitbang Kesos Senilai Rp.249.879.850,-

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
0271101994403320000KP - PUSLITBANG KESOS				
1	Scanner (Universal Tester)	Buah	1	13.750.000
2	Lemari Besi/Metal	Buah	7	40.040.000
3	Sice	Buah	1	28.325.000
4	Lemari Es	Buah	3	17.325.000
5	Note Book	Buah	6	125.799.850
6	Air Conditioning (AC)	Buah	2	24.640.000
TOTAL				249.879.850

- Pusat Pengembangan Jabatan Profesi Peksos Dan Pensos senilai Rp.349.393.000,-

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027.11.00.682040			
	PUSBANGPROF	48	349.393.000
	Alat penghancur Kertas	1	2.805.000
	Meja Kerja Kayu	1	11.825.000
	Kursi Besi / Metal	17	55.478.500
	A.C Split	8	50.864.000
	Wireless	1	9.295.000
	Dispenser	2	7.700.000
	Slide Projector	1	11.660.000
	P.C Unit	9	90.337.500
	Note Book	5	90.948.000
	Printer	2	8.800.000
	Scanner	1	9.680.000

- Pusat Penyuluhan Sosial Senilai Rp.1.798.771.000,-

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027110200369084000KD			
	PUSPENSOS	104	1.798.771.000
	Lemari Penyimpan	8	92.070.000
	Mesin Penghitung Uang	1	4.950.000
	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	20.020.000
	Alat Penghancur Kertas	3	19.800.000
	Alat Pemotong Kertas	1	4.620.000
	Laser Pointer	7	11.108.000
	LCD Projector/Infocus	3	26.567.000
	Meja Kerja Kayu	5	48.400.000
	Kursi Besi/Metal	15	62.260.000
	Sice	1	19.800.000
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	12.100.000
	Televisi	2	200.960.000
	Loudspeaker	1	23.100.000
	Karpet	2	67.320.000
	Gordyin/Kray	6	94.550.000
	Kabel	1	5.500.000
	Lensa Kamera	2	75.998.000
	Camera Digital	3	126.362.000
	Tas Kamera	1	8.800.000
	Kamera Udara	2	77.385.000
	TV Monitor	1	197.725.000
	Bateray Pack Camera (Yang Bisa Diisi Ulang)	2	5.500.000
	Background / Kertas Background	1	10.648.000
	Lap Top	20	387.978.000
	Storage Modul Disk (Peralatan Mini Komputer)	5	23.250.000
	Computer Compatible	4	90.700.000
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	45.000.000
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	36.300.000

• Politeknik Kesejahteraan Sosial Senilai Rp. 897.193.000,-

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
02711369070 Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung				
1	Alat Ukur Lainnya		1	2.970.000
2	Rak-Rak Penyimpan	Buah	2	14.740.000
3	Lemari Penyimpan	Buah	1	2.915.000
4	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Buah	1	3.355.000
5	Lemari Kayu	Buah	4	21.389.500
6	Rak Besi	Buah	5	18.425.000
7	Filing Cabinet Besi	Buah	3	31.295.000
8	Brandkas	Buah	1	8.470.000
9	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	1.034.000
10	Mesin Absensi	Buah	2	6.600.000
11	LCD Projector/Infocus	Buah	16	192.280.000
12	Perkakas Kantor Lainnya		1	2.200.000
13	Kursi Besi/Metal	Buah	12	207.790.000
14	Kursi Kayu	Buah	2	7.480.000
15	Sice	Buah	3	32.538.000
16	Meja Resepsionis	Buah	2	5.016.000
17	Kasur/Spring Bed	Buah	1	3.410.000
18	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	2	19.910.000
19	A.C. Split	Buah	2	15.950.000
20	Karpet	Buah	4	24.288.000
21	Lampu	Buah	2	3.597.000
22	Bingkai Foto	Buah	1	1.980.000
23	Rak Peralatan	Buah	12	23.100.000
24	Camera Digital	Buah	1	22.110.000
25	High Perfomance Liquid Chromatography (H	Buah	1	21.994.500
26	Layar Proyektor	Buah	2	3.080.000
27	P.C Unit	Buah	5	68.475.000
28	Lap Top	Buah	7	74.525.000
29	Monitor	Buah	1	10.725.000
30	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	9.405.000
31	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	27.940.000
32	Peralatan Komputer Lainnya		1	8.206.000
TOTAL				897.193.000

- BBPPKS BANDUNG senilai Rp. 479.128.500,-

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027110200369084000KD			
	BBPPKS BANDUNG	183	479.128.500
	LCD Projector/Infocus	5	17.100.000
	Meja Kerja Kayu	21	78.750.000
	Kursi Besi/Metal	73	83.750.000
	Kursi Kayu	40	40.000.000
	Sice	5	37.000.000
	Meja Rapat	2	17.450.000
	Meja Makan Kayu	20	100.000.000
	Rice Warmer	3	9.750.000
	Thermos Air	2	5.300.000
	Alat Dapur Lainnya	4	27.000.000
	Televisi	1	16.178.500
	Lap Top	6	42.000.000
	CPU (Peralatan Personal Kompu	1	4.850.000

Berdasarkan hasil asersi terdapat penambahan pembelian pada satker BBPPKS Bandung senilai Rp.80.128.500,- berupa : Lcd Proyektor / infokus sebanyak 5 (lima) buah senilai Rp.17.100.000,- , Televisi sebanyak 1 (satu) buah senilai Rp.16.178.500,- , Lap Top sebanyak 6 (enam) buah senilai Rp.42.000.000,- dan CPU (peralatan personal computer) sebanyak 1 (satu) buah senilai Rp.4.850.000,-

- BBPPKS Yogyakarta senilai Rp.299.500.000,-

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027.11.369180			
	BBPPKS Yogyakarta	40	Rp 299.500.000
	Lap Top	7	Rp 68.896.000
	Backdrop Tv/wardrobe	1	Rp 15.019.625
	Sice	3	Rp 53.413.875
	Meja resepsionis	1	Rp 8.063.500
	Tempat tidur kayu	3	Rp 40.305.000
	Kasur	3	Rp 29.868.000
	Lemari kayu	3	Rp 24.576.000
	Meja kerja kayu	3	Rp 10.311.000
	kursi besi/kursi tunggu panjang	5	Rp 13.000.000
	Televisi	8	Rp 31.604.000

- BBPPKS Padang Senilai Rp.143.500.000,-

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027.11.369283			
	BBPPKS PADANG	16	143.500.000
	1 LCD Projector/Infocus	3	23.100.000
	2 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cl	3	6.300.000
	3 Microphone/Wireless MIC	1	6.600.000
	4 Lap Top	8	96.000.000
	5 Note Book	1	11.500.000

- BBPPKS Banjarmasin senilai Rp.35.211.000,-

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027.11.369752			
	BBPPKS BANJARMASIN	11	35.211.000
	Bracket Standing	11	35.211.000

- BBPPKS Makassar senilai Rp.224.062.200,-

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
027110199369059000KP - SEKRETARIAT BADIKLIT PENSOS				
1	Pompa Air	Unit	1	4.850.000
2	Lemari Besi/Metal	Buah	10	34.100.000
3	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	7.700.000
4	Peta	Buah	1	8.800.000
5	Sice	Buah	4	67.100.000
6	Meja Rapat	Buah	4	22.760.000
7	A.C. Split	Buah	4	36.960.000
8	Karpet	Buah	2	12.540.000
9	Lap Top	Buah	2	16.725.000
10	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	4	9.087.200
11	Fingerprint Kits	Buah	1	3.440.000
TOTAL				224.062.200

- BBPPKS Jayapura senilai Rp.670.220.100,-

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
027110199369059000KP - SEKRETARIAT BADIKLIT PENSOS				
1	LCD Projector/Infocus	Buah	2	32.390.000
2	Kursi Besi/Metal	Buah	25	107.237.500
3	Sice	Buah	3	59.190.000
4	Meja Makan Kayu	Buah	23	173.070.000
5	Mimbar/Podium	Buah	2	19.650.000
6	Kamera Digital	Buah	2	39.319.100
7	P.C Unit	Buah	10	142.409.000
8	Lap Top	Buah	5	96.954.500
TOTAL				670.220.100

TRANSFER MASUK

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Transfer Masuk pada Satker Setjen dan Satker Pusdatin berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Transfer Masuk	Satker Setjen	2	Rp 580.390.000	
		Satker Pusdatin	1	Rp 24.607.000	
TOTAL			3	Rp 604.997.000	

Rincian Transfer Masuk Satker Setjen

- Transfer masuk 1 Unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah) dari Satker PSDBS Senilai Rp.250.500.000,-;
- Adanya Transfer masuk (Biro Kepegawaian) dari Biro Keuangan 1 Unit Station Wagon dari Biro Keuangan Senilai Rp.329.890.000,- Nomor BAST : 1338/1.2/PL.05/8/2019. Tanggal 20 Agustus 2019;

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	QTTY	NILAI
132111	PERALATAN DAN MESIN	2	580.390.000
3.02.01.01.003	Station Wagon	1	329.890.000
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	250.500.000

Rincian Transfer Masuk Satker Pusdatin

Adanya transfer masuk barang berupa Notebook Apple Macbook Pro Intel Core i5 8GB sebanyak 1 unit dengan harga perolehan **Rp. 24.607.000,-** Transfer masuk dari Biro Umum kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Kesos dengan berita acara nomor 004/PL.03/01/2019 tanggal 04 Januari 2019 dengan nilai penyusutan Rp 6.151.750 . (Berita Acara Terlampir).

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	QTTY	NILAI
1	2	4	5
132111	PERALATAN DAN MESIN	1	24.607.000
3.10.01.02.003	Note Book	1	24.607.000

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

Adanya transaksi Transfer Masuk dari Unit Satuan kerja Sekretariat Jenderal senilai Rp. 493.380.366

No	Jenis Barang	NUP	Jumlah	Nilai (Rp.)
1.	Vertical Blind	1	1	12.291.400
2.	Vertical Blind	2	1	27.848.975
3.	Vertical Blind	3	1	13.756.600
4.	Vertical Blind	4	1	8.728.141
5.	Vertical Blind	5	1	9.706.950
6.	Vertical Blind	6	1	9.401.700
7.	Vertical Blind	7	1	10.785.500
8.	Vertical Blind	8	1	3.276.350
9.	A.C. Central	1	1	60.978.000
10.	A.C. Central	2	1	51.481.750

11.	A.C. Split	15	1	14.100.000
12.	A.C. Split	16	1	14.100.000
13.	A.C. Split	17	1	14.100.000
14.	A.C. Split	18	1	14.100.000
15.	Sice	27	1	15.125.000
16.	Laptop	90	1	17.800.000
17.	Laptop	91	1	17.800.000
18.	Laptop	92	1	17.800.000
19.	Laptop	93	1	17.800.000
20.	Laptop	94	1	17.800.000
21.	Laptop	95	1	17.800.000
22.	Laptop	96	1	17.800.000
23.	Laptop	97	1	17.800.000
24.	Laptop	98	1	17.800.000
25.	Laptop	99	1	17.800.000
26.	Laptop	100	1	17.800.000
27.	Laptop	101	1	17.800.000
	Jumlah		19	493.380.366

(02) DITJEN. DAYASOS

Terdapat transaksi Transfer Masuk atas Peralatan dan Mesin dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial ke Direktorat PSDBS senilai **Rp.582.407.000,-** dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 1217/PFM.PFMPD/KS/10/2018 pada hari Rabu tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas, dengan rincian sebagai berikut:

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027030199418940000KP			
	Dit PSDBS	11	582.407.000
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4	540.230.000
	Sepeda Motor	7	42177000

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca **Peralatan dan Mesin** dengan transaksi **Transfer Masuk (102) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Transfer Masuk (102) berupa Peralatan dan Mesin** sebesar **Rp. 12.117.306.662,-** pada **Satuan Kerja BRSKP NAPZA Bambu Apus** dikarenakan perubahan nomenkelatur dari pelayanan Anak menjadi Napza berdasarkan **Berita Acara Nomor:646/BRSKPN/PL.04/06/2019** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Portable Generating Set	1	29,900,000
Electric Generating Set Lainnya	1	58,120,000
Portable Water Pump	1	1,879,000
Sumersible Pump	10	20,124,000
Mesin Diesel	2	62,485,500
Veld Bed (Peralatan Kebakaran Hutan)	130	136,500,000
Tandu Lipat	3	2,340,000
Alat Bantu Lainnya	1	18,734,000
Station Wagon	1	295,360,000
Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	362,230,000
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3	367,776,319
Sepeda Motor	11	163,751,500
Mobil Unit Rehabilitasi Sosial Keliling	2	389,553,792
Gerobak Dorong	1	2,600,000
Meja Dorong Saji/Trolley Saji	4	3,549,600
Sepeda	19	11,940,000
Mesin Press Hidrolik & Punch	1	18,810,000
Mesin Bor	10	12,427,500
Mesin Rol	1	205,000
Mesin Kompresor	4	16,378,000
Mesin Las Listrik	1	7,500,000
Mesin Pemotong Fiberglass/Poliyster	1	7,084,545
Mesin Gerinda Tangan	1	14,000
Mesin Bor Tangan	5	8,986,000
Battery Charge	2	2,910,000
Solder Listrik	7	8,859,000
Engine Cylinder Research Engine	1	20,000,000
Steam Pressure Gauge	3	6,530,000
Steam Cleaner	1	2,500,000
Mesin Spooling	2	3,960,000
Mesin Gergaji	2	5,992,800
Peralatan Las Listrik	3	5,700,000
Peralatan Las Karbit	5	1,841,000
Perkakas Pemotong Plat	2	2,900,000
Perkakas Pengecatan Kendaraan	1	67,000
Perkakas Bengkel Listrik Lainnya (Alat Bengkel Tak Bermesin)	1	1,000,000
Dongkrak Mekanik	2	1,169,000
Tool Kit Set	15	39,215,000
Tool Kit Box	3	4,521,100
Tool Cabinet Set	1	20,786,000
Engine Stand	9	142,927,570

NAMA	QTY	NILAI
Toolkit Perbengkelan	6	44,567,000
Kunci Khusus Untuk Engine	2	1,120,000
Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	3	2,450,000
Kunci L	1	630,000
Bor	4	7,729,000
Tanggem	3	6,900,000
Gunting Plat	2	3,006,000
Kunci Pas	3	48,000
Drei Ketok (Obeng)	1	665,000
Peralatan Tukang Besi Lainnya	1	1,600,000
Gunting Kain	4	1,400,000
Cermin Besar	6	30,567,000
Peralatan Bengkel Lainnya	1	1,400,000
Mesin Gerinda tangan Listrik	2	5,450,000
Multisester Digital	20	23,660,000
Multi Meter	1	1,050,000
Scanner (Universal Tester)	1	24,250,000
Nozzle Tester	1	2,958,000
Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya	1	532,000
Ragum /Catok	14	16,591,000
Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	2,445,000
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	994,400
Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	3	5,047,800
Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	2	5,264,000
Mesin Ketik Listrik Langewagon (18-27 Inchi)	1	220,000
Mesin Kas Register	1	5,180,000
Lemari Besi/Metal	29	63,465,000
Lemari Kayu	106	135,680,300
Rak Besi	51	55,998,000
Rak Kayu	32	135,572,200
Filing Cabinet Besi	62	114,930,000
Brandkas	2	12,640,000
Buffet	1	1,553,000
Locker	51	41,400,000
CCTV - Camera Control Television System	1	12,847,586
Papan Visual/Papan Nama	15	73,010,000
White Board	20	22,049,000
Alat Penghancur Kertas	5	8,035,000
Mesin Absensi	1	8,355,500
Overhead Projector	1	20,292,500
White Board Electronic	1	10,781,500

NAMA	QTY	NILAI
Mesin Laminating	1	423,000
Lampu-lampu Kristal	2	1,500,000
LCD Projector/Infocus	12	97,271,172
Flip Chart	2	5,000,000
Papan Gambar	1	10,771,200
Papan Pengumuman	1	40,897,000
Perkakas Kantor Lainnya	125	106,654,100
Meja Kerja Besi/Metal	3	10,800,000
Meja Kerja Kayu	139	225,312,500
Kursi Besi/Metal	1,117	493,647,000
Kursi Kayu	200	72,500,000
Sice	52	259,349,500
Bangku Panjang Kayu	28	12,540,000
Meja Rapat	57	139,735,000
Meja Komputer	43	42,809,000
Tempat Tidur Besi	157	390,173,000
Tempat Tidur Kayu	50	36,100,000
Meja Resepsionis	3	41,325,000
Kasur/Spring Bed	312	254,168,000
Sketsel	1	9,000,000
Meja Makan Kayu	67	158,180,000
Kursi Fiber Glas/Plastik	4	6,545,000
Rak Sepatu (Almunium)	19	19,000,000
Meubelair Lainnya	1	17,600,000
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3	6,548,000
Mesin Pel/Poles	1	16,000
Mesin Pemotong Rumput	1	4,375,700
Mesin Cuci	2	16,000,000
Lemari Es	9	30,741,200
A.C. Window	2	32,974,400
A.C. Split	38	214,672,250
Kipas Angin	104	63,857,000
Exhaust Fan	10	12,250,000
Cold Storage (Alat Pendingin)	1	4,350,000
Reach In Frezzer	2	4,557,500
Air Curtain	1	5,200,000
Kompore Gas (Alat Dapur)	12	7,288,000
Rice Cooker (Alat Dapur)	5	10,956,000
Oven Listrik	1	10,032,000
Kitchen Set	11	27,372,000
Tabung Gas	11	6,593,000
Mesin Giling Bumbu	2	961,000

NAMA	QTY	NILAI
Treng Air/Tandon Air	2	3,000,000
Rak Piring Alumunium	3	2,949,000
Panci	11	18,416,000
Mixer	1	5,700,000
Alat Dapur Lainnya	2	840,000
Radio	1	1,650,000
Televisi	51	219,475,500
Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	9	10,656,500
Amplifier	3	6,150,000
Loudspeaker	2	12,000,000
Sound System	6	170,100,000
Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga)	2	3,650,000
Wireless	5	23,923,000
Megaphone	4	2,728,000
Microphone Table Stand	20	8,900,000
Mic Conference	24	88,359,000
Unit Power Supply	11	9,845,000
Stabilisator	2	1,000,000
Tustel	7	33,565,550
Mesin Jahit	55	267,749,420
Lambang Garuda Pancasila	1	24,000
Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	420,000
Setrika	22	11,090,000
Tangga Aluminium	3	1,800,000
Kaca Hias	24	18,780,000
Dispenser	26	45,990,000
Mimbar/Podium	5	7,567,000
Handy Cam	4	18,629,900
Mesin Obras	11	42,804,400
Mesin Potong Kain	4	8,430,000
Mesin Pelubang Kancing	4	11,475,000
Meja Potong	8	16,066,000
Manequin (Boneka)	4	800,000
Mini Compo	3	3,566,000
Karpet	14	12,365,000
Vertikal Blind	27	94,350,000
Gordyin/Kray	131	117,037,300
Lemari Plastik	79	33,150,000
DVD Player	3	11,518,586
Kabel	1	5,200,000
Bingkai Foto	15	29,625,000
Home Theater	1	9,475,000

NAMA	QTY	NILAI
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6	9,275,000
Alat Rumah Tangga Lainnya	32	29,550,000
Audio Amplifier	2	10,109,486
Microphone/Wireless MIC	4	28,550,000
Professional Sound System	1	93,750,000
Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1	191,000
Voice Recorder	2	2,990,000
Digital LED Running Text	1	9,900,000
Rak Peralatan	1	1,120,000
Slide Projector	2	53,894,000
Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	2	13,916,800
Camera Digital	12	54,282,000
Mesin Potong	1	6,350,000
Mesin Cacah	1	11,430,000
Telephone (PABX)	1	14,993,990
Pesawat Telephone	4	10,417,000
Telephone Mobile	2	17,855,172
Handy Talky (HT)	20	67,477,376
Facsimile	4	14,081,000
Telepon Satelit	4	53,350,344
Alat Komunikasi Radio HF/FM Lainnya	44	103,787,784
Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	1	2,995,000
Alat Komunikasi Lainnya	1	89,777,586
Switcher/Menara Antena Lainnya	1	6,428,586
Genset	2	44,900,000
Sterilisator	1	1,465,000
Stethoscope (Alat Kedokteran Umum)	5	5,942,000
Tensimeter	2	647,000
Head Lamp (Alat Kedokteran Umum)	1	7,830,000
Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	3	2,463,000
Tabung O2	1	975,000
Lemari Obat (Kaca)	2	11,226,000
Kursi Dorong	20	33,000,000
Clips Forcep	6	4,437,000
Emergency Trolley	1	4,900,000
Kursi Zeis	34	100,300,000
Blood Pressure Meter/Tensimeter	1	475,000
Alat Kesehatan Umum Lainnya	5	2,150,000
Engine Dinamo Meter	2	14,790,000
Blender	10	5,750,000
Bak Fiberglass	3	1,143,000
Spray Gun	2	1,100,000

NAMA	QTY	NILAI
Hair Dryer/Spray Dryer/Dryer	6	8,874,000
Mesin Potong Jerami	2	7,900,000
Elektroda Spesifik	8	4,640,000
Stainless Steel Tong	18	11,678,000
Impact Test	4	5,916,000
Mesin Jahit Bartacking	1	25,080,000
Mesin Grinding Acuan	1	25,080,000
Mesin Waste Water Purification	1	22,500,000
Personal Computer	4	17,000,000
Grafic Printer PR-1	1	10,050,000
Blander SS	1	1,016,000
Gentong Plastik	4	1,524,000
Alat Fraksinasi Serat	1	1,500,000
Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	14	15,465,000
Uninterrupted Power Supply (UPS)	25	34,000,000
Software Conf Off-Line Computer	27	218,180,000
Control Panel	1	119,000,000
Peralatan Umum Lainnya	11	160,443,250
Tang Ampere	2	2,000,000
Sarung Tangan Pelindung	50	15,000,000
Kamera Digital	1	10,813,000
Spray Glue	2	1,270,000
Layar Proyektor	2	9,700,000
Magnifier	1	2,465,000
Local Area Network (LAN)	23	35,100,000
P.C Unit	66	737,404,460
Lap Top	34	404,562,988
Note Book	6	59,500,000
Personal Komputer Lainnya	1	825,000
Komputer Unit Lainnya	1	6,831,586
Console Unit (Peralatan Mainframe)	1	28,527,586
Steamer	8	13,148,500
Plotter (Peralatan Mini Komputer)	1	45,000,000
Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	6,590,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	35	152,852,720
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7	31,495,344
External	2	1,747,450
Server	5	307,565,258
Router	2	15,537,586
Modem	13	23,393,360
Netware Interface External	1	1,343,100
Rak Server	1	28,527,586

NAMA	QTY	NILAI
Firewall	1	17,528,586
Switch	7	65,923,102
Peralatan Jaringan Lainnya	1	35,877,586
Peralatan Bantu Lainnya	3	20,425,000
Tenda Pleton (Alat Pendukung Pencarian)	4	29,400,000
Regulator	4	1,200,000
Genset	2	5,215,000
Air Conditioning (AC)	25	173,800,000
Aid Hearing	1	37,000,000
Alat Peraga Pelatihan Lainnya	120	455,197,000
Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	11	68,818,500
Jet Pump	31	100,954,500
Drum	1	5,500,000
Rambu Jalan	5	12,125,000
Alat Tennis Meja	15	16,358,400
Alat Badminton	16	7,777,000
Peralatan Fitnes	1	359,000
Catur	1	510,400
Total		12,117,306,662

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor:220/2.1/PL.04/08/2019 terdapat transaksi **Transfer Masuk (102)** kepada Satuan Kerja Loka Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV Aids "Kahuripan" Sukabumi berupa **Mobil Unit Rehabilitasi Sosial Keliling senilai Rp. 330.430.000,-** untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mobil Unit Rehabilitasi Sosial Keliling	1	330,430,000
JUMLAH	1	330,430,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Direktorat RSPD Nomor : 297/2.3/PL.05/07/2019 terdapat transaksi **Transfer Masuk (102)** kepada Satuan Kerja BRSPDSN Wyata Guna senilai Rp. 746.350.000,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mini Bus 14 Orang Ke Bawah	1	746,350,000
JUMLAH	1	746,350,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Direktorat RSPD Nomor : 294/2.3/PL.05/07/2019 terdapat transaksi Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BBRSD Prof DR Soeharso senilai Rp. 746.350.000,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mini Bus 14 Orang Ke Bawah	1	746,350,000
JUMLAH	1	746,350,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Direktorat RSPD Nomor : 296/2.3/PL.05/07/2019 terdapat transaksi Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BRSPDF Budi Perkasa senilai Rp. 587.654.000,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mobil Unit Rehabilitasi Sosial Keliling	1	587,654,000
JUMLAH	1	587,654,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Direktorat RSPD Nomor : 295/2.3/PL.05/07/2019 terdapat transaksi Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BRSPDSN Mahatmiya senilai Rp. 746.350.000,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mini Bus 14 Orang Ke Bawah	1	746,350,000
JUMLAH	1	746,350,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Direktorat RSPD Nomor : 296/2.3/PL.05/07/2019 terdapat transaksi Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja BRSPDF Wirajaya Rp.746.350.000,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mini Bus 14 Orang Ke Bawah	1	746,350,000
JUMLAH	1	746,350,000

(05) DITJEN. LINJAMSOS

**a. Sekretariat Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial
senilai Rp. 87.908.200,-**

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	15	87,908,200
	Overhead Projector	1	25,000,000
	Camera Electronic	1	3,450,000
	Tripod Camera	1	1,200,000
	Slide Projector	1	10,822,000
	Camera Film	1	2,100,000
	Camera Digital	1	2,805,000
	P.C Unit	2	18,000,000
	Note Book	1	16,815,000
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	6,938,200
	External	2	778,000

- i. Dinas Sosial Gorontalo senilai Rp 29.743.200 berdasarkan BASTB Nomor: 050/1603.A/XI/2019 tanggal 1 November 2019

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.3100.319013.000.DK			
	Dinsos Provinsi Gorontalo	4	29,743,200
	Camera Digital	1	2,805,000
	Overhad Projector	1	25,000,000
	Printer (Peralaan Personal Komputer)	2	1,938,200

- ii. Dinas Sosial Sulawesi Tenggara senilai Rp. 58.165.000,- berdasarkan BASTB Nomor: 028/2627/2019 tanggal 11 November 2019

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.2000.209015.000.DK			
	Dinsos Provinsi Sulawesi tenggara	11	58,165,000
	P.C Unit	2	18,000,000
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	5,000,000
	Tripod Camera	1	1,200,000
	Slide Projector	1	10,822,000
	Camera Film	1	2,100,000
	Camera Electronic	1	3,450,000
	External	2	778,000
	Note Book	1	16,815,000

b. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Transfer masuk dari Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan BASTB nomor: 762 / Set.Ljs / 04 / 2019 tanggal 22 April 2019 dan BASTB Nomor: 525 / Set.Ljs / 03 / 2019 tanggal 18 Maret 2019, BASTB Nomor: 2243/Set.Ljs/11/2019 tanggal 19 November 2019

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.05.00.440275			
	Direktorat PSKBA	109	676,194,000
	Lemari Kayu	11	120,000,000
	Meja Kerja Kayu	52	236,500,000
	Kursi Besi/Metal	30	51,000,000
	Sice	6	46,000,000
	Televisi	2	82,020,000
	Kabel Roll	1	22,750,000
	Braket Standing Peralatan	1	3,000,000
	Lap Top	6	114,924,000

a. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Transfer masuk dari Sekretariat berdasarkan BASTB Nomor: 990/Set.Ljs/05/2019 tanggal 21 Mei 2019 dan BASTB Nomor: 2242/Set.Ljs/11/2019 tanggal 19 November 2019

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440281			
	Direktorat PSKBBS	69	267,605,000
	Mesin Hitung uang	1	4,013,800
	LCD Projector/Infocus	1	3,949,000
	P.C Unit	1	21,960,000
	Lap Top	3	38,613,000
	Personal Komputer Lainnya	1	12,200,000
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	19	37,833,200
	Scanner	1	4,392,000
	Kursi Besi Metal	40	111,216,000
	Dispenser	1	4,148,000
	Camera Digital	1	29,280,000

- b. **Direktorat JAMSOSKEL** senilai Rp. 142.878.000,-
 Transfer masuk dari Sekretariat berdasarkan BASTB: nomor 1337 /
 Set. Ljs/07/2019 tanggal 22 Juli 2019 berupa:

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440310			
	Direktorat JAMSOSKEL	31	142,878,000
	Lemari Kayu	1	23,400,000
	Meja Kerja Kayu	18	78,800,000
	Kursi Besi/Metal	10	16,500,000
	Gordyin/Kray	2	24,178,000

(06) DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN

Terdapat transaksi Tranfer Masuk atas Peralatan dan Mesin pada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin senilai **Rp534.241.000,00** dikurangi Akumulasi Penyusutan senilai **Rp23.133.188,00** sehingga nilai transfer keluar menjadi **Rp511.107.812,00** terdiri dari :

- a. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I

Terdapat transfer masuk peralatan dan mesin dari Sekretarait Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) senilai **Rp294.979.500,00** dikurangi Akumulasi Penyusutan **Rp4.534.438,00** sehingga nilai buku menjadi **Rp290.445.062,00** dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Masuk Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I					
NO	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BAST	KUANTITAS	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Notebook	3641/4.1/PL.05.02/08/2019 Tanggal 30 Agustus 2019	1	6.345.500	6.345.500
2	Notebook	3641/4.1/PL.05.02/08/2019 Tanggal 30 Agustus 2019	10	12.935.000	129.350.000
3	Laptop	3641/4.1/PL.05.02/08/2019 Tanggal 30 Agustus 2019	1	11.588.500	11.588.500
4	Notebook	3641/4.1/PL.05.02/08/2019 Tanggal 30 Agustus 2019	1	16.727.500	16.727.500
5	P.C Unit	3641/4.1/PL.05.02/08/2019 Tanggal 30 Agustus 2019	2	8.010.000	16.020.000
6	Serial Printer	3641/4.1/PL.05.02/08/2019 Tanggal 30 Agustus 2019	6	1.698.000	10.188.000
7	Serial Printer	3641/4.1/PL.05.02/08/2019 Tanggal 30 Agustus 2019	4	2.340.000	9.360.000
8	Latop	4635/4.1/PL.05.02/10/2019 Tanggal 31 Oktober 2019	2	19.200.000	38.400.000
9	P.C Unit	4635/4.1/PL.05.02/10/2019 Tanggal 31 Oktober 2019	3	19.000.000	57.000.000
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin				(4.534.438)
T O T A L					290.445.062

- b. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II

Terdapat transfer masuk peralatan dan mesin dari Sekretarait Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) senilai **Rp37.442.500,00** dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Masuk Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II					
NO	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BAST	KUANTITAS	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Laptop	2274/4.1/PL.05.02/05/2019 Tanggal 28 Mei 2019	1	16.864.500	16.864.500
2	Laptop	2274/4.1/PL.05.02/05/2019 Tanggal 28 Mei 2019	1	18.961.000	18.961.000
3	Serial Printer	2274/4.1/PL.05.02/05/2019 Tanggal 28 Mei 2019	1	1.617.000	1.617.000
T O T A L					37.442.500

c. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III

Terdapat transfer masuk peralatan dan mesin dari Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) senilai **Rp201.819.000,00** dikurangi Akumulasi Penyusutan **Rp18.598.750,00** sehingga nilai buku menjadi **Rp183.220.250,00** dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Masuk Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III					
NO	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BAST	KUANTITAS	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Laptop	2273/4.1/PL.05.02/05/2019 Tanggal 20 Mei 2019	1	16.864.500	16.864.500
2	Laptop	2273/4.1/PL.05.02/05/2019 Tanggal 20 Mei 2019	1	15.159.500	15.159.500
3	Notebook	4489/4.1/PL.05.02/10/2019 Tanggal 23 Oktober 2019	3	15.839.000	47.517.000
4	Notebook	4489/4.1/PL.05.02/10/2019 Tanggal 23 Oktober 2019	2	13.439.000	26.878.000
5	Laptop	4592/4.1/PL.05.02/10/2019 Tanggal 29 Oktober 2019	2	19.200.000	38.400.000
6	P.C Unit	4592/4.1/PL.05.02/10/2019 Tanggal 29 Oktober 2019	3	19.000.000	57.000.000
7	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin				(18.598.750)
T O T A L					183.220.250

(11) BADIKLITPENSOS

Terdapat transaksi Transfer Masuk atas peralatan dan mesin pada BP3S Senilai Rp.2.912.223.400,- yaitu pada Satker:

- STKS Bandung

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027110200369070000KD			
	STKS BANDUNG	1	21.978.000
	Lap Top	1	21.978.000

Adanya transfer masuk dari Biro Umum Kementerian Sosial berupa 1 buah Lap Top Macbook Air sesuai dengan berita acara serah terima nomor: 032/PL.03/02/2019 tanggal 12 Februari 2019.

• PUSDIKLAT KESSOS

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027.11.440326			
	PUSDIKLAT KESSOS	601	2.407.442.400
	Lemari Penyimpan	2	200.970.000
	Lemari Kayu	7	168.742.750
	Rak Kayu	1	55.687.500
	White Board	1	2.805.000
	Meja Kerja Kayu	240	704.880.000
	Kursi Besi/Metal	290	866.683.270
	Kursi Kayu	6	12.540.000
	Sice	25	156.414.630
	Meja Rapat	6	26.730.000
	Meja Resepsionis	1	7.128.000
	Kasur/Spring Bed	3	33.110.000
	Meja Makan Kayu	1	8.580.000
	Partisi	8	47.520.000
	Backdrop TV/Wardrobe	2	23.141.250
	Kitchen Set	3	59.180.000
	Air Conditioning (AC)	5	33.330.000

Transfer masuk ke Pusdiklat Kesos berasal dari 2 transaksi pengadaan yaitu:

- a. Transaksi Pembelian senilai Rp.195.140.000,- yang merupakan pengadaan interior (Springbed, Sofa, Lemari dll) untuk Wisma/Mess. sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor: 3149/6.1/PL.04.02/12/2019 tanggal 31 Desember 2019.
- b. Transaksi Melalui KDP senilai Rp.2.212.302.400,- yang merupakan pengadaan interior untuk Ruang Kelas A (bawah).

• PUSBANGPROF PEKSOS

SATKER/NO	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
027.11.682040	Pusbangprof Peksos		
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	482.803.000
TOTAL			482.803.000

Transfer masuk dari Sekretariat BP3S berupa Kendaraan Dinas Mitsubishi Pajero sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 1775/6.1/PL.04.01/08/2019 Tanggal 30 Agustus 2019.

HIBAH (MASUK)

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca **Peralatan dan Mesin** dengan transaksi **Hibah Masuk (103) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi **Hibah Masuk (103)** pada Satuan Kerja **BRSPDSN**

Wyata Guna senilai **Rp. 149.520.000,-** berdasarkan **Berita Acara Hibah BMN Nomor : 434/BRSPDSN/HM.02/03/2019** yang berasal dari **Siloam**, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mesin Hitung Listrik	1	3,150,000
Blender	1	8,925,000
Alat Dapur Lainnya	3	124,845,000
Dispenser	1	3,150,000
Refrigerator	1	9,450,000
JUMLAH	7	149,520,000

- Terdapat transaksi **Hibah Masuk (103)** pada Satuan Kerja **BRSPDI Ciung Wanara** senilai **Rp. 79.662.000,-** berdasarkan **Berita Acara Hibah BMN Nomor : 11/PSBG/KS.02/01/2019** yang berasal dari **Siloam Center For The Blind**, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Amplifer	1	3,762,000
Alat Kesehatan Umum Lainnya	16	48,900,000
PC Unit	10	22,000,000
Peralatan Olahraga Lainnya	3	5,000,000
JUMLAH	30	79,662,000

PENYELESAIAN PEMBANGUNAN DENGAN KDP

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Penyelesaian Pembangunan dengan KDP pada Satker Setjen Berupa:

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Penyelesaian KDP	Satker Setjen	1	Rp 7.496.397.272	
TOTAL			1	Rp 7.496.397.272	

Rincian Penyelesaian Pembangunan dengan KDP Satker Setjen

Adanya Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP di Gedung Kantor Cawang Kencana Senilai **Rp.7.496.397.272,-**.

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	QTTY	NILAI
1	2	4	5
132111	PERALATAN DAN MESIN	1	7.496.397.272
3.01.03.02.001	Elevator /Lift	1	7.496.397.272

(05) DITJEN. LINJAMSOS

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.05.00.440275			
Direktorat PSKBA		8	457,600,000
	Kendaraan Bermotor Roda Tiga		
	Pengangkut barang	8	457,600,000

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca *Peralatan dan Mesin* dengan transaksi *Penyelesaian Pembangunan dengan KDP (105) 31 Desember 2019*, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi *Penyelesaian Pembangunan dengan KDP (105)* sebesar **Rp. 290.280.000,-** dikarenakan adanya *pengadaan Barang Inventaris* berupa *Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke Bawah)* pada Satuan Kerja *Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial* dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mini Bus 14 Orang Kebawah	1	290,280,000
JUMLAH	1	290,280,000

(11) BADIKLITPENSOS

Terdapat penyelesaian pembangunan dengan KDP atas peralatan dan mesin pada BP3S senilai Rp.7.429.628.100,- yaitu pada satker :

- Sekretariat BP3S

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
027110199369059000KP - SEKRETARIAT BADIKLIT PENSOS				
1	Perkakas Kantor Lainnya		1	2.212.302.400
TOTAL				2.212.302.400

Merupakan reklasifikasi KDP menjadi Aset Tetap berupa pengadaan untuk Interior Kelas A (bawah) Pusdiklat Kesos sesuai dengan SPK Nomor: 2567/6.1/PL.02.02/11/2019 Tanggal 13 November 2019.

- BBPPKS Banjarmasin senilai Rp.5.217.325.700,- dengan rincian sebagai berikut :

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
027.11.369752 BBPPKS BANJARMASIN				
			Total	1.217
				5.217.325.700
1	Pesawat tak berawak	Unit	2	61.989.548
2	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Buah	2	5.911.134
3	Alat Penghancur Kertas	Buah	5	15.570.510
4	Overhead Projector	Buah	3	54.814.269
5	Kursi Besi/Metal	Buah	900	1.135.906.500
6	Mesin Pemotong Rumput	Buah	4	21.014.122
7	Mesin Cuci	Buah	17	130.424.708
8	Lemari Es	Buah	14	71.546.986
9	A.C. Split	Buah	32	425.620.204
10	Kipas Angin	Buah	8	43.096.680
11	Kompor Gas (Alat Dapur)	Buah	7	48.078.730
12	Televisi	Buah	54	991.190.563
13	Dispenser	Buah	32	103.431.744
14	Tangga Hidrolik	Buah	1	134.013.935
15	Handy Cam	Buah	3	88.814.439
16	Asbak Tinggi	Buah	12	22.210.692
17	Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	Buah	2	68.206.634
18	Layar Film/Projector	Buah	3	4.256.136
19	Camera Digital	Buah	3	64.310.985
20	Handy Talky (HT)	Buah	6	40.156.152
21	Sepeda Statis	Buah	4	53.577.504
22	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Buah	10	20.730.380
23	P.C Unit	Buah	51	1.101.369.240
24	Lap Top	Buah	8	256.673.568
25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	16	71.969.458
26	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	6	28.620.648
27	Router	Buah	1	6.168.237
28	Peralatan Fitnes	Buah	8	83.462.386
29	Treadmill	Buah	3	64.189.608

REKLASIFIKASI MASUK

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Reklasifikasi Masuk pada Satker Setjen Berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Reklas Masuk	Satker Setjen	12	Rp 7.590.162.272	
TOTAL			12	Rp 7.590.162.272	

Rincian Reklasifikasi Masuk Satker Setjen

Adanya Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin senilai **Rp. 7.590.162.272,-**.

- Adanya Reklasifikasi Masuk 4 Unit Evalator/ Lift di Gedung Kantor Cawang Kencana Senilai Rp.7.496.397.272,-.
- Adanya Reklasifikasi Masuk 3 Unit Global Positioning System Senilai Rp.30.265.000,-.
- Adanya Reklasifikasi Masuk 1 Unit Alat Rumah Tangga Lainnya Senilai Rp.23.650.000,-.
- Adanya Reklasifikasi Masuk 4 Unit Handy Talky (HT) Senilai Rp.39.850.000,-.

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
1	2	4	5
132111	PERALATAN DAN MESIN	12	7.590.162.272
3.01.03.02.001	Elevator /Lift	4	7.496.397.272
3.03.03.01.072	Global Positioning System	3	30.265.000
3.05.02.99.999	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	23.650.000
3.06.02.01.006	Handy Talky (HT)	4	39.850.000

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca *Peralatan dan Mesin* dengan transaksi *Reklasifikasi Masuk (107) 31 Desember 2019*, dengan rincian sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Reklasifikasi Masuk dan Koreksi Nilai / Kuantitas / KDP / Saldo Awal KDP Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor:30/2.1/PL.01/12/2019 terdapat transaksi *Reklasifikasi Masuk (107)* sebesar Rp. 1.216.755.560,- berupa Generator untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor pada Satuan Kerja *Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial* dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Generator	1	1,216,755,560
JUMLAH	1	1,216,755,560

- Terdapat transaksi *Reklasifikasi Masuk (107)* pada Satuan Kerja *BRSPDM Dharma Guna Bengkulu* senilai Rp. 29.900.000,- dikarenakan terdapat penyesuaian kodefikasi barang dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Papan Visual / Papan Nama	1	29,900,000
JUMLAH	1	29,900,000

(05) DITJEN. LINJAMSOS

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	10	133,525,240
	Water Filter	1	64,750,000
	Interruptible Power Supply (UPS)	1	4,513,240
	Audio Tape Reel Recoder	4	14,762,000
	Camera Digital	2	38,500,000
	Tas Kamera	2	11,000,000

Terjadinya Reklasifikasi masuk disebabkan adanya perubahan kodifikasi

(11) BADIKLITPENSOS

Terdapat Reklasifikasi Masuk atas peralatan dan mesin pada BP3S senilai Rp.2.212.302.400,- yaitu pada Satker Sekretariat BP3S

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
027110199369059000KP - SEKRETARIAT BADIKLIT PENSOS				
1	Lemari Penyimpan	Buah	2	200.970.000
2	Lemari Kayu	Buah	3	119.022.750
3	Rak Kayu	Buah	1	55.687.500
4	White Board	Buah	1	2.805.000
5	Meja Kerja Kayu	Buah	240	704.880.000
6	Kursi Besi/Metal	Buah	290	866.683.270
7	Sice	Buah	20	111.204.630
8	Meja Rapat	Buah	6	26.730.000
9	Meja Resepsionis	Buah	1	7.128.000
10	Partisi	Buah	8	47.520.000
11	Backdrop TV/Wardrobe	set	2	23.141.250
12	Kitchen Set	Buah	1	46.530.000
TOTAL				2.212.302.400

REKLASIFIKASI DARI ASET LAINNYA KE ASET TETAP

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca *Peralatan dan Mesin* dengan transaksi *Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap (117) 31 Desember 2019*, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi *Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap (117)* pada Satuan Kerja *BRSKPNAPZA Galih Pakuan* senilai

Rp.251.879.100,- dikarenakan terdapat penyesuaian kodefikasi barang dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mesin Las Listrik	1	6,160,000
Rak Besi	14	8,239,000
Mesin Penghisap Debu/Vacuum	3	10,648,000
Mesin Pel/Poles	2	14,784,000
Mesin Pemotong Rumput	3	13,305,600
A.C. Split	10	56,458,600
Portable Air Conditioner (Alat	1	14,476,000
Mixer	2	18,603,200
Televisi	3	34,249,600
Amplifier	2	9,856,000
Tensimeter	1	665,500
Alat Peraga Pelatihan Lainnya	8	6,776,000
Jet Pump	6	57,657,600
Jumlah	56	251,879,100

05) DITJEN. LINJAMSOS

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	2,126,000
	Sepeda motor	1	2,126,000

Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap disebabkan penggunaan kembali BMN yang dihentikan untuk merubah kondisi barang menjadi rusak berat.

PENGEMBANGAN NILAI ASET

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca *Peralatan dan Mesin* dengan transaksi *Pengembangan Nilai Aset (202) 31 Desember 2019*, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi *Pengembangan Nilai Aset (202)* pada Satuan Kerja *BRSPDSN Wyata Guna Bandung* senilai **Rp. 3.638.000,-** dari perorangan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Kendaraan Bermotor Roda Tiga Pengangkut Barang	1	3,638,000
JUMLAH	1	3,638,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSLU Budi Darma** senilai **Rp. 77.300.000,-** dari perorangan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mobil Jenazah	1	77,300,000
JUMLAH	1	77,300,000

KOREKSI PENCATATAN NILAI/KUANTITAS

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Koreksi Nilai/Pencatatan pada Satker Setjen Berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Koreksi Pencatatan	Satker Setjen		- 15.489.000	
TOTAL			0	-Rp 15.489.000	

Rincian Koreksi Nilai/Pencatatan pada Satker Setjen

Adanya Koreksi Pencatatan Nilai/ Kuantitas AC Sentral senilai **Rp.15.489.000,-**

- Pengembalian kemahalan Pengadaan AC CV.Karya Rahayu Mandiri, Kode Billing: 820191009549458 tanggal 10 Oktober 2019.

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	INTRAKOM	
KOD	URAIAN		PTABEL	NILAI
E			KUANTIT	
1	2	3	AS	4
132111	PERALATAN DAN MESIN		0	-15.489.000

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi pengurangan nilai neraca **Peralatan dan Mesin** dengan transaksi **Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas (204) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi **Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas (204)** pada Satuan Kerja **BRS Watunas Mulya Jaya** senilai **Rp. (10.560.000,-)** berdasarkan **Berita Acara Nomor : 2.4/PL.02.01** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Papan Visual	0	-10,560,000
JUMLAH	0	-10,560,000

- Terdapat transaksi **Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas (204)** pada Satuan Kerja **LRSODHA Kahuripan Sukabumi** senilai **Rp.(5.228.000,-)** dikarenakan adanya setoran pengembalian belanja modal dari temuan tim Auditor Inspektprat Jenderal Kementerian Sosial RI **berdasarkan TLHP Nomor : 432/LRSODHA** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Lap top	0	-5,228,000
JUMLAH	0	-5,228,000

- Terdapat transaksi **Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas (204)** pada Satuan Kerja **BRSPDM Phalamarta** senilai **Rp. (11.908.000,-)** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Papan Visual	0	-11,908,000
JUMLAH	0	-11,908,000

- Terdapat transaksi **Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas (204)** pada Satuan Kerja **BBRVBD Cibinong** senilai **Rp. (12.004.080,-)** **berdasarkan Berita Acara Nomor : 1417/2.3.16/1.1** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Papan Visual	0	-12,004,080
JUMLAH	0	-12,004,080

- Terdapat transaksi **Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas (204)** pada Satuan Kerja **BRSPDI Nipotowe** senilai **Rp. (2.454.546,-)** **berdasarkan Berita Acara Nomor : 649/BRSPDSIN/PL** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
LCD Projector Infocus	0	-2,454,546
JUMLAH	0	-2,454,546

05) DITJEN. LINJAMSOS

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.05.00.440275			
	Direktorat PSKBA		14,850,112
	Truck + Attachment		7,425,056
	Mobil Dapur Lapangan		7,425,056

(11) BADIKLITPENSOS

Terdapat transaksi Koreksi Pencatatan nilai senilai Rp.(2.650.000),- pada satker Pusdiklat Kesos

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
027.11.440326	Pusdiklat Kesos			
1	A.C Split	Unit	0	(2.650.000)
TOTAL				(2.650.000)

PENGHAPUSAN

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Penghapusan pada Satker Setjen dan Satker Pusdatin Berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Penghapusan	Satker Setjen	4	- 874.949.266	
2		Satker Pusdatin	3	- 45.850.000	
TOTAL			7	-Rp 920.799.266	

Rincian Penghapusan pada Satker Setjen

Adanya Transaksi Penghapusan senilai **Rp.874.949.266,-**

- Adanya Penghapusan berupa 1 Unit Sedan senilai Rp.350.000.000,- Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : [132/HUK/2019. Tanggal 21 Oktober 2019](#)
- Adanya Penghapusan berupa 1 Unit Station Wagon senilai Rp.210.024.266,- Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : [108/HUK/2019. Tanggal 13 September 2019](#)
- Adanya Penghapusan berupa 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat), Merk Toyota Kijang dengan nilai sebesar Rp.249.525.000,- Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : [43/HUK/2019. Tanggal 08 Mei 2019.](#)
- Adanya Penghapusan berupa 1 Unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) senilai Rp.65.400.000,- Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : [132/HUK/2019. Tanggal 21 Oktober 2019](#)

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	Qty	NILAI
1	2	4	5
132111	PERALATAN DAN MESIN	-4	-874.949.266
3.02.01.01.001	Sedan	-1	-350.000.000
3.02.01.01.003	Station Wagon	-2	-459.549.266
3.02.01.02.003	Mini Bus (<u>Penumpang</u> 14 Orang Kebawah)	-1	-65.400.000

Rincian Penghapusan pada Satker Pusdatin

Penghapusan BMN sesuai dengan SK Penghapusan Nomor : 95/HUK/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dan 131/HUK/2019 tanggal 21 Oktober 2019

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		Qty	NILAI
1	2	3	4	5
132111	PERALATAN DAN MESIN		-3	-45.850.000
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	-3	-45.850.000

(02) INPEKTORAT JENDERAL

No	Jenis Barang	NUP	Jumlah	Nilai (Rp.)
1.	Sepeda Motor	5	1	4.000.000
2.	Sepeda Motor	6	1	3.500.000
3.	Sepeda Motor	7	1	12.635.600
4.	Sepeda Motor	10	1	13.923.000
5.	Sepeda Motor	11	1	13.923.000
	Jumlah		5	47.981.000

(05) DITJEN. LINJAMSOS

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	(1)	65,800,000
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	(1)	(65,800,000)

(06) DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN

Terdapat transaksi penghapusan atas Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin senilai **Rp17.194.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL		UAPPB-E1 : 06 DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN							
AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
KODE	URAIAN	KUAN	NILAI	BERTAMBAH	BERKURANG	BERTAMBAH	BERKURANG	KUAN	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	1	1	(17.194.000)
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	-	-	-	-	1	1	(17.194.000)

(11) BADIKLITPENSOS

Terdapat transaksi Penghapusan senilai Rp.(17.068.000),- pada satker Pusdiklat kesos

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
027.11.440326 Pusdiklat Kesos				
1	Sepeda Motor	Unit	1	(17.068.000)
TOTAL				(17.068.000)

HIBAH KELUAR

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Hibah Keluar pada Satker Setjen Berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Hibah Keluar	Satker Setjen		- 147.738.600	
TOTAL			0	-Rp 147.738.600	

Rincian Hibah Keluar pada Satker Setjen

Adanya Hibah (Keluar) ke Dewan KPRMI berupa 1 Unit Station Wagon senilai **Rp. 147.738.600,-**. Nomor : 9/HUK/2019. Tanggal 06 Februari 2019.

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		S A T	INTRAKOMPTA BEL	
KO	URAIAN		KUANTITA	NILAI
DE			S	
1	2	3	4	5
132111	PERALATAN DAN MESIN		-1	-147.738.600
3.02.01.0 1.003	Station Wagon	U nit	-1	-147.738.600

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi pengurangan nilai neraca *Peralatan dan Mesin* dengan transaksi **Hibah Keluar (303) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi **Hibah Keluar (302)** pada Satuan Kerja **PSRSKPNAPZA Satria Baturaden berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 42/HUK/2019** dikarenakan adanya serah terima BMN senilai **Rp. (576.094.450,-)** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Sepeda	2	-1,000,000
Lemari Kayu	39	-87,720,000
Meja Komputer	15	-15,750,000
Tempat Tidur Kayu	58	-124,100,000
Kasur/Spring Bed	85	-49,660,000
Televisi	7	-16,564,450
DVD Player	10	-6,250,000
P.C Unit	15	-262,500,000
Peralatan Permainan Lainnya	2	-12,550,000
JUMLAH	233	-576,094,450

(11) BADIKLITPENSOS

Terdapat transaksi Hibah Keluar atas peralatan dan mesin pada BP3S Senilai Rp.(1.439.340.000),- yaitu pada Satker:

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027110199418991000KP			
	PUSAT PENYULUHAN SOSIAL	(6)	(1.439.340.000)
	Mini Bus (Penumpang 14 O	(6)	(1.439.340.000)

Adanya Hibah keluar dari Satker Puspensos ke Dinas Sosial Provinsi berupa 6 unit Mobil Penyuluhan Sosial yang pemanfaatannya di Dinas Profinsi sesuai dengan SK Menteri Sosial Nomor 27/HUK/2019 Tentang Hibah BMN Berupa 6 (enam) Unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Di Lingkungan Puspensos

TRANSFER KELUAR

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Transfer Keluar pada Satker Setjen Berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Transfer Keluar	Satker Setjen	31	- 1.067.535.366	
	TOTAL		31	-Rp 1.067.535.366	

Rincian Transfer Keluar pada Satker Setjen

Adanya Transaksi Keluar Aset Peralatan dan Mesin pada Satker Sekretariat Jenderal sejumlah 31 Unit senilai **Rp.1.067.535.366,-**

- Adanya Transfer Keluar (Biro Keuangan) ke Biro Kepegawaian berupa 1 Unit Station Wagon 1 Unit senilai Rp.329.890.000,- **Nomor BAST : 1123/1.5/PL.03.02/09/2019. Tanggal 06 September 2019.**

- Adanya Transfer Keluar berupa 1 Unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) senilai Rp.197.680.000,- Nomor BAST : [5012/1.5/PL.03/12/2019](#). Tanggal 11 Desember 2019.
- Adanya Transfer Keluar berupa 1 Set Sice senilai Rp.15.125.000,- ke Satker Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI dengan bukti Nomor BAST : [46338/PL.02/11/2019](#). Tanggal 20 Nopember 2019.
- Adanya Transfer Keluar berupa 2 Unit A.C. Central senilai Rp.112.459.750,- ke Satker Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI dengan bukti Nomor BAST : [46338/PL.02/11/2019](#). Tanggal 20 Nopember 2019.
- Adanya Transfer Keluar berupa 4 Unit A.C. Split senilai Rp.56.400.000,- ke Satker Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI dengan bukti No BAST... Nomor BAST : [46338/PL.02/11/2019](#). Tanggal 20 Nopember 2019.
- Transfer Keluar berupa 8 Buah/Set Vertikal Blind ke Satker Inspektorat Kementerian Sosial RI dengan nilai sebesar Rp.95.795.616,-. Berdasarkan Nomor BAST : [172/PLK/06/2019](#). Tanggal 17 Juni 2019
- Adanya Transfer Keluar berupa 12 Unit Lap Top senilai Rp.213.600.000,- ke Satker Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI dengan bukti Nomor BAST : [46341/PL.02/11/2019](#). Tanggal 17 Juni 2019
- Transfer Keluar berupa 1 Unit Laptop dengan merk Macbook Air ke Satker STKS Bandung dengan nilai sebesar Rp.21.978.000,-. Berdasarkan Nomor BAST : [032/PL.03/02/2019](#). Tanggal 12 Februari 2019
- Transfer Keluar berupa 1 Unit Note Book dengan merk Apple Macbook Pro Core i5 8GB ke Satker Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI dengan nilai sebesar Rp.24.607.000,-. Berdasarkan Nomor BAST: [004/PL.03/01/2019](#). Tanggal 04 Januari 2019

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	INTRAKOMPTAB	
KODE	URAIAN		KUANTITA	NILAI
1	2	3	4	5
132111	PERALATAN DAN MESIN		-31	-1.067.535.366
3.02.01.01.003	Station Wagon	Unit	-1	-329.890.000
3.02.01.02.003	Mini Bus (<u>Penumpang</u> 14 Orang Kebawah)	Unit	-1	-197.680.000
3.05.02.01.005	Sice	Buah	-1	-15.125.000
3.05.02.04.002	A.C. Sentral	Buah	-2	-112.459.750
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	-4	-56.400.000
3.05.02.06.057	Vertikal Blind	Buah	-8	-95.795.616
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	-13	-235.578.000
3.10.01.02.003	Note Book	Buah	-1	-24.607.000

(03) DITJEN. DAYASOS

Terdapat transaksi Transfer Keluar atas Peralatan dan Mesin dari Satker Dit. PSDBS ke Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan senilai **Rp.250.500.000,-** dengan BAST Nomor: 944/DYS-Sekt/10/2018 tanggal 3 Oktober 2018, dengan rincian sebagai berikut:

itker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
330199418940000KP			
Dit. PSDBS		1	250.500.000
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	250.500.000

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi pengurangan nilai neraca **Peralatan dan Mesin** dengan transaksi **Transfer Keluar (302) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Transfer Keluar (302) berupa Peralatan dan Mesin** sebesar **Rp.11.874.126.617,-** pada **Satuan Kerja BRSKP NAPZA Bambu Apus** dikarenakan perubahan nomenkelatur dari pelayanan Anak menjadi Napza berdasarkan **Berita Acara Nomor:646/BRSKPN/PL.04/06/2019** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Portable Generating Set	1	29,900,000
Electric Generating Set Lainnya	1	58,120,000
Portable Water Pump	1	1,879,000
Sumersible Pump	10	20,124,000
Mesin Diesel	2	62,485,500
Veld Bed (Peralatan Kebakaran Hutan)	130	136,500,000
Tandu Lipat	3	2,340,000
Alat Bantu Lainnya	1	18,734,000
Station Wagon	1	295,360,000
Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	362,230,000
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3	367,776,319
Sepeda Motor	11	163,751,500
Mobil Unit Rehabilitasi Sosial Keliling	2	389,553,792
Gerobak Dorong	1	2,600,000
Meja Dorong Saji/Trolley Saji	4	3,549,600
Sepeda	19	11,940,000
Mesin Press Hidrolik & Punch	1	18,810,000
Mesin Bor	10	12,427,500
Mesin Rol	1	205,000
Mesin Kompresor	4	16,378,000
Mesin Las Listrik	1	7,500,000
Mesin Pemotong Fiberglass/Poliyster	1	7,084,545
Mesin Gerinda Tangan	1	14,000
Mesin Bor Tangan	5	8,986,000
Battery Charge	2	2,910,000
Solder Listrik	7	8,859,000
Engine Cylinder Research Engine	1	20,000,000
Steam Pressure Gauge	3	6,530,000
Steam Cleaner	1	2,500,000
Mesin Spooling	2	3,960,000
Mesin Gergaji	2	5,992,800
Peralatan Las Listrik	3	5,700,000
Peralatan Las Karbit	5	1,841,000
Perkakas Pemotong Plat	2	2,900,000
Perkakas Pengecatan Kendaraan	1	67,000
Perkakas Bengkel Listrik Lainnya (Alat Bengkel Tak Bermesin)	1	1,000,000
Dongkrak Mekanik	2	1,169,000
Tool Kit Set	15	39,215,000
Tool Kit Box	3	4,521,100
Tool Cabinet Set	1	20,786,000
Engine Stand	9	142,927,570

NAMA	QTY	NILAI
Toolkit Perbengkelan	6	44,567,000
Kunci Khusus Untuk Engine	2	1,120,000
Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	3	2,450,000
Kunci L	1	630,000
Bor	4	7,729,000
Tanggem	3	6,900,000
Gunting Plat	2	3,006,000
Kunci Pas	3	48,000
Drei Ketok (Obeng)	1	665,000
Peralatan Tukang Besi Lainnya	1	1,600,000
Gunting Kain	4	1,400,000
Cermin Besar	6	30,567,000
Peralatan Bengkel Lainnya	1	1,400,000
Mesin Gerinda tangan Listrik	2	5,450,000
Multisester Digital	20	23,660,000
Multi Meter	1	1,050,000
Scanner (Universal Tester)	1	24,250,000
Nozzle Tester	1	2,958,000
Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya	1	532,000
Ragum /Catok	14	16,591,000
Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	2,445,000
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	994,400
Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	3	5,047,800
Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	2	5,264,000
Mesin Ketik Listrik Langewagon (18-27 Inchi)	1	220,000
Mesin Kas Register	1	5,180,000
Lemari Besi/Metal	29	63,465,000
Lemari Kayu	106	135,680,300
Rak Besi	51	55,998,000
Rak Kayu	32	135,572,200
Filing Cabinet Besi	62	114,930,000
Brandkas	2	12,640,000
Buffet	1	1,553,000
Locker	51	41,400,000
CCTV - Camera Control Television System	1	12,847,586
Papan Visual/Papan Nama	15	73,010,000
White Board	20	22,049,000
Alat Penghancur Kertas	5	8,035,000
Mesin Absensi	1	8,355,500
Overhead Projector	1	20,292,500
White Board Electronic	1	10,781,500

NAMA	QTY	NILAI
Mesin Laminating	1	423,000
Lampu-lampu Kristal	2	1,500,000
LCD Projector/Infocus	12	97,271,172
Flip Chart	2	5,000,000
Papan Gambar	1	10,771,200
Papan Pengumuman	1	40,897,000
Perkakas Kantor Lainnya	125	106,654,100
Meja Kerja Besi/Metal	3	10,800,000
Meja Kerja Kayu	139	225,312,500
Kursi Besi/Metal	1,117	493,647,000
Kursi Kayu	200	72,500,000
Sice	52	259,349,500
Bangku Panjang Kayu	28	12,540,000
Meja Rapat	57	139,735,000
Meja Komputer	43	42,809,000
Tempat Tidur Besi	157	390,173,000
Tempat Tidur Kayu	50	36,100,000
Meja Resepsionis	3	41,325,000
Kasur/Spring Bed	312	254,168,000
Sketsel	1	9,000,000
Meja Makan Kayu	67	158,180,000
Kursi Fiber Glas/Plastik	4	6,545,000
Rak Sepatu (Almunium)	19	19,000,000
Meubelair Lainnya	1	17,600,000
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3	6,548,000
Mesin Pel/Poles	1	16,000
Mesin Pemotong Rumput	1	4,375,700
Mesin Cuci	2	16,000,000
Lemari Es	9	30,741,200
A.C. Window	2	32,974,400
A.C. Split	38	214,672,250
Kipas Angin	104	63,857,000
Exhause Fan	10	12,250,000
Cold Storage (Alat Pendingin)	1	4,350,000
Reach In Frezzer	2	4,557,500
Air Curtain	1	5,200,000
Kompore Gas (Alat Dapur)	12	7,288,000
Rice Cooker (Alat Dapur)	5	10,956,000
Oven Listrik	1	10,032,000
Kitchen Set	11	27,372,000
Tabung Gas	11	6,593,000
Mesin Giling Bumbu	2	961,000

NAMA	QTY	NILAI
Treng Air/Tandon Air	2	3,000,000
Rak Piring Alumunium	3	2,949,000
Panci	11	18,416,000
Mixer	1	5,700,000
Alat Dapur Lainnya	2	840,000
Radio	1	1,650,000
Televisi	51	219,475,500
Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	9	10,656,500
Amplifier	3	6,150,000
Loudspeaker	2	12,000,000
Sound System	6	170,100,000
Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga)	2	3,650,000
Wireless	5	23,923,000
Megaphone	4	2,728,000
Microphone Table Stand	20	8,900,000
Mic Conference	24	88,359,000
Unit Power Supply	11	9,845,000
Stabilisator	2	1,000,000
Tustel	7	33,565,550
Mesin Jahit	55	267,749,420
Lambang Garuda Pancasila	1	24,000
Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	420,000
Setrika	22	11,090,000
Tangga Aluminium	3	1,800,000
Kaca Hias	24	18,780,000
Dispenser	26	45,990,000
Mimbar/Podium	5	7,567,000
Handy Cam	4	18,629,900
Mesin Obras	11	42,804,400
Mesin Potong Kain	4	8,430,000
Mesin Pelubang Kancing	4	11,475,000
Meja Potong	8	16,066,000
Manequin (Boneka)	4	800,000
Mini Compo	3	3,566,000
Karpet	14	12,365,000
Vertikal Blind	27	94,350,000
Gordyin/Kray	131	117,037,300
Lemari Plastik	79	33,150,000
DVD Player	3	11,518,586
Kabel	1	5,200,000
Bingkai Foto	15	29,625,000
Home Theater	1	9,475,000

NAMA	QTY	NILAI
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6	9,275,000
Alat Rumah Tangga Lainnya	32	29,550,000
Audio Amplifier	2	10,109,486
Microphone/Wireless MIC	4	28,550,000
Professional Sound System	1	93,750,000
Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1	191,000
Voice Recorder	2	2,990,000
Digital LED Running Text	1	9,900,000
Rak Peralatan	1	1,120,000
Slide Projector	2	53,894,000
Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	2	13,916,800
Camera Digital	12	54,282,000
Mesin Potong	1	6,350,000
Mesin Cacah	1	11,430,000
Telephone (PABX)	1	14,993,990
Pesawat Telephone	4	10,417,000
Telephone Mobile	2	17,855,172
Handy Talky (HT)	20	67,477,376
Facsimile	4	14,081,000
Telepon Satelit	4	53,350,344
Alat Komunikasi Radio HF/FM Lainnya	44	103,787,784
Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	1	2,995,000
Alat Komunikasi Lainnya	1	89,777,586
Switcher/Menara Antena Lainnya	1	6,428,586
Genset	2	44,900,000
Sterilisator	1	1,465,000
Stethoscope (Alat Kedokteran Umum)	5	5,942,000
Tensimeter	2	647,000
Head Lamp (Alat Kedokteran Umum)	1	7,830,000
Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	3	2,463,000
Tabung O2	1	975,000
Lemari Obat (Kaca)	2	11,226,000
Kursi Dorong	20	33,000,000
Clips Forcep	6	4,437,000
Emergency Trolley	1	4,900,000
Kursi Zeis	34	100,300,000
Blood Pressure Meter/Tensimeter	1	475,000
Alat Kesehatan Umum Lainnya	5	2,150,000
Engine Dinamo Meter	2	14,790,000
Blender	10	5,750,000
Bak Fiberglass	3	1,143,000
Spray Gun	2	1,100,000

NAMA	QTY	NILAI
Hair Dryer/Spray Dryer/Dryer	6	8,874,000
Mesin Potong Jerami	2	7,900,000
Elektroda Spesifik	8	4,640,000
Stainless Steel Tong	18	11,678,000
Impact Test	4	5,916,000
Mesin Jahit Bartacking	1	25,080,000
Mesin Grinding Acuan	1	25,080,000
Mesin Waste Water Purification	1	22,500,000
Personal Computer	4	17,000,000
Grafic Printer PR-1	1	10,050,000
Blander SS	1	1,016,000
Gentong Plastik	4	1,524,000
Alat Fraksinasi Serat	1	1,500,000
Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	14	15,465,000
Uninterrupted Power Supply (UPS)	25	34,000,000
Software Conf Off-Line Computer	27	218,180,000
Control Panel	1	119,000,000
Peralatan Umum Lainnya	11	160,443,250
Tang Ampere	2	2,000,000
Sarung Tangan Pelindung	50	15,000,000
Kamera Digital	1	10,813,000
Spray Glue	2	1,270,000
Layar Proyektor	2	9,700,000
Magnifier	1	2,465,000
Local Area Network (LAN)	23	35,100,000
P.C Unit	66	737,404,460
Lap Top	34	404,562,988
Note Book	6	59,500,000
Personal Komputer Lainnya	1	825,000
Komputer Unit Lainnya	1	6,831,586
Console Unit (Peralatan Mainframe)	1	28,527,586
Steamer	8	13,148,500
Plotter (Peralatan Mini Komputer)	1	45,000,000
Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	6,590,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	35	152,852,720
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7	31,495,344
External	2	1,747,450
Server	5	307,565,258
Router	2	15,537,586
Modem	13	23,393,360
Netware Interface External	1	1,343,100
Rak Server	1	28,527,586

NAMA	QTY	NILAI
Firewall	1	17,528,586
Switch	7	65,923,102
Peralatan Jaringan Lainnya	1	35,877,586
Peralatan Bantu Lainnya	3	20,425,000
Tenda Pleton (Alat Pendukung Pencarian)	4	29,400,000
Regulator	4	1,200,000
Genset	2	5,215,000
Air Conditioning (AC)	25	173,800,000
Aid Hearing	1	37,000,000
Alat Peraga Pelatihan Lainnya	120	455,197,000
Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	11	68,818,500
Jet Pump	31	100,954,500
Drum	1	5,500,000
Rambu Jalan	5	12,125,000
Alat Tennis Meja	15	16,358,400
Alat Badminton	16	7,777,000
Peralatan Fitnes	1	359,000
Catur	1	510,400
Total		11,874,126,617

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor:151/2.1/PL.04/07/2019 dan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 220/2.1/PL.04/08/2019 terdapat transaksi **Transfer Masuk (102) kepada Satuan Kerja Loka Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV Aids “Kahuripan” Sukabumi** berupa **Mobil Unit Rehabilitasi Sosial Keliling** senilai **Rp. 918.084.000,-** untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mobil Unit Rehabilitasi Sosial Keliling	2	918,084,000
JUMLAH	2	918,084,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Direktorat RSPD Nomor : 297/2.3/PL.05/07/2019 terdapat transaksi **Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja BRSPDSN Wyata Guna** senilai **Rp. 746.350.000,-** untuk membantu pelaksanaan tugas

operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mini Bus 14 Orang Ke Bawah	1	746,350,000
JUMLAH	1	746,350,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Direktorat RSPD Nomor : 294/2.3/PL.05/07/2019 terdapat transaksi Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja BBRSD Prof DR Soeharso senilai Rp. 746.350.000,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mini Bus 14 Orang Ke Bawah	1	746,350,000
JUMLAH	1	746,350,000

- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Direktorat RSPD Nomor : 295/2.3/PL.05/07/2019 terdapat transaksi Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja BRSPDSN Mahatmiya senilai Rp. 746.350.000,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mini Bus 14 Orang Ke Bawah	1	746,350,000
JUMLAH	1	746,350,000

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Direktorat RSPD Nomor : 296/2.3/PL.05/07/2019 terdapat transaksi Transfer Keluar (302) kepada Satuan Kerja BRSPDF Wirajaya Rp.746.350.000,- untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mini Bus 14 Orang Ke Bawah	1	746,350,000
JUMLAH	1	746,350,000

(05) DITJEN. LINJAMSOS

Terdapat transaksi Transfer Keluar atas Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.559.312.200,- terdapat pada:

a. **Sekretariat** senilai Rp. 1.471.404.000,-

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	(219)	(1,471,404,000)
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	(3)	(342,550,000)
	Sepeda Motor	(7)	(42,177,000)
	Masin penghitung uang	(1)	(4,013,800)
	Lemari Kayu	(12)	(143,400,000)
	LCD Projector/Infocus	(1)	(3,949,000)
	Meja kerja kayu	(70)	(315,300,000)
	Kursi Besi/Metal	(80)	(178,716,000)
	Sice	(6)	(46,000,000)
	Televisi	(2)	(82,020,000)
	Dispenser	(1)	(4,148,000)
	Gordyn/Kray	(2)	(24,178,000)
	Kabel Roll	(1)	(22,750,000)
	Bracket Standing Peralatan	(1)	(3,000,000)
	Camera Digital	(1)	(29,280,000)
	P.C Unit	(1)	(21,960,000)
	Lap Top	(9)	(153,537,000)
	Personal Komputer Lainnya	(1)	(12,200,000)
	Printer (Peralatan PersonalKomputer)	(19)	(37,833,200)
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	(1)	(4,392,000)

- *Ditransfer ke Direktorat PSDBS senilai Rp. 384.727.000,- berdasarkan BASTB Nomor: 463 / Set.Ljs / 03 /2019 tanggal 5 Maret 2019 berupa:*

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.03.00.418940			
	Derektorat PSDBS	(10)	(384,727,000)
	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	(3)	(342,550,000)
	Sepeda Motor	(7)	(42,177,000)

- **Ditransfer ke PSKBA** senilai Rp. 676.894.000,- berdasarkan BASTB nomor: 762 / Set.Ljs / 04 / 2019 tanggal 22 April 2019 dan BASTB Nomor: 525 / Set.Ljs / 03 / 2019 tanggal 18 Maret 2019, BASTB Nomor: 2243/Set.Ljs/11/2019 tanggal 19 November 2019

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.05.00.440275			
	Direktorat PSKBA	(109)	(676,194,000)
	Meja kerja kayu	(52)	(236,500,000)
	Lemari kayu	(11)	(120,000,000)
	Kabel Roll	(1)	(22,750,000)
	Lap Top	(6)	(114,924,000)
	Televisi	(2)	(82,020,000)
	Bracket Standing Peralatan	(1)	(3,000,000)
	Sice	(6)	(46,000,000)
	Kursi Mesi/Metal	(30)	(51,000,000)

- **Pada Direktorat PSKBS** senilai Rp. 267.605.000,- berdasarkan BASTB nomor 990 / Set. Ljs/05/2019 tanggal 21 Mei 2019. Dan Nomor 2242/Set.Ljs/11/2019 tanggal 19 November 2019.

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440281			
	Direktorat PSKBS	(69)	(267,605,000)
	Mesin Hitung uang	(1)	(4,013,800)
	LCD Projector/Infocus	(1)	(3,949,000)
	P.C Unit	(1)	(21,960,000)
	Lap Top	(3)	(38,613,000)
	Personal Komputer Lainnya	(1)	(12,200,000)
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	(19)	(37,833,200)
	Scanner	(1)	(4,392,000)
	Kursi Besi Metal	(40)	(111,216,000)
	Dispenser	(1)	(4,148,000)
	Camera Digital	(1)	(29,280,000)

- **Pada Direktorat JAMSOSKEL** senilai Rp. 142.878.000,- berdasarkan BASTB: nomor 1337 / Set. Ljs/07/2019 tanggal 22 Juli 2019 berupa:

02705.00.440310			
	Direktorat JAMSOSKEL	(31)	(142,878,000)
	Lemari Kayu	(1)	(23,400,000)
	Meja Kerja Kayu	(18)	(78,800,000)
	Kursi Besi/Metal	(10)	(16,500,000)
	Gordyin/Kray	(2)	(24,178,000)

b. Dinsos Provinsi Sulawesi Tenggara

Ditransfer ke Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan BASTB Nomor: 028/2627/2019 tanggal 11 November 2019 untuk dilakukan penghapusan.

02705.2000.209015.000.DK			
	Dinsos Provinsi Sulawesi Tenggara	(11)	22,165,000
	P.C Unit	(2)	(18,000,000)
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	(2)	5,000,000
	Tripod Camera	(1)	1,200,000
	Slide Projector	(1)	10,822,000
	Camera Film	(1)	2,100,000
	Camera Electronic	(1)	3,450,000
	External	(2)	778,000
	Note Book	(1)	16,815,000

c. Dinas Provinsi Gorontalo

Ditransfer ke Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan BASTB Nomor: 050.1603.A/XI/2019 tanggal 1 November 2019 untuk dilakukan penghapusan

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.3100.319013.000.DK			
	Dinsos Provinsi Gorontalo	4	29,743,200
	Camera Digital	1	2,805,000
	Overhad Projector	1	25,000,000
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	1,938,200

(06) DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN

Terdapat transaksi transfer keluar atas Peralatan dan Mesin pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin senilai **Rp534.241.000,00** dikurangi Akumulasi Penyusutan senilai **Rp23.133.188,00** sehingga nilai transfer keluar menjadi **Rp511.107.812,00** dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode	Uraian	Uraian Akun	Transfer Keluar
1	027.06.418941	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN	Peralatan dan Mesin	294.979.500
2	027.06.418941	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN	Peralatan dan Mesin	37.442.500
3	027.06.418941	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN	Peralatan dan Mesin	201.819.000
4	027.06.418941	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(18.598.750)
5	027.06.418941	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.534.438)
		T O T A L		511.107.812

(11) BADIKLITPENSOS

Terdapat transaksi Transfer Keluar senilai Rp.(2.890.245.400),- pada satker :

Transfer Keluar dari satker Sekretariat BP3S ke Pusbangprof Peksos dan Pensos senilai Rp.(482.803.000),- dengan rincian sebagai berikut:

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
027110199369059000KP - SEKRETARIAT BADIKLIT PENSOS				
1	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	-1	(482.803.000)
TOTAL				(482.803.000)

Transfer Keluar Ke Pusbangprof Peksos dan Pensos berupa Kendaraan Dinas Mitsubishi Pajero sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor: 1775/6.1/PL.04.01/08/2019 Tanggal 30 Agustus 2019.

Transfer Keluar dari Satker Sekretariat BP3S ke Pusdiklat Kesos senilai Rp.(2.407.442.400),- dengan rincian aset sebagai berikut:

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
027110199369059000KP - SEKRETARIAT BADIKLIT PENSOS				
1	Lemari Penyimpan	Buah	-2	(200.970.000)
2	Lemari Kayu	Buah	-7	(168.742.750)
3	Rak Kayu	Buah	-1	(55.687.500)
4	White Board	Buah	-1	(2.805.000)
5	Meja Kerja Kayu	Buah	-240	(704.880.000)
6	Kursi Besi/Metal	Buah	-290	(866.683.270)
7	Kursi Kayu	Buah	-6	(12.540.000)
8	Sice	Buah	-25	(156.414.630)
9	Meja Rapat	Buah	-6	(26.730.000)
10	Meja Resepsionis	Buah	-1	(7.128.000)
11	Kasur/Spring Bed	Buah	-3	(33.110.000)
12	Meja Makan Kayu	Buah	-1	(8.580.000)
13	Partisi	Buah	-8	(47.520.000)
14	Backdrop TV/Wardrobe	set	-2	(23.141.250)
15	Kitchen Set	Buah	-3	(59.180.000)
16	Air Conditioning (AC)	Buah	-5	(33.330.000)
TOTAL				(2.407.442.400)

Transfer Keluar ke Pusdiklat Kesos berasal dari 2 transaksi pengadaan yaitu:

- a. Transaksi Pembelian senilai Rp.195.140.000,- yang merupakan pengadaan interior (Springbed, Sofa, Lemari dll) untuk Wisma/Mess.
- b. Transaksi Melalui KDP senilai Rp.2.212.302.400,- yang merupakan pengadaan interior untuk Ruang Kelas A (bawah).

**REKLASIFIKASI KELUAR
(01) SEKRETARIAT JENDERAL**

Terdapat Reklasifikasi Keluar pada Satker Setjen Berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Reklas Keluar	Satker Setjen	9	- 7.590.162.272	
	TOTAL		9	-Rp 7.590.162.272	

Rincian Reklas Keluar pada Satker Setjen

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
1	2	4	5
132111	PERALATAN DAN MESIN	-9	-7.590.162.272
3.01.03.02.001	Elevator /Lift	-1	-7.496.397.272
3.09.02.01.999	Alat Keamanan Lainnya	-1	-23.650.000
3.09.04.03.004	GPS	-3	-30.265.000
3.09.04.03.063	GM338 Mobil Radio, Select 5, UHF (450-527MHz)	-4	-39.850.000

(05) DITJEN. LINJAMSOS

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	(8)	(138,825,240)
	Caring Care	(2)	(11,000,000)
	Alat Penjernih Air	(1)	(64,750,000)
	Recorder	(4)	(14,762,000)
	Uninterrupted Power Supply (UPS)	(1)	(4,513,240)
	Kamaera Digital	(2)	(38,500,000)
	Back Pack Ransel	(8)	(5,300,000)

Terjadinya Reklasifikasi Keluar karena perubahan kodefikasi barang pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

(11) BADIKLITPENSOS

Reklasifikasi keluar senilai Rp.2.212.302.400,- dengan rincian sebagai berikut:

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
027110199369059000KP - SEKRETARIAT BADIKLIT PENSOS				
1	Perkakas Kantor Lainnya		1	(2.212.302.400)
TOTAL				(2.212.302.400)

Merupakan penghapusan Aset Tetap Perkakas Kantor Lainnya yang berasal dari KDP yang diinput gabungan menjadi 1 Unit Aset, untuk kemudian di pecah/dirinci sesuai dengan rincian di kontraknya.

BBPPKS Jayapura Senilai Rp.107.237.500,-

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
0271125578995KD - BBPPKS Jayapura				
1	Kursi Besi / Metal		-25	(107.237.500)
TOTAL				(107.237.500)

Berdasarkan asersi terdapat penambahan reklaas keluar senilai (Rp.107.237.500,-) berupa kursi besi / metal sebanyak 25 (dua puluh lima) buah.

TRANSAKSI NORMALISASI BMN

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi pengurangan nilai neraca *Peralatan dan Mesin* dengan transaksi **Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (209) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi **Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (209)** pada Satuan Kerja **LRSODHA Kahuripan Sukabumi** senilai **Rp.(495.000,-)** dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SAT	Q'TY	NILAI
Rak Besi	Buah	-1	-495.000
JUMLAH		-1	-495,000

- Terdapat transaksi **Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (209)** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Rumbai** senilai **Rp. (78.000,-)** **berdasarkan Berita Acara Nomor : 181/2.2/7/PL.04/2019** dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SAT	Q'TY	NILAI
Meja Kerja Kayu	Buah	-1	-78.000
JUMLAH		-1	-78,000

- Terdapat transaksi **Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap (209)** pada Satuan Kerja **LRSPDSRW Meohai** senilai **Rp. (33.523.000,-)** berdasarkan **Berita Acara Nomor : 11/LRSPDSRW.Meohai/11/19** dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SAT	Q'TY	NILAI
Televisi	Buah	-5	-33.523.000
JUMLAH		-5	-33.523.000

USULAN BARANG HILANG KE PENGELOLA

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi pengurangan nilai neraca **Peralatan dan Mesin** dengan transaksi **Usulan Barang Hilang ke Pengelola (308) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Berdasarkan **Surat keputusan Menteri Sosial Nomor:124/HUK/2014** terdapat transaksi **Usulan Barang Hilang ke Pengelola (308)** berupa **Mini Bus (14 Orang kebawah)** senilai **Rp. 41.042.000,-** dikarenakan terdapat Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas kehilangan unit kendaraan operasional.

NAMA	QTY	NILAI
Mini Bus 14 Orang Ke Bawah	1	41,042,000
JUMLAH	1	41,042,000

PENGHENTIAN ASET DARI PENGGUNAAN

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Penghentian Aset pada Satker Pusdatin berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Penghentian Aset	Satker Pusdatin	4	523.418.288	
	TOTAL		4	-Rp 523.418.288	

Rincian Penghentian Aset pada Satker Pusdatin

Penghentian aset dari penggunaannya sebesar Rp. 523.418.288,- sesuai dengan Surat Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan Pada Pusat Data dan Informasi Nomor: S-82/MK.6/WKN.07/KNL.3/2019 tanggal 28 Mei 2019.

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
1	2	4	5
132111	PERALATAN DAN MESIN	-4	-523.418.288
3.02.01.02.00 3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	-3	-511.668.288
3.02.01.04.00 1	Sepeda Motor	-1	-11.750.000
TOTAL			-523.418.288

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

No	Jenis Barang	NUP	Jumlah	Nilai (Rp.)
1.	Mesin Hitung Elektronik	2	1	750.000
2.	Lemari Besi/Metal	1	1	265.000
3.	Lemari Kayu	6	1	701.000
4.	Lemari Kayu	8	1	701.000
5.	Lemari Kayu	9	1	701.000
6.	Lemari Kayu	10	1	701.000
7.	Lemari Kayu	11	1	901.000
8.	Lemari Kayu	12	1	701.000
9.	Lemari Kayu	13	1	1.106.000
10.	Lemari Kayu	14	1	901.000
11.	Lemari Kayu	16	1	901.000
12.	Lemari Kayu	17	1	701.000
13.	Lemari Kayu	18	1	701.000
14.	Rak Besi	1	1	468.750
15.	Rak Besi	2	1	468.750
16.	Rak Kayu	4	1	125.000
17.	Rak Kayu	9	1	781.000
18.	Rak Kayu	10	1	521.000
19.	Rak Kayu	11	1	1.897.500
20.	Rak Kayu	12	1	1.897.500
21.	Rak Kayu	13	1	1.897.500
22.	Rak Kayu	14	1	1.897.500
23.	Rak Kayu	15	1	1.897.500
24.	Filling Cabinet Besi	1	1	395.000
25.	Filling Cabinet Besi	2	1	395.000
26.	Filling Cabinet Besi	3	1	395.000
27.	Filling Cabinet Besi	12	1	316.000
28.	Filling Cabinet Besi	13	1	316.000

29.	Filling Cabinet Besi	18	1	196.000
30.	Filling Cabinet Besi	19	1	395.000
31.	Filling Cabinet Besi	20	1	383.000
32.	Filling Cabinet Besi	21	1	196.000
33.	Filling Cabinet Besi	22	1	196.000
34.	Brandkas	3	1	1.195.000
35.	Buffet	1	1	1.336.000
36.	Alat Penghancur Kertas	1	1	567.000
37.	Mesin Absensi	1	1	2.420.000
38.	Mesin Absensi	2	1	2.420.000
39.	Mesin Absensi	3	1	2.420.000
40.	Mesin Absensi	4	1	2.420.000
41.	Mesin Absensi	5	1	2.420.000
42.	Headmachine Besar	1	1	45.000
43.	Headmachine Besar	2	1	1.005.000
44.	Perforator Besar	2	1	407.000
45.	Perforator Besar	4	1	613.500

46.	Perforator Besar	5	1	613.500
47.	Perforator Besar	6	1	613.500
48.	Perforator Besar	7	1	613.500
49.	Overhead Projector	3	1	34.547.000
50.	Overhead Projector	4	1	4.950.000
51.	White Board Electronic	1	1	4.268.000
52.	Access Control System	6	1	1.650.000
53.	Access Control System	7	1	1.650.000
54.	Access Control System	8	1	1.650.000
55.	Meja Kerja Besi/Metal	1	1	299.000
56.	Meja Kerja Besi/Metal	2	1	299.000
57.	Meja Kerja Besi/Metal	3	1	299.000
58.	Meja Kerja Kayu	2	1	421.000
59.	Meja Kerja Kayu	5	1	59.000
60.	Meja Kerja Kayu	6	1	421.000
61.	Meja Kerja Kayu	131	1	1.300.000
62.	Meja Kerja Kayu	132	1	1.300.000
63.	Meja Kerja Kayu	133	1	1.300.000
64.	Kursi Besi/Metal	2	1	522.000
65.	Kursi Besi/Metal	9	1	474.000

66.	Kursi Besi/Metal	10	1	474.000
67.	Kursi Besi/Metal	11	1	474.000
68.	Kursi Besi/Metal	12	1	104.000
69.	Kursi Besi/Metal	13	1	104.000
70.	Kursi Besi/Metal	14	1	104.000
71.	Kursi Besi/Metal	15	1	280.000
72.	Kursi Besi/Metal	194	1	725.000
73.	Kursi Besi/Metal	195	1	725.000
74.	Kursi Besi/Metal	196	1	725.000
75.	Kursi Besi/Metal	197	1	725.000
76.	Kursi Besi/Metal	246	1	321.000
77.	Kursi Kayu	1	1	20.000
78.	Kursi Kayu	16	1	20.000
79.	Kursi Kayu	17	1	20.000
80.	Kursi Kayu	18	1	20.000
81.	Kursi Kayu	19	1	20.000
82.	Kursi Kayu	20	1	20.000
83.	Kursi Kayu	21	1	20.000
84.	Kursi Kayu	22	1	20.000
85.	Kursi Kayu	23	1	20.000
86.	Kursi Kayu	24	1	20.000
87.	Kursi Kayu	25	1	20.000
88.	Meja Rapat	3	1	3.003.000
89.	Televisi	12	1	3.850.000
90.	Loudspeaker	1	1	1.850.000
91.	Mic Conference	1	1	44.250.000
92.	Tustel	3	1	2.699.000
93.	Dispenser	2	1	2.062.500
94.	Dispenser	4	1	2.062.500
95.	P.C. Unit	37	1	5.400.000
96.	P.C. Unit	40	1	9.520.900
97.	P.C. Unit	41	1	9.520.900
98.	P.C. Unit	42	1	9.520.900
99.	P.C. Unit	43	1	6.150.000
100.	P.C. Unit	44	1	6.150.000
101.	P.C. Unit	45	1	11.000.000
102.	P.C. Unit	46	1	11.246.180
103.	P.C. Unit	48	1	11.246.180
104.	P.C. Unit	49	1	11.246.180
105.	P.C. Unit	50	1	11.246.180
106.	P.C. Unit	51	1	11.246.180
107.	P.C. Unit	52	1	11.246.180
108.	P.C. Unit	53	1	11.246.180
109.	P.C. Unit	54	1	11.246.180
110.	P.C. Unit	56	1	9.790.000
111.	Laptop	9	1	13.430.000
112.	Laptop	10	1	13.430.000
113.	Laptop	11	1	13.430.000
114.	Laptop	14	1	15.385.000

115.	Laptop	15	1	26.180.000
116.	Laptop	16	1	12.893.881
117.	Laptop	17	1	12.893.881
118.	Laptop	18	1	12.893.881
119.	Laptop	19	1	12.893.881
120.	Scanner	2	1	3.200.000
121.	Scanner	3	1	2.530.000
122.	Scanner	4	1	2.695.000
123.	Scanner	5	1	2.695.000
124.	Scanner	6	1	2.695.000
125.	Scanner	7	1	2.695.000
126.	Printer	13	1	1.106.000
127.	Printer	19	1	1.378.000
128.	Printer	20	1	1.415.000
129.	Printer	21	1	2.875.000
130.	Printer	22	1	3.849.000
131.	Printer	23	1	2.171.000
132.	Printer	24	1	2.171.000
133.	Printer	25	1	2.171.000
134.	Printer	26	1	2.171.000
135.	Printer	27	1	3.200.000
136.	Printer	29	1	2.953.400
137.	Access Point	1	1	473.400
	Jumlah		137	497.037.064

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi pengurangan nilai neraca *Peralatan dan Mesin* dengan transaksi *Penghentian Aset dari Penggunaan (401) 31 Desember 2019*, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi *Penghentian Aset dari Penggunaan (401)* pada Satuan Kerja **BRSKPNAPZA Bambu Apus** senilai **Rp.(2.941.456.605,-)** dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Electric Generating Set Lainnya	-1	-58,120,000
Portable Water Pump	-1	-1,879,000
Sumersible Pump	-10	-20,124,000
Mesin Diesel	-1	-27,489,000
Sepeda	-19	-11,940,000
Mesin Bor	-10	-12,427,500
Mesin Rol	-1	-205,000
Mesin Kompresor	-3	-6,378,000
Mesin Las Listrik	-1	-7,500,000
Mesin Pemotong Fiberglas/Poliyster	-1	-7,084,545
Mesin Gerinda Tangan	-1	-14,000
Battery Charge	-2	-2,910,000
Solder Listrik	-2	-3,600,000
Steam Pressure Gauge	-2	-1,600,000
Steam Cleaner	-1	-2,500,000
Mesin Spooring	-2	-3,960,000
Mesin Gergaji	-2	-5,992,800
Peralatan Las Listrik	-3	-5,700,000
Peralatan Las Karbit	-1	-241,000
Perkakas Pengecatan Kendaraan	-1	-67,000
Perkakas Bengkel Listrik Lainnya (Alat Bengkel Tak Bermesin)	-1	-1,000,000
Dongkrak Mekanik	-2	-1,169,000
Tool Kit Set	-3	-20,949,000
Engine Stand	-6	-15,203,570
Bor	-3	-2,829,000
Tanggem	-2	-2,000,000
Gunting Plat	-2	-3,006,000
Kunci Pas	-3	-48,000
Peralatan Tukang Besi Lainnya	-1	-1,600,000
Scanner (Universal Tester)	-1	-24,250,000

NAMA	QTY	NILAI
Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya	-1	-532,000
Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	-1	-2,445,000
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	-1	-994,400
Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	-2	-2,197,800
Mesin Ketik Listrik Langewagon (18-27 Inchi)	-1	-220,000
Lemari Besi/Metal	-9	-3,130,000
Lemari Kayu	-58	-43,306,800
Rak Besi	-30	-17,648,000
Rak Kayu	-2	-161,000
Filing Cabinet Besi	-26	-22,045,000
Locker	-27	-21,600,000
Papan Visual/Papan Nama	-4	-4,904,000
White Board	-16	-17,089,000
Alat Penghancur Kertas	-3	-2,425,000
Overhead Projector	-1	-20,292,500
Mesin Laminating	-1	-423,000
Lampu-lampu Kristal	-2	-1,500,000
LCD Projector/Infocus	-1	-20,550,000
Perkakas Kantor Lainnya	-124	-106,635,100
Meja Kerja Besi/Metal	-3	-10,800,000
Meja Kerja Kayu	-49	-20,588,000
Kursi Besi/Metal	-529	-184,799,000
Sice	-7	-25,017,000
Bangku Panjang Kayu	-28	-12,540,000
Meja Rapat	-2	-4,585,000
Meja Komputer	-43	-42,809,000
Tempat Tidur Besi	-40	-61,600,000
Tempat Tidur Kayu	-50	-36,100,000
Kasur/Spring Bed	-83	-48,900,000
Meja Makan Kayu	-24	-47,705,000
Kursi Fiber Glas/Plastik	-2	-2,000,000
Rak Sepatu (Almunium)	-19	-19,000,000
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	-3	-6,548,000
Mesin Pel/Poles	-1	-16,000
Mesin Cuci	-2	-16,000,000
Lemari Es	-2	-4,394,000
A.C. Split	-23	-120,940,500
Kipas Angin	-28	-12,987,000
Reach In Frezzer	-2	-4,557,500
Kompur Gas (Alat Dapur)	-10	-5,758,000
Rice Cooker (Alat Dapur)	-3	-1,956,000

NAMA	QTY	NILAI
Kitchen Set	-2	-6,575,000
Tabung Gas	-6	-2,218,000
Mesin Giling Bumbu	-2	-961,000
Treng Air/Tandon Air	-1	-650,000
Alat Dapur Lainnya	-2	-840,000
Radio	-1	-1,650,000
Televisi	-29	-73,915,000
Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	-7	-5,151,500
Sound System	-2	-10,010,000
Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga)	-2	-3,650,000
Wireless	-2	-11,194,000
Megaphone	-2	-1,408,000
Stabilisator	-2	-1,000,000
Tustel	-7	-33,565,550
Mesin Jahit	-25	-151,000,000
Lambang Garuda Pancasila	-1	-24,000
Gambar Presiden/Wakil Presiden	-1	-420,000
Seterika	-1	-1,850,000
Tangga Aluminium	-3	-1,800,000
Kaca Hias	-10	-5,610,000
Dispenser	-7	-10,450,000
Mimbar/Podium	-3	-867,000
Handy Cam	-4	-18,629,900
Mesin Obras	-3	-10,100,000
Mesin Pelubang Kancing	-4	-11,475,000
Meja Potong	-8	-16,066,000
Manequin (Boneka)	-4	-800,000
Mini Compo	-2	-1,600,000
Karpet	-2	-5,815,000
Vertikal Blind	-1	-30,000,000
Gordyin/Kray	-87	-42,187,300
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-6	-9,275,000
Audio Amplifier	-1	-3,522,400
Microphone/Wireless MIC	-2	-18,200,000
Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	-1	-191,000
Slide Projector	-2	-53,894,000
Camera Digital	-1	-6,350,000
Pesawat Telephone	-2	-7,092,000
Handy Talky (HT)	-2	-5,598,000
Facsimile	-2	-10,764,000
Stethoscope (Alat Kedokteran Umum)	-2	-1,857,000

NAMA	QTY	NILAI
Tensimeter	-1	-157,000
Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	-1	-163,000
Alat Fraksinasi Serat	-1	-1,500,000
Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	-14	-15,465,000
Uninterrupted Power Supply (UPS)	-25	-34,000,000
Software Conf Off-Line Computer	-26	-29,000,000
Peralatan Umum Lainnya	-10	-32,500,000
Tang Ampere	-2	-2,000,000
Local Area Network (LAN)	-23	-35,100,000
P.C Unit	-47	-562,848,500
Lap Top	-6	-103,415,000
Note Book	-2	-23,900,000
Personal Komputer Lainnya	-1	-825,000
Steamer	-6	-6,000,000
Plotter (Peralatan Mini Komputer)	-1	-45,000,000
Scanner (Peralatan Mini Komputer)	-2	-6,590,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	-15	-56,047,590
External	-2	-1,747,450
Server	-2	-45,500,000
Router	-1	-2,200,000
Modem	-3	-3,850,000
Netware Interface External	-1	-1,343,100
Peralatan Bantu Lainnya	-3	-20,425,000
Alat Peraga Pelatihan Lainnya	-44	-33,420,000
Jet Pump	-21	-54,644,500
Alat Tennis Meja	-14	-11,058,400
Alat Badminton	-8	-4,177,000
Peralatan Fitnes	-1	-359,000
Catur	-1	-510,400
Jumlah	-1890	2,941,456,605

- Terdapat transaksi **Penghentian Aset dari Penggunaan (401)** pada Satuan Kerja **BRSPDSRW Melati Jakarta** senilai **Rp. (9.100.000,-)** dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Lemari Es	-1	-1,600,000
Wireless	-5	-7,500,000
JUMLAH	-6	-9,100,000

- Terdapat transaksi **Penghentian Aset dari Penggunaan (401)** pada Satuan Kerja **Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial** senilai **Rp.(2.077.692.015,-)** Berdasarkan **Berita Acara Penelitian dan Penilaian Nomor : 67/2.1/PL.04/2019** dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawa	-7	836,530,000
Rak-Rak Penyimpan	-16	-85,465,000
Lemari Penyimpan	-11	-50,330,000
Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	-3	-2,619,000
Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	-1	-2,399,100
Mesin Ketik Listrik	-2	-3,415,000
Lemari Besi/Metal	-1	-4,100,000
Lemari Kayu	-10	-8,186,800
Filing Cabinet Besi	-37	-43,137,900
Papan Visual/Papan Nama	-1	-2,388,000
Copy Board/Elektric White Board	-1	-2,029,000
Alat Penghancur Kertas	-2	-2,699,000
Alat Pemotong Kertas	-1	-2,475,000
White Board Electronic	-5	-33,818,000
LCD Projector/Infocus	-10	-187,860,000
Focusing Screen/Layar LCD Projector	-2	-5,800,000
Alat Kantor Lainnya	-1	-800,000
Meja Kerja Kayu	-53	-53,439,000
Kursi Besi/Metal	-106	-88,889,555
Kursi Kayu	-24	-2,952,000
Sice	-3	-17,895,000
Kursi Fiber Glas/Plastik	-52	-24,645,250
Lemari Es	-3	-8,445,000
A.C. Split	-1	-1,753,000
Radio	-1	-25,000
Video Cassette	-3	-7,000,000
Wireless	-9	-12,857,000
Dispenser	-3	-7,725,000
Handy Cam	-1	-5,068,000
Microphone/Wireless MIC	-1	-6,200,000
Voice Recorder	-1	-1,228,000
Tripod Camera	-1	-1,530,000
Camera Digital	-2	-20,850,000
Mesin Jilid	-1	-2,340,000

NAMA	QTY	NILAI
Facsimile	-2	-3,439,000
P.C Unit	-16	-166,555,000
Lap Top	-9	-125,305,000
Note Book	-6	-109,932,410
Monitor	-1	-13,695,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	-31	-104,094,000
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	-4	-17,778,000
JUMLAH	-445	-2,077,692,015

- Terdapat transaksi **Penghentian Aset dari Penggunaan (401)** pada Satuan Kerja **BBREGP Galih Pakuan** senilai **Rp. (28.350.000,-)** **Berdasarkan Berita Acara Nomor : 1539/2.5/PL.04/07/2019** dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Sepeda	-2	-600,000
P.C Unit	-2	-27,750,000
JUMLAH	4	-28,350,000

- Terdapat transaksi **Penghentian Aset dari Penggunaan (401)** pada Satuan Kerja **BBRVBD Cibinong** senilai **Rp. (518.903.000,-)** **Berdasarkan Berita Nomor : 105/2.3.16/1.1/10/2019** dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Solder Listrik	65	-5,265,000
Tool Kit Set	67	-79,469,000
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	-1,024,000
Mesin Ketik Listrik	3	-4,653,000
Mesin Hitung Elektronik/Calculator	8	-2,173,000
Alat Pemotong Kertas	1	-883,000
Meja Komputer	6	-6,300,000
Meja Ketik	1	-159,000
Kursi Fiber Glas/Plastik	19	-16,386,000
Mesin Pemotong Rumput	5	-10,694,000
A.C. Sentral	2	-458,000
Radio	25	-3,687,000
Karaoke	1	-1,738,000
P.C Unit	31	-368,814,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	-17,200,000
JUMLAH	240	-518,903,000

- Terdapat transaksi **Penghentian Aset dari Penggunaan (401)** pada Satuan Kerja **BRSPDM Margo Laras** senilai **Rp. (9.067.380,-)** dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Sepeda Motor	-4	-9,067,380
JUMLAH	-4	-9,067,380

- Terdapat transaksi **Penghentian Aset dari Penggunaan (401)** pada Satuan Kerja **BRSKPNAPZA Satria** senilai **Rp. (305.155.500,-)** dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Gerobak Dorong	-1	-181,000
Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	-2	-6,600,000
Mesin Fotocopy Folio	-1	-17,124,000
Lemari Kayu	-2	-604,000
Rak Besi	-3	-702,000

NAMA	QTY	NILAI
White Board	-5	-1,321,000
LCD Projector/Infocus	-1	-9,575,000
Meja Kerja Kayu	-5	-2,878,000
Kursi Besi/Metal	-17	-1,279,000
Sice	-1	-589,000
Meja Rapat	-9	-1,080,000
Meja Komputer	-6	-6,300,000
Tempat Tidur Kayu	-5	-667,000
Meja Makan Kayu	-2	-968,000
Mesin Cuci	-3	-6,450,000
Lemari Es	-1	-966,000
Kompor Gas (Alat Dapur)	-2	-1,740,000
Rice Cooker (Alat Dapur)	-2	-1,300,000
Rak Piring Alumunium	-1	-645,000
Televisi	-2	-3,488,000
Tustel	-1	-3,500,000
Dispenser	-2	-2,756,000
Handy Cam	-1	-11,772,000
Mini Compo	-3	-2,175,000
Karpet	-9	-2,304,000
Camera Electronic	-1	-3,300,000
Camera Digital	-1	-1,500,000
Telephone (PABX)	-1	-6,733,000
Pesawat Telephone	-2	-374,000
Facsimile	-2	-3,684,000
Aqua Guard	-1	-8,085,000
Generator	-1	-35,601,000
Uninterrupted Power Supply (UPS)	-2	-5,256,000
P.C Unit	-7	-66,679,500
Lap Top	-4	-63,500,000
Personal Komputer Lainnya	-1	-2,900,000
Scanner (Peralatan Mini Komputer)	-1	-925,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	-5	-15,604,000
Peralatan Komputer Lainnya	-3	-4,050,000
Jumlah	-119	-305,155,500

- Terdapat transaksi **Penghentian Aset dari Penggunaan (401)** pada Satuan Kerja **BRSPDM Budi Luhur Banjar Baru** senilai **Rp.(276.309.500,-)** dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Rak Kayu	1	-5,625,000
White Board	3	-3,300,000
Perkakas Kantor Lainnya	10	-9,750,000
Sice	2	-9,000,000
Kasur/Spring Bed	100	-100,099,500
Meja Makan Kayu	16	-15,200,000
Mesin Pemetong Rumput	2	-9,800,000
Mesin Cuci	2	-8,180,000
Lemari Es	3	-12,750,000
A.C. Split	4	-22,400,000
Televisi	7	-12,900,000
Lap Top	5	-61,640,000
JUMLAH	156	-276,309,500

- Terdapat transaksi **Penghentian Aset dari Penggunaan (401)** pada Satuan Kerja **BBRSBD Prof Dr Soeharso** senilai **Rp. (68.808.000,-)** dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Sedan	-1	-24,500,000
Station Wagon	-1	-28,400,000
Sepeda Motor	-4	-15,908,000
Jumlah		-68,808,000

- Terdapat transaksi **Penghentian Aset dari Penggunaan (401)** pada Satuan Kerja **BRSPDSN Mahatmiya** senilai **Rp. (117.047.000,-)** **Berdasarkan Berita Acara Nomor :384/OT.02/8/2019** dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mini Bus	1	117,047,000
JUMLAH	1	117,047,000

- Terdapat transaksi **Penghentian Aset dari Penggunaan (401)** pada Satuan Kerja **BRSODHA Wasana Bahagia Ternate** senilai **Rp.(176.753.333,-)** **Berdasarkan Berita Acara Nomor :1114/BRSODH/19** dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi

rusak berat dan tidak bisa di operasional dalam kegiatan perkantoran dengan rincian Sebagai Berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mini Bus	1	-68,463,333
Mesin Ampelas Tangan	-3	-2,850,000
Mesin Gergaji	-3	-5,550,000
Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu)	-3	-4,500,000
Mesin Bor Kayu	-3	-3,750,000
Tool Kit Box	-3	-11,250,000
LCD Projector/Infocus	-1	-11,000,000
Mesin Pemotong Rumput	-1	-2,210,000
A.C. Split	-1	-3,600,000
Sound System	-1	-21,000,000
Handy Cam	-1	-6,500,000
Alat Pemisah Buih(Foam Seperator)	-1	-630,000
Wash Bak	-1	-2,500,000
P.C Unit	-1	-7,750,000
Lap Top	-2	-23,000,000
Router	-1	-2,200,000
Jumlah	-27	-176,753,333

(05) DITJEN. LINJAMSOS

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	97	251,986,060
	Sepeda Motor	1	2,126,000
	Lemari Kayu	8	32,480,360
	Meja Kerja Kayu	8	6,560,000
	Kursi Besi/Metal	51	32,478,000
	Meja Rapat	1	3,208,000
	A.C Split	1	3,734,000
	Wireless	1	4,306,000
	Bracket Standing Peralatan	1	600,000
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	600,000
	Camera Digital	1	1,000,000
	PC. Unit	6	55,740,000
	Lap Top	2	29,483,700
	Tablet PC	2	18,190,000
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	36,480,000
	External/Portable Hardisk	3	23,550,000
	Modem	1	1,450,000

Terdapat penghentian Aset dari penggunaan dikarenakan asset tersebut sudah rusak berat dan dalam proses penghapusan.

(11) BADIKLITPENSOS

Terdapat transaksi **Penghentian Aset dari Penggunaan** atas peralatan dan mesin pada BP3S Senilai Rp.(1.890.528.297),- yaitu pada Satker:

- Pusdiklat Kesos senilai Rp(381.070.000),- dengan rincian sebagai berikut :

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
02711019944032600KP			
	PUSDIKLAT KESOS	(151)	(381.070.000)
	Kasur/Spring Bed	(151)	(381.070.000)

- Pusbangprof Peksos dan Pensos senilai Rp.(443.333.897),- dengan rincian sebagai berikut :

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
02711019968204000KP			
	PUSBANGPROF PEKSOS DAN PENSOS	(57)	(443.333.897)
	Mini Bus (Penumpang 14	(1)	(199.940.500)
	Alat Pemotong Kertas	(1)	(5.450.000)
	Kursi Besi/Metal	(22)	(19.627.000)
	Sice	(2)	(9.380.000)
	Meja Rapat	(1)	(3.926.000)
	A.C. Split	(5)	(23.217.000)
	Dispenser	(1)	(2.735.000)
	Meja Potong	(1)	(1.980.000)
	DVD Player	(1)	(12.435.000)
	Peralatan Studio Audio Lai	(2)	(22.894.000)
	Tripod Camera	(2)	(990.000)
	Slide Projector	(1)	(8.650.000)
	Duplicator DVD	(1)	(13.000.000)
	Local Area Network (LAN)	(3)	(1.762.992)
	P.C Unit	(5)	(68.508.000)

- BBPPKS Bandung senilai Rp.(375.800.000),- dengan rincian aset sebagai berikut:

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027110200369084000KD			
	BBPPKS BANDUNG	(2)	(375.800.000)
	Mini Bus(Penumpang 14 Orang Ke	(2)	(375.800.000)

- BBPPKS Yogyakarta senilai Rp.(690.324.400),- dengan rincian sebagai berikut :

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027.11.369180			
	BBPPKS Yogyakarta	-266	-690.324.400
	Memori Programmer	-3	(1.050.000)
	Mesin Ketik Manual Standard (14	-2	(416.000)
	Mesin Ketik Manual Langewagon	-3	(1.293.000)
	Lemari Kayu	-6	(11.511.000)
	Overhead Projector	-11	(53.218.000)
	Sice	-2	(12.000.000)
	Meja Komputer	-57	(56.850.000)
	Meja Telepon	-31	(1.860.000)
	Meja Resepsionis	-1	(1.800.000)
	Kasur/Spring Bed	-3	(15.600.000)
	Lemari Es	-3	(1.878.000)
	A.C. Split	-2	(3.302.000)
	Kipas Angin	-15	(2.623.000)
	Televisi	-6	(24.990.000)
	Mic Conference	-1	(37.711.000)
	Seterika	-2	(900.000)
	Mesin Pemotong Keramik	-1	(1.000.000)
	Kabel Roll	-1	(1.675.000)
	Uninterruptible Power Supply (U	-5	(6.000.000)
	Power Amplifier	-1	(1.615.000)
	Sepeda Statis	-5	(2.053.000)
	Exhaust Fan (Alat Laboratorium	-15	(7.500.000)
	Software DAAS MOD	-25	(28.235.000)
	Hardware Conf Off-Line Comput	-4	(2.865.000)
	P.C Unit	-28	(312.058.750)
	Lap Top	-6	(57.177.650)
	Floppy Disk Unit (Peralatan Main	-5	(2.400.000)
	Printer (Peralatan Personal Kom	-22	(40.743.000)

E.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan adalah Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu.

Nilai Perolehan Gedung dan Bangunan pada Kementerian Sosial RI per 31 Desember 2018 (Audited) sebesar Rp. 1,744,588,039,068,- dan 31 Desember 2019 (Audited) sebesar Rp. 1.798.628.848.267,- Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 (Audited) sebesar Rp. 182,053,118,595,- sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp. 1.616.575.729.672,-

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan Tahunan Tahun 2019 (Audited) sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018 (Audited)	Rp 1.744.588.039.068
Mutasi Tambah :	
Pembelian	Rp 197.450.000
Transfer Masuk	Rp 70.612.143.100
Hibah Masuk	Rp 649.820.000
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp 36.403.039.634
Reklasifikasi Masuk	Rp 27.070.122.685
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp 45.463.000
Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	Rp 7.097.376.000
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap	Rp 154.061.000
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp 2.079.850.106
Pengembangan Nilai Aset	Rp 23.793.568.225
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	Rp 3.934.868.985
Pengembangan Melalui KDP	Rp 23.397.563.809
Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	Rp 5.426.348.940
Koreksi Penilaian Kembali BMN	Rp 29.715.000
Koreksi Nilai Barang Berlebih	Rp 781.121.000
Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	Rp 25.676.494.000
Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	Rp 5.805.109.000
Mutasi Kurang :	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp (876.846.300)
Transaksi Normalisasi BMN	Rp (2.162.011.000)
Koreksi Kesalahan Input IP	Rp (30.401.599.000)
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	Rp (7.835.552.411)
Koreksi Transfer Masuk	Rp (5.805.109.000)
Penghapusan	Rp (120.653.000)
Transfer Keluar	Rp (70.612.143.100)
Reklasifikasi keluar	Rp (28.316.778.245)
Koreksi Pencatatan	Rp (7.855.876.629)
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp (347.926.000)
Koreksi Penghapusan Akibat Koreksi Revaluasi	Rp (24.778.810.600)
Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 1.798.628.848.267
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp (182.053.118.595)
Nilai Buku per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 1.616.575.729.672

PEMBELIAN

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat pembelian pada Satker Setjen Berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Pembelian	Satker Setjen	1	Rp 197.450.000	
	TOTAL		1	197.450.000	

NO.	Nama Barang	JML	NILAI	KET
1	Pagar Permanen	1	Rp 197.450.000	
TOTAL		1	197.450.000	

NAMABARANG	NOAWAL	TGL PEROLEH	RPHASET	MERK/TYPE
Pagar Permanen	4	10-10-2019	197,450,000	PAGAR TTC SENTUL

TRANSFER MASUK

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca **Gedung dan Bangunan** dengan transaksi **Transfer Masuk (102) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Transfer Masuk (102) berupa Gedung dan Bangunan** sebesar **Rp. 70.612.143.100,-** pada **Satuan Kerja BRSKP NAPZA Bambu Apus** dikarenakan perubahan nomenkelatur dari pelayanan Anak menjadi Napza berdasarkan **Berita Acara Nomor:646/BRSKPN/PL.04/06/2019** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	9,703,849,000
Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	1	320,054,000
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1,430,237,000
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	7	4,196,000,000
Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	1	729,685,000
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	3	1,581,675,000
Bangunan Gedung Tempat Olah Raga Lainnya	1	81,053,000
Gedung Pos Jaga Permanen	1	44,031,000
Gedung Garasi/Pool Permanen	1	401,462,000
Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	1	1,049,467,000
Selasar	1	368,843,000

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Terbuka Lainnya	1	145,530,000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2	1,003,143,000
Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1	328,849,000
Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	3	479,571,000
Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	10	1,027,650,000
Asrama Permanen	30	46,957,078,100
Pagar Permanen	2	763,966,000
Total		70,612,143,100

HIBAH (MASUK)

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca **Gedung dan Bangunan** dengan transaksi **Hibah Masuk (103) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi **Hibah Masuk (103)** pada Satuan Kerja **BRSPDI Ciung Wanara** senilai **Rp. 649.820.000,- Berdasarkan Berita Acara Hibah BMN Nomor : 11/PSBG/KS.02/01/2019 yang berasal dari Siloam Center For The Blind** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Gedung Olah Raga Tertutup Semi Permanen	0	649,820,000
JUMLAH	0	649,820,000

PENYELESAIAN PEMBANGUNAN DENGAN KDP

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca **Gedung dan Bangunan** dengan transaksi **Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (105) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Penyelesaian Pembangunan dengan KDP (105)** sebesar **Rp. 28.286.878.245,-** dikarenakan adanya **pembangunan Pusat Rehabilitasi Sosial ODHIV di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan** berupa Gedung dan Bangunan yang digunakan untuk membantu pelaksanaan tugas operasional dan pelayanan kantor pada Satuan Kerja **Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	28,286,878,245
JUMLAH	0	28,286,878,245

(11) BADIKLITPENSOS

Terdapat transaksi Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP pada BP3S senilai Rp.8.116.161.389,- yaitu pada satker BBPPKS Banjarmasin dengan rincian sebagai berikut:

SATKER	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
0271115003697520000KD			
BBPPKS BANJARMASIN		1	8.116.161.389
1	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	1	7.750.783.540
2	Gedung Garasi/Pool Permanen	2	365.377.849

REKLASIFIKASI MASUK

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca *Gedung dan Bangunan* dengan transaksi *Reklasifikasi Masuk (107) 31 Desember 2019*, dengan rincian sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Reklasifikasi Masuk, Reklasifikasi Keluar dan Koreksi Nilai/Kuantitas/KDP Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor:30/2.1/PL.01/12/2019 terdapat transaksi *Reklasifikasi Masuk (107)* sebesar Rp. 27.070.122.685,- dikarenakan adanya pembangunan *Pusat Rehabilitasi Sosial ODHIV di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan* yang di definitif menjadi aset pada satu bangunan kemudian dilakukan reklasifikasi masuk untuk mengkapitalisasi aset sesuai dengan fisik bangunan yang terbentuk pada Satuan Kerja *Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial* dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2,938,333,478
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	414,004,430
Bangunan Kesehatan Lainnya	1	666,846,411
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	778,964,737
Bangunan Gedung Pertemuan	1	1,356,721,558
Bangunan Gedung Pendidikan	4	3,679,585,439
Gedung Pos Jaga Permanen	1	343,132,697
Gedung Garasi/Pool Permanen	1	347,511,268
Selasar	2	5,215,376,250
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	641,257,905
Bangunan Lainnya	11	4,145,384,700
Taman Permanen	1	779,891,845
Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	5	1,935,379,758
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	708,851,306
Asrama Permanen	3	2,496,105,408
Pagar Permanen	1	622,775,495
Jumlah		27,070,122,685

PENYELESAIAN PEMBANGUNAN LANGSUNG

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca *Gedung dan Bangunan* dengan transaksi *Penyelesaian Pembangunan Langsung (113) 31 Desember 2019*, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Terdapat transaksi *Penyelesaian Pembangunan Langsung (113)* pada Satuan Kerja *LRSODHA Kahuripan Sukabumi* senilai *Rp. 45.463.000,-* dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Tempat Parkir	0	45,463,000
JUMLAH	0	45,463,000

KOREKSI BARANG BERLEBIH HASIL INVENTARISASI

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca *Gedung dan Bangunan* dengan transaksi *Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi (130) 31 Desember 2019*, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi Terdapat transaksi *Koreksi Barang Berlebih Hasil*

Inventarisasi (130) pada Satuan Kerja **BRSPDF Wirajaya** senilai **Rp.6.486.913.000,-** dikarenakan terdapat hasil atas revaluasi BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2,599,723,000
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1,354,410,000
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	4	2,532,780,000
JUMLAH	6	6,486,913,000

- Terdapat transaksi Terdapat transaksi **Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi (130)** pada Satuan Kerja **BRSEGP Pangudi Luhur** senilai **Rp. 610.463.000,-** dikarenakan terdapat hasil atas revaluasi BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	1	610,463,000
JUMLAH	1	610,463,000

REKLASIFIKASI DARI ASET LAINNYA KE ASET TETAP
(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca **Gedung dan Bangunan** dengan transaksi **Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap (177) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi **Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap (177)** pada Satuan Kerja **pada Satuan Kerja BRSPDSN Tumotou** senilai **Rp. 154.061.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	154,061,000
JUMLAH	1	154,061,000

PEROLEHAN HASIL TINDAK LANJUT NORMALISASI
(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca **Gedung dan Bangunan** dengan transaksi **Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi (190) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi **Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi (190)** pada Satuan Kerja **pada Satuan Kerja BRSKPNAPZA Insyaf** senilai **Rp. 64.264.274,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	27,539,587
Gedung Pos Jaga Permenan	1	36,724,687
JUMLAH	2	64,264,274

- Terdapat transaksi **Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi (190)** pada Satuan Kerja **pada Satuan Kerja BRSAMPK Handayani** senilai **Rp. 2.015.585.832,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	2,015,585,832
JUMLAH	1	2,015,585,832

PENGEMBANGAN NILAI ASET
(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Pengembangan Nilai Aset pada Satker Setjen Berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Pengembangan Nilai Aset	Satker Setjen		Rp 18.251.154.000	
	TOTAL		0	18.251.154.000	

Rincian Pengembangan Nilai Aset pada Satker Setjen

Adanya Pengembangan Nilai Aset Gedung dan Bangunan senilai **Rp.18.251.154.000,-**

- Adanya Pengembangan Nilai Aset pada Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp.15.040.673.000,-
- Adanya Pengembangan Nilai Aset pada Bangunan Klinik/Puskesmas senilai Rp.748.955.000,-
- Adanya Pengembangan Nilai Aset pada Bangunan Gedung Pertemuan Permanen senilai Rp.1.127.875.000,-
- Adanya Pengembangan Nilai Aset pada Bangunan Gedung Pendidikan Permanen senilai Rp.198.200.000,-

- Adanya Pengembangan Nilai Aset pada Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen senilai Rp.199.576.000,-
- Adanya Pengembangan Nilai Aset pada Gedung Garasi/Pool Permanen senilai Rp.199.127.000,-
- Adanya Pengembangan Nilai Aset pada Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen senilai Rp.198.400.000,-
- Adanya Pengembangan Nilai Aset pada Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen senilai Rp.340.179.000,-
- Adanya Pengembangan Nilai Aset pada Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen senilai Rp.198.169.000,-

NO.	Nama Barang	JML	NILAI	KET
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Rp 15.040.673.000	
2	Bangunan Klinik/Puskesmas		Rp 748.955.000	
3	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen		Rp 1.127.875.000	
4	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen		Rp 198.200.000	
5	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen		Rp 199.576.000	
6	Gedung Garasi/Pool Permanen		Rp 199.127.000	
7	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen		Rp 198.400.000	
8	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen		Rp 340.179.000	
9	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen		Rp 198.169.000	
	TOTAL	0	18.251.154.000	

(03) DITJEN. DAYASOS

Terjadi Transaksi Mutasi Tambah berupa Pengembangan Nilai Aset pada Satker Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial berupa **Roling Door** untuk Gedung HTT di makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata sebesar Rp. 119.068.125,-

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca **Gedung dan Bangunan** dengan transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSKPNAPZA Bambu Apus** senilai **Rp. 35.662.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Kantor Permanen	0	35,662,000
JUMLAH	0	35,662,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Handayani** senilai **Rp. 25.184.500,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	25,184,500
JUMLAH	0	25,184,500

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSPDSRW Melati** senilai **Rp. 49.067.375,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	49,067,375
JUMLAH	0	49,067,375

- Adanya transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** sebesar **Rp.198.484.000,-** pada **Loka Rehabilitasi Sosial Korban Penanggulangan NAPZA Pangurangi di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan** berupa Pagar Permanen yang digunakan untuk membantu pelaksanaan tugas operasional dan pelayanan kantor pada Satuan Kerja **Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Pagar Permanen	0	198,484,000
JUMLAH	0	198,484,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **LRSODHA Kahuripan Sukabumi** senilai **Rp. 48.950.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Pagar Permanen	0	48,950,000
JUMLAH	0	48,950,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BPBI Abiyoso** senilai **Rp. 194.914.250,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	47,000,000
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	0	147,914,250
JUMLAH	0	194,914,250

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSPDM Phalamarta** senilai **Rp. 397.100.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	0	337,522,000
Rumah Negara Gol I Tipe B Permanen	0	59,578,000
JUMLAH	0	397,100,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSPDSN Wyata Guna Bandung** senilai **Rp. 243.364.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	243,364,000
JUMLAH	0	243,364,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSEGP Pangudi Luhur** senilai **Rp. 793.763.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	92,474,000
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	195,839,000
Asrama Permanen	0	505,450,000
JUMLAH	0	793,763,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSLU Budi Darma** senilai **Rp. 60.338.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	0	60,338,000
JUMLAH	0	60,338,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSPDSN Tan Miyat** senilai **Rp. 312.404.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	312,404,000
JUMLAH	0	312,404,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSKPNAPZA Galih Pakuan** senilai **Rp. 52.569.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Pagar Permanen	0	52,569,000
JUMLAH	0	52,569,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSKPNAPZA Satria** senilai **Rp. 60.340.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	60,340,000
JUMLAH	0	60,340,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSBD Prof Dr Soeharso** senilai **Rp. 123.358.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	49,403,000
Tugu/Tanda Batas	0	73,955,000
JUMLAH	0	123,358,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSBG Kartini** senilai **Rp. 247.060.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	49,500,000
Gedung Pertokoan	0	197,560,000
JUMLAH	0	247,060,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Antasena** senilai **Rp. 40.056.430,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	40,056,430
JUMLAH	0	40,056,430

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **LRSAMPK Darusaadah** senilai **Rp. 74.975.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	49,975,000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	25,000,000
JUMLAH	0	74,975,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSODH Bahagia** senilai **Rp. 58.498.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	58,498,000
JUMLAH	0	58,498,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSKPNAPZA Insyaf** senilai **Rp. 66.492.500,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	66,492,500
JUMLAH	0	66,492,500

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Rumbai** senilai **Rp. 60.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	60,000,000
JUMLAH	0	60,000,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Alyatama** senilai **Rp. 55.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	0	55,000,000
JUMLAH	0	55,000,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSPDF Budi Perkasa** senilai **Rp. 66.250.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	66.250.000
JUMLAH	0	66.250.000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSPDM Budi Luhur** senilai **Rp. 51.075.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	51,075,000
JUMLAH	0	51,075,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSPDSN Tumotou** senilai **Rp. 44.454.545,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	44,454,545
JUMLAH	0	44,454,545

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSPDI Nipotowe** senilai **Rp. 411.275.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	301,375,000
Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	0	47,900,000
Rumah Negara Gol I Tipe B Permanen	0	62,000,000
JUMLAH	0	411,275,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSLU Gau Mabaji** senilai **Rp. 62.735.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	62,735,000
JUMLAH	0	62,735,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Toddopuli** senilai **Rp. 49.500.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	49,500,000
JUMLAH	0	49,500,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **LRSPDSRW Meohai** senilai **Rp. 46.975.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	0	46,975,000
JUMLAH	0	46,975,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **LRSLU Minaula Kendari** senilai **Rp. 34.075.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	34,075,000
JUMLAH	0	34,075,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSPDSN Mahatmiya** senilai **Rp. 49.880.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	49,880,000
JUMLAH	0	49,880,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Paramita** senilai **Rp. 60.900.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	60,900,000
JUMLAH	0	60,900,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Naibonat Kupang** senilai **Rp. 370.946.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	271.147.000
Tugu/Tanda Batas	0	99.799.000
JUMLAH	0	370.946.000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSPDSRW Efata Kupang** senilai **Rp. 57.547.500,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	57,547,500
JUMLAH	0	57,547,500

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSPDM Dharma Guna** senilai **Rp. 60.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	60,000,000
JUMLAH	0	60,000,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202)** pada Satuan Kerja **BRSODH Wasana Bahagia** senilai **Rp. 47.750.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	47,750,000
JUMLAH	0	47,750,000

(11) BADIKLITPENSOS

Terdapat transaksi Pengembangan Nilai Aset pada BP3S senilai Rp.812.403.000,- yaitu pada Satker:

- STKS Bandung senilai Rp.118.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027.11.369070	Poltekesos		
			118.500.000
	Bangunan Gedung Perpustakaan	0	40.000.000
	Bangunan Gedung Pertemuan per	0	78.500.000

- BBPPKS Bandung senilai Rp.275.250.000,- dengan rincian sebagai berikut

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027110200369084000KD			
	BBPPKS BANDUNG	1	275.250.000
	Bangunan Gedung Tempat Kerj	1	275.250.000

- BBPPKS Yogyakarta senilai Rp.30.160.000,- dengan rincian sebagai berikut :

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027110400369180000KD			
	BBPPKS YOGYAKARTA	1	30.160.000
	Pagar Permanen	1	30.160.000

- BBPPKS Banjarmasin senilai Rp.388.493.000,- dengan rincian sebagai berikut :

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
0271115003697520000KD			
BBPPKS BANJARMASIN		1	388.493.000
	Bangunan Gedung Kantor Perr	0	41.709.620
	Bangunan Gedung Pendidikan	0	198.220.000
	Gedung Olah Raga Tetutup Pe	0	29.821.210
	Asrama Permanen	0	118.742.170

PENERIMAAN ASET TETAP RENOVASI

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Penerimaan Aset Tetap Renovasi pada Satker Setjen Berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Penerimaan ATR	Satker Setjen		2.407.989.500	
TOTAL			0	Rp 2.407.989.500	

NO.	Nama Barang	JML	NILAI	KET
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Rp 2.050.284.500	
2	Bangunan Klinik/Puskesmas		Rp 165.170.000	
3	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen		Rp 192.535.000	
TOTAL			0	2.407.989.500

Rincian Penerimaan ATR pada Satker Setjen

Adanya Penerimaan Aset Tetap Renovasi pada Gedung dan Bangunan senilai senilai **Rp.2.407.989.500,-**.

- Adanya Penerimaan Aset Tetap Renovasi pada Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung A Kantor Pusat) dari SEKDJEN Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI senilai Rp.198.000.000,- Nomor [BAST : 166/2.1/PL.04/06/2019](#), Tanggal 11 Juni 2019.
- Adanya Penerimaan Aset Tetap Renovasi pada Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung D Kantor Pusat) dari SEKDJEN Perlindungan Sosial Kementerian Sosial RI senilai Rp.54.450.000,- Nomor [BAST : 1348/Set.LJS/PL.05.05/08/2019](#), Tanggal 11 Agustus 2019.
- Adanya Penerimaan Aset Tetap Renovasi pada Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung A Kantor Pusat) dari Direktorat KP Napza Kementerian Sosial RI senilai Rp.45.500.000,- Nomor [BAST : 22/PL.04/09/2019](#), Tanggal 11 September 2019.

- Adanya Penerimaan Aset Tetap Renovasi pada Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung A Kantor Pusat) dari SEKDJTJEN Penangan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI senilai Rp.565.519.000,- Nomor [BAST : 4766/4.1/PL.05.02/11/2019](#), Tanggal 11 Nopember 2019.
- Adanya Penerimaan Aset Tetap Renovasi pada Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung D Kantor Pusat) dari Direktorat Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI senilai Rp.209.863.000,- Nomor [BAST : 2049/3.4/BAST_BMN/12/2019](#), Tanggal 16 Desember 2019.
- Adanya Penerimaan Aset Tetap Renovasi pada Bangunan Gedung Pertemuan Permanen (Gedung Aneka Bhakti I Kantor Pusat) dari SEKDJTJEN Penangan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI senilai Rp.192.535.000,- Nomor [BAST : 5166/4.1/PL.05.02/12/2019](#), Tanggal 04 Desember 2019.
- Adanya Penerimaan Aset Tetap Renovasi pada Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung A Kantor Pusat) dari SEKDJTJEN Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI senilai [Rp.396.041.000,-](#) Nomor [BAST : 26/2.1/PL.04/12/2019](#), Tanggal 31 Desember 2019.
- Adanya Penerimaan Aset Tetap Renovasi pada Bangunan Klinik/Puskesmas (Gedung C Kantor Pusat) dari SEKDJTJEN Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI senilai Rp.165.170.000,- Nomor [BAST : 26/2.1/PL.04/12/2019](#), Tanggal 31 desember 2019.
- Adanya Penerimaan Aset Tetap Renovasi pada Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Cawang Kencana) dari PUSDATIN senilai Rp.196.421.500,- Nomor [BAST : 8306/1.7/PL.02.03/12/2019](#), Tanggal 30 Desember 2019.
- Adanya Penerimaan Aset Tetap Renovasi pada Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung A Kantor Pusat) dari SEKRETARIAT BADIKLIT PENSOS Kementerian Sosial RI senilai Rp.384.490.000,-

Nomor BAST : 3148/6.1/PL.04.01/12/2019, Tanggal 31 Desember 2019

Dari jumlah Gedung dan bangunan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN KONDISI	KUANTITAS	NILAI (Rp.)
Baik	188	392.092.608.559
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

(03) DITJEN. DAYASOS

Terjadi Transaksi Pada Satker K2KRS berupa Penerimaan Aset Tetap Renovasi dari Satker Biro Umum Ke Satker K2KRS di Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen dengan **BAST Barang Milik Negara Nomor: 4941-1/1.5/PL.02/12/2019** pada hari Jumat tgl 6 Desember 2019 senilai Rp. 384.683.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027030199440213000KP			
	Direktorat Kepahlawanan,Keperinintisan,Kepahlawanan dan Restorasi Sosial		
	Gedung dan Bangunan	0	384.683.000
	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0	384.683.000

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi tambah nilai neraca **Gedung dan Bangunan** dengan transaksi **Penerimaan Aset Tetap Renovasi (206) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi **Penerimaan Aset Tetap Renovasi (206)** dikarenakan terdapat rehabilitasi bangunan yang menggunakan alokasi anggaran entitas lain pada Satuan Kerja **BRSKPNAPZA Bambu Apus** senilai **Rp. 378.366.485,- berdasarkan Berita Acara Serah Terima BMN Nomor : 4941/1.5/PL.02/12/2019 yang berasal dari Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial dan Berita Acara Serah Terima BMN Nomor : 29/2.1//PL.04/12/2019 yang berasal dari Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	180,366,485
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	198,000,000
JUMLAH	0	378,366,485

- Terdapat transaksi **Penerimaan Aset Tetap Renovasi (206)** dikarenakan terdapat rehabilitasi bangunan yang menggunakan alokasi anggaran entitas lain pada Satuan Kerja **BRSPDM Phalamarta** senilai **Rp. 197.844.000,- berdasarkan Berita Acara Serah Terima BMN Nomor : 28/2.1//PL.04/12/2019 yang berasal dari Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Pagar Permanen	0	197,844,000
JUMLAH	0	197,844,000

- Terdapat transaksi **Penerimaan Aset Tetap Renovasi (206)** dikarenakan terdapat rehabilitasi bangunan yang menggunakan alokasi anggaran entitas lain pada Satuan Kerja **BRSAMPK Antasena** senilai **Rp. 171.129.000,- berdasarkan Berita Acara Serah Terima BMN Nomor :27/2.1//PL.04/12/2019 yang berasal dari Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Pagar Permanen	0	171,129,000
JUMLAH	0	171,129,000

(11) BADIKLTPENSOS

Terdapat transaksi Penerimaan Aset Tetap Renovasi pada BP3S senilai Rp.394.857.000,- yaitu pada satker Pusdiklat Kesos dengan rincian sebagai berikut:

SATKER	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
027110199440326000KP			
	PUSDIKLAT KESOS	0	394.857.000
	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	0	196.975.000
	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	0	197.882.000

PENGEMBANGAN MELALUI KDP
(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi tambah nilai neraca **Gedung dan Bangunan** dengan transaksi **Pengembangan Melalui KDP (208) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi **Pengembangan Melalui KDP (208)** pada Satuan Kerja **BRSKPNAPZA Bambu Apus** senilai **Rp. 1.160.072.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	557,304,300
Asrama Permanen	0	602,767,700
JUMLAH	0	1,160,072,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Melalui KDP (208)** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Handayani** senilai **Rp. 1.087.670.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	888,720,000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	0	198,950,000
JUMLAH	0	1,087,670,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Melalui KDP (208)** pada Satuan Kerja **BPBI Abiyoso** senilai **Rp. 221.209.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	0	221,209,000
JUMLAH	0	221,209,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Melalui KDP (208)** pada Satuan Kerja **BRSPDM Phalamarta** senilai **Rp. 383.265.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	383,265,000
JUMLAH	0	383,265,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Melalui KDP (208)** pada Satuan Kerja **BRSEGP Pangudi Luhur** senilai **Rp. 446.810.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Asrama Permanen	0	446,810,000
JUMLAH	0	446,810,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Melalui KDP (208)** pada Satuan Kerja **BRSLU Budi Darma** senilai **Rp. 199.283.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Asrama Permanen	0	199,283,000
JUMLAH	0	199,283,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Melalui KDP (208)** pada Satuan Kerja **BRSPDSN Tan Miyat** senilai **Rp. 499.100.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	499,100,000
JUMLAH	0	499,100,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Melalui KDP (208)** pada Satuan Kerja **BBRVBD Cibinong** senilai **Rp. 364.582.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	75,943,500
Asrama Permanen	0	288,638,500
JUMLAH	0	364,582,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Melalui KDP (208)** pada Satuan Kerja **BRSPDM Margo Laras** senilai **Rp. 346.130.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	346,130,000
JUMLAH	0	346,130,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Melalui KDP (208)** pada Satuan Kerja **BRSKPNAPZA Satria** senilai **Rp. 144.485.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	144,485,000
JUMLAH	0	144,485,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Melalui KDP (208)** pada Satuan Kerja **BBRSBD Prof Dr Soeharso** senilai **Rp. 3.210.306.198,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	198,800,000
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	949,455,000
Asrama Permanen	0	2,062,051,198
JUMLAH	0	3,210,306,198

- Terdapat transaksi **Pengembangan Melalui KDP (208)** pada Satuan Kerja **BBRSBG Kartini** senilai **Rp. 1.860.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	0	1,860,000,000
JUMLAH	0	1,860,000,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Melalui KDP (208)** pada Satuan Kerja **LRSAMPK Darusaadah** senilai **Rp. 374.650.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	199,850,000
Asrama Permanen	0	174,800,000
JUMLAH	0	374,650,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Melalui KDP (208)** pada Satuan Kerja **BRSPDI Nipotowe** senilai **Rp. 391.350.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	391,350,000
JUMLAH	0	391,350,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Melalui KDP (208)** pada Satuan Kerja **Wasana Bahagia Ternate** senilai **Rp. 399.249.500,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Klinik	0	399,249,500
Jumlah	0	399,249,500

- Terdapat transaksi **Pengembangan Melalui KDP (208)** pada Satuan Kerja **Wyata Guna Bandung** senilai **Rp. 239.175.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Asrma Permanen	0	239,175,000
Jumlah	0	239,175,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Melalui KDP (208)** pada Satuan Kerja **Wirajaya Makasar** senilai **Rp. 60.382.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	0	60,382,000
Jumlah	0	60,382,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan Melalui KDP (208)** pada Satuan Kerja **Gau Mabaji** senilai **Rp. 626.653.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	273,253,000
Asrama Permanen	0	353,400,000
Jumlah	0	626,653,000

(11) BADIKLITPENSOS

Terdapat transaksi pengembangan Melalui KDP pada BP3S senilai Rp.11.383.192.111,-

- Pada Satker Poltekesos senilai Rp. 1.925.871.400,- dengan rincian sebagai berikut :

SATKER	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
0271102003690700000KD			
POLTEKESOS BANDUNG		1	1.925.871.400
1	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	0	1.311.308.000
2	Gedung Pos Jaga Permanen	0	216.164.200
3	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	0	198.500.000
4	Tugu/Tanda Batas Administrasi Lainnya	0	199.899.200

- Pada Satker B2P3KS Yogyakarta senilai Rp.2.408.104.300,- dengan rincian sebagai berikut :

SATKER	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
0271102003690700000KD			
POLTEKESOS BANDUNG		1	2.408.104.300
1	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	0	1.203.952.105
2	Asrama Permanen	0	1.204.152.195

- Pada Satker BBPPKS Banjarmasin senilai Rp.7.049.216.411,- dengan rincian sebagai berikut :

SATKER	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
0271115003697520000KD			
BBPPKS BANJARMASIN		1	7.049.216.411
1	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	0	1.490.490.349
2	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Lainnya	0	539.660.295
3	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	1.627.738.026
4	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	0	1.567.584.686
5	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	0	1.823.743.055

KOREKSI SEMU HASIL PENILAIAN KEMBALI

(03) DITJEN. DAYASOS

Terdapat transaksi **Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali (223)** dikarenakan terdapat revaluasi BMN pada Dinas Sosial Sulawesi Selatan senilai **Rp. 41.248.072,-** dengan rincian sebagai berikut :

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.03.19.199135			
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (TP)		
	Gedung dan Bangunan		41.248.072
	Tugu Kemerdekaan	0	11.800.000
	Pagar Permanen	0	29.448.072

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi tambah nilai neraca **Gedung dan Bangunan** dengan transaksi **Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali (223) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi **Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali (223)**

dikarenakan terdapat revaluasi BMN pada Satuan Kerja **BRSEGP Pangudi Luhur** senilai **Rp. 89.433.974,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	0	89,433,974
JUMLAH	0	89,433,974

- Terdapat transaksi **Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali (223)** dikarenakan terdapat revaluasi BMN pada Satuan Kerja **BRSPDF Wirajaya** senilai **Rp. 4,561.019.407,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	437,671,090
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	0	1,296,577,785
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	2,826,770,532
JUMLAH	0	4,561,019,407

- Terdapat transaksi **Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali (223)** dikarenakan terdapat revaluasi BMN pada Satuan Kerja **BRSLU Budi Darma** senilai **Rp. 1.407.844,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Gedung Pos Jaga Permanen	0	1,407,844
JUMLAH	0	1,407,844

- Terdapat transaksi **Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali (223)** dikarenakan terdapat revaluasi BMN pada Satuan Kerja **BRSPDSN Tan Miyat** senilai **Rp. 733.239.643,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	0	733,239,643
JUMLAH	0	733,239,643

KOREKSI BARANG BERLEBIH AKIBAT KOREKSI PENILAIAN KEMBALI

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi tambah nilai neraca **Gedung dan Bangunan** dengan transaksi **Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali (245) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi **Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali (245)** dikarenakan revaluasi BMN pada Satuan Kerja **PSBR Bambu Apus** senilai (Rp. 611.056.000,-) yang merupakan Satuan Kerja Likuidasi **BRSKNAPZA Bambu Apus**, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-611,056,000
JUMLAH	0	-611,056,000

- Terdapat transaksi **Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali (245)** dikarenakan revaluasi BMN pada Satuan Kerja **BRSAMPK Handayani** senilai Rp. 760.240.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Pagar Permanen	1	760,240,000
JUMLAH	1	760,240,000

(11) BADIKLITPENSOS

Terdapat transaksi Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali pada BP3S senilai Rp.631.937.000,- yaitu pada satker BBPPKS Makassar dengan rincian sebagai berikut:

SATKER	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
0271119003699650000KD			
BBPPKS MAKASSAR		1	631.937.000
1	Rumah Negara Golongan i Tipe B Permanen	1	631.937.000

KOREKSI TRANSFER KELUAR AKIBAT KOREKSI REVALUASI (04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi tambah nilai neraca **Gedung dan Bangunan** dengan transaksi **Koreksi Transfer Keluar Atas 224 (331) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi **Koreksi Transfer Keluar Atas 224 (331)** dikarenakan revaluasi BMN pada Satuan Kerja **PSBR Bambu Apus** senilai Rp. 5.805.109.000,- yang merupakan Satuan Kerja Likuidasi **BRSKNAPZA Bambu Apus**, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	5,339,588,000
Tugu Titik Kantor	0	465,521,000
JUMLAH	0	5,805,109,000

KOREKSI EKUITAS AKIBAT KOREKSI REVALUASI

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Adanya Proses Penginputan nilai Koreksi Transfer Masuk pada Satker Setjen berdasarkan LHIP tahun 2019 Satker Biro umum. Dimana Penginputan ini dilakukan di Satker Setjen secara Manual melalui menu **“koreksi transfer masuk hasil IP”** di Aplikasi SIMAK BMN, hal ini dikarenakan Satker Biro Umum merupakan Satker likuidasi tahun 2018

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Koreksi Ekuitas akibat koreksi Reval	Biro Umum		Rp 25.676.494.000	
	TOTAL		0	25.676.494.000	

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi tambah nilai neraca ***Gedung dan Bangunan*** dengan transaksi ***Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi (334) 31 Desember 2019***, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi ***Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi (334)*** dikarenakan revaluasi BMN pada Satuan Kerja ***BRSLU Budi Darma*** senilai ***Rp. 5.249.000,-***, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Gedung Pos Jaga Permanen	0	5,249,000
JUMLAH	0	5,249,000

KOREKSI PENCATATAN NILAI/KUANTITAS

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Koreksi Pencatatan Nilai / Kuantitas pada Satker Setjen Berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Koreksi Pencatatan	Satker Setjen		Rp (55.660.988)	
	TOTAL		0	Rp (55.660.988)	

NO.	Nama Barang	JML	NILAI	KET
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Rp (11.760.373)	
2	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen		Rp (3.099.750)	
3	Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan		Rp (40.800.865)	
TOTAL		0	- 55.660.988	

Rincian Koreksi Pencatatan Nilai / Kuantitas pada Satker Setjen

Adanya Koreksi Pencatatan pada Aset Gedung dan Bangunan senilai **Rp.55.660.988,-;**

- Adanya Koreksi Pencatatan pada Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Cawang Kencana) senilai Rp.5.848.000,-
- Adanya Koreksi Pencatatan pada Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Cawang Kencana) senilai Rp.4.175.250,-
- Adanya Koreksi Pencatatan pada Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung A Kantor Pusat) senilai Rp.1.737.123,-
- Adanya Koreksi Pencatatan pada Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung A Kantor Pusat) senilai Rp.3.099.750,-
- Adanya Koreksi Pencatatan pada Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan Permanen (Gedung TTC Sentul) senilai Rp.8.761.000,-
No.TLHP :A/A.05/LHP/KP/IJ/12/2015 Kode Billing: 820190131314422 tanggal 31 Januari 2019.

Adanya Koreksi Pencatatan pada Bangunan Gedung Pendidikan dan Latihan Permanen (Gedung TTC Sentul) senilai Rp.32.039.865,-. TLHP BPK RI Tahun 2011 Kode Billing: 82019071561374 tanggal 15 Juli 2019.

(03) DITJEN. DAYASOS

Terjadi transaksi mutasi kurang berupa koreksi pencatatan pada Gedung dan Bangunan berupa Gudang HTT di Taman Makam Pahlawan Utama Kalibata sebesar **Rp. -4.555.912,-** dikarenakan kemahalan harga saat pembanguna Gudang HTT Tahun 2019.

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca **Gedung dan Bangunan** dengan transaksi **Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas (204) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi **Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas (204)** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Handayani** senilai **Rp. (1.300.000,-)** dengan

rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	0	-1,300,000
JUMLAH	0	-1,300,000

- Terdapat transaksi **Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas (204)** dikarenakan terdapat temuan pemeriksaan Tim Inspektorat Jenderal Bidang Rehabilitasi Sosial pada Satuan Kerja **BRSPDM Phalamarta Sukabumi** senilai **Rp. 5.017.410,- berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 607/ST/LJ/5/2019** dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi **Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas (204)** pada Satuan Kerja **BRSWatunas Mulya Jaya** senilai **Rp. 10.560.000,- berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 2.4.1/PL.02.01/11/2019** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Klinik	0	10,560,000
JUMLAH	0	10,560,000

- Terdapat transaksi **Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas (204)** dikarenakan terdapat temuan pemeriksaan Tim Inspektorat Jenderal Bidang Rehabilitasi Sosial pada Satuan Kerja **BRSODH Bahagia Medan** senilai **Rp. (807.579,-)** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	-807,579
JUMLAH	0	-807,579

- Terdapat transaksi **Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas (204)** dikarenakan terdapat temuan pemeriksaan Tim Inspektorat Jenderal Bidang Rehabilitasi Sosial pada Satuan Kerja **BRSPDSN Tumotou Manado** senilai **Rp. (12.543.036-)** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	0	-12,543,036
JUMLAH	0	-12,543,036

- Terdapat transaksi **Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas (204)** pada Satuan Kerja **BRSPDSN Wyata Guna** senilai **Rp. 128.700.000,-** berdasarkan Surat Keterangan Nomor : **2583/2.3.6/PL.04/12/2019** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	128,700,000
JUMLAH	0	128,700,000

- Terdapat transaksi **Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas (204)** pada Satuan Kerja **BBRVBD Cibinong** senilai **Rp. 12.004.080,-** berdasarkan Surat Keterangan Nomor : **1417/2.3.16/I.I/12/2019** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	12,004,080
JUMLAH	0	12,004,080

- Terdapat transaksi **Koreksi Pencatatan Nilai Kuantitas (204)** pada Satuan Kerja **BBRSBD Prof Dr Soeharso** senilai **Rp. (849.268.256,-)** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Bengkel Hanggar	0	168,329,822
Asrama Permanen		-1,017,598,078
JUMLAH	0	-849,268,256

(11) BADIKLITPENSOS

Terdapat transaksi Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas pada BP3S senilai Rp.(108.992.019),- yaitu pada Satker:

- BBPPKS Yogyakarta

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027110400369180000KD			
	BBPPKS YOGYAKARTA	0	-89.781.450
	Bangunan Gedung Tempat Ti	0	-89.781.450

- Pusklat Kesos

SATKER	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
027110199440326000KP			
	PUSDIKLAT KESOS	0	-19.210.569
	Bangunan Gedung	0	-19.210.569

TRANSAKSI NORMALISASI BMN
(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca *Gedung dan Bangunan* dengan transaksi *Transaksi Normalisasi (209) 31 Desember 2019*, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi *Transaksi Normalisasi (209) atas nilai minus* pada Satuan Kerja *BRSKPNAPZA Insyaf* senilai *Rp. (67.493.000,-)* berdasarkan **Surat Keterangan Nomor :1194/BRSKPN/PL.04/12/2019** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	0	-28.926.000
Gedung Pos Jaga Permanen	0	-38.567.000
JUMLAH	0	-67.493.000

- Terdapat transaksi *Transaksi Normalisasi (209) atas nilai minus* pada Satuan Kerja *BRSAMPK Handayani* senilai *Rp. (2.094.518.000,-)* dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	-2,094,518,000
JUMLAH	0	-2,094,518,000

KOREKSI PENILAIAN KEMBALI BMN
(11) BADIKLITPENSOS

Terdapat transaksi penilaian kembali BMN senilai Rp.63.007.000,- pada satker BBPPKS Makassar

SATKER	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
0271119003699650000KD			
BBPPKS MAKASSAR		1	63.007.000
1	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	0	753.676.000
2	Asrama Permanen	0	(690.669.000)

Terdapat transaksi Koreksi Penilaian Kembali BMN pada BP3S senilai Rp.(33,292.000),- yaitu pada Satker BBPPKS Makassar dengan rincian:

SATKER	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
0271119003699650000KD			
BBPPKS MAKASSAR		1	(33.292.000)
1	Pagar Permanen	0	(33.292.000)

KOREKSI KESALAHAN INPUT IP

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Adanya Proses Penginputan nilai Koreksi Transfer Masuk pada Satker Setjen berdasarkan LHIP tahun 2019 Satker Biro umum. Dimana Penginputan ini dilakukan di Satker Setjen secara Manual melalui menu **“koreksi transfer masuk hasil IP”** di Aplikasi SIMAK BMN, hal ini dikarenakan Satker Biro Umum merupakan Satker likuidasi tahun 2018

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
2	Koreksi Kesalahan Input IP	Biro Umum		Rp 25.676.494.000	

(03) DITJEND. DAYASOS

Terjadi Transaksi Mutasi Tambah berupa Koreksi Kesalahan Input IP pada satker K2KRS berupa TUGU TITIK KONTROL/PASTI di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata sebesar (Rp. 24.049.731.000,-)

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027030199440213000KP			
	Direktorat Kepahlawanan,Keperinintisan,Kepahlawanan dan Restorasi Sosial		
	Gedung dan Bangunan	0	6.441.702.000
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	6.441.702.000

Terjadi Transaksi Mutasi Kurang berupa Koreksi Kesalahan Input IP berupa Gedung dan Bangunan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata Nasional sebesar Rp. -30.491.433.000,-

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027030199440213000KP			
	Direktorat Kepahlawanan,Keperinintisan,Kepahlawanan dan Restorasi Sosial		
	Gedung dan Bangunan	0	(30.491.433.000)
	Bangunan Gedung	0	(30.491.433.000)

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca ***Gedung dan Bangunan*** dengan transaksi ***Koreksi Kesalahan Input IP (225) 31 Desember 2019***, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi ***Koreksi Kesalahan Input IP (225) atas revaluasi BMN*** pada Satuan Kerja ***BRSPDSRW Melati*** senilai ***Rp.(3.864.436.000,-)*** berdasarkan ***LHIP Nomor : 101/REV/WKN/07, 102/REV/WKN/07, 99/REV/WKN/07*** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	-314,794,000
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	0	-121,933,000
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	0	-82,782,000
Bangunan Gedung Pertemuan	0	-139,234,000
Bangunan Gedung Pendidikan	0	-571,300,000
Gedung Pos Jaga Permanen	0	-7,119,000
Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	-53,590,000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	0	-182,749,000
Taman Permanen	1	-2,761,000
Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	0	-270,595,000
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	0	-83,429,000
Asrama Permanen	0	-1,253,148,000
Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	0	-100,000
Pagar Permanen	0	-780,902,000
Jumlah		-3,864,436,000

- Terdapat transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) atas revaluasi BMN** pada Satuan Kerja **BRSPDM Budi Luhur** senilai **Rp.5.012.402.000,- berdasarkan LHIP Nomor : 81/REV/WKN/12, 82/REV/WKN/12**, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	6,354,000
Bangunan Gedung Kantor Lainnya	0	1,677,000
Bangunan Klinik	0	847,000
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	0	-76,602,000
Bangunan Gedung Pendidikan	0	3,953,000
Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	0	-33,704,000
Bangunan Kolam	0	-3,545,000
Bangunan Gedung Tempa Kerja Lainnya Permanen	0	83,738,000
Bangunan Gedung Tempa Kerja Lainnya Semi Permanen	0	622,833,000
Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	0	-61,467,000
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	0	-69,410,000
Mess	0	-104,000
Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	0	-51,768,000
Pagar Permanen	0	130,004,000
Asrama Permanen	0	4,459,596,000
Jumlah		5,012,402,000

- Terdapat transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) atas revaluasi BMN** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Alyatama** senilai **Rp.(679.176.000,-)** berdasarkan **LHIP Nomor : 88/REV/WKN/04, 89/REV/WKN/04**, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	-18,964,000
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	0	-9,386,000
Bangunan Klinik	0	-11,378,000
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	0	-11,378,000
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	0	2,094,000
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	44,151,000
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	0	-59,320,000
Gedung Pos Jaga	0	-6,194,000
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	0	-8,533,000
Gedung Garasi	0	-61,789,000
Bangunan Lantaijemur Permanen	0	-18,652,000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	0	-116,724,000
Rumah Negara Gol II Tipe C Permanen	0	-40,567,000
Mess	0	-18,014,000
Asrama Permanen	0	-242,286,000
Pagar	0	-102,236,000
Jumlah	0	-679,176,000

- Terdapat transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) atas revaluasi BMN** pada Satuan Kerja **Direktorat RTS & KPO** senilai **Rp.(279.993.000,-)** berdasarkan **LHIP Nomor :621/REV/WKN/07/2019, 622/REV/WKN/07/2019, 623/REV/WKN/07/2019** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	12,240,000
Pagar Permanen	0	-258,439,000
Pagar Lainnya	0	-33,794,000
JUMLAH	0	-279,993,000

- Terdapat transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) atas revaluasi BMN** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Rumbai** senilai **Rp. 175.582.000** berdasarkan **LHIP Nomor : 62/REV/WKN/03/2019, 63/REV/WKN/03/2019** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	546,920,000
Bangunan Bengkel	0	44,047,000
Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0	-165,116,000
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	0	-1,166,393,000
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	-634,015,000
Gedung Pertokoan	0	530,196,000
Gedung Pos Jaga Permanen	0	-8,464,000
Gedung Garasai	0	119,942,000
Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	0	675,415,000
Banguan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	0	47,142,000
Rumah Negara Gol 2 Tipe C Permanen	0	191,743,000
Rumah Negara Gol 2 Tipe D Permanen	0	-17,883,000
Rumah Negara Gol 2 Tipe E Permanen	0	-18,396,000
Mess	0	-155,479,000
Asrama Permanen	0	185,923,000
JUMLAH	0	175,582,000

- Terdapat transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) atas revaluasi BMN** pada Satuan Kerja **BRSPDSN Wyata Guna** senilai **Rp.(28.795.000,-)** berdasarkan **LHIP Nomor : 337/REV/WKN/08** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Pagar Permanen	0	-28.795.000
JUMLAH	0	-28.795.000

- Terdapat transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) atas revaluasi BMN** pada Satuan Kerja **BPBI Abiyoso** senilai **Rp. (229.169.000,-)** berdasarkan **LHIP Nomor : 334/REV/WKN/08** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	0	-229.169.000
JUMLAH	0	-229.169.000

- Terdapat transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) atas revaluasi BMN** pada Satuan Kerja **BRSLU Budi Darma** senilai **Rp. 739.495.000,- berdasarkan LHIP Nomor : 0044/REV/WKN/08/2019, 0116/REV/WKN/08/2019, 0117/REV/WKN/08/2019** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	0	22,343,000
Asrama Permanen	0	-368,676,000
Bangunan Gedung Kantor Permanen		23,672,000
Bangunan Gudang Pertemuan Permanen		207,530,000
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen		-1,452,000
Gedung Olah Raga Tertutup Permanen		51,890,000
Gedung Pos Jaga Permanen		-1,818,000
Gedung Garasi		130,530,000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen		573,823,000
Rumah Negara Gol I Tipe C Permanen		23,000,000
Rumah Negara Gol I Tipe D Permanen		11,644,000
Rumah Negara Gol I Tipe E Permanen		55,242,000
Pagar Permanen		11,767,000
JUMLAH	0	739,495,000

- Terdapat transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) atas revaluasi BMN** pada Satuan Kerja **BRSKPNAPZA Galih Pakuan** senilai **(Rp.3.204.973.000,-)** berdasarkan **LHIP Nomor :211/REV/WKN/08/2019, 212/REV/WKN/08/2019, 372/REV/WKN/08/2019** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Gedung Instalasi Studio	0	-508,177,000
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	0	-50,204,000
Asrama Permanen	0	-993,810,000
Pagar Permanen	0	-537,591,000
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	-158,376,000
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	0	-108,489,000
Bangunan Bengkel	0	-110,780,000
Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	0	-99,211,000
Bangunan Rumah Sakit Umum	0	12,540,000
Bangunan Oceanarium	0	-113,206,000

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	0	4.845.000
Gedung Olah Raga Tertutup Semi Permanen	0	-28.350.000
Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	0	103.997.000
Gedung Pos Jaga Permanen	0	-40.220.000
Gedung Garasi	0	114.784.000
Bangunan Untuk Kandang	0	-516.078.000
Bak Ikan	0	-1.373.000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	0	-647.232.000
Rumah Negara Gol I Tipe D Permanen	0	170.015.000
Rumah Negara Gol I Tipe E Permanen	0	8.643.000
Mess	0	-993.810.000
Pagar Semi Permanen	0	515.993.000
Total		-3.204.973.000

- Terdapat transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) atas revaluasi BMN** pada Satuan Kerja **BRVBD Cibinong** senilai **Rp. (357.923.000,-)** berdasarkan **LHIP Nomor : 214/REV/WKN/08** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	983,464,000
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	0	674,000
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	0	-185,369,000
Bangunan Olah Raga Terbuka Semi Permanen	0	-330,570,000
Bangunan Lantai Jemur Permanen	0	-551,000
Bangunan Lainnya	0	-46,094,000
Bangunan Tempat Parkir	0	-1,836,000
Taman Permanen	0	-177,079,000
Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	0	-2,031,000
Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	0	-24,990,000
Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	0	-55,118,000
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	0	-503,686,000
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	0	-4,849,000
Asrama Permanen	0	-9,888,000
Jumlah	0	-357,923,000

- Terdapat transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) atas revaluasi BMN** pada Satuan Kerja **BRSPDF Wirajaya** senilai **Rp.(513.665.000,-) berdasarkan LHIP Nomor : 11/REV/WKN.15, LHIP Nomor :63/REV/WKN.15, LHIP Nomor : 545/REV/WKN.15** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Gedun Olahraga Tertutup Permanen	0	-450,604,000
Asrama Permanen	0	-63,061,000
JUMLAH	0	-513,665,000

- Terdapat transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) atas revaluasi BMN** pada Satuan Kerja **PSBR Bambu Apus Satuan Kerja likuidasi dari BRSNKP Napza Bambu Apus** senilai **Rp.(5.194.053.000,-)** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Tugu Titik Kontrol	0	-465,521,000
Bangunan Gedung	0	-4,728,532,000
JUMLAH	0	-5,194,053,000

- Terdapat transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) atas revaluasi BMN** pada Satuan Kerja **BRSWATUNAS Mulya Jaya** senilai **Rp.(1.141.544.000,-) berdasarkan LHIP Nomor : 88/REV/WKN.07, LHIP Nomor : 89/REV/WKN.07 LHIP Nomor : 91/REV/WKN.07** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	1,690,000
Bangunan Klinik	0	-1,370,000
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	92,683,000
Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	0	57,855,000
Bangunan Olah Raga SemiPermanen	0	-1,344,682,000
Gedung Garasi	0	-89,520,000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	0	2,996,000
Rumah Negara Gol II Tipe C Permanen	0	2,154,000
Rumah Negara Gol II Tipe D Permanen	0	3,056,000
Rumah Negara Gol II Tipe E Permanen	0	2,853,000
Rumah Negara Gol III Tipe C Permanen	0	3,405,000
Mess	0	2,612,000
Asrama Permanen	0	24,358,000
Asrama Semi Permanen	0	-857,000
Tugu	0	917,000
Pagar Permanen	0	100,306,000
Total	0	-1,141,544,000

- Terdapat transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) atas revaluasi BMN** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Handayani** senilai **Rp.(207.263.000,-)** berdasarkan **LHIP Nomor : 86/REV/WKN.07, LHIP Nomor : 87/REV/WKN.07**, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	-630,006,000
Bangunan Olahraga Tertutup Permanen	0	563,096,000
Gedung Garasi	0	-26,623,000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	0	-63,295,000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	0	-25,291,000
Mess	0	-61,179,000
Asrama Permanen	0	-73,831,000
Tugu	0	95,032,000
Bangunan Rumah Sakit Umum	0	37,805,000
Jumlah		-207,263,000

- Terdapat transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) atas revaluasi BMN** pada Satuan Kerja **BRSPDSN Mahatmiya** senilai

Rp.(3.258.132.000,-) dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	310,454,000
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	0	-115,654,000
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	0	229,735,000
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	0	351,128,000
Gedung Olah Raga Tertutup Permanen	0	592,374,000
Gedung Pos Jaga Permanen	0	5,172,000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	0	1,363,053,000
Bangunan Tempat Parkir	0	11,410,000
Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	0	-78,046,000
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	0	84,627,000
Asrama Permanen	0	-6,012,385,000
Jumlah		-3,258,132,000

- Terdapat transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) atas revaluasi BMN** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Toddopuli** senilai **(Rp.8.487.494.000,-)** berdasarkan **LHIP Nomor : 273/REV/WKN/15 dan 274/REV/WKN/15**, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	-327,874,000
Bangunan Bengkel	0	-7,883,166,000
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	0	-113,506,000
Gedung Garasi	0	-13,252,000
Rumah Negara Gol I Tipe C Permanen	0	902,000
Rumah Negara Gol I Tipe D Permanen	0	710,000
Rumah Negara Gol I Tipe E Permanen	0	14,163,000
Asrama Permanen	0	-165,471,000
JUMLAH	0	-8,487,494,000

- Terdapat transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) atas revaluasi BMN** pada Satuan Kerja **BRSPDSN Tumotou** senilai **Rp. 888.194.000,-** berdasarkan **LHIP Nomor : 273/REV/WKN/15 dan 274/REV/WKN/15**, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	972.993.000
Tugu Titik	0	-84.799.000
JUMLAH	0	888.194.000

- Terdapat transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) atas revaluasi BMN** pada Satuan Kerja **BRSPDSN Tan Miyat** senilai **(Rp.1.469.658.000,-)** berdasarkan **LHIP Nomor : 118/REV/WKN/2019 dan 127/REV/WKN/2019**, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	-100,348,000
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	0	-222,819,000
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	0	-514,937,000
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	0	858,380,000
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	-381,071,000
Gedung Pos Jaga Permanen	0	37,218,000
Gedung Garasi	0	79,730,000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	0	597,885,000
Rumah Negara Gol II Tipe A Permanen	0	370,666,000
Asrama Permanen	0	-2,167,539,000
Pagar Permanen	0	-26,823,000
JUMLAH	0	-1,469,658,000

- Terdapat transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) atas revaluasi BMN** pada Satuan Kerja **BRSEGP Pangudi Luhur** senilai **Rp.3.159.779.000,-** berdasarkan **LHIP Nomor : 118/REV/WKN/2019 dan 127/REV/WKN/2019**, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	300,291,000
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	0	-49,457,000
Bangunan Bengkel	0	-95,161,000
Gedung Instalasi Studio	0	29,233,000
Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	0	135,077,000
Bangunan Klinik	0	147,954,000
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	0	-20,741,000
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	0	213,274,000
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	1,097,364,000
Gedung Pos Jaga Permanen	0	21,013,000
Gedung Garasi	0	131,635,000
Bangunan Gedung Perpustakaan Lainnya	0	49,275,000
Bangunan Terbuka Lainnya	0	15,524,000
Bak Ikan	0	-28,466,000
Bangunan Parkir Terbuka Permanen	0	-44,387,000

NAMA	QTY	NILAI
Rumah Negara Goll Tipe C Permanen	0	23,000,000
Rumah Negara Gol I Tipe D Permanen	0	168,094,000
Rumah Negara Gol I Tipe E Permanen	0	161,873,000
Mess	0	89,219,000
Tugu	0	-29,613,000
Total	0	3,159,779,000

(05) DITJEN. LINJAMSOS

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	163,939,000
	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	163,939,000

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.05.00.440275			
	Direktorat PSKBA		(5.025.669.000)
	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	3	(5.025.669.000)

(11) BADIKLITPENSOS

Terdapat transaksi Koreksi Kesalahan Input IP pada BP3S yaitu pada satker:

- BBPPKS Bandung senilai Rp.375.178.000,- dengan rincian sebagai berikut:

SATKER	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
027110200369084000KD			
BBPPKS BANDUNG		3	375.178.000
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	9.712.000
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	0	519.000
	Gedung Pos Jaga Permanen	0	0
	Gedung Garasi/Pool Permanen	0	0
	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	0	0
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	0	0
	Bangunan Lainnya	1	24.750.000
	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	0	35.406.000
	Asrama Permanen	2	295.587.000
	Pagar Permanen	0	9.204.000

- Pusdiklat Kesos senilai Rp.2.976.390.000,- dengan rincian sebagai berikut

SATKER	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
027.11.440326 Pusdiklat Kesos			
		0	2.976.390.000
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	1.832.630.000
	Tugu/Tanda Batas	0	1.143.760.000

- BBPPKS Banjarmasin senilai Rp.4.356.000,- dengan rincian sebagai berikut

SATKER	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
027.11.369752 BBPPKS Banjarmasin			
		0	4.356.000
	Tugu Titik kontrol / pasti	0	4.356.000
		0	

- BBPPKS Banjarmasin senilai Rp.(154.855.000),-

SATKER	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
0271115003697520000KD			
BBPPKS BANJARMASIN		7	-154.855.000
1	Bangunan Gedung	7	-154.855.000

- Pusdiklat Kesos senilai Rp.(647.000),-

SATKER	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
027110199440326000KP			
PUSDIKLAT KESOS		0	-647.000
	Tugu pembangunan	0	-647.000

- BBPPKS Makassar senilai Rp.(5.456.647.000),-

SATKER	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
0271119003699650000KD			
BBPPKS MAKASSAR		1	(5.456.647.000)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	(309.754.000)
2	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	0	1.158.427.000
3	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	0	(61.363.000)
4	Asrama Permanen	0	(6.243.957.000)

- Poltekesos Bandung senilai Rp.(5.969.585.000),-

SATKER	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
0271102369070D			
Poltekesos Bandung		1	-5.969.585.000
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	109.741.000
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	0	-8.000
3	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	0	362.162.000
4	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	-6.441.480.000

KOREKSI HASIL REVALUASI ATAS BMN YANG TIDAK DITEMUKAN (03) DITJEND. DAYASOS

Terdapat transaksi **Koreksi Hasil Revaluasi Atas BMN Yang Tidak Ditemukan (229)** dikarenakan adanya hasil revaluasi BMN pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan senilai **Rp. (581.606.472,-)** dengan rincian sebagai berikut :

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.03.19.199135			
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (TP)		
	Gedung dan Bangunan		(581.606.472)
	Tugu Kemerdekaan	0	(15.775.000)
	Pagar Permanen	0	(565.831.472)

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca **Gedung dan Bangunan** dengan transaksi **Koreksi Hasil Revaluasi Atas BMN Yang Tidak Ditemukan (229) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi **Koreksi Hasil Revaluasi Atas BMN Yang Tidak Ditemukan (229)** dikarenakan adanya hasil revaluasi BMN pada Satuan Kerja **BRSPDF Wirajaya** senilai **Rp. (6.352.687.305,-)** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	-2,489,903,000
Bangunan Gedng Pertemuan Permanen	0	-1,399,364,000
Bangunan Pendidikan Permanen	0	-2,463,420,305
Jumlah	0	-6,352,687,305

- Terdapat transaksi **Koreksi Hasil Revaluasi Atas BMN Yang Tidak Ditemukan (229)** dikarenakan adanya hasil revaluasi BMN pada

Satuan Kerja **BRSLU Budi Darma** senilai (Rp. 6.656.844,-) dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Gedung Pos Jaga Permanen	0	-6.656.844
Jumlah	0	-6.656.844

- Terdapat transaksi **Koreksi Hasil Revaluasi Atas BMN Yang Tidak Ditemukan (229)** dikarenakan adanya hasil revaluasi BMN pada Satuan Kerja **BRSEGP Pangudi Luhur** senilai Rp. 190.713.853,- dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Instalasi Permanen	0	190,713,853
Jumlah	0	190,713,853

- Terdapat transaksi **Koreksi Hasil Revaluasi Atas BMN Yang Tidak Ditemukan (229)** dikarenakan adanya hasil revaluasi BMN pada Satuan Kerja **BRSPDSN Tan Miyat** senilai Rp. (1.085.315.643,-) dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedng Pertemuan Permanen	0	-1,085,315,643
Jumlah	0	-1,085,315,643

KOREKSI TRANSFER MASUK

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca **Gedung dan Bangunan** dengan transaksi **Koreksi Transfer Masuk (232) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi **Koreksi Transfer Masuk (232)** dikarenakan adanya hasil revaluasi BMN pada Satuan Kerja **BRSKPNAPZA Bambu Apus** senilai Rp. (5.805.109.000,-) dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	0	-158,762,000
Bangunan Bengkel	0	-45,722,000
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	0	-5,459,000
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	0	-967,947,000
Gedung Olahraga Tertutup Permanen	0	61,000
Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	0	174,971,000
Bangunan Gedung Tempat Olahraga Lainnya	0	-21,614,000
Gedung Pos Jaga Permanen	0	-14,677,000
Selasar	0	-7,932,000
Bangunan Terbuka Lainnya	0	-15,055,000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	0	-221,301,000
Rumah Negara Gol I Tipe A Permanen	0	-54,808,000
Rumah Negara Gol I Tipe C Permanen	0	-162,208,000
Rumah Negara Gol I Tipe D Permanen	0	-308,291,000
Asrama Permanen	0	-3,530,844,000
Pagar Permanen	0	-465,521,000
Jumlah	0	-5,805,109,000

PENGHAPUSAN**(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL**

Mutasi kurang nilai neraca **Gedung dan Bangunan** dengan transaksi **Penghapusan (301) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi **Penghapusan (301)** dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat pada Satuan Kerja **BRSAMPK Naibonat** senilai **Rp. (120.653.000,-)** berdasarkan **Surat Keputusan Penghapusan BMN Nomor : 321/HUK/2016** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	0	-120.653.000
Jumlah		-120.653.000

TRANSFER KELUAR**(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL**

Mutasi kurang nilai neraca **Gedung dan Bangunan** dengan transaksi **Transfer Keluar (302) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Transfer Keluar (302) berupa Gedung dan Bangunan** sebesar **Rp. 70.612.143.100,-** pada **Satuan Kerja BRSKP NAPZA Bambu Apus** dikarenakan perubahan nomenkelatur dari pelayanan Anak menjadi Napza berdasarkan **Berita Acara Nomor:646/BRSKPN/PL.04/06/2019** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	9,703,849,000
Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	1	320,054,000
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1,430,237,000
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	7	4,196,000,000
Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	1	729,685,000
Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	3	1,581,675,000
Bangunan Gedung Tempat Olah Raga Lainnya	1	81,053,000
Gedung Pos Jaga Permanen	1	44,031,000
Gedung Garasi/Pool Permanen	1	401,462,000
Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	1	1,049,467,000
Selasar	1	368,843,000
Bangunan Terbuka Lainnya	1	145,530,000
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2	1,003,143,000
Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1	328,849,000
Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	3	479,571,000
Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	10	1,027,650,000
Asrama Permanen	30	46,957,078,100
Pagar Permanen	2	763,966,000
Total		70,612,143,100

REKLASIFIKASI KELUAR

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca **Gedung dan Bangunan** dengan transaksi **Reklasifikasi Keluar (304) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Berdasarkan **Berita Acara Reklasifikasi Masuk, Reklasifikasi Keluar dan Koreksi Nilai/Kuantitas/KDP Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor:30/2.1/PL.01/12/2019** terdapat transaksi **Reklasifikasi Keluar (304)** sebesar **(Rp. 28.286.878.245,-)** pada Satuan Kerja **Sekretariat**

Ditjen Rehabilitasi Sosial dikarenakan adanya pembangunan **Pusat Rehabilitasi Sosial ODHIV di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan** untuk menyesuaikan nilai pada bangunan yang akan dikapitalisasi.

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	-28,286,878,245
JUMLAH	1	-28,286,878,245

- Terdapat transaksi **Reklasifikasi Keluar (304)** dikarenakan adanya penyesuaian kodefikasi BMN pada Satuan Kerja **BRSPDPDM Dharma Guna** senilai **Rp. (29.900.000-)** berdasarkan **Surat Keterangan Nomor : 530/2.3.10/PL.04.01/02/2019** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Lainnya	-1	-29.900.000
JUMLAH	-1	-29.900.000

KOREKSI PENCATATAN
(03) DITJEN. DAYASOS

Terjadi Transaksi Mutasi Kurang berupa Koreksi Pencatatan pada Lahan Tanah untuk Makam Pahlawan Utama Kalibata untuk didefinitifkan Semu Hasil Penilaian Kembali per 31 Desember 2019 sebesar **Rp.-1.468.277.700,-**

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca **Gedung dan Bangunan** dengan transaksi **Koreksi Pencatatan (305) 31 Desember 2019 Audited**, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi **Koreksi Pencatatan (305)** dikarenakan berdasarkan hasil revaluasi dan penilaian kembali pada tahun 2019 terdapat barang tidak ditemukan tetapi masih tercatat pada laporan BMN pada Satuan Kerja **BRSEGP Pangudi Luhur** senilai **Rp.(809.457.827,-)** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	-1	-809,457,827
JUMLAH	-1	-809,457,827

- Terdapat transaksi **Koreksi Pencatatan (305)** dikarenakan berdasarkan hasil revaluasi dan penilaian kembali pada tahun 2019 terdapat barang tidak ditemukan tetapi masih tercatat pada laporan

BMN pada Satuan Kerja **BRSPDF Wirajaya** senilai **Rp.(5.325.241.102,-)** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Kantor Permanen	-1	-487,186,090
Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	-1	-1,296,577,785
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	-4	-3,541,477,227
JUMLAH	-1	-5,325,241,102

(11) BADIKLITPENSOS

Terdapat transaksi koreksi Pencatatan pada BP3S senilai Rp.(252.900.000),- pada satker BBPPKS Bandung

SATKER	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
027110200369084000KD			
BBPPKS BANDUNG		1	-252.900.000
	Bangunan Gedung	1	-252.900.000

PENGHENTIAN ASET DARI PENGGUNAAN

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca **Gedung dan Bangunan** dengan transaksi **Penghentian Aset dari Penggunaan (401) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi **Penghentian Aset dari Penggunaan (401)** dikarenakan dalam kondisi rusak berat akibat kejian force majeure kebakaran pada Satuan Kerja **BRSPDSN Wyata Guna** senilai **Rp.(61.997.000,-)** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	-1	61,997,000
JUMLAH	-1	61,997,000

- Terdapat transaksi **Penghentian Aset dari Penggunaan (401)** dikarenakan dalam kondisi rusak berat pada Satuan Kerja **BRSPDF Wirajaya Makasar** senilai **Rp. (281.536.000,-)** berdasarkan **Berita Acara Nomor : 445/BRSPDFW/02/2019** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-1	-281,536,000
JUMLAH	-1	-281,536,000

- Terdapat transaksi **Penghentian Aset dari Penggunaan (401)** dikarenakan dalam kondisi rusak berat pada Satuan Kerja **BRSAMPK Naibonat** senilai **Rp. (4.393.000,-)** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Lainnya	-1	4,393,000
JUMLAH	-1	4,393,000

KOREKSI PENGHAPUSAN AKIBAT KOREKSI REVALUASI
(01) SEKRETARIAT JENDERAL

- Terdapat transaksi **Koreksi Penghapusan Akibat Koreksi Revaluasi** dikarenakan adanya hasil revaluasi BMN pada Satuan Kerja **Biro Umum Sekjen** senilai **Rp. (25.676.494.000,-)** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	-25.676.494.000
Jumlah	0	-25.676.494.000

(03) DITJEN. DAYASOS

- Terdapat transaksi **Koreksi Penghapusan Akibat Koreksi Revaluasi** dikarenakan adanya hasil revaluasi BMN pada Satuan Kerja **Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan** senilai **Rp.540.358.400,-** dengan rincian sebagai berikut :

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.03.19.199135			
	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan (TP)		
	Gedung dan Bangunan		540.358.400
	Tugu Kemerdekaan	0	3.975.000
	Pagar Permanen	0	536.383.400

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

- Terdapat transaksi **Koreksi Penghapusan Akibat Koreksi Revaluasi** dikarenakan adanya hasil revaluasi BMN pada Satuan Kerja **BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "BUDHI DHARMA"** senilai **Rp. 5.249.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	5.249.000
Jumlah	0	5.249.000

Terdapat transaksi **Koreksi Penghapusan Akibat Koreksi Revaluasi** dikarenakan adanya hasil revaluasi BMN pada Satuan Kerja **BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK NETRA "TAN MIYAT"** senilai **Rp. 352.076.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung	0	352.076.000
Jumlah	0	352.076.000

E.2.2.4 Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan adalah Jalan dan Jembatan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Perolehan Jalan dan Jembatan pada Kementerian Sosial RI per **31 Desember 2018 (Audited)** sebesar **Rp. 48,667,957,875,-** dan **31 Desember 2019 (Audited)** sebesar **Rp. 46,551,709,875,-** Akumulasi Penyusutan per **31 Desember 2019 (Audited)** sebesar **Rp. 23,402,850,397,-** sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar **Rp. 23,148,859,478,-**.

Mutasi/perubahan Jalan dan Jembatan Tahunan Tahun 2019 (Audited) sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018 (Audited)	Rp 48.667.957.875
Mutasi Tambah :	
Transfer Masuk	Rp 3.454.031.000
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp 43.705.000
Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	Rp 852.978.000
Mutasi Kurang :	
Transaksi Normalisasi BMN	Rp (43.054.000)
Transfer Keluar	Rp (3.454.031.000)
Koreksi Kesalahan Input IP	Rp (2.116.899.000)
Koreksi Transfer Masuk	Rp (852.978.000)
Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 46.551.709.875
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 (Aud)	Rp (23.402.850.397)
Nilai Buku per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 23.148.859.478

TRANSFER MASUK

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca *Jalan dan Jembatan* dengan transaksi *Transfer Masuk (102) 31 Desember 2019*, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi *Transfer Masuk (102) berupa Jalan dan Jembatan* sebesar *Rp. 3.454.031.000,- pada Satuan Kerja BRSKP NAPZA Bambu Apus* dikarenakan perubahan nomenkelatur dari pelayanan Anak menjadi Napza berdasarkan *Berita Acara Nomor:646/BRSKPN/PL.04/06/2019* dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan Khusus Komplek	4852	2,911,754,000
Jalan Khusus Lainnya	725	542,277,000
Total	5,577	3,454,031,000

PEROLEHAN HASIL TINDAK LANJUT NORMALISASI

Mutasi penambahan nilai neraca *Jalan dan Jembatan* dengan transaksi *Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi (190) 31 Desember 2019*, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi *Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi (190) berupa Jalan dan Jembatan* dikarenakan adanya nilai buku minus sebesar *Rp. 43.705.000,- pada Satuan Kerja BRSKPNAPZA Bambu Apus Berdasarkan Surat Keterangan Nomor:1670/BRKPN/PL.04/12/2019* dikarenakan adanya revaluasi BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan Khusus Komplek	0	43,705,000
Total	0	43,705,000

KOREKSI TRANSFER KELUAR ATAS 224

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Adanya transaksi *Koreksi TRANSFER KELUAR ATAS 224 (331) berupa Jalan dan Jembatan* sebesar *Rp. 852.978.000,- pada Satuan Kerja PSBR Bambu Apus Satuan Kerja likuidasi dari BRSKPNAPZA Bambu Apus* dikarenakan adanya revaluasi BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan dan Jembatan	0	852.978.000
Total	0	852.978.000

TRANSAKSI NORMALISASI BMN

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dijelaskan terdapat mutasi kurang pada **Jalan dan Jembatan 31 Desember 2019** dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Transaksi Normalisasi BMN (209) berupa Jalan dan Jembatan** sebesar **(Rp. 43.054.000,-)** pada **Satuan Kerja BRSKP NAPZA Bambu Apus** dikarenakan terdapat nilai buku minus berdasarkan **Surat Keretangan Nomor:1670/BRSKPN/PL.04/12/2019** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan Khusus Komplek	-200	-43,054,000
Total	-200	-43,054,000

TRANSFER KELUAR

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dijelaskan terdapat mutasi kurang pada **Jalan dan Jembatan 31 Desember 2019** dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Transfer Keluar (302) berupa Jalan dan Jembatan** sebesar **Rp. 3.454.031.000,-** pada **Satuan Kerja BRSKP NAPZA Bambu Apus** dikarenakan perubahan nomenkelatur dari pelayanan Anak menjadi Napza berdasarkan **Berita Acara Nomor:646/BRSKPN/PL.04/06/2019** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan Khusus Komplek	4852	2,911,754,000
Jalan Khusus Lainnya	725	542,277,000
Total	5,577	3,454,031,000

KOREKSI KESALAHAN INPUT IP

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca **Jalan dan Jembatan** dengan transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Jalan dan Jembatan** sebesar **Rp. 404.011.000,-** pada **Satuan Kerja BRSPDSRW Melati** dikarenakan adanya revaluasi BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan Khusus Komplek	0	212,502,000
Jalan Khusus Lainnya	0	191,509,000
Total	0	404,011,000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Jalan dan Jembatan** sebesar (Rp. 260.295.000,-) pada Satuan Kerja **BRSAMPK Rumbai** dikarenakan adanya revaluasi BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan Khusus Komplek	0	-260,295,000
Total	0	-260,295,000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Jalan dan Jembatan** sebesar (Rp. 21.640.000,-) pada Satuan Kerja **Direktorat RTS & KPO berdasarkan LHIP Nomor : 621/REV/WKN.07/2019** dikarenakan adanya revaluasi BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan Khusus Komplek	0	-21,640,000
Total	0	-21,640,000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Jalan dan Jembatan** sebesar Rp. -258.384.000,- pada Satuan Kerja **BBRVBD Cibinong berdasarkan LHIP Nomor : 214/REV/WKN.08** dikarenakan adanya revaluasi BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan Khusus Komplek	0	-258.384.000
Total	0	-258.384.000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Jalan dan Jembatan** sebesar Rp. 107.574.000,- pada Satuan Kerja **BBRSPDF Wirajaya berdasarkan LHIP Nomor : 545/REV/WKN.15** dikarenakan adanya revaluasi BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan Khusus Komplek	0	107,574,000
Total	0	107,574,000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Jalan dan Jembatan** sebesar **Rp. 46.740.000,-** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Handayani** dikarenakan adanya revaluasi BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan Khusus Komplek	0	46,740,000
Total	0	46,740,000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Jalan dan Jembatan** sebesar **(Rp. 13.423.000,-)** pada Satuan Kerja **BRSPDSN Tumotou** dikarenakan adanya revaluasi BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan Khusus Komplek	0	-13.423.000
Total	0	-13.423.000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Jalan dan Jembatan** sebesar **Rp. 27.494.000,-** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Alyatama** dikarenakan adanya revaluasi BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan Khusus Komplek	0	27,494,000
Total	0	27,494,000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Jalan dan Jembatan** sebesar **Rp. 488.136.000,-** pada Satuan Kerja **BRSPDM Budi Luhur** dikarenakan adanya revaluasi BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan Khusus Komplek	0	486,609,000
Jalan Khusu Perorangan	0	1,527,000
Total	0	488,136,000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Jalan dan Jembatan** sebesar **(Rp. 852.978.000,-)** pada Satuan Kerja **PSBR Bambu Apus Satuan Kerja likuidasi dari BRSKPNAPZA Bambu**

Apus dikarenakan adanya revaluasi BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan dan Jembatan	0	-852,978,000
Total	0	-852,978,000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Jalan dan Jembatan** sebesar **Rp. 1.795.287.000,- pada Satuan Kerja BRSPDSN Tan Miyat** dikarenakan adanya revaluasi BMN Berdasarkan **BAR LHIP Nomor : 00127/REV/WKN/2019**, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan Khusus Komplek	0	1,795,287,000
Total	0	1,795,287,000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Jalan dan Jembatan** sebesar **Rp. 176.773.000,- pada Satuan Kerja BRSKPNAPZA Galih Pakuan** dikarenakan adanya revaluasi BMN Berdasarkan **BAR LHIP Nomor : 00327/REV/WKN.08/2019**, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan Khusus Komplek	0	123,786,000
Jembatan pada Jalan Desa	0	52,987,000
Total	0	176,773,000

(05) DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.05.00.440275			
Direktorat PSKBA			117.071.000
	Jembatan pada Jalan Khusus Kompleks	1	117.071.000

Koreksi kesalahan input Inventarisasi dan Penilaian (IP) berkaitan dengan Revaluasi Aset.

(11) BADIKLITPENSOS

Berdasarkan data tersebut terjadi mutasi tambah dikarenakan adanya koreksi kesalahan input IP pada satker :

- Pusdiklat kesos senilai Rp.346.550.000,- dengan rincian sebagai berikut :

SATKER	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
027110199440326000KP			
	PUSDIKLAT KESOS	0	346.550.000
	Bangunan Gedung	0	346.550.000

Terjadi mutasi kurang dikarenakan adanya koreksi kesalahan input IP pada satker :

- BBPPKS Banjarmasin senilai Rp.(4.219.815.000),- dengan rincian sebagai berikut :

SATKER	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
027111500369752000KD			
	BBPPKS BANJARMASIN	0	-4.219.815.000
1	Jalan dan Jembatan	0	-4.219.815.000

KOREKSI TRANSFER MASUK

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Adanya transaksi **Koreksi Transfer Masuk (232) berupa Jalan dan Jembatan** sebesar **(Rp. 852.978.000,-)** pada **Satuan Kerja PSBR Bambu Apus Satuan Kerja likuidasi dari BRSKPNAPZA Bambu Apus** dikarenakan adanya revaluasi BMN dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jalan dan Jembatan	0	-852,978,000
Total	0	-852,978,000

E.2.2.5 Irigasi

Irigasi adalah Irigasi yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Perolehan Irigasi pada Kementerian Sosial RI per per **31 Desember 2018 (Audited)** sebesar **Rp. 30,824,046,668,-** dan **31 Desember 2019 (Audited)** sebesar **Rp. 38.341,743,268,-** Akumulasi Penyusutan per **31 Desember 2019 (Audited)** sebesar **Rp. 6,491,545,017,-** sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar **Rp. 31,850,198,251,-**.

Mutasi/perubahan Irigasi Tahunan Tahun 2019 (Audited) sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018 (Audited)	Rp 30.824.046.668
Mutasi Tambah :	
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp 338.000.000
Pengembangan Melalui KDP	Rp 185.000.000
Koreksi Kesalahan Input IP	Rp 7.416.045.000
Mutasi Kurang :	
Koreksi Pencatatan	Rp (421.348.400)
Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 38.341.743.268
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp (6.491.545.017)
Nilai Buku per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 31.850.198.251

PENYELESAIAN PEMBANGUNAN LANGSUNG

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca *Irigasi* dengan transaksi *Penyelesaian Pembangunan Langsung (113) 31 Desember 2019*, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi *Penyelesaian Pembangunan Langsung (113) berupa Irigasi* sebesar *Rp. 140.000.000,- pada Satuan Kerja BBRSPDI Kartini Temanggung* dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Sumur Artesis	0	140,000,000
Total	0	140,000,000

- Adanya transaksi *Penyelesaian Pembangunan Langsung (113) berupa Irigasi* sebesar *Rp. 140.000.000,- pada Satuan Kerja BRSPNP Insyaf Medan* dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Sumur Dengan Pompa	1	198,000,000
Total	1	198,000,000

PENGEMBANGAN MELALUI KDP

Mutasi penambahan nilai neraca *Irigasi* dengan transaksi *Pengembangan Melalui KDP (208) 31 Desember 2019*, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi *Pengembangan Melalui KDP (208) berupa Irigasi* sebesar *Rp. 185.000.000,- pada Satuan Kerja BBRSLU Gau Mabaji*

dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Krib Pengamanan Sungai	1	185,000,000
Total	1	185,000,000

KOREKSI KESALAHAN INPUT IP

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi tambah nilai neraca *Irigasi* dengan transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Irigasi** sebesar **Rp. 413.506.000,-** dikarenakan adanya revaluasi BMN pada **Satuan Kerja BRSPDSRW Melati** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Sumut Artesis	0	-8,504,000
Bak Penampung	0	-88,479,000
Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah	0	510,489,000
Total	0	413,506,000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Irigasi** sebesar (**Rp. 110.532.000,-**) dikarenakan adanya revaluasi BMN pada **Satuan Kerja BBRVBD Cibinong Berdasarkan LHIP Nomor:214/REV/WKN.08** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Sumur Dengan Pompa	0	-90,178,000
Sumur Artesis	0	-20,354,000
Total	0	-110,532,000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Irigasi** sebesar (**Rp. 179.874.000,-**) dikarenakan adanya revaluasi BMN pada **Satuan Kerja BRSAMPK Rumbai** dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	QTY	NILAI
Saluran Drainase	0	-211.926.000
Bangunan Menara	0	-5.593.000
Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah	0	37.645.000
Total	0	-179.874.000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Irigasi** sebesar **Rp. 6.299.885.000,-** dikarenakan adanya revaluasi BMN pada **Satuan Kerja BRSAMPK Handayani** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Pembuang Irigasi Lainnya	0	6.255.748.000
Sumur Dengan Pompa	0	44.137.000
Total	0	6.299.885.000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Irigasi** sebesar (**Rp. 30.259.000,-**) dikarenakan adanya revaluasi BMN pada **Satuan Kerja BRSPDSN Tumotou** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Tanggul Keliling	0	-8,187,000
Saluran Pembuangan Air Hujan	0	-22,072,000
Total	0	-30,259,000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Irigasi** sebesar (**Rp. 264.000,-**) dikarenakan adanya revaluasi BMN pada **Satuan Kerja BRSAMPK Alyatama** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Sumur Dengan Pompa	0	-132,000
Bangunan Menara	0	-132,000
Total	0	-264,000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Irigasi** sebesar **Rp. 36.122.000,-** dikarenakan adanya revaluasi BMN pada **Satuan Kerja BRSPDM Budi Luhur** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Sumur Dengan Pompa	0	-64,452,000
Saluran Pembuangan Air Hujan	0	100,574,000
Total	0	36,122,000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Irigasi** sebesar **Rp. 829.823.000,-** dikarenakan adanya revaluasi BMN pada **Satuan Kerja BRSEGP Pangudi Luhur** dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	QTY	NILAI
Waduk Dengan Menara Pengambilan	0	917,405,000
Saluran Drainage	0	-196,530,000
Bangunan Pengambilan Air Bersih	0	-2,770,000
Bangunan Mandi Cuci Kakus	0	111,718,000
Total	0	829,823,000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Irigasi** sebesar **Rp. 224.167.000,-** dikarenakan adanya revaluasi BMN pada **Satuan Kerja BRSLU Budi Darma berdasarkan BAR LHIP Nomor:00126/REV/WKN/2019,** dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	QTY	NILAI
Sumur Artesis	0	224,167,000
Total	0	224,167,000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Irigasi** sebesar **Rp. 333.032.000,-** dikarenakan adanya revaluasi BMN pada **Satuan Kerja BRSPDSN Tan Miyat** dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Pembuang Air Kotor Lainnya	0	333,032,000
Total	0	333,032,000

- Adanya transaksi **Koreksi Kesalahan Input IP (225) berupa Irigasi** sebesar **(Rp. 162.475.000,-)** dikarenakan adanya revaluasi BMN pada **Satuan Kerja BRSKPNAPZA Galih Pakuan Berdasarkan BAR LHIP Nomor : 372/REV/WKN.08/2019** dengan rincian sebagai berikut:

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Pelimpah Sampah	0	10,581,000
Tanggul Keliling	0	-133,019,000
Bangunan Stasiun Pompa Pemasukan	0	2,456,000
Bak Penampung	0	25,845,000
Bangunan Penampung Air Baku	0	-51,424,000
Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah	0	-16,914,000
Total	0	-162,475,000

(11) BADIKLITPENSOS

Berdasarkan data tersebut terjadi mutasi kurang dikarenakan adanya koreksi kesalahan input IP pada bidang bangunan air pada satker :

- BBPPKS Banjarmasin senilai Rp.(42.537.000),-

SATKER	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
0271115003697520000KD			
BBPPKS BANJARMASIN		0	-42.537.000
1	Bak penampung / Kolam / Menara penampungan	0	-42.537.000

- BBPPKS Makassar senilai Rp.(30.726.000),-

SATKER	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
027.11.369965			
BBPPKS MAKASSAR		0	-30.726.000
1	Bak Penyimpanan / Tower air baku	0	-30.726.000

- Pusdiklat Kesos senilai Rp.(163.823.000),-

SATKER	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
027110199440326000KP			
PUSDIKLAT KESOS		0	-163.823.000
	Bangunan Pelimpah Sampah	0	560.000
	Saluran Induk Pembuang (Bangunan Pembuang Penge	0	(73.972.000)
	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	0	28.687.000
	Saluran Pembawa Air Baku Terbuka	0	(5.351.000)
	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Mir	0	28.585.000
	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	0	(7.971.000)
	Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah	0	(134.361.000)

KOREKSI PENCATATAN

(03) DITJEN. DAYASOS

Terjadi Transaksi Koreksi Pencatatan Aset pada Satker Direktorat K2KRS sebagai berikut:

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.03.00.440213			
Direktorat K2KRS			
	IRIGASI	0	(421.348.400)
	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Penagmbil Iriga	0	(421.348.400)

E.2.2.6 Jaringan

Jaringan adalah Jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Perolehan Jaringan pada Kementerian Sosial RI per *31 Desember 2018 (Audited)* sebesar *Rp. 16,022,524,241,-* dan *31 Desember 2019 (Audited)* sebesar *Rp. 17,770,229,691,-* Akumulasi Penyusutan per *31 Desember 2019 (Audited)* sebesar *Rp. 7,373,488,912,-* sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar *Rp. 10,396,740,779,-*.

Mutasi/perubahan Jaringan Tahunan Tahun 2019 (Audited) sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018 (Audited)	Rp 16.022.524.241
Mutasi Tambah :	
Pembelian	Rp 1.743.586.850
Transfer Masuk	Rp 209.506.506
Pengembangan Nilai Aset	Rp 4.118.600
Mutasi Kurang :	
Transfer Keluar	Rp (209.506.506)
Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 17.770.229.691
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp (7.373.488.912)
Nilai Buku per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 10.396.740.779

PEMBELIAN

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat pembelian pada Satker Setjen Berupa :

Adanya Pembelian pada Aset Jaringan pada Satker Sekretariat Jenderal senilai **Rp.856.971.200,-**

- Adanya Pembelian berupa Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya sejumlah 1 Unit senilai Rp.856.971.200,-
- Adanya Pembelian berupa Instalasi Lain-lain sejumlah 2 Unit senilai Rp.261.140.500,-
- Adanya Pembelian berupa Jaringan Listrik Lainnya sejumlah 1 Unit senilai Rp.397.338.700,-

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Pembelian	Satker Setjen	5	Rp 856.971.200	
TOTAL			5	856.971.200	

NO.	Nama Barang	JML	NILAI	KET
1	Instalasi Air Bersih	1	Rp 198.492.000	INSTALASI PIPA HIDRANT
2	Instalasi Lain lain	2	Rp 261.140.500	INSTALASI JARINGAN MEP MINI MARKET DAN RESTO DAN RG45 CAT6
3	Jaringan Listrik Lainnya	2	Rp 397.338.700	INSTALASI TRAF0 DANJARINGAN KABEL TRAF0 800 KVA
TOTAL		5	856.971.200	

NAMA BARANG	NO AWAL	TGL PEROLEH	RPHASET	MERK/TYPER
Instalasi Air Bersih / Air Baku	3	04-12-2019	198,492,000	INSTALASI PIPA HIDRANT
Instalasi Lain-lain	3	29-07-2019	62,287,500	RG45 CAT6
Instalasi Lain-lain	4	28-11-2019	198,853,000	INSTALASI JARINGAN MEP MINI MARKET DAN F
NAMA BARANG	NO AWAL	TGL PEROLEH	RPHASET	MERK/TYPER
Jaringan Listrik Lainnya	4	18-12-2019	198,953,700	JARINGAN KABEL TRAF0 800 KVA
Jaringan Listrik Lainnya	5	19-12-2019	198,385,000	INSTALASI TRAF0

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca **Jaringan** dengan transaksi **Pembelian**

(101) 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Pembelian (101) berupa Jaringan** sebesar **Rp.66.299.000,- pada Satuan Kerja BPBI Abiyoso** dikarenakan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Instalasi Air Tanah Dalam Kapasitas Kecil	1	16,000,000
Jaringan Listrik Lainnya	2	50,299,000
Total	3	66,299,000

(11) BADIKLITPENSOS

Berdasarkan data tersebut terjadi kenaikan dikarenakan adanya pembelian jaringan pada satker :

- BBPPKS Jayapura senilai Rp.820.316.650,- dengan rincian sebagai berikut :

SATKER	NAMA BARANG	QTY	NILAI ASET
027.11.578995			
BBPPKS Jayapura		21	820.316.650
1	Jaringan Listrik Lainnya	21	820.316.650

PENGEMBANGAN NILAI ASET

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca **Jaringan** dengan transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Pengembangan Nilai Aset (202) berupa Jaringan** sebesar **Rp. 4.118.600,- pada Satuan Kerja BPBI Abiyoso** dikarenakan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Jaringan Listrik Lainnya	0	4,118,600
Total	0	4,118,600

TRANSFER MASUK

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca **Jaringan** dengan transaksi **Transfer Masuk (102) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Transfer Masuk (102) berupa Jaringan** sebesar **Rp.209.506.506,- pada Satuan Kerja BRSKP NAPZA Bambu Apus** dikarenakan perubahan nomenkelatur dari pelayanan Anak menjadi Napza berdasarkan **Berita Acara Nomor:646/BRSKPN/PL.04/06/2019** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Sumur Gali (SGL)	1	3,000,000
Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA	1	10,025,200
Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	1	38,500,000
Jaringan Telepon Lainnya	21	157,981,306
Total	24	209,506,506

TRANSFER KELUAR

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dijelaskan terdapat mutasi kurang pada **Jaringan** dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Transfer Keluar (302) berupa Jaringan** sebesar **Rp.209.506.506,-** pada **Satuan Kerja BRSKP NAPZA Bambu Apus** dikarenakan perubahan nomenkelatur dari pelayanan Anak menjadi Napza berdasarkan **Berita Acara Nomor:646/BRSKPN/PL.04/06/2019** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Sumur Gali (SGL)	1	3,000,000
Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA	1	10,025,200
Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	1	38,500,000
Jaringan Telepon Lainnya	21	157,981,306
Total	24	209,506,506

E.2.2.7 Aset Tetap Dalam Renovasi

Aset Tetap dalam Renovasi adalah Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan. Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

- 1. Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L;**
- 2. Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain;**
- 3. Renovasi aset tetap milik UPTD lain dalam satu SKPD; dan**

Nilai Perolehan aset tetap dalam renovasi pada Kementerian Sosial RI per **31 Desember 2018 (Audited)** sebesar **Rp. 350,000,000,-** dan **31 Desember 2019 (Audited)** sebesar **Rp. 7,120,842,700,-** Akumulasi Penyusutan per **31 Desember 2019 (Audited)** sebesar **Rp. 0,-** sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar **Rp. 7,120,842,700,-**.

Mutasi/perubahan Aset Tetap dalam Renovasi Tahunan Tahun 2019 (Audited) sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018 (Audited)	Rp 350.000.000
Mutasi Tambah :	
Pembelian	Rp 3.018.803.940
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp 6.770.842.700
Reklasifikasi Masuk	Rp 6.770.842.700
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp 1.110.550.485
Mutasi Kurang :	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp (4.000.000)
Transfer Keluar	Rp (4.092.545.985)
Reklasifikasi Keluar	Rp (6.770.842.700)
Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 7.153.651.140
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 (Audited)	
Nilai Buku per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 7.153.651.140

PEMBELIAN

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Pembelian di Satker Setjen dan Pusdatin berupa :

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Pembelian	Satker Setjen	4	Rp 740.360.000	
		Pusdatin	1	196.421.500	
	TOTAL		5	936.781.500	

NO.	Nama Barang	JML	NILAI	KET
1	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	1	198.000.000	
2	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	1	195.665.000	
3	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	1	189.018.000	
4	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	1	157.677.000	
5	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	1	196.421.500	
	TOTAL	5	936.781.500	

(03) DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

Terdapat Transaksi Mutasi Tambah pada Satker Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat DK sebesar Rp. 32.808.440,- pada Aset Tetap Dalam Renovasi yang terletak di Taman Makam Pahlawan berupa Gudang untuyk penyimpanan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca *Aset Tetap Dalam Renovasi* dengan transaksi *Pembelian (101) 31 Desember 2019*, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi *Pembelian (101)* sebesar *Rp. 198.000.000,-* dikarenakan adanya *rehabilitasi ruangan Bagian Umum, Bagian*

Keuangan dan Bagian Organisasi Hukum & Humas yang menggunakan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sedangkan gedung dan bangunan tercatat pada Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	1	198,000,000
JUMLAH	1	198,000,000

- Adanya transaksi **Pembelian (101)** sebesar **Rp. 49.500.000,-** dikarenakan pada Satuan Kerja **Direktorat RSKPNAPZA** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	1	49,500,000
JUMLAH	1	49,500,000

(05) DITJEN LINJAMSOS

Terdapat transaksi Pembelian atas Aset Tetap Dalam Renovasi sebesar Rp. 264.313.000,- terdiri dari:

a. Sekretariat

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	54,450,000
	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	1	54,450,000

b. Direktorat Jaminan Sosial

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440310			
	Direktorat Jaminan Sosial	-	209,863,000
	Aset tetap Lainnya Dalam renovasi	-	209,863,000

(06) DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN

Terdapat transaksi Pembelian atas Aset Tetap Renovasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin senilai **Rp758.054.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN PEMBELIAN INTRA	KUAN	TOTAL
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	4	758.054.000
Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	-	-
TOTAL	4	758.054.000

(11) BADIKLITPENSOS

Pembelian Rp. 779.347.000,- dengan rincian sebagai berikut:

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
027110199369059000KP - SEKRETARIAT BADIKLIT PENSOS				
1	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi		4	779.347.000
TOTAL				779.347.000

Merupakan renovasi gedung dan bangunan melalui pengadaan Penunjukan Langsung berupa:

- a. Renovasi Wisma/Mess Pusdiklat Kesos Tahun 2019 senilai Rp.196.975.000, sesuai dengan SPK Nomor: 2887/6.1/PL.02.01/12/2019 tanggal 4 Desember 2019, ATR yang akan di Transfer Keluar ke Pusdiklat Kesos.
- b. Renovasi Gerbang Pusdiklat Kesos Tahun 2019 senilai Rp.197.882.000,- sesuai dengan SPK Nomor: 2889/6.1/PL.02.01/12/2019, ATR yang akan di Transfer Keluar ke Pusdiklat Kesos.
- c. Renovasi Ruang Kerja Kepala dan Sekretaris BP3S senilai Rp.195.950.000,- sesuai dengan SPK Nomor: 2911/6.1/PL.02.01/12/2019 tanggal 5 Desember 2019, ATR yang akan di Transfer Keluar ke Biro Umum.
- d. Renovasi Ruang Kerja, Ruang Tamu dan Ruang Rapat Sekretariat BP3S senilai Rp.188.540.000,- sesuai dengan SPK Nomor: 3067/6.1/PL.02.01/12/2019 tanggal 5 Desember 2019, ATR yang akan di Transfer Keluar ke Biro Umum.

PENYELESAIAN PEMBANGUNAN DENGAN KDP

(11) BADIKLITPENSOS

Penyelesaian Pembangunan dengan KDP Rp.6.770.842.700,-

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
027110199369059000KP - SEKRETARIAT BADIKLIT PENSOS				
1	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi		1	6.770.842.700
TOTAL				6.770.842.700

REKLASIFIKASI MASUK

(11) BADIKLITPENSOS

Reklasifikasi Masuk Rp.6.770.842.700,-

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
027110199369059000KP - SEKRETARIAT BADIKLIT PENSOS				
1	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi		2	6.770.842.700
TOTAL				6.770.842.700

PENYELESAIAN PEMBANGUNAN LANGSUNG

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca *Aset Tetap Dalam Renovasi* dengan transaksi *Penyelesaian Pembangunan Langsung (113) 31 Desember 2019* dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi *Penyelesaian Pembangunan Langsung (113)* sebesar *Rp. 1.110.550.485,-* pada *Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial* dikarenakan adanya *pekerjaan rehabilitasi ruangan Sekretariat TRC, pekerjaan rehabilitasi pagar* pada *BRSAMPK Antasena Magelang, pekerjaan rehabilitasi ruangan Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Susila & Korban Perdagangan Orang dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, pekerjaan rehabilitasi pagar* bangunan tercatat pada *BRSPDM Phalamarta Sukabumi, pekerjaan pengembangan Gedung SDC Bambu Apus* bangunan tercatat pada *BRSKPNAPZA Bambu Apus* yang menggunakan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	1	1,110,550,485
JUMLAH	1	1,110,550,485

KOREKSI PENCATATAN NILAI/KUANTITAS

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi penambahan nilai neraca *Aset Tetap Dalam Renovasi* dengan transaksi *Koreksi Perubahan Nilai Kuantitas (204) 31 Desember 2019* dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi *Koreksi Perubahan Nilai Kuantitas (204)* sebesar *Rp. 4.000.000,-* pada *Satuan Kerja Direktorat KPNAPZA* dikarenakan adanya temuan atas pengembalian belanja modal dari Tim Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial dengan rincian sebagai berikut.

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	1	4,000,000
JUMLAH	1	4,000,000

TRANSFER KELUAR

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Transfer Keluar ATR di Satker Setjen dan Pusdatin berupa :

Adanya Transfer Keluar Pembangunan Gedung dan Bangunan Aset Tetap Dalam Renovasi Satker Sekretariat Jenderal dan Pusdatin senilai Rp.936.981.500,-

- Adanya Transfer Keluar Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi ke Satker BRSKPN Bambu Apus senilai Rp.198.000.000,-. Nomor BAST 4941/1.5/PL.02/12/2019;
- Adanya Transfer Keluar Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi ke Direktorat K2KRS senilai Rp.195.665.000,-. Nomor BAST 4941-1/1.5/PL.02/12/2019;
- Adanya Transfer Keluar Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi ke Direktorat K2KRS senilai Rp.189.018.000,-. Nomor BAST 494-1/1.5/PL.02/12/2019;
- Adanya Transfer Keluar Rumah Dinas Widya Chandra Bangunan Dalam Renovasi ke Sekretariat Negara senilai Rp.157.677.000,-. Nomor BAST 4942-1/1.5/PL.02/12/2019;

No.	Nama Barang	Jml	Nilai	Satker Tujuan	Ke
1	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	1	Rp 198.000.000	Ke TK Bambu Apus	
2	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	1	Rp 195.665.000	K2KRS	
3	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	1	Rp 189.018.000	K2KRS	
4	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	1	Rp 157.677.000		
5	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	1	Rp 196.421.500	SETJEN	
TOTAL		5	936.781.500		

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca ***Aset Tetap Dalam Renovasi*** dengan transaksi ***Transfer Keluar (302) 31 Desember 2019***, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi ***Transfer Keluar (302)*** sebesar ***(Rp. 45.500.000,-)*** pada ***Satuan Kerja Direktorat KPNAPZA berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 22/2.5/PL.04/09/2019*** dikarenakan adanya ***rehabilitasi ruangan yang menggunakan Direktorat KPNAPZA sedangkan gedung dan bangunan tercatat pada Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI.***

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	1	-45,500,000
JUMLAH	1	-45,500,000

- Adanya transaksi **Transfer Keluar (302)** sebesar (Rp. 1.308.550.485,-) pada **Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial** dikarenakan adanya **pekerjaan rehabilitasi ruangan Sekretariat TRC, rehabilitasi ruangan Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Organisasi Hukum & Humas, pekerjaan rehabilitasi pagar** pada **BRSAMPK Antasena Magelang, pekerjaan rehabilitasi ruangan Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Susila & Korban Perdagangan Orang dan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, pekerjaan rehabilitasi pagar** bangunan tercatat pada **BRSPDM Phalamarta Sukabumi, pekerjaan pengembangan Gedung SDC Bambu Apus** bangunan tercatat pada **BRSKPNAPZA Bambu Apus** yang menggunakan anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	1	-1,308,550,485
JUMLAH	1	-1,308,550,485

(05) DITJEN LINJAMSOS

a. Sekretariat

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	(54.450.000)
	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	1	(54.450.000)

b. Direktorat Jaminan Sosial

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440310			
	Direktorat Jaminan Sosial	-	(209.863.000)
	Aset tetap Lainnya Dalam renovasi	-	(209.863.000)

(06) DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN

Terdapat transaksi transfer keluar atas Aset Tetap Renovasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin ke Biro Umum Kementerian Sosial RI sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) senilai **Rp758.054.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Keluar Sekretariat Jenderal Penanganan Fakir Miskin				
NO	URAIAN	NOMOR DAN TANGGALSPK	NOMOR DAN TANGGAL BAST	JUMLAH
1	ASET TETAP RENOVASI	195.4/PFM.SET/PPK/PL/09/2019 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2019	4766/4.1/PL.05.02/11/2019 TANGGAL 11 NOVEMBER 2019	198.828.000
2	ASET TETAP RENOVASI	185.4/PFM.SET/PPK/PL/09/2019 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2019	4766/4.1/PL.05.02/11/2019 TANGGAL 11 NOVEMBER 2019	166.991.000
3	ASET TETAP RENOVASI	193.4/PFM.SET/PPK/PL/09/2019 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2019	4766/4.1/PL.05.02/11/2019 TANGGAL 11 NOVEMBER 2019	199.700.000
4	ASET TETAP RENOVASI	199.4/PFM.SET/PPK/PL/09/2019	5166/4.1/PL.05.02/12/2019 TANGGAL 04 DESEMBER 2019	192.535.000
T O T A L				758.054.000

(11) BADIKLITPENSOS

Transfer Keluar Rp.-779.347.000,-

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
027110199369059000KP - SEKRETARIAT BADIKLIT PENSOS				
1	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi		-4	779.347.000
TOTAL				779.347.000

Transfer Keluar ATR dengan rincian sebagai berikut:

Ke Biro Umum dengan total senilai Rp.384.490.000,- berupa:

- Renovasi Ruang Kerja Kepala dan Sekretaris BP3S senilai Rp.195.950.000,- berdasarkan BAST Nomor: 3148/6.1/PL.04.01/12/2019 tanggal 30 Desember 2019.
- Renovasi Ruang Kerja, Ruang Tamu dan Ruang Rapat Sekretariat BP3S senilai Rp.188.540.000,- berdasarkan BAST Nomor: 3148/6.1/PL.04.01/12/2019 tanggal 30 Desember 2019.

Ke Pusdiklat Kesos berupa:

- Renovasi Wisma/Mess Pusdiklat Kesos Tahun 2019 senilai Rp.196.975.000, sesuai dengan BAST Nomor: 3149/6.1/PL.02.01/12/2019 tanggal 31 Desember 2019.
- Renovasi Gerbang Pusdiklat Kesos Tahun 2019 senilai Rp.197.882.000,- sesuai dengan BAST Nomor: 3149/6.1/PL.02.01/12/2019 tanggal 31 Desember 2019.

REKLASIFIKASI KELUAR

(11) BADIKLITPENSOS

Reklasifikasi Keluar Rp.-6.770.842.700,-

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
027110199369059000KP - SEKRETARIAT BADIKLIT PENSOS				
1	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi		-1	(6.770.842.700)
TOTAL				(6.770.842.700)

Transaksi Reklas Keluar dimaksudkan untuk mereklas dari Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi yang berjumlah 1 NUP menjadi Gedung dan Bangunan dalam Renovasi 2 NUP.

E.2.2.8 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Sosial RI per 31 Desember 2018 (Audited) sebesar Rp. 14,448,697,676,- dan 31 Desember 2019 (Audited) sebesar Rp. 14.836,358,922,- Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 (Audited) sebesar Rp. 3.466,709,781,- sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp. 11.369,649,141,-.

Mutasi/perubahan Aset Tetap Lainnya Tahunan Tahun 2019 (Audited) sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018 (Audited)	Rp 14.448.697.676
Mutasi Tambah :	
Pembelian	Rp 495.425.100
Transfer Masuk	Rp 412.357.750
Hibah Masuk	Rp 33.794.000
Mutasi Kurang :	
Transfer Keluar	Rp (412.357.750)
Hibah Keluar	Rp (20.980.954)
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp (120.576.900)
Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 14.836.358.922
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 (Aud)	Rp (3.466.709.781)
Nilai Buku per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 11.369.649.141

PEMBELIAN

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Pembelian di Satker Setjen berupa:

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Pembelian	Satker Setjen	233	82.278.000	
	TOTAL		233	82.278.000	

No.	Nama Barang	Jml	Nilai	Ket
1	Buku Lainnya	233	Rp 82.278.000	
TOTAL		233	82.278.000	

Rincian Pembelian Buku Lainnya Pada Satker Setjen (di Satker Pembantu Biro Humas);

NAMA BARANG	NO AWAL	TGL PEROLEH	RPHASET	MERK/TYPE
Buku Lainnya	227	19-12-2019	176,000	101 CARA BERFIKIR
Buku Lainnya	229	19-12-2019	165,000	PEMROGRAMAN WEB
Buku Lainnya	231	19-12-2019	132,000	ANAK MUDA & MEDSOS
Buku Lainnya	233	19-12-2019	198,000	ANAK RANTAU
Buku Lainnya	235	19-12-2019	165,000	ANALIS KEBIJAKAN
Buku Lainnya	237	19-12-2019	132,000	ANTARA PERINTAH JABATAN
Buku Lainnya	239	19-12-2019	165,000	ANTOLOGI RASA
Buku Lainnya	241	19-12-2019	192,500	ASPEK PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Buku Lainnya	243	19-12-2019	385,000	BEST SCORE TOEFL
Buku Lainnya	245	19-12-2019	275,000	CHICKEN SOUP FOR THE SOUL
Buku Lainnya	247	19-12-2019	174,900	CINTA DALAM GELAS
Buku Lainnya	249	19-12-2019	412,500	DERADIKALISASI KEBIJAKAN
Buku Lainnya	251	19-12-2019	275,000	DISRUPTION

NAMA BARANG	NO AWAL	TGL PEROLEH	RPHASET	MERK/TYPE
Buku Lainnya	253	19-12-2019	242,000	FIGHT LIKE A TIGER WIN
Buku Lainnya	255	19-12-2019	242,000	FILOSOFI TERAS
Buku Lainnya	257	19-12-2019	198,000	GELANDANGAN DI KAMPUNG SENDIRI
Buku Lainnya	259	19-12-2019	198,000	HUJAN
Buku Lainnya	261	19-12-2019	198,000	HUKUM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PEDO
Buku Lainnya	263	19-12-2019	121,000	KONSOLIDASI UU PERLINDUNGAN ANAK
Buku Lainnya	265	19-12-2019	275,000	LOCKWOOD & CO
Buku Lainnya	267	19-12-2019	220,000	MAESTRO PSIKOTES
Buku Lainnya	269	19-12-2019	195,000	MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER
Buku Lainnya	271	19-12-2019	195,000	MIMPI ANAK PAPUA
Buku Lainnya	273	19-12-2019	197,000	PADANG BULAN
Buku Lainnya	275	19-12-2019	242,000	PATOLOGI SOSIAL
Buku Lainnya	277	19-12-2019	159,500	PERANAN ORANG TUA DALAM PERSIDANGAN

NAMA BARANG	NO AWAL	TGL PEROLEH	RPHASET	MERK/TYPE
Buku Lainnya	279	19-12-2019	203,500	PERGI
Buku Lainnya	281	19-12-2019	220,000	RASUK
Buku Lainnya	283	19-12-2019	231,000	SOSIOLOGI PEDESAAN
Buku Lainnya	285	19-12-2019	177,100	STRATEGI MENINGKATKAN DAYA BACA
Buku Lainnya	287	19-12-2019	163,900	TEMAN TAPI MENIKAH
Buku Lainnya	289	19-12-2019	495,000	TEORI & PRAKTEK PERLINDUNGAN ANAK
Buku Lainnya	291	19-12-2019	341,000	THE BEST GUIDE BOOK OF TOEFL
Buku Lainnya	293	19-12-2019	165,000	TOP ONE PREPARATION TOEIC
Buku Lainnya	295	19-12-2019	198,000	TRAVELLING AJA DULU !
Buku Lainnya	297	19-12-2019	55,000	JU PORNOGRAFI NO.44 TH.2008
Buku Lainnya	299	19-12-2019	143,000	JU APARATUR NEGERI SIPIL
Buku Lainnya	301	19-12-2019	440,000	MAGIC OF BLENDER 3D
Buku Lainnya	303	19-12-2019	143,000	PANDUAN MUDAH BELAJAR FRAMEWORK LAR

NAMA BARANG	NO AWAL	TGL PEROLEH	RPHASET	MERK/TYPE
Buku Lainnya	332	19-12-2019	207,900	REVOLUSI MENTAL/ 28
Buku Lainnya	333	19-12-2019	797,500	KAMUS BESAR BI EDISI LIMA
Buku Lainnya	335	19-12-2019	110,000	GELIAT KRISIS DALAM PENELITIAN
Buku Lainnya	337	19-12-2019	88,000	SOSIOLOGI AGAMA, TEORI
Buku Lainnya	339	19-12-2019	110,000	ANATOMI SISTEM SOSIAL
Buku Lainnya	341	19-12-2019	132,000	ILMU-ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR
Buku Lainnya	343	19-12-2019	110,000	SOSIOLOGI KONSEP DAN TEORI
Buku Lainnya	345	19-12-2019	495,000	PARADIGMA PENELITIAN
Buku Lainnya	347	19-12-2019	302,500	ENSIKLOPEDIA DONGENG BUDI PEKERTI
Buku Lainnya	349	19-12-2019	170,500	MODUL PRAKTIS PSIKOTES
Buku Lainnya	351	19-12-2019	88,000	BIJAK MENDIDIK ANAK DI ERA MILENIAL
Buku Lainnya	353	19-12-2019	187,000	GENTLE DISIPLINE
Buku Lainnya	355	19-12-2019	143,000	PARENTING 4.0

NAMA BARANG	NO AWAL	TGL PEROLEH	RPHASET	MERK/TYPE
Buku Lainnya	307	19-12-2019	473,000	DAFTAR TAJUK SUBJEK DALAM BAHASA INDON
Buku Lainnya	309	19-12-2019	935,000	KAMUS ILMU PERPUSTAKAAN
Buku Lainnya	311	19-12-2019	418,000	KOMPETENSI LITERASI INFORM PERPUSTAKAA
Buku Lainnya	313	19-12-2019	198,000	REVOLUSI PANCASILA
Buku Lainnya	315	19-12-2019	275,000	ERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK
Buku Lainnya	317	19-12-2019	74,800	SURAPATI (HC)
Buku Lainnya	319	19-12-2019	85,800	PROMO BUKU KURIKULUM
Buku Lainnya	321	19-12-2019	112,200	PROMO BUKU KAMUS B
Buku Lainnya	323	19-12-2019	112,200	I SETAHUN DI BEDAHULLU
Buku Lainnya	325	19-12-2019	231,000	HOMO DEUS, MASA DE
Buku Lainnya	327	19-12-2019	239,800	EXPM-018 SELF DISR
Buku Lainnya	329	19-12-2019	99,650	HTML,FHP & MYS
Buku Lainnya	331	19-12-2019	231,000	PROMO BUKU KURIKULUM

NAMABARANG	NOAWAL	TGL PEROLEH	RPHASET	MERK/TYPE
Buku Lainnya	357	19-12-2019	115,500	KIRANA & HAPPY LITTLE WORLD
Buku Lainnya	359	19-12-2019	88,000	PENGANTAR SOSIOLOGI PASAR
Buku Lainnya	361	19-12-2019	165,000	KOK BISA?
Buku Lainnya	363	19-12-2019	247,500	FRASANGKA KONFLIK & KOMUNIKASI
Buku Lainnya	365	19-12-2019	148,500	MULTIKULTURALISME CERDAS
Buku Lainnya	367	19-12-2019	220,000	365 CERITA ISLAM FAVORIT
Buku Lainnya	369	19-12-2019	104,500	ISD ILMU SOSIAL DASAR
Buku Lainnya	371	19-12-2019	88,000	MANUSIA, KEEUDAYAAN & MASYA
Buku Lainnya	373	19-12-2019	110,000	KITAE EXCEL 2019
Buku Lainnya	375	19-12-2019	95,700	PENGANTAR SOSIOLOGI
Buku Lainnya	377	19-12-2019	231,000	STRATEGI DAN PROBLEM
Buku Lainnya	379	19-12-2019	176,000	FEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN
Buku Lainnya	381	19-12-2019	297,000	KEBERAGAMAN GENDER

NAMABARANG	NOAWAL	TGL PEROLEH	RPHASET	MERK/TYPE
Buku Lainnya	383	19-12-2019	242,000	SUCCESS IELTS
Buku Lainnya	385	19-12-2019	236,500	ENSIKLOPEDIA FAUNA DUNIA
Buku Lainnya	387	19-12-2019	495,000	ENSIKLOPEDIA SAINS
Buku Lainnya	389	19-12-2019	236,500	COMPUTER GRAPIC DESIGN
Buku Lainnya	391	19-12-2019	154,000	30 CERITA SERU DUNIA BINATANG
Buku Lainnya	393	19-12-2019	187,000	111 CERITA MENAKJUEKAN 25 NABI
Buku Lainnya	395	19-12-2019	220,000	SUPER DIKTAT MAGIC TRICK TOEFL
Buku Lainnya	397	19-12-2019	198,000	PENERAPAN SM MUTU SNI ISO 9001-2008
Buku Lainnya	399	19-12-2019	319,000	PENGETAHUAN DASAR PERPUS DIGITAL
Buku Lainnya	401	19-12-2019	253,000	LIMA PILAR REVCLUSI MENTAL
Buku Lainnya	403	19-12-2019	110,000	WASIAT REVOLUSIONER BUNG KARN0
Buku Lainnya	405	19-12-2019	231,000	TEORI SOSIAL KONTEMPORER
Buku Lainnya	407	19-12-2019	231,000	MERAWAT BANGSA

NAMABARANG	NOAWAL	TGL PEROLEH	RPHASET	MERK/TYPE
Buku Lainnya	409	19-12-2019	220,000	RESONANSI KEBANGSAAN
Buku Lainnya	411	19-12-2019	209,000	WAWASAN PANCASILA
Buku Lainnya	413	19-12-2019	242,000	TEORI SOSAL DLM 3 PARADIGMA
Buku Lainnya	415	19-12-2019	330,000	ASSESMEN CENTER
Buku Lainnya	417	19-12-2019	220,000	INSKLOPEDIA ANAK HEBAT
Buku Lainnya	419	19-12-2019	330,000	IENSKLOPEDIA JUNIOR
Buku Lainnya	421	19-12-2019	151,700	INDAH DI MASA PENSUN
Buku Lainnya	423	19-12-2019	220,000	KETAHANAN SOSIAL
Buku Lainnya	425	19-12-2019	254,000	LITERASI VISUAL
Buku Lainnya	426	19-12-2019	143,000	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
Buku Lainnya	428	19-12-2019	155,000	PERSPEKTIF BIODIKOSOSIAL
Buku Lainnya	430	19-12-2019	236,000	SOSIOLOGI PERUBAHAN SOSIAL
Buku Lainnya	432	19-12-2019	440,000	THE HAPPLEST MOMMY

NAMABARANG	NOAWAL	TGL PEROLEH	RPHASET	MERK/TYPER
Euku Lainnya	434	19-12-2019	539,000	THE INTLIELIGEN INVISTOR
Euku Lainnya	436	19-12-2019	253,000	TWI FOR TIARE
Euku Lainnya	438	19-12-2019	330,000	ANDROID PEMROGAMAN
Euku Lainnya	440	19-12-2019	528,000	THE MAGIC OF ADOBE PREMIER
Euku Lainnya	442	19-12-2019	308,000	CISCO CCNA CCNP
Euku Lainnya	444	19-12-2019	374,000	PEMROGRAMAN WEB PHP 7
Euku Lainnya	446	19-12-2019	217,800	KUMPULAN SOLUSI PEMROGRAMAN PITHON
Euku Lainnya	448	19-12-2019	467,500	THE MAGIC OF CORELDRAW

(11) BADIKLITPENSOS

Berdasarkan data tersebut terjadi kenaikan dikarenakan adanya pembelian Bahan Perpustakaan pada satker :

- Poltekesos Bandung sebanyak 145 buah Senilai Rp.364.150.000,-

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
027.11.369070 Politeknik Kesejahteraan Sosial				
1	Buku lainnya		145	364.150.000
TOTAL				364.150.000

- B2P3KS Yogyakarta Sebanyak 599 buah Senilai Rp.48.997.100,-

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
027.11.369070 B2P3KS YOGYAKARTA				
1	MONOGRAFI		599	48.997.100
TOTAL				48.997.100

TRANSFER MASUK

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi Penambahan nilai neraca **Aset Tetap Lainnya** dengan transaksi **Transfer Masuk (102) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Transfer Masuk (102) berupa Aset Tetap Lainnya** sebesar **Rp. 412.357.750,- pada Satuan Kerja BRSKP NAPZA Bambu Apus** dikarenakan perubahan nomenkelatur dari pelayanan Anak menjadi Napza berdasarkan **Berita Acara Nomor:646/BRSKPN/PL.04/06/2019** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Monografi	649	120,016,300
Buku Lainnya	1,017	33,220,550
CD/VCD/DVD/LD	1	319,000
Peta (Map)	2	368,000
Atlas	1	25,000
Bola Dunia (Globe)	1	394,900
Ukiran dan Lukisan Lainnya	2	11,500,000
Alat Musik Tradisional/Daerah	4	12,015,000
Alat Musik Modern/Band	66	93,451,000
Barang Bercorak Kesenian Lainnya	41	140,048,000
Maket/Miniatur/Replika	1	1,000,000
Total	1,785	412,357,750

HIBAH MASUK

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi Penambahan nilai neraca **Aset Tetap Lainnya** dengan transaksi **Hibah Masuk (103) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Hibah Masuk (103) berupa Aset Tetap Lainnya** sebesar **Rp. 33.794.000,- pada Satuan Kerja BRSPDI Ciung Wanara** dikarenakan adanya serah terima BMN dari Siloam Center For The Blind berdasarkan **Berita Acara Nomor : 11/PSBG/KS.02/01/2019** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Alat Musk Modern Band	4	27,734,000
Alat Musik Lainnya	16	4,840,000
Alat Peraga Kesenian Lainnya	2	1,220,000
Total	22	33,794,000

TRANSFER KELUAR

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca **Aset Tetap Lainnya** dengan transaksi **Transfer Keluar (302) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Transfer Keluar (302) berupa Aset Tetap Lainnya** sebesar **Rp. 412.357.750,- pada Satuan Kerja BRSKP NAPZA Bambu Apus** dikarenakan perubahan nomenkelatur dari pelayanan Anak menjadi Napza berdasarkan **Berita Acara Nomor:646/BRSKPN/PL.04/06/2019** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Monografi	649	-120,016,300
Buku Lainnya	1,017	-33,220,550
CD/VCD/DVD/LD	1	-319,000
Peta (Map)	2	-368,000
Atlas	1	-25,000
Bola Dunia (Globe)	1	-394,900
Ukiran dan Lukisan Lainnya	2	-11,500,000
Alat Musik Tradisional/Daerah	4	-12,015,000
Alat Musik Modern/Band	66	-93,451,000
Barang Bercorak Kesenian Lainnya	41	-140,048,000
Maket/Miniatur/Replika	1	-1,000,000
Total	1,785	-412,357,750

HIBAH KELUAR

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca **Aset Tetap Lainnya** dengan transaksi **Hibah Keluar (303) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Hibah Keluar (302) berupa Aset Tetap Lainnya** sebesar **(Rp. 20.980.954,-) pada Satuan Kerja BRSKP NAPZA Satria Baturaden** berdasarkan **Surat Keputusan Nomor : 42/HUK/2019** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Monografi	-983	-20,980,954
Total	-983	-20,980,954

PENGHENTIAN ASET DARI PENGGUNAAN

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca **Aset Tetap Lainnya** dengan transaksi **Penghentian Aset Dari Penggunaan (401) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Penghentian Aset Dari Penggunaan (401) berupa Aset Tetap Lainnya** sebesar **(Rp. 92.879.000,-) pada Satuan Kerja BRSKP NAPZA Bambu Apus** berdasarkan **Berita Acara Nomor:831/BRSKPN/PL.04**, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
CD	1	-344.000
Alat Musik Tradisional	-4	-12.015.000
Alat Musik Modern	-53	-79.520.000
Maket	-1	-1.000.000
Total	1	-92.879.000

- Adanya transaksi **Penghentian Aset Dari Penggunaan (401) berupa Aset Tetap Lainnya** sebesar (Rp. 27.697.900,-) pada Satuan Kerja **BRSKP NAPZA Satria Baturaden** berdasarkan **Berita Acara Nomor:831/BRSKPN/PL.04**, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Atlas	-2	-94,300
Bola Dunia (Globe)	-2	-493,600
Alat Musik Modern/Band	-2	-25,930,000
Lukisan Cat Minyak	-12	-780,000
Maket/Miniatur/Replika	-1	-400,000
Jumlah	-19	-27,697,900

E.2.2.9 Software

Nilai Perolehan Software Kementerian Sosial RI per dan *31 Desember 2018 (Audited)* sebesar Rp. 86,297,896,087,- dan *31 Desember 2019 (Audited)* sebesar Rp. 98,151,352,706,- Akumulasi Amortisasi per *31 Desember 2019 (Audited)* sebesar Rp. 85,268,906,958,- sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp. 12,882,445,748,-.

Mutasi/perubahan Software Tahunan Tahun 2019 (Audited) sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018 (Audited)	Rp 86.297.896.087
Mutasi Tambah :	
Pembelian	Rp 3.424.077.465
Reklasifikasi Masuk	Rp 7.988.200.000
Pengembangan Nilai Aset	Rp 470.050.000
Mutasi Kurang :	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp (13.730.846)
Penghentian Aset Dari Penggunaannya	Rp (15.140.000)
Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 98.151.352.706
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp (82.273.331.958)
Nilai Buku per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 15.878.020.748

PEMBELIAN

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Pembelian di Satker Setjen dan Satker Pusdatin berupa:

No.	Nama Barang	Jml	Nilai	Ket
1	Software	5	Rp 613.655.000	Satker Setjen
2	Software	257	Rp 1.526.847.465	Satker Pusdatin
	TOTAL	262	Rp 2.140.502.465	

Satker Setjen

NAMA BARANG	NO AWAL	TGL PEROLEH	RPHASET	MERK/TYPE
Software Komputer	10	10-07-2019	59.742.500	VIDEO SAFETY
Software Komputer	11	17-07-2019	185.900.000	WAREHOUSE MANAJEMEN DAN WEB SERVICE MEDIA
Software Komputer	12	22-07-2019	73.012.500	SOFTWARE CCTV
Software Komputer	13	14-10-2019	198.000.000	SOFTWARE RENOVASI GEDUNG
Software Komputer	14	28-11-2019	97.000.000	APLIKASI APEL SUPER

Satker Pusdatin

NAMA BARANG	NO AWAL	TGL PEROLEH	RPHASET	MERK/TYPE
Software Komputer	471	19-06-2019	98.000.000	E-Aset Middleware
Software Komputer	472	25-09-2019	213.480	Limitless - Responsive Web Application Kit - Regul
Software Komputer	473	25-09-2019	128.088	Limitless - Responsive Web Application Kit - 6 mon
Software Komputer	474	25-09-2019	128.088	Limitless - Responsive Web Application Kit - 6 mon
Software Komputer	475	25-09-2019	56.928	Envato Buyer Fee for purchase of Limitless - resp
Software Komputer	476	25-09-2019	686.694	SmartEnd CMS-Laravel Admin Dashboard with frontend
Software Komputer	477	25-09-2019	2.848.287	Aplikasi E-Learning Themes via paddle.com
Software Komputer	537	23-12-2019	24.040.500	Navicat
Software Komputer	545	23-12-2019	10.285.000	Software Balsamiq
Software Komputer	550	23-12-2019	186.811.900	Software acunetix
Software Komputer	551	23-12-2019	1.210.000	CB NG-WIN-PRM-1Y
Software Komputer	701	23-12-2019	1.210.000	CB NG-MAC-PRM-1Y
Software Komputer	716	20-12-2019	90.000.000	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

NAMA BARANG	NO AWAL	TGL PEROLEH	RPHASET	MERATYPE
Software Komputer	717	25-12-2019	49.850.000	PENGEMBANGAN APLIKASI E-DESK AUDIT
Software Komputer	718	23-12-2019	7.800.000	Adobe Captivate for teams [NKSPC1MBUN]
Software Komputer	727	30-12-2019	6.700.500	Microsoft (Office Standard) OfficeStd 2019 OLP1HL
Software Komputer	777	19-12-2019	50.000.000	MODUL E-PUD
Software Komputer	778	19-12-2019	85.000.000	DASHBOARD LAYANAN DATA TERPADU
Software Komputer	779	19-12-2019	12.200.000	System Analist
Software Komputer	780	19-12-2019	12.300.000	Web Designer
Software Komputer	783	19-12-2019	12.300.000	Database Programmer/Administrator
Software Komputer	784	19-12-2019	9.500.000	Software Tester/Implementer
Software Komputer	785	19-12-2019	12.300.000	Web Programmer

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

URAIAN JENIS	JUMLAH	INTRAKOMPTABEL (Rp.)	EKSTRAKOMPTABEL (Rp.)
Pembelian	1	180.000.000	-
Jumlah	1	180.000.000	-

(03) DITJEN. DAYASOS

Terjadi Transaksi Pembelian Pada Satker Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial berupa Software sebesar Rp. 98.450.000,-

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.03.00.630859			
	Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial		
	Software	1	98.450.000
	Software Komputer	1	98.450.000

(05) DITJEN. LINJAMSOS

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.05.00.440275			
	Direktorat PSKBA	2	266.010.000
	Software Komputer	2	266.010.000

(06) DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN

Terdapat transaksi pembelian atas Software pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin senilai Rp**396.015.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN PEMBELIAN ASET TAK BERWUJUD	KUAN	TOTAL
Software Komputer	5	396.015.000
TOTAL	5	396.015.000

(11) BADIKLITPENSOS

Terdapat transaksi Pembelian atas software pada BP3S senilai Rp.343.100.000,- pada satker:

STKS Bandung

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027110200369070000KD			
	STKS BANDUNG	0	343.100.000
	Software Komputer	0	343.100.000

REKLASIFIKASI MASUK

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440310			
	Direktorat Jaminan Sosial	-	7,988,200,000
	Software Komputer	-	7,988,200,000

Reklasifikasi masuk software computer berasal dari asset tak berwujud lainnya.

PENGEMBANGAN NILAI ASET

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Pengembangan Nilai Aset di Satker Setjen berupa:

No.	Nama Barang	Jml	Nilai	Ket
1	Software	1	Rp 94.600.000	Satker Setjen
	TOTAL	1	Rp 94.600.000	

NAMABARANG	NOAWAL	TGL BUKU	TGL PEROLEH	RPHASET	MERKTYPE
Software Komputer	7	18-12-2019	20-05-2014	47,410,000	SIKD
Software Komputer	7	19-12-2019	20-05-2014	47,190,000	SIKD

(05) DITJEN. LINJAMSOS

Direktorat Jaminan Sosial

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440310			
	Direktorat Jaminan Sosial	-	197,450,000
	Software Komputer	-	197,450,000

(11) BADIKLITPENSOS

Terdapat transaksi Pengembangan Nilai Aset atas software pada BP3S senilai Rp.178.000.000,- pada satker:

STKS Bandung

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
02711020036907000KD			
	STKS BANDUNG	0	178.000.000
	Software Komputer	0	178.000.000

KOREKSI PENCATATAN NILAI/KUANTITAS

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Koreksi Nilai/Kuantitas di Satker Setjen berupa:

No.	Nama Barang	Jml	Nilai	Ket
1	Software	1	Rp (4.776.300)	Satker Setjen
	TOTAL	1	-Rp 4.776.300	

NAMA BARANG	NO.AKHIR	TGL PEROLEH	RPHASET	MERK/TYPER
Software Komputer	11	17-07-2019	-4,776,300	WAREHOUSE MANAJEMEN DAN WEB SERVICE MEDIA

(05) DITJEN. LINJAMSOS

Direktorat Jaminan Sosial

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440310			
	Direktorat Jaminan Sosial	-	(8,954,546)
	Software Komputer	-	(8,954,546)

PENGHENTIAN ASET DARI PENGGUNAAN

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca **Software** dengan transaksi **Penghentian Aset Dari Penggunaan (401) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Penghentian Aset Dari Penggunaan (401)** dikarenakan dalam kondisi rusak berat **berupa Software** sebesar

(Rp.15.140.000,-) pada Satuan Kerja BRSKP NAPZA Galih Pakuan berdasarkan *Berita Acara Nomor : 1539/2.5.1/PL.04/07/19*, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Software Komputer	-1	-15,140,000
Total	-1	-15,140,000

E.2.3.0 Lisensi

Nilai Perolehan Lisensi Kementerian Sosial RI per dan *31 Desember 2018 (Audited)* sebesar Rp. 0,- dan *31 Desember 2019 (Audited)* sebesar Rp. 190,850,000,- Akumulasi Amortisasi per *31 Desember 2019 (Audited)* sebesar Rp. 9,542,500,- sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp. 181,307,500,-.

Mutasi/perubahan Software Tahunan Tahun 2019 (Audited) sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018 (Audited)	
Mutasi Tambah :	
Pembelian	Rp 190.850.000
Pengembangan Nilai Aset	
Mutasi Kurang :	
Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 190.850.000
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 (Aud)	Rp (9.542.500)
Nilai Buku per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 181.307.500

PEMBELIAN

(03) DITJEN. DAYASOS

Terjadi Transaksi Pembelian Pada Satker PSPKKM berupa Lisensi sebesar Rp. 190.850.000,-

Pada periode tahun 2019 Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat melakukan transaksi belanja modal dengan mata anggaran kegiatan (MAK) 536111 (belanja modal lainnya) berupa :

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| a. | 1 Lisensi (Sistem Sipsukses) | Rp. 135.850.000,- |
| b. | 1.Lisensi (Sipsukses real presence) | Rp. 16.500.000,- |
| c. | 1 Lisensi (Sipsukses Integrator System) | Rp. 38.500.000,- |
| | | Rp. 190.850.000,- |

E.2.3.1 Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud pada Kementerian Sosial RI per dan 31 Desember 2018 (Audited) sebesar Rp 8,316,000,000,- dan 31 Desember 2019 (Audited) sebesar Rp. 196,625,000,-.

Mutasi/perubahan Aset Tak Berwujud Lainnya Tahunan Tahun 2019 (Audited) sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018 (Audited)	Rp	8.316.000.000
Mutasi Tambah :		
Pembelian	Rp	196.625.000
Mutasi Kurang :		
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp	(327.800.000)
Reklasifikasi Keluar	Rp	(7.988.200.000)
Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp	196.625.000

PEMBELIAN

(03) DITJEN. DAYASOS

Terjadi Mutasi Tambah berupa Pembelian Aset Tak berwujud sebesar Rp. 196.625.000,- pada Satker Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial Tahun 2019 berupa aplikasi persuratan elektronik.

KOREKSI PENCATATAN NILAI/KUANTITAS

(05) DITJEN LINJAMSOS

Direktorat Jaminan Sosial

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440310			
Direktorat Jaminan Sosial		-	(327,800,000)
	Aset Tak Berwujud Lainnya	-	(327,800,000)

REKLASIFIKASI KELUAR

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440310			
Direktorat Jaminan Sosial		-	(7.988.200.000)
	Software Komputer	-	(7.988.200.000)

Reklasifikasi Keluar Aset tak Berwujud Lainnya ke Akun Software

E.2.3.1 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Nilai Perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Kementerian Sosial RI per dan 31 Desember 2018 (Audited) sebesar Rp. 0,- dan 31 Desember 2019 (Audited) sebesar Rp. 0,-.

Mutasi/perubahan Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahunan Tahun 2019 (Audited) sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018 (Audited)	Rp	-
Mutasi Tambah :		
Perolehan/Penambahan KDP	Rp	84.904.545
Pengembangan KDP	Rp	6.685.938.155
Mutasi Kurang :		
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	Rp	(6.770.842.700)
Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp	-

Transaksi Perolehan/penambahan KDP

Terdapat Transaksi Perolehan/penambahan KDP pada BP3S senilai Rp.84.904.545,- pada satker:

- Sekretariat BP3S

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
027110199369059000KP - SEKRETARIAT BADIKLIT PENSOS				
#REF!	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan		1	84.904.545
TOTAL				84.904.545

Terdapat Transaksi Pengembangan KDP pada BP3S senilai Rp.6.685.938.155,- pada satker:

- Sekretariat BP3S

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
027110199369059000KP - SEKRETARIAT BADIKLIT PENSOS				
#REF!	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan		1	6.685.938.155
TOTAL				6.685.938.155

Terdapat Transaksi Reklasifikasi KDP Menjadi Barang jadi pada BP3S senilai (Rp.6.770.842.700,- pada satker:

- Sekretariat BP3S

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
027110199369059000KP - SEKRETARIAT BADIKLIT PENSOS				
#REF!	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan		1	(6.770.842.700)
TOTAL				(6.770.842.700)

E.2.3.2 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tak Berwujud

Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual telah mengatur bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan Aset Tak Berwujud, yaitu:

1. Masa Manfaat

Masa manfaat atas Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud merupakan masa manfaat terbatas yang digunakan dalam rangka amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

2. Metode Amortisasi

Amortisasi atas Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan dengan menggunakan metode garis lurus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

3. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode

- a. *Nilai perolehan bruto atas Aset Tak Berwujud disajikan berdasarkan jenis Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas sebagaimana ditetapkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.06/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;*
- b. *Penyajian atas nilai perolehan bruto Aset Tak Berwujud, akumulasi penyusutan, dan nilai buku atas Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud, dituangkan sebagai berikut: (cetak neracanya)*

= **E.2.3.3 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan**

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Nilai Perolehan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan pada Kementerian Sosial RI per *31 Desember 2018 (Audited)* sebesar *Rp. 27,222,866,531,-* dan *31 Desember 2019 (Audited)* sebesar *Rp. 26,060,951,592,-* Akumulasi Penyusutan per *31 Desember 2019 (Audited)* sebesar *Rp. 23,337,779,234,-* sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah *Rp. 2,723,172,358,-*.

Mutasi/perubahan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan Tahunan Tahun 2019 (Audited) sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018 (Audited)	Rp 27.222.866.531
Mutasi Tambah :	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp 10.160.114.942
Mutasi Kurang :	
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	Rp (11.713.000)
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	Rp (10.602.070.736)
Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	Rp (243.180.045)
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	Rp (57.000.000)
Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan	Rp (408.066.100)
Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 26.060.951.592
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp (23.337.779.234)
Nilai Buku per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 2.723.172.358

REKLASIFIKASI DARI ASET TETAP KE ASET LAINNYA**(01) SEKRETARIAT JENDERAL**

Terdapat Reklasifikasi Aset di Satker Pusdatin berupa:

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Reklas Aset Tetap ke Aset Lainnya	Satker Pusdatin	4	Rp 523.418.288	
	TOTAL		4	523.418.288	

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
1	2	4	5
132111	PERALATAN DAN MESIN	-4	-523.418.288
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	-3	-511.668.288
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	-1	-11.750.000

(02) INSPEKTORAT JENDERAL

Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	750,000
Lemari Besi/Metal	1	265,000
Lemari Kayu	11	8,716,000
Rak Besi	2	937,500
Rak Kayu	8	10,914,500
Filing Cabinet Besi	10	3,183,000
Brandkas	1	1,195,000
Buffet	1	1,336,000
Alat Penghancur Kertas	1	567,000
Mesin Absensi	5	11,814,000
Headmachine Besar	1	1,005,000
Perforator Besar	5	2,861,000
Overhead Projector	2	39,497,000
White Board Electronic	1	4,268,000
Acces Control System	3	4,950,000
Meja Kerja Besi/Metal	3	897,000
Meja Kerja Kayu	6	4,801,000
Kursi Besi/Metal	13	5,757,000
Kursi Kayu	11	220,000
Meja Rapat	1	3,003,000
Televisi	1	3,850,000
Loudspeaker	1	1,850,000
Mic Conference	1	44,250,000
Tustel	1	2,699,000
Dispenser	2	4,125,000
P.C Unit	16	157,022,140
Lap Top	9	133,430,524
Scanner (Peralatan Mini Komputer)	6	16,510,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	25,890,400
Acces Point	1	473,000
		497,037,064

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi tambah nilai neraca **Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah** dengan transaksi **Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya**

(188) berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah sebesar Rp. 3.034.335.605,- pada Satuan Kerja BRSKP NAPZA Bambu Apus dikarenakan terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintah dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Electric Generating Set Lainnya	1	58,120,000
Portable Water Pump	1	1,879,000
Sumersible Pump	10	20,124,000
Mesin Diesel	1	27,489,000
Sepeda	19	11,940,000
Mesin Bor	10	12,427,500
Mesin Rol	1	205,000
Mesin Kompresor	3	6,378,000
Mesin Las Listrik	1	7,500,000
Mesin Pemotong Fiberglass/Poliyster	1	7,084,545
Mesin Gerinda Tangan	1	14,000
Battery Charge	2	2,910,000
Solder Listrik	2	3,600,000
Steam Pressure Gauge	2	1,600,000
Steam Cleaner	1	2,500,000
Mesin Spooring	2	3,960,000
Mesin Gergaji	2	5,992,800
Peralatan Las Listrik	3	5,700,000
Peralatan Las Karbit	1	241,000
Perkakas Pengecatan Kendaraan	1	67,000
Perkakas Bengkel Listrik Lainnya (Alat Bengkel Tak Bermesin)	1	1,000,000
Dongkrak Mekanik	2	1,169,000
Tool Kit Set	3	20,949,000
Engine Stand	6	15,203,570
Bor	3	2,829,000
Tanggem	2	2,000,000
Gunting Plat	2	3,006,000
Kunci Pas	3	48,000
Peralatan Tukang Besi Lainnya	1	1,600,000
Scanner (Universal Tester)	1	24,250,000
Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya	1	532,000
Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	2,445,000
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	994,400
Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	2	2,197,800
Mesin Ketik Listrik Langewagon (18-27 Inchi)	1	220,000
Lemari Besi/Metal	9	3,130,000
Lemari Kayu	58	43,306,800
Rak Besi	30	17,648,000
Rak Kayu	2	161,000

NAMA	QTY	NILAI
Wireless	2	11,194,000
Megaphone	2	1,408,000
Stabilisator	2	1,000,000
Tustel	7	33,565,550
Mesin Jahit	25	151,000,000
Lambang Garuda Pancasila	1	24,000
Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	420,000
Seterika	1	1,850,000
Tangga Aluminium	3	1,800,000
Kaca Hias	10	5,610,000
Dispenser	7	10,450,000
Mimbar/Podium	3	867,000
Handy Cam	4	18,629,900
Mesin Obras	3	10,100,000
Mesin Pelubang Kancing	4	11,475,000
Meja Potong	8	16,066,000
Manequin (Boneka)	4	800,000
Mini Compo	2	1,600,000
Karpet	2	5,815,000
Vertikal Blind	1	30,000,000
Gordyin/Kray	87	42,187,300
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6	9,275,000
Audio Amplifier	1	3,522,400
Microphone/Wireless MIC	2	18,200,000
Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1	191,000
Slide Projector	2	53,894,000
Camera Digital	1	6,350,000
Pesawat Telephone	2	7,092,000
Handy Talky (HT)	2	5,598,000
Facsimile	2	10,764,000
Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	2	1,857,000
Tensimeter	1	157,000
Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1	163,000
Alat Fraksinasi Serat	1	1,500,000
Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	14	15,465,000
Uninterrupted Power Supply (UPS)	25	34,000,000
Software Conf Off-Line Computer	26	29,000,000
Peralatan Umum Lainnya	10	32,500,000
Tang Ampere	2	2,000,000
Local Area Network (LAN)	23	35,100,000
P.C Unit	47	562,848,500
Lap Top	6	103,415,000

NAMA	QTY	NILAI
Filing Cabinet Besi	26	22,045,000
Locker	27	21,600,000
Papan Visual/Papan Nama	4	4,904,000
White Board	16	17,089,000
Alat Penghancur Kertas	3	2,425,000
Overhead Projector	1	20,292,500
Mesin Laminating	1	423,000
Lampu-lampu Kristal	2	1,500,000
LCD Projector/Infocus	1	20,550,000
Perkakas Kantor Lainnya	124	106,635,100
Meja Kerja Besi/Metal	3	10,800,000
Meja Kerja Kayu	49	20,588,000
Kursi Besi/Metal	529	184,799,000
Sice	7	25,017,000
Bangku Panjang Kayu	28	12,540,000
Meja Rapat	2	4,585,000
Meja Komputer	43	42,809,000
Tempat Tidur Besi	40	61,600,000
Tempat Tidur Kayu	50	36,100,000
Kasur/Spring Bed	83	48,900,000
Meja Makan Kayu	24	47,705,000
Kursi Fiber Glas/Plastik	2	2,000,000
Rak Sepatu (Almunium)	19	19,000,000
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	3	6,548,000
Mesin Pel/Poles	1	16,000
Mesin Cuci	2	16,000,000
Lemari Es	2	4,394,000
A.C. Split	23	120,940,500
Kipas Angin	28	12,987,000
Reach In Frezzer	2	4,557,500
Kompore Gas (Alat Dapur)	10	5,758,000
Rice Cooker (Alat Dapur)	3	1,956,000
Kitchen Set	2	6,575,000
Tabung Gas	6	2,218,000
Mesin Giling Bumbu	2	961,000
Treng Air/Tandon Air	1	650,000
Alat Dapur Lainnya	2	840,000
Radio	1	1,650,000
Televisi	29	73,915,000
Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	7	5,151,500
Sound System	2	10,010,000
Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga)	2	3,650,000

NAMA	QTY	NILAI
Note Book	2	23,900,000
Personal Komputer Lainnya	1	825,000
Steamer	6	6,000,000
Plotter (Peralatan Mini Komputer)	1	45,000,000
Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	6,590,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	56,047,590
External	2	1,747,450
Server	2	45,500,000
Router	1	2,200,000
Modem	3	3,850,000
Netware Interface External	1	1,343,100
Peralatan Bantu Lainnya	3	20,425,000
Alat Peraga Pelatihan Lainnya	44	33,420,000
Jet Pump	21	54,644,500
Alat Tennis Meja	14	11,058,400
Alat Badminton	8	4,177,000
Peralatan Fitnes	1	359,000
Catur	1	510,400
CD/VCD/DVD/LD	1	319,000
Atlas	1	25,000
Alat Musik Tradisional/Daerah	4	12,015,000
Alat Musik Modern/Band	53	79,520,000
Maket/Miniatur/Replika	1	1,000,000
Jumlah	1950	3,034,335,605

- Terdapat transaksi **Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188)** pada Satuan Kerja **BRSPDSRW Melati Jakarta** senilai **Rp.9.100.000,- dikarenakan terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahahan** dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	SAT	Q'TY	NILAI
Mobil Ambulance	Unit	1	9.100.000
JUMLAH		1	9.100.000

- transaksi **Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188)** pada Satuan Kerja **Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial dikarenakan terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan** senilai **Rp. 2.077.692.015,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7	836.530.000
Rak-Rak Penyimpan	16	85.465.000
Lemari Penyimpan	11	50.330.000
Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	3	2.619.000
Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	2.399.100
Mesin Ketik Listrik	2	3.415.000
Lemari Besi/Metal	1	4.100.000
Lemari Kayu	10	8.186.800
Filing Cabinet Besi	37	43.137.900
Papan Visual/Papan Nama	1	2.388.000
Copy Board/Elektrik White Board	1	2.029.000
Alat Penghancur Kertas	2	2.699.000
Alat Pemotong Kertas	1	2.475.000
White Board Electronic	5	33.818.000
LCD Projector/Infocus	10	187.860.000
Focusing Screen/Layar LCD Projector	2	5.800.000
Alat Kantor Lainnya	1	800.000
Meja Kerja Kayu	53	53.439.000
Kursi Besi/Metal	106	88.889.555
Kursi Kayu	24	2.952.000
Sice	3	17.895.000
Kursi Fiber Glas/Plastik	52	24.645.250
Lemari Es	3	8.445.000
A.C. Split	1	1.753.000
Radio	1	25.000
Video Cassette	3	7.000.000
Wireless	9	12.857.000
Dispenser	3	7.725.000
Handy Cam	1	5.068.000
Microphone/Wireless MIC	1	6.200.000
Voice Recorder	1	1.228.000
Tripod Camera	1	1.530.000
Camera Digital	2	20.850.000
Mesin Jilid	1	2.340.000
Facsimile	2	3.439.000
P.C Unit	16	166.555.000
Lap Top	9	125.305.000
Note Book	6	109.932.410
Monitor	1	13.695.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	31	104.094.000
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	17.778.000
Jumlah	445	2.077.692.015

- Terdapat transaksi **Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188)** pada Satuan Kerja **BBRPDSN Wyata Guna dikarenakan terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan** senilai **Rp. 61.997.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Rumah Negara Gol II Tipe E Permanen	1	61,997,000
JUMLAH	1	61,997,000

- Terdapat transaksi **Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188)** pada Satuan Kerja **BBRKPNAPZA Galih Pakuan dikarenakan terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan** senilai **Rp. 28.350.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Sepeda	2	600,000
PC Unit	2	27,750,000
JUMLAH	4	28,350,000

- Terdapat transaksi **Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188)** pada Satuan Kerja **BBRVBD Cibinong dikarenakan terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan** senilai **Rp. 518.903.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Solder Listrik	65	5,265,000
Tool Kit Set	67	79,469,000
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	1,024,000
Mesin Ketik Listrik	3	4,653,000
Mesin Hitung Elektronik/Calculator	8	2,173,000
Alat Pemotong Kertas	1	883,000
Meja Komputer	6	6,300,000
Meja Ketik	1	159,000
Kursi Fiber Glas/Plastik	19	16,386,000
Mesin Pemotong Rumput	5	10,694,000
A.C. Sentral	2	458,000
Radio	25	3,687,000
Karaoke	1	1,738,000
P.C Unit	31	368,814,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	17,200,000
JUMLAH	240	518,903,000

- Terdapat transaksi **Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188)** pada Satuan Kerja **BRSPDM Margo Laras** dikarenakan **terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan** senilai **Rp. 9.067.380,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Sepeda Motor	4	9,067,380
JUMLAH	4	9,067,380

- Terdapat transaksi **Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188)** pada Satuan Kerja **BRSKPNAPZA Satria** dikarenakan **terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan** senilai **Rp. 332.853.400,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Gerobak Dorong	1	181,000
Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	2	6,600,000
Mesin Fotocopy Folio	1	17,124,000
Lemari Kayu	2	604,000
Rak Besi	3	702,000
White Board	5	1,321,000
LCD Projector/Infocus	1	9,575,000
Meja Kerja Kayu	5	2,878,000
Kursi Besi/Metal	17	1,279,000
Sice	1	589,000
Meja Rapat	9	1,080,000
Meja Komputer	6	6,300,000
Tempat Tidur Kayu	5	667,000
Meja Makan Kayu	2	968,000
Mesin Cuci	3	6,450,000
Lemari Es	1	966,000
Kompor Gas (Alat Dapur)	2	1,740,000
Rice Cooker (Alat Dapur)	2	1,300,000
Rak Piring Alumunium	1	645,000
Televisi	2	3,488,000
Tustel	1	3,500,000
Dispenser	2	2,756,000
Handy Cam	1	11,772,000
Mini Compo	3	2,175,000
Karpet	9	2,304,000
Camera Electronic	1	3,300,000
Camera Digital	1	1,500,000
Telephone (PABX)	1	6,733,000
Pesawat Telephone	2	374,000
Facsimile	2	3,684,000
Aqua Guard	1	8,085,000
Generator	1	35,601,000
Uninterrupted Power Supply (UPS)	2	5,256,000
P.C Unit	7	66,679,500
Lap Top	4	63,500,000
Personal Komputer Lainnya	1	2,900,000
Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	925,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	15,604,000
Peralatan Komputer Lainnya	3	4,050,000
Atlas	2	94,300
Bola Dunia (Globe)	2	493,600
Alat Musik Modern/Band	2	25,930,000
Lukisan Cat Minyak	12	780,000
Maket/Miniatur/Replika	1	400,000
Jumlah		332,853,400

- Terdapat transaksi **Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188)** pada Satuan Kerja **BBRSBD Prof Dr Soeharso** senilai **Rp.68.808.000,-** dikarenakan terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Sedan	1	24,500,000
Station Wagon	1	28,400,000
Sepeda Motor	4	15,908,000
JUMLAH	6	68,808,000

- Terdapat transaksi **Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188)** pada Satuan Kerja **BRSPDM Budi Luhur Banjar Baru** senilai **Rp.276.309.500,-** dikarenakan terdapat barang rusak berat yang

dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Rak Kayu	1	5,625,000
White Board	3	3,300,000
Perkakas Kantor Lainnya	10	9,750,000
Sice	2	9,000,000
Kasur/Spring Bed	100	100,099,500
Meja Makan Kayu	16	15,200,000
Mesin Pemotong Rumput	2	9,800,000
Mesin Cuci	2	8,180,000
Lemari Es	3	12,750,000
A.C. Split	4	22,400,000
Televisi	7	12,900,000
Lap Top	5	61,640,000
Finger Print	1	5,665,000
JUMLAH	156	276,309,500

- Terdapat transaksi **Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188)** pada Satuan Kerja **BRSPDF Wirajaya Makasar** dikarenakan **terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan** senilai **Rp. 281.536.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	281,536,000
JUMLAH	1	281,536,000

- Terdapat transaksi **Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188)** pada Satuan Kerja **BRSPDSN Mahatmiya** dikarenakan **terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan** senilai **Rp. 117.047.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mini Bus	1	117,047,000
JUMLAH	1	117,047,000

- Terdapat transaksi **Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188)** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Naibonat** dikarenakan **terdapat barang rusak berat yang dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan** senilai **Rp. 4.393.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Bangunan Lainnya	1	4,393,000
JUMLAH	1	4,393,000

- Terdapat transaksi **Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188)** pada Satuan Kerja **BRSODHA Wasana Bahagia Ternate** senilai **Rp. 176.753.333-**, dikarenakan terdapat barang rusak berat yang **dihentikan penggunaan dari operasional pemerintahan** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	68,463,333
Mesin Ampelas Tangan	3	2,850,000
Mesin Gergaji	3	5,550,000
Mesin Ketam (Perkakas Bengkel Kayu)	3	4,500,000
Mesin Bor Kayu	3	3,750,000
Tool Kit Box	3	11,250,000
LCD Projector/Infocus	1	11,000,000
Mesin Pemotong Rumput	1	2,210,000
A.C. Split	1	3,600,000
Sound System	1	21,000,000
Handy Cam	1	6,500,000
Alat Pemisah Buih(Foam Seperator)	1	630,000
Wash Bak	1	2,500,000
P.C Unit	1	7,750,000
Lap Top	2	23,000,000
Router	1	2,200,000
Jumlah	27	176,753,333

(05) DITJEN LINJAMSOS

Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	97	251.986.060
	Sepeda motor	1	2.126.000
	Lemari Kayu	8	32.480.360
	Meja kerja kayu	8	6.560.000
	Kursi Besi/Metal	51	32.478.000
	Meja Rapat	1	3.208.000
	A.C. Split	1	3.734.000
	Wireless	1	4.306.000
	Bracket Standing Peralataan	1	600.000
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	600.000
	Camera Digital	6	1.000.000
	P.C Unit	2	55.740.000
	Lap Top	2	29.483.700
	Tablet PC	9	18.190.000
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	36.480.000
	External/Portable Hardisk	1	23.550.000
	Modem	1	1.450.000

(11) BADIKLITPENSOS

Terdapat Transaksi **Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya** atas Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan pada BP3S senilai Rp.1.890.528.297. pada satker:

- **Pusdiklat Kesos**

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
02711019944032600KP			
	PUSDIKLAT KESOS	151	381.070.000
	Kasur/Spring Bed	151	381.070.000

- **BBPPKS Bandung dengan rincian aset sebagai berikut:**

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027110200369084000KD			
	BBPPKS BANDUNG	2	375.800.000
	Mini Bus(Penumpang 14 Orang Ke	2	375.800.000

- **BBPPKS Yogyakarta dengan rincian aset sebagai berikut :**

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027.11.369084			
	BBPPKS Yogyakarta	266	690.324.400
	Memori Programmer	3	1.050.000
	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 l	2	416.000
	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-2	3	1.293.000
	Lemari Kayu	6	11.511.000
	Overhead Projector	11	53.218.000
	Sice	2	12.000.000
	Meja Komputer	57	56.850.000
	Meja Telepon	31	1.860.000
	Meja Resepsionis	1	1.800.000
	Kasur/Spring Bed	3	15.600.000
	Lemari Es	3	1.878.000
	A.C. Split	2	3.302.000
	Kipas Angin	15	2.623.000
	Televisi	6	24.990.000
	Mic Conference	1	37.711.000
	Seterika	2	900.000
	Mesin Pemetong Keramik	1	1.000.000
	Kabel Roll	1	1.675.000
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	6.000.000
	Power Amplifier	1	1.615.000
	Sepeda Statis	5	2.053.000
	Exhaust Fan (Alat Laboratorium Proses	15	7.500.000
	Software DAAS MOD	25	28.235.000
	Hardware Conf Off-Line Computer	4	2.865.000
	P.C Unit	28	312.058.750
	Lap Top	6	57.177.650
	Floppy Disk Unit (Peralatan Mainframe	5	2.400.000
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22	40.743.000

• Pusbangprof Peksos dan Pensos

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027110199682040000KP			
	PUSBANGPROF PEKSOS DAN PENSOS	57	443.333.897
	Mini Bus (Penumpang 14	1	199.940.500
	Alat Pemotong Kertas	1	5.450.000
	Kursi Besi/Metal	22	19.627.000
	Sice	2	9.380.000
	Meja Rapat	1	3.926.000
	A.C. Split	5	23.217.000
	Dispenser	1	2.735.000
	Meja Potong	1	1.980.000
	DVD Player	1	12.435.000
	Peralatan Studio Audio Lai	2	22.894.000
	Tripod Camera	2	990.000
	Slide Projector	1	8.650.000
	Duplicator DVD	1	13.000.000
	Local Area Network (LAN)	3	1.762.992
	P.C Unit	5	68.508.000
	Note Book	4	43.586.158
	Printer (Peralatan Persona	1	2.203.740
	External	3	3.048.507

TRANSAKSI NORMALISASI BMN (BMN YANG DIHENTIKAN)

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca *Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah* dengan transaksi *Transaksi Normalisasi BMN Yang Dihentikan (299) 31 Desember 2019*, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi *Transaksi Normalisasi BMN Yang Dihentikan (299)* pada Satuan Kerja *BRAMPK Rumbai dikarenakan terdapat barang dengan nilai minus* senilai (Rp. 11.713.000,-) dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Kipas Angin	-10	-11.713.000
JUMLAH	-10	-11.713.000

PENGHAPUSAN (BMN YANG DIHENTIKAN)

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Penghapusan Aset di Satker Setjen dan Satker Pusdatin berupa:

NO.	TRANSAKSI	SATKER	JML	NILAI	KET
1	Penghapusan	Satker Setjen		- 1.012.992.000	
		Satker Pusdatin	2	- 185.281.439	
TOTAL			2	- 1.198.273.439	

Rincian Penghapusan pada Satker Setjen

- Adanya Penghapusan berupa 3 Unit Evalator/Lift Aset Tetap Yang Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan pada Satker Sekretariat Jenderal sejumlah Senilai Rp.922.992.000,-
- Adanya Penghapusan berupa 1 Unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Aset Tetap Yang Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan pada Satker Sekretariat Jenderal sejumlah Senilai Rp.90.000.000,-

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
1	2	4	5
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI	-4	-1.012.992.000
3.01.03.02.001	Elevator /Lift	-3	-922.992.000
3.02.01.02.003	Mini Bus (<u>Penumpang</u> 14 Orang Kebawah)	-1	-90.000.000

Satker Pusdatin

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI
1	2	4	5
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI	-2	-185.281.439
3.02.01.02.003	Mini Bus (<u>Penumpang</u> 14 Orang Kebawah)	-1	-173.531.439
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	-1	-11.750.000
TOTAL			-185.281.439

(03) DITJEN. DAYASOS

Terjadi Transaksi Penghapusan(BMN yang dihentikan) dari Satker Sekretariat Ditjen Dayasos dengan rincian sebagai berikut:

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027030199630859000KP			
	Sekretariat Dayasos	(6)	(989.570.000)
	Station Wagon	(1)	(184.970.000)
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	-5	(804.600.000)

Daihatsu Terios Tahun 2007 B 2262 UQ telah di Transfer dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial ke Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan. Pada hari Rabu tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Delapan belas dengan BAST Nomor: 944/DYS-Sekt/10/2018.

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca ***Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah*** dengan transaksi ***Penghapusan BMN yang Dihentikan (391) 31 Desember 2019***, dengan rincian sebagai berikut :

- Terdapat transaksi ***Penghapusan BMN yang Dihentikan (391)*** senilai ***Rp. (888.445.140,-)*** berupa barang inventaris berdasarkan ***Surat Keputusan Penghapusan Nomor : 167 / HUK / 2019*** dikarenakan barang tersebut dalam kondisi rusak berat dan sudah tidak di operasionalkan dalam tugas perkantoran pada Satuan Kerja ***BRSPDSRW Melati***, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mesin Bor	-1	-7,618,000
Mesin Gerinda Tangan	-3	-3,996,000
Mesin Bor Tangan	-5	-2,129,000
Mesin Ampelas Tangan	-3	-1,257,000
Mesin Gergaji	-3	-1,675,000
Mesin Penghalus	-2	-1,546,000
Peralatan Las Listrik	-2	-8,648,000
Perkakas Pemotong Plat	-1	-644,000
Perkakas Pengecatan Kendaraan	-1	-226,000
Gunting Plat Tangan	-2	-5,812,000
Tang Potong	-2	-1,332,000
Audio Signal Source	-1	-3,267,000
Decible Meter	-1	-22,523,000
Test Intelegensia WPPS	-1	-2,047,000
Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	-1	-846,000
Lemari Besi/Metal	-6	-2,860,000
Lemari Kayu	-136	-62,669,500
Filing Cabinet Besi	-3	-1,818,000
Papan Visual/Papan Nama	-2	-750,000
White Board	-6	-3,504,000
Papan Gambar	-1	-900,000
Perkakas Kantor Lainnya	-6	-2,667,000
Meja Kerja Kayu	-41	-27,862,000
Kursi Besi/Metal	-76	-15,570,000
Sice	-6	-13,876,000
Tempat Tidur Besi	-65	-48,420,000
Tempat Tidur Kayu	-3	-6,295,000
Kasur/Spring Bed	-75	-29,962,500
Meja Makan Kayu	-2	-270,000
Kursi Fiber Glas/Plastik	-3	-942,000
Mesin Cuci	-1	-2,800,000
Lemari Es	-2	-2,918,000
A.C. Split	-5	-25,825,000

NAMA	QTY	NILAI
Kipas Angin	-29	-10,251,900
Kompore Gas (Alat Dapur)	-1	-1,996,500
Oven Listrik	-1	-1,996,500
Rak Piring Alumunium	-1	-450,000
Radio	-1	-3,430,000
Televisi	-12	-24,796,400
Wireless	-15	-22,500,000
Tustel	-1	-659,000
Mesin Jahit	-15	-41,374,000
Kaca Hias	-6	-900,000
Dispenser	-2	-2,145,000
Mimbar/Podium	-1	-418,000
Handy Cam	-1	-5,628,700
Mesin Obras	-3	-1,449,000
Mesin Pelubang Kancing	-1	-1,980,000
Meja Potong	-3	-424,000
Uninterruptible Power Supply (UPS)	-1	-4,250,000
Time Switching	-1	-2,700,000
Photo Tustel	-1	-1,600,000
Camera Digital	-1	-2,552,000
Mesin Pres	-1	-8,332,500
GPS Receiver	-1	-1,200,000
Tiang Keseimbangan	-1	-2,950,200
Boneka Anatomi	-2	-714,000
Engine Dinamo Meter	-15	-7,500,000
Mesin Bordir Highspeed	-1	-1,996,500
Mesin Jahit Pasang Kancing	-1	-1,980,000
Mesin Jahit Overlock	-1	-1,996,500
Stabilizer/UPS	-9	-12,240,000
Cable Tester	-1	-1,675,000
Local Area Network (LAN)	-1	-900,000
P.C Unit	-20	-242,120,000
Lap Top	-3	-39,924,500
Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	-2	-10,194,000
Scanner (Peralatan Mini Komputer)	-1	-24,250,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	-6	-18,679,590
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	-1	-1,180,000

NAMA	QTY	NILAI
Printer (Peralatan Personal Komputer)	-6	-18,679,590
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	-1	-1,180,000
Server	-1	-41,250,000
Modem	-1	-1,450,000
Netware Interface External	-1	-3,000,000
Air Conditioning (AC)	-1	-11,522,500
Alat Tennis Meja	-1	-875,000
Peralatan Fitnes	-2	-7,538,850
Jumlah	-639	888,445,140

- Terdapat transaksi **Penghapusan BMN Yang Dihentikan (391)** senilai **Rp. (502.211.590,-)** berupa barang inventaris berdasarkan **Surat Keputusan Penghapusan Nomor : 58 / HUK / 2019** dikarenakan barang tersebut dalam kondisi rusak berat dan sudah tidak di operasionalkan dalam tugas perkantoran pada Satuan Kerja **BRSPDM Phalamarta Sukabumi**, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Portable Water Pump	-6	-5,800,000
Stationary Water Pump	-2	-1,950,000
Mesin Ketam (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)	-2	-1,494,000
Mesin Bor Tangan	-3	-221,000
Mesin Gergaji	-2	-1,494,000
Mesin Gergaji	-3	-81,000
Peralatan Las Listrik	-17	-32,000
Gergaji	-1	-18,000
Kakak Tua	-1	-18,000
Siku	-96	-87,000
Palu	-36	-155,000
Tanggem	-14	-700,000
Tang Potong	-1	-87,000
Drei Biasa (Obeng	-4	-11,000
Rol Meter	-1	-900,000
Circuit Tester (Alat Ukur Universal)	-38	-3,825,000
Memori Programmer	-1	-714,000
Pacul	-16	-310,000
Garpu Pacul	-2	-310,000
Garpu Besi	-1	-37,585,000
Lemari Penyimpan	-1	-2,450,000
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	-7	-35,860,000
Lemari Kayu	-15	-5,145,000
Rak Besi	-1	-8,241,000
Filing Cabinet Besi	-23	-793,000
Buffet	-2	-1,074,000
White Board	-6	-2,788,000
Perkakas Kantor Lainnya	-2	-101,000
Meja Kerja Besi/Metal	-2	-18,684,000
Meja Kerja Kayu	-5	-28,299,000
Kursi Besi/Metal	-1	-3,794,000
Kursi Kayu	-5	-39,750,000
Sice	-1	-20,540,000

NAMA	QTY	NILAI
Meja Komputer	-6	-5,250,000
Tempat Tidur Besi	-2	-49,827,000
Kasur/Spring Bed	-2	-63,480,000
Meja Makan Kayu	-3	-14,666,000
Jam Elektronik	-2	-147,000
Lemari Es	-3	-20,000
Lap Top	-17	-14,129,500
Note Book	-1	-108,607,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	-1	-22,774,090
Total		502,211,590

- Terdapat transaksi **Penghapusan BMN yang Dihentikan (391)** senilai **Rp. (275.539.000,-)** berdasarkan **Surat Keputusan Penghapusan Nomor : 56/HUK/2019** pada Satuan Kerja **BRSPDSN Tan Miyat** dikarenakan barang tersebut dalam kondisi rusak berat dan sudah tidak di operasionalkan dalam tugas perkantoran, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Kasur Spring Bed	-389	-243,616,000
A.C. Split	-2	-5,708,000
P.C Unit	-2	-18,519,000
Printer	-4	-7,696,000
Jumlah	-397	-275,539,000

- Terdapat transaksi **Penghapusan BMN yang Dihentikan (391)** senilai **Rp. (90.566.000,-)** berdasarkan **Surat Keputusan Penghapusan Nomor : 103/HUK/2019** pada Satuan Kerja **BRSWTS Mulya Jaya** dikarenakan barang tersebut dalam kondisi rusak berat dan sudah tidak di operasionalkan dalam tugas perkantoran, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mobil Ambulance	1	-90,566,000
Jumlah	1	-90,566,000

- Terdapat transaksi **Penghapusan BMN yang Dihentikan (391)** senilai **Rp. (1.561.480.929,-)** berdasarkan **Surat Keputusan Penghapusan Nomor : 169/HUK/2019** pada Satuan Kerja **BRSKPNAPZA Galih Pakuan** dikarenakan barang tersebut dalam kondisi rusak berat dan sudah tidak di operasionalkan dalam tugas perkantoran, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Sepeda	-2	-600,000
Mesin Kompresor	-3	-6,239,000
Mesin Las Listrik	-1	-6,774,000
Mesin Bor Tangan	-1	-900,000
Perkakas Pemotong Plat	-3	-903,000
Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	-1	-37,000
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	-1	-398,000
Lemari Besi/Metal	-35	-28,553,000
Lemari Kayu	-177	-67,184,000
Rak Kayu	-2	-4,400,000
Filing Cabinet Besi	-8	-2,764,000
Brandkas	-2	-7,538,000
Buffet	-4	-2,028,000
Locker	-2	-6,890,000
Papan Visual/Papan Nama	-4	-1,227,000
White Board	-22	-14,385,000
Alat Pemotong Kertas	-1	-384,000
Overhead Projector	-4	-52,954,000
Panel Pameran	-13	-481,000
Perkakas Kantor Lainnya	-18	-46,898,335
Meja Kerja Besi/Metal	-2	-104,000
Meja Kerja Kayu	-66	-22,270,000
Kursi Besi/Metal	-379	-76,985,000
Kursi Kayu	-21	-16,359,000
Tempat Tidur Besi	-86	-63,226,200
Meja Ketik	-6	-5,403,000
Kasur/Spring Bed	-43	-81,840,000
Meja Makan Kayu	-10	-19,480,000
Mesin Pemotong Rumput	-7	-20,739,000
Lemari Es	-4	-6,177,500
A.C. Window	-3	-7,542,000
A.C. Split	-21	-98,622,004
Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	-2	-28,952,000

NAMA	QTY	NILAI
Kipas Angin	-9	-3,753,500
Alat Pendingin Lainnya	-5	-36,300,000
Kompur Gas (Alat Dapur)	-7	-3,823,500
Rice Cooker (Alat Dapur)	-2	-2,198,000
Kitchen Set	-2	-776,000
Tabung Gas	-6	-1,789,000
Treng Air/Tandon Air	-2	-3,080,000
Rak Piring Alumunium	-3	-1,593,000
Televisi	-16	-28,855,000
Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	-2	-933,000
Sound System	-2	-9,145,000
Laser Disc	-1	-4,030,000
Wireless	-4	-7,704,400
Microphone Table Stand	-1	-66,000
Unit Power Supply	-34	-90,365,000
Mesin Jahit	-7	-8,435,000
Timbangan Orang	-1	-303,000
Seterika	-5	-1,540,000
Dispenser	-18	-8,080,000
Handy Cam	-3	-33,944,000
Meja Potong	-2	-182,000
Mini Compo	-1	-1,375,000
DVD Player	-4	-5,420,800
Jemuran	-24	-13,305,600
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-12	-29,153,000
Power Amplifier	-2	-5,999,000
Tripod Camera	-2	-5,600,000
Camera Film	-1	-6,075,000
Camera Digital	-1	-15,070,000
Lampu Blitz Kamera	-1	-8,800,000
Pesawat Telephone	-11	-1,564,000
Handy Talky (HT)	-15	-52,800,000
Facsimile	-1	-451,000

NAMA	QTY	NILAI
Genset	-1	-7,975,000
Tensimeter	-2	-812,500
Blender	-1	-484,000
TV Monitor	-2	-1,746,000
Refrigerator/Freezer	-2	-10,695,000
Alat Pengisi Pen Dosimeter / Charger	-1	-6,160,000
Local Area Network (LAN)	-24	-36,000,000
P.C Unit	-23	-188,498,500
Lap Top	-1	-22,500,000
Note Book	-5	-66,495,500
Hard Disk	-5	-12,100,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	-15	-29,141,590
External	-5	-19,390,000
Modem	-3	-3,900,000
Alat Peraga Pelatihan Lainnya	-39	-41,014,000
Jet Pump	-6	-11,840,000
Alat Tennis Meja	-4	-4,340,000
Alat Volley	-7	-2,201,000
Alat Badminton	-2	-680,000
Peralatan Olah Raga Lainnya	-9	-3,762,000
Jumlah	-11	-1,561,480,929

- Terdapat transaksi **Penghapusan BMN Yang Dihentikan (391)** senilai **Rp. (1.047.567.983,-)** berdasarkan **Surat Keputusan Penghapusan Nomor : 83/HUK/2019** pada Satuan Kerja **BRSPDM Margo Laras** dikarenakan barang tersebut dalam kondisi rusak berat dan sudah tidak di operasionalkan dalam tugas perkantoran, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mesin Bubut	-2	-896,897
Mesin Las Listrik	-1	-323,974
Tool Kit Set	-1	-61,385
Tool Kit Box	-1	-20,350,000
Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	-1	-1,650,000
Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	-1	-2,000,000
Lemari Kayu	-68	-17,099,374
Locker	-8	-15,538,200
CCTV - Camera Control Television System	-1	-13,000,000
Alat Detektor Uang Palsu	-1	-14,276
Overhead Projector	-1	-696,934
Meja Kerja Kayu	-34	-10,799,280
Kursi Kayu	-65	-3,385,785
Sice	-9	-9,759,106
Meja Komputer	-28	-27,344,160
Tempat Tidur Besi	-1	-1,157,538
Tempat Tidur Kayu	-158	-36,998,115
Kasur/Spring Bed	-100	-14,855,100
Sketsel	-2	-1,452,041
Rak Sepatu (Almunium)	-17	-4,977,501
Jam Elektronik	-2	-75,494
A.C. Split	-3	-3,209,677
Kipas Angin	-24	-8,667,964
Kompor Gas (Alat Dapur)	-5	-1,716,453
Mesin Giling Bumbu	-1	-605,000
Treng Air/Tandon Air	-7	-2,098,795
Televisi	-22	-40,460,000
Alat Hiasan	-9	-604,782
P.C Unit	-33	-726,273,323
Lap Top	-3	-41,200,603
Printer (Peralatan Personal Komputer)	-6	-15,885,590
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	-2	-24,410,636
Jumlah	-617	-1,047,567,983

- Terdapat transaksi **Penghapusan (391)** senilai **Rp. (169.225.588,-)** berdasarkan **Surat Keputusan Penghapusan Nomor : 62/HUK/2019** pada Satuan Kerja **BRSODHA Wasana Bahagia Ternate** dikarenakan barang tersebut dalam kondisi rusak berat dan sudah tidak di operasionalkan dalam tugas perkantoran pada Satuan Kerja **BRSODHA Wasana Bahagia Ternate**, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Lemari Penyimpan	-2	-3,000,000
Lemari Kayu	-50	-28,732,064
Meja Kerja Kayu	-20	-10,300,000
Kursi Besi/Metal	-53	-27,250,024
Kursi Kayu	-4	-1,200,000
Sice	-3	-9,000,000
Meja Komputer	-5	-5,250,000
Tempat Tidur Kayu	-15	-5,250,000
Meja Makan Kayu	-8	-18,000,000
Meubelair Lainnya	-1	-1,850,000
Mesin Pemotong Rumput	-1	-3,000,000
Lemari Es	-2	-7,000,000
A.C. Split	-1	-2,750,000
Kipas Angin	-1	-470,000
P.C Unit	-3	-31,173,500
Bangunan Menara	-2	-15,000,000
Total	-171	-169,225,588

(05) DITJEN. LINJAMSOS**a. Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	(261)	(1.081.164.616)
	Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah)	(2)	(340.000.000)
	Pick Up	(1)	(37.981.000)
	Lemari Kayu	(3)	(10.608.216)
	Tabung Pemadam Api	(20)	(82.700.000)
	Alat penghancur Kertas	(1)	(4.150.000)
	Meja Kerja Kayu	(83)	(76.460.000)
	Kursi Besi/Metal	(35)	(71.749.000)
	Sice	(3)	(11.850.000)
	Meja Rapat	(2)	(6.224.000)
	Meubelair Lainnya	(2)	(2.400.000)
	A.C. Split	(7)	(17.802.000)
	Rice Cooker (Alat Dapur)	(2)	(1.296.700)
	Wireless	(1)	(4.306.000)
	Camera Video	(1)	(47.950.000)
	Handy Cam	(2)	(20.050.000)
	Gordyn/Kray	(1)	(13.130.000)
	DVD Player	(1)	(350.000)
	Home Theater	(1)	(1.000.000)
	Alat Rumah Tangga Lainnya	(1)	(1.000.000)
	Vidio Mixer	(1)	(6.380.000)
	Lensa Kamera	(1)	(2.381.500)
	Layar Film/Projector	(1)	(2.190.000)
	Camera digita	(4)	(51.700.000)
	Pesawat Telepon	(5)	(266.000)
	P.C Unit	(2)	(16.195.000)
	Lap Top	(16)	(203.938.700)
	Ultra Mobil P.C	(1)	(3.564.000)
	Personal Komputer Lainnya	(2)	(7.400.000)
	Hard Disk	(1)	(1.250.000)
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	(7)	(28.080.000)
	External/Portable Hardisk	(2)	(1.330.000)
	Monografi	(25)	(2.707.500)
	Buku Liannya	(24)	(2.775.000)

b. Direktorat Jaminan Sosial

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.440310			
	Direktorat Jaminan Sosial	(38)	(32.775,000)
	Lemari Besi/Metal	(1)	(2,750,000)
	Lemari Kayu	(1)	(2,700,000)
	Filing Cabinet Besi	(1)	(2,500,000)
	Papan Visual/Papan Nama	(1)	(700,000)
	White Board	(1)	(1,200,000)
	Meja Kerja Kayu	(6)	(4,200,000)
	Kursi Besi/Metal	(22)	(10,500,000)
	Meja Komputer	(1)	(1,500,000)
	Handy Cam	(1)	(4,500,000)
	DVD Player	(1)	(700,000)
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	(1)	(775,000)
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	(1)	(750,000)

(06) DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN

Terdapat transaksi Penghapusan atas Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sesuai Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor: 154/HUK/2019 tanggal 02 Desember 2019

pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin senilai **Rp18.150.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	SALDO AWAL		BERTAMBAH		BERKURANG		SALDO TAHUNAN	
	KUAN	JUMLAH	KUAN	JUMLAH	KUAN	JUMLAH	KUAN	JUMLAH
P.C Unit	1	27.720.000	-	-	-	-	1	27.720.000
Lap Top	1	18.150.000	-	-	(1)	(18.150.000)	-	-
TOTAL	2	45.870.000	-	-	(1)	(18.150.000)	1	27.720.000

(11) BADIKLITPENSOS

Penghapusan (BMN yang dihentikan) senilai Rp.(2.747.101.451),- pada satker :

- Pusbangprof Peksos senilai Rp.(243.393.397),- dengan rincian sebagai berikut :

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
02711019968204000KP			
	PUSBANGPROF PEKSOS DAN PENS	-56	-243.393.397
	Alat Pemotong Kertas	-1	(5.450.000)
	Kursi Besi/Metal	-22	(19.627.000)
	Sice	-2	(9.380.000)
	Meja Rapat	-1	(3.926.000)
	A.C. Split	-5	(23.217.000)
	Dispenser	-1	(2.735.000)
	Meja Potong	-1	(1.980.000)
	DVD Player	-1	(12.435.000)
	Peralatan Studio Audio Lainnya	-2	(22.894.000)
	Tripod Camera	-2	(990.000)
	Slide Projector	-1	(8.650.000)
	Duplicator DVD	-1	(13.000.000)
	Local Area Network (LAN)	-3	(1.762.992)
	P.C Unit	-5	(68.508.000)
	Note Book	-4	(43.586.158)
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-1	(2.203.740)
	External	-3	(3.048.507)

- Pusdiklat Kesos senilai Rp.(2.503.708.054),-

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027110199440326000KP			
	PUSDIKLAT KESOS	-866	-2.503.708.054
	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	-1	(66.630.000)
	Sepeda Motor	-4	(19.416.000)
	CCTV - Camera Control Television System	-3	(119.182.207)
	LCD Projector/Infocus	-13	(190.010.000)
	Kursi Besi/Metal	-199	(55.453.509)
	Meja Komputer	-30	(31.500.000)
	Tempat Tidur Kayu	-10	(4.437.230)
	Kasur/Spring Bed	-271	(461.812.567)
	A.C. Split	-31	(51.092.596)
	Televisi	-11	(37.376.333)
	Loudspeaker	-26	(41.906.498)
	Tustel	-6	(29.160.236)
	Mimbar/Podium	-2	(810.276)
	Handy Cam	-3	(10.093.825)
	Handy Talky (HT)	-10	(11.644.371)
	Sepeda Statis	-9	(926.028)
	Uninterrupted Power Supply (UPS)	-62	(90.100.000)
	Software DAAS MOD	-62	(65.650.000)
	P.C Unit	-64	(875.300.000)
	Lap Top	-14	(169.729.500)
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	-25	(159.210.590)
	Peralatan Fitnes	-10	(12.266.288)

TRANSFER KELUAR (BMN YANG DIHENTIKAN)

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca **Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah** dengan transaksi **Transfer Keluar (302) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Transfer Keluar (302) berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah** sebesar **Rp.243.180.045,-** pada Satuan Kerja **BRSKP NAPZA Bambu Apus** dikarenakan perubahan nomenkelatur dari pelayanan Anak menjadi Napza berdasarkan **Berita Acara Nomor:646/BRSKPN/PL.04/06/2019** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mesin Diesel	-1	-27,489,000
Mesin Bor	-3	-2,986,500
Mesin Las Listrik	-1	-7,500,000
Mesin Pemotong Fiberglass/Poliyster	-1	-7,084,545
Mesin Gerinda Tangan	-1	-14,000
Mesin Sporing	-2	-3,960,000
Peralatan Las Listrik	-1	-600,000
Dongkrak Mekanik	-1	-926,000
Tanggem	-1	-1,000,000
Kunci Pas	-3	-48,000
Peralatan Tukang Besi Lainnya	-1	-1,600,000
Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya	-1	-532,000
Mesin Ketik Listrik Langewagon (18-27 Inchi)	-1	-220,000
Lemari Besi/Metal	-8	-2,814,000
Lemari Kayu	-48	-22,341,000
Filing Cabinet Besi	-26	-22,045,000
White Board	-3	-1,107,000
Lampu-lampu Kristal	-2	-1,500,000
Meja Kerja Besi/Metal	-3	-10,800,000
Meja Kerja Kayu	-19	-2,982,000
Kursi Besi/Metal	-105	-31,538,000
Sice	-3	-6,312,000
Meja Rapat	-2	-4,585,000
Kipas Angin	-4	-2,100,000
Reach In Frezzer	-1	-1,270,000
Kitchen Set	-2	-6,575,000
Radio	-1	-1,650,000
Televisi	-12	-24,005,000
Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	-1	-824,000
Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga)	-1	-2,000,000
Lambang Garuda Pancasila	-1	-24,000
Mesin Pelubang Kancing	-2	-1,975,000
Meja Potong	-6	-14,066,000
Slide Projector	-1	-20,294,000
Tang Ampere	-1	-1,000,000
Steamer	-2	-2,000,000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	-1	-1,813,000
Alat Peraga Pelatihan Lainnya	-12	-3,600,000
Total		-243,180,045

USULAN BARANG RUSAK BERAT KE PENGELOLA (BMN YANG DIHENTIKAN)

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca **Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah** dengan transaksi **Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola BMN yang Dihentikan (396) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola BMN yang Dihentikan (396) berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah** sebesar (Rp. 57.000.000,-) pada Satuan Kerja **BRSPDSRW Efata** dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat berdasarkan **Surat Sekretaris Jenderal Nomor:1095/2.3/PL.03/10/2019** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mini Busa	1	-57,000,000
JUMLAH	1	-57,000,000

PENGGUNAAN KEMBALI BMN YANG SUDAH DIHENTIKAN

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi kurang nilai neraca **Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah** dengan transaksi **Penggunaan Kembali BMN yang Dihentikan (402) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Penggunaan Kembali BMN yang Dihentikan (402) berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah** sebesar (Rp. 251.879.100,-) pada Satuan Kerja **BRSKP Napza Galih Pakuan** dikarenakan BMN tersebut masih digunakan dalam kegiatan operasional perkantoran berdasarkan **Surat Keterangan Nomor : 1539/2.5.1/PL.04.01/7/2019** dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Mesin Las Listrik	-1	-6,160,000
Rak Besi	-14	-8,239,000
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	-3	-10,648,000
Mesin Pel/Poles	-2	-14,784,000
Mesin Pemotong Rumput	-3	-13,305,600
A.C. Split	-10	-56,458,600
Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	-1	-14,476,000
Mixer	-2	-18,603,200
Televisi	-3	-34,249,600
Amplifier	-2	-9,856,000
Tensimeter	-1	-665,500
Alat Peraga Pelatihan Lainnya	-8	-6,776,000
Jet Pump	-6	-57,657,600
Jumlah	-56	- 251,879,100

- Adanya transaksi **Penggunaan Kembali BMN yang Dihentikan (402) berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah** sebesar (Rp. 154.061.000,-) pada Satuan Kerja **BRSPDSN Tumou Tou Manado** dikarenakan BMN tersebut masih digunakan dalam kegiatan operasional perkantoran

(05) DITJEN. LINJAMSOS

Sekretariat

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
02705.00.426820.000			
	Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	2.126.000
	Sepeda motor	1	2.126.000

E.2.3.3 Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan

Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan adalah Aset Tak Berwujud yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Nilai Perolehan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan pada Kementerian Sosial RI per *31 Desember 2018 (Audited)* sebesar *Rp. 231,083,052,-* dan *31 Desember 2019 (Audited)* sebesar *Rp. 237,023,052,-* Akumulasi Amortisasi per *31 Desember 2019 (Audited)* sebesar *Rp. 159,469,052,-* sehingga Nilai Buku pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah *Rp. 77,554,000,-*.

Saldo per 31 Desember 2018 (Audited)	Rp 231.083.052
Mutasi Tambah :	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp 15.140.000
Mutasi Kurang :	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	Rp (9.200.000)
Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 237.023.052
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp (159.469.052)
Nilai Buku per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 77.554.000

REKLASIFIKASI DARI ASET TETAP KE ASET LAINNYA

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi Penambahan nilai neraca *Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah 31 Desember 2019* dengan transaksi *Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188)*, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi *Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya (188)* sebesar *Rp. 15.140.000,-* pada Satuan Kerja *BRSKP Napza Galih Pakuan* dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	3	15,140,000
Jumlah	3	15,140,000

PENGHAPUSAN (BMN YANG DIHENTIKAN)

Mutasi Kurang nilai neraca *Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah 31 Desember 2019* dengan transaksi *Penghapusan (301)*, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi *Penghapusan (301)* sebesar (*Rp. 9.200.000,-*) pada Satuan Kerja *BRSKP Napza Galih Pakuan* berdasarkan *Surat Keputusan Penghapusan Nomor : 170/HUK/2019* dikarenakan BMN tersebut dalam kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	QTY	NILAI
Aset Tak Berwujud	2	-9.200.000
Jumlah	2 -	9.200.000

E.2.3.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Nilai Perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Kementerian Sosial RI per dan *31 Desember 2018 (Audited)* sebesar *Rp. 623,272,587,-* dan *31 Desember 2019 (Audited)* sebesar *Rp. 281,836,313,-*.

Mutasi/perubahan Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahunan Tahun 2019 (Audited) sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018 (Audited)	Rp 623.272.587
Mutasi Tambah :	
Saldo Awal KDP	Rp 206.197.213
Perolehan/Penambahan KDP	Rp 5.212.690.188
Pengembangan KDP	Rp 161.842.113.156
Mutasi Kurang :	
Koreksi Nilai KDP	Rp (1.423.742.608)
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	Rp (166.178.694.223)
Saldo per 31 Desember 2019 (Audited)	Rp 281.836.313

SALDO AWAL KDP

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi Penambahan nilai neraca **Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)** dengan transaksi **Saldo Awal KDP (501) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi **Saldo Awal KDP (501)** senilai **Rp. 206.197.213,-**, dikarenakan adanya nilai perencanaan yang belum dilaksanakan untuk pembangunan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) pada **Pusat Rehabilitasi Sosial di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan** yang digunakan untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor pada **Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 206,197,213
	Jumlah	Rp 206,197,213

PEROLEHAN/PENAMBAHAN KDP

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Perolehan KDP di Satker Setjen berupa:

No.	Nama Barang	Jml	Nilai	Ket
1	Peralatan dan Mesin dalam Pengerjaan	1	Rp 99.500.000	
TOTAL		1	Rp 99.500.000	

NAMABARANG	NO AWAL	RPH KDP	NAMAKONTRAK
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	1	99,500,000	PT.MALMASS MITRA TEKNIK

(03) DITJEN. DAYASOS

Terjadi Transaksi Perolehan/Penambahan KDP pada Satker Dit K2KRS di Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata sebesar Rp. 1.924.629.068,- sebagai berikut:

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027030199440213000KP			
	Dit K2KRS		1.924.629.068
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2	1.924.629.068
	Tanah Dalam Pengerjaan	2	1.924.629.068

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi Penambahan nilai neraca *Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)* dengan transaksi *Perolehan Penambahan KDP (502) 31 Desember 2019*, dengan rincian sebagai berikut :

- Adanya transaksi *Perolehan Penambahan KDP (502)* senilai **Rp.306.776.000,- Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 306.776.000
	Jumlah	Rp 306.776.000

- Adanya transaksi *Perolehan Penambahan KDP (502)* senilai **Rp.72.237.500,- Satuan Kerja BRSPDM Margo Laras** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 72,237,500
	Jumlah	Rp 72,237,500

- Adanya transaksi **Perolehan Penambahan KDP (502)** senilai **Rp.28.350.000,- Satuan Kerja BRSODH Wasana Bahagia** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 28,350,000
	Jumlah	Rp 28,350,000

- Adanya transaksi **Perolehan Penambahan KDP (502)** senilai **Rp.20.752.800,- Satuan Kerja BPBI Abiyoso** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 20,752,800
	Jumlah	Rp 20,752,800

- Adanya transaksi **Perolehan Penambahan KDP (502)** senilai **Rp.2.670.000,- Satuan Kerja BRSPDSN Wyata Guna** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 2,670,000
	Jumlah	Rp 2,670,000

- Adanya transaksi **Perolehan Penambahan KDP (502)** senilai **Rp.200.591.500,- Satuan Kerja BBRSD Prof Dr Soeharso** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 200,591,500
	Jumlah	Rp 200,591,500

- Adanya transaksi **Perolehan Penambahan KDP (502)** senilai **Rp.19.500.000,- Satuan Kerja BRSPDM Phalamarta** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 19,500,000
	Jumlah	Rp 19,500,000

- Terdapat transaksi **Perolehan Penambahan KDP (502)** pada Satuan Kerja **BRSPDF Wirajaya** senilai **Rp. 51.615.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 51,615,000
	Jumlah	Rp 51,615,000

- Terdapat transaksi **Perolehan Penambahan KDP (502)** pada Satuan Kerja **BRSRLU Gau Mabaji Makasar** senilai **Rp. 224.995.900,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 224,995,900
	Jumlah	Rp 224,995,900

- Terdapat transaksi **Perolehan Penambahan KDP (502)** pada Satuan Kerja **BBRSBG Kartini Temanggung** senilai **Rp. 47.964.200,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 47,964,200
	Jumlah	Rp 47,964,200

- Terdapat transaksi **Perolehan Penambahan KDP (502)** pada Satuan Kerja **BBRVBD Cibinong** senilai **Rp. 25.037.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 25,037,000
	Jumlah	Rp 25,037,000

- Terdapat transaksi **Perolehan Penambahan KDP (502)** pada Satuan Kerja **BRSEGP Pangudi Luhur Bekasi** senilai **Rp. 29.500.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 29,500,000
	Jumlah	Rp 29,500,000

- Terdapat transaksi **Perolehan Penambahan KDP (502)** pada Satuan Kerja **BRSKPNAPZA Satria** senilai **Rp. 122.868.250,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 122,868,250
	Jumlah	Rp 122,868,250

- Terdapat transaksi **Perolehan Penambahan KDP (502)** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Handayani** senilai **Rp. 64.420.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 64.420.000
	Jumlah	Rp 64.420.000

- Terdapat transaksi **Perolehan Penambahan KDP (502)** pada Satuan Kerja **BRSLU Budi Darma** senilai **Rp. 13.985.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 13,985,000
	Jumlah	Rp 13,985,000

- Terdapat transaksi **Perolehan Penambahan KDP (502)** pada Satuan Kerja **LRSAMPK Darusaadah** senilai **Rp. 200.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 200,000,000
	Jumlah	Rp 200,000,000

- Terdapat transaksi **Perolehan Penambahan KDP (502)** pada Satuan Kerja **BRSKPNAPZA Bambu Apus** senilai **Rp. 67.720.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 67,720,000
	Jumlah	Rp 67,720,000

- Terdapat transaksi **Perolehan Penambahan KDP (502)** pada Satuan Kerja **BRSPDSN Tan Miyat** senilai **Rp. 25.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 25,000,000
	Jumlah	Rp 25,000,000

- Terdapat transaksi **Perolehan Penambahan KDP (502)** pada Satuan Kerja **BRSPDI Nipotowe** senilai **Rp. 362.350.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 36,235,000
	Jumlah	Rp 36,235,000

(05) DITJEN LINJAMSOS

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.05.00.440275			
	Direktorat PSKBA	1	91,520,000
	Peralatan dan Mesin dalam pengerjaan	1	91,520,000

(11) BADIKLITPENSOS

Terdapat Transaksi Perolehan/penambahan KDP pada BP3S senilai Rp.1.210.707.970,- pada satker:

- Sekretariat BP3S

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
027110199369059000KP - SEKRETARIAT BADIKLIT PENSOS				
1	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan		1	553.075.600
2	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan		1	84.904.545
TOTAL				637.980.145

- i. Perolehan KDP Peralatan dan Mesin merupakan pembayaran Termin I pengadaan Interior ruang kelas A (Bawah) pada Pusdiklat Kesos senilai Rp.553.075.600,-
- ii. Perolehan KDP Aset Tetap Lainnya merupakan pembayaran Termin I Konsultan Perencana Renovasi Gedung Kantor Pusdiklat Kesos senilai Rp.84.904.545,-

• **STKS Bandung**

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027110200369070000KD			
	STKS BANDUNG	1	459.794.750
	Tanah Dalam Pengerjaan	1	31.600.000
	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	4	428.194.750

• **B2P3KS Yogyakarta**

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027110400369202000KD			
	B2P3KS YOGYAKARTA	1	82.373.500
	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	1	82.373.500

• **BBPPKS Banjarmasin**

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027111500369752000KD			
	BBPPKS BANJARMASIN	1.230	115.463.820
	Tanah Dalam Pengerjaan	1	55.094.320
	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	12	55.074.300
	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	1.217	5.295.200

PENGEMBANGAN KDP

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Pengembangan KDP di Satker Setjen berupa:

No.	Nama Barang	Jml	Nilai	Ket
1	Peralatan dan Mesin dalam Pengerjaan	1	Rp 7.396.897.272	
	TOTAL	1	Rp 7.396.897.272	

NAMA BARANG	NO AWAL	RPH KDP	NAMA KONTRAK
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	1	2,700,000	
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	1	666,962,727	PT.BANGUN NUSAINDO PRIMA
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	1	2,000,888,182	PT.BANGUN NUSAINDO PRIMA
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	1	18,900,000	PT.BANGUN NUSAINDO PRIMA
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	1	3,450,000	PT.BANGUN NUSAINDO PRIMA
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	1	6,720,000	PT.BANGUN NUSAINDO PRIMA
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	1	75,500,000	PT.BANGUN NUSAINDO PRIMA
Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	1	4,621,776,363	PT.BANGUN NUSAINDO PRIMA

(03) DITJEN. DAYASOS

Terjadi transaksi Pengembangan KDP pada Satker K2KRS di Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata sebesar Rp. 5.123.302.932,- sebagai berikut:

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027030199440213000KP			
	Dit K2KRS		5.123.302.932
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	5.123.302.932
	Tanah Dalam Pengerjaan	0	5.123.302.932

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi Penambahan nilai neraca *Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)* dengan transaksi *Pengembangan KDP (503) 31 Desember 2019*, dengan rincian sebagai berikut (data terlampir) :

- Terdapat transaksi *Pengembangan KDP (503)* pada Satuan Kerja *Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial* senilai Rp. 28.240.607.203,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 28,240,607,203
	Jumlah	Rp 28,240,607,203

- Terdapat transaksi *Pengembangan KDP (503)* pada Satuan Kerja *BRSLU Gau Mabaji* senilai Rp. 586.657.100,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 586,657,100
	Jumlah	Rp 586,657,100

- Terdapat transaksi **Pengembangan KDP (503)** pada Satuan Kerja **BRSBG Kartini** senilai **Rp. 1.812.035.800,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 1,812,035,800
	Jumlah	Rp 1,812,035,800

- Terdapat transaksi **Pengembangan KDP (503)** pada Satuan Kerja **Satria Batu Raden** senilai **Rp. 21.616.750,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 21.616.750
	Jumlah	Rp 21.616.750

- Terdapat transaksi **Pengembangan KDP (503)** pada Satuan Kerja **BRSPDM Phalamarta** senilai **Rp. 363.765.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 363,765,000
	Jumlah	Rp 363,765,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan KDP (503)** pada Satuan Kerja **BRSAMPK Handayani** senilai **Rp. 1.023.250.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 1,023,250,000
	Jumlah	Rp 1,023,250,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan KDP (503)** pada Satuan Kerja **BRSODHA Wasana Bahagia Ternate** senilai **Rp. 370.899.500,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 370,899,500
	Jumlah	Rp 370,899,500

- Terdapat transaksi **Pengembangan KDP (503)** pada Satuan Kerja **BPBI Abiyoso** senilai **Rp. 200.456.200,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 200,456,200
	Jumlah	Rp 200,456,200

- Terdapat transaksi **Pengembangan KDP (503)** pada Satuan Kerja **BRSPDF Wirajaya** senilai **Rp. 8.767.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 8,767,000
	Jumlah	Rp 8,767,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan KDP (503)** pada Satuan Kerja **BBRSBD Prof Dr Soeharso Surakarta** senilai **Rp. 3.009.714.698,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 3,009,714,698
	Jumlah	Rp 3,009,714,698

- Terdapat transaksi **Pengembangan KDP (503)** pada Satuan Kerja **BRSPDM Margo Laras** senilai **Rp. 273.892.500,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 273,892,500
	Jumlah	Rp 273,892,500

- Terdapat transaksi **Pengembangan KDP (503)** pada Satuan Kerja **BRSKPNAPZA Bambu Apus** senilai **Rp. 1.092.352.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 1,092,352,000
	Jumlah	Rp 1,092,352,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan KDP (503)** pada Satuan Kerja **BRSLU Budi Darma** senilai **Rp. 185.298.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 185,298,000
	Jumlah	Rp 185,298,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan KDP (503)** pada Satuan Kerja **BRSPDSN Tan Miyat** senilai **Rp. 474.100.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 474,100,000
	Jumlah	Rp 474,100,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan KDP (503)** pada Satuan Kerja **BRSPDI Nipotowe** senilai **Rp. 29.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 29,000,000
	Jumlah	Rp 29,000,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan KDP (503)** pada Satuan Kerja **BBRVBD Cibinong** senilai **Rp. 339.545.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 339,545,000
	Jumlah	Rp 339,545,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan KDP (503)** pada Satuan Kerja **BRSEGP Pangudi Luhur Bekasi** senilai **Rp. 417.310.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 417,310,000
	Jumlah	Rp 417,310,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan KDP (503)** pada Satuan Kerja **BRSPDSN Wyata Guna Bandung** senilai **Rp. 236.505.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 236,505,000
	Jumlah	Rp 236,505,000

- Terdapat transaksi **Pengembangan KDP (503)** pada Satuan Kerja **LRSAMPK Darusaadah** senilai **Rp. 174.650.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 174,650,000
	Jumlah	Rp 174,650,000

(05) DITJEN LINJAMSOS

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.05.00.440275			
Direktorat PSKBA		1	366,080,000
	Peralatan dan Mesin dalam pengerjaan	1	366,080,000

(11) BADIKLITPENSOS

Terdapat transaksi Pengembangan KDP pada BP3S senilai Rp.110.095.411.201,- pada satker:

- Sekretariat BP3S

SATKER/NO	NAMA BARANG	SAT	QTY	NILAI ASET
027110199369059000KP - SEKRETARIAT BADIKLIT PENSOS				
1	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan		0	1.659.226.800
TOTAL				1.659.226.800

Pengembangan KDP Peralatan dan Mesin merupakan pembayaran Termin II, III dan IV pengadaan Interior ruang kelas A (Bawah) pada Pusdiklat Kesos senilai Rp.1.659.226.800,-

- **BBPPKS Banjarmasin**

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027111500369752000KD			
	BBPPKS BANJARMASIN		32.194.571.063
	Tanah Dalam Pengerjaan		10.853.577.200
	Peralatan dan mesin Dalam pengerjaan		5.212.030.200
	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan		16.128.963.663

- **BBP3KS Yogyakarta senilai Rp. 2.325.730.800**

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027.11.369070			
	B2P3KS YOGYAKARTA		2.325.730.800
	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan		2.325.730.800

- **Poltek Kesos**

SATKER	NAMA BARANG	KUANTITAS	NILAI ASET
027110200369070000KD			
	STKS BANDUNG	0	73.915.882.538
	Tanah Dalam Pengerjaan	0	72.418.205.888
	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	0	1.497.676.650

KOREKSI NILAI KDP

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi Penambahan nilai neraca **Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)** dengan transaksi **Koreksi Nilai KDP (504) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Transaksi **Koreksi Nilai KDP (504)** senilai (**Rp. 405.082.445,-**) dikarenakan adanya nilai perencanaan yang belum dilaksanakan untuk pembangunan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) pada **Pusat Rehabilitasi Sosial di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan** berdasarkan **Berita Acara Reklasifikasi Masuk dan Koreksi Nilai / Kuantitas/Koreksi Nilai KDP / Saldo Awal KDP BMN Nomor:30/2.1/PL.01/12/2019** pada **Satuan Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial**.

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (405,082,445)
	Jumlah	Rp (405,082,445)

(11) BADIKLITPENSOS

Terdapat transaksi koreksi nilai KDP senilai Rp.(1.018.660.163),- pada satker

- **BBPPKS Banjarmasin dengan rincian sebagai berikut :**
 Transaksi koreksi nilai KDP dikarenakan :
 - 1.Koreksi nilai KDP dikarenakan denda pinalti keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan nilai Rp. 1,207,121,-
 - 2.Koreksi nilai KDP Pengembalian uang muka dari penyedia jasa sebelumnya karena adanya pemutusan kontrak dengan nilai Rp.1,013,769,442,-
 - 3.Koreksi nilai KDP Pengembalian karena kelebihan bayar dengan nilai Rp.3,683,600,-

REKLASIFIKASI KDP MENJADI BARANG JADI

(01) SEKRETARIAT JENDERAL

Terdapat Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi di Satker Setjen berupa:

No.	Nama Barang	Jml	Nilai	Ket
1	Peralatan dan Mesin dalam Pengerjan	1	Rp 7.496.397.272	
	TOTAL	1	Rp 7.496.397.272	

NAMABARANG	NOAWAL	NO.AKHIR	TGL BUKU	TGL PEROLEH	KONDISI	KUANTITAS	RPHASET
Elevator /Lift	13	13	20-12-2019	20-12-2019	Baik	1	7,496,397,272

(03) DITJEN. DAYASOS

Terjadi Transaksi Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi pada Satker Dit. K2KRS sebesar Rp. 7.047.932.000,- sebagai berikut:

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027030199440213000KP			
	Dit K2KRS	(2)	(7.047.932.000)
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	(2)	(7.047.932.000)
	Tanah Dalam Pengerjaan	-2	(7.047.932.000)

Terjadi Transaksi Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi dari Tanah Dalam Pengerjaan menjadi Tanah peruntukan untuk Makam Pahlawan Di satker Dit 2KRS sebesar Rp. 7.047.932.000,-

(04) DITJEN REHABILITASI SOSIAL

Mutasi Kurang nilai neraca **Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)** dengan transaksi **Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599) 31 Desember 2019**, dengan rincian sebagai berikut :

- Transaksi **Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599)** senilai (**Rp.28.689.934.245,-**) dikarenakan adanya **Pembangunan Pusat Rehabilitasi ODHIV di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan**, yang menggunakan termin pembayaran pada realisasi belanja pada Satuan Kerja **Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (28,689,934,245)
	Jumlah	Rp (28,689,934,245)

- Transaksi **Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599)** senilai (**Rp.346.130.000,-**) Satuan Kerja **BRSPDM Margo Laras** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (346,130,000)
	Jumlah	Rp (346,130,000)

- Transaksi **Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599)** senilai (**Rp.399.249.500,-**) Satuan Kerja **BRSODHA Wasana Bahagia** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (399,249,500)
	Jumlah	Rp (399,249,500)

- Transaksi **Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599)** senilai (**Rp.221.209.000,-**) Satuan Kerja **BPBI Abiyoso** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (221,209,000)
	Jumlah	Rp (221,209,000)

- Transaksi **Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599)** senilai (**Rp.239.175.000,-**) Satuan Kerja **BRSPDSN Wyata Guna** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (239,175,000)
	Jumlah	Rp (239,175,000)

- Transaksi **Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599)** senilai (**Rp.60.382.000,-**) Satuan Kerja **BRSPDF Wirajaya** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (60,382,000)
	Jumlah	Rp (60,382,000)

- Transaksi **Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599)** senilai (**Rp.446.810.000,-**) Satuan Kerja **BRSEGP Pangudi Luhur** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (446,810,000)
	Jumlah	Rp (446,810,000)

- Transaksi **Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599)** senilai (**Rp.144.485.000,-**) Satuan Kerja **BRSKPNAPZA Satria** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (144,485,000)
	Jumlah	Rp (144,485,000)

- Transaksi **Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599)** senilai (**Rp.1.087.670.000,-**) Satuan Kerja **BRSAMPK Handayani** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (1,087,670,000)
	Jumlah	Rp (1,087,670,000)

- Transaksi **Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599)** senilai (Rp.364.852.000,-) Satuan Kerja **BBRVBD Cibinong** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (364,852,000)
	Jumlah	Rp (364,852,000)

- Transaksi **Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599)** senilai (Rp.374.650.000,-) Satuan Kerja **LRSAMPK Darusaadah** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (374,650,000)
	Jumlah	Rp (374,650,000)

- Transaksi **Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599)** senilai (Rp.3.210.306.198,-) Satuan Kerja **BBRSBD Prof Dr Soeharso** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (3,210,306,198)
	Jumlah	Rp (3,210,306,198)

- Transaksi **Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599)** senilai (Rp.1.860.000.000,-) Satuan Kerja **BBRSBG Kartini** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (1,860,000,000)
	Jumlah	Rp (1,860,000,000)

- Transaksi **Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599)** senilai (Rp.811.653.000,-) Satuan Kerja **BRSLU Gau Mabaji** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (811,653,000)
	Jumlah	Rp (811,653,000)

- Transaksi **Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599)** senilai (Rp.1.160.072.000,-) Satuan Kerja **BRSKPN Bambu Apus** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (1.160.072.000)
	Jumlah	Rp (1.160.072.000)

- Transaksi **Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599)** senilai (Rp. 383.265.000,-) Satuan Kerja **BRSPDM Phala martha** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (383.265.000)
	Jumlah	Rp (383.265.000)

- Transaksi **Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599)** senilai (Rp. 199.283.000,-) Satuan Kerja **BRSLU Budhi Dharma** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (199.283.000)
	Jumlah	Rp (199.283.000)

- Transaksi **Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599)** senilai (Rp. 499.100.000,-) Satuan Kerja **BRSPDSN Tan Miyat** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp 499.100.000
	Jumlah	Rp 499.100.000

- Transaksi **Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi (599)** senilai (Rp. 391.350.000,-) Satuan Kerja **BRSPDI Nipotowe PAIu** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai
1	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	Rp (391.350.000)
	Jumlah	Rp (391.350.000)

(05) DITJEN LINJAMSOS

Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

027.05.00.440275			
	Direktorat PSKBA	(8)	(457,600,000)
	Peralatan dan Mesin dalam pengerjaan	(8)	(457,600,000)

(11) BADIKLITPENSOS

Terdapat transaksi Reklasifikasi KDP menjadi barang jadi pada satker :

No	SATKER	KUANTITAS	NILAI
1	Sekretariat BP3S	0	(2.212.302.400)
2	STKS Bandung	0	(74.375.677.288)
3	B2P3KS Yogyakarta	0	(2.408.104.300)
4	BBPPKS Banjarmasin	0	(31.291.375.020)
Jumlah			(110.287.459.008)

Rincian KDP Tahun Perolehan Tahun 2019 sebagai berikut:

No	SATKER	TAHUN PEROLEHAN	NILAI
1	Sekretariat BP3S	2019	553.075.600
2	STKS Bandung	2019	459.794.750
3	B2P3KS Yogyakarta	2019	82.373.500
4	BBPPKS Banjarmasin	2019	115.464.120
Jumlah			1.210.707.970

Rincian KDP Tahun Perolehan Sebelum Tahun 2019 sebagai berikut:

No	SATKER	JENIS KDP	TAHUN PEROLEHAN	NILAI
1	STKS Bandung	KDP Gedung dan Bangunan	2016	34.012.100
2	BBPPKS Padang	KDP Tanah	2017	41.627.000
Jumlah				75.639.100

BMN Berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2018 per *31 Desember 2019* (Audited) adalah sebanyak 5 unit. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 5 unit, mutasi tambah sebanyak 0 unit, dan mutasi kurang sebanyak 0 unit.

Mutasi Tambah BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS
Perolehan Barang Bersejarah	0
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (positif)	0

Mutasi Kurang BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

URAIAN JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS
Perubahan/Koreksi Barang Bersejarah (negatif)	0
Penghapusan Barang Bersejarah	0

Berdasarkan data diatas terdapat barang bersejarah sebanyak 5 unit yang berada di Unit Dit. KKKRS sebanyak 2 unit, Pusdiklat Kesos sebanyak 2 unit dan BBRSPDF "Prof. DR. Soeharso Solo sebanyak 1 Unit. Data tersebut di input sebagai saldo awal barang bersejarah pada tahun 2007 dan 2008.

E.2.3.4. BMN Rusak Berat

Pada saat suatu BMN diketahui kondisinya rusak, Satuan Kerja melakukan perubahan kondisi BMN dengan menerbitkan surat keterangan atas kondisi BMN tersebut. Pengguna Barang mengusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan atas BMN tersebut dengan menyertakan syarat-syarat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Setelah Pengguna Barang melakukan pengusulan kepada Pengelola Barang, selanjutnya Satuan Kerja melakukan reklasifikasi BMN tersebut ke dalam Daftar Barang Rusak Berat. Dampak dari proses reklasifikasi tersebut adalah tidak dicantumkannya BMN tersebut di dalam Laporan Barang Pembantu Pengguna Barang E1, Posisi BMN di Neraca, dan Buku Barang. (Proses reklasifikasi dilakukan melalui menu reklasifikasi BMN ke dalam Daftar Barang Rusak Berat pada aplikasi SIMAK-BMN). Penyusutan tidak dilakukan terhadap BMN yang masuk dalam Daftar Barang Rusak Berat.

Nilai BMN yang masuk dalam Daftar Barang Rusak Berat per [31 Desember 2019 \(Audited\)](#) sebesar [Rp. 1.126.216.808,-](#) (rincian terlampir)

E.2.3.5. BMN Hilang

Pada saat suatu BMN dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah, Pengguna Barang mengusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan atas BMN tersebut dengan menyertakan syarat-syarat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Setelah Pengguna Barang melakukan pengusulan kepada Pengelola Barang, selanjutnya Satuan Kerja melakukan reklasifikasi BMN tersebut ke dalam Daftar Barang Hilang. Dampak dari proses reklasifikasi tersebut adalah tidak dicantumkannya BMN tersebut di dalam Laporan Barang Pembantu Pengguna Barang E1, Posisi BMN di Neraca, dan Buku

Barang. (Proses reklasifikasi dilakukan melalui menu reklasifikasi BMN ke dalam Daftar Barang Hilang pada aplikasi SIMAK-BMN). Penyusutan tidak dilakukan terhadap BMN yang masuk dalam Daftar Barang Hilang. Dalam hal BMN berupa Aset Tetap yang dinyatakan hilang ditemukan kembali, dilakukan pencatatan sebagaimana perolehan BMN, yaitu:

- a. Dicatat sebagai transaksi perolehannya apabila diperoleh pada tahun anggaran berjalan.**
- b. Dicatat sebagai transaksi saldo awal apabila diperoleh sebelum tahun anggaran berjalan.**

Nilai BMN yang masuk dalam Daftar Barang Hilang per **31 Desember 2019 (Audited)** sebesar **Rp. 0,- (rincian terlampir)**

E.2.3.6. Usulan BMN Hibah (DK/TP)

Pada saat suatu BMN (DK/TP) oleh Pengguna Barang dilakukan usulan hibah kepada Pengelola Barang dengan menyertakan syarat-syarat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Setelah Pengguna Barang melakukan pengusulan kepada Pengelola Barang, selanjutnya Satuan Kerja melakukan reklasifikasi BMN tersebut ke dalam Daftar Barang Usulan BMN Hibah (DK/TP). Dampak dari proses reklasifikasi tersebut adalah tidak dicantumkan BMN tersebut di dalam Laporan Barang Pembantu Pengguna Barang E1, Posisi BMN di Neraca, dan Buku Barang. (Proses reklasifikasi dilakukan melalui menu Usulan BMN Hibah (DK/TP) pada aplikasi SIMAK-BMN). Penyusutan tidak dilakukan terhadap BMN yang masuk dalam Daftar Barang Usulan BMN Hibah (DK/TP).

Nilai BMN yang masuk dalam Daftar Barang Hibah (DK/TP) per **31 Desember 2019 (Audited)** sebesar **Rp. 11.171.714.350,- (rincian terlampir)**

F. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2019 per 31 Desember 2019 (Audited) per akun neraca adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN NERACA	LAPORAN BARANG	LAPORAN KEUANGAN	SELISIH
1	Persediaan	455.884.848.039	455.884.848.039	-
2	Tanah	18.532.038.706.705	18.532.038.706.705	-
3	Peralatan dan Mesin	1.904.924.241.165	1.904.924.241.165	-
4	Gedung dan Bangunan	1.798.628.848.267	1.798.628.848.267	-
5	Jalan dan Jembatan	46.551.709.875	46.551.709.875	-
6	Irigasi	38.341.743.268	38.341.743.268	-
7	Jaringan	17.770.229.691	17.770.229.691	-
8	Aset Tetap dalam Renovasi	7.153.651.140	7.153.651.140	-
9	Aset Tetap Lainnya	14.836.358.922	14.836.358.922	-
10	KDP	281.836.313	281.836.313	-
11	Software	98.151.352.706	98.151.352.706	-
12	Lisensi	190.850.000	190.850.000	-
13	Aset Tak Berwujud	196.625.000	196.625.000	-
14	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	26.060.951.592	26.060.951.592	-
15	Aset tak berwujud yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	237.023.052	237.023.052	-
TOTAL		22.941.248.975.735	22.941.248.975.735	-

2. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan–permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain :

- a. Unit akuntansi barang tidak dapat melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan SIMAK BMN;
- b. Tidak dapatnya melakukan inventarisasi atas BMN yang dikuasainya dalam rangka mendukung keandalan laporan BMN.

3. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada K/L, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. Perlu adanya pembinaan lebih lanjut terhadap petugas SIMAK-BMN.
- b. Perlu adanya komitmen pimpinan tingkat satker maupun tingkat pusat untuk meningkatkan SDM terhadap petugas SIMAK-BMN.
- c. Perlu adanya komitmen dari bagian Sak dalam menyampaikan dokumen kepada bagian SIMAK-BMN sebagai bahan pendukung untuk penyusunan laporan BMN

- d. Perlu adanya pendampingan dan monitoring terhadap satker dekonsentrasi dalam menyusun dan menyampaikan laporan BMN kepada Kementerian Sosial RI terkait penggunaan anggaran dekonsentrasi yang digunakan untuk belanja modal.

G. CATATAN PENTING LAINNYA

KEBIJAKAN PENILAIAN KEMBALI BMN

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:

- 1) *“Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/Daerah.”*
- 2) *“Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.”*

Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap:

- a. Tanah,
- b. Gedung dan bangunan, dan
- c. Jalan, irigasi, dan jaringan yang meliputi:
 - 1) Jalan dan jembatan, dan
 - 2) Bangunan air

Pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S- 761/MK.06/2017 tanggal 14 September 2017 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan setelah pencanangan pada tanggal 29 Agustus 2017.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah. Untuk Kementerian Sosial RI, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN mulai tahun 2017 dan selesai tahun 2019.

Rincian rekapitulasi hasil Penilaian Kembali BMN sebagaimana terlampir.

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEMBALI BMN
Pada Kementerian Sosial RI
Per 31 Desember 2019

No.	Uraian Barang	Jumlah NUP	Nilai BMN	
			Nilai Buku Administrasi	Nilai Wajar
1	Tanah	270	3.541.430.778.409	18.452.279.292.569
2	Gedung dan Bangunan	4.807	608.300.173.981	918.612.562.000
3	JJBA	273	19.843.051.467	31.055.126.000
	Total	5.350	4.169.574.003.857	19.401.946.980.569

Sehubungan dengan pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, BPK RI merekomendasikan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang untuk memperbaiki data hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN. Sesuai surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S- 44/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017- 2018, guna menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, Pengguna Barang telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mereviu dan memperbaiki data hasil inventarisasi untuk kemudian dilakukan penilaian kembali oleh Kementerian Keuangan berdasarkan data inventarisasi yang telah dilakukan perbaikan;
2. Menelusuri kembali Aset Tetap yang menjadi objek penilaian kembali BMN; dan
3. Melakukan tindak lanjut atas barang tidak ditemukan dan barang dalam sengketa.

Dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut, telah dilakukan perbaikan penilaian kembali terhadap objek yang menjadi temuan pemeriksaan. Selain itu, juga dilakukan pengujian dan perbaikan atas hasil penilaian kembali di luar objek temuan BPK yang telah dilakukan sebagai dampak dari adanya temuan pemeriksaan pada Pengelola Barang.

Hasil perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, sebanyak **5350 NUP** dengan total nilai kenaikan/penurunan nilai BMN sebesar **Rp 154.803.679.454** yang berasal dari nilai wajar sebelum perbaikan sebesar **Rp 19.247.143.301.115** dan nilai wajar setelah perbaikan sebesar **Rp 19.401.946.980.569**

Rincian rekapitulasi hasil perbaikan Penilaian Kembali BMN sebagaimana terlampir.

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN PENILAIAN KEMBALI BMN
Pada Kementerian Sosial RI
Per 31 Desember 2019

No.	Uraian Barang	Jumlah NUP	Nilai BMN		Kenaikan/ Penurunan
			Nilai Wajar Sebelum Perbaikan	Nilai Wajar Setelah Perbaikan	
1	Tanah	270	18.258.748.490.115	18.452.279.292.569	193.530.802.454
2	Gedung dan Bangunan	4807	963.468.426.000	918.612.562.000	- 44.855.864.000
3	JJBA	273	24.926.385.000	31.055.126.000	6.128.741.000
	Total	5.350	19.247.143.301.115	19.494.718.498.115	247.575.197.000

SEKRETARIAT JENDERAL

- Terdapat permasalahan pada Aset tanah dan Bangunan yang telah memiliki bukti kepemilikan tetapi masih dikuasai oleh pihak lain. Dengan Rincian Sebagai berikut :

Laporan Barang Milik Negara Kementerian Sosial RI Tahunan Tahun 2019 per 31 Desember 2019 (Audited)

NO	Kode Barang	Nama Barang	Alamat	Tanggal Perolehan	Kuantitas (m ²)	Status kepemilikan	NILAI	Keterangan/Digunakan	
1	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. TB.Simatupang. Pasar Rebo (Komnas Anak)	20-12-2010	960	SHP	Rp 3.596.160.000	Kantor Komnas Anak	
2	2010101005	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	Jl.Kanguru. Kampung Gedong.Pasar Rebo (Belakang Kantor Komnas Anak)	20-12-2010	1.327	SHP	Rp 2.072.774.000	Masyarakat. pesiunan depsos	
6	2010301003	Tanah Lapangan Badminton/Bulutan gkis	Jl. Depsos X Bintaro. Jakarta Selatan	30-06-1972	263	SHP	Rp 3.314.852.000		
7	2010301003	Tanah Lapangan Badminton/Bulutan gkis	Jl. Depsos XIV Bintaro. Jakarta Selatan	30-06-1972	251	SHP	Rp 1.462.064.000		
8	2010301003	Tanah Lapangan Badminton/Bulutan gkis	Jl. Depsos XIII Bintaro. Jakarta Selatan	02-01-1971	116	SHP	Rp 3.163.604.000		
9	2010301002	Tanah Lapangan Basket	Jl. Depsos III Bintaro (Depan masjid Komplek)	30-06-1972	1.930	SHP	Rp 24.325.720.000		
10	2010301001	Tanah Lapangan Tennis	Jl. Depsos XII Bintaro. Jakarta Selatan	02-01-1971	909	SHP	Rp 11.457.036.000		
11	2010106001	Tanah Untuk Bangunan Masjid	Jl. Depsos XIII Bintaro. Jakarta Selatan	02-01-1976	1.216	SHP	Rp 15.326.464.000		
12	2010104999	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	Jl. Depsos II Bintaro. Jakarta Selatan	02-01-1976	442	SHP	Rp 5.570.968.000		
13	2010104018	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	Jl. Depsos II Bintaro. Jakarta Selatan	02-01-1976	79	SHP	Rp 995.716.000		
14	2010104007	Tanah Bangunan Poliklinik	Jl. Depsos X No.1 dan 2 Bintaro. Jakarta Selatan (Aula sentra keg.warga kompleks)	02-01-1976	413	SHP	Rp 5.205.452.000		Digunakan Masyarakat kompleks depsos. tp ada oknum yg memungut sewa bangunannya (seharusnya jadi PNBPN)
15	2010104002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	Jl. Depsos II Bintaro. Jakarta Selatan (TK Tat Twan Asi)	30-06-1972	726	SHP	Rp 9.276.544.000		Digunakan untuk masyarakat umum sebagai sekolah TK (seharusnya jadi PNBPN)
16	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Jl. Depsos XIV Bintaro No. 17	30-06-1972	124	SHP	Rp 1.562.896.000	Dikuasai eks.pesiunan depsos/Umang	
17	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Jl. Depsos XIII Bintaro No.6	30-06-1972	131	SHP	Rp 1.651.124.000	Dikuasai eks.pesiunan depsos/Loso	
18	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Jl. Depsos X No.17 A RTT Gol. II Bintaro an. Elmaren T	03-12-1972	120	SHP	Rp 1.512.480.000	Dikuasai eks.pesiunan depsos/Elmaren	
19	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	jl. Depsos XI no. 39	02-01-1976	321	SHP	Rp 4.045.884.000	Dikuasai eks.pesiunan depsos/Yoso	

- Terdapat permasalahan pada Aset tanah dan Bangunan belum memiliki bukti kepemilikan dan dikuasai oleh pihak lain. Dengan Rincian Sebagai berikut :

TEMUAN	RENCANA TINDAK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
<p>Aset tetap senilai Rp. 22,501 Miliar masih bermasalah dan senilai Rp. 706,034 Miliar dimanfaatkan pihak lain serta senilai Rp. 15,841 Miliar belum memiliki bukti kepemilikan; yaitu:</p>	
<p>Tanah dan bangunan senilai Rp. 22,501 Miliar dalam sengketa dengan pihak ketiga dan dalam proses peradilan.</p>	<p>1. Tanah seluas 700 m berikut bangunannya di Jl. Bangunan Barat No.2 Kampung Ambon, Jakarta Timur senilai Rp. 14,861 milyar menjadi aset Kementerian Sosial setelah dilakukan serah terima dari pihak Kejaksaan Negeri Ambon pada tanggal 19 April 1982 kepada Departemen Sosial berdasarkan Surat Perintah Kepada Kejaksaan Tinggi Maluku No. Prin01/01/1982 dan Surat Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung RI tanggal 11 Februari 1982 No. B348/II3/11/1982 tentang barang-barang ex. milik Drs. H.R. Hollo, S.Th. Tanah tersebut bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan masa 20 tahun, berakhir 26 Mei 1995. Atas nama Muhammad Bilfaqih. Hingga saat ini tanah tersebut masih dikuasai pihak ketiga dengan dasar perjanjian jual beli No. 220 tanggal 26 September 1986 dihadapan notaris. Fakta yang ada dilapangan bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut tidak diketahui siapa yang menyimpan dan sudah dilaporkan sebagai barang hilang kepada pihak kepolisian. Selain itu dokumen asli persetujuan Menteri Keuangan RI dan serah terima antara Kejaksaan Negeri Ambon dengan Kementerian Sosial sudah tidak diketahui dimana aslinya, yang ada saat ini hanya foto copynya saja. Dari hasil penelusuran bahwa aset tersebut sebelum diterima oleh Kementerian Sosial pada masa lalu telah diserobot oleh Keluarga Hollo yang dijual kepada Keluarga Asep Ahmad, sehingga sampai saat ini Kementerian Sosial mengalami kesulitan atas bukti Kepemilikan terhadap putusan pengadilan. Halhal tersebut diketahui berdasarkan kronologis (cerita), sedangkan dokumen yang terkait dengan penyerahan aset tersebut tidak pernah ada.</p>
	<p>2. Tanah seluas 1.911 m² berikut bangunan di Jl. Kolam No.12, Ciembeulit, Bandung senilai Rp. 7,64 miliar. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2680/Pdt/K/1998 tanggal 17 Februari 2000 pemilik yang sah atas tanah ini adalah Kementerian Sosial. Namun hingga sekarang bangunan dan tanah ini belum bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Sosial. Namun demikian permasalahan ini belum selesai begitu saja sehingga aset tersebut masih dicatat oleh Biro Umum dan akan diajukan kembali dengan mengajukan buktibukti baru oleh Pusat Kajian Hukum ke pengadilan Negeri Bandung.</p>
<p>Tanah dan bangunan senilai Rp.706,034 Miliar, dimanfaatkan/dikuasai oleh pihak lain tanpa perjanjian yang jelas.</p>	<p>Tanah seluas 74.000 m² dan senilai Rp. 706,034 Miliar di Jl. Karanganyar, Sawah Besar Jakarta Pusat masih dikuasai oleh masyarakat, sehingga pihak Kementerian Sosial tidak bisa memanfaatkan secara maksimal. Kementerian Sosial akan berupaya untuk memperoleh aset tersebut.</p>
<p>Tanah dan bangunan yang belum memiliki bukti kepemilikan senilai Rp 15,841 Miliar, yaitu :</p>	<p>Tanah seluas 700 m² senilai Rp. 14,861 Miliar di Jl. Pondasi ,Kampung Ambon, Pulogadung, Jakarta Timur masih dikuasai oleh pihak ketiga dan tanah seluas 420 m² senilai Rp. 980.280.000 di Jl. Subali III, Tugu, Semarang Jawa Tengah masih dikuasai oleh pihak ketiga (para pensiunan dan pegawai ex.kanwil depsos Jateng) sehingga pihak Kementerian Sosial tidak bisa memanfaatkan secara maksimal. Kementerian Sosial akan berupaya untuk memperoleh kembali aset tersebut.</p>

DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL**Satuan Kerja Dit PSPKKM**

Terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Unit Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat, ada beberapa catatan berikut :

1. Pada periode tahun 2019 Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat melakukan transaksi belanja persediaan dengan mata anggaran kegiatan (MAK) 526112 (belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat) berupa :

a.	60 Personal Komputer (PC)	@	Rp. 10.000.000,-	Rp. 600.000.000,-
b.	1.000 Tablet	@	Rp. 1.799.000,-	Rp. 1.799.000.000,-
c.	80 Notebook	@	Rp. 10.000.000,-	Rp. 800.000.000,-
d.	40 Office	@	Rp. 1.320.000,-	Rp. 52.800.000,-
e.	140 License	@	Rp. 150.000,-	Rp. 21.000.000,-
				Rp. 3.272.800.000,-

Semua belanja persediaan diatas sudah diserahkan kepada 20 pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai lokasi penumbuhan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Pada periode tahun 2019 Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat melakukan transaksi belanja modal dengan mata anggaran kegiatan (MAK) 536111 (belanja modal lainnya) berupa :

a.	1 Lisensi (Sistem Sipsukses)	Rp. 135.850.000,-
b.	1.Lisensi (Sipsukses real presence)	Rp. 16.500.000,-
c.	1 Lisensi (Sipsukses Integrator System)	Rp. 38.500.000,-
		Rp. 190.850.000,-

Satker Tugas Pembantuan yang terkena Revaluasi Aset di Tahun 2017 tetapi tidak ada pemberitahuan dari pihak KPKNL setempat untuk di lakukan Re Revaluasi Aset atau pengisian Form baru di tahun 2019 dikarenakan tidak termasuk prioritas utama adalah:

DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.03.029004			
	Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat	-	141.820.000
	Gedung dan Bangunan	-	141.820.000

DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.03.039161			
	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	-	143.437.000
	Gedung dan Bangunan	-	143.437.000

DINAS SOSIAL PROVINSI ACEH

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.03.069143			
	Dinas Sosial Provinsi Aceh	-	504.200.000
	Gedung dan Bangunan	-	504.200.000

DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.03.089141			
	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	-	467.204.000
	Gedung dan Bangunan	-	467.204.000

DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Satker	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
027.03.209115			
	Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	-	131.896.000
	Gedung dan Bangunan	-	131.896.000

SATUAN KERJA PADA SATKER K2KRS

Aset Tetap Dalam Renovasi yang berada di Timor Leste tetapi pencatatan ada di Dit K2KRS sebesar 350.000.000,- dalam proses penghapusan

Masih belum ada Persediaan diserahkan kepada Masyarakat Dalam-Proses sebesar Rp. 1.676.128.906,- dikarenakan masih belum ada BAST.

1. Pekerjaan jasa kontruksi pembangunan MPN sebagai Destinasi Wisata **Nomor SPK : 03/3.4/PL.03.03/destinasiwisata/08/2019 Tanggal 09 Agustus 2019** Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin. Jangka waktu pelaksanaan 09 Agustus s.d 06 Desember Perjanjian/Kontrak **Rp. 474.000.000.**
2. Pekerjaan Jasa Kontruksi Rehabilitasi TMPN Sulawesi Tengah **Nomor SPK : 02/3.4/PL.03.03/tmpnsulteng/08/2019 Tanggal 02 Agustus 2019** Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin. Jangka waktu pelaksanaan 02 Agustus s.d 29 November 2019 Perjanjian/Kontrak **Rp. 287.966.000.**
3. Pekerjaan Jasa Kontruksi Pemeliharaan MPN Gorontalo **Nomor SPK : 04/3.4/PL.03.03/mpngorontalo/08/2019 Tanggal 16 Agustus 2019** Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin. Jangka waktu pelaksanaan 16 Agustus s.d 13 November 2019 Perjanjian/Kontrak **Rp. 452.162.906.**
4. Pekerjaan Jasa Konstruksi Pemeliharaan MPN Gorontalo Tahap II **Nomor SPK: 04/3.4/PL.03.03/mpngorontalo2/10/2019 Tanggal 21**

Oktober 2019 Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara 2 Termin. Jangka waktu pelaksanaan 21 Oktober s.d 19 Desember 2019 Perjanjian/ Kontrak **Rp462.000.000**.

BAST dari Provinsi terhadap pekerjaan ini masih dalam proses karena masih dalam tahap pemeliharaan.

- Perlu dilakukan penyerahan Aset / Hibah dan likuidasi terhadap Satker-Satker yang sudah tidak aktif atau sudah tidak mendapatkan Dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan, sehingga dalam pelaporan pada tingkat Eselon I dan Kementerian hanya akan memunculkan Satker-Satker yang masih mendapatkan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan saja. Pada data Erekon masih terdapat Satker Inactive Bersaldo antara lain;

No	BAES1	KDSATKER	NMSATKER	KODE	AKUN	RPHREAL
1	02703	209115	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	TP	133111	131.896.000
	02703	209115	DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA	TP	137211	- 7.494.090
2	02703	039161	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH	TP	133111	143.437.000
	02703	039161	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH	TP	137211	- 7.881.155
3	02703	029004	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	TP	133111	141.820.000
	02703	029004	DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT	TP	137211	- 7.993.015
4	02703	239020	DINAS SOSIAL PROVINSI NTB	TP	132111	205.719.000
	02703	239020	DINAS SOSIAL PROVINSI NTB	TP	137111	- 174.861.150

DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL

- a. Pada **Satuan Kerja Direktorat KP NAPZA** masih terdapat barang persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat senilai **Rp. 87.262.558.140,-** dari pembangunan IPWL, PIE beserta sarana dan prasarana yang sampai dengan saat ini masih tercatat pada laporan persediaan, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	NILAI
Tanah Bangunan Untuk Dijual dan diserahkan Ke Masyarakat	76,627,390,481
Peralatan dan Mesin Bangunan Untuk Dijual dan diserahkan Ke Masyarakat	10,635,167,659
JUMLAH	87,262,558,140

Rekomendasi :

-Melakukan percepatan proses permohonan atas hibah berupa tanah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat (Direktorat KPNAPZA) sesuai dengan arah kebijakan operasional IPWL dikelola oleh Pemerintah Pusat.

- b. Pada **Satuan Kerja Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak** masih terdapat barang persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat senilai **Rp. 87.262.558.140,-** berupa **Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak Bantuan Dengan Hukum (LPKS ABH)**, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	NILAI
Tanah Bangunan Untuk Dijual dan diserahkan Ke Masyarakat	21,963,803,000
Peralatan dan Mesin Bangunan Untuk Dijual dan diserahkan Ke Masyarakat	6,351,566,467
Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk Di Serahkan Kepada Masyarakat	1,700,516,000
Aset Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1,386,026,850
JUMLAH	31,401,912,317

-Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk barang persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Direktorat KS Anak akan dilakukan proses pembuatan Naskah Perjanjian Hibah kepada setiap Provinsi penerima untuk dapat diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan Hibah BMN dari Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial RI.

- c. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Masih terdapat Konturksi Dalam Pengerjaan senilai **Rp.206.197.213,-** pada **Satuan Kerja Sekretariat Ditjen Rehabilitasi Sosial** dikarenakan adanya nilai perencanaan yang belum dilaksanakan untuk pembangunnn Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) pada Pusat Rehabilitasi Sosial di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan yang digunakan untuk membantu pelaksanaan tugas operasional kantor.

- d. Terdapat selisih pada Tranfer Keluar dan Transfer Masuk pada Satuan Kerja **BRSKPNAPZA Bambu Apus** dikarenakan adanya hasil revaluasi dan penilaian kembali berdasarkan LHIP Nomor : yang usualannya masih menggunakan Satuan Kerja lama (PSBR Bambu Apus), sedangkan untuk proses kapitalisasi asetnya untuk entitas lama melakukan penarikan data secar file csv tetapi pada entitas baru kapitalisasi asetnya menggunakan transaksi koreksi transfer masuk (323), dengan rincian sebagai berikut :

NAMA	NILAI
Tanah	67,029,050,000
Gedung dan Bangunan	5,805,109,000
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	4,284,225,291
Jalan dan Jembatan	852,978,000
JUMLAH	77,971,362,291

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Pada Direktorat Jaminan Sosial Keluarga:
 - a. Perbaikan Kode Akun yang semula 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin menjadi 536111 Belanja Modal Lainnya berupa Pekerjaan Pengadaan Renovasi Interior Lt 4 Gedung D Ruang Subdit Bansos senilai Rp 98.103.000,-. Nomor SP2D 191821302026117, tanggal SP2D 29-05-2019
 - b. Telah dilakukan penghapusan aset peralatan dan mesin karena *force majeure* (kebakaran) di PPKH (Pelaksana Program Keluarga Harapan) Kabupaten Timor Tengah Selatan senilai Rp (32.775.000),- sebanyak 38 buah;
 - c. Terdapat koreksi pencatatan terhadap Aset Tak Berwujud / Software karena kelebihan bayar berdasarkan LHP Kepatuhan – LK Kemensos Tahun 2018 sebagai berikut:
 - 1) Aplikasi Pendaftaran Rekrutmen senilai Rp 8.954.546,-
 - 2) Aplikasi Tata Kelola Survey SDM senilai Rp 163.900.000,-
 - 3) Aplikasi Tata Kelola Website Program Keluarga Harapan Rp 163.900.000,-

NO.	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	MERK/TYPE	NILAI PEROLEHAN	KOREKSI NILAI	NILAI BUKU
1	8010101001	366	Software Komputer	Aplikasi Pendaftaran Rekrutmen	Rp 954.875.000	Rp (8.954.546)	Rp 945.920.454
2	8010101999	2	Aset Tak Berwujud Lainnya	Aplikasi Tata Kelola Survey SDM	Rp 198.000.000	Rp (163.900.000)	Rp 34.100.000
3	8010101999	3	Aset Tak Berwujud Lainnya	Aplikasi Tata Kelola Website	Rp 198.000.000	Rp (163.900.000)	Rp 34.100.000
JUMLAH TOTAL					Rp 1.350.875.000	Rp (336.754.546)	Rp 1.014.120.454

- d. Melakukan Transfer Keluar berupa Aset Tetap Dalam Renovasi pekerjaan Renovasi Ruang Subdit Bansos Lantai 4 dan Ruang Kantor Lantai 1 ke Sekretariat Jenderal senilai Rp 209.863.000,- yang menambah nilai aset Gedung dan Bangunan.
2. Pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam:
 - barang persediaan yang bersumber dari belanja akun 52 tidak lagi dicatat pada aplikasi persediaan, Hal ini merupakan hasil audit pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas catatan laporan Direktorat PSKBA tahun 2017, Pencatatan atas barang dari akun 52 masih dicatat di Gudang Kementerian Sosial yang berada di Bekasi, Palembang dan Makassar, Sedangkan seluruh Gudang provinsi dan kabupaten/kota, pencatatannya dilakukan secara manual.
 - Terdapat Barang persediaan yang sudah kadaluarsa dalam proses penghapusan berupa:

No	Lokasi	Nama Barang		
		Mei Instan	Sambal Pedas	Makanan Anak
1	Gudang Bekasi	32,520 Bks	34,673 Botol	
2	Gudang Regional Palembang	12,600 Bks	600 Botol	200 Paket
3	Gudang Regional Makasar		5,000 Botol	
	Jumlah	45,120 Bks	40,273 Botol	200 Paket

3. Terdapat Persediaan berupa ATK berupa transfer masuk dan keluar yang kode barangnya tidak sesuai.

BADAN PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENYULUHAN SOSIAL

- Telah keluarnya surat persetujuan penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada BBPPKS Padang dengan nomor : S-15/MK.6/WKN.03/KNL.01/2020 pada tanggal 18 Februari 2020 dengan kode KDP 7.01.01.01.001 dengan jenis Tanah dalam Pengerjaan dengan tahun perolehan 2017 senilai Rp.41.627.000,-
- Perbaikan asersi untuk persediaan terjadi pada satker Pusdiklat Kesos yaitu berupa Peralatan dan mesin untuk dijual / diserahkan ke masyarakat berupa toolkit diklat fds senilai Rp.14.571.860.780,-
- Perbaikan asersi untuk peralatan dan mesin terjadi di satker BBPPKS Bandung yaitu berupa pembelian senilai Rp.80.128.500,- dan satker BBPPKS Jayapura berupa Reklasifikasi Keluar senilai Rp.(107.237.500),-
- Perbaikan asersi untuk Gedung dan Bangunan terjadi di satker Poltekesos Bandung berupa Koreksi Kesalahan Input IP senilai Rp.(5.969.585.000),- dan BBPPKS Makassar berupa Koreksi penilaian kembali BMN senilai Rp.63.007.000,-

Jakarta, 04 Mei 2020

SEKRETARIS JENDRAL,



HARTONO LARAS

NIP. 19630306 198503 1 005

**LAPORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TERKAIT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
KEMENTERIAN SOSIAL RI
PER 31 DESEMBER 2019**

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan tahun anggaran 2019 per 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 9.386.860.954,-** Penerimaan PNPB menunjukkan penerimaan yang cukup signifikan pemasukan negara adalah penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya, Pendapatan Penjualan Lainnya, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dan Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	PENDAPATAN
1	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya	
2	Pendapatan Pemindahan BMN Lainnya	1.488.003.700
3	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	152.683.386
4	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	
5	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	16.200.000
6	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	7.728.973.868
7	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000
JUMLAH		9.386.860.954

Jakarta, 04 Mei 2020

SEKRETARIS JENDRAL,



HARTONO LARAS

NIP. 19630306 198503 1 005

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
 POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2019
 TAHUN ANGGARAN 2019

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

Tanggal : 30/04/20 2:55 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_kl

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	7,990,376,411
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	27,944,000
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	98,591,193,481
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	31,558,594,906
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	1,700,516,000
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1,386,026,850
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	22,228,558,086
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam	5,130,176,957
117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	286,839,684,347
117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	13,759,717
117199	Persediaan Lainnya	418,017,284
131111	Tanah	18,532,038,706,705
132111	Peralatan dan Mesin	1,904,924,241,165
133111	Gedung dan Bangunan	1,798,628,848,267
134111	Jalan dan Jembatan	46,551,709,875
134112	Irigasi	38,341,743,268
134113	Jaringan	17,770,229,691
135111	Aset Tetap Renovasi	7,153,651,140
135121	Aset Tetap Lainnya	14,836,358,922
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	281,836,313
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,552,647,621,419)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(182,053,118,595)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(23,402,850,397)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(6,491,545,017)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(7,373,488,912)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(3,466,709,781)
162151	Software	98,151,352,706
162161	Lisensi	190,850,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	196,625,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	26,060,951,592
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	237,023,052
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(23,337,779,234)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(85,268,906,958)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(9,542,500)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan	(159,469,052)
J U M L A H		21,057,037,943,870

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
 POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2019 (SALDO AWAL)
 TAHUN ANGGARAN 2019

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

Tanggal : 30/04/20 1:55 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_kl

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	7,213,665,962
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	27,927,250
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	102,682,236,481
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	17,645,838,126
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	1,700,516,000
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	1,386,026,850
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	19,502,730,167
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	1,175,916,032
117131	Bahan Baku	1,805,750
117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	299,846,152,930
117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	17,562,386
117199	Persediaan Lainnya	564,941,957
131111	Tanah	18,247,980,067,897
132111	Peralatan dan Mesin	1,788,554,554,510
133111	Gedung dan Bangunan	1,744,588,039,068
134111	Jalan dan Jembatan	48,667,957,875
134112	Irigasi	30,824,046,668
134113	Jaringan	16,022,524,241
135111	Aset Tetap Renovasi	350,000,000
135121	Aset Tetap Lainnya	14,448,697,676
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	623,272,587
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,402,111,593,278)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(121,168,838,761)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(16,573,320,799)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(4,553,076,047)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(6,359,104,282)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(3,430,878,695)
162151	Software	86,297,896,087
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	8,316,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	27,222,866,531
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	231,083,052
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi	(24,837,883,183)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(72,659,127,907)
169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam	(178,275,302)
J U M L A H		20,814,020,227,829

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

Tanggal : 30/04/20 2:03 PM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_persediaan_kl_kel

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
10103	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	7,989,884,751
10107	NATURA DAN PAKAN	491,660
Jumlah Barang Konsumsi		7,990,376,411
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
10103	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	27,944,000
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		27,944,000
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
10105	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	98,591,193,481
Jumlah Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat		98,591,193,481
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
10105	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	31,558,594,906
Jumlah Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat		31,558,594,906
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	
10105	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	1,700,516,000
Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat		1,700,516,000
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	
10105	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	1,386,026,850
Jumlah Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat		1,386,026,850
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
10105	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	22,228,558,086
Jumlah Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat		22,228,558,086
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	
10109	PERSEDIAAN DALAM PROSES	5,130,176,957
Jumlah Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses		5,130,176,957
117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	
10110	PERSEDIAAN DARI BELANJA BANTUAN SOSIAL	286,839,684,347
Jumlah Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial		286,839,684,347
117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	
10106	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	13,759,717
Jumlah Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga		13,759,717
117199	Persediaan Lainnya	
10104	OBAT-OBATAN	418,017,284
Jumlah Persediaan Lainnya		418,017,284
Jumlah		455,884,848,039

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

Tanggal : 30/04/20 2:56 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_persediaan_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	150,913,240
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	9,526,600
1010301003	Penjepit Kertas	21,407,270
1010301004	Penghapus/Korektor	8,688,504
1010301005	Buku Tulis	102,757,140
1010301006	Ordner Dan Map	214,502,440
1010301007	Penggaris	2,692,750
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	8,607,640
1010301009	Pita Mesin Ketik	5,108,340
1010301010	Alat Perekat	19,702,145
1010301011	Stadler HD	4,629,250
1010301012	Staples	8,890,150
1010301013	Isi Staples	10,777,500
1010301014	Barang Cetak	1,487,102,180
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	171,455,480
1010302001	Kertas HVS	285,166,475
1010302002	Berbagai Kertas	31,207,190
1010302003	Kertas Cover	4,030,450
1010302004	Amplop	97,691,344
1010302005	Kop Surat	40,000
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	112,648,800
1010303001	Transparant Sheet	308,900
1010303002	Tinta Cetak	4,073,550
1010303003	Plat Cetak	8,500,000
1010303006	Film Cetak	312,000
1010303999	Bahan Cetak Lainnya	1,157,908,443
1010304001	Continuous Form	1,347,500
1010304003	Pita Printer	350,000
1010304004	Tinta/Toner Printer	903,366,820
1010304005	Disket	4,891,500
1010304006	USB/Flash Disk	22,598,750
1010304008	CD/DVD Drive	1,250,000
1010304010	Mouse	3,691,400
1010304011	CD/DVD	3,399,000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	19,938,700
1010306001	Kabel Listrik	650,000
1010306002	Lampu Listrik	17,209,200
1010306003	Stop Kontak	836,000
1010306004	Saklar	480,500
1010306005	Stacker	235,000
1010306006	Balast	1,575,000
1010306007	Starter	112,500
1010306008	Vitting	564,400
1010306010	Batu Baterai	6,360,750
1010306999	Alat Listrik Lainnya	2,424,920

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

Tanggal : 30/04/20 2:56 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_persediaan_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

Kode	Uraian	Jumlah
1010307001	Bahan Baku Pakaian	2,100,000
1010307002	Penutup Kepala	125,000
1010307003	Penutup Badan	18,380,500
1010307005	Penutup Kaki	3,750,000
1010307006	Atribut	306,000
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	2,005,000
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	21,263,500
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	5,676,200
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	5,587,000
1010314004	Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi)	80,000
1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	1,065,000
1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	7,042,400
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3,002,574,430
1010701001	Makanan/Sembako	491,660
Jumlah Barang Konsumsi		7,990,376,411
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	583,000
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	52,500
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	450,000
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	250,000
1010305005	Kunci, Kran Dan Semprotan	2,310,000
1010305007	Peralatan Ledeng	2,580,000
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	3,636,000
1010305012	Pengharum Ruangan	1,203,000
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	16,879,500
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		27,944,000
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
1010501002	Tanah dan Bangunan	98,591,193,481
Jumlah Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat		98,591,193,481
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	
1010501004	Peralatan dan Mesin	31,558,594,906
Jumlah Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat		31,558,594,906
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	
1010501005	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,700,516,000
Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat		1,700,516,000
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	
1010501007	Aset Lain-lain	1,386,026,850
Jumlah Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat		1,386,026,850
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
1010501008	Barang Persediaan	22,228,558,086
Jumlah Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat		22,228,558,086
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	
1010901001	Tanah dan bangunan dalam proses	5,130,176,957
Jumlah Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses		5,130,176,957
117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

Tanggal : 30/04/20 2:56 AM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_persediaan_kl

Kode	Uraian	Jumlah
1011001007	Barang Persediaan	286,839,684,347
Jumlah Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial		286,839,684,347
117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	
1010601999	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	13,759,717
Jumlah Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga		13,759,717
117199	Persediaan Lainnya	
1010401001	Obat Cair(Persediaan Lainnya)	130,082,868
1010401002	Obat Padat(Persediaan Lainnya)	180,912,186
1010401003	Obat Gas(Persediaan Lainnya)	1,110,000
1010401004	Obat Serbuk/Tepung(Persediaan Lainnya)	7,568,360
1010401005	Obat Gel/Salep(Persediaan Lainnya)	26,418,260
1010401006	Alat/Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana(Persediaan Lainnya)	456,000
1010401007	Non Alat/Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana(Persediaan Lainnya)	50,000
1010401999	Obat Lainnya(Persediaan Lainnya)	71,419,610
Jumlah Persediaan Lainnya		418,017,284
TOTAL		455,884,848,039

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 1:56 PM

Halaman : 1

Kode Lap : 154 lap_bmn_intra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	2,260,405	18,247,980,067,897	293,917	1,337,404,380,808	103,405	1,053,345,742,000	2,450,917	18,532,038,706,705
20101	TANAH PERSIL	1,732,007	10,894,500,565,362	291,769	1,068,425,722,808	103,400	1,032,472,394,000	1,920,376	10,930,453,894,170
20102	TANAH NON PERSIL	250,043	670,577,669,000	0	37,952,679,000	0	19,403,288,000	250,043	689,127,060,000
20103	LAPANGAN	278,355	6,682,901,833,535	2,148	231,025,979,000	5	1,470,060,000	280,498	6,912,457,752,535
132111	Peralatan dan Mesin	185,297	1,788,554,554,510	13,968	161,571,567,746	9,422	45,201,881,091	189,843	1,904,924,241,165
30101	ALAT BESAR DARAT	46	3,695,342,495	0	0	0	0	46	3,695,342,495
30102	ALAT BESAR APUNG	319	9,292,018,440	0	0	0	0	319	9,292,018,440
30103	ALAT BANTU	665	33,048,087,776	214	16,137,960,294	162	7,906,602,772	717	41,279,445,298
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	3,435	716,080,957,540	103	23,960,806,501	88	12,040,769,090	3,450	728,000,994,951
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	272	373,585,159	39	81,827,600	48	31,810,600	263	423,602,159
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	115	82,155,970,225	0	0	0	0	115	82,155,970,225
30204	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	833	71,178,109,025	0	0	0	0	833	71,178,109,025
30205	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	0	0	6	287,482,052	0	0	6	287,482,052
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	1,924	6,503,724,701	70	440,207,595	150	189,580,645	1,844	6,754,351,651
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1,682	4,076,435,883	87	404,443,880	161	455,134,240	1,608	4,025,745,523
30303	ALAT UKUR	802	2,359,124,143	36	109,703,000	27	77,218,000	811	2,391,609,143
30401	ALAT PENGOLAHAN	1,134	4,332,521,425	142	842,373,016	44	353,888,000	1,232	4,821,006,441
30501	ALAT KANTOR	21,651	74,299,447,237	1,373	10,704,812,432	1,020	4,549,547,094	22,004	80,454,712,575
30502	ALAT RUMAH TANGGA	105,258	201,926,394,323	8,977	32,740,370,018	6,065	9,692,535,227	108,170	224,974,229,114
30601	ALAT STUDIO	8,216	80,611,559,265	192	2,501,940,437	64	489,700,686	8,344	82,623,799,016
30602	ALAT KOMUNIKASI	3,200	23,475,732,921	164	912,660,904	95	418,084,252	3,269	23,970,309,573
30603	PERALATAN PEMANCAR	516	18,742,919,784	8	505,208,586	5	62,328,586	519	19,185,799,784
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	17	118,001,663	0	0	0	0	17	118,001,663
30701	ALAT KEDOKTERAN	3,088	10,575,324,649	247	513,916,790	81	175,837,000	3,254	10,913,404,439
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	153	897,960,082	28	134,107,504	10	4,203,000	171	1,027,864,586
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	2,562	18,856,935,326	256	2,684,338,482	118	317,037,000	2,700	21,224,236,808
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	378	3,941,177,393	4	275,915,700	4	14,762,000	378	4,202,331,093
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	359	2,970,903,618	48	221,893,880	53	77,769,240	354	3,115,028,258
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	41	91,298,000	0	0	0	0	41	91,298,000
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING	3	4,986,000	0	0	0	0	3	4,986,000
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	106	1,454,288,535	0	0	0	0	106	1,454,288,535
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	514	5,110,398,104	40	501,223,250	104	590,223,250	450	5,021,398,104
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	268	229,051,956	2	2,000,000	3	3,000,000	267	228,051,956
30901	SENJATA API	7	4,330,000	0	0	0	0	7	4,330,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	166	213,832,599	52	50,650,000	51	38,650,000	167	225,832,599
30903	SENJATA SINAR	1	2,873,000	0	0	0	0	1	2,873,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	738	2,748,613,556	33	436,746,750	15	132,863,000	756	3,052,497,306

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 1:56 PM

Halaman : 2

Kode Lap : 154 lap_bmn_intra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31001	KOMPUTER UNIT	12,646	113,260,872,782	941	13,975,926,446	452	5,134,599,358	13,135	122,102,199,870
31002	PERALATAN KOMPUTER	9,359	268,426,255,886	566	51,080,460,057	267	1,338,923,951	9,658	318,167,791,992
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	2	3,960,000	0	0	0	0	2	3,960,000
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	9	113,176,373	0	0	0	0	9	113,176,373
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	56	5,652,865,000	3	20,425,000	6	40,850,000	53	5,632,440,000
31301	SUMUR	26	2,186,700,860	0	0	0	0	26	2,186,700,860
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	18	121,436,269	1	82,900,000	0	0	19	204,336,269
31401	ALAT BANTU EKSPLORASI	2	34,686,000	0	0	0	0	2	34,686,000
31402	ALAT BANTU PRODUKSI	1	20,500,000	0	0	0	0	1	20,500,000
31501	ALAT DETEKSI	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	ALAT PELINDUNG	323	233,735,000	0	0	0	0	323	233,735,000
31503	ALAT SAR	513	3,220,763,508	13	86,990,000	16	35,900,000	510	3,271,853,508
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	243	6,218,041,403	56	675,640,000	32	212,345,000	267	6,681,336,403
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	734	3,514,606,979	142	597,819,078	164	590,835,500	712	3,521,590,557
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	2,081	3,188,907,697	39	166,532,100	53	161,099,000	2,067	3,194,340,797
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	170	530,607,963	5	12,125,000	5	12,125,000	170	530,607,963
31802	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	1	11,450,000	0	0	0	0	1	11,450,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	587	2,442,623,072	81	422,161,394	59	53,659,600	609	2,811,124,866
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	57	1,460,895	0	0	0	0	57	1,460,895
133111	Gedung dan Bangunan	2,537	1,744,588,039,068	127	310,540,428,151	97	256,499,618,952	2,567	1,798,628,848,267
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1,382	1,192,252,563,738	70	214,015,584,077	48	167,714,546,356	1,404	1,238,553,601,459
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1,028	503,535,443,060	53	81,571,778,835	46	82,844,127,016	1,035	502,263,094,879
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	7	1,764,938,000	0	27,575,000	0	28,222,000	7	1,764,291,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	120	47,035,094,270	4	14,925,490,239	3	5,912,723,580	121	56,047,860,929
134111	Jalan dan Jembatan	200,162	48,667,957,875	11,254	8,130,626,000	5,777	10,246,874,000	205,639	46,551,709,875
50101	JALAN	199,426	46,150,293,375	11,254	7,960,568,000	5,777	10,246,874,000	204,903	43,863,987,375
50102	JEMBATAN	736	2,517,664,500	0	170,058,000	0	0	736	2,687,722,500
134112	Irigasi	282	30,824,046,668	2	9,169,077,000	1	1,651,380,400	283	38,341,743,268
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	15	2,111,021,400	0	7,184,294,000	1	421,480,400	14	8,873,835,000
50202	BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT	3	713,430,000	0	0	0	0	3	713,430,000
50203	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	7	469,265,000	0	2,456,000	0	215,178,000	7	256,543,000
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	31	8,395,443,296	0	185,000,000	0	408,456,000	31	8,171,987,296
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	71	7,041,774,510	2	636,222,000	0	318,577,000	73	7,359,419,510
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	116	7,468,602,462	0	172,074,000	0	99,080,000	116	7,541,596,462
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	39	4,624,510,000	0	989,031,000	0	188,609,000	39	5,424,932,000
134113	Jaringan	385	16,022,524,241	53	1,957,211,956	24	209,506,506	414	17,770,229,691

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 1:56 PM

Halaman : 3

Kode Lap : 154 lap_bmn_intra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	64	2,693,290,764	3	217,492,000	1	3,000,000	66	2,907,782,764
50302	INSTALASI AIR KOTOR	4	788,270,095	0	0	0	0	4	788,270,095
50303	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	3	44,520,000	0	0	0	0	3	44,520,000
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	8	217,335,700	0	0	0	0	8	217,335,700
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	42	2,249,610,243	0	0	0	0	42	2,249,610,243
50307	INSTALASI PERTAHANAN	0	0	0	0	0	0	0	0
50309	INSTALASI PENGAMAN	2	6,000,000	0	0	0	0	2	6,000,000
50310	INSTALASI LAIN	51	3,247,036,680	2	261,140,500	0	0	53	3,508,177,180
50401	JARINGAN AIR MINUM	11	468,266,650	0	0	0	0	11	468,266,650
50402	JARINGAN LISTRIK	152	5,697,514,803	27	1,320,598,150	2	48,525,200	177	6,969,587,753
50403	JARINGAN TELEPON	47	578,412,806	21	157,981,306	21	157,981,306	47	578,412,806
50404	JARINGAN GAS	1	32,266,500	0	0	0	0	1	32,266,500
135111	Aset Tetap Renovasi	1	350,000,000	30	17,671,039,825	27	10,867,388,685	4	7,153,651,140
60701	TANAH DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	17	9,332,283,640	14	2,528,632,500	3	6,803,651,140
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	1	350,000,000	13	8,338,756,185	13	8,338,756,185	1	350,000,000
135121	Aset Tetap Lainnya	80,394	14,448,697,676	2,774	941,576,850	2,847	553,915,604	80,321	14,836,358,922
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	75,522	7,982,402,883	2,633	648,661,950	2,649	174,217,804	75,506	8,456,847,029
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	101	197,533,950	1	319,000	2	638,000	100	197,214,950
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	3,423	1,018,047,822	6	12,287,900	11	12,900,800	3,418	1,017,434,922
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	1,193	4,919,260,349	133	279,308,000	182	363,759,000	1,144	4,834,809,349
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	155	331,452,672	1	1,000,000	3	2,400,000	153	330,052,672
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	15,474	27,222,866,531	3,693	10,160,114,942	5,960	11,322,029,881	13,207	26,060,951,592
20101	TANAH PERSIL	4,752	494,208,000	0	0	0	0	4,752	494,208,000
30101	ALAT BESAR DARAT	8	2,800,000	0	0	0	0	8	2,800,000
30103	ALAT BANTU	27	1,084,194,000	13	107,612,000	15	958,231,000	25	233,575,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	106	7,621,265,079	27	2,201,200,501	20	1,878,570,439	113	7,943,895,141
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1	1,123,000	22	12,721,000	2	600,000	21	13,244,000
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	1	101,380,000	0	0	0	0	1	101,380,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	140	111,785,916	109	82,027,845	43	73,597,916	206	120,215,845
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	35	36,772,260	94	138,590,570	26	34,010,385	103	141,352,445
30303	ALAT UKUR	12	58,330,000	4	25,300,000	9	32,562,000	7	51,068,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	185	130,028,311	28	136,327,000	104	42,451,000	109	223,904,311
30501	ALAT KANTOR	1,656	2,202,437,013	512	860,254,760	918	927,434,106	1,250	2,135,257,667
30502	ALAT RUMAH TANGGA	6,726	5,314,787,136	2,140	2,452,966,555	4,072	3,181,068,589	4,794	4,586,685,102

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 1:56 PM

Halaman : 4

Kode Lap : 154 lap_bmn_intra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30601	ALAT STUDIO	58	275,625,872	29	173,854,400	28	191,433,000	59	258,047,272
30602	ALAT KOMUNIKASI	79	153,415,761	14	43,349,000	42	66,725,371	51	130,039,390
30603	PERALATAN PEMANCAR	1	7,975,000	0	0	1	7,975,000	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	37	90,201,200	4	2,177,000	4	4,428,200	37	87,950,000
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	25	129,677,668	5	2,053,000	11	1,640,028	19	130,090,640
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	46	78,463,000	34	71,281,000	30	27,943,000	50	121,801,000
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	0	0	0	0	0	0	0	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	88	128,350,000	27	39,256,000	62	90,100,000	53	77,506,000
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	2	10,695,000	0	0	2	10,695,000	0	0
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	91	662,190,000	65	92,600,000	62	65,650,000	94	689,140,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	2	2,675,000	2	2,000,000	2	2,675,000	2	2,000,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	1	6,160,000	0	0	1	6,160,000	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1	8,525,000	0	0	0	0	1	8,525,000
31001	KOMPUTER UNIT	471	5,453,403,590	244	2,626,874,324	239	2,944,475,776	476	5,135,802,138
31002	PERALATAN KOMPUTER	295	1,321,874,873	146	496,572,787	108	434,987,333	333	1,383,460,327
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	0	0	3	20,425,000	0	0	3	20,425,000
31501	ALAT DETEKSI	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	1	11,522,500	0	0	1	11,522,500	0	0
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	59	51,390,000	44	33,420,000	59	51,390,000	44	33,420,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	15	71,850,368	21	54,644,500	12	69,497,600	24	56,997,268
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	39	66,153,138	24	16,104,800	35	31,663,138	28	50,594,800
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	12	725,797,195	2	285,929,000	1	154,061,000	13	857,665,195
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	6	447,333,573	1	61,997,000	0	0	7	509,330,573
40401	TUGU/TANDA BATAS	1	95,591,000	0	0	0	0	1	95,591,000
50101	JALAN	400	109,231,000	0	0	0	0	400	109,231,000
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR	1	19,900,000	0	0	0	0	1	19,900,000
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	6	33,424,078	0	0	2	15,000,000	4	18,424,078
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	0	0	0	0	0	0	0	0
50310	INSTALASI LAIN	20	2,816,000	0	0	0	0	20	2,816,000
50403	JARINGAN TELEPON	0	0	0	0	0	0	0	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	61	15,894,000	0	0	49	5,482,500	12	10,411,500
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	0	0	1	319,000	0	0	1	319,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	0	0	5	612,900	0	0	5	612,900
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	6	82,871,000	71	118,245,000	0	0	77	201,116,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 1:56 PM

Halaman : 5

Kode Lap : 154 lap_bmn_intra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	0	0	2	1,400,000	0	0	2	1,400,000
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	1	750,000	0	0	0	0	1	750,000
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			21,918,658,754,466		1,857,546,023,278		1,389,898,337,119		22,386,306,440,625

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:56 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	46,145	6,354,157,622	1,784	604,330,821	2,185	288,033,975	45,744	6,670,454,468
30101	ALAT BESAR DARAT	4	78,000	0	0	0	0	4	78,000
30103	ALAT BANTU	105	17,207,600	0	0	0	0	105	17,207,600
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	7	2,967,800	0	0	0	0	7	2,967,800
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	989	87,889,455	2	530,000	4	1,060,000	987	87,359,455
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	4,553	335,186,798	71	8,918,700	91	9,712,000	4,533	334,393,498
30303	ALAT UKUR	155	20,825,858	0	0	0	0	155	20,825,858
30401	ALAT PENGOLAHAN	238	24,243,420	1	140,000	6	340,000	233	24,043,420
30501	ALAT KANTOR	1,581	186,644,435	65	25,005,000	103	16,808,200	1,543	194,841,235
30502	ALAT RUMAH TANGGA	30,124	4,441,551,841	1,013	366,020,971	1,558	215,188,675	29,579	4,592,384,137
30601	ALAT STUDIO	478	67,132,400	8	5,300,000	0	0	486	72,432,400
30602	ALAT KOMUNIKASI	194	44,135,150	0	0	4	1,000,000	190	43,135,150
30603	PERALATAN PEMANCAR	25	3,597,953	0	0	0	0	25	3,597,953
30701	ALAT KEDOKTERAN	929	87,742,543	8	2,442,500	13	2,615,000	924	87,570,043
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	24	2,434,800	48	21,380,000	10	490,000	62	23,324,800
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1,392	53,040,695	7	2,225,000	5	825,000	1,394	54,440,695
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	1	188,980	0	0	0	0	1	188,980
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	53	3,885,250	0	0	0	0	53	3,885,250
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	6	1,234,100	0	0	0	0	6	1,234,100
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	310	31,756,980	0	0	0	0	310	31,756,980
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	819	121,940,892	0	0	0	0	819	121,940,892
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	383	31,562,526	200	20,000,000	200	20,000,000	383	31,562,526
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	14	1,630,000	0	0	0	0	14	1,630,000
31001	KOMPUTER UNIT	970	19,698,000	0	0	0	0	970	19,698,000
31002	PERALATAN KOMPUTER	285	33,189,440	11	9,954,800	2	1,800,000	294	41,344,240
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	15	1,437,500	0	0	0	0	15	1,437,500
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	12	2,951,250	10	2,451,250	20	4,902,500	2	500,000
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	6	207,000	0	0	0	0	6	207,000
31502	ALAT PELINDUNG	158	24,318,600	0	0	0	0	158	24,318,600
31503	ALAT SAR	331	199,793,794	200	129,400,000	0	0	531	329,193,794
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	3	2,760,000	0	0	0	0	3	2,760,000
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	1,089	118,236,900	136	9,362,600	169	13,292,600	1,056	114,306,900
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	29	6,139,205	0	0	0	0	29	6,139,205
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	33	6,436,399	0	0	0	0	33	6,436,399
31802	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	150	309,400,000	0	0	0	0	150	309,400,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	679	62,612,058	4	1,200,000	0	0	683	63,812,058

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:56 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	1	100,000	0	0	0	0	1	100,000
133111	Gedung dan Bangunan	4,222	5,041,366,440	195	386,494,000	95	187,494,000	4,322	5,240,366,440
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	34	238,750,053	0	0	0	0	34	238,750,053
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	4,183	4,784,921,273	195	385,724,000	95	186,724,000	4,283	4,983,921,273
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	0	0	0	0	0	0	0	0
40401	TUGU/TANDA BATAS	5	17,695,114	0	770,000	0	770,000	5	17,695,114
135121	Aset Tetap Lainnya	91	56,710,000	0	0	0	0	91	56,710,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	87	13,110,000	0	0	0	0	87	13,110,000
60501	TANAMAN	4	43,600,000	0	0	0	0	4	43,600,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	4,293	441,066,050	794	99,885,125	1,222	136,777,100	3,865	404,174,075
30103	ALAT BANTU	0	0	0	0	0	0	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	29	1,195,000	2	530,000	0	0	31	1,725,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	7	1,050,000	25	2,045,000	4	525,000	28	2,570,000
30303	ALAT UKUR	4	438,350	0	0	0	0	4	438,350
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	5	200,000	0	0	5	200,000
30501	ALAT KANTOR	875	31,033,400	62	10,236,200	179	14,487,500	758	26,782,100
30502	ALAT RUMAH TANGGA	2,886	351,774,300	645	78,132,675	966	118,018,600	2,565	311,888,375
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	4	1,000,000	0	0	4	1,000,000
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	415	51,729,000	6	1,160,000	0	0	421	52,889,000
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	69	2,674,000	2	200,000	69	2,674,000	2	200,000
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	0	0	0	0	0	0	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	0	0	0	0	0	0	0	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	3	897,000	0	0	3	897,000	0	0
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	0	0	10	2,451,250	0	0	10	2,451,250
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	0	0	33	3,930,000	0	0	33	3,930,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	1	175,000	0	0	1	175,000	0	0
60501	TANAMAN	4	100,000	0	0	0	0	4	100,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:56 AM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TOTAL		11,893,300,112		1,090,709,946		612,305,075		12,371,704,983

**LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

Tanggal : 30/04/20 2:04 PM

Halaman : 1

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

Kode Lap : 207 lap_bmn_gab_kl

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	2,260,405	18,247,980,067,897	293,917	1,337,404,380,808	103,405	1,053,345,742,000	2,450,917	18,532,038,706,705
20101	TANAH PERSIL	1,732,007	10,894,500,565,362	291,769	1,068,425,722,808	103,400	1,032,472,394,000	1,920,376	10,930,453,894,170
20102	TANAH NON PERSIL	250,043	670,577,669,000	0	37,952,679,000	0	19,403,288,000	250,043	689,127,060,000
20103	LAPANGAN	278,355	6,682,901,833,535	2,148	231,025,979,000	5	1,470,060,000	280,498	6,912,457,752,535
132111	Peralatan dan Mesin	231,442	1,794,908,712,132	15,752	162,175,898,567	11,607	45,489,915,066	235,587	1,911,594,695,633
30101	ALAT BESAR DARAT	50	3,695,420,495	0	0	0	0	50	3,695,420,495
30102	ALAT BESAR APUNG	319	9,292,018,440	0	0	0	0	319	9,292,018,440
30103	ALAT BANTU	770	33,065,295,376	214	16,137,960,294	162	7,906,602,772	822	41,296,652,898
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	3,435	716,080,957,540	103	23,960,806,501	88	12,040,769,090	3,450	728,000,994,951
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	279	376,552,959	39	81,827,600	48	31,810,600	270	426,569,959
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	115	82,155,970,225	0	0	0	0	115	82,155,970,225
30204	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	833	71,178,109,025	0	0	0	0	833	71,178,109,025
30205	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	0	0	6	287,482,052	0	0	6	287,482,052
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	2,913	6,591,614,156	72	440,737,595	154	190,640,645	2,831	6,841,711,106
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	6,235	4,411,622,681	158	413,362,580	252	464,846,240	6,141	4,360,139,021
30303	ALAT UKUR	957	2,379,950,001	36	109,703,000	27	77,218,000	966	2,412,435,001
30401	ALAT PENGOLAHAN	1,372	4,356,764,845	143	842,513,016	50	354,228,000	1,465	4,845,049,861
30501	ALAT KANTOR	23,232	74,486,091,672	1,438	10,729,817,432	1,123	4,566,355,294	23,547	80,649,553,810
30502	ALAT RUMAH TANGGA	135,382	206,367,946,164	9,990	33,106,390,989	7,623	9,907,723,902	137,749	229,566,613,251
30601	ALAT STUDIO	8,694	80,678,691,665	200	2,507,240,437	64	489,700,686	8,830	82,696,231,416
30602	ALAT KOMUNIKASI	3,394	23,519,868,071	164	912,660,904	99	419,084,252	3,459	24,013,444,723
30603	PERALATAN PEMANCAR	541	18,746,517,737	8	505,208,586	5	62,328,586	544	19,189,397,737
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	17	118,001,663	0	0	0	0	17	118,001,663
30701	ALAT KEDOKTERAN	4,017	10,663,067,192	255	516,359,290	94	178,452,000	4,178	11,000,974,482
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	177	900,394,882	76	155,487,504	20	4,693,000	233	1,051,189,386
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	3,954	18,909,976,021	263	2,686,563,482	123	317,862,000	4,094	21,278,677,503
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	379	3,941,366,373	4	275,915,700	4	14,762,000	379	4,202,520,073
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	412	2,974,788,868	48	221,893,880	53	77,769,240	407	3,118,913,508
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	41	91,298,000	0	0	0	0	41	91,298,000
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING	3	4,986,000	0	0	0	0	3	4,986,000
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	112	1,455,522,635	0	0	0	0	112	1,455,522,635
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	824	5,142,155,084	40	501,223,250	104	590,223,250	760	5,053,155,084
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	1,087	350,992,848	2	2,000,000	3	3,000,000	1,086	349,992,848
30901	SENJATA API	7	4,330,000	0	0	0	0	7	4,330,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	549	245,395,125	252	70,650,000	251	58,650,000	550	257,395,125
30903	SENJATA SINAR	1	2,873,000	0	0	0	0	1	2,873,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	752	2,750,243,556	33	436,746,750	15	132,863,000	770	3,054,127,306

**LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019**

Tanggal : 30/04/20 2:04 PM

Halaman : 2

Kode Lap : 207 lap_bmn_gab_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31001	KOMPUTER UNIT	13,616	113,280,570,782	941	13,975,926,446	452	5,134,599,358	14,105	122,121,897,870
31002	PERALATAN KOMPUTER	9,644	268,459,445,326	577	51,090,414,857	269	1,340,723,951	9,952	318,209,136,232
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	17	5,397,500	0	0	0	0	17	5,397,500
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	9	113,176,373	0	0	0	0	9	113,176,373
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	68	5,655,816,250	13	22,876,250	26	45,752,500	55	5,632,940,000
31301	SUMUR	26	2,186,700,860	0	0	0	0	26	2,186,700,860
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	24	121,643,269	1	82,900,000	0	0	25	204,543,269
31401	ALAT BANTU EKSPLORASI	2	34,686,000	0	0	0	0	2	34,686,000
31402	ALAT BANTU PRODUKSI	1	20,500,000	0	0	0	0	1	20,500,000
31501	ALAT DETEKSI	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	ALAT PELINDUNG	481	258,053,600	0	0	0	0	481	258,053,600
31503	ALAT SAR	844	3,420,557,302	213	216,390,000	16	35,900,000	1,041	3,601,047,302
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	246	6,220,801,403	56	675,640,000	32	212,345,000	270	6,684,096,403
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	1,823	3,632,843,879	278	607,181,678	333	604,128,100	1,768	3,635,897,457
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	2,110	3,195,046,902	39	166,532,100	53	161,099,000	2,096	3,200,480,002
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	203	537,044,362	5	12,125,000	5	12,125,000	203	537,044,362
31802	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	151	320,850,000	0	0	0	0	151	320,850,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	1,266	2,505,235,130	85	423,361,394	59	53,659,600	1,292	2,874,936,924
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	58	1,560,895	0	0	0	0	58	1,560,895
133111	Gedung dan Bangunan	6,759	1,749,629,405,508	322	310,926,922,151	192	256,687,112,952	6,889	1,803,869,214,707
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1,416	1,192,491,313,791	70	214,015,584,077	48	167,714,546,356	1,438	1,238,792,351,512
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	5,211	508,320,364,333	248	81,957,502,835	141	83,030,851,016	5,318	507,247,016,152
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	7	1,764,938,000	0	27,575,000	0	28,222,000	7	1,764,291,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	125	47,052,789,384	4	14,926,260,239	3	5,913,493,580	126	56,065,556,043
134111	Jalan dan Jembatan	200,162	48,667,957,875	11,254	8,130,626,000	5,777	10,246,874,000	205,639	46,551,709,875
50101	JALAN	199,426	46,150,293,375	11,254	7,960,568,000	5,777	10,246,874,000	204,903	43,863,987,375
50102	JEMBATAN	736	2,517,664,500	0	170,058,000	0	0	736	2,687,722,500
134112	Irigasi	282	30,824,046,668	2	9,169,077,000	1	1,651,380,400	283	38,341,743,268
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	15	2,111,021,400	0	7,184,294,000	1	421,480,400	14	8,873,835,000
50202	BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT	3	713,430,000	0	0	0	0	3	713,430,000
50203	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	7	469,265,000	0	2,456,000	0	215,178,000	7	256,543,000
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN	31	8,395,443,296	0	185,000,000	0	408,456,000	31	8,171,987,296
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	71	7,041,774,510	2	636,222,000	0	318,577,000	73	7,359,419,510
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	116	7,468,602,462	0	172,074,000	0	99,080,000	116	7,541,596,462
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	39	4,624,510,000	0	989,031,000	0	188,609,000	39	5,424,932,000
134113	Jaringan	385	16,022,524,241	53	1,957,211,956	24	209,506,506	414	17,770,229,691

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:04 PM

Halaman : 3

Kode Lap : 207 lap_bmn_gab_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	64	2,693,290,764	3	217,492,000	1	3,000,000	66	2,907,782,764
50302	INSTALASI AIR KOTOR	4	788,270,095	0	0	0	0	4	788,270,095
50303	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	3	44,520,000	0	0	0	0	3	44,520,000
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	8	217,335,700	0	0	0	0	8	217,335,700
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	42	2,249,610,243	0	0	0	0	42	2,249,610,243
50307	INSTALASI PERTAHANAN	0	0	0	0	0	0	0	0
50309	INSTALASI PENGAMAN	2	6,000,000	0	0	0	0	2	6,000,000
50310	INSTALASI LAIN	51	3,247,036,680	2	261,140,500	0	0	53	3,508,177,180
50401	JARINGAN AIR MINUM	11	468,266,650	0	0	0	0	11	468,266,650
50402	JARINGAN LISTRIK	152	5,697,514,803	27	1,320,598,150	2	48,525,200	177	6,969,587,753
50403	JARINGAN TELEPON	47	578,412,806	21	157,981,306	21	157,981,306	47	578,412,806
50404	JARINGAN GAS	1	32,266,500	0	0	0	0	1	32,266,500
135111	Aset Tetap Renovasi	1	350,000,000	30	17,671,039,825	27	10,867,388,685	4	7,153,651,140
60701	TANAH DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	17	9,332,283,640	14	2,528,632,500	3	6,803,651,140
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	1	350,000,000	13	8,338,756,185	13	8,338,756,185	1	350,000,000
135121	Aset Tetap Lainnya	80,485	14,505,407,676	2,774	941,576,850	2,847	553,915,604	80,412	14,893,068,922
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	75,522	7,982,402,883	2,633	648,661,950	2,649	174,217,804	75,506	8,456,847,029
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	101	197,533,950	1	319,000	2	638,000	100	197,214,950
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	3,423	1,018,047,822	6	12,287,900	11	12,900,800	3,418	1,017,434,922
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	1,280	4,932,370,349	133	279,308,000	182	363,759,000	1,231	4,847,919,349
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	155	331,452,672	1	1,000,000	3	2,400,000	153	330,052,672
60501	TANAMAN	4	43,600,000	0	0	0	0	4	43,600,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	19,767	27,663,932,581	4,487	10,260,000,067	7,182	11,458,806,981	17,072	26,465,125,667
20101	TANAH PERSIL	4,752	494,208,000	0	0	0	0	4,752	494,208,000
30101	ALAT BESAR DARAT	8	2,800,000	0	0	0	0	8	2,800,000
30103	ALAT BANTU	27	1,084,194,000	13	107,612,000	15	958,231,000	25	233,575,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	106	7,621,265,079	27	2,201,200,501	20	1,878,570,439	113	7,943,895,141
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	1	1,123,000	22	12,721,000	2	600,000	21	13,244,000
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	1	101,380,000	0	0	0	0	1	101,380,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	169	112,980,916	111	82,557,845	43	73,597,916	237	121,940,845
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	42	37,822,260	119	140,635,570	30	34,535,385	131	143,922,445
30303	ALAT UKUR	16	58,768,350	4	25,300,000	9	32,562,000	11	51,506,350
30401	ALAT PENGOLAHAN	185	130,028,311	33	136,527,000	104	42,451,000	114	224,104,311

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:04 PM

Halaman : 4

Kode Lap : 207 lap_bmn_gab_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30501	ALAT KANTOR	2,531	2,233,470,413	574	870,490,960	1,097	941,921,606	2,008	2,162,039,767
30502	ALAT RUMAH TANGGA	9,612	5,666,561,436	2,785	2,531,099,230	5,038	3,299,087,189	7,359	4,898,573,477
30601	ALAT STUDIO	58	275,625,872	29	173,854,400	28	191,433,000	59	258,047,272
30602	ALAT KOMUNIKASI	79	153,415,761	18	44,349,000	42	66,725,371	55	131,039,390
30603	PERALATAN PEMANCAR	1	7,975,000	0	0	1	7,975,000	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	452	141,930,200	10	3,337,000	4	4,428,200	458	140,839,000
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	25	129,677,668	5	2,053,000	11	1,640,028	19	130,090,640
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	115	81,137,000	36	71,481,000	99	30,617,000	52	122,001,000
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	0	0	0	0	0	0	0	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	88	128,350,000	27	39,256,000	62	90,100,000	53	77,506,000
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	2	10,695,000	0	0	2	10,695,000	0	0
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	91	662,190,000	65	92,600,000	62	65,650,000	94	689,140,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	2	2,675,000	2	2,000,000	2	2,675,000	2	2,000,000
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	1	6,160,000	0	0	1	6,160,000	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1	8,525,000	0	0	0	0	1	8,525,000
31001	KOMPUTER UNIT	471	5,453,403,590	244	2,626,874,324	239	2,944,475,776	476	5,135,802,138
31002	PERALATAN KOMPUTER	298	1,322,771,873	146	496,572,787	111	435,884,333	333	1,383,460,327
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	0	0	13	22,876,250	0	0	13	22,876,250
31501	ALAT DETEKSI	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	1	11,522,500	0	0	1	11,522,500	0	0
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	59	51,390,000	77	37,350,000	59	51,390,000	77	37,350,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	15	71,850,368	21	54,644,500	12	69,497,600	24	56,997,268
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	40	66,328,138	24	16,104,800	36	31,838,138	28	50,594,800
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	12	725,797,195	2	285,929,000	1	154,061,000	13	857,665,195
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	6	447,333,573	1	61,997,000	0	0	7	509,330,573
40401	TUGU/TANDA BATAS	1	95,591,000	0	0	0	0	1	95,591,000
50101	JALAN	400	109,231,000	0	0	0	0	400	109,231,000
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	1	19,900,000	0	0	0	0	1	19,900,000
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	6	33,424,078	0	0	2	15,000,000	4	18,424,078
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	0	0	0	0	0	0	0	0
50310	INSTALASI LAIN	20	2,816,000	0	0	0	0	20	2,816,000
50403	JARINGAN TELEPON	0	0	0	0	0	0	0	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	61	15,894,000	0	0	49	5,482,500	12	10,411,500

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:04 PM

Halaman : 5

Kode Lap : 207 lap_bmn_gab_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	0	0	1	319,000	0	0	1	319,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	0	0	5	612,900	0	0	5	612,900
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	6	82,871,000	71	118,245,000	0	0	77	201,116,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	0	0	2	1,400,000	0	0	2	1,400,000
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	1	750,000	0	0	0	0	1	750,000
60501	TANAMAN	4	100,000	0	0	0	0	4	100,000
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			21,930,552,054,578		1,858,636,733,224		1,390,510,642,194		22,398,678,145,608

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:05 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_kdp_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		JUMLAH S/D 1 JANUARI 2019	PENAMBAHAN	KDP YANG MENJADI ASET DEFINITIF	JUMLAH S/D 31 DESEMBER 2019	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	623,272,587	172,608,100,649	172,949,536,923	281,836,313	
7010101001	Tanah Dalam Pengerjaan	41,627,000	90,519,185,408	90,519,185,408	41,627,000	
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	0	15,673,905,372	15,673,905,372	0	
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	649,454,787	59,644,167,169	59,985,603,443	308,018,513	
7010101004	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	(67,809,200)	0	0	(67,809,200)	
7010101005	Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	0	6,770,842,700	6,770,842,700	0	
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
8020101001	Aset Tak Berwujud Dalam Penyelesaian	0	0	0	0	
TOTAL		623,272,587	172,608,100,649	172,949,536,923	281,836,313	

LAPORAN BARANG PENGGUNA
 ASET TAK BERWUJUD
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:05 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_atb_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO S.D 31 DESEMBER 2019	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162151	Software	550	86,297,896,087	279	11,882,327,465	3	28,870,846	826	98,151,352,706
80101	ASET TAK BERWUJUD	550	86,297,896,087	279	11,882,327,465	3	28,870,846	826	98,151,352,706
162161	Lisensi	0	0	3	190,850,000	0	0	3	190,850,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	3	190,850,000	0	0	3	190,850,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	3	8,316,000,000	1	196,625,000	3	8,316,000,000	1	196,625,000
80101	ASET TAK BERWUJUD	3	8,316,000,000	1	196,625,000	3	8,316,000,000	1	196,625,000
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	145	231,083,052	3	15,140,000	2	9,200,000	146	237,023,052
80101	ASET TAK BERWUJUD	145	231,083,052	3	15,140,000	2	9,200,000	146	237,023,052
TOTAL				94,844,979,139		8,354,070,846		12,284,942,465	98,775,850,758

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
 BARANG BERSEJARAH
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 1:58 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_sejarah_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2019
			BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
1	2	4	5	6	7
133111	Gedung dan Bangunan	5	0	0	5
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	5	0	0	5
TOTAL		5	0	0	5

LAPORAN BARANG DENGAN KONDISI RUSAK BERAT
 YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:06 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_dbrb_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	(218)	(234,945,608)	13	57,399,000	27	948,670,200	(232)	(1,126,216,808)
30103	ALAT BANTU	0	0	0	0	0	0	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	9	286,816,000	1	57,000,000	22	948,387,200	(12)	(604,571,200)
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	(29)	(97,282,867)	6	51,000	2	17,000	(25)	(97,248,867)
30502	ALAT RUMAH TANGGA	(149)	(112,404,570)	6	348,000	3	266,000	(146)	(112,322,570)
30601	ALAT STUDIO	(1)	(3,426,069)	0	0	0	0	(1)	(3,426,069)
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	(1)	(2,100,000)	0	0	0	0	(1)	(2,100,000)
31001	KOMPUTER UNIT	(31)	(275,388,400)	0	0	0	0	(31)	(275,388,400)
31002	PERALATAN KOMPUTER	(16)	(31,159,702)	0	0	0	0	(16)	(31,159,702)
162151	Software	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			(234,945,608)		57,399,000		948,670,200		(1,126,216,808)

LAPORAN BARANG HILANG
 YANG TELAH DIUSULKAN PROSES PENGHAPUSANNYA KEPADA PENGELOLA BARANG
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:58 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_dbh_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	0	0	1	41,042,000	1	41,042,000	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0	1	41,042,000	1	41,042,000	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	0	0	0	0	0	0	0	0
30303	ALAT UKUR	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0	0	0	0	0	0	0
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
162151	Software	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			0		41,042,000		41,042,000		0

LAPORAN BARANG HIBAH DK/TP
 YANG TELAH DIUSULKAN PROSES HIBAH KEPADA PENGELOLA BARANG
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:06 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_dhdktp_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/ KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	6	124,225,000	0	0	5	21,725,000	1	102,500,000
30501	ALAT KANTOR	1	102,500,000	0	0	0	0	1	102,500,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1	8,200,000	0	0	1	8,200,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	2	9,825,000	0	0	2	9,825,000	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	2	3,700,000	0	0	2	3,700,000	0	0
133111	Gedung dan Bangunan	3	1,388,548,000	0	0	0	0	3	1,388,548,000
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1	484,789,000	0	0	0	0	1	484,789,000
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	1	121,975,000	0	0	0	0	1	121,975,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	1	781,784,000	0	0	0	0	1	781,784,000
134112	Irigasi	1	20,063,000	0	0	0	0	1	20,063,000
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	1	20,063,000	0	0	0	0	1	20,063,000
135111	Aset Tetap Renovasi	32	9,660,630,350	0	0	0	0	32	9,660,630,350
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	23	8,621,735,850	0	0	0	0	23	8,621,735,850
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	1	277,140,500	0	0	0	0	1	277,140,500
60705	ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	8	761,754,000	0	0	0	0	8	761,754,000
TOTAL			11,193,466,350		0		21,725,000		11,171,741,350

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Tanggal : 30/04/20 2:59 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kl

UAKPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2019						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
132111	Peralatan dan Mesin	189,786	1,904,922,780,270	1,402,111,593,278	162,287,588,507	(11,751,560,366)	1,552,647,621,419	352,275,158,851
30101	ALAT BESAR DARAT	46	3,695,342,495	1,926,804,548	309,402,166	0	2,236,206,714	1,459,135,781
30102	ALAT BESAR APUNG	319	9,292,018,440	9,292,018,440	0	0	9,292,018,440	0
30103	ALAT BANTU	717	41,279,445,298	22,763,645,161	3,378,532,540	(80,123,000)	26,062,054,701	15,217,390,597
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	3,450	728,000,994,951	528,685,883,424	59,624,368,383	(4,217,850,308)	584,092,401,499	143,908,593,452
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	263	423,602,159	366,110,159	21,962,000	(13,721,000)	374,351,159	49,251,000
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	115	82,155,970,225	62,231,788,968	7,978,047,826	0	70,209,836,794	11,946,133,431
30204	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	833	71,178,109,025	69,770,984,050	938,083,325	0	70,709,067,375	469,041,650
30205	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	6	287,482,052	0	10,022,051	0	10,022,051	277,460,001
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	1,844	6,754,351,651	4,236,250,587	442,793,265	(54,738,300)	4,624,305,552	2,130,046,099
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1,608	4,025,745,523	3,488,573,285	360,854,598	(135,016,570)	3,714,411,313	311,334,210
30303	ALAT UKUR	811	2,391,609,143	2,130,032,343	129,110,353	(25,300,000)	2,233,842,696	157,766,447
30401	ALAT PENGOLAHAN	1,232	4,821,006,441	3,672,719,068	447,190,368	(135,795,000)	3,984,114,436	836,892,005
30501	ALAT KANTOR	22,004	80,454,712,575	58,925,454,605	7,763,478,921	(872,953,760)	65,815,979,766	14,638,732,809
30502	ALAT RUMAH TANGGA	108,170	224,974,229,114	161,003,988,470	21,879,028,488	(2,366,066,260)	180,516,950,698	44,457,278,416
30601	ALAT STUDIO	8,344	82,623,799,016	56,454,435,283	10,632,139,213	(153,560,400)	66,933,014,096	15,690,784,920
30602	ALAT KOMUNIKASI	3,269	23,970,309,573	18,962,613,189	2,012,893,619	(42,782,500)	20,932,724,308	3,037,585,265
30603	PERALATAN PEMANCAR	519	19,185,799,784	7,705,299,189	1,750,932,996	(3,850,000)	9,452,382,185	9,733,417,599
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	17	118,001,663	73,876,046	7,866,781	0	81,742,827	36,258,836
30701	ALAT KEDOKTERAN	3,254	10,913,404,439	8,298,112,199	1,312,371,176	(1,511,500)	9,608,971,875	1,304,432,564
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	171	1,027,864,586	814,604,972	61,463,892	(2,053,000)	874,015,864	153,848,722
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	2,700	21,224,236,808	11,863,244,880	1,827,807,759	(59,570,000)	13,631,482,639	7,592,754,169
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	378	4,202,331,093	2,348,343,584	267,696,662	(492,066)	2,615,548,180	1,586,782,913
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	354	3,115,028,258	1,817,461,292	176,161,185	(39,406,441)	1,954,216,036	1,160,812,222
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	41	91,298,000	85,134,450	1,444,050	0	86,578,500	4,719,500
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	3	4,986,000	4,986,000	0	0	4,986,000	0
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	106	1,454,288,535	1,404,084,495	16,392,970	0	1,420,477,465	33,811,070
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	450	5,021,398,104	3,981,459,059	307,160,981	(76,585,478)	4,212,034,562	809,363,542
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	267	228,051,956	182,136,296	8,553,015	(1,000,000)	189,689,311	38,362,645
30901	SENJATA API	7	4,330,000	1,244,500	433,000	0	1,677,500	2,652,500
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	167	225,832,599	185,895,435	16,995,004	0	202,890,439	22,942,160
30903	SENJATA SINAR	1	2,873,000	287,300	574,600	0	861,900	2,011,100
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	756	3,052,497,306	2,440,645,417	217,389,659	(33,687,500)	2,624,347,576	428,149,730
31001	KOMPUTER UNIT	13,135	122,102,199,870	101,869,399,783	7,777,158,135	(2,870,638,511)	106,775,919,407	15,326,280,463
31002	PERALATAN KOMPUTER	9,658	318,167,791,992	235,125,566,997	30,616,787,536	(489,023,787)	285,253,330,746	52,914,461,246
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	2	3,960,000	1,980,000	792,000	0	2,772,000	1,188,000
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	9	113,176,373	41,345,731	11,064,638	0	52,410,369	60,766,004
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	53	5,632,440,000	5,362,857,750	282,552,750	(18,382,500)	5,627,028,000	5,412,000

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Tanggal : 30/04/20 2:59 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kl

UAKPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2019						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
31301	SUMUR	26	2,186,700,860	1,195,149,895	219,089,318	0	1,414,239,213	772,461,647
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	19	204,336,269	61,869,555	13,628,060	0	75,497,615	128,838,654
31401	ALAT BANTU EKSPLORASI	2	34,686,000	18,702,900	3,468,600	0	22,171,500	12,514,500
31402	ALAT BANTU PRODUKSI	1	20,500,000	12,300,000	2,050,000	0	14,350,000	6,150,000
31501	ALAT DETEKSI	0	0	0	0	0	0	0
31502	ALAT PELINDUNG	323	233,735,000	227,391,700	2,261,800	0	229,653,500	4,081,500
31503	ALAT SAR	510	3,271,853,508	3,194,241,508	33,069,500	(5,300,000)	3,222,011,008	49,842,500
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	267	6,681,336,403	2,642,305,612	657,924,525	0	3,300,230,137	3,381,106,266
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	712	3,521,590,557	2,558,911,792	232,190,495	(22,230,600)	2,768,871,687	752,718,870
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	2,067	3,194,340,797	2,120,371,214	305,391,768	(4,194,100)	2,421,568,882	772,771,915
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	170	530,607,963	237,929,867	70,456,215	0	308,386,082	222,221,881
31802	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	1	11,450,000	11,450,000	0	0	11,450,000	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	609	2,811,124,866	2,311,702,280	158,552,321	(25,727,785)	2,444,526,816	366,598,050
133111	Gedung dan Bangunan	2,567	1,798,628,848,267	121,168,838,761	67,539,375,213	(6,655,095,379)	182,053,118,595	1,616,575,729,672
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	1,404	1,238,553,601,459	80,553,119,452	43,999,073,249	(3,451,705,319)	121,100,487,382	1,117,453,114,077
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1,035	502,263,094,879	38,299,048,194	21,847,441,952	(3,334,831,964)	56,811,658,182	445,451,436,697
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	7	1,764,291,000	44,897,634	37,859,234	(21,810)	82,735,058	1,681,555,942
40401	TUGU/TANDA BATAS	121	56,047,860,929	2,271,773,481	1,655,000,778	131,463,714	4,058,237,973	51,989,622,956
134111	Jalan dan Jembatan	205,639	46,551,709,875	16,573,320,799	7,694,501,065	(864,971,467)	23,402,850,397	23,148,859,478
50101	JALAN	204,903	43,863,987,375	16,456,517,471	7,618,862,875	(868,403,132)	23,206,977,214	20,657,010,161
50102	JEMBATAN	736	2,687,722,500	116,803,328	75,638,190	3,431,665	195,873,183	2,491,849,317
134112	Irigasi	283	38,341,743,268	4,553,076,047	2,049,090,797	(110,621,827)	6,491,545,017	31,850,198,251
50201	BANGUNAN AIR IRIGASI	14	8,873,835,000	125,074,161	245,404,632	246,588,787	617,067,580	8,256,767,420
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	3	713,430,000	23,132,211	15,421,474	0	38,553,685	674,876,315
50203	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	7	256,543,000	46,253,532	16,796,127	(21,059,340)	41,990,319	214,552,681
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	31	8,171,987,296	3,043,732,142	973,759,108	(376,699,494)	3,640,791,756	4,531,195,540
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	73	7,359,419,510	478,474,700	329,863,404	(2,284,410)	806,053,694	6,553,365,816
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	116	7,541,596,462	466,098,093	304,256,948	8,626,237	778,981,278	6,762,615,184
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	39	5,424,932,000	370,311,208	163,589,104	34,206,393	568,106,705	4,856,825,295
134113	Jaringan	414	17,770,229,691	6,359,104,282	1,014,384,630	0	7,373,488,912	10,396,740,779
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	66	2,907,782,764	933,684,581	95,154,329	0	1,028,838,910	1,878,943,854
50302	INSTALASI AIR KOTOR	4	788,270,095	258,357,589	26,867,570	0	285,225,159	503,044,936
50303	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	3	44,520,000	27,462,000	3,252,000	0	30,714,000	13,806,000
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	8	217,335,700	59,381,889	6,317,294	0	65,699,183	151,636,517
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	42	2,249,610,243	700,846,874	94,977,961	0	795,824,835	1,453,785,408
50307	INSTALASI PERTAHANAN	0	0	0	0	0	0	0
50309	INSTALASI PENGAMAN	2	6,000,000	1,050,000	300,000	0	1,350,000	4,650,000
50310	INSTALASI LAIN	53	3,508,177,180	2,439,176,707	565,989,540	0	3,005,166,247	503,010,933

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Tanggal : 30/04/20 2:59 AM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kl

UAKPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2019						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
50401	JARINGAN AIR MINUM	11	468,266,650	271,432,947	34,862,721	0	306,295,668	161,970,982
50402	JARINGAN LISTRIK	177	6,969,587,753	1,370,860,568	155,748,583	0	1,526,609,151	5,442,978,602
50403	JARINGAN TELEPON	47	578,412,806	289,860,052	29,839,082	0	319,699,134	258,713,672
50404	JARINGAN GAS	1	32,266,500	6,991,075	1,075,550	0	8,066,625	24,199,875
135111	Aset Tetap Renovasi	3	6,803,651,140	0	0	0	0	6,803,651,140
60702	PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	3	6,803,651,140	0	0	0	0	6,803,651,140
60704	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	1,144	4,834,809,349	3,430,878,695	141,281,086	(105,450,000)	3,466,709,781	1,368,099,568
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	1,144	4,834,809,349	3,430,878,695	141,281,086	(105,450,000)	3,466,709,781	1,368,099,568
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	8,434	25,553,250,192	24,837,883,183	131,226,860	(1,631,330,809)	23,337,779,234	2,215,470,958
30101	ALAT BESAR DARAT	8	2,800,000	2,800,000	0	0	2,800,000	0
30103	ALAT BANTU	25	233,575,000	1,084,194,000	0	(850,619,000)	233,575,000	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	113	7,943,895,141	7,589,712,242	8,774,084	18,232,062	7,616,718,388	327,176,753
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	21	13,244,000	1,123,000	0	12,121,000	13,244,000	0
30203	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	1	101,380,000	101,380,000	0	0	101,380,000	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	206	120,215,845	109,629,916	1,140,500	9,445,429	120,215,845	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	103	141,352,445	36,772,260	0	104,580,185	141,352,445	0
30303	ALAT UKUR	7	51,068,000	58,330,000	0	(7,262,000)	51,068,000	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	109	223,904,311	130,028,311	0	93,876,000	223,904,311	0
30501	ALAT KANTOR	1,250	2,135,257,667	2,191,947,956	7,747,000	(68,104,346)	2,131,590,610	3,667,057
30502	ALAT RUMAH TANGGA	4,794	4,586,685,102	5,127,696,788	11,979,300	(726,169,429)	4,413,506,659	173,178,443
30601	ALAT STUDIO	59	258,047,272	271,872,612	1,415,260	(15,568,600)	257,719,272	328,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	51	130,039,390	134,146,906	566,500	(23,942,871)	110,770,535	19,268,855
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	5,981,250	0	(5,981,250)	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	37	87,950,000	47,153,000	0	(2,251,200)	44,901,800	43,048,200
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	19	130,090,640	126,986,668	0	412,972	127,399,640	2,691,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	50	121,801,000	78,321,569	195,625	7,345,750	85,862,944	35,938,056
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	0	0	0	0	0	0	0
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	53	77,506,000	72,604,089	0	(25,315,591)	47,288,498	30,217,502
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	0	0	10,695,000	0	(10,695,000)	0	0
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	94	689,140,000	364,024,959	27,344,008	29,536,317	420,905,284	268,234,716
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	2	2,000,000	2,675,000	0	(675,000)	2,000,000	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	6,160,000	0	(6,160,000)	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	1	8,525,000	8,525,000	0	0	8,525,000	0
31001	KOMPUTER UNIT	476	5,135,802,138	5,028,836,681	4,777,500	(326,253,952)	4,707,360,229	428,441,909
31002	PERALATAN KOMPUTER	333	1,383,460,327	1,220,447,039	1,226,328	60,292,954	1,281,966,321	101,494,006
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Tanggal : 30/04/20 2:59 AM

Halaman : 4

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kl

UAKPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2019						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	3	20,425,000	0	1,021,250	18,382,500	19,403,750	1,021,250
31501	ALAT DETEKSI	0	0	0	0	0	0	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	0	0	8,065,750	0	(8,065,750)	0	0
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	44	33,420,000	45,057,000	2,189,800	(13,826,800)	33,420,000	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	24	56,997,268	61,039,568	3,603,600	(7,645,900)	56,997,268	0
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	0	0	0	0	0	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	28	50,594,800	66,153,138	127,726	(18,485,353)	47,795,511	2,799,289
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	13	857,665,195	408,345,942	42,786,995	32,159,348	483,292,285	374,372,910
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	7	509,330,573	201,421,738	13,310,303	8,856,716	223,588,757	285,741,816
40401	TUGU/TANDA BATAS	1	95,591,000	19,118,200	1,911,820	0	21,030,020	74,560,980
50101	JALAN	400	109,231,000	109,231,000	0	0	109,231,000	0
50204	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	0	0	0	0	0	0	0
50205	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	1	19,900,000	2,653,333	663,334	0	3,316,667	16,583,333
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	4	18,424,078	24,154,878	445,927	(15,000,000)	9,600,805	8,823,273
50305	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	0	0	0	0	0	0	0
50310	INSTALASI LAIN	20	2,816,000	2,816,000	0	0	2,816,000	0
50403	JARINGAN TELEPON	0	0	0	0	0	0	0
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	77	201,116,000	77,782,390	0	105,450,000	183,232,390	17,883,610
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		408,270	3,843,407,022,0	1,579,034,695,0	240,857,448,158	(21,119,029,848)	1,798,773,113,3	2,044,633,908,697

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Tanggal : 30/04/20 2:59 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kl

UAKPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2019						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	PERIODE BERJALAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
132111	Peralatan dan Mesin	45,743	6,670,354,468	5,586,891,909	422,649,874	(148,392,008)	5,861,149,775	809,204,693
30101	ALAT BESAR DARAT	4	78,000	62,400	7,800	0	70,200	7,800
30103	ALAT BANTU	105	17,207,600	9,632,628	2,422,556	0	12,055,184	5,152,416
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	7	2,967,800	1,459,700	1,005,400	0	2,465,100	502,700
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	987	87,359,455	64,547,594	4,303,431	(530,000)	68,321,025	19,038,430
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	4,533	334,393,498	308,447,718	13,500,754	(1,520,000)	320,428,472	13,965,026
30303	ALAT UKUR	155	20,825,858	20,072,369	502,326	0	20,574,695	251,163
30401	ALAT PENGOLAHAN	233	24,043,420	21,523,920	1,026,500	(200,000)	22,350,420	1,693,000
30501	ALAT KANTOR	1,543	194,841,235	180,381,923	4,114,290	(10,018,700)	174,477,513	20,363,722
30502	ALAT RUMAH TANGGA	29,579	4,592,384,137	3,925,419,504	204,059,690	(127,923,688)	4,001,555,506	590,828,631
30601	ALAT STUDIO	486	72,432,400	52,899,925	7,419,475	0	60,319,400	12,113,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	190	43,135,150	38,507,050	2,360,600	(1,000,000)	39,867,650	3,267,500
30603	PERALATAN PEMANCAR	25	3,597,953	2,978,724	150,339	0	3,129,063	468,890
30701	ALAT KEDOKTERAN	924	87,570,043	81,639,043	2,709,050	(1,160,000)	83,188,093	4,381,950
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	62	23,324,800	1,933,500	2,200,400	0	4,133,900	19,190,900
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1,394	54,440,695	51,140,124	670,259	(100,000)	51,710,383	2,730,312
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	1	188,980	44,093	12,598	0	56,691	132,289
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	53	3,885,250	2,609,201	219,298	0	2,828,499	1,056,751
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	6	1,234,100	1,234,100	0	0	1,234,100	0
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	310	31,756,980	6,646,028	2,117,277	0	8,763,305	22,993,675
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	819	121,940,892	120,206,592	311,800	0	120,518,392	1,422,500
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	383	31,562,526	31,235,858	163,334	0	31,399,192	163,334
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	14	1,630,000	1,603,750	8,750	0	1,612,500	17,500
31001	KOMPUTER UNIT	970	19,698,000	19,698,000	0	0	19,698,000	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	294	41,344,240	19,212,290	5,440,500	0	24,652,790	16,691,450
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	15	1,437,500	1,437,500	0	0	1,437,500	0
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	2	500,000	2,583,560	122,560	(2,206,120)	500,000	0
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	6	207,000	110,400	13,800	0	124,200	82,800
31502	ALAT PELINDUNG	158	24,318,600	22,602,600	1,603,800	0	24,206,400	112,200
31503	ALAT SAR	531	329,193,794	101,993,794	162,500,000	0	264,493,794	64,700,000
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	3	2,760,000	276,000	276,000	0	552,000	2,208,000
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	1,056	114,306,900	113,755,587	1,788,343	(3,733,500)	111,810,430	2,496,470
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	29	6,139,205	5,107,945	687,520	0	5,795,465	343,740
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	33	6,436,399	3,876,431	731,424	0	4,607,855	1,828,544
31802	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	150	309,400,000	309,400,000	0	0	309,400,000	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	683	63,812,058	62,612,058	200,000	0	62,812,058	1,000,000
133111	Gedung dan Bangunan	4,322	5,240,366,440	507,500,856	105,808,997	(36,222,316)	577,087,537	4,663,278,903

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Tanggal : 30/04/20 2:59 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kl

UAKPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2019						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	PERIODE BERJALAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	34	238,750,053	41,587,350	4,823,698	(408,742)	46,002,306	192,747,747
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	4,283	4,983,921,273	464,001,235	96,338,270	(35,813,574)	524,525,931	4,459,395,342
40201	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	0	0	0	0	0	0	0
40401	TUGU/TANDA BATAS	5	17,695,114	1,912,271	4,647,029	0	6,559,300	11,135,814
135121	Aset Tetap Lainnya	87	13,110,000	665,000	0	0	665,000	12,445,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	87	13,110,000	665,000	0	0	665,000	12,445,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	3,861	404,074,075	433,353,765	343,341	(37,593,763)	396,103,343	7,970,732
30103	ALAT BANTU	0	0	0	0	0	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	0	0	0	0	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	31	1,725,000	1,195,000	0	530,000	1,725,000	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	28	2,570,000	1,050,000	0	1,520,000	2,570,000	0
30303	ALAT UKUR	4	438,350	438,350	0	0	438,350	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	5	200,000	0	0	200,000	200,000	0
30501	ALAT KANTOR	758	26,782,100	31,033,400	0	(4,251,300)	26,782,100	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	2,565	311,888,375	344,468,335	24,271	(40,146,083)	304,346,523	7,541,852
30601	ALAT STUDIO	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	4	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	421	52,889,000	51,422,680	0	1,160,000	52,582,680	306,320
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	2	200,000	2,674,000	0	(2,474,000)	200,000	0
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	0	0	0	0	0	0	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	0	0	0	0	0	0	0
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	897,000	0	(897,000)	0	0
31202	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10	2,451,250	0	122,570	2,206,120	2,328,690	122,560
31502	ALAT PELINDUNG	0	0	0	0	0	0	0
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	33	3,930,000	0	196,500	3,733,500	3,930,000	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0	0	0	0	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	175,000	0	(175,000)	0	0
JUMLAH		54,013	12,327,904,983	6,528,411,530	528,802,212	(222,208,087)	6,835,005,655	5,492,899,328

**LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Tanggal : 30/04/20 2:07 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_amor_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2019						
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI AMORTISASI				NILAI BUKU
				SALDO AWAL	BEBAN AMORTISASI	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9=4-8
162151	Software	826	98,151,352,706	72,659,127,907	11,887,711,273	722,067,778	85,268,906,958	12,882,445,748
80101	ASET TAK BERWUJUD	826	98,151,352,706	72,659,127,907	11,887,711,273	722,067,778	85,268,906,958	12,882,445,748
162161	Lisensi	3	190,850,000	0	19,085,000	(9,542,500)	9,542,500	181,307,500
80101	ASET TAK BERWUJUD	3	190,850,000	0	19,085,000	(9,542,500)	9,542,500	181,307,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	18	159,469,052	178,275,302	0	(18,806,250)	159,469,052	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	18	159,469,052	178,275,302	0	(18,806,250)	159,469,052	0
JUMLAH		847	98,501,671,758	72,837,403,209	11,906,796,273	693,719,028	85,437,918,510	13,063,753,248

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:00 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_crbtnm_intra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
131111	Tanah	2,450,917	18,532,038,706,705
201	TANAH	2,450,917	18,532,038,706,705
202	Pengembangan Nilai Aset	0	8,651,400
302	Transfer Keluar	(103,400)	(645,733,000,000)
247	Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	0	47,231,259,000
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	113,937	83,471,253,408
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	998	0
208	Pengembangan Melalui KDP	0	7,047,932,000
232	Koreksi Transfer Masuk	0	(67,029,050,000)
245	Koreksi Nilai barang Berlebih	0	873,785,000
000	Saldo Awal	2,260,405	18,247,980,067,897
102	Transfer Masuk	103,400	645,733,000,000
331	Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	0	67,029,050,000
334	Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	0	(47,231,259,000)
225	Koreksi Kesalahan input IP	75,577	192,657,017,000
132111	Peralatan dan Mesin	189,843	1,904,924,241,165
301	ALAT BESAR	1,082	54,266,806,233
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(13)	(107,612,000)
101	Pembelian	60	815,083,250
304	Reklasifikasi Keluar	(1)	(7,496,397,272)
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1	7,496,397,272
102	Transfer Masuk	149	330,082,500
302	Transfer Keluar	(148)	(302,593,500)
000	Saldo Awal	1,030	46,035,448,711
107	Reklasifikasi Masuk	4	7,496,397,272

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:00 PM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_crbtnm_intra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
302	ALAT ANGKUTAN	4,667	882,046,158,412
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	11	809,869,548
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0	(14,850,112)
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1	2,126,000
202	Pengembangan Nilai Aset	0	80,938,000
102	Transfer Masuk	62	7,145,845,211
301	Penghapusan	(15)	(1,068,842,266)
302	Transfer Keluar	(62)	(7,145,845,211)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(49)	(2,213,921,501)
303	Hibah (Keluar)	(9)	(1,588,078,600)
000	Saldo Awal	4,655	869,788,621,949
308	Usulan Barang Hilang ke Pengelola	(1)	(41,042,000)
101	Pembelian	74	16,291,337,394
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	4,263	13,171,706,317
101	Pembelian	43	416,195,960
302	Transfer Keluar	(131)	(476,014,470)
102	Transfer Masuk	146	501,733,515
107	Reklasifikasi Masuk	3	30,265,000
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1	6,160,000
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(207)	(245,918,415)
000	Saldo Awal	4,408	12,939,284,727
304	ALAT PERTANIAN	1,232	4,821,006,441
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(28)	(136,327,000)
107	Reklasifikasi Masuk	2	200,970,000
101	Pembelian	123	423,310,016

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:00 PM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_crbtnm_intra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
102	Transfer Masuk	17	218,093,000
000	Saldo Awal	1,134	4,332,521,425
302	Transfer Keluar	(16)	(217,561,000)
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	130,174	305,428,941,689
302	Transfer Keluar	(4,186)	(8,220,115,030)
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0	(55,065,626)
000	Saldo Awal	126,909	276,225,841,560
102	Transfer Masuk	4,437	8,380,848,030
103	Hibah (Masuk)	7	143,832,000
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(2,652)	(3,313,221,315)
209	Transaksi Normalisasi BMN	(7)	(34,096,000)
303	Hibah (Keluar)	(214)	(300,044,450)
101	Pembelian	4,180	27,011,123,454
304	Reklasifikasi Keluar	(26)	(2,319,539,900)
107	Reklasifikasi Masuk	576	2,129,632,400
100	Koreksi Saldo Awal	15	95,178,950
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	40	180,620,000
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1,095	5,503,947,616
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	12,149	125,897,910,036
101	Pembelian	217	2,872,050,656
304	Reklasifikasi Keluar	(2)	(11,000,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(43)	(217,203,400)
107	Reklasifikasi Masuk	13	108,625,240
102	Transfer Masuk	120	762,204,124
302	Transfer Keluar	(119)	(741,910,124)

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:00 PM

Halaman : 4

Kode Lap : lap_crbrmn_intra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
000	Saldo Awal	11,949	122,948,213,633
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	14	176,929,907
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	3,425	11,941,269,025
103	Hibah (Masuk)	16	48,900,000
302	Transfer Keluar	(82)	(175,810,000)
000	Saldo Awal	3,241	11,473,284,731
101	Pembelian	172	369,071,290
102	Transfer Masuk	82	175,810,000
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(9)	(4,230,000)
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1	665,500
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	4	53,577,504
308	ALAT LABORATORIUM	4,299	35,341,618,754
103	Hibah (Masuk)	1	9,450,000
101	Pembelian	189	1,723,806,122
000	Saldo Awal	4,231	32,659,038,932
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(128)	(205,137,000)
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	10	20,730,380
107	Reklasifikasi Masuk	1	1,216,755,560
302	Transfer Keluar	(148)	(713,629,250)
304	Reklasifikasi Keluar	(6)	(84,025,240)
102	Transfer Masuk	149	714,629,250
309	ALAT PERSENJATAAN	931	3,285,532,905
101	Pembelian	29	448,148,750
102	Transfer Masuk	56	39,248,000
000	Saldo Awal	912	2,969,649,155

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:00 PM

Halaman : 5

Kode Lap : lap_crbtnm_intra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
302	Transfer Keluar	(56)	(39,248,000)
304	Reklasifikasi Keluar	(10)	(132,265,000)
310	KOMPUTER	22,793	440,269,991,862
103	Hibah (Masuk)	10	22,000,000
302	Transfer Keluar	(314)	(3,082,348,198)
000	Saldo Awal	22,005	381,687,128,668
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(390)	(3,123,447,111)
303	Hibah (Keluar)	(15)	(262,500,000)
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	82	1,464,801,151
101	Pembelian	1,098	60,483,424,154
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0	(5,228,000)
102	Transfer Masuk	317	3,086,161,198
311	ALAT EKSPLORASI	11	117,136,373
000	Saldo Awal	11	117,136,373
312	ALAT PENGEBORAN	53	5,632,440,000
102	Transfer Masuk	3	20,425,000
302	Transfer Keluar	(3)	(20,425,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(3)	(20,425,000)
000	Saldo Awal	56	5,652,865,000
313	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	45	2,391,037,129
000	Saldo Awal	44	2,308,137,129
101	Pembelian	1	82,900,000
314	ALAT BANTU EKSPLORASI	3	55,186,000
000	Saldo Awal	3	55,186,000
315	ALAT KESELAMATAN KERJA	1,100	10,186,924,911

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:00 PM

Halaman : 6

Kode Lap : lap_crbtnm_intra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
101	Pembelian	29	519,685,000
304	Reklasifikasi Keluar	(8)	(5,300,000)
000	Saldo Awal	1,079	9,672,539,911
302	Transfer Keluar	(40)	(242,945,000)
102	Transfer Masuk	40	242,945,000
316	ALAT PERAGA	712	3,521,590,557
102	Transfer Masuk	132	561,015,500
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	8	6,776,000
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(44)	(33,420,000)
000	Saldo Awal	734	3,514,606,979
302	Transfer Keluar	(120)	(557,415,500)
101	Pembelian	2	30,027,578
317	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	2,067	3,194,340,797
000	Saldo Awal	2,081	3,188,907,697
102	Transfer Masuk	32	106,454,500
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	6	57,657,600
302	Transfer Keluar	(32)	(106,454,500)
101	Pembelian	1	2,420,000
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(21)	(54,644,500)
318	RAMBU - RAMBU	171	542,057,963
302	Transfer Keluar	(5)	(12,125,000)
000	Saldo Awal	171	542,057,963
102	Transfer Masuk	5	12,125,000
319	PERALATAN OLAH RAGA	609	2,811,124,866
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	11	147,651,994

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:00 PM

Halaman : 7

Kode Lap : lap_crbrmn_intra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
101	Pembelian	34	244,504,600
103	Hibah (Masuk)	3	5,000,000
303	Hibah (Keluar)	(2)	(12,550,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(24)	(16,104,800)
000	Saldo Awal	587	2,442,623,072
302	Transfer Keluar	(33)	(25,004,800)
102	Transfer Masuk	33	25,004,800
602	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	57	1,460,895
000	Saldo Awal	57	1,460,895
133111	Gedung dan Bangunan	2,567	1,798,628,848,267
401	BANGUNAN GEDUNG	2,439	1,740,816,696,338
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0	3,368,013,985
221	Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi	0	0
102	Transfer Masuk	71	69,848,177,100
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	4	36,403,039,634
331	Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	0	5,339,588,000
232	Koreksi Transfer Masuk	0	(5,339,588,000)
208	Pengembangan Melalui KDP	0	23,197,664,609
202	Pengembangan Nilai Aset	0	23,289,651,225
305	Koreksi Pencatatan	(15)	(7,855,876,629)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(3)	(347,926,000)
130	Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	7	7,097,376,000
226	Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0	(864,303,264)
247	Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	0	25,676,494,000

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:00 PM

Halaman : 8

Kode Lap : lap_crbtnm_intra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
209	Transaksi Normalisasi BMN	(3)	(2,162,011,000)
334	Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	0	(25,319,169,000)
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	3	2,079,850,106
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1	154,061,000
302	Transfer Keluar	(71)	(69,848,177,100)
225	Koreksi Kesalahan input IP	0	(36,729,070,000)
224	Koreksi Penilaian Kembali BMN	0	63,007,000
223	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	0	5,385,100,868
245	Koreksi Nilai barang Berlebih	0	20,881,000
304	Reklasifikasi Keluar	(2)	(28,316,778,245)
107	Reklasifikasi Masuk	35	26,447,347,190
000	Saldo Awal	2,410	1,695,788,006,798
229	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	0	(7,253,945,939)
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	1	45,463,000
103	Hibah (Masuk)	1	649,820,000
402	MONUMEN	7	1,764,291,000
000	Saldo Awal	7	1,764,938,000
229	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	0	(15,775,000)
334	Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	0	3,975,000
223	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	0	11,800,000
221	Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi	0	0
225	Koreksi Kesalahan input IP	0	(647,000)
404	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	121	56,047,860,929
221	Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi	0	0
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0	566,855,000

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:00 PM

Halaman : 9

Kode Lap : lap_crbtnm_intra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
232	Koreksi Transfer Masuk	0	(465,521,000)
229	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	0	(565,831,472)
208	Pengembangan Melalui KDP	0	199,899,200
225	Koreksi Kesalahan input IP	0	6,328,118,000
000	Saldo Awal	120	47,035,094,270
202	Pengembangan Nilai Aset	0	503,917,000
331	Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	0	465,521,000
107	Reklasifikasi Masuk	1	622,775,495
102	Transfer Masuk	2	763,966,000
334	Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	0	536,383,400
245	Koreksi Nilai barang Berlebih	0	760,240,000
224	Koreksi Penilaian Kembali BMN	0	(33,292,000)
226	Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	0	0
101	Pembelian	1	197,450,000
301	Penghapusan	(1)	(120,653,000)
302	Transfer Keluar	(2)	(763,966,000)
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0	(12,543,036)
223	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	0	29,448,072
134111	Jalan dan Jembatan	205,639	46,551,709,875
501	JALAN DAN JEMBATAN	205,639	46,551,709,875
331	Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	0	852,978,000
232	Koreksi Transfer Masuk	5,577	(852,978,000)
302	Transfer Keluar	(5,577)	(3,454,031,000)
000	Saldo Awal	200,162	48,667,957,875
209	Transaksi Normalisasi BMN	(200)	(43,054,000)

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:00 PM

Halaman : 10

Kode Lap : lap_crbtnm_intra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
225	Koreksi Kesalahan input IP	0	(2,116,899,000)
102	Transfer Masuk	5,577	3,454,031,000
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	100	43,705,000
134112	Irigasi	283	38,341,743,268
502	BANGUNAN AIR	283	38,341,743,268
225	Koreksi Kesalahan input IP	0	7,416,045,000
208	Pengembangan Melalui KDP	0	185,000,000
000	Saldo Awal	282	30,824,046,668
305	Koreksi Pencatatan	(1)	(421,348,400)
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	2	338,000,000
134113	Jaringan	414	17,770,229,691
503	INSTALASI	178	9,721,695,982
101	Pembelian	4	475,632,500
302	Transfer Keluar	(1)	(3,000,000)
000	Saldo Awal	174	9,246,063,482
102	Transfer Masuk	1	3,000,000
504	JARINGAN	236	8,048,533,709
202	Pengembangan Nilai Aset	0	4,118,600
102	Transfer Masuk	23	206,506,506
101	Pembelian	25	1,267,954,350
000	Saldo Awal	211	6,776,460,759
302	Transfer Keluar	(23)	(206,506,506)
135111	Aset Tetap Renovasi	4	7,153,651,140
607	ASET TETAP DALAM RENOVASI	4	7,153,651,140
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0	(4,000,000)

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:00 PM

Halaman : 11

Kode Lap : lap_crbtnm_intra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
304	Reklasifikasi Keluar	(1)	(6,770,842,700)
302	Transfer Keluar	(26)	(4,092,545,985)
101	Pembelian	21	3,018,803,940
107	Reklasifikasi Masuk	2	6,770,842,700
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	6	1,110,550,485
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1	6,770,842,700
000	Saldo Awal	1	350,000,000
135121	Aset Tetap Lainnya	80,321	14,836,358,922
601	BAHAN PERPUSTAKAAN	79,024	9,671,496,901
102	Transfer Masuk	1,673	165,843,750
303	Hibah (Keluar)	(983)	(20,980,954)
000	Saldo Awal	79,046	9,197,984,655
302	Transfer Keluar	(1,673)	(165,843,750)
101	Pembelian	967	495,425,100
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(6)	(931,900)
602	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	1,297	5,164,862,021
000	Saldo Awal	1,348	5,250,713,021
103	Hibah (Masuk)	22	33,794,000
102	Transfer Masuk	112	246,514,000
302	Transfer Keluar	(112)	(246,514,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(73)	(119,645,000)
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	(341,436,274)
701	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	(341,436,274)
503	Pengembangan KDP	0	161,842,113,156
507	Transfer Keluar KDP	0	0

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:00 PM

Halaman : 12

Kode Lap : lap_crbtnm_intra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
502	Perolehan/Penambahan KDP	0	5,212,690,188
501	Saldo Awal KDP	0	206,197,213
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	0	(166,178,694,223)
504	Koreksi Nilai KDP	0	(1,423,742,608)
162151	Software	826	98,151,352,706
801	ASET TAK BERWUJUD	826	98,151,352,706
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(3)	(15,140,000)
209	Transaksi Normalisasi BMN	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	3	7,988,200,000
202	Pengembangan Nilai Aset	0	470,050,000
101	Pembelian	276	3,424,077,465
000	Saldo Awal	550	86,297,896,087
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0	(13,730,846)
162161	Lisensi	3	190,850,000
801	ASET TAK BERWUJUD	3	190,850,000
101	Pembelian	3	190,850,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	196,625,000
801	ASET TAK BERWUJUD	1	196,625,000
101	Pembelian	1	196,625,000
304	Reklasifikasi Keluar	(3)	(7,988,200,000)
000	Saldo Awal	3	8,316,000,000
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0	(327,800,000)
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0
701	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	0	(6,770,842,700)

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:00 PM

Halaman : 13

Kode Lap : lap_crbtnm_intra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
503	Pengembangan KDP	0	6,685,938,155
502	Perolehan/Penambahan KDP	0	84,904,545
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	13,207	26,060,951,592
201	TANAH	4,752	494,208,000
000	Saldo Awal	4,752	494,208,000
301	ALAT BESAR	33	236,375,000
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(1)	(27,489,000)
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	13	107,612,000
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(14)	(930,742,000)
000	Saldo Awal	35	1,086,994,000
302	ALAT ANGKUTAN	135	8,058,519,141
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	49	2,213,921,501
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(1)	(2,126,000)
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(1)	(57,000,000)
000	Saldo Awal	108	7,723,768,079
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(20)	(1,820,044,439)
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	316	312,636,290
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	207	245,918,415
000	Saldo Awal	187	206,888,176
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(15)	(25,719,045)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(1)	(6,160,000)
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(62)	(108,291,256)
304	ALAT PERTANIAN	109	223,904,311
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(103)	(41,919,000)
000	Saldo Awal	185	130,028,311

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:00 PM

Halaman : 14

Kode Lap : lap_crbmn_intra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	28	136,327,000
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(1)	(532,000)
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	6,044	6,721,942,769
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	(24)	(11,713,000)
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(251)	(160,733,000)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(40)	(180,620,000)
000	Saldo Awal	8,382	7,517,224,149
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	2,652	3,313,221,315
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(4,675)	(3,755,436,695)
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	110	388,086,662
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	43	217,203,400
000	Saldo Awal	138	437,016,633
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(70)	(245,839,371)
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(1)	(20,294,000)
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	56	218,040,640
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	9	4,230,000
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(1)	(665,500)
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(14)	(5,402,728)
000	Saldo Awal	62	219,878,868
308	ALAT LABORATORIUM	199	890,447,000
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(1)	(1,000,000)
000	Saldo Awal	229	882,373,000
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	128	205,137,000
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(157)	(196,063,000)
309	ALAT PERSENJATAAN	1	8,525,000

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:00 PM

Halaman : 15

Kode Lap : lap_crbtnm_intra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(1)	(6,160,000)
000	Saldo Awal	2	14,685,000
310	KOMPUTER	809	6,519,262,465
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(3)	(3,813,000)
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(344)	(3,375,650,109)
000	Saldo Awal	766	6,775,278,463
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	390	3,123,447,111
311	ALAT EKSPLORASI	0	0
000	Saldo Awal	0	0
312	ALAT PENGEBORAN	3	20,425,000
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	3	20,425,000
315	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(1)	(11,522,500)
000	Saldo Awal	1	11,522,500
316	ALAT PERAGA	44	33,420,000
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(8)	(6,776,000)
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	44	33,420,000
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(39)	(41,014,000)
000	Saldo Awal	59	51,390,000
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(12)	(3,600,000)
317	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	24	56,997,268
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(6)	(11,840,000)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(6)	(57,657,600)
000	Saldo Awal	15	71,850,368
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	21	54,644,500

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:00 PM

Halaman : 16

Kode Lap : lap_crbrmn_intra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
318	RAMBU - RAMBU	0	0
000	Saldo Awal	0	0
319	PERALATAN OLAH RAGA	28	50,594,800
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(35)	(31,663,138)
000	Saldo Awal	39	66,153,138
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	24	16,104,800
401	BANGUNAN GEDUNG	20	1,366,995,768
000	Saldo Awal	18	1,173,130,768
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(1)	(154,061,000)
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	3	347,926,000
404	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1	95,591,000
000	Saldo Awal	1	95,591,000
501	JALAN DAN JEMBATAN	400	109,231,000
000	Saldo Awal	400	109,231,000
502	BANGUNAN AIR	5	38,324,078
000	Saldo Awal	7	53,324,078
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(2)	(15,000,000)
503	INSTALASI	20	2,816,000
000	Saldo Awal	20	2,816,000
504	JARINGAN	0	0
000	Saldo Awal	0	0
601	BAHAN PERPUSTAKAAN	18	11,343,400
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(49)	(5,482,500)
000	Saldo Awal	61	15,894,000
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	6	931,900

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:00 PM

Halaman : 17

Kode Lap : lap_crbrmn_intra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
602	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	80	203,266,000
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	73	119,645,000
000	Saldo Awal	7	83,621,000
607	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0
000	Saldo Awal	0	0
166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	146	237,023,052
801	ASET TAK BERWUJUD	146	237,023,052
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	0	0
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(2)	(9,200,000)
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	3	15,140,000
000	Saldo Awal	145	231,083,052
TOTAL		2,944,171	22,484,740,855,109

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 3:00 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_crbtnm_ekstra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
132111	Peralatan dan Mesin	45,744	6,670,454,468
301	ALAT BESAR	109	17,285,600
000	Saldo Awal	109	17,285,600
302	ALAT ANGKUTAN	7	2,967,800
000	Saldo Awal	7	2,967,800
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	5,675	442,578,811
000	Saldo Awal	5,697	443,902,111
101	Pembelian	1	726,700
102	Transfer Masuk	72	8,722,000
302	Transfer Keluar	(68)	(8,197,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(27)	(2,575,000)
304	ALAT PERTANIAN	233	24,043,420
000	Saldo Awal	238	24,243,420
102	Transfer Masuk	1	140,000
302	Transfer Keluar	(1)	(140,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(5)	(200,000)
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	31,122	4,787,225,372
000	Saldo Awal	31,705	4,628,196,276
101	Pembelian	260	189,309,900
102	Transfer Masuk	671	93,801,000
107	Reklasifikasi Masuk	125	107,237,500
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	21	599,571
209	Transaksi Normalisasi BMN	0	60,500
302	Transfer Keluar	(668)	(93,351,000)
303	Hibah (Keluar)	(295)	(50,815,000)

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 3:00 AM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_crbmn_ekstra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(697)	(87,813,375)
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	701	119,165,503
000	Saldo Awal	697	114,865,503
107	Reklasifikasi Masuk	8	5,300,000
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(4)	(1,000,000)
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	986	110,894,843
000	Saldo Awal	953	90,177,343
101	Pembelian	1	987,500
102	Transfer Masuk	17	1,945,000
103	Hibah (Masuk)	38	20,890,000
302	Transfer Keluar	(17)	(1,945,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(6)	(1,160,000)
308	ALAT LABORATORIUM	2,583	213,446,897
000	Saldo Awal	2,581	212,046,897
101	Pembelian	3	1,500,000
102	Transfer Masuk	4	725,000
302	Transfer Keluar	(3)	(625,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(2)	(200,000)
309	ALAT PERSENJATAAN	397	33,192,526
000	Saldo Awal	397	33,192,526
102	Transfer Masuk	200	20,000,000
302	Transfer Keluar	(200)	(20,000,000)
310	KOMPUTER	1,264	61,042,240
000	Saldo Awal	1,255	52,887,440
101	Pembelian	9	8,154,800

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 3:00 AM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_crbtnm_ekstra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
102	Transfer Masuk	2	1,800,000
302	Transfer Keluar	(2)	(1,800,000)
311	ALAT EKSPLORASI	15	1,437,500
000	Saldo Awal	15	1,437,500
312	ALAT PENGEBORAN	2	500,000
000	Saldo Awal	12	2,951,250
102	Transfer Masuk	10	2,451,250
302	Transfer Keluar	(10)	(2,451,250)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(10)	(2,451,250)
313	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	6	207,000
000	Saldo Awal	6	207,000
315	ALAT KESELAMATAN KERJA	692	356,272,394
000	Saldo Awal	492	226,872,394
101	Pembelian	200	129,400,000
316	ALAT PERAGA	1,056	114,306,900
000	Saldo Awal	1,089	118,236,900
102	Transfer Masuk	136	9,362,600
302	Transfer Keluar	(136)	(9,362,600)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(33)	(3,930,000)
317	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	29	6,139,205
000	Saldo Awal	29	6,139,205
318	RAMBU - RAMBU	183	315,836,399
000	Saldo Awal	183	315,836,399
319	PERALATAN OLAH RAGA	683	63,812,058
000	Saldo Awal	679	62,612,058

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 3:00 AM

Halaman : 4

Kode Lap : lap_crbmn_ekstra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
103	Hibah (Masuk)	4	1,200,000
602	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	1	100,000
000	Saldo Awal	1	100,000
133111	Gedung dan Bangunan	4,322	5,240,366,440
401	BANGUNAN GEDUNG	4,317	5,222,671,326
000	Saldo Awal	4,217	5,023,671,326
101	Pembelian	100	199,000,000
107	Reklasifikasi Masuk	95	186,724,000
209	Transaksi Normalisasi BMN	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	(95)	(186,724,000)
402	MONUMEN	0	0
000	Saldo Awal	0	0
404	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	5	17,695,114
000	Saldo Awal	5	17,695,114
225	Koreksi Kesalahan input IP	0	770,000
334	Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	0	(770,000)
135121	Aset Tetap Lainnya	91	56,710,000
602	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	87	13,110,000
000	Saldo Awal	87	13,110,000
605	TANAMAN	4	43,600,000
000	Saldo Awal	4	43,600,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	3,865	404,174,075
301	ALAT BESAR	0	0
000	Saldo Awal	0	0
302	ALAT ANGKUTAN	0	0

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 3:00 AM

Halaman : 5

Kode Lap : lap_crbrmn_ekstra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
000	Saldo Awal	0	0
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	63	4,733,350
000	Saldo Awal	40	2,683,350
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	27	2,575,000
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(4)	(525,000)
304	ALAT PERTANIAN	5	200,000
000	Saldo Awal	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	5	200,000
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	3,323	338,670,475
000	Saldo Awal	3,761	382,807,700
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	697	87,813,375
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	10	555,500
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(1,142)	(132,056,100)
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(3)	(450,000)
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	4	1,000,000
000	Saldo Awal	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	4	1,000,000
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	421	52,889,000
000	Saldo Awal	415	51,729,000
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	6	1,160,000
308	ALAT LABORATORIUM	2	200,000
000	Saldo Awal	69	2,674,000
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	2	200,000
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(68)	(2,574,000)
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(1)	(100,000)

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
 EKSTRAKOMPTABEL
 RINCIAN PER BIDANG BARANG
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 3:00 AM
 Halaman : 6
 Kode Lap : lap_crbmn_ekstra_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
309	ALAT PERSENJATAAN	0	0
000	Saldo Awal	0	0
310	KOMPUTER	0	0
000	Saldo Awal	3	897,000
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(3)	(897,000)
312	ALAT PENGEBORAN	10	2,451,250
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	10	2,451,250
315	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0
000	Saldo Awal	0	0
316	ALAT PERAGA	33	3,930,000
000	Saldo Awal	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	33	3,930,000
317	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0	0
000	Saldo Awal	0	0
319	PERALATAN OLAH RAGA	0	0
000	Saldo Awal	1	175,000
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(1)	(175,000)
605	TANAMAN	4	100,000
000	Saldo Awal	4	100,000
TOTAL		54,022	12,371,704,983

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:08 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_crbtnm_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
131111	Tanah	2,450,917	18,532,038,706,705
201	TANAH	2,450,917	18,532,038,706,705
000	Saldo Awal	2,260,405	18,247,980,067,897
102	Transfer Masuk	103,400	645,733,000,000
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	113,937	83,471,253,408
202	Pengembangan Nilai Aset	0	8,651,400
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	998	0
208	Pengembangan Melalui KDP	0	7,047,932,000
225	Koreksi Kesalahan input IP	75,577	192,657,017,000
232	Koreksi Transfer Masuk	0	(67,029,050,000)
245	Koreksi Nilai barang Berlebih	0	873,785,000
247	Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	0	47,231,259,000
302	Transfer Keluar	(103,400)	(645,733,000,000)
331	Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	0	67,029,050,000
334	Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	0	(47,231,259,000)
132111	Peralatan dan Mesin	235,587	1,911,594,695,633
301	ALAT BESAR	1,191	54,284,091,833
000	Saldo Awal	1,139	46,052,734,311
101	Pembelian	60	815,083,250
102	Transfer Masuk	149	330,082,500
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1	7,496,397,272
107	Reklasifikasi Masuk	4	7,496,397,272
302	Transfer Keluar	(148)	(302,593,500)
304	Reklasifikasi Keluar	(1)	(7,496,397,272)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(13)	(107,612,000)

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:08 PM

Halaman : 2

Kode Lap : lap_crbtnm_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
302	ALAT ANGKUTAN	4,674	882,049,126,212
000	Saldo Awal	4,662	869,791,589,749
101	Pembelian	74	16,291,337,394
102	Transfer Masuk	62	7,145,845,211
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	11	809,869,548
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1	2,126,000
202	Pengembangan Nilai Aset	0	80,938,000
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0	(14,850,112)
301	Penghapusan	(15)	(1,068,842,266)
302	Transfer Keluar	(62)	(7,145,845,211)
303	Hibah (Keluar)	(9)	(1,588,078,600)
308	Usulan Barang Hilang ke Pengelola	(1)	(41,042,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(49)	(2,213,921,501)
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	9,938	13,614,285,128
000	Saldo Awal	10,105	13,383,186,838
101	Pembelian	44	416,922,660
102	Transfer Masuk	218	510,455,515
107	Reklasifikasi Masuk	3	30,265,000
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1	6,160,000
302	Transfer Keluar	(199)	(484,211,470)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(234)	(248,493,415)
304	ALAT PERTANIAN	1,465	4,845,049,861
000	Saldo Awal	1,372	4,356,764,845
101	Pembelian	123	423,310,016
102	Transfer Masuk	18	218,233,000

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:08 PM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_crbtnm_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
107	Reklasifikasi Masuk	2	200,970,000
302	Transfer Keluar	(17)	(217,701,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(33)	(136,527,000)
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	161,296	310,216,167,061
000	Saldo Awal	158,614	280,854,037,836
100	Koreksi Saldo Awal	15	95,178,950
101	Pembelian	4,440	27,200,433,354
102	Transfer Masuk	5,108	8,474,649,030
103	Hibah (Masuk)	7	143,832,000
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1,095	5,503,947,616
107	Reklasifikasi Masuk	701	2,236,869,900
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	40	180,620,000
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	21	599,571
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0	(55,065,626)
209	Transaksi Normalisasi BMN	(7)	(34,035,500)
302	Transfer Keluar	(4,854)	(8,313,466,030)
303	Hibah (Keluar)	(509)	(350,859,450)
304	Reklasifikasi Keluar	(26)	(2,319,539,900)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(3,349)	(3,401,034,690)
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	12,850	126,017,075,539
000	Saldo Awal	12,646	123,063,079,136
101	Pembelian	217	2,872,050,656
102	Transfer Masuk	120	762,204,124
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	14	176,929,907
107	Reklasifikasi Masuk	21	113,925,240

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:08 PM

Halaman : 4

Kode Lap : lap_crbmn_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
302	Transfer Keluar	(119)	(741,910,124)
304	Reklasifikasi Keluar	(2)	(11,000,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(47)	(218,203,400)
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	4,411	12,052,163,868
000	Saldo Awal	4,194	11,563,462,074
101	Pembelian	173	370,058,790
102	Transfer Masuk	99	177,755,000
103	Hibah (Masuk)	54	69,790,000
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	4	53,577,504
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1	665,500
302	Transfer Keluar	(99)	(177,755,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(15)	(5,390,000)
308	ALAT LABORATORIUM	6,882	35,555,065,651
000	Saldo Awal	6,812	32,871,085,829
101	Pembelian	192	1,725,306,122
102	Transfer Masuk	153	715,354,250
103	Hibah (Masuk)	1	9,450,000
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	10	20,730,380
107	Reklasifikasi Masuk	1	1,216,755,560
302	Transfer Keluar	(151)	(714,254,250)
304	Reklasifikasi Keluar	(6)	(84,025,240)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(130)	(205,337,000)
309	ALAT PERSENJATAAN	1,328	3,318,725,431
000	Saldo Awal	1,309	3,002,841,681
101	Pembelian	29	448,148,750

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:08 PM

Halaman : 5

Kode Lap : lap_crbtnm_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
102	Transfer Masuk	256	59,248,000
302	Transfer Keluar	(256)	(59,248,000)
304	Reklasifikasi Keluar	(10)	(132,265,000)
310	KOMPUTER	24,057	440,331,034,102
000	Saldo Awal	23,260	381,740,016,108
101	Pembelian	1,107	60,491,578,954
102	Transfer Masuk	319	3,087,961,198
103	Hibah (Masuk)	10	22,000,000
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	82	1,464,801,151
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0	(5,228,000)
302	Transfer Keluar	(316)	(3,084,148,198)
303	Hibah (Keluar)	(15)	(262,500,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(390)	(3,123,447,111)
311	ALAT EKSPLORASI	26	118,573,873
000	Saldo Awal	26	118,573,873
312	ALAT PENGEBORAN	55	5,632,940,000
000	Saldo Awal	68	5,655,816,250
102	Transfer Masuk	13	22,876,250
302	Transfer Keluar	(13)	(22,876,250)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(13)	(22,876,250)
313	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	51	2,391,244,129
000	Saldo Awal	50	2,308,344,129
101	Pembelian	1	82,900,000
314	ALAT BANTU EKSPLORASI	3	55,186,000
000	Saldo Awal	3	55,186,000

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:08 PM

Halaman : 6

Kode Lap : lap_crbmn_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
315	ALAT KESELAMATAN KERJA	1,792	10,543,197,305
000	Saldo Awal	1,571	9,899,412,305
101	Pembelian	229	649,085,000
102	Transfer Masuk	40	242,945,000
302	Transfer Keluar	(40)	(242,945,000)
304	Reklasifikasi Keluar	(8)	(5,300,000)
316	ALAT PERAGA	1,768	3,635,897,457
000	Saldo Awal	1,823	3,632,843,879
101	Pembelian	2	30,027,578
102	Transfer Masuk	268	570,378,100
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	8	6,776,000
302	Transfer Keluar	(256)	(566,778,100)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(77)	(37,350,000)
317	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	2,096	3,200,480,002
000	Saldo Awal	2,110	3,195,046,902
101	Pembelian	1	2,420,000
102	Transfer Masuk	32	106,454,500
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	6	57,657,600
302	Transfer Keluar	(32)	(106,454,500)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(21)	(54,644,500)
318	RAMBU - RAMBU	354	857,894,362
000	Saldo Awal	354	857,894,362
102	Transfer Masuk	5	12,125,000
302	Transfer Keluar	(5)	(12,125,000)
319	PERALATAN OLAH RAGA	1,292	2,874,936,924

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:08 PM

Halaman : 7

Kode Lap : lap_crbtnn_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
000	Saldo Awal	1,266	2,505,235,130
101	Pembelian	34	244,504,600
102	Transfer Masuk	33	25,004,800
103	Hibah (Masuk)	7	6,200,000
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	11	147,651,994
302	Transfer Keluar	(33)	(25,004,800)
303	Hibah (Keluar)	(2)	(12,550,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(24)	(16,104,800)
602	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	58	1,560,895
000	Saldo Awal	58	1,560,895
133111	Gedung dan Bangunan	6,889	1,803,869,214,707
401	BANGUNAN GEDUNG	6,756	1,746,039,367,664
000	Saldo Awal	6,627	1,700,811,678,124
101	Pembelian	100	199,000,000
102	Transfer Masuk	71	69,848,177,100
103	Hibah (Masuk)	1	649,820,000
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	4	36,403,039,634
107	Reklasifikasi Masuk	130	26,634,071,190
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	1	45,463,000
130	Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	7	7,097,376,000
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	1	154,061,000
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	3	2,079,850,106
202	Pengembangan Nilai Aset	0	23,289,651,225
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0	(864,303,264)
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0	3,368,013,985

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:08 PM

Halaman : 8

Kode Lap : lap_crbmn_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
208	Pengembangan Melalui KDP	0	23,197,664,609
209	Transaksi Normalisasi BMN	(3)	(2,162,011,000)
221	Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi	0	0
223	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	0	5,385,100,868
224	Koreksi Penilaian Kembali BMN	0	63,007,000
225	Koreksi Kesalahan input IP	0	(36,729,070,000)
226	Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	0	0
229	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	0	(7,253,945,939)
232	Koreksi Transfer Masuk	0	(5,339,588,000)
245	Koreksi Nilai barang Berlebih	0	20,881,000
247	Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	0	25,676,494,000
302	Transfer Keluar	(71)	(69,848,177,100)
304	Reklasifikasi Keluar	(97)	(28,503,502,245)
305	Koreksi Pencatatan	(15)	(7,855,876,629)
331	Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	0	5,339,588,000
334	Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	0	(25,319,169,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(3)	(347,926,000)
402	MONUMEN	7	1,764,291,000
000	Saldo Awal	7	1,764,938,000
221	Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi	0	0
223	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	0	11,800,000
225	Koreksi Kesalahan input IP	0	(647,000)
229	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	0	(15,775,000)
334	Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	0	3,975,000
404	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	126	56,065,556,043

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:08 PM

Halaman : 9

Kode Lap : lap_crbtnm_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
000	Saldo Awal	125	47,052,789,384
101	Pembelian	1	197,450,000
102	Transfer Masuk	2	763,966,000
107	Reklasifikasi Masuk	1	622,775,495
202	Pengembangan Nilai Aset	0	503,917,000
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0	(12,543,036)
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0	566,855,000
208	Pengembangan Melalui KDP	0	199,899,200
221	Barang Tidak Ditemukan Hasil Inventarisasi	0	0
223	Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali	0	29,448,072
224	Koreksi Penilaian Kembali BMN	0	(33,292,000)
225	Koreksi Kesalahan input IP	0	6,328,888,000
226	Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil revaluasi	0	0
229	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	0	(565,831,472)
232	Koreksi Transfer Masuk	0	(465,521,000)
245	Koreksi Nilai barang Berlebih	0	760,240,000
301	Penghapusan	(1)	(120,653,000)
302	Transfer Keluar	(2)	(763,966,000)
331	Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	0	465,521,000
334	Koreksi penghapusan akibat Koreksi Revaluasi	0	535,613,400
134111	Jalan dan Jembatan	205,639	46,551,709,875
501	JALAN DAN JEMBATAN	205,639	46,551,709,875
000	Saldo Awal	200,162	48,667,957,875
102	Transfer Masuk	5,577	3,454,031,000
190	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	100	43,705,000

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:08 PM

Halaman : 10

Kode Lap : lap_crbtnm_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
209	Transaksi Normalisasi BMN	(200)	(43,054,000)
225	Koreksi Kesalahan input IP	0	(2,116,899,000)
232	Koreksi Transfer Masuk	5,577	(852,978,000)
302	Transfer Keluar	(5,577)	(3,454,031,000)
331	Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	0	852,978,000
134112	Irigasi	283	38,341,743,268
502	BANGUNAN AIR	283	38,341,743,268
000	Saldo Awal	282	30,824,046,668
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	2	338,000,000
208	Pengembangan Melalui KDP	0	185,000,000
225	Koreksi Kesalahan input IP	0	7,416,045,000
305	Koreksi Pencatatan	(1)	(421,348,400)
134113	Jaringan	414	17,770,229,691
503	INSTALASI	178	9,721,695,982
000	Saldo Awal	174	9,246,063,482
101	Pembelian	4	475,632,500
102	Transfer Masuk	1	3,000,000
302	Transfer Keluar	(1)	(3,000,000)
504	JARINGAN	236	8,048,533,709
000	Saldo Awal	211	6,776,460,759
101	Pembelian	25	1,267,954,350
102	Transfer Masuk	23	206,506,506
202	Pengembangan Nilai Aset	0	4,118,600
302	Transfer Keluar	(23)	(206,506,506)
135111	Aset Tetap Renovasi	4	7,153,651,140

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:08 PM

Halaman : 11

Kode Lap : lap_crbtnm_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
607	ASET TETAP DALAM RENOVASI	4	7,153,651,140
000	Saldo Awal	1	350,000,000
101	Pembelian	21	3,018,803,940
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1	6,770,842,700
107	Reklasifikasi Masuk	2	6,770,842,700
113	Penyelesaian Pembangunan Langsung	6	1,110,550,485
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0	(4,000,000)
302	Transfer Keluar	(26)	(4,092,545,985)
304	Reklasifikasi Keluar	(1)	(6,770,842,700)
135121	Aset Tetap Lainnya	80,412	14,893,068,922
601	BAHAN PERPUSTAKAAN	79,024	9,671,496,901
000	Saldo Awal	79,046	9,197,984,655
101	Pembelian	967	495,425,100
102	Transfer Masuk	1,673	165,843,750
302	Transfer Keluar	(1,673)	(165,843,750)
303	Hibah (Keluar)	(983)	(20,980,954)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(6)	(931,900)
602	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	1,384	5,177,972,021
000	Saldo Awal	1,435	5,263,823,021
102	Transfer Masuk	112	246,514,000
103	Hibah (Masuk)	22	33,794,000
302	Transfer Keluar	(112)	(246,514,000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(73)	(119,645,000)
605	TANAMAN	4	43,600,000
000	Saldo Awal	4	43,600,000

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:08 PM

Halaman : 12

Kode Lap : lap_crbtnm_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	(341,436,274)
701	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	(341,436,274)
501	Saldo Awal KDP	0	206,197,213
502	Perolehan/Penambahan KDP	0	5,212,690,188
503	Pengembangan KDP	0	161,842,113,156
504	Koreksi Nilai KDP	0	(1,423,742,608)
507	Transfer Keluar KDP	0	0
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	0	(166,178,694,223)
162151	Software	826	98,151,352,706
801	ASET TAK BERWUJUD	826	98,151,352,706
000	Saldo Awal	550	86,297,896,087
101	Pembelian	276	3,424,077,465
107	Reklasifikasi Masuk	3	7,988,200,000
202	Pengembangan Nilai Aset	0	470,050,000
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0	(13,730,846)
209	Transaksi Normalisasi BMN	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(3)	(15,140,000)
162161	Lisensi	3	190,850,000
801	ASET TAK BERWUJUD	3	190,850,000
101	Pembelian	3	190,850,000
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	196,625,000
801	ASET TAK BERWUJUD	1	196,625,000
000	Saldo Awal	3	8,316,000,000
101	Pembelian	1	196,625,000
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0	(327,800,000)

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:08 PM

Halaman : 13

Kode Lap : lap_crbtnm_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
304	Reklasifikasi Keluar	(3)	(7,988,200,000)
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	0
701	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0	0
502	Perolehan/Penambahan KDP	0	84,904,545
503	Pengembangan KDP	0	6,685,938,155
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	0	(6,770,842,700)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	17,218	26,702,148,719
201	TANAH	4,752	494,208,000
000	Saldo Awal	4,752	494,208,000
301	ALAT BESAR	33	236,375,000
000	Saldo Awal	35	1,086,994,000
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	13	107,612,000
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(14)	(930,742,000)
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(1)	(27,489,000)
302	ALAT ANGKUTAN	135	8,058,519,141
000	Saldo Awal	108	7,723,768,079
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	49	2,213,921,501
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(20)	(1,820,044,439)
396	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	(1)	(57,000,000)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(1)	(2,126,000)
303	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	379	317,369,640
000	Saldo Awal	227	209,571,526
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	234	248,493,415
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(62)	(108,291,256)
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(19)	(26,244,045)

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:08 PM

Halaman : 14

Kode Lap : lap_crbtnm_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(1)	(6,160,000)
304	ALAT PERTANIAN	114	224,104,311
000	Saldo Awal	185	130,028,311
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	33	136,527,000
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(103)	(41,919,000)
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(1)	(532,000)
305	ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	9,367	7,060,613,244
000	Saldo Awal	12,143	7,900,031,849
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	3,349	3,401,034,690
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	(14)	(11,157,500)
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(5,817)	(3,887,492,795)
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(254)	(161,183,000)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(40)	(180,620,000)
306	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	114	389,086,662
000	Saldo Awal	138	437,016,633
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	47	218,203,400
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(70)	(245,839,371)
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(1)	(20,294,000)
307	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	477	270,929,640
000	Saldo Awal	477	271,607,868
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	15	5,390,000
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(14)	(5,402,728)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(1)	(665,500)
308	ALAT LABORATORIUM	201	890,647,000
000	Saldo Awal	298	885,047,000

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:08 PM

Halaman : 15

Kode Lap : lap_crbtnm_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	130	205,337,000
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(225)	(198,637,000)
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(2)	(1,100,000)
309	ALAT PERSENJATAAN	1	8,525,000
000	Saldo Awal	2	14,685,000
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(1)	(6,160,000)
310	KOMPUTER	809	6,519,262,465
000	Saldo Awal	769	6,776,175,463
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	390	3,123,447,111
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(347)	(3,376,547,109)
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(3)	(3,813,000)
311	ALAT EKSPLORASI	0	0
000	Saldo Awal	0	0
312	ALAT PENGEBORAN	13	22,876,250
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	13	22,876,250
315	ALAT KESELAMATAN KERJA	0	0
000	Saldo Awal	1	11,522,500
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(1)	(11,522,500)
316	ALAT PERAGA	77	37,350,000
000	Saldo Awal	59	51,390,000
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	77	37,350,000
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(39)	(41,014,000)
392	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	(12)	(3,600,000)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(8)	(6,776,000)
317	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	24	56,997,268

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:08 PM

Halaman : 16

Kode Lap : lap_crbtnm_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
000	Saldo Awal	15	71,850,368
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	21	54,644,500
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(6)	(11,840,000)
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(6)	(57,657,600)
318	RAMBU - RAMBU	0	0
000	Saldo Awal	0	0
319	PERALATAN OLAH RAGA	28	50,594,800
000	Saldo Awal	40	66,328,138
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	24	16,104,800
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(36)	(31,838,138)
401	BANGUNAN GEDUNG	20	1,366,995,768
000	Saldo Awal	18	1,173,130,768
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	3	347,926,000
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(1)	(154,061,000)
404	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	1	95,591,000
000	Saldo Awal	1	95,591,000
501	JALAN DAN JEMBATAN	400	109,231,000
000	Saldo Awal	400	109,231,000
502	BANGUNAN AIR	5	38,324,078
000	Saldo Awal	7	53,324,078
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(2)	(15,000,000)
503	INSTALASI	20	2,816,000
000	Saldo Awal	20	2,816,000
504	JARINGAN	0	0
000	Saldo Awal	0	0

LAPORAN CRBMN PENGGUNA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUNAN
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER BIDANG BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Tanggal : 30/04/20 2:08 PM

Halaman : 17

Kode Lap : lap_crbmn_kl

UAPB : 027 KEMENTERIAN SOSIAL

JENIS TRANSAKSI		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		
1	2	3	4
601	BAHAN PERPUSTAKAAN	18	11,343,400
000	Saldo Awal	61	15,894,000
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	6	931,900
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(49)	(5,482,500)
602	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	80	203,266,000
000	Saldo Awal	7	83,621,000
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	73	119,645,000
605	TANAMAN	4	100,000
000	Saldo Awal	4	100,000
607	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0	0
000	Saldo Awal	0	0
801	ASET TAK BERWUJUD	146	237,023,052
000	Saldo Awal	145	231,083,052
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	3	15,140,000
299	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	0	0
391	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	(2)	(9,200,000)
TOTAL		2,998,193	22,497,112,560,092